

Growing Sustainably



CATATAN UNTUK PEMBACA LAPORAN

Peringatan atas Pernyataan-pernyataan Mengenai Masa Depan

Dalam dokumen ini mungkin terdapat pernyataan mengenai rencana, proyeksi, strategi dan tujuan tertentu Perseroan, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dan perlu dipahami sebagai pernyataan mengenai masa depan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pernyataan mengenai masa depan tergantung pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual Perseroan di masa depan berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi oleh Perseroan, atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan mengenai masa depan, akan tercapai.

Catatan atas Tabel dan Grafik

- Tabel dan grafik pada Laporan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah bahasa Inggris. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah bahasa Inggris dan Indonesia, sesuai konteksnya.
- Semua satuan ukuran nikel dalam matte dan mineral lain dalam Laporan ini adalah metrik ton, dengan ketentuan satu metrik ton sama dengan 2.204,62 pon, dan disajikan dalam laporan sebagai "ton".

NOTE TO THE READERS OF THE REPORT

Cautionary Note on Forward-looking Statements

This document may contain statements regarding the Company's plans, projections, strategies and objectives that are not statements of historical fact and should be treated as forward-looking statements based on applicable laws.

Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual events, and the Company's future results, to be different than expected or indicated by such statements. No assurances can be given that the results anticipated by the Company, or indicated by such forward-looking statements, will be achieved.

Notes on Tables and Graphics

- For all tables and graphs presenting numerical data, the English standard is used. Where numerical values are presented in text format, English and Indonesian standards are used respectively.
- All measurements of nickel in matte and other mined materials are reported in metric tons, with one metric ton being equal to 2,204.62 pounds, and represented as "ton".





Keberlanjutan Tema Theme Continuity



2017



2018

2019 Growing Sustainably Tumbuh secara Berkelanjutan

Setelah melewati 50 tahunnya sebagai produsen nikel terkemuka di Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk ("PT Vale") meneruskan perjalanan dengan tetap berpegang teguh pada semangat untuk terus tumbuh sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. 'Keberlanjutan' telah menjadi komitmen PT Vale selama bertahun-tahun dan menjadi dasar bagi Perseroan untuk meningkatkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Meneruskan proyek yang sedang berjalan dengan optimal, mendapatkan penilaian kinerja PROPER Hijau untuk lingkungan, mempertahankan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan semua pemangku kepentingan menjadi bentuk tanggung jawab PT Vale. Semua yang PT Vale lakukan merupakan bagian untuk menciptakan nilai yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, sejalan dengan Visi dan Misi Perseroan.

After 50 years, as a leading nickel producer in Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk ("PT Vale") continues its journey by staying true to the spirit of growing in line with the sustainable development goals. 'Sustainability' has been PT Vale's long commitment for years and the foundation for improving its economic, environmental and social performance. Continuing the ongoing projects optimally, receiving a Green PROPER performance evaluation for the environment, maintaining occupational health and safety performance, as well as preserving the harmonious relations with the communities and all stakeholders, have been the result of PT Vale's responsible actions. Everything PT Vale does has created values to support sustainable growth, in line with the Company's Vision and Mission.





Daftar Isi

Table of Contents

3	Keberlanjutan Tema Theme Continuity
6	Pokok-pokok Pencapaian Kinerja 2019 Performance Highlights 2019
8	Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights
9	Informasi Saham Shares Information
12	Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi Information Related to Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds
14	Laporan Direksi Board of Directors' Report
24	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report
34	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 Board of Directors' and Board of Commissioners' Statement of Responsibility for 2019 Annual Report

Profil Perusahaan **36**

Company Profile

37	Sekilas PT Vale PT Vale at a Glance
39	Riwayat Singkat Perseroan Brief History of The Company
40	Wilayah Konsesi Concession Area
41	Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perseroan Company Vision and Mission and Values
42	Nilai-Nilai Perseroan Company Values
47	Kegiatan Operasi dan Usaha Operational and Business Activities

51	Produk dan Cadangan Mineral Product and Mineral Reserves
53	Struktur Organisasi dan Pejabat Senior Perseroan The Company's Organizational Structure and Senior Officers
54	Profil Direksi Board of Directors' Profiles
64	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profiles
76	Karyawan Perseroan Company Employees
82	Daftar Pemegang Saham List of Shareholders
85	Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lain Chronology of Shares and Other Securities Listings
86	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and/or Professionals
87	Entitas Anak dan Alamat Entitas Anak Subsidiaries Names and Addresses
88	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
90	Informasi Pada Situs Perseroan dan Penyampaian Laporan Information on The Company Website and Submission of Reports
91	Peristiwa Penting Significant Events

Analisis dan Pembahasan **93**

Manajemen

Management Discussion & Analysis

94	Tinjauan Operasional Operational Overview
99	Tinjauan Kinerja Per Segmen Operasi dan Usaha Performance Overview By Operational and Business Segment
112	Kinerja Keuangan Komprehensif Comprehensive Financial Performance
138	Rasio Keuangan Financial Ratios



141	Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy
142	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Investment
144	Perbandingan Antara Target pada Awal Tahun Buku dengan Pencapaian (Realisasi) Comparison Between Target at the Start of the Year and Realization
146	Target dan Proyeksi Tahun 2020 2020 Targets and Projection
147	Prospek Usaha dan Kelangsungan Usaha Business Prospects and Business Continuity
150	Aktivitas Eksplorasi dan Cadangan Bijih Nikel Exploration Activities and Nickel Ore Reserves
150	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Material Information and Facts After the Date of the Audited Report
151	Aspek Pemasaran Marketing Aspects
152	Uraian Mengenai Dividen Description of Dividend
154	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Initial Public Offering Proceeds Realization
154	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang dan Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan Material Information Related to Investments, Expansions, Mergers, Acquisitions, Debt Restructuring, and Conflict of Interest Transactions
155	Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan Amendments to Laws and Regulations that Significantly Influence on the Company
156	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies

Laporan Tata Kelola Perusahaan 161

Corporate Governance Report

162	Peningkatan Praktik GCG Berkesinambungan dan Pembaruan GCG Tahun 2019 Continuous Improvement of GCG Practice and 2019 GCG Update
163	Kebijakan GCG GCG Policies
166	Struktur Tata Kelola Perseroan Corporate Governance Structure
167	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
187	Dewan Komisaris Board of Commissioners

208	Direksi Board of Directors
226	Uraian Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Description Regarding Majority and Controlling Shareholders
226	Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Affiliate Relationships Between Members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Majority and/or Controlling Shareholders
227	Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Supporting Bodies
228	Komite Audit Audit Committee
236	Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Governance, Nomination and Remuneration Committee
243	Komite Mitigasi Risiko Risk Mitigation Committee
249	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
258	Unit Audit Internal Internal Audit Unit
266	Akuntan Publik Public Accountant
267	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
271	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System
283	Perkara Penting yang Dihadapi Important Cases Faced
285	Informasi tentang Sanksi Administratif terhadap Perseroan Information Regarding Administrative Sanctions to The Company
285	Divisi Kode Etik dan Perilaku Ethics and Conduct Office
285	Informasi tentang Kode Etik Information on Code of Ethics
289	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)
289	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
293	Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity Policy
294	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Corporate Governance Guidelines of Public Company
301	Penilaian Penerapan GCG GCG Implementation Assessment
302	Akses Informasi dan Data Perusahaan Information Access and Corporate Data

Laporan Keuangan Audit 303

2019 Audited Financial Statement

368	Referensi POJK dan SEOJK POJK and SEOJK Reference
-----	--



Pokok-Pokok Pencapaian Kinerja 2019

2019 Performance Highlights

Harga Realisasi Rata-rata Average Realized Price

AS\$
US\$ **10,855** per ton

naik 6% dibanding tahun 2018 sebesar AS\$10.272 per ton
increase of 6% compared to US\$10,272 per ton in 2018



Total Cadangan Terbukti Total Proven Reserves

66.2 juta ton (DKP)
million tons (DKP)

turun dibanding tahun 2018 sebesar 101,8 juta ton (DKP).
decreased compared to 101.8 million tons (DKP) in 2018

Total Cadangan Terkira Total Probable Reserves

41.4 juta ton (DKP)
million tons (DKP)

naik dibanding tahun 2018 sebesar 14,7 juta ton (DKP)
increased compared to 14.7 million tons (DKP) in 2018



Pendapatan Revenue

AS\$
US\$ **782.0** juta
million

naik 1% dibanding tahun 2018 sebesar AS\$776,9 juta.
increase of 1% compared to US\$776.9 million in 2018.

EBITDA yang Disesuaikan Adjusted EBITDA

AS\$
US\$ **232.4** juta
million

turun 1% dibanding tahun 2018 sebesar AS\$235,7 juta.
decrease of 1% compared to US\$235.7 million in 2018.

Biaya Kas Cash Cost

AS\$
US\$ **7,403** per ton

naik 4% dibanding tahun 2018 sebesar AS\$7.110 per ton.
increase of 4% compared to US\$7,110 per ton in 2018.



Harga Saham Per 31
Desember 2019
Share Price as at December 31, 2019

IDR **3,640** per saham
per share



Produksi Nikel dalam Matte
Nickel in Matte Production

71,025 tons

turun 5% dibanding tahun 2018 sebesar 74.806 ton.
decrease of 5% compared to 74,806 tons in 2018.

Penjualan Nikel Matte
Nickel Matte Sales

72,044 tons

turun 5% dibanding tahun 2018 sebesar 75.631 ton.
decrease of 5% compared to 75,631 tons in 2018.



Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Occupational Health and Safety

0.53 Total Recordable Injury
Frequency Rate (TRIFR)

lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar 0,50.
higher than 0.50 in 2018.

Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management

PROPER HIJAU

Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
("KLHK") Republik Indonesia.
GREEN PROPER from the Ministry of Environment and
Forestry of the Republic of Indonesia.

Intensitas SO₂ rata-rata 0,72 SO₂/kg Ni, lebih rendah dibandingkan nilai baku mutu 0,80 SO₂/kg Ni
Average SO₂ intensity 0.72 SO₂/kg Ni, lower than 0.80 SO₂/kg Ni threshold.



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Highlights

Dinyatakan dalam ribuan dolar AS, kecuali dinyatakan lain

Expressed in thousands of US dollars, unless otherwise stated

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015	Description
Ikhtisar Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit or Loss and Other Comprehensive Income Highlights						
Pendapatan	782,012	776,900	629,334	584,143	789,745	Revenue
Beban Pokok Pendapatan	(665,558)	(672,899)	(622,780)	(550,018)	(671,389)	Cost of Revenue
Laba Bruto	116,454	104,001	6,554	34,125	118,356	Gross Profit
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	89,136	82,617	(23,020)	5,165	69,828	Profit/(Loss) Before Income Tax
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan	(31,736)	(22,105)	7,749	(3,259)	(19,327)	Income Tax (Expense)/Benefit
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	57,400	60,512	(15,271)	1,906	50,501	Profit/(Loss) for the Year
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Net Profit/(Loss) After Tax Attributable to the Owners of the Parent*
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Net Profit/(Loss) After Tax Attributable to Non-Controlling Interests*
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Comprehensive Income Attributable to the Owners of the Parent*
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Comprehensive Income Attributable to the Non-Controlling Interests*
Total Penghasilan Komprehensif Lain	566	3,848	49	(1,274)	(1,879)	Total Other Comprehensive Income
Jumlah Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	57,966	64,360	(15,222)	632	48,604	Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year
Jumlah Saham Beredar (Dalam Ribuan Lembar)	4,119,596	2,630,527	3,384,111	3,252,982	2,281,124	Total Outstanding Shares (in thousand shares)
Laba/(Rugi) Per Saham (Dalam IDR) – Dasar dan Dilusian	80.28	88.71	(20.42)	2.69	68.98	Earnings/(Loss) per Share (in IDR) – Basic and Diluted
Dividen Per Saham (Dalam IDR)	0	0	0	0	0	Dividend per Share (in IDR)
EBITDA yang Disesuaikan	232,367	235,673	111,635	134,966	214,682	Adjusted EBITDA
Ikhtisar Posisi Keuangan Financial Position Highlights						
Kas dan Setara Kas	249,035	301,153	221,699	185,560	194,754	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	107,295	124,248	165,577	146,616	78,200	Trade Receivables
Persediaan	147,961	131,779	117,726	129,796	104,066	Inventories
Aset Lancar Lain-lain	84,022	73,818	92,054	137,182	217,880	Other Current Assets
Aset Lancar	588,313	630,998	597,056	599,154	594,900	Current Assets
Aset Tidak Lancar Lain-lain	166,913	136,944	93,714	93,685	90,959	Other Non-Current Assets
Aset Tetap	1,467,462	1,434,510	1,493,789	1,532,653	1,603,302	Fixed Assets
Jumlah Aset	2,222,688	2,202,452	2,184,559	2,225,492	2,289,161	Total Assets
Utang Usaha	97,408	91,181	60,940	64,274	85,636	Trade Payables
Liabilitas Jangka Pendek Lain-lain	39,144	84,159	68,360	67,715	62,863	Other Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	144,443	143,385	235,892	258,914	306,705	Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	280,995	318,725	365,192	390,903	455,204	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	1,941,693	1,883,727	1,819,367	1,834,589	1,833,957	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2,222,688	2,202,452	2,184,559	2,225,492	2,289,161	Total Liabilities and Equity
Belanja Modal/Investasi	166,367	103,369	68,525	60,660	106,390	Capital Expenditures/Investments
Modal Kerja Bersih	451,761	455,658	467,756	467,165	446,401	Net Working Capital
Investasi pada Entitas Anak/Asosiasi	1,440	0	0	0	0	Investment in Subsidiaries/Associate Entities
Rasio Keuangan Financial Ratios						
Margin Laba Bersih	7%	8%	(2)%	0%	6%	Net Profit Margin
Margin Laba Kotor	15%	13%	1%	6%	15%	Gross Profit Margin
Margin Operasi	11%	11%	(3)%	2%	10%	Operational Margin
Imbalan Ekuitas Rata-rata	3%	3%	(1)%	0%	3%	Average Return on Equity (ROE)
Imbalan Aset Rata-rata	3%	3%	(1)%	0%	2%	Average Return on Assets (ROA)
Utang/Ekuitas	0%	2%	4%	6%	8%	Debt/Equity
Utang/Aset	0%	2%	3%	5%	6%	Debt/Assets
Periode Penagihan (Hari)	53	67	89	69	39	Receivables Turnover (Days)
Periode Persediaan (Hari)	86	76	97	123	96	Inventory Turnover (Days)
Rasio Lancar	4.31	3.60	4.62	4.54	4.01	Current Ratio

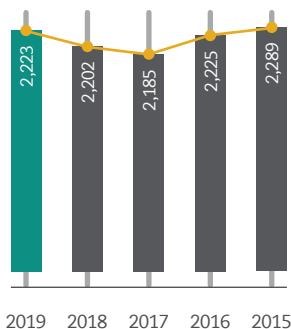
* Perseroan tidak secara khusus mengatribusikan Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Komprehensif kepada Pemilik Entitas Induk maupun Kepentingan Non-Pengendali
The Company does not specifically attribute Profit (Loss) for The Year and Comprehensive Profit (Loss) to the Owners of the Parent and Non-Controlling Interests



ASET

Assets

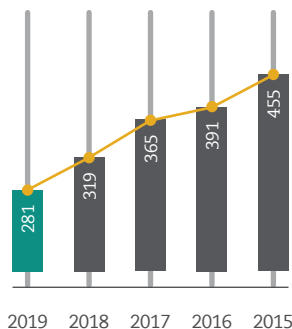
(dalam jutaan AS\$ | in million US\$)



LIABILITAS

Liabilities

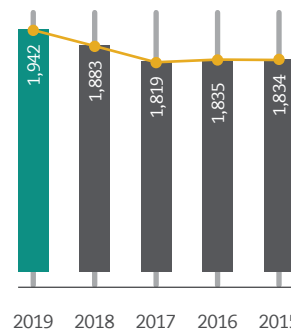
(dalam jutaan AS\$ | in million US\$)



EKUITAS

Equity

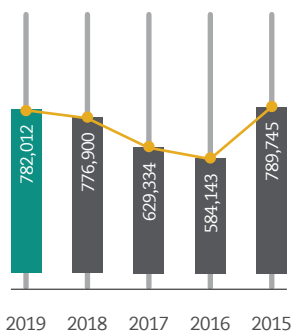
(dalam jutaan AS\$ | in million US\$)



PENDAPATAN

Revenue

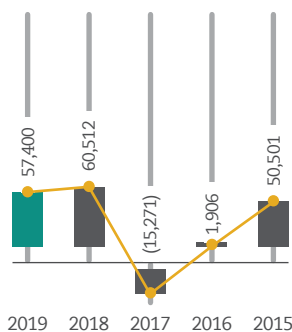
(dalam ribuan AS\$ | in thousand US\$)



LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN

Profit/(Loss) For The Year

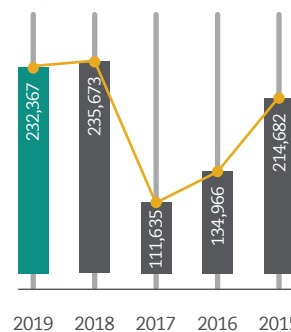
(dalam ribuan AS\$ | in thousand US\$)



EBITDA YANG DISESUAIKAN

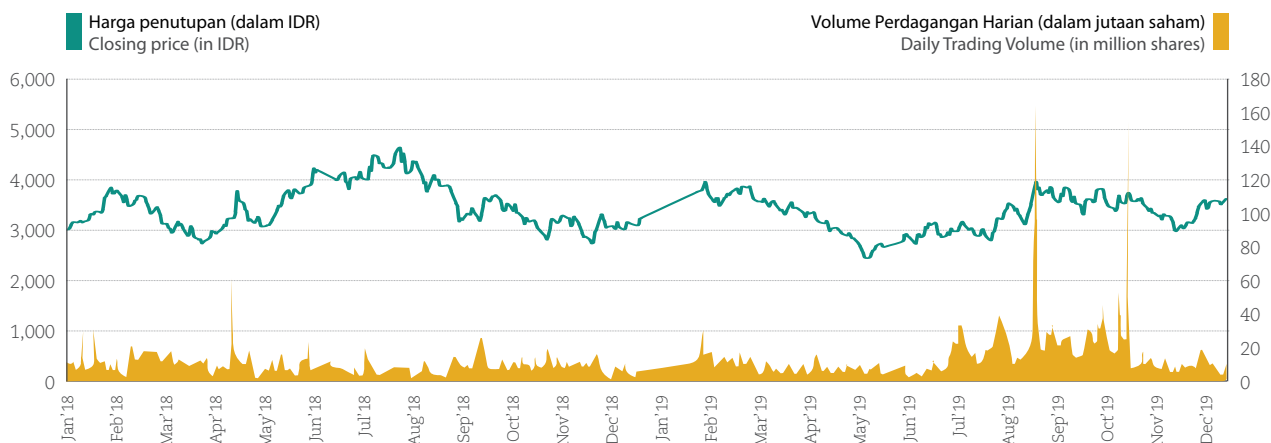
Adjusted EBITDA

(dalam ribuan AS\$ | in thousand US\$)



Informasi Saham

Shares Information



PERGERAKAN HARGA SAHAM

Share Price Movements

Bulan Month	Harga Saham Share Price			Peredaran Saham di Pasar Reguler Shares Trading in Regular Market			IHSI Individual Index	Jumlah Saham Beredar Total Shares Registered	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization	
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing	Volume	Nilai Value	Frekuensi Frequency		Jumlah Saham Quantity of Shares	IDR	AS\$ (000) US\$ (000)
	IDR	IDR	IDR	Unit	IDR	x				
2019										
Januari January	3,860	3,050	3,850	408,824,000	1,447,673,404,000	74,355	1,571	9,936,338,720	38,254,904,072,000	2,718,512
Februari February	4,020	3,480	3,740	282,995,600	1,062,718,802,000	61,370	1,527	9,936,338,720	37,161,906,812,800	2,642,718
Maret March	3,970	3,310	3,390	183,496,700	668,294,918,000	45,515	1,384	9,936,338,720	33,684,188,260,800	2,364,798
April	3,590	2,980	3,050	165,894,600	543,496,746,000	40,176	1,245	9,936,338,720	30,305,833,096,000	2,131,962
Mei May	3,040	2,410	2,700	178,400,400	489,639,411,000	39,212	1,102	9,936,338,720	26,828,114,544,000	1,865,006
Juni June	3,170	2,720	3,120	102,228,900	301,990,345,000	30,329	1,273	9,936,338,720	31,001,376,806,400	2,192,304
Juli July	3,300	2,840	3,030	408,653,100	1,249,948,885,000	79,704	1,237	9,936,338,720	30,107,106,321,600	2,146,521
Agustus August	3,600	2,750	3,530	499,964,300	1,621,014,907,000	78,776	1,441	9,936,338,720	35,075,275,681,600	2,463,670
September	4,320	3,480	3,510	684,051,700	2,625,817,588,000	107,031	1,433	9,936,338,720	34,876,548,907,200	2,460,600
Oktober October	3,960	3,310	3,710	762,297,500	2,772,477,295,000	121,424	1,514	9,936,338,720	36,863,816,651,200	2,631,626
November	3,740	2,950	3,000	233,846,300	795,854,857,000	52,882	1,224	9,936,338,720	29,809,016,160,000	2,113,815
Desember December	3,680	2,960	3,640	208,942,700	707,508,004,000	52,222	1,486	9,936,338,720	36,168,272,940,800	2,593,637
Harga 2019 Price	4,320	2,410	3,640							
Jumlah Total				4,119,595,800	14,286,435,162,000	782,996				
2018										
Januari January	3,890	2,920	3,750	288,660,800	965,154,283,000	46,589	1,531	9,936,338,720	37,261,270,200,000	2,777,997
Februari February	3,860	3,310	3,390	259,315,200	924,309,024,000	40,867	1,384	9,936,338,720	33,684,188,260,800	2,457,444
Maret March	3,370	2,740	2,790	273,235,200	826,136,361,000	47,555	1,139	9,936,338,720	27,722,385,028,800	2,015,294
April	3,810	2,780	3,160	309,759,400	1,028,827,674,000	50,213	1,290	9,936,338,720	31,398,830,355,200	2,262,653
Mei May	3,880	3,020	3,860	174,110,800	613,584,685,000	41,403	1,576	9,936,338,720	38,354,267,459,200	2,749,213
Juni June	4,300	3,790	4,040	129,428,800	524,333,521,000	25,587	1,649	9,936,338,720	40,142,808,428,800	2,786,921
Juli July	4,720	3,880	4,370	167,553,300	724,630,770,000	50,091	1,784	9,936,338,720	43,421,800,206,400	3,012,683
Agustus August	4,580	3,750	3,800	130,538,300	537,379,804,000	52,453	1,551	9,936,338,720	37,758,087,136,000	2,566,657
September	3,770	3,110	3,710	270,055,000	927,298,903,000	62,228	1,514	9,936,338,720	36,863,816,651,200	2,469,276
Oktober October	3,700	2,830	2,920	241,030,000	786,597,493,000	55,528	1,192	9,936,338,720	29,014,109,062,400	1,905,438
November	3,370	2,750	3,030	244,936,200	756,752,156,000	56,808	1,237	9,936,338,720	30,107,106,321,600	2,099,666
Desember December	3,360	2,960	3,260	141,904,400	448,921,340,000	38,399	1,331	9,936,338,720	32,392,464,227,200	2,227,511
Harga 2018 Price	4,720	2,740	3,260							
Jumlah Total				2,630,527,400	9,063,926,014,000	567,721				





Penghentian Sementara Perdagangan dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham

Temporary Suspension of Trading and/or Delisting of Shares

Selama tahun 2019, Perseroan tidak pernah dihadapkan pada penghentian sementara perdagangan saham, dan/atau penghapusan pencatatan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), selaku pemegang otoritas perdagangan saham Perseroan.

During 2019, there was no suspension in trading, and/or delisting of the Company's shares by PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), as Company's shares trading authority.



Aksi Korporasi

Corporate Action

Amendemen Kontrak Karya ("KK") 2014 mengharuskan Perseroan melakukan divestasi lebih lanjut sebesar 20% dalam kurun waktu 5 tahun. Divestasi lebih lanjut ini dilakukan untuk mencapai porsi kepemilikan peserta Indonesia sebesar 40%, termasuk diantaranya 20% saham (dari total 20.49%) yang saat ini telah dimiliki publik yang telah diakui pemerintah sebagai bagian dari kepemilikan peserta Indonesia.

The 2014 Contract of Work ("COW") Amendment requires the Company to divest further its share by 20% a period of 5 years. This further divestment is carried out to achieve a 40% Indonesian participants ownership, including in it the 20% of the shares (of a total of 20.49%) currently owned by the public that the government has recognized as part of the ownership of Indonesian participants.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui suratnya tanggal 8 Oktober 2019 menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ("MIND ID") sebagai wakil pemerintah Indonesia untuk mengakuisisi 20% saham Perseroan sebagai pemenuhan kewajiban divestasi tersebut. Penunjukan ini diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pendahuluan antara Perseroan bersama Vale Canada Limited ("VCL") dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("SMM") selaku pemegang saham Perseroan dengan MIND ID pada tanggal 11 Oktober 2019. Perjanjian Pendahuluan ini kemudian dilanjutkan dengan perjanjian definitif utama dan penyelesaian keseluruhan transaksi yang diharapkan tuntas pada pertengahan tahun 2020.

The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia through its letter dated October 8, 2019 appointed PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ("MIND ID") as the Indonesian government representative to acquire 20% of the Company's shares as a fulfillment of the divestment obligations. This appointment was followed by the signing of a Heads of Agreement between the Company and Vale Canada Limited ("VCL") and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("SMM"), as the Company's shareholders, with MIND ID on October 11, 2019. This Heads of Agreement was followed by key definitive agreements, with completion of all transactions expected by mid 2020.

Selain hal tersebut di atas, tidak ada lagi aksi korporasi selama tahun 2019 yang mempengaruhi jumlah saham Perseroan.

Other than the above, there were no other corporate actions during 2019 that affected the number of shares in the Company.





Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi

Information Related to Bonds, Sukuk or Convertible Bonds

Perseroan tidak pernah menerbitkan dan/atau memiliki obligasi, sukuk atau obligasi konversi. Dengan demikian Laporan ini tidak menyajikan informasi kinerja obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang memuat jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk pada tahun buku.

The Company has never issued and/or owned bonds, sukuk or convertible bonds. Therefore, this Report does not include bond, sukuk or convertible bond information related to the number of bonds/sukuk/convertible bonds outstanding, interest/return, maturity date and bonds/sukuk rating for the fiscal year.







Laporan Direksi

Board of Directors' Report

Strategi keseluruhan pada tahun 2019 diwujudkan dengan beberapa inisiatif terkait keselamatan, keberlanjutan, inovasi, keragaman tenaga kerja dan komunikasi, serta memajukan proyek pengembangan kami di Bahodopi dan Pomalaa.

Our overall strategies for 2019 were translated to several initiatives on safety, sustainability, innovation, workforce diversity and communication, as well as progressing our development projects in Bahodopi and Pomalaa.



KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN,

Merupakan suatu kehormatan bagi saya, atas nama Dewan Direksi PT Vale, untuk menyajikan Laporan Tahunan 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasi. Secara umum, Perseroan mampu menghadapi situasi yang menantang. Meskipun harus melakukan beberapa perbaikan di fasilitas pengolahan kami, baik yang sifatnya terencana maupun tidak terencana, di tahun 2019, Perseroan mampu mempertahankan produksi produksi dan kinerja keuangan yang kuat di bawah kondisi pasar nikel yang fluktuatif.

PENCAPAIAN UTAMA DI TAHUN 2019

Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai peristiwa dengan banyaknya kejadian penting.

Pada triwulan kedua, kami menyelesaikan pekerjaan di Kanal Larona. Kanal Larona mengalirkan air ke pembangkit listrik tenaga air yang menyediakan listrik ke fasilitas pengolahan kami. Proyek ini dibuat untuk memastikan integritas kanal dengan melakukan pelapisan ulang dinding bagian dalam untuk mencegah kebocoran air dan pada saat yang sama akan meningkatkan aliran air. Selanjutnya, penguatan dinding akan dilakukan untuk meningkatkan peringkat seismik dari 0,2 g menjadi 0,4 g. Penyelesaian pelapisan kanal pada akhir April 2019 dapat meningkatkan aliran air 5 meter kubik/detik, yang setara dengan tambahan daya sebesar 10 MW. Setelah selesainya pekerjaan tersebut, pembangkit listrik dapat mencapai kapasitas penuh 375 MW dan kami bisa mempertahankan level operasi yang stabil sampai akhir tahun sehingga Perseroan mampu mencapai produksi 71kT meskipun kinerja produksi pada trwiulan pertama 2019 tidak maksimal.

TO THE STAKEHOLDERS,

It is an honor for me, on behalf of PT Vale's Board of Directors, to present our 2019 Annual Report and the Consolidated Financial Statements. In general, the Company performed strongly in challenging circumstances. Although there were several planned and unplanned shutdowns in our processing facilities, the Company was able to maintain strong production and financial performance under a volatile nickel market condition.

MAJOR ACHIEVEMENT IN 2019

2019 was an eventful year for the Company with many significant events along the way.

In the second quarter, we completed works at Larona Canal. The Larona Canal channels water to our hydroelectric power plants that provides electricity to our smelting facility. The project was to ensure the integrity of the canal by doing the inside wall relining to prevent water leakage and at the same time to increase water flow. The wall strengthening will be carried further to increase seismic rating from 0.2 g to 0.4 g. The completion of Larona Canal lining at the end of April 2019 increased the water flow by 5 cubic meter/sec, equal to additional power of 10 MW. After the completion of the work, the power plant could generate up to 375 MW and stable production rate could be maintained for the remaining of the year which enabled the Company to produce 71kT of nickel matte, despite poor production performance in the first quarter of 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mempercepat rencana pemberlakuan persyaratan pemrosesan bijih nikel dalam negeri dari yang sebelumnya tahun 2022 menjadi Januari 2020. Keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian yang lebih besar kepada para *investor* yang berencana membangun pabrik pengolahan dan pemurnian, yang nantinya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan ekspor. Kami sepenuhnya mendukung kebijakan Pemerintah ini. Sejak Perseroan didirikan 51 tahun yang lalu, kami belum pernah mengekspor bijih yang belum diolah. Semua bijih yang kami tambang diproses di pabrik pengolahan Sorowako untuk menghasilkan nikel matte.

Pada tahun 2019 pula, PT Vale, bersama dengan para pemegang saham utamanya, VCL dan SMM, menandatangani Perjanjian Pendahuluan dengan MIND ID sebagai langkah penting untuk memenuhi kewajiban divestasi PT Vale berdasarkan amendemen Kontrak Karya tahun 2014. Kami telah memulai penyelesaian perjanjian kami dengan MIND ID untuk mengakuisisi 20% saham PT Vale. Perjanjian tersebut adalah langkah pertama dalam membentuk kemitraan strategis jangka panjang antara PT Vale dan MIND ID. Kami menyambut MIND ID sebagai mitra strategis karena nilai-nilai, visi dan misi yang selaras dengan nilai kami, yaitu pembangunan berkelanjutan, pemrosesan hilir untuk menciptakan nilai tambah, dan mengelola sumber daya strategis untuk Indonesia. MIND ID memiliki visi besar untuk nikel dan untuk Indonesia agar menjadi salah satu pemain nikel terbesar. Kami melihat ini sebagai persamaan yang baik dengan PT Vale dan strategi Perseroan.

Tahun ini PT Vale membentuk tim khusus untuk melengkapi semua informasi yang dibutuhkan dalam penilaian PROPER. Kami sangat bangga mengumumkan bahwa pada tahun 2019 kami berhasil meraih penghargaan PROPER Hijau pertama. PT Vale juga menerima penghargaan nasional dan internasional lainnya termasuk Sustainable Business Awards ("SBA"), Subroto Awards, Most Improved Corporate Governance Awards, ASEAN Mining Awards, ASEAN Coal Awards, Global Corporate Sustainability Awards, dan banyak lainnya.

In 2019 the Indonesian Government decided to bring forward its plan to fully enforce the domestic processing requirements for nickel ore from 2022 to January 2020. This decision was taken to provide greater certainty to investors planning to build refineries and smelters, which in turn will create more jobs and boost export earnings. We fully support this Government policy. Since the Company was founded 51 years ago, we have never exported unprocessed ore. All of our mined ore is processed in our Sorowako smelter to produce nickel matte.

Also in 2019, PT Vale, together with its majority shareholders, VCL and SMM, signed a Heads of Agreement with MIND ID which was an important step in complying to divestment obligation under the 2014 COW amendment. We have embarked on finalizing our agreement with MIND ID to acquire 20% of PT Vale's shares. The agreement is the first step in forming a long-term strategic partnership between PT Vale and MIND ID. We welcome MIND ID as our strategic partner and we see significant alignment in both corporate values, vision and mission, namely sustainable development, downstream processing to create added value, and managing strategic resources for Indonesia. MIND ID has a grand vision for nickel, and for Indonesia becoming one of the largest nickel players, and we see this as a great match with PT Vale and our Company's strategy.

This year PT Vale formed a special team to complete all the information needed for the PROPER assessment, and we are very proud to announce that in 2019 we achieved our first Green PROPER Award. PT Vale also received other national and international awards including Sustainable Business Awards ("SBA"), Subroto Awards, Most Improve Good Corporate Governance Awards, ASEAN Mining Awards, ASEAN Coal Awards, Global Corporate Sustainability Awards, and many others.



TANTANGAN SAAT INI

Tantangan maupun kendala utama pada tahun 2019 adalah penghentian beberapa fasilitas pengolahan yang direncanakan ataupun tidak untuk kegiatan pemeliharaan. Walaupun bisa diselesaikan dengan baik, sesuai dengan rencana yang ditetapkan di awal, proyek Larona canal memengaruhi kinerja produksi di triwulan pertama 2019 dengan signifikan. Selain itu, kegiatan pemeliharaan tidak terencana yang harus dilakukan pada salah satu tanur pelebur kami juga memengaruhi pencapaian produksi di tahun 2019. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya inisiatif keunggulan operasional yang telah menjadi fokus utama bagi Perseroan saat memasuki tahun 2020.

Pasar nikel berfluktuasi secara signifikan pada tahun 2019 dan menjadi tantangan lain bagi kinerja Perseroan. Harga nikel berada di posisi yang rendah di awal tahun, tetapi mulai naik tajam ketika rumor mulai beredar mengenai rencana Pemerintah Indonesia untuk mempercepat implementasi persyaratan pemrosesan dalam negeri untuk bijih nikel. Harga nikel mencapai harga tertingginya ketika Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan tersebut. Namun, harga nikel kembali turun menjelang akhir tahun karena adanya pengiriman kembali stok nikel ke London Metal Exchange ("LME") dan permintaan yang lebih rendah untuk baja nirkarat.

TINJAUAN EKONOMI MIKRO

Pada tahun 2019, kondisi ekonomi global masih dipengaruhi oleh gerakan proteksionisme dan gejolak geopolitik di berbagai wilayah yang menyebabkan perlambatan ekonomi global. Kondisi ini termasuk perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dengan Cina, keluarnya Britania Raya ("BREXIT") dari Uni Eropa, dan kekacauan geopolitik di bagian lain dunia.

Melemahnya ekonomi global juga terus menekan harga komoditas, terutama harga minyak dan batubara. Untuk menanggapi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi, banyak negara menerapkan stimulus fiskal dan melonggarkan kebijakan moneter, termasuk The Fed, yang menurunkan suku bunga acuan ("FFR") tiga kali lebih rendah menjadi 1,50% - 1,75%.

CURRENT CHALLENGES

The major challenge in 2019 was the planned and unplanned shutdowns for maintenance. Although the Larona Canal Lining project could be completed as planned, it significantly impacted the production performance in first quarter 2019. In addition to that, the unplanned maintenance that need to be done in one of our furnaces has also affected the level of production achieved in 2019. This incident highlights the importance of our operational excellence initiatives and has become a key area of focus for the Company as we move into 2020.

The nickel market fluctuated significantly in 2019, posing another challenge to our performance. Prices were low in the early part of the year but began to rise sharply as rumors began to circulate regarding the Indonesian Government's plan to accelerate the implementation of the domestic processing requirements for nickel ore. Nickel prices peaked when the Government made the formal policy announcement. However, prices retracted towards the end of the year due to increasing amount of Nickel stock added back to the London Metal Exchange ("LME") and lower demand for stainless steel.

MACRO ECONOMIC REVIEW

In 2019, global economic conditions were still be affected by the protectionist movements and geopolitical turmoil in various regions that caused a global economic slowdown. Included in it was ongoing United States trade war with China, the exit of the United Kingdom ("BREXIT") from the European Union, and geopolitical turmoil in other parts of the world.

The weakening of the global economy also continued to depress commodity prices, especially oil and coal prices. To respond to the impact of slowing economic growth, many countries implemented fiscal stimulus and eased monetary policy, including the Fed, which reduced its benchmark interest rate ("FFR") three times to 1.50% - 1.75%.

Untuk ekonomi domestik, pemerintah melakukan antisipasi perlambatan ekonomi global dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pengembangan pengembangan sektor strategis berorientasi ekspor, impor pengganti, industri pariwisata, subsidi bunga di sektor-sektor tertentu, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, serta penurunan tingkat kebijakan dan pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia.

Di tengah gejolak ekonomi global, Indonesia tetap menjaga kesehatan fundamental ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0% pada 2019. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, hasil ini masih merupakan pencapaian yang sangat baik mengingat kondisi ekonomi saat itu. Untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi lebih baik dari tahun 2019. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional akan berada di kisaran 5,1%-5,5%. Prediksi ini didukung oleh kondisi politik nasional yang semakin stabil setelah selesai pemilihan umum.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Secara keseluruhan, strategi perusahaan di tahun 2019 difokuskan untuk membawa Perseroan ke kondisi yang aman dan berkelanjutan, serta siap untuk menuju pertumbuhan. Strategi ini diwujudkan dengan beberapa inisiatif terkait keselamatan, keberlanjutan, inovasi, keragaman tenaga kerja dan komunikasi, serta melanjutkan proyek pengembangan kami di Bahodopi dan Pomalaa.

Terkait keamanan, pada tahun 2019, kami memperbarui Golden Rules. Aturan-aturan ini menetapkan perihal paling penting yang harus dipatuhi semua pekerja untuk mencegah kecelakaan. Kami juga mengambil langkah untuk melibatkan keluarga pekerja dalam kampanye '*the Fatigue Management System*' sehingga pekerja mendapatkan pesan yang konsisten, baik di tempat kerja maupun di rumah tentang pentingnya bekerja dengan aman. Akhirnya, kami juga telah menyelesaikan Identifikasi Bahaya dan Analisis Risiko ("HIRA") yang komprehensif di seluruh operasi Sorowako. Proses ini fokus pada kegiatan yang memiliki paparan resiko besar dan berpotensi mengakibatkan banyak kejadian fatal. Kontrol resiko yang diperlukan dan mitigasi telah diidentifikasi dan akan diimplementasikan di tahun 2020.

In anticipation of slowing global economy, the government has focused itself in defining policies to support the development of export-oriented strategic sectors, substituting imports, the tourism industry, interest subsidies in certain sectors, the empowerment of Micro Small Medium Enterprises, as well as a decrease in policy rates and easing liquidity by Bank Indonesia.

In the midst of the global economic turmoil, Indonesia maintained the health of its economic fundamentals. Economic growth in the country reached 5.0% in 2019. Although lower than the previous year, it was still a very good achievement considering the economic condition at that time. For 2020, Indonesia's economic growth is predicted to be better than in 2019. Bank Indonesia predicts national economic growth will be in the range of 5.1%-5.5%. This prediction was supported by increasingly stable condition of national politics after the completion of general elections.

STRATEGIC POLICIES

Our overall strategies for 2019 were focused on bringing the Company to a safer and more sustainable condition, ready for growth. This translated to several initiatives on safety, sustainability, innovation, workforce diversity and communication, as well as progressing our development projects in Bahodopi and Pomalaa.

Regarding safety, in 2019, we updated our Golden Rules. These rules set out the most important rules that all our employee must obey to prevent major accidents. We also took the step to involve the families of our employee in the Fatigue Management System campaign so that our employee are getting a consistent message at work and at home about the importance of working safely. Finally, we completed a comprehensive Hazard Identification and Risk Analysis ("HIRA") session across the entire Sorowako operation. This process focused on high risk activities with potential events that could result in multiple fatalities. Required controls and mitigations were identified, and action plans will be implemented in 2020.



Pada tahun 2019, kami menetapkan empat perilaku utama yang berbasis kepada budaya perusahaan yaitu: obsesi dengan keselamatan dan manajemen risiko, berdialog dengan terbuka dan transparan, mengembangkan sumber daya manusia melalui pemberdayaan dengan akuntabilitas dan manajemen kinerja, serta rasa memiliki yang menyeluruh.

Kami juga telah meningkatkan saluran komunikasi dua arah melalui program baru kami yang disebut "Open Talk". Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa risiko tidak hanya diidentifikasi tetapi juga dikomunikasikan secara terbuka kepada manajemen sehingga tindakan yang tepat dapat diambil. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun budaya perusahaan yang mendorong agar setiap isu dan tantangan dapat diatasi dan ditangani secara terbuka.

Pada tahun 2019, kami juga mengambil langkah pertama dalam mempersiapkan program keragaman dan inklusi gender. Langkah pertama dari program ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja wanita dapat terwakili dan dilindungi dengan baik di tempat kerja. Kami percaya bahwa pekerja wanita dapat mendukung Perseroan menjadi lebih beragam, memungkinkan cara penyelesaian masalah secara berbeda dan terciptanya inovasi yang lebih besar di tempat kerja. Kami melihat ini sebagai hal yang penting untuk keberlanjutan organisasi saat kami memasuki tahun 2020 dan seterusnya.

Kami juga menetapkan *Floor Management Development System* ("FMDS") di semua level operasi kami di Sorowako. Ini adalah cara untuk memberikan pengawasan yang lebih besar kepada manajemen lapangan untuk berinovasi dan menemukan cara melakukan kegiatan yang lebih baik. Proses ini merupakan pendekatan dari bawah ke atas dan telah diterima dengan baik oleh tingkat manajemen lapangan, serta telah diterapkan secara efektif. Pengawasan merupakan bagian penting dari keseluruhan Vale Production System ("VPS"). VPS memperkuat budaya organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia, standarisasi praktik terbaik, operasional yang disiplin, dan kepatuhan terhadap rutinitas.

Akhirnya, kami melakukan berbagai upaya besar untuk meningkatkan kondisi area kerja di tahun 2019. Upaya ini dipandang sebagai langkah penting dalam menanamkan

In 2019, we established four key behaviors open which our corporate culture is based: be obsessed with safety and risk management, create open and transparent dialogue, develop people through empowerment with accountability and performance management and take ownership for the whole.

We also have improved our two-way communication channels, with our new program called "Open Talk". This is a vital step in ensuring that risks are not only identified but also openly communicated to management so that proper action can be taken. It is part of our efforts to establish a corporate culture that encourages issues and challenges to be raised and handled transparently.

In 2019, we also took our first steps in preparing for a gender diversity and inclusion program. The first step of this program aims to ensure that our female employees are properly represented and protected in our work place. We believe that our female employees provide the Company with a more diversity, which means different ways of tackling problems and thus greater innovation in our work place. We see this as critical for the sustainability of our organization as we move in to 2020 and beyond.

We also established our Floor Management Development System ("FMDS") in all our operating levels in Sorowako. This is a mean of giving greater control to our floor management to innovate and find better ways of operating. It is a bottom-up approach and was well received by our floor management levels and has been rolled out effectively. This is a key part of our overall Vale Production System ("VPS"). The VPS strengthens our organizational culture through human resource development, standardization of best practices, operational disciplines, and compliance to routines.

Finally, we implemented a major push to improve housekeeping in 2019. This was seen as an important step in instilling greater operational discipline, which is an important

disiplin operasional yang lebih besar, yang merupakan tahapan penting bagi keselamatan operasional. Dengan adanya tempat kerja yang bersih dan rapi, kami yakin pekerja akan mendapat manfaat dari semangat dan rasa memiliki yang lebih besar terhadap semua aset dan kinerja Perseroan. Kami juga percaya bahwa perbaikan area kerja juga akan membentuk disiplin diri yang akan membantu tercapainya keselamatan kerja dan kinerja produksi dalam jangka panjang.

KINERJA KEUANGAN DAN PRODUKSI

Kinerja perusahaan pada tahun 2019 dipengaruhi oleh kegiatan pemeliharaan yang direncanakan maupun yang tidak, yang berdampak pada produksi dan biaya.

Produksi nikel dalam matte pada tahun 2019 adalah 71.025 ton, 5% lebih rendah dari 74.806 ton pada tahun 2018, sebagai akibat dari dijalankannya proyek pelapisan ulang Kanal Larona dan juga masalah yang terjadi pada tanur listrik 4. Pendapatan meningkat sebesar 1% pada 2019 (YoY) menjadi AS\$782,0 juta, karena harga nikel yang lebih tinggi. Harga realisasi rata-rata untuk pengiriman nikel matte pada tahun 2019 adalah sebesar AS\$10.855 per ton, dibandingkan dengan AS\$10.272 per ton pada tahun 2018. Biaya Pokok Pendapatan turun 1% YoY pada tahun 2019, karena produksi yang lebih rendah dan harga bahan bakar yang lebih rendah. Harga HSFO, diesel dan batubara turun masing-masing sebesar 4%, 11% dan 22%.

Pada akhir tahun fiskal 2019, Perseroan mencatat Laba Operasional sebesar AS\$88,3 juta, meningkat 4% dibandingkan dengan AS\$84,9 juta pada tahun fiskal 2018. Kami membelanjakan sekitar AS\$166,6 juta untuk belanja modal pada tahun 2019, dibandingkan dengan AS\$83,8 juta pada tahun 2018.

PENCAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET SEPANJANG 2019

Pencapaian produksi dipengaruhi oleh masalah pada tanur listrik yang tidak terencana di awal 2019, sebagaimana disebutkan di atas. Dengan masalah ini, Perseroan memutuskan untuk merevisi target produksi untuk sisa tahun 2019. Pencapaian produksi di akhir tahun sejalan dengan target revisi ini, meskipun lebih rendah dari target awal. Pendapatan sedikit di atas target karena harga nikel yang sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan pada tahun 2019. Total biaya produksi berada dalam kisaran nilai target, tetapi biaya per unit lebih tinggi daripada target. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya pemeliharaan yang lebih tinggi dan produksi yang lebih rendah.

precursor to operational safety. By taking ownership for a clean and tidy workplace, we believe our people will benefit from greater motivation and ownership of all company assets and performance. We also believe it will lead to self-discipline, which helps both safety and production performance in the long term.

FINANCIAL AND PRODUCTION PERFORMANCE

As noted earlier, performance in 2019 was impacted by the planned and unplanned maintenance activities, which affected both production and costs.

Nickel in matte production in 2019 was 71,025 tonnes, 5% lower than the 74,806 tonnes in 2018, due to Larona Canal relining and unplanned problems in electric furnace 4. Revenue increased by 1% in 2019 (YoY) to US\$782.0 million, due to higher nickel price. The average realized price for nickel matte shipments in 2019 was US\$10,855 per ton, compared to US\$10,272 per ton in 2018. The Cost of Revenue fell by 1% YoY in 2019, due to lower production and lower fuels prices. The price of HSFO, diesel and coal decreased by 4%, 11% and 22% respectively.

At the end of fiscal year 2019, the Company recorded an Operating Profit of US\$88.3 million, an increase of 4% compared to US\$84.9 million in fiscal year 2018. We disbursed approximately US\$166.6 million in cash for capital expenditures in 2019, compared to US\$83.8 million disbursed in 2018.

REVIEW OF RESULTS AGAINST TARGET IN 2019

Production was impacted by the unplanned electric furnace issues at the beginning of 2019, as mentioned above. With these issues, the Company decided to revise its production targets for the remainder of 2019. The final production was in line with these revised targets, albeit lower than the initial targets. Revenue was slightly above target due to a slightly higher-than-expected nickel price in 2019. Overall costs were within our target values, but on a cost-per-unit production basis, the costs were above our target. This was mostly impacted by higher maintenance costs and lower production.



Tidak seperti produksi, target laba Perseroan tidak mengalami penyesuaian terhadap masalah tanur listrik yang disebutkan di atas. Akibatnya, laba final untuk 2019 berada di bawah target awal yang ditetapkan pada awal tahun. Namun, laba operasi yang direalisasikan pada tahun 2019 berada di atas laba operasi yang dicapai pada tahun 2018.

PROSPEK USAHA

Direksi optimis bahwa strategi yang ditetapkan akan memosisikan Perseroan pada jalur yang benar untuk memanfaatkan kondisi pasar dan perubahan kebijakan pemerintah. Kami berada dalam kondisi yang baik untuk bertumbuh, telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir untuk siap mengembangkan Pomalaa dan Bahodopi, dan juga untuk mengembangkan Sorowako. Ini berarti kami berada dalam posisi yang sangat baik untuk memanfaatkan kebijakan baru guna mendorong investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan investasi. Secara khusus, dukungan Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") dalam membantu perusahaan-perusahaan, termasuk PT Vale untuk mendapatkan izin dan persetujuan, telah mempercepat proyek pengembangan kami, terutama di Pomalaa.

Pengembangan ini sesuai dengan perkembangan pasar nikel dunia yang lebih luas dan memosisikan Perseroan untuk bisa mengambil kesempatan dari pertumbuhan permintaan yang diharapkan dari sektor kendaraan listrik ("EV"). Akan ada selisih yang besar antara permintaan nikel untuk baterai dibandingkan dengan pasokan yang tersedia dari rangkaian proyek yang berkembang saat ini. Selain itu, sektor EV menunjukkan peningkatan perhatian pada isu keberlanjutan dalam rantai pasokan. Hal ini terbukti pada langkah-langkah yang diambil dalam mendapatkan kobalt untuk baterai EV, dan ada beberapa tanda yang jelas pada tahun 2019 bahwa sumber nikel yang berkelanjutan akan menjadi semakin penting. Kondisi ini selaras dengan perhatian utama PT Vale pada produksi nikel yang berkelanjutan. Kami berada di posisi yang tepat untuk menyediakan nikel bagi pasar EV yang mudah ditelusuri dan diverifikasi ke lokasi tambang untuk menunjukkan bahwa kami telah memberikan perhatian yang tepat untuk agenda keberlanjutan.

DIVIDEN

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 2 April 2019, para pemegang saham menyetujui bahwa Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Unlike production, our profit target was not adjusted following the electric furnace issues mentioned above. As a result, the final profit for 2019 was below the initial targets set at the start of the year. However, the realized operating profit in 2019 was above the operating profit achieved in 2018.

BUSINESS PROSPECTS

The Board of Directors is optimistic that our strategy positions the Company's in the right path to take advantage of market conditions and evolving government policy. We are primed for growth, having been working hard over the last few years to be ready to develop Pomalaa and Bahodopi, and also to expand Sorowako. This means we are well placed to take advantage of the relatively new push from the re-elected government to boost investment. In particular, the support from the Investment Coordinating Body ("BKPM") to help companies, including PT Vale, to obtain permits and approvals, is speeding up our developments, especially in Pomalaa.

This fits within the wider nickel market development to take advantage of expected demand growth from the electric vehicle ("EV") sector. There will be a big gap for nickel demand for batteries compared to the available supplies from the ongoing project pipeline. Furthermore, the EV sector is showing increasing signs of emphasis on sustainability in the supply chain. This is evident in the steps being taken to source sustainable cobalt for EV batteries, and there were some clear signs in 2019 that sustainable sourcing of nickel will become increasingly important. This fits perfectly with PT Vale's corporate emphasis on sustainable production of nickel. We are well placed to provide nickel for the EV market that is easily tracked and verifiable right back to the mine site to show that proper attention has been given to sustainability.

DIVIDEND

Based on the Annual General Meeting of Shareholders decision held on April 2, 2019, the shareholders approved that the Company will not distribute a dividend to shareholders for the fiscal year ended December 31, 2018.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ("GCG")

Perseroan berusaha untuk meningkatkan dan menerapkan praktik-praktik GCG, tidak hanya sesuai dengan peraturan tetapi juga sesuai dengan praktik terbaik/standar internasional. GCG menciptakan dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan. Praktik-praktik GCG mengacu pada ketentuan OJK dan standar internasional dalam kerangka ASEAN Corporate Governance Scorecard yang konsisten dengan parameter yang ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD").

Bagi Perseroan, penerapan GCG adalah suatu keharusan dan kami telah menanamkan kesadaran GCG dalam semua lini fungsi bisnis dan fungsi pendukung, didukung oleh sistem dan infrastruktur yang sesuai, untuk meningkatkan reputasi dan mengembangkan bisnis di masa depan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ("CSR")

Program Terpadu Pengembangan Masyarakat ("PTPM") masih berlangsung untuk mendorong pengembangan bisnis mikro berkelanjutan bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program CSR 5 tahunan saat ini berfokus pada pengembangan area dengan harapan untuk dapat mendukung pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengembangan kapasitas, dan efektivitas. Kami memastikan program ini selaras dengan potensi penduduk lokal, keterlibatan masyarakat dan memastikan program tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.

PERUBAHAN DALAM KOMPOSISI DEWAN DIREKSI

Selama 2019 terdapat perubahan pada komposisi Direksi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 2 April 2019, Lovro Paulic mengundurkan diri sebagai anggota Direksi. Febriany Eddy diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur dan Bernardus Irmanto, Vinicius Mendes Ferreira, Dani Widjaja dan Agus Superiadi sebagai Direktur. Direksi Perseroan ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paulic atas dedikasi dan komitmennya kepada Perseroan selama masa jabatannya.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ("GCG")

The Company strives to enhance and implement GCG practices, not only in line with regulations but also in accordance with best practices/international standards. GCG creates and sustains long-term relationships with all of our shareholders and stakeholders. The GCG practices refer to OJK provisions and international standards in the ASEAN Corporate Governance Scorecard framework consistent with parameters set by the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD").

For the Company, GCG implementation is a must, and we have embedded GCG awareness within all lines of our business and support functions, supported by appropriate systems and infrastructure, to improve the Company's reputation and support the future business development.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ("CSR")

Our Integrated Community Development Program ("PTPM") is still in place to encourage sustainable micro business development together with the Ministry of Villages, Underdeveloped Regions, and Transmigration. This 5-year CSR program has now become more district-focused in the hope of encouraging reporting accountability, capacity building, and effectiveness. We make sure the program is aligned with local potential, community engagement and make sure the program does not overlap with the government's programs.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

During 2019 there were changes to the Board of Directors' composition. At the Annual General Meeting of Shareholders held on April 2, 2019, Lovro Paulic resigned as a member of the Board of Directors. Febriany Eddy was appointed as Vice President Director, and Bernardus Irmanto, Vinicius Mendes Ferreira, Dani Widjaja and Agus Superiadi as Directors. The Board of Directors of the Company would like to thank Mr. Paulic for his dedication and commitment to the Company during his tenure.



Komposisi Direksi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors' composition as at December 31, 2019 is as follows:

Jabatan	Nama Name	Position
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Febriany Eddy	Vice President Director
Direktur	Bernardus Irmanto	Director
Direktur	Vinicius Mendes Ferreira	Director
Direktur	Dani Widjaja	Director
Direktur	Agus Superiadi	Director

APRESIASI

Sebagai penutup, atas nama Direksi, saya ingin menyampaikan penghargaan tertinggi kepada semua pemegang saham, pekerja, dan pelanggan PT Vale atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada kami. Kami juga ingin memberikan penghargaan tertinggi kepada Dewan Komisaris untuk bimbingan mereka selama 2019. Prestasi kami tidak akan terwujud tanpa kerja sama yang erat, rasa saling percaya, dan semangat untuk terus tumbuh dan berinovasi. Saya yakin bahwa semangat budaya Perusahaan PT Vale - Keterbukaan dan Saling Menghormati, Kepedulian Lingkungan, Budaya Kinerja Tinggi, Kerjasama, Integritas Tinggi, Budaya Keselamatan - akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam kinerja kami sebagai sebuah perusahaan di masa yang akan datang.

Mari kita bertumbuh bersama.

APRECIATION

In closing, on behalf of the Board of Directors, I would like to express our highest appreciation to all PT Vale shareholders, employees and customers for their trust and support given to us. We also would like to give our highest appreciation to the Board of Commissioners for their guidance during 2019. Our achievements would not have been realized without this close cooperation, mutual trust and the spirit to continue to grow and innovate. I am confident that the spirit of PT Vale's Company cultures – Openness and Mutual Respect, Environmental Concern, High Performance Culture, Cooperation, High Integrity, Safety Culture – will be decisive success factors in our performance as a company in 2020 and beyond.

Let's grow together.

Terima Kasih | Thank you
Atas Nama Direksi | On behalf of the Board of Directors

PT Vale Indonesia Tbk



NICOLAS D. KANTER

Presiden Direktur | President Director



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report

Dewan Komisaris menganggap prospek usaha 2020 yang direncanakan oleh Direksi cukup realistis dan sejalan dengan pandangan Dewan Komisaris. Perseroan berada pada posisi yang baik di pasar dan di Indonesia.

The Board of Commissioners consider the 2020 business prospects designed by the Board of Directors to be realistic and in-line with the Board of Commissioners view. The Company is well placed in the market and within Indonesia.



KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Atas nama Dewan Komisaris PT Vale, saya menyampaikan laporan mengenai tugas dan tanggung jawab kami kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, sebagai bagian dari penatalayanan kami atas bisnis Perseroan.

Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dengan memperhatikan masalah keuangan, operasional, lingkungan dan tanggung jawab sosial, serta mengambil peran kepemimpinan dalam memastikan keunggulan praktik tata kelola. Dewan Komisaris menjaga objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Sepanjang tahun, Dewan Komisaris meninjau strategi Perseroan dan menyetujui arah kebijakan yang diambil oleh Perseroan.

Industri nikel terus berubah dengan cepat, terutama di Indonesia. Pada bulan Januari 2020, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kembali persyaratan pemrosesan dalam negeri untuk semua bijih nikel, termasuk bijih berkadar sedang dan rendah. Kami sepenuhnya mendukung inisiatif Pemerintah untuk mempromosikan pengembangan fasilitas pemrosesan yang berkelanjutan di Indonesia dan untuk mengoptimalkan nilai dari sumber daya nikel. Hal ini akan

DEAR SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

It is with great pleasure that on behalf of the Board of Commissioners of PT Vale, I present this report regarding our duties and responsibilities to the shareholders and stakeholders, as part of our stewardship of the Company's business.

The Board of Commissioners performs a supervisory function by overseeing the financial, operational, environmental and social responsibility matters, and takes a leadership role in ensuring excellence in governance practices. The Board of Commissioners maintains the objectivity and independency in performing its duties and responsibilities, in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

COMPANY STRATEGY IMPLEMENTATION REVIEW

Throughout the year, the Board of Commissioners reviewed the Company's strategies and is in agreement with the direction taken by the Company.

The nickel industry continues to change rapidly, especially in Indonesia. In January 2020 the Indonesian Government has reintroduced the domestic processing requirements for all nickel ore, including medium and low-grade ore. We fully support the initiative by the Government to promote the development of sustainable processing facilities in Indonesia and to optimize the value created from nickel resources. This will bring added value to Indonesia by creating more jobs and

membawa nilai tambah bagi Indonesia dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan ekspor. Sehubungan dengan ini, Dewan Komisaris setuju dengan strategi pertumbuhan di tiga provinsi di Sulawesi yang secara bersamaan memanfaatkan kesempatan yang ada dan juga mendukung kebijakan Pemerintah.

Namun pertumbuhan saja tidak cukup. Tahun 2019 telah menunjukkan bahwa keberlanjutan sangat penting untuk bisnis kita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dewan Komisaris memuji tindakan yang diambil oleh Perseroan untuk membawa keberlanjutan lebih jauh lagi dari apa yang dapat dilihat sekarang. Kejadian tragis jebolnya *tailing dam* di Brazil pada awal 2019 telah menunjukkan kepada seluruh industri pertambangan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas. Perseroan telah menanggapi seruan internasional ini pada tahun 2019, mengambil langkah-langkah untuk menanamkan budaya yang fokus pada keselamatan, sekaligus mengimplementasikan beberapa proyek yang terkait dengan keselamatan.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, PT Vale bersama dengan pemegang sahamnya, VCL dan SMM dan MIND ID menandatangani Perjanjian Pendahuluan, yang merupakan awal dari proses divestasi. Hal ini dilakukan mengikuti penunjukan MIND ID sebagai perwakilan Pemerintah untuk mengakuisisi saham divestasi PT Vale dalam rangka memenuhi kewajiban divestasi PT Vale. Pada tanggal 19 Juni 2020, PT Vale diberitahu oleh para pemegang sahamnya, VCL dan SMM bahwa mereka telah menandatangani perjanjian-perjanjian definitif untuk penjualan 20% saham di PT Vale kepada MIND ID. Divestasi ini memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk menjalin kemitraan strategis jangka panjang yang akan menempatkan Perseroan pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan di Indonesia. MIND ID memiliki visi besar untuk nikel, dan untuk Indonesia sebagai salah satu pemain nikel terbesar, dan kami menyambut mereka sebagai pemegang saham.

boosting exports. In light of this, the Board of Commissioners agrees with the Company's growth strategy. The Company's strategy of growth in three provinces in Sulawesi will see the Company simultaneously take advantage of and support the Government policy.

Yet growth alone is not enough. 2019 has shown us that more than ever, sustainability is essential for our business. The Board of Commissioners applauds the actions taken by the Company to bring sustainability even further into the spotlight. The tragic rupture of a tailings dam in Brazil in early 2019 has shown the entire mining industry that safety must be the priority. The Company has responded to this global call in 2019, taking steps to instill a safety-obsessed culture while implementing several safety-related projects.

On October 14, 2019, PT Vale, together with its shareholders, VCL and SMM and MIND ID signed a Heads of Agreement, representing the beginning of the divestment process. This followed the appointment of MIND ID as the Government representative to acquire PT Vale's divested shares, to fulfil PT Vale's divestment obligation. On June 19, 2020 PT Vale were informed that its shareholders, VCL and SMM have signed the definitive agreements for the sale of a 20% stake in PT Vale to MIND ID. This divestment offers the Company the opportunity to forge a long-term strategic partnership that will set the Company on a firm path for future sustainable growth in Indonesia. MIND ID has a grand vision for nickel, and for Indonesia becoming one of the largest nickel players, and we welcome them as a shareholder.



TINJAUAN KINERJA USAHA

Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada Perseroan atas seluruh pencapaian kinerja di masa-masa yang penuh tantangan ini. Meskipun produksi tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, Dewan Komisaris mencatat inisiatif pengurangan biaya yang terus dilakukan dan upaya peningkatan operasional yang dilakukan seiring dengan perbaikan pada budaya perilaku

Seperti disebutkan di atas, operasi yang aman dan berkelanjutan sangat penting. Dewan Komisaris mencatat keberhasilan penyelesaian proyek pelapisan kanal Larona. Proyek ini membutuhkan periode penghentian beberapa kegiatan operasi yang signifikan dan memengaruhi produksi, tetapi merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar kami berada.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Terlepas dari tantangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain fluktuasi yang signifikan di pasar nikel, serta kegiatan pemeliharaan, baik yang terencana maupun tidak, Dewan Komisaris menganggap bahwa Direksi dapat mengatasi tantangan dengan bekerja sama sebagai sebuah tim dan menutup tahun 2019 dengan mencatat kenaikan 4% dalam Laba Operasional (tahunan) dan dengan mencatatkan berbagai pencapaian. Mereka melihat adanya kebutuhan untuk berubah sambil tetap menjaga supaya Perseroan berada pada jalur pertumbuhan ke depan sesuai pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas kepemimpinan, komitmen, dan kerja keras mereka yang kuat.

Dampak dari pekerjaan perbaikan pada tanur listrik 4 yang tidak terencana pada semester pertama mengakibatkan produksi tahun ini di bawah target, dan kami ingin mengingatkan Direksi bahwa mereka perlu memastikan semua pemeliharaan ke depan dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan. Perseroan sudah menanggapi seruan ini dan perbaikan sedang dilakukan.

BUSINESS PERFORMANCE REVIEW

The Board of Commissioners congratulates the Company on overall performance in these challenging times. Even though this year production was lower compared to last year, however the Board of Commissioners notes the ongoing cost reductions initiatives and operational improvements that have been implemented along with key improvements in behavioral culture.

As noted above, safe and sustainable operations are essential. The Board of Commissioners notes the successful completion of the Larona canal lining project. This project required a significant shutdown period, and thus impacted production, but was an important and necessary step to ensure the safety of our people and the communities around us.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Despite the challenges driven by among others, significant fluctuation in nickel market as well as planned and unplanned maintenance activities, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors was able to surmount the challenges by working together as a team and closed the fiscal year 2019 by recording 4% increase in the Operating Profit (YoY) and with achievements. They see the need to change while keeping the Company on a forward trajectory. The Board of Commissioners offers its appreciation to the Board of Directors for their strong leadership, commitment and hard work.

The impact of the unplanned electric furnace 4 repair work in the first half resulted in this year's production being below target, and we would like to remind the Board of Directors that they need to ensure all future maintenance is conducted in a scheduled manner. The Company is already responding to this call, and improvements are underway.

Dewan Komisaris menghargai Direksi yang memberikan fokus pada keselamatan sebagai bentuk aktual dari salah satu nilai, "Value Our People". Mereka menggunakan sistem Kaizen sebagai alat untuk menjalankan VPS. Model ini fokus pada pemberian hasil melalui implementasi kebijakan, praktik, serta standar yang mendalam dan komprehensif. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk menyelenggarakan kegiatan operasi yang aman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta menjamin integritas dari aset maupun pekerja kami. VPS memperkuat budaya organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia, standarisasi praktik terbaik, disiplin operasional, dan kepatuhan atas rutinitas pekerjaan.

Kami sangat bangga dengan upaya Perseroan yang berhasil mendapatkan penghargaan PROPER Hijau pertama pada bulan Desember 2019. Kami tahu bahwa banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai tahap ini dan kami memberikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang terlibat. Penghargaan ini membuktikan komitmen Perseroan sebagai perusahaan pertambangan terintegrasi untuk mempertahankan lingkungan operasi penambangan dan pemrosesan nikel.

Kami hanya dapat mengulangi dua kutipan dari Agus Superiadi, Direktur Support and Site Service; "Ini adalah pencapaian yang luar biasa, yang tentunya didukung oleh komitmen yang sangat tinggi dari Manajemen dan kerja tim yang sangat solid. Semoga prestasi ini menambah motivasi dan antusiasme untuk semakin maju dengan inovasi selanjutnya. Itu menjadi kebanggaan kita bersama karena pencapaian ini adalah pertama kalinya untuk penambangan dan pengolahan nikel terintegrasi di Indonesia". PT Vale juga bekerja untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sejalan dengan target Perseroan".

Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penghargaan, kami juga mencatat bahwa Perseroan diakui sebagai tolok ukur untuk penambangan berkelanjutan, kerja sama dengan pemerintah: pembangkit listrik tenaga air, dan program pemberdayaan masyarakat.

The Board of Commissioners appreciate the Board of Directors' focus on safety as an actual form of one of the Company's value, "Value Our People". They use the Kaizen system as a tool to embrace the VPS. This model focuses on delivering results through deep and comprehensive implementation of policies, practices and standards. This enables the Company to provide a safe and environmentally responsible operation that ensures the integrity of our assets and people. VPS strengthens the Company's organizational culture through people development, standardization of best practices, operational discipline and compliance with routine.

We are very proud of the Company's efforts that resulted in the Company's achieving the first Green PROPER status in December 2019. We know that much effort has gone on to achieving this status and we offer our sincere appreciation to all those involved. This award proves the Company's commitment as an integrated mining company to maintain its mining operations and nickel processing environment.

We can only reiterate two quotes from Agus Superiadi, our Director for Support & Site Services; "This is an extraordinary achievement, which is certainly supported by a very high commitment from Management and a very solid teamwork. Hopefully this achievement adds motivation and enthusiasm to be even better going forward with the next innovations. It becomes our mutual pride because this achievement is the first time for an integrated nickel mining and processing in Indonesia". PT Vale is also working to support the government's target in achieving Sustainable Development Goals that are in line with the Company's targets".

As demonstrated by various awards, we also note that the Company is recognized as a benchmark for its sustainable mining, cooperation with the government: hydro-generated power plants, and its community empowerment programs.



Proyek pertumbuhan kami di Pomalaa dan Bahodopi telah mengalami kemajuan. Proyek Pomalaa telah menyelesaikan semua tinjauan penilaian lingkungan dan dijadwalkan untuk mendapat persetujuan pada awal 2020, dan dengan perizinan lainnya yang diselesaikan dengan lebih cepat. Dewan Komisaris menghargai dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk investasi kelas dunia ini, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Proyek Bahodopi juga mencatatkan kemajuan dengan ditandatangani nota kesepahaman dengan mitra terpilih.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris berharap bahwa Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya untuk tumbuh secara berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan strategis dan dengan memprioritaskan kehati-hatian dalam pengambilan risiko, serta tetap patuh terhadap semua persyaratan peraturan.

FREKUENSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SARAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui rapat rutin Dewan Komisaris dan rapat gabungan yang diadakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.

Dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris juga mengoptimalkan peran Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit untuk meninjau kebijakan yang diterapkan dengan mempertimbangkan tata kelola yang baik, kepatuhan dan kontrol internal Direksi, dan pengendalian internal, serta peran Komite Mitigasi Risiko untuk meninjau kembali praktik prinsip kehati-hatian dalam pengambilan risiko oleh Direksi.

Pada 2019, Dewan Komisaris mengadakan 6 rapat dan 3 pertemuan bersama dengan Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan peningkatan tata kelola perusahaan dan situs web Perseroan untuk memenuhi standar nasional dan internasional, serta mengikuti kebijakan manajemen risiko. Direksi juga melibatkan Komisaris Independen dalam sejumlah diskusi mengenai hal-hal strategis untuk memastikan persamaan hak para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Our growth projects in Pomalaa and Bahodopi have progressed. The Pomalaa project has completed all reviews of the environmental assessment, which is slated for approval in early 2020, and with other permitting actions moving forward with greater speed. The Board of Commissioners appreciates the support shown by the Indonesian government for this world class investment opportunity, particularly the Investment Coordinating Body (BKPM). Our Bahodopi project is also proceeding, with a memorandum of understanding signed with selected partner.

Moving forwards, the Board of Commissioners hope that the Company could continuously improve its performance to grow sustainably, in accordance with the strategic policies and by prioritizing prudence in risk taking and compliance with regulatory requirements.

FREQUENCY AND MANNER OF GIVING ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTOR

The supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners were carried out through, among others, routine meetings of the Board of Commissioners and joint meetings held by the Board of Commissioners together with the Board of Directors.

In providing advices and recommendations to the Board of Directors, the Board of Commissioners also optimizes the role of the Governance, Nomination and Remuneration Committee and the Audit Committee to review the policies implemented by the Board of Directors by considering proper governance, compliance and internal control, as well as the role of the Risk Mitigation Committee to review the practice of prudence principle in risk taking by the Board of Directors.

In 2019, the Board of Commissioners held 6 meetings in addition to 3 joint meetings with the Board of Directors. The Board of Commissioners also provided advice and recommendations to the Board of Directors with respect to the improvement of corporate governance and the Company's website to meet national and international standards, as well as in keeping abreast of the enterprise risk management policy. The Board of Directors also involve the Independent Commissioners in a number of discussions of strategic matters to ensure equal rights of the shareholders, particularly minority shareholders.

TINJAUAN PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris menganggap prospek usaha 2020 yang direncanakan oleh Direksi cukup realistis dan sejalan dengan pandangan Dewan Komisaris. Perseroan berada pada posisi yang baik di pasar dan di Indonesia.

Kerja sama strategis dengan MIND ID akan memperkuat posisi Perseroan sebagai mitra pilihan untuk pertumbuhan nikel Indonesia. Dengan dorongan Pemerintah untuk lebih banyak melakukan investasi dalam fasilitas pemrosesan nikel, kami memosisikan diri untuk bisa mengambil kesempatan ke depan dan sepenuhnya sejalan dengan visi ini. Kami telah mengalami kemajuan dalam persiapan proyek investasi Pomalaa dan Bahodopi berkat dukungan yang kuat dari Pemerintah selama proses perizinan.

Produk nikel matte serbaguna milik Perseroan sangat cocok untuk pertumbuhan jangka panjang yang diharapkan di sektor kendaraan listrik. Pertumbuhan permintaan yang diharapkan akan memicu optimisme pada harga nikel untuk jangka panjang. Selain itu, fokus Perseroan pada keberlanjutan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

TINJAUAN KINERJA TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dengan semakin meningkatnya pengawasan terhadap operator di seluruh industri global, pentingnya Tata Kelola Perusahaan ("CG") tidak dapat diabaikan. Dewan Komisaris didukung penuh oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan bimbingan dan saran kepada Direksi, dengan menekankan penerapan praktik-praktik terbaik dalam CG dan pemenuhan kepatuhan. Sementara, Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi proses dan tata kelola integritas, serta praktik pengendalian internal.

Dewan Komisaris menganggap bahwa Direksi telah secara efektif menerapkan CG berdasarkan standar yang diterima secara nasional dan internasional, dalam memastikan kesetaraan hak pemegang saham, pelibatan pemangku kepentingan serta pengungkapan informasi yang tepat waktu dan akurat. Pada tahun 2019, Perseroan meningkatkan praktik manajemen risiko dan pengawasannya dengan mengadopsi tiga lini pertahanan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian bisnis Perseroan melalui pengelolaan risiko yang efektif.

BUSINESS PROSPECTS REVIEW

The Board of Commissioners consider the 2020 business prospects designed by the Board of Directors to be realistic and in-line with the Board of Commissioners view. The Company is well placed in the market and within Indonesia.

The strategic alliance with MIND ID will solidify our position as the partner of choice for Indonesian nickel growth. With the government pushing for more investment in nickel processing facilities, we stand to gain by being fully in line with this vision. We are well advanced in our preparations for Pomalaa and Bahodopi investments, with strong Government support in the permitting process.

The Company's versatile nickel matte product is a good fit for the expected long-term growth in the electric vehicle sector. The expected growth in demand is fueling optimism in the long-term nickel price. Furthermore, The Company's focus on sustainability is critical for the Company to meet customer and other stakeholders demands.

CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE REVIEW

With increasing scrutiny on operators across the global industry, the importance of Corporate Governance ("CG") cannot be understated. The Board of Commissioners is fully supported by the Governance, Nomination and Remuneration Committee in providing guidance and advice to the Board of Directors, which emphasize best practices in CG and meets compliance. While the Audit Committee supports the Board of Commissioners in overseeing the process and integrity governance and internal control practices.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has effectively implemented CG based on the nationally and internationally accepted standards, in ensuring the equal rights of the shareholders, involvement of stakeholders as well as timely and accurate disclosure. In 2019, the Company improved its risk management practices and control by adopting the three lines of defense with single objective to support achieving the Company's business purposes through an effective risk management.



Antikorupsi dan kasus suap terus menjadi fokus utama, sesuai kode etik Perseroan. Dewan Komisaris mencatat tren di Indonesia dan secara global untuk tetap patuh, serta bangga dengan upaya Perseroan untuk menjadi pemimpin di bidang ini. Perseroan dilengkapi dengan berbagai perangkat yang memadai, seperti Kode Etik dan Perilaku, serta Vale Whistleblowing Channel, untuk memastikan bahwa praktik-praktik Perseroan diimplementasikan secara konsisten dan terus menerus dengan transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, serta tetap menjaga reputasi Perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Komitmen kuat dan upaya terus-menerus dalam penerapan CG diakui oleh Lembaga pemberi penghargaan dalam penerapan CG mendapatkan pengakuan dengan didaparkannya penghargaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan instrumen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk kategori yang "Paling Meningkatkan" oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Setelah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, Perseroan telah mempertahankan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan lokal dan terus menerus mengembangkan komunitas yang mandiri dan lingkungan yang berkelanjutan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Perseroan terus berpartisipasi dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang fokus pada target nasional dan regional, melalui Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat ("PPM"). Program ini menyatukan tujuan berkelanjutan Perseroan, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Program PPM yang dikembangkan pada tahun 2019 antara lain, pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, pertanian herbal, pengembangan usaha mikro dan menengah, dan pengembangan daerah pedesaan mandiri melalui peningkatan kapasitas. Program-program ini telah menghasilkan peningkatan ekonomi lokal dan kualitas kesehatan, kualitas produk yang kompetitif dan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas lingkungan.

Anti-corruption and bribery continue to be a key focus, as well as the Company's code of ethical conduct. The Board of Commissioners notes the trends in Indonesia and globally to implement extensive corporate compliance programs and is proud of the Company's efforts to be a leader in this area. The Company is equipped with proper tools, such as Code of Ethics and Conduct and Behavior and Vale Whistleblowing Channel, to ensure that the Company's practices are implemented consistently and continuously in a transparent, accountable, responsible, independent and fair manner while maintaining the Company's reputation to benefit both the majority and minority shareholders.

The Company's strong commitment and continuous efforts in the implementation of CG is recognized by the best issuer award in good corporate governance implementation based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment Instrument for "Most Improved" Category by the Indonesian Institute for Corporate Directorship.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Having operated for more than 50 years, the Company has maintain a good relationship with the local stakeholders and continuous to develop an independent community and sustainable environment through corporate social responsibility programs.

The Company continues to participate in achieving the Government's Sustainable Development Goals which focus on the national and regional targets, through the Company's Community Empowerment and Development ("PPM") Programs. This program synergies the sustainable goals of the Company, the local government and the local community.

The Company's PPM Program developed in 2019 among others, environmentally friendly and sustainable agriculture, herbal farming, development of micro and medium scale business, and development of independent rural area through capacity building. These programs have resulted in the improvement of local economy and health quality, competitive product quality and contribution in increasing the environmental capacity.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019, para pemegang saham menerima pengunduran diri Robert Alan Morris dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak 1 Januari 2019; dan menunjuk Luiz Fernando Landeiro sebagai Komisaris untuk menggantikan Robert Alan Morris.

Kemudian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019, pemegang saham menerima pengunduran diri Eduardo Bartolomeo dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, efektif sejak 1 Juni 2019; dan menunjuk Mark James Travers sebagai Presiden Komisaris untuk menggantikan Eduardo Bartolomeo. Para pemegang saham juga menunjuk Mahendra Siregar sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen dan Cory McPhee sebagai Komisaris.

Pada 4 November 2019, Mahendra Siregar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen karena pengangkatannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Pengunduran diri ini berlaku surut hingga 25 Oktober 2019 setelah diterima oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020.

Dalam hal ini, Dewan Komisaris ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Eduardo Bartolomeo, Robert Alan Morris dan Mahendra Siregar atas kontribusi dan dedikasi mereka yang berharga bagi Perseroan selama masa jabatannya.

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, the shareholders accepted the resignation of Robert Alan Morris from his position as Commissioner of the Company, effective from January 1, 2019; and appointed Luiz Fernando Landeiro as a Commissioner to replace Robert Alan Morris.

Later in the 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders, the shareholder accepted the resignation of Eduardo Bartolomeo from his position as President Commissioner, effective from June 1, 2019; and appointed Mark James Travers as the President Commissioner to replace Eduardo Bartolomeo. The shareholders also appointed Mahendra Siregar as Vice President Commissioner and Independent Commissioner and Cory McPhee as Commissioner.

On November 4, 2019, Mahendra Siregar resigned from his position as Vice President Commissioner and Independent Commissioner due to his appointment as the Vice Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The resignation is to be effective retroactively to October 25, 2019 upon acceptance of the shareholders at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

In this regard, the Board of Commissioners would like to express the highest gratitude and appreciation to Eduardo Bartolomeo, Robert Alan Morris and Mahendra Siregar for their valuable contributions and dedication to the Company during their tenure.

The composition of members of the Board of Commissioners as at December 31, 2019 is as follows:

Jabatan	Nama Name	Position
Presiden Komisaris	Mark James Travers	President Commissioner
Komisaris	Luiz Fernando Landeiro	Commissioner
Komisaris	Cory McPhee	Commissioner
Komisaris	Nobuhiro Matsumoto	Commissioner
Komisaris Independen	Raden Sukhyar	Independent Commissioner



APRESIASI

Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kami kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kontribusi dan kepercayaan mereka sepanjang tahun 2019.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada semua anggota Direksi dan manajemen atas komitmen, kepemimpinan, dan kerja keras yang kuat dalam membantu Perseroan dalam mencapai posisi seperti saat ini di industri pertambangan.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras, antusiasme, dan komitmen untuk semua pekerja unggul kami, yang tanpanya, Perseroan tidak akan memiliki kinerja yang baik dan pencapaian sepanjang 2019.

Dengan penuh keyakinan, kami menantikan tahun-tahun di depan untuk melanjutkan komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan dan kepedulian terhadap manusia dan alam, sesuai dengan standar global.

Mari kita wujudkan bersama.

APPRECIATION

Finally, on behalf of Board of Commissioners, I would like to express our appreciation and gratitude to our shareholders and stakeholders for their contributions and trust throughout 2019.

We also extend our appreciation to all members of the Board of Directors and the management for their strong commitment, leadership and hard work in helping the Company reach its current place in the mining industry.

We send out our thanks to all our employees hard work, enthusiasm and commitment to excellence, without whom the Company would not have had good performance and recognized achievement throughout 2019.

With confidence, we look forward to the coming years of continued commitment to sustainable development in Indonesia, so that the Company can achieve its ultimate Vision to be Indonesia's number one natural resources company in creating long-term value, through excellence and passion for people and the planet, according to global standards.

Lets do it together.

Terima Kasih | Thank you

Atas Nama Dewan Komisaris | On behalf of the Board of Commissioners

PT Vale Indonesia Tbk



MARK JAMES TRAVERS

Presiden Komisaris | President Commissioner



Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Vale Indonesia Tbk

Board of Directors' and Board of Commissioners' Statement of Responsibility for the 2019 Annual Report of PT Vale Indonesia Tbk

● — Direksi | Board of Directors ← ●



NICOLAS D. KANTER

Presiden Direktur
President Director



FEBRIANY EDDY

Wakil Presiden Direktur
Vice President Director



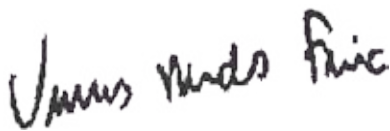
BERNARDUS IRMANTO

Direktur
Director



DANI WIDJAJA

Direktur
Director



VINICIUS MENDES FERREIRA

Direktur
Director



AGUS SUPERIADI

Direktur
Director



Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Tahun 2019 PT Vale Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2019 Annual Report of PT Vale Indonesia Tbk has been presented in its entirety, and that we assume full responsibility for the accuracy of the Company's Annual Report contents.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


This statement is hereby made in all integrity.

— Dewan Komisaris | Board of Commissioners —



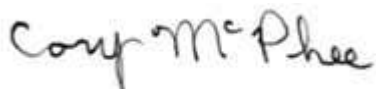
MARK JAMES TRAVERS

Presiden Komisaris
President Commissioner



MAHENDRA SIREGAR*

Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Vice President Commissioner and Independent Commissioner



CORY MCPHEE

Komisaris
Commissioner



LUIZ FERNANDO LANDEIRO

Komisaris
Commissioner



NOBUHIRO MATSUMOTO

Komisaris
Commissioner



RADEN SUKHYAR

Komisaris Independen
Independent Commissioner

* Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 4 November 2019, sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah disetujui oleh RUPS. Sejak tanggal surat pengunduran diri sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS tersebut, Bapak Mahendra Siregar tidak lagi aktif dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Mahendra Siregar submitted his resignation letter as the Company's Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019, following his appointment as the Deputy Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the resignation became effective upon approval at the GMS. Between the date of his resignation until the GMS, Mahendra Siregar was not active as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.



Profil Perusahaan

Company Profile

Selama lebih dari lima puluh tahun beroperasi di Indonesia, PT Vale terus berkembang menjadi perusahaan tambang nikel kelas dunia yang berkomitmen pada pertumbuhan berkelanjutan.

After more than fifty years in Indonesia, PT Vale is continuing to evolve into a world-class nickel mining company committed to sustainable growth.



Sekilas PT Vale Indonesia Tbk

PT Vale at A Glance

Nama Perusahaan Company Name	PT VALE INDONESIA TBK (PT VALE)	
	Perusahaan melakukan perubahan nama dari PT International Nickel Indonesia Tbk menjadi PT Vale Indonesia Tbk pada tanggal 27 September 2011 berdasarkan Akta Nomor 75, yang dibuat di Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.	The company changed its name from PT International Nickel Indonesia Tbk to PT Vale Indonesia Tbk on September 27, 2011 based on Deed Number 75, made before Notary Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.
	Tidak terjadi perubahan nama Perseroan pada tahun 2019.	There was no change to the Company's name in 2019.
Tanggal Pendirian Establishment Date	25 Juli 1968	July 25, 1968
Kode Saham Share Code	INCO	INCO
Tanggal Pencatatan di Bursa Stock Exchange Listing Date	16 Mei 1990 pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).	May 16, 1990 on the Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta Stock Exchange).
Modal Dasar Authorized Capital	39.745.354.880 saham, dengan nilai nominal IDR25 per saham.	39,745,354,880 shares, with par value of IDR25 per share.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Up Capital	9.936.338.720 saham, dengan nilai nominal IDR25 per saham.	9,936,338,720 shares, with par value of IDR25 per shares.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	The Energy Building SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Lantai 31 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: +62 21 524 9000 Faksimili: +62 21 524 9020 E-mail: ptvi-corpsec@vale.com	The Energy Building SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, 31 st Floor Jakarta 12190 Indonesia Telephone: +62 21 524 9000 Fax: +62 21 524 9020 E-mail: ptvi-corpsec@vale.com
Alamat Kantor Perwakilan Representative Offices Address	Makassar, Sulawesi Selatan Jl. Somba Opu, PO Box 1143 Makassar 90001, Sulawesi Selatan Indonesia Telepon: +62 411 873731, 873732 Faksimili: +62 411 856157	Makassar, Sulawesi Selatan Jl. Somba Opu, PO Box 1143 Makassar 90001, South Sulawesi Indonesia Telephone: +62 411 873731, 873732 Fax: +62 411 856157
Pabrik Pengolahan Processing Plant	Sorowako 92984 Sulawesi Selatan, Indonesia Telepon: +62 21 5249100 Faksimili: +62 21 5249557	Sorowako 92984 South Sulawesi, Indonesia Telephone: +62 21 5249100 Fax: +62 21 5249557
Kepemilikan Saham Shareholding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vale Canada Limited 58.73% 2. Publik Public 20.49% 3. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 20.09% 4. Vale Japan Limited 0.54% 5. Sumitomo Corporation 0.14% 	
Website	www.vale.com/indonesia	

Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis for Establishment

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93 Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2015 terjadi perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) pada tanggal 29 Juni 2015. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir berdasar Akta No. 37 tanggal 13 September 2019 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti S.H., sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2019. Perubahan tersebut disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0080297.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019.

The Company was established under Deed No. 49 dated July 25, 1968, drawn up before Eliza Pondaag, a public notary in Jakarta. The Company’s Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968, and published in Supplement No. 93 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. The Articles of Association have been amended several times. The Articles of Association was amended in 2015 under Deed No. 121, dated June 29, 2015, drawn up before Leolin Jayayanti S.H., a public notary in Jakarta, to reflect amendments to the Company’s Articles of Association as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Extraordinary GMS”) on June 29, 2015. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0938647.AH.01.02 Year 2015 dated July 3, 2015, and obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0948078 Year 2015 dated July 3, 2015.

The latest amendment to the Company’s Articles of Association was based on Deed No. 37 dated September 13, 2019 drawn up before Notary Leolin Jayayanti S.H., in accordance with the Extraordinary GMS decision dated August 16, 2019. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0080297.AH.01.02. Year 2019 dated October 9, 2019.



Informasi lebih lanjut mengenai Perseroan silakan menghubungi:

For further Company information please contact:

PT VALE INDONESIA TBK

The Energy Building, 31st Floor
SCBD Lot 11A

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 Indonesia

Telepon | Telephone: +62 21 524 9000

Faksimili | Fax: +62 21 524 9020

● **Corporate Secretary**
ptvi-corpsec@vale.com

● **Investor Relation**
ptvi.investorrelations@vale.com



Riwayat Singkat Perseroan

Brief History of the Company

1968

Pendirian PT Inco dan penandatanganan KK antara PT Inco dan Pemerintah Indonesia untuk konsesi berjangka tiga puluh tahun sejak dimulainya produksi komersial

Establishment of PT Inco and the signing of a COW between PT Inco and the Government of Indonesia for a thirty-year concession starting from the commencement of commercial production

1973

Pembangunan fasilitas pengolahan pirometalurgi satu lini di Sorowako

Construction of a single pyrometallurgical processing line in Sorowako

1978

PT Inco memulai produksi komersial

PT Inco initiates start of commercial production

1990

Inco Limited menjual 20% kepemilikan sahamnya di PT Inco kepada publik dan dicatatkan di bursa saham Indonesia

Inco Limited sells 20% of its shares in PT Inco to the public, which are listed on the Indonesian stock exchange

2011

RUPS tanggal 27 September 2011 menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT International Nickel Indonesia Tbk menjadi PT Vale Indonesia Tbk

GMS held on September 27, 2011 approved the change of Company name from PT International Nickel Indonesia Tbk to PT Vale Indonesia Tbk

2014

Perseroan dan Pemerintah Indonesia menandatangani amendemen KK sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

The Company and the Government of Indonesia signed an amendment to the COW as mandated by Law No. 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining

2019

Perjanjian Pendahuluan divestasi tahap kedua 20% saham Perseroan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Mining Industry Indonesia (MIND ID)

Heads of Agreement on the second divestment of 20% of the Company's shares with PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) or Mining Industry Indonesia (MIND ID)

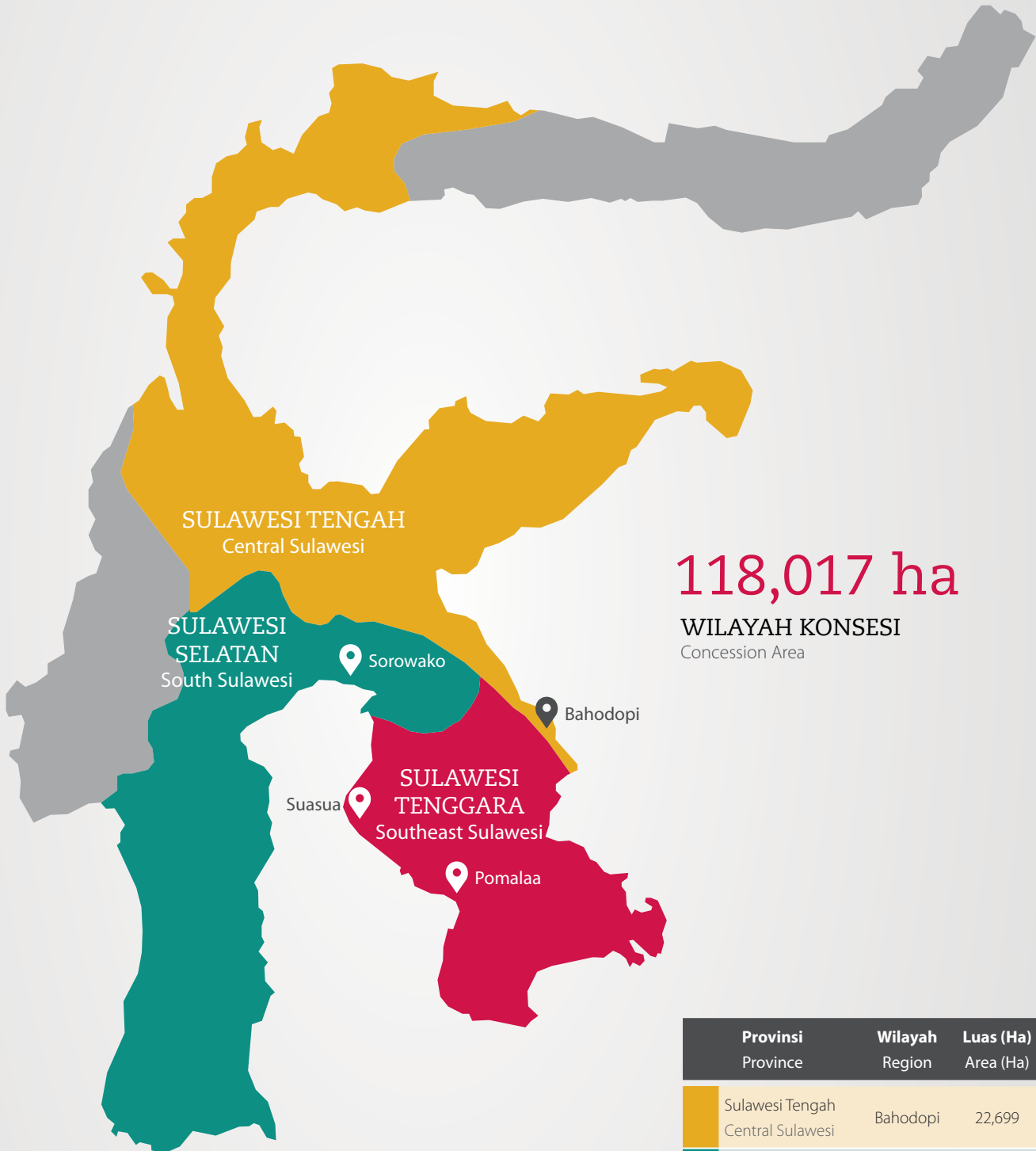
2018

Lima puluh tahun PT Vale berkontribusi bagi Indonesia dan dunia

Fifty years of PT Vale contributing to Indonesia and the world

Wilayah Konsesi

Concession Area



118,017 ha
WILAYAH KONSESI
 Concession Area

Provinsi Province	Wilayah Region	Luas (Ha) Area (Ha)
Sulawesi Tengah Central Sulawesi	Bahodopi	22,699
Sulawesi Selatan South Sulawesi	Sorowako	70,566
Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	Pomalaa	20,286
	Suasua	4,466



Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perseroan

Company Vision and Mission and Values

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala melakukan kaji ulang (*review*) atas Visi dan Misi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi menilai Visi dan Misi Perseroan masih relevan dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang Perseroan.

The Board of Commissioners and the Board of Directors periodically review the Company's Vision and Mission. The Board of Commissioners and the Board of Directors considers the Company's Vision and Mission still relevant to the Company's short and long-term goals.



VISI | Vision

Menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di Indonesia yang menggunakan standar global dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam.

To be Indonesia's number one natural resources company in creating long-term value, through excellence and passion for people and the planet, according to global standards.



MISI | Mission

Mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan.

To transform natural resources into prosperity and sustainable development.

NILAI-NILAI PERSEROAN | Company Value

Nilai-nilai Perseroan secara berkala disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan merupakan panduan semua pihak dalam melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Penerapan Nilai-nilai Perseroan telah mendorong terbangunnya budaya yang dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Perseroan.

The Company regularly disseminated its values to all employees as a guide for conducting operational activities in accordance with their respective responsibilities. The Company's Values encourage culture development to support the Company's Vision and Mission realization.



KEHIDUPAN ADALAH HAL YANG TERPENTING

Life matters most

Keselamatan jiwa lebih penting daripada keuntungan materi semata

Life is more important than results and material goods



MELAKUKAN HAL YANG BENAR

Do what is right

Mendukung terciptanya komunikasi yang berdasar pada rasa percaya, terbuka dan jelas, bertindak adil, penuh integritas dan tunduk pada aturan hukum

Promote trust-based, open and clear communication, act fairly, with integrity and in compliance with the law



MENGHARGAI KARYAWAN

Value our people

Membimbing dan membuka peluang bagi perkembangan individu, memberikan penghargaan terhadap prestasi seseorang tanpa memandang latar belakang mereka, mendukung keberagaman dan mengakui aspirasi serta kebutuhan individu

Nurture and enable personal growth, reward accomplishments regardless of individual background, promote diversity, and recognize individual aspirations and needs



BERSAMA-SAMA MENJADI LEBIH BAIK

Improve together

Berjuang untuk terjalannya kerja sama, perbaikan dan inovasi yang terus-menerus, penegakan disiplin kerja untuk meningkatkan nilai-nilai jangka panjang

Strive for collaboration, continuous improvement, innovation and discipline in the way we work to generate long-term value



MENJAGA KELESTARIAN BUMI

Prize our planet

Komitmen terhadap pengembangan masyarakat, lingkungan dan ekonomi dalam berbagai keputusan bisnis

Commitment to social, environmental and economic developments in business decisions



MEWUJUDKAN TUJUAN

Make it happen

Suka tantangan, kemampuan beradaptasi, bangga atas prestasi dan apa yang telah dilakukan dalam membentuk dunia

Thirst for challenges, ability to adapt, pride in results and how we shape the world



BUDAYA PERUSAHAAN | Company Culture

Budaya kerja Perseroan berlaku bagi seluruh karyawan tanpa terkecuali, dan bertujuan untuk menjaga sikap dan perilaku serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.

The Company's work culture applies to all employees without exception, and is aimed at maintaining their attitudes and behavior, and at creating a comfortable work environment.

Budaya Kerja Work Culture		
<p>"Kami saling mempercayai dan membangun tempat kerja yang diinginkan semua orang. Kami mendorong pengembangan dan pengakuan personal serta profesional berdasarkan meritokrasi."</p> <p>Yang kami inginkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi semua orang; • Untuk dinilai, diakui, dan dihargai berdasarkan kinerja (meritokrasi); • Berbagi tanggung jawab dan secara jelas membicarakan peran setiap orang; • Bertanggung jawab atas pengembangan diri dan mempromosikan pengembangan orang lain; • Mengatasi kinerja rendah; • Menawarkan dan menerima umpan balik yang terbuka dan adil secara berkala 	<p>Keterbukaan dan Saling Menghargai Antarpekerja Openness and Mutual Respect</p>	<p>"We trust each other and build a desired workplace for everyone. We encourage personal and professional development and recognition based on meritocracy."</p> <p>What we want:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To create a positive work environment for everyone; • To be evaluated, recognized, and rewarded based on performance (meritocracy); • To share responsibility and to clearly talk about everyone's role; • To take responsibility for our own development and to promote the development of others; • To address low performance; • To offer and receive open and fair feedback on a regular basis
<p>"Kami berkomitmen pada pengembangan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam keputusan bisnis."</p> <p>Yang kami inginkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kontribusi pada pembangunan daerah di wilayah operasional dan meninggalkan warisan yang berkelanjutan untuk masa depan; • Menyertakan keberlanjutan dalam kegiatan sehari-hari, menerapkan praktik terbaik sosial dan lingkungan; • Mempraktikkan konsumsi berkelanjutan: bahan daur ulang, penggunaan kembali air dan meningkatkan efisiensi energi; • Menghormati perbedaan politik dan budaya di setiap lokasi; • Mengidentifikasi dampak kegiatan terhadap masyarakat di tempat kami beroperasi 	<p>Peduli Lingkungan Environmental Concern</p>	<p>"We commit ourselves to economic, social and environmental development in our business decisions."</p> <p>What we want:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To contribute to local development in the regions where we operate and leave a sustainable legacy for the future; • To include sustainability in our daily activities, adopting social and environmental best practices; • To practice sustainable consumption: recycling materials, reusing water and promoting energy efficiency; • To respect political and cultural differences in each location; • To identify the impacts of our activities in the communities where we operate
<p>"Kami terlibat, bertanggung jawab dan memiliki disiplin untuk memberikan hasil sembari mengatasi tantangan. Kami fokus pada keunggulan."</p> <p>Yang kami inginkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertindak dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa memiliki, demi kepentingan terbaik Perseroan; • Bekerja dengan disiplin dan efisien untuk meningkatkan produktivitas; • Mengidentifikasi akar penyebab masalah untuk menghindari pengulangan masalah; • Merencanakan, menetapkan tujuan yang jelas, dan melaksanakan kegiatan secara efektif; mengkaji dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi hasil; • Bekerja ekstra dan mempertimbangkan tantangan sebagai peluang pengembangan 	<p>Kinerja Tinggi High Performance Culture</p>	<p>"We are engaged, responsible and have the discipline to deliver results while overcoming challenges. We focus on excellence."</p> <p>What we want:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To behave responsibly, with a sense of ownership, for the best interest of the Company; • To work with discipline and efficiency to increase productivity; • To identify the root cause of issues in order to avoid recurrences; • To plan, set clear goals, and execute activities effectively; to assess and control risks that may influence results; • To go the extra mile and consider challenges as development opportunities

Budaya Kerja | Work Culture

"Kami percaya pada kekuatan kerja sama, kolaborasi antar departemen pada semua tingkat hirarkis, serta mempromosikan penyederhanaan, perbaikan terus-menerus dan penciptaan nilai jangka panjang."

Yang kami inginkan:

- Memercayai satu sama lain;
- Bertingkah laku sebagai tim dan bekerja menuju tujuan bersama;
- Berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai hasil yang berkelanjutan;
- Mendorong perbaikan terus-menerus dan berbagi pengetahuan dan praktik terbaik;
- Mendorong pembelajaran, inovasi dan untuk menerima gagasan baru;
- Solusi yang menciptakan nilai jangka panjang bagi Perseroan dan pemangku kepentingan kami

**Kerja Sama
Cooperation**

"We believe in the power of teamwork, collaboration among departments and all hierarchical levels, and promote simplification, continuous improvement and long-term value creation."

What we want:

- To trust each other;
- To behave as a team and to work towards common goals;
- To collaborate with each other to achieve sustainable results;
- To encourage continuous improvement and to share knowledge and best practices;
- To encourage learning, innovation and to be receptive to new ideas;
- To develop solutions that create long-term value for our Company and for our stakeholders

"Kami membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan kami mempromosikan komunikasi terbuka dan transparan, didasari rasa hormat dan integritas".

Yang kami inginkan:

- Bertindak sesuai dengan pedoman dan peraturan Kode Etik dan Aturan Perilaku;
- Fokus pada mencari solusi dan memecahkan masalah;
- Komunikasi dan dialog yang transparan;
- Bertindak sejujurnya, terbuka dan penuh hormat dengan semua orang: rekan kerja, pelanggan, pemasok, masyarakat, serikat pekerja, pemerintah, dll;
- Memperlakukan pemasok kami sebagai mitra, memastikan hubungan yang adil;
- Melaporkan perilaku tidak jujur dan tidak etis;
- Menghormati perbedaan dan menjunjung inklusivitas

**Integritas Tinggi
High Integrity**

"We build our relationships based on trust and we promote open and transparent communication, all with respect and integrity".

What we want:

- To behave according to the Code of Ethics and Conduct and the Human Rights policy and rules;
- To focus on finding solutions and solving problems;
- To communicate transparently;
- To behave frankly, openly and respectfully with everyone: colleagues, customers, suppliers, communities, unions, governments, etc.;
- To treat our suppliers as partners, ensuring fair relationships;
- To report dishonest and unethical behaviors;
- To respect differences and uphold inclusivity

"Hidup lebih penting daripada hasil dan barang material, kami mewujudkan visi ini dalam keputusan bisnis."

Yang kami inginkan:

- Kepedulian yang aktif: kami peduli dengan diri kami dan kami memberikan kesempatan orang lain untuk peduli;
- Menjadi contoh dengan secara aktif terlibat dalam hal kesehatan dan keselamatan di dalam dan di luar tempat kerja;
- Terus melakukan inspeksi dan mengendalikan risiko, baik sebelum dan sesudah terjadinya perubahan di tempat kerja;
- Memiliki peralatan, perlengkapan, dan lingkungan kerja yang tepat untuk dapat melakukan aktivitas;
- Mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan sepanjang keseluruhan siklus proyek kami;
- Melaksanakan hak untuk menolak pekerjaan yang tidak aman

**Keselamatan Kerja
Safety Culture**

"Life is more important than results and material goods, we embody this vision in our business decisions."

What we want:

- To conduct ourselves with active genuine care: to care about ourselves, to care about others and to let other people care about us;
- To be an example by actively engaging in health and safety inside and outside our workplace;
- To continuously conduct inspections and control risks, both before and after changes in the workplace;
- To have the right equipment, tools and work environment to be able to perform our activities;
- To consider health and safety throughout the entire cycle of our projects;
- To exercise the right to refuse unsafe work.

Sosialisasi Budaya Kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain Action for Integrity, Environment Week, Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Prevention Week & Day of Reflection, Leadership Academy, dan Contractor Safety Forum.

The work culture is socialized through various activities including: Action for Integrity, Environment Week, Occupational Health and Safety Month, Prevention Week & Day of Reflection, the Leadership Academy, and Contractor Safety Forum.



Perilaku Utama

Key Behaviours

Pada tahun 2019, Perusahaan menetapkan empat perilaku utama sebagai dasar budaya Perseroan kami: obsesi terhadap keselamatan dan risiko, menciptakan dialog yang terbuka dan transparan, pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan dengan akuntabilitas dan manajemen kinerja serta rasa memiliki secara keseluruhan.

In 2019, the Company established four key behaviors upon which our corporate culture is based: be obsessed with safety and risk, create open and transparent dialogue, develop people through empowerment with accountability and performance management and take ownership for the whole.

1

Terobsesi terhadap Keamanan dan Risiko

- Membuat keputusan dengan mengutamakan keselamatan dan kehidupan manusia di atas aset dan hasil lainnya
- Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan untuk semua pemangku kepentingan
- Menunjukkan kepemimpinan terkait keamanan secara terbuka dan dapat dirasakan melalui tindakan terukur
- Mendorong percakapan tentang dilema keamanan, masalah operasional dan tanda-tanda kontroversial

Be obsessed with safety and risk

- Makes decisions by putting people's safety and life before assets and other outcomes
- Identifies and manages risks associated with its activities for all stakeholders
- Demonstrates security leadership in a visible and perceived way through measurable actions
- Stimulates conversation about security dilemmas, operational issues and controversial signs

2

Dialog Terbuka dan Transparan

- Berfokus pada paparan dan pemecahan masalah
- Mengajukan pertanyaan dan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada jawaban
- Mendorong semua orang untuk mengekspresikan ide dan pendapat mereka
- Mendorong pembelajaran dari kesalahan
- Menghargai pluralitas profil

Open and Transparent Dialogue

- Focuses on exposure and problem solving
- Ask questions and demonstrate genuine interest in the answers
- Encourages all people to express their ideas and opinions
- Encourages learning from mistakes
- Values the plurality of profiles

3

Mengembangkan Orang Melalui Pemberdayaan Bersama

- Memberdayakan orang untuk menggunakan semua potensi mereka secara optimal
- Memberikan umpan balik berkelanjutan secara konstruktif
- Berkomitmen pada pengembangan individu orang
- Mengelola tim berdasarkan meritokrasi

Developing People through empowerment with accountability and performance management

- Empower people to have all their potential happen hit optimum performance
- Provides continuous feedback constructively
- Commits to the individual development of people
- Manages the team in a meritocratic way

4

Kepemilikan secara Menyeluruh

- Bertindak sistematis, berusaha memahami hubungan antara pihak-pihak, peran yang berbeda dan tidak hanya berpikir dalam cakupan sendiri
- Memprioritaskan solusi berkelanjutan dilandasi dengan kesadaran akan urgensi
- Mempertanyakan *status quo* dan menguji berbagai pendekatan
- Bekerja bersama untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar

Take Ownership for the whole

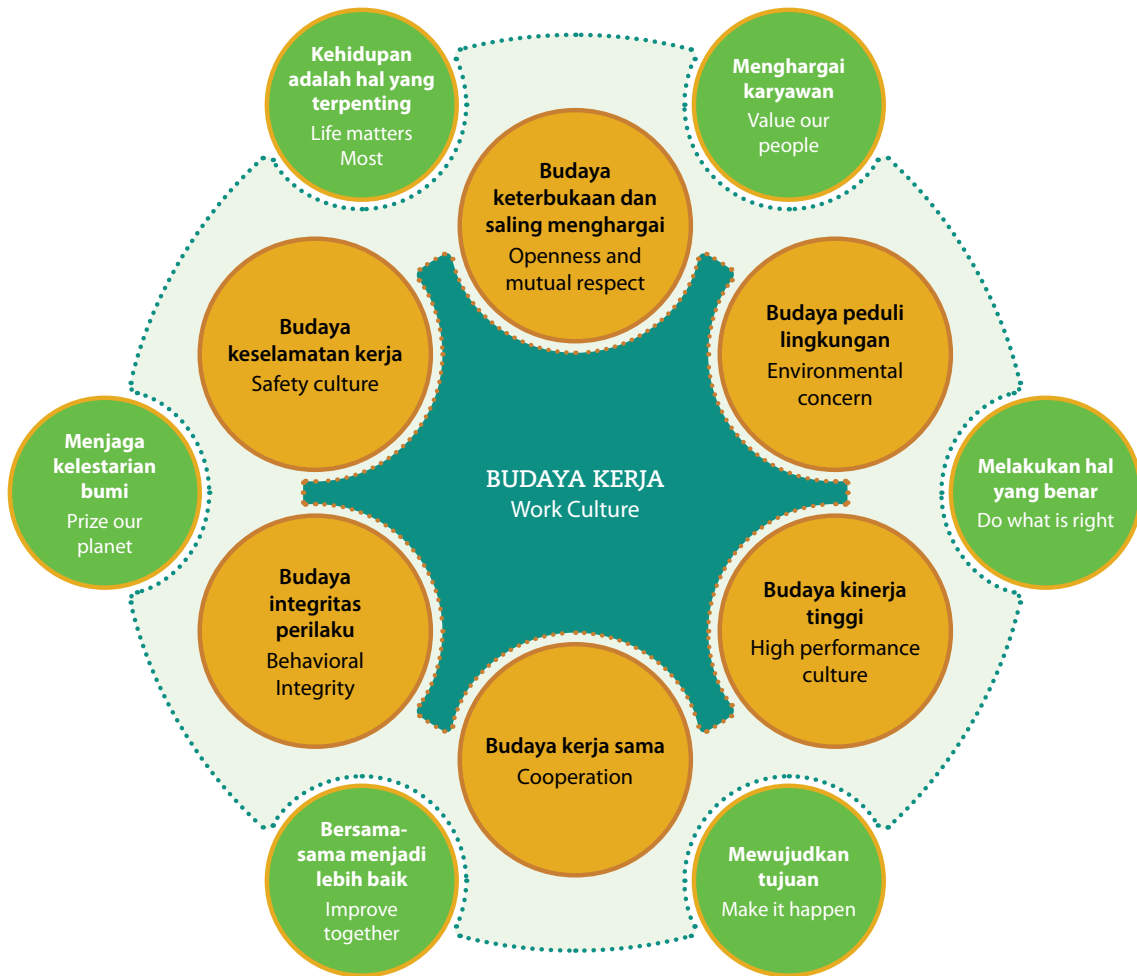
- Acts systemically, seeking to understand the relationship between the parties, the different roles and not only think in their area
- Prioritizes sustainable solutions with a sense of urgency
- Questions the status quo and tests different approaches
- Works together to generate greater efficiency

Penerapan Budaya Kerja dan Nilai-Nilai Perseroan

Company Work Culture and Values Implementation

Penerapan budaya kerja saling terkait dengan Nilai-Nilai Perseroan, dan ditunjukkan dalam ilustrasi berikut ini.

The work culture is interrelated with Company Values, and is shown in the following illustration.





Kegiatan Operasi dan Usaha

Operational and Business Activities

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir

Business Activities Based on the Latest Articles of Association

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir yang dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tertanggal 13 September 2019, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah pertambangan, perdagangan besar, pengangkutan, pengadaan listrik, *real estate*, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi. Pada tahun buku 2019 kegiatan utama Perseroan meliputi operasi pertambangan bijih nikel, produksi nikel dalam matte dan penjualan nikel matte.

Based on the amendment to the Articles of Association set forth in Deed of Restatement of Shareholders Resolutions No. 37 dated September 13, 2019, the Company's scope of activities includes mining, wholesale trade, transportation, electricity procurement, real estate, wastewater management, waste management and recycling, and remediation activities. During fiscal year 2019 the Company's main activities included nickel ore mining operations, nickel in matte production and nickel matte sales.

Kegiatan Operasi Pertambangan Bijih Nikel

Nickel Ore Mining Activities

Operasi pertambangan bijih nikel dilakukan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan data eksplorasi dan geologi. Kegiatan operasi pertambangan yang dijalankan Perseroan digolongkan sebagai penambangan terbuka, dengan menggali lapisan tanah yang mengandung bijih nikel kadar tinggi (*saprolite*) menggunakan ekskavator dan kemudian diolah di stasiun penyaring. Uraian lengkap operasi pertambangan disampaikan terpisah pada bagian lain Laporan ini.

Nickel ore mining operations are carried out in Sorowako, East Luwu Regency, South Sulawesi at predetermined locations based on exploration and geological data. The mining operations carried out by the Company are classified as open-pit mining which involves removing soil layers containing high-grade nickel ore (*saprolite*) using excavators and then processing it at screening stations. A complete mining operations description is presented separately in other sections of this Report.

Setiap tahun Perseroan membatasi luas area kegiatan operasi pertambangan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Kegiatan operasi pertambangan didukung berbagai fasilitas, meliputi jalan tambang, peralatan berat, pelabuhan, terminal bahan bakar, jaringan pipa bahan bakar dan tangki penyimpanan bahan bakar.

Every year the Company limits the area of its mining operations to minimize the impact on the environment. Mining operations are supported by a number of facilities, including mining roads, heavy equipment, ports, fuel terminals, fuel pipelines and fuel storage tanks.



FASILITAS OPERASI PERSEROAN TAHUN 2019
Company's Operations Facilities In 2019

Fasilitas Facilities	Satuan Unit	Uraian Description
Alat Berat Heavy Equipment	Unit	Ekskavator 24 Excavators
		Truk 109 Trucks
Jalan Tambang Mining Roads	Km	448
Pelabuhan Port	Unit	Lokasi Balantang, Luwu Timur Located at Balantang, Luwu Timur
Terminal Bahan Bakar Mangkasa Point Mangkasa Point Fuel Terminal	Unit	Lokasi Desa Lampia, Luwu Timur Located at Desa Lampia, Luwu Timur
Jaringan Pipa Bahan Bakar Fuel Pipelines	Km	48,8
Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Fuel Storage Tanks	Unit	19

Kegiatan Produksi Nikel dalam Matte

Nickel in Matte Production Activities

Proses produksi berlangsung di fasilitas pengolahan di Sorowako. Perseroan memiliki pabrik pengolahan mineral yang mampu memproduksi 240 ton nikel dalam matte setiap hari. Fasilitas pabrik pengolahan dilengkapi empat unit tanur listrik. Uraian lengkap produksi nikel dalam matte disampaikan terpisah pada bagian lain Laporan ini.

Total volume nikel dalam matte yang diproduksi pada tahun 2019 mencapai 71.025 ton. Jumlah tersebut berkurang 5% dibanding tahun 2018 sebanyak 74.806 ton.

Kapasitas fasilitas pengolahan yang dimiliki Perseroan dapat memproses 75.000 ton nikel dalam matte per tahun. Dengan berbagai inisiatif pengembangan pada pabrik pengolahan, Perseroan menargetkan untuk mendapatkan kapasitas produksi 80.000 ton nikel dalam matte seperti pencapaian produksi di tahun 2015. Untuk mendapatkan target 90.000 ton nikel, Perseroan berencana mengembangkan satu lini produksi Feronikel dengan kapasitas 10.000 ton nikel, dalam Feronikel.

The production process takes place at the Sorowako processing facility. The Company has a mineral refining plant (smelter) capable of producing 240 tons of nickel in matte daily. The smelter facility is equipped with four electric furnaces. A complete description of nickel in matte production is presented separately in other sections of this Report.

The total volume of nickel in matte produced in 2019 reached 71,025 tons. This was a decrease of 5% compared to 74,806 tons in 2018.

Company's processing facility can produce 75,000 ton of nickel in matte per year. With the various development initiatives at the process plant, the Company is targeting to achieve production capacity of 80,000 tons nickel in matte as achieved in 2015. To get 90,000 tons target of nickel, the Company plans to develop one line production of ferronickel with capacity 10,000 tons nickel in Ferronickel.



Perseroan juga melanjutkan rencana pembangunan pabrik pengolahan di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Proyek di Bahodopi direncanakan untuk membangun pabrik pengolahan untuk pemroses bijih saprolite dan menghasilkan feronikel yang merupakan bahan utama dalam pembuatan baja nirkarat. Untuk Pomalaa, proyek yang saat ini dikembangkan adalah untuk memproses bijih nikel limonite dengan menggunakan teknologi HPAL (*High Pressure Acid Leaching*) untuk menghasilkan produk yang dapat diolah untuk menjadi bahan utama baterai mobil listrik. Sementara itu, pemanfaatan bijih nikel saprolite yang ada di Pomalaa saat ini masih dalam tahap studi lebih lanjut.

The Company is also continuing its plan to construct two smelters in Bahodopi, Morowali Regency, Central Sulawesi and in Pomalaa, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. The project in Bahodopi, is to build a smelter to process saprolite nickel ore and produce ferro nickel, a main material for stainless steel making. In Pomalaa, the project is to build a processing facility with HPAL (High Pressure Acid Leaching) technology to process limonite ore and produce intermediate product which can be further process in to material for EV battery. Meanwhile, the potential utilization of saprolite nickel ore in Pomalaa is now being studied.

Realisasi pembangunan pabrik pengolahan dipengaruhi berbagai faktor dan pertimbangan, di antaranya adalah harga nikel di pasar dunia.

The realization of smelter development is affected by numerous factors and considerations, including world market nickel prices.

Selama lima puluh satu tahun beroperasi di Indonesia, Perseroan telah membangun berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan produksi.

Throughout its 50 years operation in Indonesia, has built a number of facilities to support production activities.

FASILITAS PRODUKSI PERSEROAN TAHUN 2019 Company Production Facilities in 2019

Fasilitas Facilities	Satuan Unit	Jumlah Total
Tanur Pengereng Dryer Kiln	Unit	3
Tanur Pereduksi Reduction Kiln	Unit	5
Tanur Listrik Electric Furnace	Unit	4
Konverter Converter	Unit	3
Stasiun Penyaring Screening Station	Unit	5
Tempat Penggilingan Batubara Coal Mill	Unit	1

FASILITAS PENDUKUNG MILIK PERSEROAN TAHUN 2019 Company's Supporting Facilities in 2019

Fasilitas Facilities	Uraian Description	Jumlah Total	Kapasitas (MegaWatt) Capacity (MegaWatt)
Pembangkit Listrik Tenaga Air Hydroelectric Power Generators	PLTA Larona	3	165
	PLTA Balambano	2	110
	PLTA Karebbe	2	90
Pembangkit Listrik Tenaga Termal Thermal Power Generators	Generator Diesel Mirrlees Blackstone Mirrlees Blackstone Diesel Generator	5	30
	Generator Diesel Caterpillar Caterpillar Diesel Generator	23	23
	Generator Turbin Uap Steam Turbine Generator	1	15



Kegiatan Usaha Penjualan Nikel Matte dan Jangkauan Pasar

Nickel Matte Sales Business Activities and Market Reach

Penjualan dilaksanakan berdasarkan kontrak jangka panjang dalam denominasi AS\$, dengan VCL dan SMM. Sesuai perjanjian penjualan, 80% produksi nikel dalam matte pada setiap tahun dibeli VCL dan 20% lainnya oleh SMM, berdasarkan harga London Metal Exchange (“LME”).

Seluruh nikel matte dijual dan dikirim setiap bulan ke Jepang dengan menggunakan kapal-kapal besar baik milik VCL maupun kapal sewaan, untuk menjamin keekonomian dan kecepatan pengangkutan.

Sales are carried out based on long-term contracts denominated in US\$, with VCL and SMM. In accordance with the sales agreements, 80% of nickel in matte annual production is sold to VCL, while the remaining 20% is sold to SMM, based on the London Metal Exchange (“LME”) price.

All nickel matte is sold and shipped to Japan every month using large vessel owned by VCL or charter vessels in order to guarantee the economy and the speed of transportation.



Pada bulan November 2019, PT Vale menandatangani perjanjian penjualan yang telah diperbarui disajikan kembali dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip *arm's length* secara terus menerus, termasuk untuk meninjau kembali ketentuan harga yang berlaku, memperbarui dan menggabungkan praktik terbaik yang ada, dan untuk mencerminkan keadaan komersial saat ini terkait perjanjian wajib beli logam dasar yang berorientasi jangka panjang. Perjanjian-perjanjian tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan persetujuan ini, Perseroan akan mulai menerapkan ketentuan baru berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjualan mulai tanggal 1 Januari 2020.

In November 2019, PT Vale signed Amended and Restated Sales Agreements with VCL and SMM, with the underlying objective to ensure on-going compliance with the arm's length principle, including to revisit the existing pricing terms, to update and incorporate current best practices, and to reflect the current commercial realities for long-term base metals offtake agreements, on a going forward basis. The agreements were approved by the MEMR on December 31, 2019. With this approval, starting January 1, 2020, the Company will start to implement the new terms under the Amended and Restated Sales Agreements.

Produk dan Cadangan Mineral

Product and Mineral Reserves

Perseroan menghasilkan produk berupa nikel matte, yaitu produk antara yang digunakan dalam pembuatan nikel olahan dengan kandungan rata-rata 78% nikel, 1% - 2% kobalt, serta 20% - 21% sulfur. Seluruh produk nikel matte dikapalkan ke Jepang untuk proses pemurnian lebih lanjut.

The Company produces nickel matte, as an intermediate product used in producing refined nickel with an average content of 78% nickel, 1% - 2% cobalt, and 20% - 21% sulfur. All nickel matte products are shipped to Japan for further refining processes.

Perseroan menerapkan VPS dalam penatagunaan produk. VPS melibatkan empat elemen utama Perseroan, yakni karyawan, operasi, perawatan dan manajemen; serta tiga bidang pendukung, yakni kesehatan, keselamatan serta lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan produk aman bagi lingkungan dan dapat didaur ulang.

The Company has implemented the VPS in its product stewardship. VPS involves four main Company elements, namely employees, operations, maintenance and management; as well as three supporting fields, namely health, safety and the environment. This is intended to ensure products are safe for the environment and can be recycled.

Perseroan telah mematuhi Restriction of Hazardous Substance (RoHS) atau aturan pembatasan bahan berbahaya yang dibakukan pasar Uni Eropa, serta mendapatkan status akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional ("KAN") untuk ISO 17025 tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sejak 2005, Perseroan diberi pengakuan untuk mencantumkan logo KAN pada sertifikat hasil analisis yang dikirim ke pelanggan. Pada tahun 2019, Perseroan memperbaharui kesesuaian ISO 17025 dari versi 2008 menjadi versi terbaru 2017.

The Company complies with the Restriction of Hazardous Substance (RoHS) rules on limiting hazardous substances, as standardized by the European Union market, and has obtained accreditation status from the National Accreditation Committee ("NAC") through ISO 17025 regarding Competency Requirements for the Testing and Calibration Laboratories. Since 2005, company recognized by KAN to include NAC logo on each CoA sent to the customer. In 2019, the Company renew the compliance of ISO 17025 from 2008 version to the newest 2017 version.

Selama periode pelaporan, terjadi penurunan cadangan mineral dikarenakan adanya aktivitas penambangan, evaluasi kembali desain pit dari proses optimalisasi pit dan pembaruan *Block Model*.

During the reporting period, the mineral reserves decreased due mining depletion; re-evaluations related to pit design update as result of pit optimization process and Block Model update.

CADANGAN MINERAL PERSEROAN (DALAM JUTA TON)

The Company Mineral Reserves (in million tons)

Uraian Description	Per 31 Desember 2019 December 31, 2019		Per 31 Desember 2018 December 31, 2018		Δ%	
	Mt (DKP)	% Grade	Mt (DKP)	% Grade	Mt (DKP)	% Grade
Terbukti Proven	66.2	1.72	101.8	1.76	(34.94)	(2.21)
Terkira Probable	41.4	1.75	14.7	1.64	182.13	6.70
Jumlah Total	107.6	1.73	116.5	1.74	(7.59)	(0.51)

CATATAN:

Pernyataan Teknis Sumber Daya dan Cadangan ("MRMR") 2019 meliputi informasi teknis untuk mendukung perkiraan cadangan mineral dan sumber daya mineral:

- Estimasi sumber daya mineral dan cadangan mineral telah mengikuti Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia ("KCMCI") dan juga berdasarkan Definition Standards of Mineral Resources and Mineral Reserves and CIM Best Practice Guidelines dari Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") yang mengacu pada standar kode NI43-101. Perseroan, sebagai unit usaha Vale Base Metals, harus menggunakan standar CIM dalam pelaporan sumber daya mineral dan cadangan mineralnya.
- CIM mendefinisikan cadangan mineral "terkira" sebagai bagian dari sumber daya mineral terunjuk yang diperkirakan dapat ditambang secara ekonomis berdasarkan studi pra kelayakan. Studi ini harus mencakup informasi yang memadai mengenai faktor-faktor penambangan, pengolahan, metalurgi, ekonomi dan faktor-faktor terkait lainnya yang menunjukkan, pada saat pelaporan, bahwa penambangan dapat dibenarkan secara ekonomi.

Cadangan mineral "terbukti" adalah bagian yang dapat ditambang secara ekonomis dari sumber daya mineral terunjuk yang dinyatakan setidaknya oleh studi pra kelayakan. Studi ini harus mencakup informasi yang memadai mengenai faktor-faktor penambangan, pengolahan, metalurgi, ekonomi dan faktor-faktor lainnya yang pada saat pelaporan, penambangan dapat dibenarkan secara ekonomi.

Vale Base Metal memiliki sistem pertanggungjawaban berlapis untuk mendokumentasikan informasi pendukung dalam perhitungan sumber daya mineral dan cadangan mineral. Perhitungan sumber daya mineral dan cadangan mineral disiapkan dan disertifikasi oleh Operational Responsible Person ("RPs") dan selanjutnya dikaji dan disertifikasi oleh Vale Base Metals Corporate Qualified Persons ("QPs").

Berdasarkan pedoman dari Vale Base Metals, pernyataan mengenai cadangan mineral harus didukung oleh sekurang-kurangnya:

- Rencana penambangan dan Laporan Teknis tahunan atau pernyataan teknis dan data pendukung untuk mineral yang ditambang dari infrastruktur tambang yang ada (biasanya didanai oleh biaya operasi atau modal jangka panjang);
 - Studi Pra Kelayakan (atau setara) untuk mineralisasi baru di daerah *brownfields* yang terbentuk di luar tetapi masih di dalam akses yang wajar dan menggunakan infrastruktur yang ada (konstruksi biasanya didanai dengan menggunakan modal proyek khusus); dan
 - Studi Kelayakan (atau setara) untuk mineralisasi baru di daerah *greenfields* yang memerlukan infrastruktur tambahan baru yang juga mencakup pembangunan fasilitas pengolahan mineral yang baru.
- Evaluasi keuangan dilakukan untuk mengevaluasi nilai ekonomi cadangan mineral.
Evaluasi keuangan ini memperhitungkan seluruh biaya produksi, biaya penjualan dan biaya modal. Informasi mengenai perkiraan harga nikel, kurs mata uang asing dan tingkat diskon diberikan oleh Vale S.A.
 - Perhitungan cadangan mineral dan sumber daya mineral untuk Kegiatan Sorowako Operations (SO) meliputi Sorowako Project Area (SPA), Sorowako Outer Area (SOA) dan Bahodopi Blok 1.

NOTES:

From the 2019 Mineral Resources and Mineral Reserves ("MRMR") Technical Statement that provides technical information to support the estimates of mineral reserves and mineral resources:

- Mineral resource and mineral reserve estimates are based on Indonesian Joint Committee for Mineral Reserves ("KCMCI Code") and the Council of the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") Definition Standards of Mineral Resources and Mineral Reserves and CIM Best Practice Guidelines from the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) which refers to code standard the NI43-101. The Company, as a business unit of Vale Base Metals, must use the CIM standards to report its mineral resources and mineral reserves.
- CIM defines "probable" mineral reserve as the economically mineable part of an indicated resource demonstrated by at least a preliminary feasibility study. This study must include adequate information on mining, processing, metallurgical, economic, and other relevant factors that demonstrate, at the time of reporting, that extraction can be justified economically.

"Proven" mineral reserve is the economically mineable part of a measured mineral resource demonstrated by at least a preliminary feasibility study. This study must include adequate information on mining, processing, metallurgical, economic, and other relevant factors that demonstrate, at the time of reporting, that extraction can be justified economically.

Vale Base Metals establishes a layered responsibility system for documenting the information supporting the mineral resources and mineral reserves estimates. Mineral resources and mineral reserves estimates are prepared and certified by Operational Responsible Persons ("RPs") and are subsequently reviewed and certified by the Vale Base Metals Corporate Qualified Persons ("QPs").

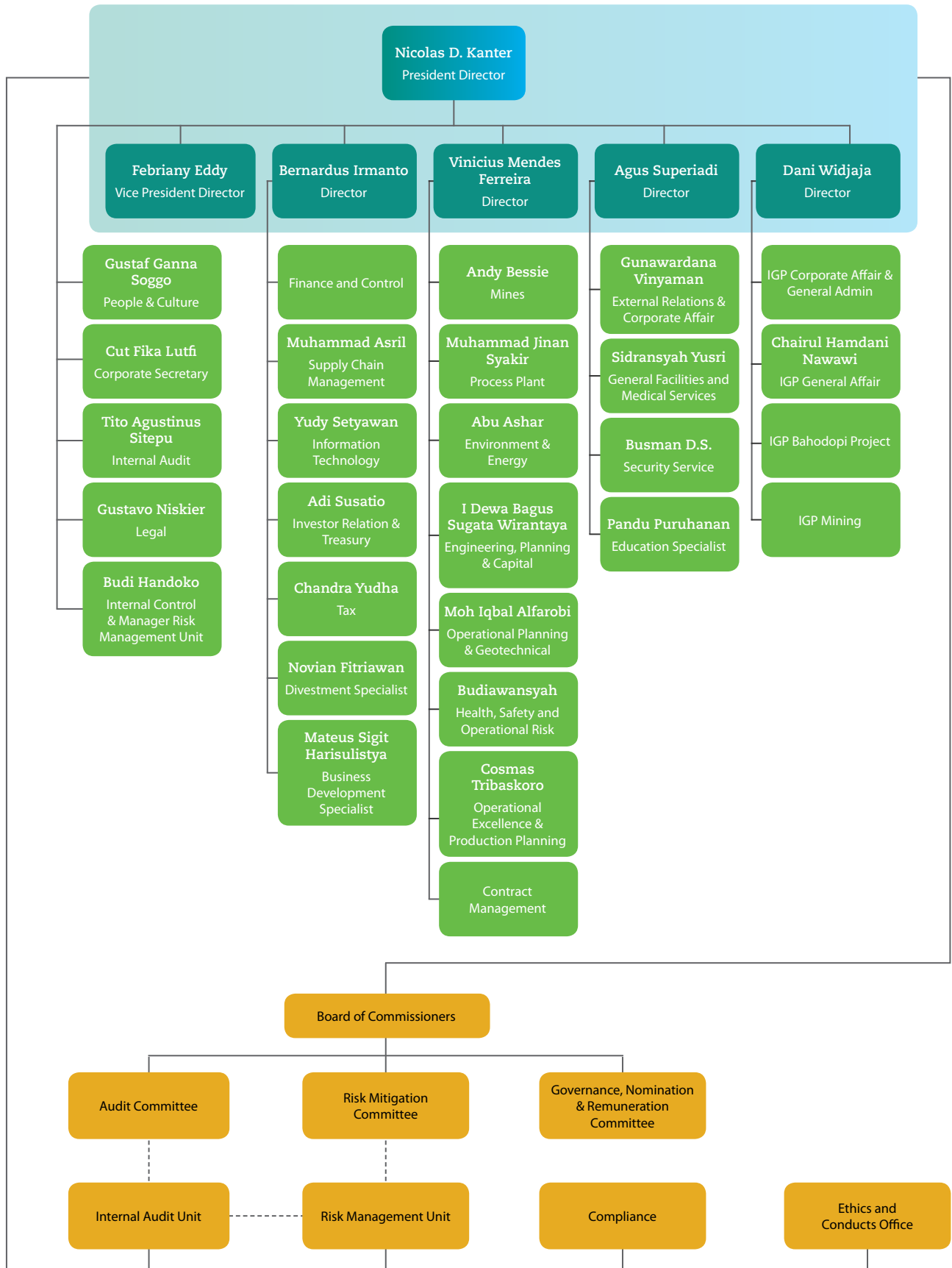
Based on Vale Base Metals Guidelines, mineral reserves declaration must be supported by at least:

- A mine plan and an annual Technical Report or technical statement and supporting files for mineralization that is to be exploited from existing mine infrastructure (typically funded with operating costs or sustaining capital);
 - A Pre-Feasibility Study (or equivalent) for new brownfields area mineralization occurring beyond but within reasonable access and using existing infrastructure (construction typically funded using dedicated project capital); and
 - A Feasibility study (or equivalent) for new mineralization in a greenfield area that requires additional new standalone infrastructure, which may also include the construction of new mineral processing facilities.
- Financial evaluation is performed to evaluate mineral reserve economic value. All costs, including production, sales and capital costs, are considered in the financial evaluation. Forecasts of nickel price, foreign exchange rate and discount rate is provided by Vale S.A.
 - These estimates of mineral reserves and mineral resources are for the Company's Sorowako Operation (SO), which includes Sorowako Project Area (SPA), Sorowako Outer Area (SOA) and Bahodopi Block 1.



Struktur Organisasi dan Penjabat Senior Perseroan

The Company's Organizational Structure and Senior Officers





Profil Direksi

Board of Directors' Profiles



Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") tanggal 2 April 2019 di Jakarta, keanggotaan Direksi mengalami perubahan sebagai berikut:

- Pemegang Saham menerima pengunduran diri Bapak Lovro Paulic sebagai anggota Direksi Perseroan.
- Pemegang Saham mengangkat Ibu Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Bernardus Irmanto sebagai Direktur, Bapak Dani Widjaja sebagai Direktur, Bapak Agus Superiadi sebagai Direktur dan Bapak Vinicius Mendes Ferreira sebagai Direktur, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021.

Dengan demikian per tanggal 31 Desember 2019, Direksi Perseroan terdiri atas:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders ("Annual GMS") resolution dated April 2, 2019 in Jakarta, the Board of Directors' membership changed as follows:

- Shareholders accepted Lovro Paulic's resignation as a member of the Company's Board of Directors.
- Shareholders appointed Febriany Eddy as Vice President Director, Bernardus Irmanto as Director, Dani Widjaja as Director, Agus Superiadi as Director and Vinicius Mendes Ferreira as Director, until the closing of the Company's 2021 Annual GMS.

As of December 31, 2019, the Company's Board of Directors consisted of:

Jabatan	Nama Name	Position
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Febriany Eddy	Vice President Director
Direktur	Bernardus Irmanto	Director
Direktur	Vinicius Mendes Ferreira	Director
Direktur	Dani Widjaja	Director
Direktur	Agus Superiadi	Director



NICOLAS D. KANTER

Presiden Direktur | President Director

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Tahunan 4 April 2018 - penutupan RUPS Tahunan 2020

Period in Office:

Annual GMS Closing April 4, 2018 - Annual GMS Closing 2020

Lahir 11 Oktober 1958

Usia 61 tahun

Born October 11, 1958

Age 61

Kewarganegaraan: Indonesia

Domisili: Jakarta

Nationality: Indonesian

Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia
2. Master Administrasi Bisnis (Bisnis Internasional) dari University of Southern California

Education History

1. Bachelor and Master Degree in Law from Universitas Indonesia.
2. Master of Business Administration (International Business) from University of Southern California, USA.

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat kembali sebagai Presiden Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 4 April 2018, setelah ditetapkan menjadi Presiden Direktur Perseroan untuk pertama kali pada RUPS Luar Biasa tanggal 27 September 2011.
- **Rangkap Jabatan**
 1. Direktur pada PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (entitas Perseroan)
 2. Direktur pada PT Kolaka Nickel Indonesia (entitas Perseroan)
- **Pengalaman Kerja**
 1. Komisaris Independen, PT Vale, 2009-2011
 2. Head of Country, BP Indonesia, 2007 - 2009

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Re-appointed as Company's President Director at the Annual GMS dated April 4, 2018, first appointed as Company's President Director at the Extraordinary GMS on September 27, 2011.
- **Concurrent Positions**
 1. Director of PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (Company's Subsidiary)
 2. Director of PT Kolaka Nickel Indonesia (Company's Subsidiary)
- **Work Experience**
 1. PT Vale Independent Commissioner, 2009-2011
 2. BP Indonesia Head of Country, 2007 - 2009



FEBRIANY EDDY

Wakil Presiden Direktur | Vice President Director

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Tahunan 2 April 2019 - penutupan RUPS Tahunan 2021

Period in Office:

Annual GMS Closing April 2, 2019 - Annual GMS Closing 2021

Lahir 18 Februari 1977

Usia 42 tahun

Born February 18, 1977

Age 42

Kewarganegaraan: Indonesia

Nationality: Indonesian

Domisili: Jakarta

Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia
2. MBA dari UCLA Anderson School of Management dan National University of Singapore

Education History

1. Bachelor Degree in Economic Accounting from Universitas Indonesia
2. MBA from UCLA Anderson School of Management and National University of Singapore

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 2 April 2019; setelah ditetapkan menjadi Direktur Perseroan untuk pertama kali pada RUPS Tahunan tanggal 23 April 2013.
- **Rangkap Jabatan**
Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/badan usaha maupun lembaga lain.
- **Pengalaman Kerja**
 1. Business Planning and Performance Manager, Vale Base Metals Asia Pacific & Africa, 2010-2013
 2. Project Financing and Financial Evaluation Manager, PT Vale, 2007-2010

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Appointed as Company's Vice President Director at the Annual GMS dated April 2, 2019; first appointed as Director at the Annual GMS on April 23, 2013
- **Concurrent Positions**
Up to the end of reporting period, had no concurrent positions in the Company/other business entities or institutions.
- **Work Experience**
 1. Business Planning and Performance Manager, Vale Base Metals Asia Pacific & Africa, 2010-2013
 2. Project Financing and Financial Evaluation Manager, PT Vale, 2007-2010





» BERNARDUS IRMANTO

Direktur | Director

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Tahunan 2 April 2019 - penutupan RUPS Tahunan 2021

Period in Office:

Annual GMS Closing April 2, 2019 - Annual GMS Closing 2021

Lahir 30 Agustus 1975

Usia 44 tahun

Born August 30, 1975

Age 44

Kewarganegaraan: Indonesia

Nationality: Indonesian

Domisili: Jakarta

Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2. Magister Ilmu dan Teknik Komputer dari University of New South Wales, Sydney, Australia
3. Global Executive MBA dari University of California Los Angeles dan National University of Singapore, Singapura

Education History

1. Bachelor Degree in Computer Science from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2. Master of Science and Computer Engineering Degree from University of New South Wales in Sydney, Australia
3. Global Executive MBA program from the University of California Los Angeles - National University of Singapore, Singapore

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 2 April 2019, setelah ditetapkan menjadi Direktur Perseroan untuk pertama kali pada RUPS Luar Biasa tanggal 28 Oktober 2010.
- **Rangkap Jabatan**
Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/badan usaha maupun lembaga lain.
- **Pengalaman Kerja**
 1. General Manager Shared Services Operations, PT Vale, 2009 - 2010
 2. General Manager Information Technology, PT Vale, 2007 - 2009

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Re-appointed as Company's Director at the Annual GMS dated April 2, 2019, first appointed as Director at the Extraordinary GMS on October 28, 2010.
- **Concurrent Positions**
Up to the end of reporting period, had no concurrent positions in the Company/other business entities or institutions.
- **Work Experience**
 1. PT Vale General Manager Shared Services Operations, 2009 - 2010
 2. PT Vale IT General Manager, 2007 - 2009



DANI WIDJAJA

Direktur | Director

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Tahunan 2 April 2019
- penutupan RUPS Tahunan 2021

Lahir 6 November 1967

Usia 52 tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan

1. Diplom-Ingenieur degree in Mechanical Engineering dari Technische Universitaet Braunschweig, Jerman
2. Executive courses dari Richard Ivey School of Business, Hongkong

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 2 April 2019.
- **Rangkap Jabatan**
Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/badan usaha maupun lembaga lain.
- **Pengalaman Kerja**
 1. Direktur Pabrik Pengolahan, PT Vale, 2015
 2. Direktur Proyek Program Pertumbuhan Indonesia, PT Vale, 2012
 3. Direktur dan GM Industri, PT Bimatekno Karyatama Konsultan
 4. Wakil Direktur Proyek HEPP Karebbe, PT Vale, 2009
 5. Asisten Manajer Proyek, Panasia Group Bandung, 1995-1998
 6. Section Leader, PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, Bandung, 1992-1995
 7. Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft-und Raum-fahrt (DLR), Institut fuer Strukturmechanik Braunschweig, Jerman, 1990.

Period in Office:

Annual GMS Closing April 2, 2019 –
Annual GMS Closing 2021

Born November 6, 1967

Age 52

Nationality: Indonesian

Domicile: Jakarta

Education History

1. Diplom-Ingenieur degree in Mechanical Engineering from Technische Universitaet Braunschweig, Germany
2. Executive courses from Richard Ivey School of Business, Hongkong

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Appointed as Company's Director at the Annual GMS dated April 2, 2019.
- **Concurrent Positions**
Up to the end of reporting period, had no concurrent positions in the Company/other business entities or institutions.
- **Work Experience**
 1. Processing Plant Director, PT Vale, 2015
 2. Indonesia Growth Program Project Director, PT Vale, 2012
 3. Director and GM Industries, PT Bimatekno Karyatama Konsultan
 4. Karebbe HEPP Project Deputy Director, PT Vale, 2009
 5. Assistant Project Manager, Panasia Group Bandung, 1995-1998
 6. Section Leader, PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, Bandung, 1992-1995
 7. Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft-und Raum-fahrt (DLR), Fuer Structural Mechanics Institute Braunschweig, Germany, 1990.





» **AGUS SUPERIADI**
Direktur | Director

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Tahunan 2 April 2019 - penutupan RUPS Tahunan 2021

Period in Office:

Annual GMS Closing April 2, 2019 – Annual GMS Closing 2021

Lahir 7 Agustus 1971

Usia 48 tahun

Born August 7, 1971

Age 48

Kewarganegaraan: Indonesia

Nationality: Indonesian

Domisili: Sorowako

Domicile: Sorowako

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung

Education History

Bachelor of Science from Institut Teknologi Bandung

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 2 April 2019.
- **Rangkap Jabatan**
Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/ badan usaha maupun lembaga lain.
- **Pengalaman Kerja**
Senior General Manager Strategic Business Development & Growth Projects, PT Vale, 2016-2018

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Appointed as Company's Director at the Annual GMS dated April 2, 2019.
- **Concurrent Positions**
Up to the end of reporting period, had no concurrent positions in the Company/other business entities or institutions.
- **Work Experience**
Senior General Manager Strategic Business Development & Growth Projects, PT Vale, 2016-2018



VINICIUS MENDES FERREIRA

Direktur | Director



Periode jabatan:

Penutupan RUPS Tahunan 2 April 2019 - penutupan RUPS Tahunan 2021

Period in Office:

Annual GMS Closing April 2, 2019 – Annual GMS Closing 2021

Lahir: 12 April 1974

Born April 12, 1974

Usia 45 tahun

Age 45

Kewarganegaraan: Brazil

Nationality: Brazilian

Domisili: Sorowako

Domicile: Sorowako

Riwayat Pendidikan

1. Bachelor of Science School of Mines dari Federal University of Ouro Preto
2. Master (MSc) Mineral Engineering dari School of Mines - Federal University of Ouro Preto
3. MBA di bidang Pemasaran dari Getúlio Vargas Foundation - Vitória
4. MBA di bidang Keuangan dan Akuntansi dari Getúlio Vargas Foundation - Taubaté
5. Doktor (PhD) Engineering in Ferrous Metallurgy dari Central South University (CSU) - Hunan, Tiongkok

Education History

1. Bachelor of Science degree from School of Mines - Federal University of Ouro Preto
2. Master (MSc) degree in Mineral Engineering from School of Mines - Federal University of Ouro Preto
3. MBA in Marketing from Getúlio Vargas Foundation - Vitória
4. MBA in Finance and Accounting from Getúlio Vargas Foundation - Taubaté
5. Doctorate (PhD) Engineering in Ferrous Metallurgy from Central South University (CSU) - Hunan, China

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 2 April 2019.
- **Rangkap Jabatan**
Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/badan usaha maupun lembaga lain.
- **Pengalaman Kerja**
 1. Copper Director, Vale Copper Operation, South Hub – Canaa Dos Carajas Brasil 2018
 2. Nickel Director, Vale Nickel Operation, Onça Puma - Ourilândia Do Norte Brasil, 2017-2018
 3. Chief Executive Officer, Vale, Tecnoled Desenvolvimento Tecnológico, Brasil, 2011-2017
 4. General Manager Bahia Ferro-Alloy Plant, Vale Ferro Alloy Operation, Simões Filho, 2009-2011
 5. Market and Business Development Manager, Vale Shanghai, 2007
 6. Bekerja di anak perusahaan Vale (Samarco Mineracao and Mineracoes Brasileiras Reunidas) dari 1995 ke 2007

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Appointed as Company's Director at the Annual GMS dated April 2, 2019.
- **Concurrent Positions**
Up to the end of reporting period, had no concurrent positions in the Company/other business entities or institutions.
- **Work Experience**
 1. Copper Director, Vale Copper Operation, South Hub - Canaa Dos Carajas Brazil 2018
 2. Nickel Director, Vale Nickel Operation, Onça Puma - Ourilândia Do Norte Brazil, 2017-2018
 3. Chief Executive Officer, Vale Tecnoled Desenvolvimento Tecnológico, Brazil, 2011-2017
 4. General Manager, Bahia Ferro-Alloy Plant, Vale Ferro Alloy Operation, Simões Filho, 2009-2011
 5. Market and Business Development Manager, Vale Shanghai, 2007
 6. Worked in Vale Subsidiaries Companies (Samarco Mineracao and Mineracoes Brasileiras Reunidas) from 1995 to 2007



Pendidikan dan Pelatihan Direksi Tahun 2019

Board of Directors' Education and Training in 2019

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIKUTI DIREKSI

Education and Training Followed by the Directors

Anggota Direksi Director	Penyelenggara dan Kegiatan Organizer and Activity	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place
Nicolas D. Kanter	VALE - Basemet Leadership Team Meeting	18 Juni 2019/Toronto June 18, 2019/Toronto
	VALE - Basemet 2019: Global Leadership Summit	20-21 Juni 2019/Toronto June 20-21, 2019/Toronto
	VALE - 2019 Leadership Forum	10-11 Desember 2019/Rio De Janeiro December 10-11, 2019/Rio De Janeiro
	VALE - Culture Workshop	13 Desember 2019/Rio De Janeiro December 13, 2019/Rio De Janeiro
	VALE - VPS/Vale Management Model	Oktober 2019/Pelatihan Online October 2019/Online Training
	VALE - Information Security/Digital Care	Oktober 2019/Pelatihan Online October 2019/Online Training
Febriany Eddy	VALE - Basemet Leadership Team Meeting	18 Juni 2019/Toronto June 18, 2019/Toronto
	VALE - Basemet 2019: Global Leadership Summit	20-21 Juni 2019/Toronto June 20-21, 2019/Toronto
	VALE - 2019 Leadership Forum	10-11 Desember 2019/Rio De Janeiro December 10-11, 2019/Rio De Janeiro
	VALE - Culture Workshop	13 Desember 2019/Rio De Janeiro December 13, 2019/Rio De Janeiro
	VALE - VPS/Vale Management Model	Oktober 2019/Pelatihan Online October 2019/Online Training
	VALE - Information Security/Digital Care	Oktober 2019/Pelatihan Online October 2019/Online Training
Bernardus Irmanto	VALE - 2019 Leadership Forum	10-11 Desember 2019/Rio De Janeiro December 10-11, 2019/Rio De Janeiro
	VALE - Finance Workshop	13 Desember 2019/Rio De Janeiro December 13, 2019/Rio De Janeiro
	VALE - Training for Risk Owner	29 Oktober 2019/Sorowako October 29, 2019/Sorowako
	VALE - VPS/Vale Management Model	November 2019/Pelatihan Online November 2019/Online Training
	VALE - Information Security/Digital Care	November 2019/Pelatihan Online November 2019/Online Training
	VALE - Global Anti Corruption	Desember 2019/Pelatihan Online December 2019/Online Training



Anggota Direksi Director	Penyelenggara dan Kegiatan Organizer and Activity	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place
Dani Widjaja	VALE - Technical Review and Risk HPAL	26 November 2019/Tokyo November 26-30, 2019/Tokyo
	VALE - Training for Risk Owner	29 Oktober 2019/Sorowako October 29, 2019/Sorowako
	VALE - VPS/Vale Management Model	November 2019/Pelatihan Online November 2019/Online Training
	VALE - Information Security/Digital Care	November 2019/Pelatihan Online November 2019/Online Training
Vinicius Mendes Ferreira	VALE - 2019 Leadership Forum	10-11 Desember 2019/Rio De Janeiro December 10-11, 2019/Rio De Janeiro
	VALE - 2019 POM/POU	November 2019
	VALE - Training for Risk Owner	29 Oktober 2019/Sorowako October 29, 2019/Sorowako
	VALE - VPS/Vale Management Model	November 2019/Pelatihan Online November 2019/Online Training
	VALE - Information Security/Digital Care	November 2019/Pelatihan Online November 2019/Online Training
Agus Superiadi	VALE - 2019 Leadership Forum	10-11 Desember 2019/Rio De Janeiro December 10-11, 2019/Rio De Janeiro
	VALE - Sustainability Workshop	November 2019
	VALE - Training for Risk Owner	29 Oktober 2019/Sorowako October 29, 2019/Sorowako
	VALE - VPS/Vale Management Model	November 2019/Pelatihan Online November 2019/Online Training
	VALE - Information Security/Digital Care	November 2019/Pelatihan Online November 2019/Online Training



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profiles



Selama periode pelaporan terjadi perubahan keanggotaan Dewan Komisaris.

1. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 2 April 2019, pemegang saham menerima pengunduran diri Robert Alan Morris sebagai Komisaris dan mengangkat Bapak Luiz Fernando Landeiro sebagai Komisaris sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2020.
2. Pada keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2019 yang menyetujui antara lain, pengunduran diri Bapak Eduardo Bartolomeo sebagai Presiden Komisaris. Dengan demikian, pemegang saham menyetujui pengangkatan Bapak Mark James Travers sebagai Presiden Komisaris, Bapak Mahendra Siregar sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, serta Bapak Cory McPhee sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan RUPS Luar Biasa 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2020. Perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan Surat No. 415/30/MEM.B/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.

Bapak Mahendra Siregar menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan kepada Direksi Perseroan yang berlaku efektif pada 25 Oktober 2019.

Dengan pengunduran diri tersebut, Dewan Komisaris akan terdiri dari 5 Komisaris dengan 1 Komisaris Independen. Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah diterima oleh RUPS dan Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen yang baru telah diangkat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Bapak Mahendra Siregar tersebut serta serta keanggotaan minimum dewan komisaris dipenuhi.

Dengan demikian keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 adalah:

During the reporting period there were changes in the Board of Commissioners' membership.

1. Based on the Annual GMS resolutions dated April 2, 2019, the shareholders accepted the resignation of Robert Alan Morris as Commissioner and appointed Luiz Fernando Landeiro as Commissioner effective from the close of the Meeting until the closing of the 2020 Annual GMS.
2. Based on the Extraordinary GMS resolutions on August 16, 2019, which approved among others, the resignation of Eduardo Bartolomeo as President Commissioner. Thus, the shareholders approved the appointment of Mark James Travers as President Commissioner, Mahendra Siregar as Vice President Commissioner and Independent Commissioner and Cory McPhee as Commissioner, effective as at the closing of the 2019 Extraordinary GMS until the closing of the Annual GMS in 2020. The changes in the Board of Commissioners composition has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights, as evidenced by Letter No. 415/30/MEM.B/2019 dated October 7, 2019 on the Approval to the Change of the Board of Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk.

Mahendra Siregar tendered his resignation as Vice President Commissioner and Independent Commissioner to the Board of Directors of the Company, effective on October 25, 2019.

Following the resignation, the Board of Commissioners composed of 5 Commissioners with 1 Independent Commissioner. In accordance with the Articles of Association, the resignation shall be effective if accepted by the GMS and a new Vice President Commissioner and Independent Commissioner is appointed to fill the vacancy left by Mahendra Siregar and comply with the minimum membership of the Board of Commissioners.

As of December 31, 2019, the Company's Board of Commissioners consisted of:

Jabatan	Nama Name	Position
Presiden Komisaris	Mark James Travers	President Commissioner
Komisaris	Luiz Fernando Landeiro	Commissioner
Komisaris	Cory McPhee	Commissioner
Komisaris	Nobuhiro Matsumoto	Commissioner
Komisaris Independen	Raden Sukhyar	Independent Commissioner



MARK JAMES TRAVERS

Presiden Komisaris | President Commissioner

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Luar Biasa 16 Agustus 2019 - penutupan RUPS Tahunan 2020

Period in Office:

Extraordinary GMS Closing August 16, 2019 - Annual GMS Closing 2020

Lahir 16 Desember 1966

Usia 53 tahun

Born December 16, 1966

Age 53

Kewarganegaraan: Kanada

Nationality: Canadian

Domisili: Kanada

Domicile: Canada

Riwayat Pendidikan

1. Bachelor of Arts (Honors) dan Master of Business Administration dari University of Western Ontario, Kanada
2. Bachelor of Laws degree dari York University's Osgoode Hall Law School, Kanada

Education History

1. Bachelor of Arts (Honors) and Joint Master of Business Administration, from University of Western Ontario, Canada
2. Bachelor of Laws degree from York University's Osgoode Hall Law School, Toronto, Canada

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada RUPS Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2019.
- **Rangkap Jabatan**
Lihat uraian halaman 73
- **Pengalaman Kerja**
 1. Executive Vice President, Legal and Sustainability, Vale Base Metals, 2015
 2. Executive Vice President, Legal, Vale Base Metals, 2012-2015

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Appointed as Company's President Commissioner at the Extraordinary GMS dated August 16, 2019.
- **Concurrent Positions**
See page 73
- **Work Experience**
 1. Executive Vice President, Legal and Sustainability, Vale Base Metals, 2015
 2. Executive Vice President, Legal, Vale Base Metals, 2012-2015



MAHENDRA SIREGAR

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Luar Biasa 16 Agustus 2019-sekarang

Period in Office:

Extraordinary GMS Closing August 16 2019-present

Lahir 17 Oktober 1962

Usia 57 tahun

Born October 17, 1962,

Age 57

Kewarganegaraan: Indonesia

Nationality: Indonesian

Domisili: Jakarta

Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia
2. Master di bidang Ekonomi dari Monash University

Education History

1. Bachelor Degree in Economics from Universitas Indonesia
2. Master in Economics from Monash University

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada RUPS Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2019.
- **Rangkap Jabatan**
Lihat uraian halaman 73
- **Pengalaman Kerja**
 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2013-2014
 2. Wakil Menteri Keuangan, 2011-2013
 3. Presiden Komisaris, PT Rajawali Nusantara Indonesia, 2012
 4. Wakil Menteri Perdagangan, 2009-2011
 5. Chairman/CEO, Indonesia Eximbank, 2009
 6. Komisaris, PT Aneka Tambang Tbk, 2008- 2009
 7. Deputi Ekonomi Internasional dari Kementerian Koordinator Perekonomian, 2004-2009

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Appointed as Company Vice President Commissioner and Independent Commissioner at the Extraordinary GMS dated Aug 16, 2019
- **Concurrent Positions**
See page 73
- **Work Experience**
 1. Investment Coordinating Board Chairman, 2013-2014
 2. Deputy Minister of Finance, 2011-2013
 3. President Commissioner, PT Rajawali Nusantara Indonesia, 2012
 4. Deputy Minister of Trade, 2009-2011
 5. Chairman/CEO, Indonesia Eximbank, 2009
 6. Commissioner, PT Aneka Tambang Tbk, 2008- 2009
 7. Economic International Deputy from the Coordinating Ministry for Economic Affairs, 2004-2009

Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 4 November 2019, sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah disetujui oleh RUPS. Sejak tanggal surat pengunduran diri sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS tersebut, Bapak Mahendra Siregar tidak lagi aktif dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Mahendra Siregar submitted his resignation letter as the Company's Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019, following his appointment as the Deputy Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the resignation became effective upon approval at the GMS. Between the date of his resignation until the GMS, Mahendra Siregar was not active as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.





RADEN SUKHYAR

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Tahunan 4 April 2018 - penutupan RUPS Tahunan 2020

Period in Office:

Annual GMS Closing April 4, 2018 - Annual GMS Closing 2020

Lahir 11 April 1955

Usia 64 tahun

Born April 11, 1955

Age 64

Kewarganegaraan: Indonesia

Nationality: Indonesian

Domisili: Jakarta

Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung
2. Doktor (Ph.D) Earth Science dari Monash University

Education History

1. Bachelor Degree in Geological Engineering from Institut Teknologi Bandung
2. Doctorate (Ph.D) Earth Science from Monash University

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 27 Maret 2017.
- **Rangkap Jabatan**
Lihat uraian halaman 73
- **Pengalaman Kerja**
 1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, 2013-2015
 2. Presiden Komisaris PT Aneka Tambang Tbk, 2012-2015
 3. Kepala Badan Geologi ESDM, 2008
 4. Komisaris PT Pertamina Geothermal Energy, 2005 - 2009
 5. Asisten Menteri ESDM untuk Urusan Komunikasi dan Informasi, 2005
 6. Komisaris PT Timah Tbk, 2002-2008
 7. Direktur Vulkanologi tahun 1998-1999, sebelum menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral

Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Appointed as Company Independent Commissioner at the Annual GMS dated March 27, 2017.
- **Concurrent Positions**
See page 73
- **Work Experience**
 1. Director General of Mineral and Coal, Ministry of EMR, 2013-2015
 2. President Commissioner of PT Aneka Tambang Tbk, 2012-2015
 3. Head of Geological Agency of EMR, 2008
 4. Commissioner of PT Pertamina Geothermal Energy, 2005 - 2009
 5. Assistant Minister of EMR for Communication and Information, 2005
 6. Commissioner of PT Timah Tbk, 2002-2008
 7. Director of Volcanology in 1998-1999, before serving as Secretary of Directorate General of Geology and Mineral Resources





NOBUHIRO MATSUMOTO

Komisaris | Commissioner

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Luar Biasa 20 Juli 2018 - penutupan RUPS Tahunan 2020

Period in Office:

Extraordinary GMS Closing July 20, 2018 - Annual GMS Closing 2020

Lahir 24 Februari 1963

Usia 56 tahun

Born February 24, 1963

Age 56

Kewarganegaraan: Jepang

Nationality: Japanese

Domisili: Jepang

Domicile: Japan

Riwayat Pendidikan

Master di bidang Teknik Metalurgi dari Kyushu Institute of Technology.

Education History

Masters of Engineering in Metallurgy from Kyushu Institute of Technology.

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**

1. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pertama kali pada RUPS Luar Biasa tanggal 25 September 2014
2. Pada RUPS Tahunan tanggal 1 April 2016 diangkat kembali untuk jabatan yang sama.

- **Rangkap Jabatan**

Lihat uraian halaman 73

- **Pengalaman Kerja**

General Manager di Administration Department, Non-Ferrous Metal Division, SMM, 2014

Position History

- **Legal Basis for Appointment**

1. Appointed as Company Commissioner on September 25, 2014 at the Extraordinary GMS.
2. Reappointed for the same position at the Annual GMS dated April 1, 2016.

- **Concurrent Positions**

See page 73

- **Work Experience**

General Manager of Administration Department, Non-Ferrous Metal Division, SMM, Ltd. , 2014

» LUIZ FERNANDO LANDEIRO

Komisaris | Commissioner

Periode jabatan:

Penutupan RUPS Tahunan 2 April 2019 - penutupan RUPS Tahunan 2020

Period in Office:

Annual GMS Closing April 2, 2019 - Annual GMS Closing 2020

Lahir: 16 Maret 1977

Usia 42 tahun

Born: March 16 1977

Age 42

Kewarganegaraan: Brazil

Nationality: Brazilian

Domisili: Brazil

Domicile: Brazil

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Teknik Sipil dari Universidade Federal do Rio de Janeiro
2. Magister Universidade dari Federal do Espirito Santo
3. MBA dari Fundacao Dom Cabral, Nova Lima
4. MBA dari Kellogg School of Management, Evanston, di Illinois

Education History

1. Bachelor degree in Civil Engineering from Universidade Federal do Rio de Janeiro
2. Masters degree from Universidade Federal do Espirito Santo
3. MBA from Fundacao Dom Cabral, Nova Lima
4. MBA from Kellogg School of Management, Evanston, in Illinois

Riwayat Jabatan

- **Dasar Hukum Penunjukan**
Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 2 April 2019.
- **Rangkap Jabatan**
Lihat uraian halaman 73
- **Pengalaman Kerja**
 1. Integrated Planning
Director, Vale Base Metals, 2018-sekarang
 2. Southeast Port Operations
Executive Manager, 2013-2016
 3. Carajas Railway Operations
Director, Vale Brasil, 2009-2013
 4. Railway Operations Engineer,
2001-2009

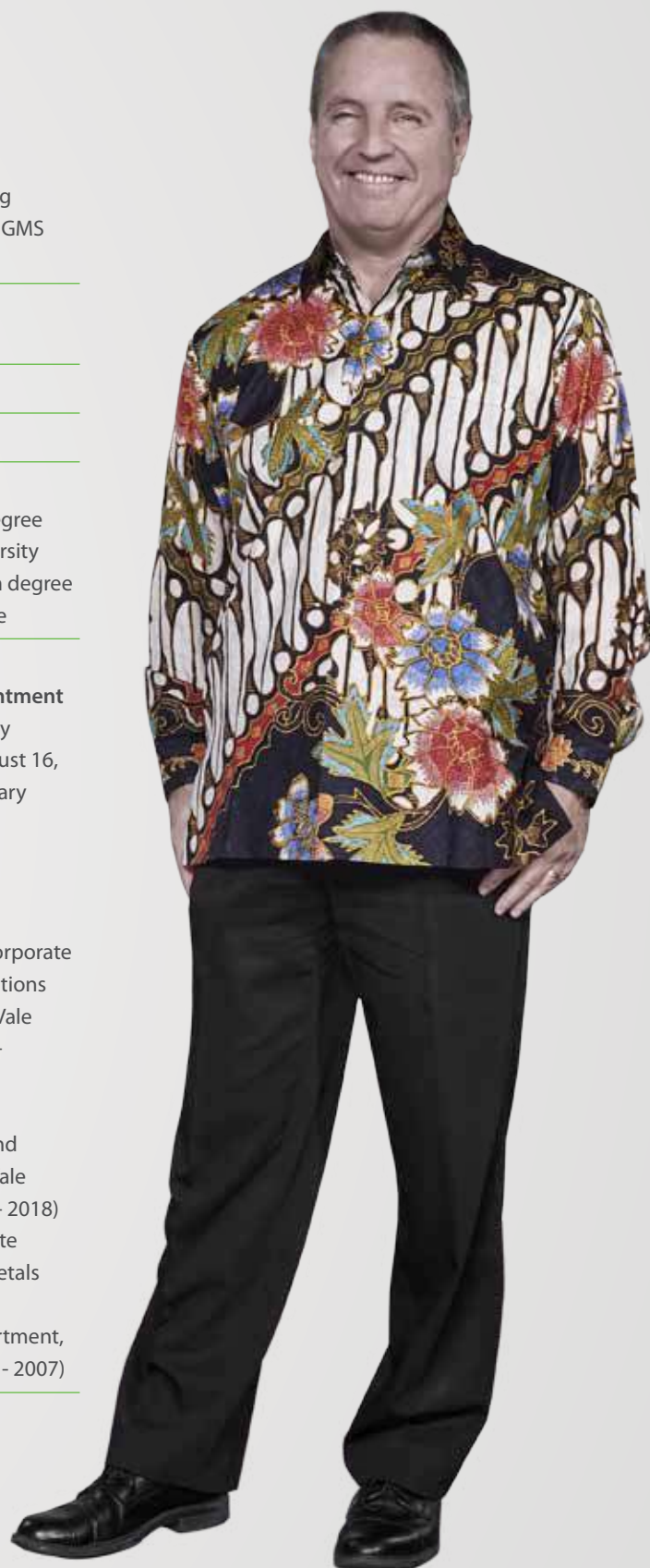
Position History

- **Legal Basis for Appointment**
Appointed as Company Commissioner on April 2, 2019 at the Company's Annual GMS.
- **Concurrent Positions**
See page 73
- **Work Experience**
 1. Integrated Planning
Director, Vale Base Metals, 2018-present
 2. Southeast Port Operations
Executive Manager, 2013-2016
 3. Carajas Railway Operations
Director, Vale Brasil, 2009-2013
 4. Railway Operations Engineer,
2001-2009




CORY MCPHEE
 Komisaris | Commissioner

Periode jabatan: Penutupan RUPS Luar Biasa 16 Agustus 2019 - penutupan RUPS Tahunan 2020	Period in Office: Extraordinary GMS Closing August 16, 2019 - Annual GMS Closing 2020
Lahir: 9 Juni 1963 Usia 56 tahun	Born: June 9, 1963 Age 56
Kewarganegaraan: Kanada	Nationality: Canadian
Domisili: Kanada	Domicile: Canada
Riwayat Pendidikan 1. Bachelor of Science dari Laurentian University 2. Bachelor of Journalism dari Cambrian College	Education History 1. Bachelor of Science degree from Laurentian University 2. Bachelor of Journalism degree from Cambrian College
Riwayat Jabatan <ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum Penunjukan Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Luar Biasa 16 Agustus 2019. • Rangkap Jabatan Lihat uraian halaman 73 • Pengalaman Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice President Corporate Affairs, Communications and Sustainability, Vale Base Metals (2018 - present) 2. Vice President Corporate Affairs and Communications, Vale Base Metals (2009 - 2018) 3. Direktur Corporate Affairs, Vale Base Metals (2007 - 2009) 4. Public Affairs Department, Inco Limited (1989 - 2007) 	Position History <ul style="list-style-type: none"> • Legal Basis for Appointment Appointed as Company Commissioner on August 16, 2019 at the Extraordinary GMS. • Concurrent Positions See page 73 • Work Experience <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice President of Corporate Affairs, Communications and Sustainability, Vale Base Metals (2018 - present) 2. Vice President of Corporate Affairs and Communications, Vale Base Metals (2009 - 2018) 3. Director of Corporate Affairs, Vale Base Metals (2007 - 2009) 4. Public Affairs Department, Inco Limited (1989 - 2007)



Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Concurrent Positions

Peraturan Perseroan mengatur perihal rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada tidak lebih dari dua emiten atau perusahaan publik.
- Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi di perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, paling banyak pada empat emiten atau perusahaan publik lain.
- Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota Komite paling banyak lima Komite di Perseroan dan perusahaan publik lain. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat berlaku.

The Company regulates the concurrent positions of Board of Commissioners' members as follows:

- Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as members of a Board of Directors or a Board of Commissioners at no more than two companies or other public companies.
- If the Board of Commissioners members do not hold concurrent positions as a member of a Board of Directors in other companies then the relevant members may hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners at no more than four companies or other public companies.
- Members of the Board of Commissioners may become a member of five committees at a maximum in the Company and in other public companies where the relevant members also serve as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

Concurrent positions may only be made as long as they are not contrary to other laws and regulations. If any other regulations, which control the provisions of concurrent positions, differ from the OJK regulations, then the more restrictive one applies.



RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners' Concurrent Positions

No	Nama Name	Jabatan pada Perseroan Position in the Company	Jabatan pada Perusahaan Lain Position in Other Companies
1	Mark James Travers*	<ol style="list-style-type: none"> Presiden Komisaris Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <ol style="list-style-type: none"> President Commissioner Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee 	<ol style="list-style-type: none"> Interim Chief Executive Officer Divisi Base Metal Vale S. A. (2019 - sekarang)* Chairman Log-In Logistica Intermodal S.A. Executive Director dari Divisi Base Metal di Vale Australia (IP) Pty. Ltd. <ol style="list-style-type: none"> Interim Chief Executive Officer, Vale Base Metals (2019 - present)* Chairman of Log-In Logistica Intermodal S. A. Executive Director of Base Metal Division at Vale Australia (IP) Pty. Ltd.
2	Mahendra Siregar**	<ol style="list-style-type: none"> Komisaris Independen Ketua Komite Audit Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <ol style="list-style-type: none"> Independent Commissioner Chair of the Audit Committee Chair of the Governance, Nomination and Remuneration Committee 	<ol style="list-style-type: none"> Presiden Komisaris PT Semen Indonesia Tbk sejak tanggal 26 Juni 2012 Komisaris PT AKR Corporindo Tbk sejak tanggal 5 Mei 2015 Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk sejak bulan Juni 2015 Komisaris Independen PT AJ Sequislife Tbk sejak tahun 2015 Chairman/Non-Executive Director Bank Mandiri (Europe) Ltd. di London sejak bulan Mei 2016 Penasihat Senior PT AT Kearney Indonesia Anggota Dewan Australia-Indonesia Center Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia <ol style="list-style-type: none"> PT Semen Indonesia Tbk President Commissioner since June 26, 2012 PT AKR Corporindo Tbk Commissioner since May 5, 2015 PT Unilever Indonesia Tbk Independent Commissioner since June 2015 PT AJ Sequislife Tbk Independent Commissioner since 2015 Bank Mandiri (Europe) Ltd. London Chairman / Non-Executive Director since May 2016 PT AT Kearney Indonesia Senior Advisor Australia-Indonesia Center Council Member E-Commerce Association of Indonesia Adviser
3	Raden Sukhyar	<p>Komisaris Independen</p> <p>Independent Commissioner</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tenaga Ahli Menteri Perindustrian untuk Sumber Daya Alam Anggota Kelompok Kerja ESDM, Komite Nasional untuk Ekonomi dan Industri (KEIN) <ol style="list-style-type: none"> Expert to the Minister of Industry for Natural Resources EMR Working Group, National Committee on Economics and Industry (KEIN) Members
4	Nobuhiro Matsumoto	<ol style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi <ol style="list-style-type: none"> Commissioner Member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee 	<p>General Manager of Non-Ferrous Metal Division of SMM</p> <p>General Manager Non-Ferrous Metal Division at SMM</p>
5	Luiz Fernando Landeiro	<p>Komisaris</p> <p>Commissioner</p>	<ol style="list-style-type: none"> Komisaris, PT Kolaka Nickel Indonesia (2019 - sekarang); Komisaris, PT Bahodopi Nickel Smelting (2019 - sekarang). <ol style="list-style-type: none"> Commissioner, PT Kolaka Nickel Indonesia (2019 - present); Commissioner, PT Bahodopi Nickel Smelting (2019 - present).
6	Cory McPhee	<p>Komisaris</p> <p>Commissioner</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Kamar Dagang Brazil-Kanada (2018 - sekarang); and Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Kanada (2019 - sekarang). <ol style="list-style-type: none"> Co-Chair of Brazil - Canada Chamber of Commerce (2018 - present); and Vice-Chair of Mining association of Canada (2019 - present).

Catatan | Notes:

*) Mark James Travers telah diangkat menjadi Chief Executive Officer Divisi Base Metal Vale S.A. pada bulan Mei 2020.
Mark James Travers has been appointed as Chief Executive Officer of Vale Base Metal in May 2020.

** Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 4 November 2019, sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah disetujui oleh RUPS. Sejak tanggal surat pengunduran diri sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS tersebut, Bapak Mahendra Siregar tidak lagi aktif dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.
Mahendra Siregar submitted his resignation letter as the Company's Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019, following his appointment as the Deputy Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the resignation became effective upon approval at the GMS. Between the date of his resignation until the GMS, Mahendra Siregar was not active as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2019

Board of Commissioners' Education and Training in 2019

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIKUTI DEWAN KOMISARIS Education and Training Followed by the Board of Commissioners

Anggota Komisaris Commissioner	Kegiatan Activity	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place
Raden Sukhyar	Diskusi Panel Peran Komisaris Independen dalam Pengawasan atas Kendala Laporan Keuangan-Belajar dari Beberapa Kasus Terkini Panel Discussion on the Independent Commissioners' Supervisory Role on Financial-Learning Report Constraints with Recent Cases	Jakarta, 5 September 2019, Financial Club Jakarta, September 5 2019, Financial Club
Cory McPhee	Sesi internal tentang pembangunan tim, kepemimpinan, dan respons krisis. Internal sessions on team building, leadership and crisis response.	



Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliation Relationships Between Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

		Dewan Komisaris Board of Commissioners						Direksi Board of Directors						Pemegang Saham pengendali Controlling Shareholders
		Mark James Travers	Mahendra Siregar	Nobuhiro Matsumoto	Luiz Fernando Landeiro	Cory McPhee	Raden Sukhyar	Nicolas D. Kanter	Febriany Eddy	Bernardus Irmanto	Dani Widjaja	Agus Superiadi	Vinicius Mendes Ferreira	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Mark James Travers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v
	Mahendra Siregar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nobuhiro Matsumoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v
	Luiz Fernando Landeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v
	Cory McPhee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v
	Raden Sukhyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direksi Board of Directors	Nicolas D. Kanter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febriany Eddy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bernardus Irmanto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dani Widjaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agus Superiadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vinicius Mendes Ferreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v
Pemegang Saham pengendali Controlling Shareholders		v	-	v	v	v	-	-	-	-	-	-	v	-

Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 4 November 2019, sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah disetujui oleh RUPS. Sejak tanggal surat pengunduran diri sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS tersebut, Bapak Mahendra Siregar tidak lagi aktif dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Mahendra Siregar submitted his resignation letter as the Company's Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019, following his appointment as the Deputy Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the resignation became effective upon approval at the GMS. Between the date of his resignation until the GMS, Mahendra Siregar was not active as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.



Karyawan Perseroan

Company Employees

Karyawan merupakan pemangku kepentingan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesinambungan kegiatan operasi dan bisnis Perseroan. Untuk itu Perseroan harus memastikan setiap posisi terisi dan secara berkala melakukan perekrutan disertai upaya berkesinambungan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan.

PRINSIP KESETARAAN DALAM PEREKRUTAN

PT Vale memberikan kesempatan setara kepada setiap orang untuk bekerja sebagai karyawan. Proses rekrutmen karyawan berlangsung dalam beberapa tahap dan dilaksanakan secara terbuka dengan mengedepankan asas berkeadilan.

Employees are strategic stakeholders who directly influence the sustainability of the Company's operations and business activities. For this reason, the Company must ensure that every position is filled, through regular recruitment, and continuous efforts to improve employees' competencies through training.

PRINCIPLES FOR EQUALITY IN RECRUITMENT

PT Vale provides equal opportunities for everyone to work as an employee. The employee recruitment process involves several stages and is carried out openly and follows the principle of fairness.

TAHAPAN REKRUTMEN KARYAWAN PT VALE

PT Vale Employee Recruitment Stages



Jumlah dan Profil Karyawan

Total Employees and Profiles

Pada tahun 2019 Perseroan telah menerima 40 karyawan baru, terdiri dari 32 laki-laki dan 8 perempuan. Total jumlah karyawan sampai dengan akhir periode pelaporan ada 3.044 orang, berkurang dibanding tahun 2018 sebanyak 3.092 orang.

In 2019 the Company employed 40 new employees, comprising 32 males and 8 females. The total number of employees at the end of the reporting period was 3,044 people, a decrease compared to 3,092 in 2018.

Berdasarkan penempatan, karyawan Perseroan ditempatkan sesuai kebutuhan kegiatan operasi dan pendukung, serta tempat kerja. Secara umum kegiatan Perseroan terbagi dalam dua lingkup yakni operasi dan pendukung.

Based on placement, the Company's employees are placed according to the needs of the operating and supporting activities, as well as the workplace. In general, the Company's activities are divided into two, namely operations and support.

- Departemen-departemen lingkup operasi terdiri dari, Mines, Process Plant, Environment & Energy, Health, Safety & Operational Risk, Operational Planning & Geotechnical, Engineering Planning & Capital and Operation.
- Departemen-departemen lingkup pendukung adalah People & Culture, Supply Chain Management, Legal, Information Technology, Finance, External Relation & Corporate Affairs, Support & Site Services, Indonesia Growth Project ("IGP"), Internal Audit, Risk Management Unit, Compliance dan Ethics and Conduct Office

- Operations Departments include Mines, Process Plant, Environment & Energy, Health, Safety & Operational Risk, Operational Planning & Geotechnical, Engineering Planning & Capital and Operation.
- Supporting Departments include People & Culture, Supply Chain Management, Legal, Information Technology, Finance, External Relation & Corporate Affairs, Support & Site Services, Indonesia Growth Project ("IGP"), Internal Audit, Risk Management Unit, Compliance, and Ethics and Conduct Office.

Berdasarkan tempat kerja, meliputi wilayah Kantor Pusat Jakarta, Kantor Perwakilan Makassar, pusat operasional Perseroan dan permukiman karyawan di Sorowako, serta karyawan yang ditugaskan di lokasi untuk pembangunan pabrik feronikel di Bahodopi dan pabrik HPAL di Pomalaa.

Based on the workplace, they cover the Jakarta Head Office, Makassar Representative Office, the Company's operational centres, and employee settlements in Sorowako, as well as locations for the construction of the ferronickel in Bahodopi and HPAL plant in Pomalaa.

JUMLAH KARYAWAN BARU BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

Number of New Employees Based On Employment and Gender Status

Jabatan Position	2019		2018		2017	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Management	1	0	0	0	0	0
Senior General Manager/Spesialis Senior General Manager/Specialist	2	0	4	0	1	0
General Manager/Spesialis General Manager/Specialist	6	2	1	0	5	0
Staff	15	6	15	3	5	3
Non-staf	8	0	12	0	176	3
Jumlah Total	32	8	32	3	187	6
	40		35		193	

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN JENIS KELAMIN

Number of Employees Based On Employment and Gender Status

Status Kepegawaian Employment Status	2019		2018		2017	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Karyawan Tetap Permanent Employees	2,780	243	2,842	243	2,891	257
Karyawan Tidak Tetap Non-permanent Employees	18	3	7	0	14	3
Jumlah Total	2,798	246	2,849	243	2,905	260
	3,044		3,092		3,165	

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

Number of Employees Based On Education Level and Gender

Tingkat Pendidikan Education Level	2019		2018		2017	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Doktor (S3) PhD	1	0	1	0	0	0
Pascasarjana (S2) Master Degree	48	10	45	7	48	10
Sarjana (S1) Bachelor Degree	559	110	563	105	576	108
Diploma 3 D3 Diploma	270	69	282	72	285	78
Diploma 2 D2 Diploma	25	1	25	1	25	1
Diploma 1 D1 Diploma	2	3	2	3	2	3
SLTA/Sederajat Senior High School	1,856	53	1,895	55	1,929	59
SLTP/Sederajat Junior High School	28	0	29	0	30	0
SD Elementary School	1	0	2	0	3	0
Ekspatriat Expatriate	8	0	5	0	7	1
Jumlah Total	2,798	246	2,849	243	2,905	260
	3,044		3,092		3,165	

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA DAN JENIS KELAMIN

Number of Employees Based On Age Group and Gender

Kelompok Usia Age Group	2019		2018		2017	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
> 50	401	13	313	10	249	13
30 – 50	2,294	219	2,399	224	2,469	230
< 30	103	14	137	9	187	17
Jumlah Total	2,798	246	2,849	243	2,905	260
	3,044		3,092		3,165	



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN DAERAH PENEMPATAN DAN JENIS KELAMIN

Number of Employees Based On Placement Location and Gender

Lokasi Penempatan Placement Location	2019		2018		2017	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Kantor Pusat Jakarta Jakarta Head Office	35	16	29	17	25	19
Kantor Perwakilan Makassar Makassar Representative Office	3	2	3	1	3	1
Sorowako	2,745	228	2,807	225	2,867	240
Bahodopi	10	0	10	0	10	0
Pomalaa	5	0	0	0	0	0
Jumlah Total	2,798	246	2,849	243	2,905	260
	3,044		3,092		3,165	

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN FUNGSI PENEMPATAN DAN JENIS KELAMIN

Number of Employees Based On Placement Function and Gender

Fungsi Penempatan Placement Function	2019		2018		2017	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Operasi Operation	2,488	140	2,543	129	2,559	127
Pendukung Supporting	310	106	306	114	346	133
Jumlah Total	2,798	246	2,849	243	2,905	260
	3,044		3,092		3,165	

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKATAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

Number of Employees Based On Position Level and Gender

Tingkatan Jabatan Position Level	2019		2018		2017	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Management	5	1	3	1	3	1
Senior General Manager/Specialist	10	0	6	0	9	1
General Manager/Specialist	57	6	54	4	50	5
Senior Staff/Manager	267	32	274	30	282	36
Staff	596	92	575	91	567	93
Non-Staff	1,863	115	1,937	117	1,994	124
Jumlah Total	2,798	246	2,849	243	2,905	260
	3,044		3,092		3,165	

Pelatihan Untuk Karyawan

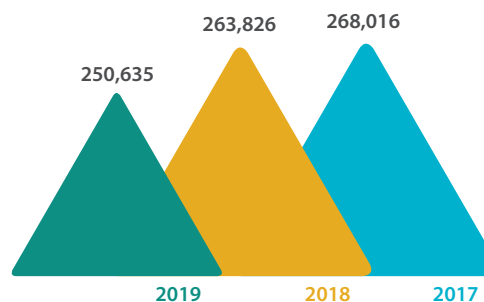
Employee Training

Setiap karyawan memiliki kesempatan setara untuk mengikuti pelatihan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pengembangan Perseroan. Selama tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan 125.070 jam pelatihan dengan total peserta pelatihan sebanyak 23.569 peserta, meningkat 1,4% dibanding tahun 2018 sebanyak 123.393 jam pelatihan. Total biaya yang diinvestasikan untuk pelatihan pekerja tahun 2019 mencapai AS\$250.635, berkurang 5% dibanding tahun 2018 sebesar AS\$263.826. Pengurangan ini disebabkan karena sebagian besar program pelatihan dilaksanakan secara *in-house* di *site* Sorowako, dengan memanfaatkan sumber daya internal Perseroan.

Each employee has an equal opportunity to attend training based on the Company's needs and development plans. During 2019, the Company conducted 125,070 training hours with 23,569 participants, an increase of 1.4% compared to 123,393 training hours in 2018. The total employee training costs in 2019 reached US\$250,635, a decrease of 5% compared to US\$263,826 in 2018. The decrease is due to the majority of the training programs were in-house at the Sorowako site using Company's internal resources.



**BIAYA PENDIDIKAN
PELATIHAN KARYAWAN (AS\$)**
Employee Education and
Training Costs (US\$)



PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN

Employee Education and Training

Jenis Pelatihan dan Pendidikan Type of Employee Education and Training	2019		2018		2017	
	Jumlah Peserta Number of Participants	Jam Pelatihan Training Hours	Jumlah Peserta Number of Participants	Jam Pelatihan Training Hours	Jumlah Peserta Number of Participants	Jam Pelatihan Training Hours

INTERNAL

Teknikal Technical	8,630	42,600	4,935	37,626	3,500	28,000
Manajemen dan Profesional Management and Professional	1,230	11,220	1,641	13,393	651	5,208
Teknologi Informasi Information Technology	752	1,620	868	1,867	638	5,104
Bahasa Language	520	1,130	922	1,892	59	472
Keselamatan Kerja Safety	12,292	63,200	10,458	63,815	4,051	32,408
Jumlah Total	23,424	119,770	18,824	118,593	8,899	71,192

EKSTERNAL | EXTERNAL

Beragam jenis pelatihan Miscellaneous	145	5,300	131	4,800	56	2,112
Jumlah Total	23,569	125,070	18,955	123,393	8,955	73,304

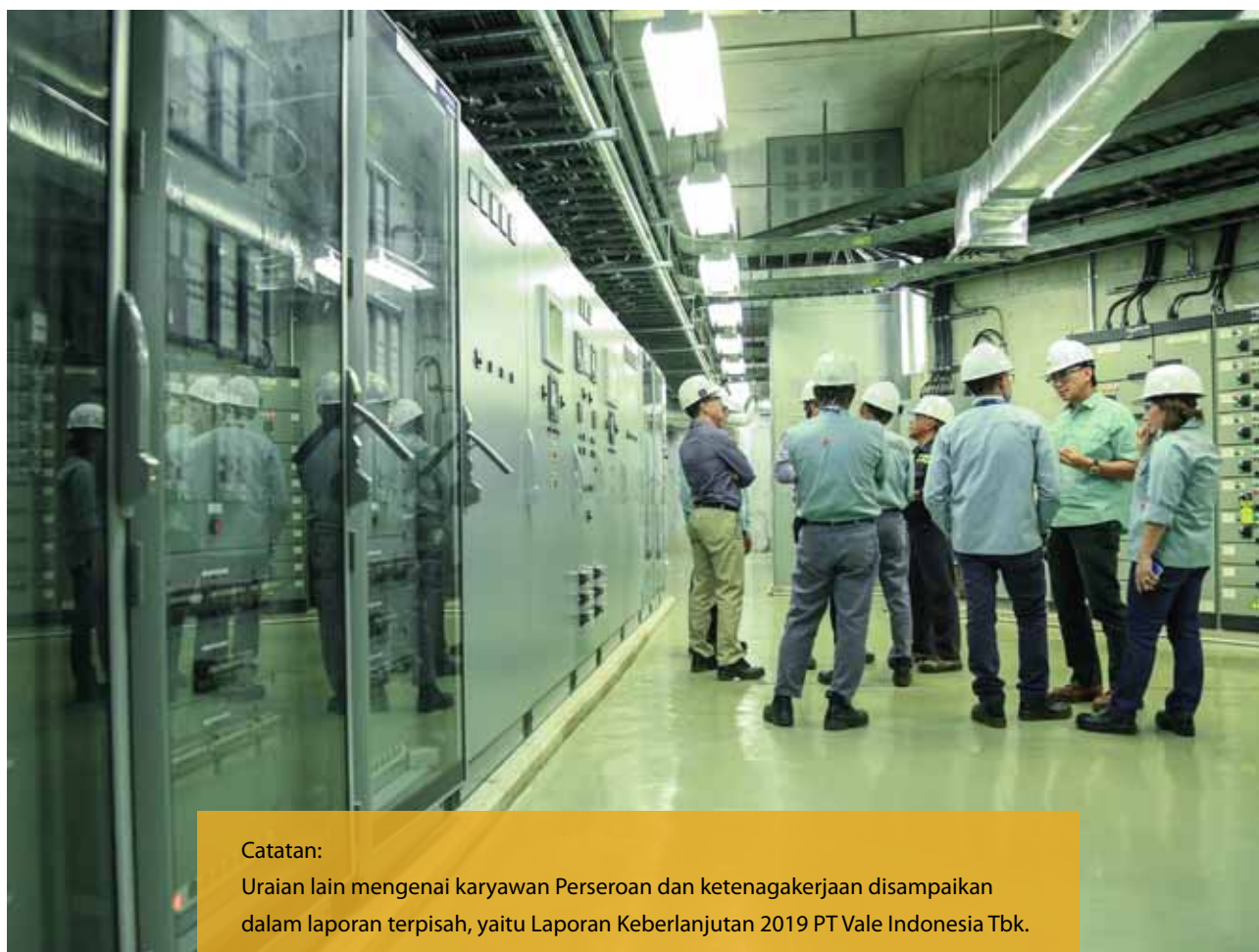


Perseroan berkomitmen meningkatkan kompetensi karyawan, dengan melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi ("LSP") Vale yang telah mendapatkan akreditasi sebagai LSP Pihak 1 (*first party*) di bawah koordinasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Keberadaan LSP Vale membantu manajemen melakukan pengembangan karyawan dengan standar kompetensi jelas, terukur dan teruji secara nasional.

The Company is committed to improve employee's competency by engaging Vale's Professional Certification Institution ("PCI") that has been accredited as a first party PCI under the coordination of the National Agency for Professional Certification (NAPC). Vale' PCI ensures that the management develops its employees with clear, measurable, and tested national competency standards.

Pada tahun 2019 LSP telah melakukan sertifikasi profesi bagi 250 pekerja. Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pekerja Perseroan yang mendapatkan sertifikasi profesi LSP mencapai 1.521 orang atau 52% dari total pekerja. Mereka antara lain bertugas di bidang mekanik pemeliharaan alat berat, teknisi elektrik, instrumentasi, mekanik pemeliharaan pabrik, petugas pergudangan, petugas pemadam kebakaran, operator alat berat, operator pabrik peleburan nikel dan operator utilitas.

In 2019 Vale PCI conducted professional certification for 250 employees. By the end of 2019, 1,521 Company employees, or 52% of the total employees, had received LSP professional certification. They include heavy equipment mechanics, electrical technician, instrumentation, factory maintenance mechanics, warehousing officers, firefighters, heavy equipment operators, nickel smelter operators and utility operators.



Catatan:

Uraian lain mengenai karyawan Perseroan dan ketenagakerjaan disampaikan dalam laporan terpisah, yaitu Laporan Keberlanjutan 2019 PT Vale Indonesia Tbk.

Note:

Other disclosure regarding Company's employees and employment matters can be found in the PT Vale Indonesia Tbk's 2019 Sustainability Report.



Daftar Pemegang Saham

List of Shareholders

Pada 11 Oktober 2019 Perseroan bersama VCL dan SMM telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan dengan MIND ID, sebagai bagian dari pelaksanaan divestasi tahap kedua atas 20% saham Perseroan. Pada tanggal 19 Juni 2020, PT Vale diberitahu oleh para pemegang sahamnya, VCL dan SMM bahwa mereka telah menandatangani perjanjian-perjanjian definitif untuk penjualan 20% saham di PT Vale kepada MIND ID. Berdasarkan KK, divestasi merupakan salah satu syarat untuk keberlanjutan operasi PT Vale setelah 2025.

Jumlah seluruh pemegang saham tahun 2019 terdiri dari 15.227, bertambah 7,3% dibanding tahun 2018 yaitu sebanyak 14.189 pemegang saham.

On October 11, 2019 the Company together with VCL and SMM signed a Heads of Agreement with MIND ID, as part of the second phase divestment on divestment of 20% of Company's shares. On June 19, 2020 PT Vale was informed that its shareholders, VCL and SMM have signed the definitive agreements for the sale of a 20% stake in PT Vale to MIND ID. Based on the COW, divestment is one of the requirements for PT Vale's continuity of operations beyond 2025.

The total number of shareholders in 2019 is 15,227, an increase of 7.3% compared to 14,189 shareholders in 2018.

NAMA PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2019

Company Shareholder Names dan Percentage Ownership Per December 31, 2019

No	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Pemegang Saham yang Memiliki 5% Saham Atau Lebih Shareholders Owning 5% of Shares or More			
1	Vale Canada Limited	5,835,607,960	58.73
2	Sumitomo Metal Mining Co.Ltd.	1,996,281,680	20.09
Pemegang Saham yang Terafiliasi Atau Berelasi Affiliated or Related Shareholders			
1	Vale Japan Limited	54,083,720	0.55
2	Sumitomo Corporation	14,018,480	0.14
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Memiliki Saham Board of Commissioners or Board of Directors Members Shareholding			
1	Anggota Dewan Komisaris Members of Board of Commissioners	Tidak Ada None	0.00
2	Anggota Direksi Members of Board of Directors	Tidak Ada None	0.00
Kelompok Pemegang Saham yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham Shareholder Groups with Less Than 5% of Shares			
1	Publik Public	2,036,346,880	20.49
Jumlah Saham Total Shares		9,936,338,720	100.00



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERDASARKAN JENIS INVESTOR PER 31 DESEMBER 2019

Company Shareholders Based On Investor Classification Per December 31, 2019

Jenis Investor Type of Investor	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Kepemilikan Lokal Local Ownership			
Individu Individual	14,355	337,637,704	3.40
Institusi Institution	550	982,810,614	9.89
Sub Total	14,905	1,320,448,318	13.29
Kepemilikan Asing Foreign Ownership			
Individu Individual	103	11,203,540	0.11
Institusi Institution	219	8,604,686,862	86.60
Sub Total	322	8,615,890,402	86.71
Jumlah Saham Total Shares	15,227	9,936,338,720	100.00

20 PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBESAR PER 31 DESEMBER 2019

20 Largest Company Shareholders Per December 31, 2019

No	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
1	Vale Canada Limited	5,835,607,960	58.73
2	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	1,996,281,680	20.09
3	Citibank New York S/A Government of Norway - 15	114,786,900	1.16
4	GIC S/A Government of Singapore	99,265,700	1.00
5	DJS Ketenagakerjaan Program JHT	96,856,000	0.97
6	SSB NYEU S/A City of New York Group Trust-2144614550	58,116,300	0.58
7	Vale Japan Limited	54,083,720	0.54
8	Allianz Life Ind - Smartlink Rupiah Equity Fund	51,242,900	0.52
9	Honky Harjo	46,344,300	0.47
10	PT AXA Mandiri Financial Services S/A Mandiri Dinamic Money Rp	36,895,200	0.37
11	RD Batavia Dana Saham - 898544000	33,667,400	0.34
12	JPMCB NA Re-Vanguard Total International Stock Index Fund	33,636,610	0.34
13	DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	31,449,700	0.32
14	JPMCB NA Re - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	30,595,047	0.31
15	Ssb Nyl0 S/A City of New York Group Trust-2144614328	29,573,400	0.30
16	BNYM RE BNYMLB RE BA G PF A S FOFTBGOSGFI-2039926714	27,813,700	0.28
17	PT AIA Finl - UL Equity	26,662,300	0.27
18	PT Prudential Life Assurance - Sef	26,500,000	0.27
19	PT AIA Finl - Syariah Eq	25,136,300	0.25
20	Reksa Dana Sam Dana Cerdas	24,545,500	0.25

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Shareholdings

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan.

Until the end of 2019, no members of the Board of Commissioners or the Board of Directors hold Company shares.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Majority and Controlling Shareholder

Pemegang saham utama Perseroan adalah VCL, yang dimiliki sepenuhnya oleh Vale S.A. Modal perusahaan Vale S.A. per 31 Desember 2019 terdiri dari 5.284.474.770 saham biasa dan dua belas saham emas (*golden shares*) yang dimiliki Pemerintah Brazil. Vale S.A. berkedudukan di Praia de Botafogo, 186-Botafogo, Rio de Janeiro, Brazil.

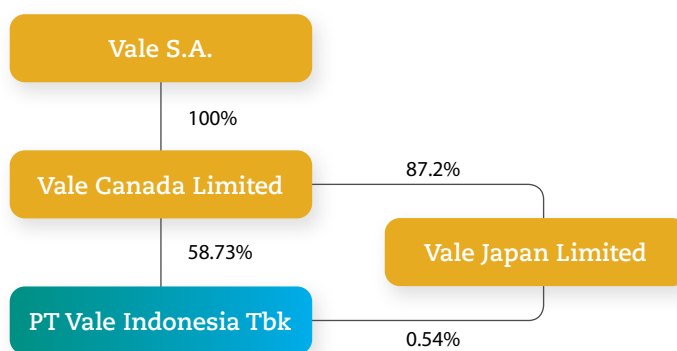
The Company's majority shareholder is VCL, who is fully owned by Vale S.A. Vale S.A.'s corporate capital as of December 31, 2019 was 5,284,474,770 common shares and twelve golden shares owned by the Brazilian Government. Vale S.A. is domiciled at Praia de Botafogo, 186-Botafogo, Rio de Janeiro, Brazil.

Keduabelas saham emas tersebut berhak atas veto terhadap beberapa hal, seperti perubahan nama, lokasi kantor pusat, dan tujuan perusahaan terkait aktivitas tambang. Dengan demikian Vale S.A. menjadi Pemegang Saham Pengendali atas Perseroan, karena melakukan pengendalian langsung maupun tidak langsung.

The twelve golden shares have veto powers over certain actions, such as a change in name, location of the head office, and the Company's purpose as it relates to mining activities. As such, Vale S.A. is the Company's Controlling Shareholder, due to its direct and indirect control.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERSEROAN

Company Majority and Controlling Shareholders Structure



STRUKTUR PEMEGANG SAHAM VALE S.A. PER 31 DESEMBER 2019

Vale S.A. Shareholding Structure as at December 31, 2019

No	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
1	Litela	905,773,534	17.1
2	Litel	74,832,355	1.4
3	Bradespar	293,907,266	5.6
4	Mitsui&co	286,347,055	5.4
5	BNDESPar	323,496,276	6.1

* Struktur kepemilikan saham per Mei 2020, berdasarkan www.vale.com
Shareholding composition as per May 2020 available at www.vale.com



Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lain

Chronology of Shares and Other Securities Listings

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM PERSEROAN

Company Shares Listing Chronology

Tanggal Date	Nama Name	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Shares	Nilai Nominal Par Value	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	Modal Dasar Authorized Capital	Keterangan Description
16 Mei 1990 May 16, 1990	PT International Nickel Indonesia	248,408,468	1,000	248,408,468,000	1,092,600,000,000	Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Listed on the Indonesian Stock Exchange
14 April 2000 April 14, 2000	PT International Nickel Indonesia Tbk	248,408,468	1,000	248,408,468,000	993,663,872,000	Penyesuaian Modal Dasar Authorized Capital Adjustment
3 Agustus 2004 August 3, 2004	PT International Nickel Indonesia Tbk	993,633,872	250	248,408,468,000	993,663,872,000	Pemecahan Saham 1:4 Stock Split 1:4
15 Januari 2008 January 15, 2008	PT International Nickel Indonesia Tbk	9,936,338,720	25	248,408,468,000	993,663,872,000	Pemecahan Saham 1:10 Stock Split 1:10
4 Oktober 2011 October 4, 2011	PT Vale Indonesia Tbk	9,936,338,720	25	248,408,468,000	993,663,872,000	Nama Baru Perseroan Company Name Change

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listings

Selama kurun waktu periode pelaporan, Perseroan tidak mencatatkan efek lainnya pada bursa manapun. Dengan demikian Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait kronologi pencatatan efek lainnya, meliputi nama efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran dan peringkat efek.

During the reporting period, the Company has not listed other securities on any exchange. Therefore, this report does not present information related to the chronology of other securities listing, including the securities name, year of issue, due date, value of bids and securities rating.



Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Insitutions and/or Professionals

Kantor Akuntan Publik | Public Accounting Firm

“Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan”

PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920 – Indonesia

Telp | Phone : (62 21) 521 2901

Fax : (62 21) 52905555, 52905050

Website : www.pwc.com/id

Penasehat Hukum | Legal Counsel

Mochtar Karuwin Komar

Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Lt. 14 Wisma Metropolitan II

Jakarta 12820 Indonesia

Telp | Phone : (62 21) 571 1130

Fax : (62 21) 5711162, 5701686

Website : www.mkklaw.net

Biro Administrasi Efek | Shares Administration

PT Bima Registra

Satrio Tower , 9th Floor A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4

Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp | Phone : (62 21) 2598 4818

Fax : (62 21) 2598 4819

Website : web.bimaregistra.co.id

Notaris | Notary

Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru

Jakarta 12170 Indonesia

Telp | Phone : (62 21) 727 87 232

Fax : (62 21) 723 3607

JASA BERKALA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TAHUN 2019

Periodic Services of Capital Market in 2019

Profesi Penunjang Supporting Professionals	Jasa Services	Komisi (fee) Commission (fee)	Periode Penugasan Assignment Period
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Mengaudit Interim Laporan Keuangan To audit Interim Financial Statements	AS\$230.593 US\$230,593	Selama 6 bulan Periode 2019 For the 6 months period of 2019
	Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2019 To audit Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019	AS\$285.188 US\$285,188	Periode 2019 Period 2019
Biro Administrasi Efek Shares Administration	Menyediakan jasa administrasi efek bagi para pemegang saham Providing securities administration services to the shareholders	-	Periode 2019 Period 2019
Penasehat Hukum Legal Counsel	Menyediakan jasa konsultasi hukum bagi Perseroan Providing legal consultancy services for the Company	-	Periode 2019 Period 2019
Notaris Notary	Menyediakan jasa notaris bagi Perseroan Providing notary services for the Company	-	Periode 2019 Period 2019





Entitas Anak dan Alamat Entitas Anak

Subsidiaries Names and Addresses

Pada tanggal 31 Desember 2019, entitas anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2019, subsidiaries that directly owned by the Company were as follows:

Entitas Anak Subsidiaries	Alamat dan Kedudukan Address and Domicile	Persentase Kepemilikan Efektif Effective Percentage of Ownership		Total Aset (sebelum dieliminasi) Total Assets (before elimination) A\$ US\$	
		2019	2018	2019	2018
PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia	Bahodopi, Sulawesi Tengah Bahodopi, Central Sulawesi	99.9%	0	720	0
PT Kolaka Nickel Indonesia	Kolaka, Sulawesi Tenggara Kolaka, South East Sulawesi	99.9%	0	720	0

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan telah membentuk dua anak perusahaan, yaitu PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan PT Kolaka Nickel Indonesia (“entitas anak”), yang masing-masing 99,9% sahamnya dimiliki Perseroan dan 0,1% saham dimiliki oleh VCL. Total modal ditempatkan dan disetor pada masing-masing entitas anak adalah sebesar IDR10 miliar (nilai penuh). Perseroan telah membayarkan porsi modal Perseroan di kedua entitas anak tersebut pada bulan Desember 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, VCL belum membayarkan porsi modal pada kedua entitas anak tersebut. Pembentukan entitas anak tersebut bertujuan sebagai suatu tahapan dalam pelaksanaan komitmen investasi Perseroan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara berdasarkan Amendemen KK, yang menyatakan komitmen Perseroan atas pembangunan fasilitas pengolahan bijih nikel.

Dua anak perusahaan ini nantinya akan menjadi usaha patungan atau *joint venture* antara Perseroan dengan mitra strategis yang dipilih untuk melaksanakan pembangunan fasilitas pengolahan bijih nikel di Bahodopi, Sulawesi Tengah dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

On June 25, 2019, the Company has established two subsidiaries, namely PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia and PT Kolaka Nickel Indonesia (“Subsidiaries”), each of which has 99.9% of its shares owned by the Company and 0.1% by VCL. The total capital issued and paid for in each of the Subsidiaries is IDR10 billion (full amount). The Company has paid the Company’s capital portion on those Subsidiaries in December 2019. Up to December 31, 2019, VCL has yet paid its capital portion on those Subsidiaries. The establishment of the Subsidiaries is intended as a milestone in the implementation of the Company’s investment commitments in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi provinces based on the COW Amendment, in which the Company is committed to the construction of nickel ore processing facilities.

The two Subsidiaries will become a joint ventures between the Company and appointed strategic partners to implement the construction of nickel ore processing facilities in Bahodopi, Central Sulawesi and Pomalaa, Southeast Sulawesi.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Selama tahun 2019, PT Vale mendapatkan 5 penghargaan berskala internasional dan 8 penghargaan berskala nasional.

During 2019, PT Vale received 5 international awards and 8 national awards.

PENGHARGAAN 2019

2019 Awards

No	Nama Penghargaan Award Name	Tanggal Diterima Date Awarded	Lembaga Pemberi Organization
1	<p>Sustainable Business Awards</p> <ul style="list-style-type: none"> · Overall winner · Terbaik di Kategori Business Responsibility and Ethics · Terbaik di Kategori Workforce <p>Sustainable Business Awards</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overall winner • Best in the Business Responsibility and Ethics Category • Best in the Workforce Category 	<p>7 Januari</p> <p>January 7</p>	<p>Global Initiatives Business Council for Sustainable Development, PricewaterhouseCoopers dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</p> <p>Global Initiatives Business Council for Sustainable Development, PricewaterhouseCoopers and Ministry for National Development Planning/Bappenas</p>
2	<p>Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan ("P2") HIV/AIDS di Tempat Kerja, Kategori Platinum</p> <p>HIV/AIDS Prevention and Management Program Award ("PM") in the workplace, Platinum Category</p>	<p>22 April</p> <p>April 22</p>	<p>Kementerian Ketenagakerjaan</p> <p>Ministry of Manpower</p>
3	<p>Gold Award Annual Report - 2019 Australasian Reporting Award</p> <p>Gold Award Annual Report - 2019 Australasian Reporting Awards</p>	<p>19 Juni</p> <p>June 19</p>	<p>Australasian Reporting Awards ("ARA")</p>
4	<p>ASEAN Coal Award. Peringkat pertama untuk kategori Industri Skala Menengah.</p> <p>ASEAN Coal Award. First place in the Medium Scale Industry category.</p>	<p>2 September</p> <p>September 2</p>	<p>ASEAN Energy Business Forum</p>
5	<p>Penghargaan Subroto 2019 untuk Kategori Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Kelompok Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus</p> <p>Subroto Award 2019 in the Environmental Protection Mining Work Group Contract and Special Mining Business Permit and Special Mining Business Permits category</p>	<p>27 September</p> <p>September 27</p>	<p>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>Ministry of Energy and Mineral Resources</p>
6	<p>Penghargaan Emiten Terbaik dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance, Kategori "Most Improved" Kelas Emiten Kapitalisasi Besar (Big Cap).</p> <p>Best Issuer Award for the Implementation of Good Corporate Governance, in the "Most Improved" Big Cap Issuers category.</p>	<p>14 Oktober</p> <p>October 14</p>	<p>Institute for Corporate Directorship</p>
7	<p>Peringkat 3 dalam Indonesia Green Company Award</p> <p>Ranked 3rd in the Indonesia Green Company Award</p>	<p>22 Oktober</p> <p>October 22</p>	<p>Majalah SWA & Kehati</p> <p>SWA & Kehati Magazine</p>





No	Nama Penghargaan Award Name	Tanggal Diterima Date Awarded	Lembaga Pemberi Organization
8	ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradiction, Kategori Sektor Swasta ASEAN Leadership Award in the Rural Development and Poverty Eradication, Private Sector Category	8 November November 8	ASEAN
9	Indonesian Mining Award, Kategori Perusahaan dengan Pengelolaan Lingkungan Terbaik-Perusahaan Mineral Indonesian Mining Award in the Company with the Best Environmental Management-Mineral Companies category	20 November November 22	Indonesia Mining Association
10	Platinum Asia Sustainability Reporting Rating. Platinum Asia Sustainability Reporting Rating.	23 November November 23	National Center for Sustainability Reporting
11	Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) 2019 kategori Sustainability Reporting Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) 2019 in the Sustainability Reporting category	28 November November 28	Taiwan Institute for Sustainable Energy
12	ASEAN Mineral Award (AMA) 2019, Runner Up kategori Metallic Mineral Processing ASEAN Mineral Award (AMA) 2019, Runner Up in the Metallic Mineral Processing category	13 Desember December 13	ASEAN
13	Peringkat Hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2018-2019 Green Rating Company Performance Rating Program (PROPER) 2018-2019	17 Desember December 17	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ministry of Environment and Forestry

SERTIFIKASI YANG DIMILIKI PERSEROAN

Certification Held by The Company

No	Nama Sertifikasi Certification Name	Masa Berlaku Validity	Lembaga Pemberi Organization
1	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	4 Oktober 2018 - 3 Oktober 2021 October 4, 2018 - October 3, 2021	Bureau Veritas
2	ISO 17025 Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories	1 Oktober 2018 - 30 September 2022 October 1, 2018 - September 30, 2022	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Agency



Informasi Pada Situs Perseroan dan Penyampaian Laporan

Information On The Company Website and Submission Of Reports

Situs Perseroan: www.vale.com/indonesia.

Company website: www.vale.com/indonesia.

Situs Perseroan telah menampilkan informasi yang wajib dimuat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.8/POJK.4/2015 tertanggal 25 Juni 2015 Tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

The Company’s website holds information that must be published in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.8/POJK.4/2015 dated June 25, 2015 concerning Issuer’s or Public Company Websites.





Peristiwa Penting

Significant Events

Tanggal Date	Keterangan Description
6 Februari February 6	PT Vale menggelar Simposium “Keberlanjutan: Investasi Masa Depan” di Hotel Claro, Makassar, sebagai upaya pengembangan wawasan seputar keberlanjutan khususnya di industri tambang. PT Vale held a "Sustainability: Future Investment" Symposium at the Claro Hotel, Makassar, as efforts to develop insights around sustainability, especially in the mining industry.
28 Februari February 28	Penyerahan bantuan Puskesmas dan dua unit hunian sementara kepada Pemerintah Kota Palu untuk warga Kelurahan Mamboro, yang merupakan korban gempa dan tsunami yang terjadi September 2018. Grant the donation of Puskesmas and two temporary shelter units to the Palu Government for residents in the Mamboro Village, who were victims of the September 2018 earthquake and tsunami.
23 Mei May 23	<i>Boiler</i> Listrik Baru PT Vale mendapat “buku merah” (persetujuan pengoperasian penuh) oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (“Disnakertrans”) Provinsi Sulawesi Selatan. <i>Boiler</i> baru ditenagai listrik yang berasal dari PLTA menggantikan model sebelumnya yang ditenagai bahan bakar <i>high sulfur fuel oil</i> (“HSFO”). PT Vale's New Electric Boiler received a full operating agreement (red book) from the South Sulawesi Province Manpower and Transmigration Office (“Disnakertrans”). The new hydropower electricity boiler replaces the previous model that was powered by high sulfur fuel oil (“HSFO”).
9 Juli July 9	Para <i>leaders</i> level L2 hingga L4 mengikuti pelatihan “Alignment & Basic Calibration of Beyond Compliance Toward Green/Gold PROPER” di Hall TAB, Sorowako. Pelatihan ini bertujuan untuk persiapan PT Vale menuju PROPER Hijau. L2 to L4 level leaders participated in "Alignment & Basic Calibration of Beyond Compliance Toward Green/Gold PROPER" training at TAB Hall, Sorowako. This training is to prepare PT Vale for Green PROPER.
23 September September 23	CEO Vale S.A. Eduardo Bartolomeo menemui Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas divestasi PT Vale sesuai amanat amendemen KK PT Vale dengan Pemerintah Indonesia. Vale SA CEO Eduardo Bartolomeo met with Indonesian President Joko Widodo at the State Palace, Jakarta to discuss PT Vale's divestment in accordance with PT Vale's COW amendment mandate with the Government of Indonesia.
2 Oktober October 2	Deputy CEO Febriany Eddy dan COO Vinicius Mendes Ferreira mengunjungi lokasi proyek yang menandai selesainya proyek Penguatan Dam Batubesi dan Laron Canal Lining. Febriany, Deputy CEO and Vinicius Mendes Ferreira, COO of the Company inaugurate the completion of Batubesi Dam Strengthening and Laron Canal Lining project in the location.
11 Oktober October 11	PT Vale bersama dengan para pemegang sahamnya, VCL dan SMM, serta MIND ID menandatangani Perjanjian Pendahuluan sebagai awal dari proses divestasi setelah penunjukan MIND ID sebagai perwakilan Pemerintah untuk mengakuisisi saham divestasi PT Vale, untuk memenuhi kewajiban divestasi PT Vale. PT Vale, together with its shareholders, VCL and SMM, and MIND ID signed a Heads of Agreement, representing the beginning of the divestment process. This followed the appointment of MIND ID as the Government representative to acquire PT Vale's divested shares, to fulfil PT Vale's divestment obligation.
11 Desember December 11	PT Vale bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, BPBD Luwu Timur dan masyarakat menggelar simulasi Rencana Tindak Darurat (“RTD”) Bendungan Seri Sungai Laron di lima desa di Kecamatan Malili. PT Vale with the East Luwu Regency Government, East Luwu BPBD, and the communities held a simulation of the Laron River Dam Series Emergency Action Plan (“RTD”) in five villages in the Malili District.
17 Desember December 17	Untuk pertama kali sepanjang sejarah PT Vale, kami meraih predikat PROPER Hijau dari KLHK. For the first time in the history of PT Vale, the Company received a Green PROPER rating from the KLHK.







ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management
Discussion and Analysis

PT Vale Indonesia Tbk memiliki komitmen berinvestasi di Indonesia dalam jangka panjang.

PT Vale Indonesia Tbk is committed to long-term investments in Indonesia.



Tinjauan Operasional

Operational Overview



Tinjauan Umum

General Overview



Sektor pertambangan termasuk pertambangan mineral dan batubara (minerba) masih akan menjadi salah satu andalan penerimaan negara Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Ada beberapa komoditas yang akan menjadi unggulan, di antaranya nikel yang diproduksi juga oleh PT Vale.

The mining sector, including minerals and coal (minerba) will still be one of the mainstays of Indonesian state revenue in the next few years. There will be several prime mining commodities and Nickel, which is produced by PT Vale, is one of them.

Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") dari sektor mineral dan batubara (minerba) tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2019, PNBP minerba terkumpul sebanyak IDR45,02 triliun, turun 9,96% dibanding realisasi tahun 2018 yang mencapai IDR50 triliun.

Non-Tax State Revenue ("PNBP") from mineral and coal (minerba) sector in 2019 decreased compared to the previous year. Throughout 2019, the total PNBP collection from mining sector was IDR45.02 trillion, 9.96% lower compared to the number collected in 2018 of IDR50 trillion.

Kendati demikian, realisasi PNBP dari sektor pertambangan ini sedikit melampaui target yang dipatok di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") 2019 sebesar IDR43,26 triliun [1].

Nevertheless, the realization of PNBP from mining sector slightly exceeded the target set in the 2019 state budget ("APBN") of IDR43.26 trillion [1].

Pencapaian tersebut tak terlepas dari komitmen Pemerintah mendukung pengembangan dan investasi pertambangan minerba, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan. Sejak tahun 2018 pertambangan minerba memperlihatkan pertumbuhan positif, sebagai pengaruh dari beberapa kebijakan Pemerintah.

This achievement was the result of the Government's commitment to supporting the development and investment of mineral mining, while continuing to pay attention to environmental preservation. Since 2018 mineral mining has shown positive growth as a result of several Government policies.

Penerbitan Peraturan Presiden ("Perpres") No. 55/2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, serta kebijakan mengenai percepatan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah per 1 Januari 2020 memberikan sentimen positif terhadap kinerja perusahaan pertambangan nikel nasional termasuk PT Vale.

The Presidential Regulation ("Perpres") No. 55/2019 concerning Battery-powered Electric Vehicles for the Road Transportation Program, and the policy for accelerating the low grade ore export ban to January 1, 2020 have provided positive sentiments to support the performance of nickel mining companies, including PT Vale.

[1] <https://industri.kontan.co.id/news/menurun-pnbp-sektor-minerba-sentuh-rp-4502-triliun-di-2019?page=all>



Tinjauan Pasar Nikel Global dan Kinerja Perseroan

Global Nickel Market Overview and Company Performance

Dunia membutuhkan nikel sebagai bahan pembuatan baja nirkarat, *alloy*, *plating*, baterai dan lainnya yang banyak digunakan untuk konstruksi, industri otomotif, serta industri energi. Saat ini kebutuhan nikel dunia dipasok beberapa negara, dan Indonesia sendiri saat ini menguasai kurang lebih 20% total ekspor nikel dunia.

Pasar nikel dunia di tahun 2019 semakin berkembang dengan tumbuhnya permintaan dan penawaran produk nikel. Kenaikan permintaan datang dari industri *stainless steel*, sementara itu, kenaikan pasokan produk nikel di dorong oleh mulai beroperasinya pabrik-pabrik RKEF baru/tambahan di Indonesia. Rumor mengenai percepatan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah dari Indonesia yang dimulai bulan Juli 2019 sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019 telah memicu kenaikan harga nikel di pasar global. Dengan keluarnya peraturan ini, maka mulai 1 Januari 2020, ekspor nikel kadar <1.7% keluar negeri dihentikan. Dari Agustus sampai Desember, terjadi pengiriman bijih nikel ke luar negeri dalam jumlah yang besar, yang dikhawatirkan menyebabkan market *over supply*. Hal tersebut menyebabkan penurunan harga nikel di triwulan ke-empat 2019.

Meskipun mengalami penurunan produksi di triwulan pertama sebagai akibat dari proyek Laron Canal Lining dan juga masalah yang terjadi pada tanur listrik 4, PT Vale tetap memberikan kontribusi besar bagi pasokan nikel Indonesia ke pasar dunia di tahun 2019. Setelah aktivitas pemeliharaan diselesaikan di bulan Mei 2019, Perseroan mampu meningkatkan produksi secara stabil pada triwulan selanjutnya, sehingga bisa mencapai produksi 71.025 ton nikel dalam matte.

The world needs nickel as a material for producing stainless steel, alloy, plating, batteries and other materials used in the construction, automotive and energy industries. Currently several countries supply the world's nickel needs, and Indonesia hold 20% shares of the world nickel export market.

The world nickel market in 2019 is growing as the demand and supply of nickel products increase. The demand increase comes from the stainless steel industry, while the increase in supply side was driven by the commencement of new/additional RKEF operations in Indonesia. The rumor regarding the acceleration of low-grade nickel ore export ban which was first aired in July 2019, which was then confirmed by issuance of minister of EMR regulation no.11 or 2019 has driven the nickel price increase in the global market. With the issuance of this regulation, starting January 1, 2020, export of nickel ore with grade lower than 1.7% is banned. Between August and December 2019, there was significant amount of nickel ore shipped outside of Indonesia which could potentially create market over supply. This has led to a drop in nickel prices in the fourth quarter of 2019.

Despite of lower performance in first quarter due to the Laron Canal Lining project and technical problems occurred in furnace 4, PT Vale made a major contribution still to Indonesia's nickel supply to the world market in 2019. After the completion of maintenance works in May 2019, the Company could increase its production to stable rate so that the total production of 71,025 ton could be achieved. This number is 5% lower than 2018 production of 74,806 tons and represents 3% of total 2019 global nickel production.

Kebutuhan nikel dunia dalam beberapa tahun mendatang, diperkirakan masih cukup tinggi meski industri baja dunia sebagai pasar utama mengalami tekanan permintaan dan isu mengenai Corona Virus ("Covid-19") telah menyebabkan penurunan perekonomian dunia utamanya di Cina. Kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel diperkirakan akan mengurangi produksi NPI di Cina karena berkurangnya pasokan bijih nikel dari Indonesia. Di sisi lain, *output* produksi NPI dari Indonesia akan meningkat seiring perkembangan pabrik pengolahan di Indonesia. Kebijakan banyak negara termasuk Indonesia terkait mobil listrik, juga membantu permintaan nikel dunia tetap terjaga.

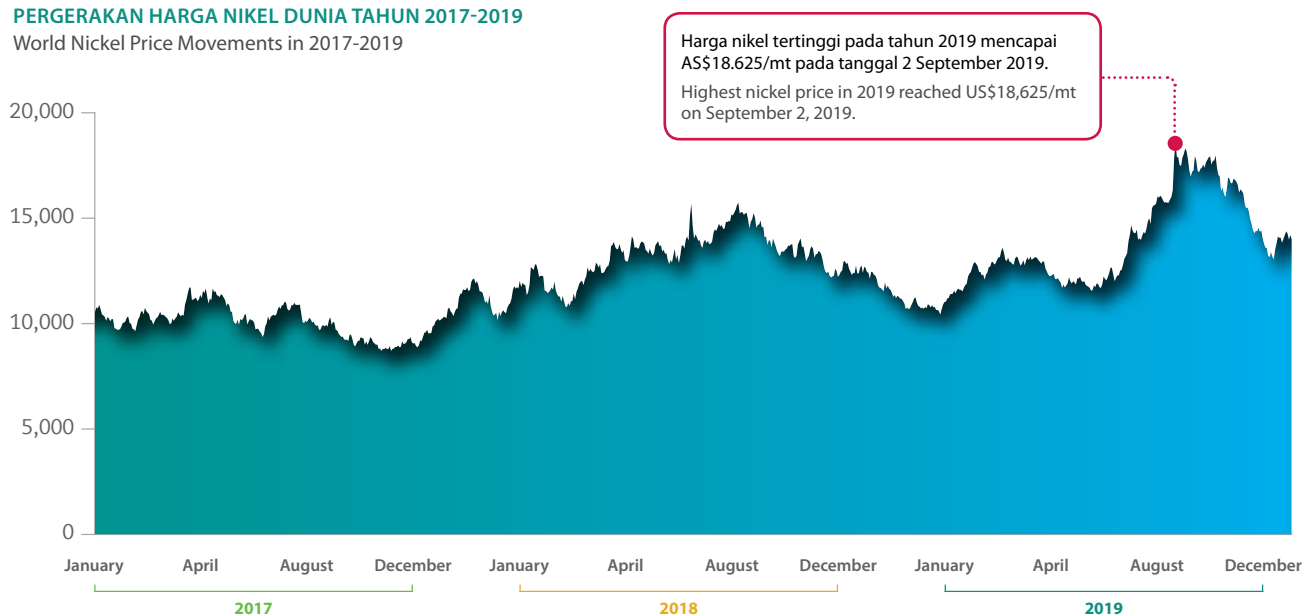
Ketersediaan pasokan nikel dan permintaan nikel di pasar dunia berpengaruh pada harga nikel. Secara umum harga nikel di pasar dunia pada tahun 2019 mengalami fluktuasi. Setelah tertekan di awal tahun, harga nikel di pasar dunia mengalami peningkatan signifikan di semester kedua tahun 2019. Harga nikel sempat mencapai titik tertinggi di harga AS\$18.625 per ton di bulan September 2019, tertinggi sejak Oktober 2014. Menguatnya harga nikel dunia berpengaruh positif pada kinerja keuangan PT Vale.

Global nickel demand in the next few years is expected to remain high even though the world steel industry, as the key market, is experiencing demand pressure, and the issue of the Corona Virus ("Covid-19") has been causing a decline in the world economy especially in China. The Indonesian government policy of banning nickel ore exports is expected to reduce the China NPI production due to reduced supply of nickel ore from Indonesia. Indonesia's NPI production output will increase along with the development of processing plants in Indonesia. Nevertheless, global nickel demand will remain intact as many countries, including Indonesia, are enacting policies regarding electric vehicles.

Nickel supply and demand in the world market has affected the average realized price for nickel, with the price fluctuating in 2019. Following pressure at the start of the year, the average realized world nickel price increased significantly in the second half of 2019. The nickel price was US\$18,625 per ton in September 2019, the highest price since October 2014. The strengthening world nickel price had a positive effect on PT Vale's financial performance.

PERGERAKAN HARGA NIKEL DUNIA TAHUN 2017-2019

World Nickel Price Movements in 2017-2019



Tinjauan Kebijakan Pertambangan Nikel Nasional dan Kinerja Perseroan

National Nickel Mining Policy Overview and Company Performance

Percepatan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah menjadi 1 Januari 2020 memengaruhi pasokan bijih nikel untuk kebutuhan global dan memicu kenaikan harga nikel di LME. Hal ini memberikan sentimen positif pada kinerja keuangan Perseroan yang sempat menurun di semester pertama 2019, menjadi membaik pada periode-periode triwulan berikutnya. Dalam sisa waktu sampai dengan pada paruh kedua di tahun 2019, pasar merespon dengan melakukan impor terhadap produk bijih nikel Indonesia sebagai buffer. Hal ini juga yang menyebabkan kenaikan persediaan nikel yang menyebabkan tertahannya kenaikan harga nikel, disamping tekanan dari wabah Corona Virus di Cina.

Kinerja produksi Perseroan pada triwulan pertama 2019 sebesar 13.867 ton, lebih rendah 36% dibanding triwulan keempat 2018 sebanyak 20.579 ton. Kinerja penjualan pada triwulan pertama 2019 tercatat 13.867 ton, lebih rendah 34% dari penjualan triwulan keempat 2018. Pada triwulan pertama PT Vale membukukan EBITDA AS\$4,0 juta, sebagai akibat dari kombinasi volume penjualan dan harga realisasi rata-rata yang lebih rendah. Rendahnya penjualan di triwulan pertama 2019 ini disebabkan aktivitas pemeliharaan yang terencana pada bendungan Larona.

Kinerja produksi Perseroan pada triwulan kedua 2019 mencapai 17.631 ton atau lebih tinggi 35% dibandingkan produksi triwulan pertama, karena aktivitas pemeliharaan bendungan Larona telah selesai dilaksanakan. Kinerja penjualan pada triwulan kedua 2019 sebesar 16.966 ton, meningkat 22% dibanding triwulan pertama, dengan total pendapatan meningkat 31% menjadi AS\$165,8 juta yang dipengaruhi kenaikan harga realisasi rata-rata sebesar 7% dibanding triwulan pertama menjadi AS\$9.774 per ton. EBITDA yang dibukukan pada triwulan kedua sebesar AS\$28,8 juta, lebih tinggi dibanding triwulan pertama sebagai pengaruh

The acceleration of the enactment of the low-grade ore export ban to January 1, 2020 affected the nickel ore supply for global needs and triggered price increases nickel on LME. This gave a positive sentiment on performance the Company's financial performance, which was quite poor in in the first semester of 2019, and drove better financial numbers in the second half of the year. Within the remaining period until January 1, 2020, the market was in a rush to import the Indonesia's nickel ore as a buffer. This led to an increase in nickel inventories and contributed to the restraining of nickel prices increases, besides pressure from Corona Virus pandemic in China.

The Company's production in the first quarter of 2019 was 13,867 tons, 36% lower than the fourth quarter of 2018's production of 20,579 tons. Sales in the first quarter of 2019 was 13,867 tons, 34% lower than sales in the fourth quarter of 2018. In the first quarter, PT Vale's recorded EBITDA of US\$4.0 million due to lower shipment and average realized price. The lower shipment in the first quarter of 2019 was due to planned maintenance activities of the Larona dam.

Production in the second quarter of 2019 rose to 17,631 tons, 35% higher than the production on the first quarter, following the completion of the Larona dam maintenance. Sales in the second quarter of 2019 was 16,966 tons, 22% higher than the first quarter. Total revenue increased by 31% to US\$165.8 million, driven by 7% increase in average realized price, to US\$9,774/ton level. EBITDA in the second quarter stood at US\$28.8 million, higher than the first quarter as a result of higher sales volume and realized price per metric ton of nickel in matte. In the second quarter, the Company experienced an issue in the electric furnace number 4 that required unplanned

kenaikan volume penjualan dan harga realisasi rata-rata per metrik ton nikel dalam matte. Di triwulan kedua ini, Perseroan mengalami isu di tanur listrik nomor 4 yang memerlukan pemeliharaan tidak terencana di periode ini. Karena masalah ini, produksi di triwulan kedua menjadi 7% lebih rendah di bandingkan periode yang sama di tahun 2018.

Produksi Perseroan pada triwulan ketiga 2019 mencapai 19.820 ton, lebih tinggi 12% dari volume produksi yang direalisasikan pada triwulan kedua sebagai pengaruh dari selesainya aktivitas-aktivitas pemeliharaan utama. Kinerja penjualan pada triwulan ketiga 2019 sebesar 19.999 ton, meningkat 18% dibanding triwulan kedua dengan total pendapatan meningkat 29% menjadi AS\$214,2 juta yang dipengaruhi kenaikan harga realisasi rata-rata sebesar 10% dibanding triwulan kedua menjadi AS\$10.712 per ton. EBITDA yang dibukukan pada triwulan ketiga sebesar AS\$70,3 juta, lebih tinggi dibanding triwulan kedua sebagai pengaruh dari kenaikan volume penjualan dan harga realisasi, serta beban pokok pendapatan per metrik ton nikel matte relatif terjaga.

Kinerja produksi Perseroan membaik di triwulan keempat 2019, dengan mencatatkan produksi sebesar 20.494 ton, lebih tinggi 3% dari volume produksi yang direalisasikan pada triwulan ketiga. Angka penjualan pada triwulan keempat 2019 mencapai 21.211 ton, meningkat 6% dibanding triwulan ketiga dengan total pendapatan meningkat 29% menjadi AS\$275,6 juta yang dipengaruhi kenaikan harga realisasi rata-rata sebesar 21% dibanding triwulan ketiga menjadi AS\$12.991 per ton. EBITDA yang dibukukan pada triwulan keempat sebesar AS\$129,2 juta, lebih tinggi dibanding triwulan ketiga sebagai pengaruh dari kenaikan volume penjualan dan harga realisasi, serta beban pokok pendapatan per metrik ton nikel matte relatif terjaga.

maintenance to be done in this period. As the consequence, the production in the 2nd quarter was 7% lower than the same period in 2018.

Company's production in the third quarter of 2019 was 19,820 tons, 12% higher than the second quarter, following the completion of key maintenance activities. Sales in the third quarter of 2019 was 19,999 tons, 18% higher than the second quarter with total revenue increased 29% to US\$214.2 million, driven by 10% increase in average realized price, to \$10,712/ton level. EBITDA in the third quarter stood at US\$70.3 million, higher than the second quarter due to higher sales volume, higher realized price and relatively stable cost of revenue per metric ton of nickel in matte.

Company's production performance improved in the fourth quarter of 2019 and recorded production of 20,494 tons, 3% higher than the volume of production realized in the third quarter. Sales in the fourth quarter was 21,211 tons, 6% higher than the third quarter. Total revenue increased 29% to US\$275.6 million, driven by 12% increase of average realized price, to US\$12,991/ton level. EBITDA in the fourth quarter stood at US\$129.2 million, higher than the third quarter due to higher sales volume, higher realized price and relatively stable cost of revenue per metric ton of nickel in matte.

IKHTISAR PRODUKSI DAN PENJUALAN NIKEL MATTE TAHUN 2019

Nickel in Matte 2019 Production and Sales Overview

Periode Period	Produksi (MT) Production (MT)	Penjualan (MT) Sales (MT)	Harga Realisasi Rata-Rata (AS\$ per MT) Average Realized Price (US\$ per MT)
Triwulan 1 Quarter 1	13,080	13,867	9,117
Triwulan 2 Quarter 2	17,631	16,966	9,774
Triwulan 3 Quarter 3	19,820	19,999	10,712
Triwulan 4 Quarter 4	20,494	21,211	12,991
Total	71,025	72,044	10,855



Kebijakan lain yang tidak secara langsung mempengaruhi kinerja Perseroan, adalah persetujuan Pemerintah Indonesia terkait realisasi divestasi tahap kedua 20% saham Perseroan. Pemerintah Indonesia telah menunjuk MIND ID sebagai pihak yang melakukan pembelian saham Perseroan. Pada tanggal 19 Juni 2020, PT Vale diberitahu oleh para pemegang sahamnya, VCL dan SMM bahwa mereka telah menandatangani perjanjian-perjanjian definitif untuk penjualan 20% saham di PT Vale kepada MIND ID.

Penandatanganan Perjanjian-perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Pendahuluan yang sebelumnya ditandatangani pada 11 Oktober 2019. Berdasarkan KK, divestasi merupakan salah satu syarat untuk keberlanjutan operasi PT Vale setelah 2025.

Saat ini Perseroan meneruskan pengembangan fasilitas pabrik pengolahan di Sorowako untuk mencapai target kapasitas produksi 90.000 ton per tahun sebelum berakhirnya KK. PT Vale juga melanjutkan rencana pembangunan dua pabrik pengolahan baru, yakni di Bahodopi untuk produksi feronikel, dan di Pomalaa untuk mengonversi bijih nikel menjadi Mixed Sulphide Precipitate ("MSP") sebagai bahan baku produksi baterai mobil listrik.

Another policy that indirectly affected the Company's performance related to the second phase divestment of 20% of Company's shares. The government of Indonesia appointed MIND ID to acquire the Company's divested shares. On June 19, 2020 PT Vale was informed that its shareholders, VCL and SMM have signed the definitive agreements for the sale of a 20% stake in PT Vale to MIND ID.

The signing of the Agreements is a continuation of the Heads of Agreement which was previously signed on 11 October 2019. Based on the COW, divestment is one of the requirements for PT Vale's continuity of operations beyond 2025.

The Company is continuing the development of new processing facility in Sorowako to achieve production capacity of 90,000 tons per year before the expiry of CoW. PT Vale is also progressing with its plan to develop two new processing plants, in Bahodopi for ferronickel production, and in Pomalaa to convert nickel ore into Mixed Sulphide Precipitate ("MSP") which is raw material for Electric Vehicle battery production.

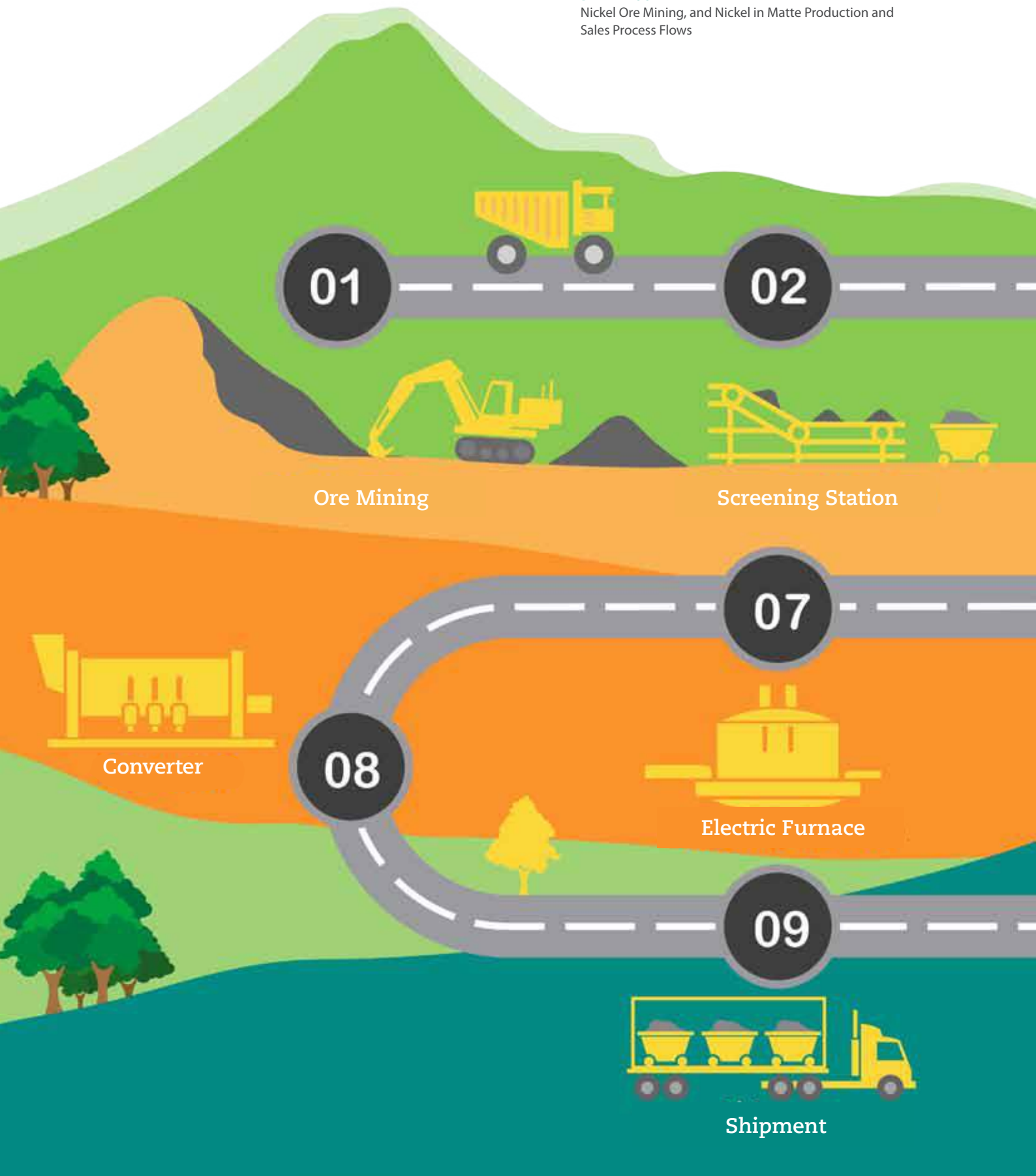
Tinjauan Kinerja Per Segmen Operasi Dan Usaha

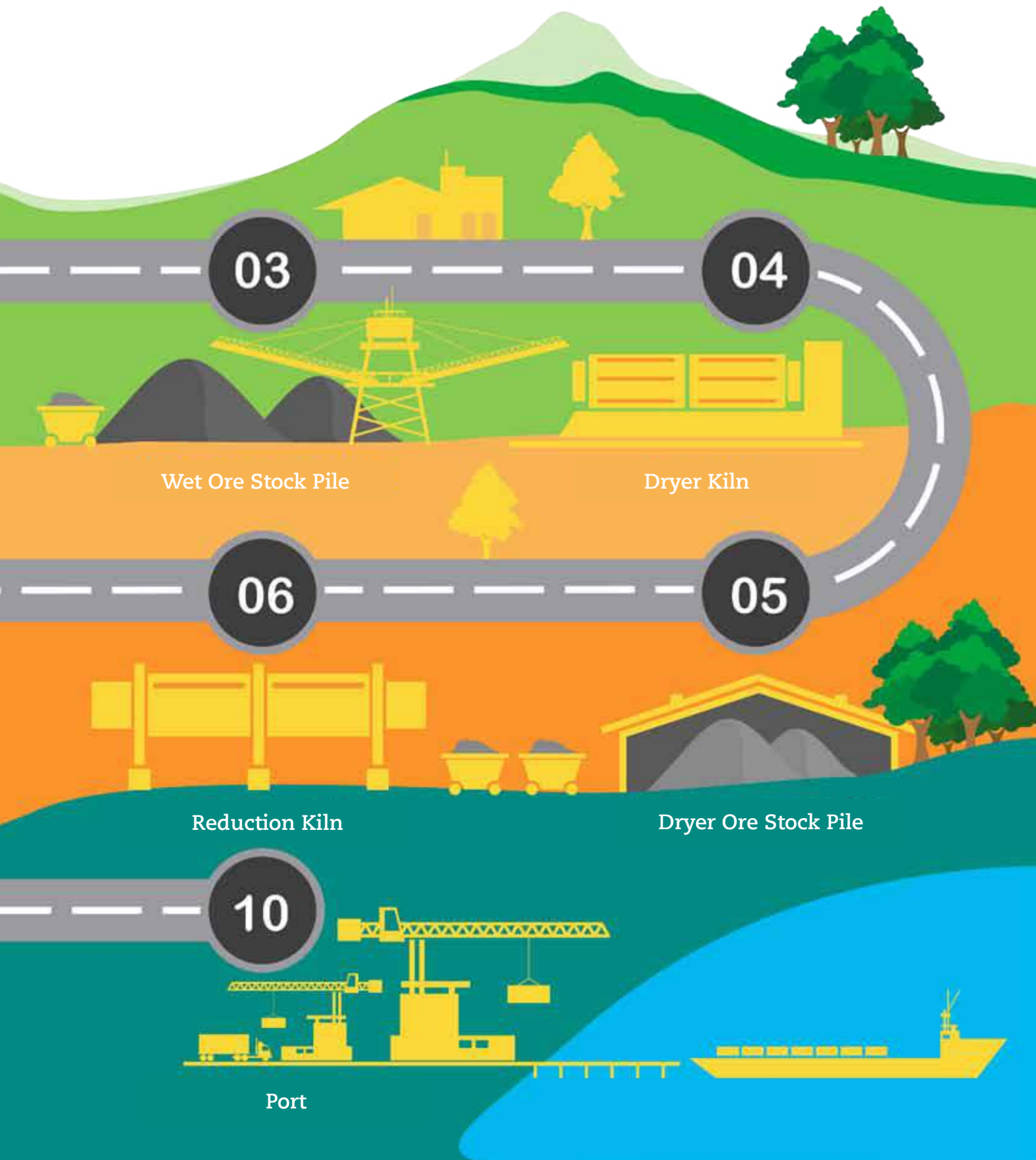
Performance Overview By Operational And Business Segment

Kegiatan operasi dan usaha Perseroan meliputi penambangan bijih nikel, produksi nikel dalam matte dan penjualan nikel matte. Seluruh proses penambangan bijih nikel, produksi nikel dalam matte dan pengapalan berlangsung di Indonesia. Nikel matte dijual kepada VCL dan SMM berdasarkan perjanjian penjualan jangka panjang.

The Company's operations and business activities include nickel ore mining, nickel in matte production and sales. The nickel ore mining, nickel in matte production and shipping takes place in Indonesia. The nickel matte is sold to VCL and SMM under long-term sales agreement.

**ALUR PROSES PENAMBANGAN BIJIH NIKEL, PRODUKSI
DAN PENJUALAN NIKEL MATTE**
Nickel Ore Mining, and Nickel in Matte Production and
Sales Process Flows





Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun buku 2019, segmen operasi dan segmen usaha Perseroan meliputi:

1. Segmen operasi pertambangan bijih nikel
2. Segmen produksi nikel dalam matte
3. Segmen usaha penjualan nikel matte

Kinerja segmen operasi pertambangan bijih nikel dan produksi nikel dalam matte ditentukan berdasarkan volume produksi selama tahun buku, yang dibandingkan dengan periode sebelumnya serta target produksi setahun berikutnya.

Kinerja segmen penjualan nikel matte ditentukan berdasarkan volume penjualan dan perolehan pendapatan dari penjualan nikel matte selama tahun buku, yang dibandingkan dengan periode sebelumnya serta target pada setahun berikutnya.

Based on its activities in fiscal year 2019, the Company's operations and business segments include:

1. Nickel ore mining operations segment
2. Nickel in matte production segment
3. Nickel matte sales segment

The mining operations segment performance for nickel ore and nickel in matte production is determined based on production volumes during the fiscal year, compared to the previous period and production targets for the following year.

The nickel matte segment sales performance is determined based on sales and revenue during the fiscal year, compared to the previous period and targets for the following year.

Strategi Pengembangan Segmen Operasi Pertambangan dan Produksi Mining and Production Segment Development Strategy

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan program keunggulan operasional secara menyeluruh dan terpadu di semua lini bisnis. 2. Penerapan manajemen dan inovasi sistem pergantian <i>shift</i> kerja operasi tambang untuk meningkatkan angka produksi di waktu pergantian <i>shift</i>. 3. Optimalisasi dan penambahan dozer untuk meningkatkan produktivitas yang sejalan dengan faktor keamanan di area penimbunan tanah penutup tambang. 4. Menjaga kualitas bijih dengan meminimalkan dilusi. 5. Mengurangi kandungan air di <i>Screening Station Product</i> ("SSP"). 6. Meningkatkan <i>recovery</i> penyaringan dengan meminimalkan bijih yang terbawa material reject +18 7. Meningkatkan <i>recovery</i> penambangan dengan mengoptimalkan pengoperasian alat kecil di bottom ore profile. 8. Studi geoteknikal pada lereng tambang dan area penimbunan untuk meningkatkan kestabilan dan penambangan yang lebih ekonomis. 9. Penerapan <i>short-term block model</i> untuk mendorong kinerja rencana jangka pendek yang lebih baik. 10. Melakukan optimasi dan kontrol <i>recovery</i> pengolahan di <i>process plant</i>. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementation of a comprehensive and integrated operational excellence program across all business lines. 2. Implementation of management and innovation in the mining operations work shift system to increase production numbers during transition of shifts. 3. Optimization and additional dozer to increase productivity which align with Factor of Safety in the mine waste dump areas. 4. Maintain ore quality by minimize ore dilution. 5. Reduce water moisture content in Screening Station Product ("SSP"). 6. Increase screening station recovery by reduce ore carried over reject +18. 7. Increase mining recovery by optimization small fleet utilization at bottom ore profile. 8. Geotechnical studies on mine slopes and waste dump areas to improve stability and more economical mining. 9. Implementation of short-term block model to stimulate better short-term plan performance. 10. Recovery processing recovery optimization and control improvement. |
|---|---|



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 11. Membuat dan mengimplementasikan <i>Process Technical Standard</i> ("PTS") area pengolahan untuk mengurangi <i>variability</i> dalam proses. 12. Membuat standar metrik untuk mengontrol parameter-parameter kritis dalam proses pengolahan. 13. Membuat standar metrik untuk mengontrol parameter-parameter kritis dalam pemeliharaan peralatan utama. 14. Mengimplementasikan FMDS sebagai bagian dari VPS untuk mengontrol aktivitas rutin di level operator. 15. Melakukan sinkronisasi aktivitas perbaikan antar peralatan utama untuk meminimalkan kehilangan produksi selama perbaikan. 16. Mengembangkan Process Safety Management ("PSM") untuk mencegah kerusakan peralatan akibat kegagalan proses. | <ul style="list-style-type: none"> 11. Preparing and implementing a Process Technical Standard ("PTS") in the processing areas to reduce process variability. 12. Developing standard metrics to control critical processing parameters. 13. Developing standard metrics to control critical key equipment maintenance parameters. 14. Implementing FMDS, as part of the VPS, to control operator routine activities. 15. Synchronizing main equipment repair activities to minimize production loss during repairs. 16. Developing Process Safety Management ("PSM") to prevent equipment damage/breakdown due to process failure. |
|--|---|

Strategi Pengembangan Menuju Produksi 90.000 Ton

Strategi Pengembangan Menuju Produksi 90.000 Ton

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Stasiun penyaringan yang bisa dipindahkan dengan <i>zero water consumption technology</i> untuk mengurangi biaya pengangkutan serta meningkatkan produktivitas alat tambang. 2. Optimasi pit tambang dan penggunaan <i>software</i> penjadwalan tambang. 3. Studi metode baru untuk mengoptimalkan kapasitas <i>waste dump</i>. 4. Peremajaan alat tambang. 5. Program <i>debottlenecking</i> tanur listrik meliputi penerapan sistem granulasi slag, teknologi daur ulang debu, <i>mechanized skimming</i>, <i>mechanized rod measurement</i> dan pemasangan radar di tanur listrik 6. Meningkatkan kapasitas produksi dengan melakukan peningkatan pada <i>dryer system drive</i> (sistem penggerak utama tanur pengering). 7. Mengurangi <i>variability</i> operasi tanur pereduksi dengan memasang <i>Brain Wave Control System</i> (otomasi). 8. Mengurangi <i>variability</i> operasi Calcine Transfer System ("CTS") dengan memasang Calcine Crane Automation di tanur pereduksi No.5. 9. Memasang <i>online analyzer</i> untuk membantu kontrol operasi di tanur pengering. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Modular screening stations with zero water consumption technology to reduce transportation and increase mining equipment productivity. 2. Mine pits optimization and mine production scheduling software implementation. 3. Study of new waste dump method to optimize waste dump capacity. 4. Mining equipment replacement. 5. The furnace debottlenecking program includes a slag granulation system, dust recycling technology, mechanized skimming, mechanized rod measurement, and radar installation in the electric furnace. 6. Upgrading the dryer system drive to increase production capacity. 7. Installing a Brain Wave Control System (automation) to reduce variabilities in reduction kiln operations. 8. Installing Calcine Crane Automation in reduction kiln No. 5 to reduce variabilities in the Calcine Transfer System ("CTS") operations. 9. Installing online analyzer to help controlling dryer operations. |
|--|--|

10. Melakukan studi pengolahan limonite dan saprolite menggunakan *Technored Furnace Technology*.
11. Dalam rangka memenuhi komitmen yang tertuang dalam amendemen perjanjian perpanjangan KK, Perseroan saat ini sedang melakukan evaluasi dan studi untuk menambah satu lini produksi menggunakan teknologi RKEF untuk menghasilkan produk berupa feronikel dengan estimasi produksi 10.000 ton per tahun. Studi akan dijalankan dengan menggandeng perusahaan *engineering* yang berpengalaman dalam pengembangan RKEF di Cina, Myanmar dan Indonesia dan hasil studi diharapkan bisa selesai di akhir tahun 2020. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses konstruksi setelah semua perizinan diperoleh. Dengan kombinasi proyek *continuous improvement* dan tambahan satu lini produksi RKEF ini, diharapkan target produksi mendekati 90.000 ton nikel dapat tercapai sebelum berakhirnya KK.

10. Conducting studies on limonite and saprolite processing using *Technored Furnace Technology*.
11. In order to fulfill the commitments that stipulated in the amendment of the COW extension agreement, Company currently is conducting evaluations and studies to add one production line using RKEF technology to produce products in the form of ferronickel with an estimated annual production of 10,000 tons. The study will be carried out in partnership with an engineering company experienced in developing RKEF in China, Myanmar and Indonesia and the study results are expected to be completed by the end of 2020. The next step is to carry out the construction process after all permits have been obtained. With the combination of continuous improvement projects and the addition of one RKEF production line, it is expected that the production target of 90,000 tons of nickel can be achieved before the expiry of the COW.

Strategi Perusahaan terkait manajemen energi, lingkungan dan keamanan bendungan Company's strategy related to energy, environment and dam safety management:

Energi:

- Memusatkan ruang kontrol utilitas dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air secara jarak jauh dari *plant site*.
- Mengembangkan *road map* energi untuk kebutuhan masa depan yang berfokus pada sumber energi terbarukan.
- Mengimplementasikan program konservasi energi untuk mengoptimalkan penggunaan *green energy* dari pembangkit listrik tenaga air.

Lingkungan:

- Pengembangan sistem manajemen lingkungan yang handal melalui sistem pemantauan *online* yang terintegrasi.
- Menyelesaikan studi keanekaragaman hayati sebagai dasar untuk pengembangan di masa depan.
- Penyamaan pemahaman dengan program manajemen energi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca ("GRK").

Manajemen Keamanan Bendungan:

- Menerapkan sistem pemantauan robotik untuk ketiga bendungan guna menyediakan data yang handal dan aktual untuk memantau integritas bendungan.

Energi:

- Centralize Utilities Control Room and operate hydroelectric plant remotely from plant site
- Develop energy road map for future requirement focusing on renewable energy source.
- Implement energy conservation programs to optimally use of green energy from hydroelectric plants.

Environment:

- Development of a robust environmental management system through integrated online monitoring system.
- Complete biodiversity study as baseline for future development.
- Alignment with energy management program to reduce Green House Gas ("GHG") emission.

Dam Safety Management:

- Implement robotic monitoring system for all three hydro dams that provide more reliable and real data for monitoring the integrity of the dams.



Proyek Larona Canal Lining | Larona Canal Lining Project

Pencapaian Selama Pengerjaan Achievements During Work	Manfaat Operasional Kanal Canal Operations Benefits
<ul style="list-style-type: none"> • Selesai lebih cepat dari jadwal yang direncanakan • Pelibatan ratusan penduduk lokal sebagai pekerja proyek • Perencanaan mitigasi untuk meminimalkan risiko • Nihil kecelakaan kerja dan <i>lost time injured</i> ("LTI"). <ul style="list-style-type: none"> • Completed ahead of the planned schedule • Involved hundreds of local residents as project workers • Mitigation planning to minimize risk • Zero work accidents and lost time injuries ("LTI"). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air lebih stabil dan mengoptimalkan produksi listrik • Meminimalkan kebocoran yang dapat memicu pergerakan tanah. • Meningkatkan keamanan kanal <ul style="list-style-type: none"> • More stabilized water supply and optimized electricity production • Minimized leaks that can trigger ground movement • Improved canal safety

Vale Production System (VPS)	Floor Management Development System (FMDS)	Housekeeping Program
<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi yang aman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, jaminan pada integritas aset dan karyawan. • Memperkuat budaya organisasi PT Vale melalui pengembangan sumber daya manusia, standarisasi praktik terbaik, disiplin operasional, dan kepatuhan terhadap rutinitas. <p>Benefits</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safe and environmentally responsible operations, guarantees the integrity of assets and employees. • Strengthened PT Vale's organizational culture through human resource development, standardized best practices, operational discipline, and compliance with routines. 	<p>Perangkat VPS untuk menerjemahkan target menjadi KPI, memantau kinerja, mengungkap masalah, menangani penyimpangan, dan meningkatkan kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat: Karyawan, EHS-C, Kualitas, Produktivitas, Biaya • Metoda: Pertemuan periodik. <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan karyawan pada pencapaian target. • Pengembangan karyawan dalam pemecahan masalah. <p>VPS tools to translate targets into KPIs, monitoring performance, uncovering problems, dealing with irregularities, and improving performance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tools: People, EHS-C, Quality, Productivity, Costs • Method: Periodic meetings <p>Benefits</p> <ul style="list-style-type: none"> • Employees' involvement in achieving targets. • Employees' problem solving Development. 	<p>Tujuan</p> <p>Membuat referensi pada ruang kerja (atau <i>workposts</i>) untuk membedakan kondisi abnormal dengan kondisi normal, sehingga memungkinkan karyawan secara visual mengenali setiap keadaan dan pemborosan yang tidak diinginkan di ruang kerja.</p> <p>Purpose</p> <p>Creates references in the workposts to differentiate abnormal conditions from normal conditions, so that employees can visually recognize undesirable conditions and waste in the workposts.</p>

Pencapaian 2019 | 2019 Achievements

Kenaikan kinerja tambang harian Daily mining performance improvements	72 FMDS di seluruh PT Vale 72 FMDS throughout PT Vale	Peningkatan signifikan pada kondisi ruang kerja di pabrik Significant improvements in processing plant workspaces
--	--	--



Uraian Segmen Operasi Pertambangan Bijih Nikel

Nickel Ore Mining Operations Segment

Kegiatan operasi pertambangan bijih nikel dijalankan di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penambangan dilakukan secara terbuka. Sampai dengan akhir tahun 2019, area operasi pertambangan meliputi East Block, West Block dan Petea.

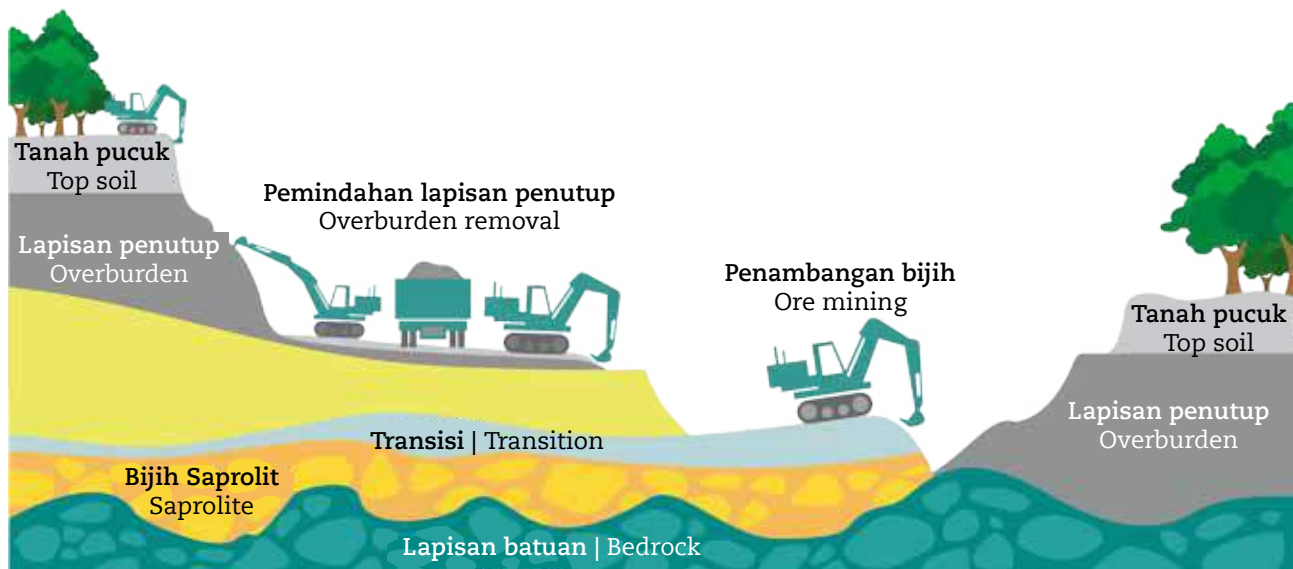
Sejalan dengan praktik pertambangan yang baik, Perseroan memiliki kebijakan membatasi pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan. Luas bukaan lahan tahun 2019 dibatasi seluas 2.352,84 hektar sesuai dokumen Jaminan Reklamasi tahun 2018-2022 yang telah disetujui Kementerian ESDM. Adapun realisasi area tambang pada tahun 2019 adalah seluas 286,56 hektar. Proses penambangan bijih nikel dimulai dari survei geologi untuk menemukan kandungan bijih nikel, perencanaan tambang dan operasi pertambangan termasuk rehabilitasi pasca-tambang. Akhir kegiatan operasi pertambangan adalah penyimpanan SSP di *stock pile*.

Nickel ore mining operations are carried out in Sorowako, Nuha District, East Luwu Regency, South Sulawesi, using an open-mining process. At the end of 2019, mining operations covered areas of East Block, West Block and Petea.

In line with good mining practises, the Company has a policy of limiting the opening of mining area. The total opened area in 2019 was limited to maximum 2,352.84 hectares, as stated in the 2018-2022 reclamation guarantee document approved by ministry of EMR. The actual opened area for mining activities in 2019 was 286,56 hectares. The nickel ore mining process starts with a nickel ore geological survey and then continued with mine planning and mining operations including post-mining rehabilitation. Mining operation finish with the storage of SSP in stockpiles.

Kegiatan Operasi Pertambangan

Mining Operations



Total volume material bijih nikel yang ditambang tahun 2019 mencapai 12,5 juta ton, turun 12% dibanding tahun 2018 sebanyak 14,2 juta ton. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rencana produksi nikel yang lebih rendah dibanding tahun 2018.

The total volume of nickel ore material mined in 2019 reached 12,5 million tons, 12% lower than 2018 number of 14.2 tons. This decrease was due to lower nickel production plan compared to 2018.

PRODUKSI BIJIH NIKEL (TON)

Nickel Ore Production (Ton)

Jenis Bijih Nikel Type of Ore	2019	2018	2017	%Δ	
	1	2	3	1:2	2:3
Saprolite	12,522,081	14,284,142	13,131,814	(12)	9

Kesinambungan operasi pertambangan dipengaruhi oleh cadangan kandungan nikel yang dimiliki Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2019, total cadangan kandungan nikel mencapai 107,6 juta ton *dry kiln product* ("DKP"). Jumlah tersebut turun 7,6% dibanding tahun 2018 sebanyak 116,5 juta ton DKP. Penurunan cadangan mineral ini disebabkan aktivitas penambangan, evaluasi desain pit dari proses pit optimisasi dan pembaharuan blok model. Perseroan terus melakukan upaya mendapatkan cadangan nikel yang dimiliki melalui kegiatan eksplorasi dan studi pra-kelayakan.

The Company's mining operations sustainability is dependent upon the availability of nickel reserves. At the end of 2019, total nickel reserves stood at 107.6 million tons of dry kiln product ("DKP"), 7.6% lower than 2018 number of 116.5 million tons. This decrease in mineral reserves was due to mining activities, evaluation of pit design from the pit optimization process and block model renewal. The Company continues its efforts to find nickel reserves through exploration and pre-feasibility studies.

CADANGAN NIKEL (JUTA TON)

Nickel Reserves (Million Tons)

Uraian Description	Per 31 Desember 2019 As at December 31, 2019		Per 31 Desember 2018 As at December 31, 2018		%Δ	
	Mt (DKP)	% Grade	Mt (DKP)	% Grade	Mt (DKP)	% Grade
Terbukti Proven	66.2	1.72	101.8	1.76	(34.94)	(2.21)
Terkira Probable	41.4	1.75	14.7	1.64	182.13	6.70
Jumlah Total	107.6	1.73	116.5	1.74	(7.59)	(0.51)



Uraian Segmen Produksi Nikel Dalam Matte

Nickel In Matte Production Segment

Produksi nikel dalam matte dilakukan pada fasilitas pengolahan dan produksi di Sorowako. Proses produksi dimulai dari pengolahan SSP yang diperoleh dari operasi penambangan, dan hasil akhir adalah *nickel in matte*.

Produksi nikel dalam matte dimulai dari proses membawa bijih nikel dalam bentuk SSP ke apron feeder di tanur pengering, untuk mengurangi kadar air hingga menjadi 20%. Setelah proses pengeringan, bijih nikel masuk ke tempat penyimpanan bijih kering ("DOS"). Bijih kering tersebut selanjutnya diproses dalam tanur pereduksi untuk menghilangkan seluruh kadar air. Proses berlanjut di zona kalsinasi, yang mengubah nikel oksida menjadi logam nikel.

Pada tahapan di tanur pereduksi, digunakan bahan lain sebagai pendukung seperti batubara dan sulfur. Produk akhir dalam proses di tanur pereduksi adalah kalsin, yang memiliki suhu sekitar 700 derajat celsius. Kalsin kemudian dimasukkan ke tanur listrik untuk proses peleburan dan reduksi hingga menghasilkan *furnace matte*.

Nickel in matte production is carried out at the processing and production facility in Sorowako. The production process starts by processing the SSP obtained from mining operations, with the final product of nickel in matte.

Nickel in matte production begins by bringing the nickel ore in a form of SSP to the apron feeders in the dryer kilns to reduce the water content to about 20%. After the drying process, nickel ore goes into dry ore storage ("DOS"), and is then processed in a reduction kiln to remove all moisture content. The process continues in the calcination zone, to convert the nickel oxide into nickel metal.

At this stage, other materials such as coal and sulfur are fed into the reduction kiln. The final product of reduction kiln process is calcine which has a temperature of around 700 degrees celsius. The calcine is then fed into an electric furnace for smelting and reduction processes to produce furnace matte.





Di tanur listrik, hanya sekitar 7% dari total masukan bijih nikel yang keluar dalam bentuk *furnace matte* dan sisanya adalah slag (material tidak terpakai). Tanur listrik membutuhkan suhu hingga sekitar 1.500 derajat celsius untuk memisahkan slag dan menghasilkan *furnace matte*. Pasokan listrik diperoleh dari operasi pembangkit listrik tenaga air (“PLTA”) milik kami sendiri dan pembangkit listrik termal sebagai cadangan. Sejak beroperasi hingga akhir tahun 2018, Perseroan memiliki tiga unit PLTA yakni Larona, Balambano, dan Karebbe dengan total kapasitas 365 MegaWatt.

Dari tanur listrik, *furnace matte* diangkut ke konverter untuk menghilangkan kandungan besi. Konverter matte cair dituangkan ke dalam aliran air bertekanan tinggi hingga menghasilkan butiran padat dengan diameter sekitar 0,3 mm, yang dinamakan nikel matte. Setelah itu, nikel matte dikeringkan dan dikemas. Nikel matte yang dikemas harus memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan sebelum diangkut ke pelabuhan Balintang untuk pengiriman kepada pembeli di Jepang.

Total produksi nikel dalam matte pada tahun 2019 mencapai 71.205 ton. Jumlah tersebut menurun 5% dibanding tahun 2018 sebanyak 74.806 ton. Penurunan produksi ini dikarenakan adanya kombinasi aktivitas pemeliharaan yang telah direncanakan terkait Larona Canal Lining dan masalah di tanur listrik 4 yang tidak terencana.

In the electric furnace, only about 7% of the total nickel ore input comes out as furnace matte, with the rest being slag (unused material). Electric furnaces requires temperatures up to about 1,500 degrees celsius to separate slag and produce furnace matte. Electricity supplies come from our self- owned hydroelectric power plants (“HEPP”), with thermal power plant as a backup. At the end of 2018, the Company owned three HEPP units: Larona, Balambano and Karebbe with a total capacity of 365 MegaWatts.

From the electric furnace, the furnace matte is transported to converters to remove the iron. The liquid converter matte is poured into high pressure water streams to produce dense granules with a diameter of about 0.3 mm, called nickel matte. After that, the nickel matte is dried and packed. Packed nickel matte must meet the required specifications before being transported to Balintang port for shipment to the buyers in Japan.

The total production of nickel in matte in 2019 reached 71,205 tons, 5% lower than 2018 number of 74,806 tons in 2018. This decrease was due to a combination of unplanned maintenance activities related to Larona Canal Lining and problems in the electric furnace 4.

Uraian Segmen Penjualan Nikel Matte

Nickel Matte Sales Segment

Kegiatan penjualan nikel matte dilakukan Perseroan melalui perjanjian jangka panjang dengan VCL dan SMM. Sesuai perjanjian, PT Vale menjual 80% dari produk tahunan kepada VCL dan 20% lainnya dijual kepada SMM. Penjualan dilakukan dalam dolar AS, berdasarkan formula harga LME.

Nikel matte dikirimkan kepada VCL dan SMM dengan menggunakan kapal. Pada triwulan pertama 2019 Perseroan mencatat penjualan sebesar 13.867 ton, lebih rendah 34% dibanding triwulan keempat tahun 2018, yang dipengaruhi turunnya produksi nikel dalam matte. Penjualan nikel matte mengalami kenaikan pada triwulan kedua yakni 16.966 ton atau 22% lebih tinggi dibanding triwulan pertama. Triwulan ketiga penjualan nikel matte tercatat 19.999 ton atau 18% lebih tinggi dibanding triwulan kedua, dan pada triwulan keempat sebanyak 21.211 ton atau bertambah 6% dibanding triwulan ketiga. Dengan demikian total penjualan nikel matte tahun 2019 mencapai 72.044 ton, berkurang 5% dibanding tahun 2018 sebanyak 75.631 ton.

The Company's nickel matte sales are conducted through long-term agreements with VCL and SMM. Based on these agreement, PT Vale sells 80% of its annual products to VCL and the remaining 20% to SMM. Sales is denominated in US\$ based on the LME price formula.

Nickel matte is sent to VCL and SMM by ship. In the first quarter of 2019 the Company recorded sales volume of 13,867 tons, 34% lower than the fourth quarter of 2018, due to the decline in nickel in matte production. Sales volume increased in the second quarter to 16,966 tons, 22% higher than the first quarter. In the third quarter the Company booked sales volume of 19,999 tons, 18% higher than the second quarter and in the last quarter the year, the sales volume was 21,211 tons, an increase of 6% compared to the third quarter. The total sales of nickel matte in 2019 was 72,044 tons, a decrease of 5% compared to 2018 number of 75,631 tons.

VOLUME PENJUALAN NIKEL MATTE (TON)

Nickel Matte Sales Volume (Tons)

Periode Period	2019	2018	2017	%Δ	
	1	2	3	1:2	2:3
Triwulan 1 Quarter 1	13,867	17,239	17,524	(20)	(2)
Triwulan 2 Quarter 2	16,966	18,764	19,620	(10)	(4)
Triwulan 3 Quarter 3	19,999	18,566	20,580	8	(10)
Triwulan 4 Quarter 4	21,211	21,062	19,919	1	6
Total	72,044	75,631	77,643	(5)	(3)

VOLUME PENJUALAN NIKEL MATTE (TON)

Nickel Matte Sales Volume (Tons)

Pelanggan Customer	2019	2018	2017	%Δ	
	1	2	3	1:2	2:3
VCL	57,617	60,516	62,114	(5)	(3)
SMM	14,426	15,115	15,529	(5)	(3)
Total	72,044	75,631	77,643	(5)	(3)

Penjualan nikel matte adalah sumber pendapatan Perseroan. Total Pendapatan Perseroan pada tahun 2019 sebesar AS\$782,0 juta, bertambah 1% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai AS\$776,9 juta.

The sales of nickel matte is the Company's revenue source. The Company's total revenue in 2019 amounted to US\$782.0 million, an increase of 1% compared to US\$776.9 million in 2018.



Meningkatnya pendapatan tak hanya mendatangkan keuntungan bagi Perseroan. Sebagian dari pendapatan dibayarkan kepada negara melalui Pemerintah Indonesia dalam bentuk pembayaran Royalti dan iuran lain sebagai PNBP. Total royalti yang telah dibayarkan Perseroan dari mulai beroperasi mencapai total AS\$250 juta, dengan pembayaran tertinggi di tahun 2007 sebesar AS\$32 juta. Pada tahun 2019, total royalti yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia sebesar AS\$15,9 juta. Perseroan juga telah melakukan pembayaran PNBP Kehutanan untuk area Sorowako sebesar AS\$13,6 juta.

The increase in revenue does not only bring profits to the Company, but also a certain portion of the Company's revenue will be distributed to the Government of Indonesia through royalty payments and other contributions such as PNBP. The total royalties paid by the Company from the start of commercial operation is amounted to US\$250 million, with the highest payment made in 2007, in the amount of US\$32 million. In 2019, total royalties paid to the Government of Indonesia was US\$15.9 million. The Company also paid Forestry PNBP for the Sorowako area amounting to US\$13.6 million.

Profitabilitas

Profitability

Kembalinya tingkat produksi nikel dalam matte dan kenaikan harga rata-rata nikel di pasar dunia, mendorong membaiknya kinerja keuangan Perseroan. Setelah sempat merugi pada semester pertama 2019, Perseroan mencatatkan keuntungan pada periode triwulan berikutnya.

The increase of nickel in matte production and the rise of the average price of nickel in the world market led to an improvement in the Company's financial performance. Following a loss in the first quarter of 2019, the Company booked profits in the following quarters.

Pada akhir tahun buku 2019, Perseroan membukukan perolehan Laba Usaha sebesar AS\$88,3 juta. Jumlah tersebut bertambah 4% dibanding Laba Usaha tahun buku 2018 yang mencapai AS\$84,9 juta.

At the end of fiscal year 2019, the Company recorded an Operating Profit of US\$88.3 million, an increase of 4% compared to US\$84.9 million in fiscal year 2018.

Besaran unit biaya kas pendapatan pada tahun 2019 adalah AS\$7.403 per ton, naik 4% dibanding tahun 2018 sebesar AS\$7.110 per ton. Hal ini disebabkan oleh volume produksi yang lebih rendah sebagai akibat dari pemeliharaan Canal Lining pada bendungan Larona dan masalah di tanur listrik 4 yang tidak terencana. Setelah pemeliharaan ini selesai dan pasokan listrik dari PLTA Larona kembali normal, produksi di triwulan berikutnya menjadi lebih tinggi. Di samping itu, dengan kembali normalnya PLTA Larona, penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel di triwulan pertama bisa dihentikan.

The unit cash cost of revenue in 2019 was US\$7,403 per ton, up 4% compared to US\$7,110 per ton in 2018. This was due to lower production volume in the first quarter as the consequence of the execution of Larona canal lining project and unplanned issue in electric furnace 4. After the completion of the maintenance and the electricity supply from the Larona HEPP had returned to normal, production in the following quarters increased. In addition, with the return to the normal Larona HEPP, the use of diesel generated power plant in the first quarter of the year could be stopped.

Perseroan juga terus melakukan kontrol yang hati-hati atas pengeluaran untuk menjaga ketersediaan kas dan tetap fokus pada berbagai inisiatif penghematan untuk mempertahankan daya saing dalam jangka panjang.

The Company also continued to exercise careful control over expenditure to maintain cash availability, and focused on various savings initiatives to maintain long-term competitiveness.

Kinerja Keuangan Komprehensif

Comprehensive Financial Performance

Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi dalam uraian ini, harus dibaca bersamaan dengan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019, yang dilampirkan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Secara umum, kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2019 dipengaruhi beberapa faktor:

- **Fluktuasi harga nikel global**
Harga nikel tak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang bisa menimbulkan sentimen positif maupun sentimen negatif di pasar global. Tingkat harga nikel dunia secara langsung berpengaruh pada Pendapatan Perseroan.
- **Fluktuasi harga bahan bakar**
Bahan bakar merupakan komponen terbesar biaya produksi yang tidak dapat dikendalikan Perseroan sepenuhnya. Untuk menekan biaya konsumsi bahan bakar, Perseroan melakukan beberapa inisiatif peningkatan efisiensi.
- **Kebijakan Pemerintah dan perubahan peraturan perundang-undangan**
Upaya Pemerintah melakukan tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang diikuti pemberlakuan kebijakan dan peraturan baru, akan mempengaruhi operasional Perseroan.
- **Fluktuasi nilai tukar mata uang asing**
Penguatan/pelemahan dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan, mengingat Perseroan beroperasi di wilayah Indonesia sehingga ada sebagian transaksi keuangan yang menggunakan mata uang rupiah.
- **Royalti dan iuran kepada Pemerintah**
Royalti yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia sebesar 2% dari penjualan (menjadi 3% ketika harga nikel naik menjadi AS\$21.000 per ton). Penetapan tersebut telah merefleksikan evolusi dinamika pasar.

This management discussion and analysis of the financial condition and operational results must be read in conjunction with the Company's Financial Statements as of December 31, 2019, which are attached to this Annual Report. The Financial Statements were audited by the Public Accounting Firm ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) and prepared in conformity with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

The Company's business activities in 2019 were influenced by several factors:

- **Fluctuating global nickel prices**
World nickel prices are linked to many factors that can lead to positive and negative sentiment, and these can directly affect the Company's Revenue.
- **Fluctuating fuel prices**
The largest production cost component is fuel, which the Company cannot fully control. In order to reduce fuel consumption cost, the Company execute several efficiency improvement initiatives.
- **Government policies and changes in legislation**
Government efforts related to the mineral and coal mining governance, followed by the enactment of new policies and regulations, affect the Company's operations.
- **Fluctuations in foreign exchange rates**
The strengthening/weakening US dollar affects financial conditions. In addition to that, as the Company operate in Indonesia, there are a number of financial transactions denominated in rupiah.
- **Royalties and contributions to the Government**
The royalty rate agreed with the Government of Indonesia is 2% of sales (3% when nickel prices rise to US\$21,000 per ton). This has reflected in the market dynamics evolution.



Aset Assets

TOTAL ASET

Nilai Total Aset Perseroan per 31 Desember 2019 naik dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Aset Tidak Lancar.

Proporsi Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar terhadap Total Aset pada tahun 2019 masing-masing sebesar 26% dan 74%.

TOTAL ASSETS

The Company's Total Assets as of December 31, 2019 increased compared to 2018, mainly due to the increase of Non-current Assets.

The Current Assets and Non-Current Assets proportion to Total Assets in 2019 was 26% and 74% respectively.

ASET (DALAM RIBUAN AS\$)

Assets (Thousand US\$)

Aset Assets	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
	1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
Aset Lancar Current Assets	588,313	26	630,998	29	(42,685)	(7)	597,056	599,154	594,900
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	1,634,375	74	1,571,454	71	62,921	4	1,587,503	1,626,338	1,694,261
Jumlah Total	2,222,688	100	2,202,452	100	20,236	1	2,184,559	2,225,492	2,289,161



ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar Perseroan pada tahun 2019 berkurang dibanding tahun 2018. Penyebabnya adalah penurunan Kas dan Setara Kas terutama karena tingginya pembayaran belanja barang modal.

CURRENT ASSETS

The value of Company's current asset in 2019 decreased compared to 2018. It was due to lower Cash and Cash Equivalents on account of higher payment for capital expenditure.

ASET LANCAR (DALAM RIBUAN AS\$)

Current Assets (Thousand US\$)

Uraian Description	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
	1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	249,035	42	301,153	48	(52,118)	(17)	221,699	185,560	194,754
Investasi jangka pendek Short-term investments	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	90,154
Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash	0	0	15,607	2	(15,607)	(100)	15,890	29,725	27,802
Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi Trade Receivables Related Parties	107,295	18	124,248	20	(16,953)	(14)	165,577	146,616	78,200
Persediaan Inventories	147,961	25	131,779	21	16,182	12	117,726	129,796	104,066
Pajak Dibayar Di Muka Prepaid Taxes	78,160	13	50,798	8	27,362	54	67,331	100,454	91,137
Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka Prepayments and Advances	3,108	1	4,887	1	(1,779)	(36)	5,687	3,940	5,045
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	2,754	1	2,526	0	228	9	3,146	3,063	3,742
Jumlah Total	588,313	100	630,998	100	(42,685)	(7)	597,056	599,154	594,900



KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari Kas di Bank dan Deposito Berjangka. Pada tahun 2019, turun dibanding tahun 2018. Penyebab utamanya adalah lebih tingginya pembayaran untuk belanja barang modal.

Pada tahun 2019, porsi Kas di Bank Perseroan lebih tinggi dibandingkan Deposito Berjangka. Hal ini disebabkan Perseoran menempatkan dana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam di rekening Kas di Bank di rekening Citibank N.A dan PT Bank UOB Indonesia dengan tingkat bunga yang kompetitif, dibandingkan dengan tingkat bunga Deposito Berjangka. Perseroan menerapkan strategi ini sebagai upaya untuk mengurangi resiko keuangan dengan menyebar portofolio investasi dalam Deposito Berjangka dan Kas di Bank yang memiliki tingkat bunga kompetitif. Hal ini menyebabkan proporsi dana yang ditempatkan dalam Deposito Berjangka lebih rendah dibandingkan tahun 2018.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of Cash in Banks and Time Deposits. In 2019, the balance decreased compared to 2018 due to an increase in capital expenditure payments.

In 2019, the Company's Cash in Banks portion was higher than Time Deposits. This was due to the decision to place the natural resources export proceeds in Citibank N.A and PT Bank UOB Indonesia that offered more competitive interest rates compared to time deposits. The Company applied this strategy to reduce financial risk exposure by spreading its investment portfolio in Time Deposits and Cash in Banks which offered competitive interest rates. This resulted in the Time Deposits portion being lower compared to 2018.

KAS DAN SETARA KAS (DALAM RIBUAN ASS)

Cash and Cash Equivalent (Thousand US\$)

No	Uraian Description	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
		1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
1	Kas Cash	0	0	0	0	0	0	1	3	13
2	Kas Di Bank Cash in Bank									
	IDR IDR	20,653	8	10,566	3	10,087	95	9,962	11,629	7,013
	ASS US\$	118,382	48	53,294	18	65,088	122	40,689	43,623	46,885
	Jumlah Kas Di Bank Total Cash in Bank	139,035	56	63,860	21	75,175	118	50,651	55,252	53,898
3	Deposito Berjangka Time Deposits									
	IDR IDR	0	0	0	0	0	0	0	0	5,629
	ASS US\$	110,000	44	237,293	79	(127,293)	(54)	171,047	130,305	135,214
	Jumlah Deposito Berjangka Total Time Deposits	110,000	44	237,293	79	(127,293)	(54)	171,047	130,305	140,843
4	Jumlah Total	249,035	100	301,153	100	(52,118)	(17)	221,699	185,560	194,754

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Porsi lancar dari saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada akhir tahun 2019 mengalami perubahan signifikan dibanding akhir tahun 2018, sehingga saldo di tahun 2019 menjadi Nihil. Perubahan signifikan tersebut terdiri dari :

1. Rekening pada MUFG Union Bank N.A.
Sehubungan dengan telah dilunasinya pinjaman jangka Panjang SEFA pada 10 April 2019, maka Kas yang Dibatasi Penggunaannya di rekening ini menjadi Nihil.
2. Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dipindahkan sebagai porsi tidak lancar. Deposito berjangka ini ditujukan sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi dan penutupan tambang.

PIUTANG USAHA PIHAK-PIHAK BERELASI

Saldo Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi pada 31 Desember 2019 turun dibanding tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan jangka waktu pembayaran VCL dari sebelumnya 90 hari kembali ke 30 hari.

Kinerja Piutang Usaha
Trade Receivables Performances

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Rata-rata Saldo Piutang Usaha Pada Awal dan Akhir Tahun Average Trade Receivables Balance at the Beginning and End of the Year	Ribu AS\$ Thousand US\$	115,772	144,913	156,097	112,408	85,453
Periode Penagihan Receivables Turnover	Hari Days	53	67	89	69	39

Semua Piutang Usaha Perseroan adalah kepada pihak-pihak berelasi, yang memiliki kepentingan strategis jangka panjang terhadap kesinambungan operasi serta usaha Perseroan, yakni VCL dan SMM. Piutang Usaha terkait realisasi perjanjian penjualan jangka panjang seluruh produksi nikel dalam matte kepada VCL dan SMM, yang juga merupakan pemegang saham Perseroan.

VCL dan SMM memiliki sejarah pembayaran yang baik dan senantiasa tepat waktu sesuai perjanjian. Selama periode pelaporan belum pernah terjadi kegagalan maupun keterlambatan pembayaran atas piutang yang telah jatuh tempo.

RESTRICTED CASH

Current Portion of Restricted Cash at the end of 2019 changed significantly compared to the end of 2018, resulting in the balance at the end of 2019 becoming Zero. The significant changes consisted of:

1. MUFG Union Bank N.A. Account
After the repayment of the SEFA long-term loans on April 10, 2019, the restricted cash in this account became zero.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk time deposits were transferred to non-current. They served as guarantee to reclamation and mine closure.

TRADE RECEIVABLES - RELATED PARTIES

Total Trade Receivables with Related Parties as of December 31, 2019 decreased compared to 2018, due to changes in term of payment from VCL from previously 90 days to 30 days.

All the Company's Trade Receivables are from related parties who have long-term strategic interests in the Company's operations and business continuity, namely VCL and SMM, and they are all related to the long-term nickel matte sales agreements with VCL and SMM, who are also Company shareholders.

VCL and SMM have a history of timely payment schedule according to the agreement. There has never been a failure or delay in payment of past-due receivables.



PERSEDIAAN BERSIH

Perseroan mencatat kenaikan nilai Persediaan Bersih pada akhir tahun 2019 dibanding tahun 2018. Saldo Persediaan tahun 2019 terdiri dari:

1. Persediaan nikel dalam proses sebesar AS\$55,5 juta;
2. Persediaan barang jadi nikel matte sebesar AS\$13,2 juta;
3. Persediaan bahan pembantu sebesar AS\$79,3 juta;

Kenaikan nilai Persediaan Bersih terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan nikel dalam proses dan barang jadi nikel matte yaitu AS\$7,1 juta dan peningkatan persediaan bahan pembantu yaitu AS\$9,1 juta.

Kenaikan jumlah hari persediaan bahan pembantu menjadi 86 hari pada tahun 2019 dibandingkan 76 hari pada tahun 2018 disebabkan turunnya pemakaian bahan bakar dan pelumas serta batubara. Pemakaian yang lebih rendah ini sejalan dengan penurunan produksi *nikel in matte* di tahun 2019. Pemakaian suku cadang di tahun 2019 mengalami kenaikan untuk mendukung program perbaikan dan pemeliharaan peralatan di pabrik dan tambang, dengan tetap menjaga level persediaan yang setara dengan tahun sebelumnya.

KINERJA PERSEDIAAN

Inventory Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Rata-rata Persediaan Bersih Bahan Pembantu (Saldo Awal dan Akhir Tahun) Average Net Supplies Inventory (Balance at the Beginning and End of the Year)	Ribu AS\$ Thousand US\$	74,755	69,740	77,152	80,757	81,947
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	Hari Days	86	76	97	123	96

Perseroan melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian atau kerusakan atas persediaan yang diakibatkan semua risiko industri, termasuk gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis, atau listrik serta gangguan usaha lainnya. Besaran nilai pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Besaran nilai pertanggungan untuk seluruh aset dan kemungkinan gangguan usaha terhadap perseroan, per 31 Desember 2019 mencapai AS\$4.338 juta dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian.

INVENTORIES, NET

The Company's Inventories, Net increased at the end of 2019 compared to 2018. The Inventory Balance in 2019 consist of:

1. Nickel in process inventory of US\$55.5 million;
2. Nickel matte finished goods inventory of US\$13.2 million;
3. Supplies inventory of US\$79.3 million;

The increase in Inventories, Net was mainly due to the increase of in process nickel and finished goods inventories of US\$7.1 million and the increase of supplies of US\$9.1 million.

The increase in days of supplies inventory to 86 days in 2019 from 76 days in 2018 was due to the lower usage of fuels and lubricant and coal. The lower usage was aligned with the reduced of nickel in matte production in 2019. The spare part usage in 2019 increase to support the equipment maintenance program in process plant and mining, but to keep similar level of inventory as previous year.

The Company protects against the possibility of any risk of inventory loss or damage caused by industrial risks, including earthquakes, fires, mechanical damage, or electrical and other business interruptions. The insurance coverage is sufficient to cover possible losses arising from these risks.

As of December 31, 2019, the insurance coverage for assets and possible business disruption, was US\$4,338 million with a limit of US\$800 million per incident.

Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam matte sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksi kembali.

Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Supplies are insured at replacement cost. Nickel in process is set at the cost of raw materials for ore and labor, plus a certain portion of indirect costs. The nickel matte finished goods is set at the higher of the net cash selling price or the cost of reproducing.

According to management, the insurance coverage is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Porsi Lancar nilai Pajak Dibayar di Muka pada tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Hal ini dikarenakan keterlambatan pengembalian pajak pertambahan nilai dari pemerintah.

PREPAID TAXES

Prepaid Taxes in 2019 increased compared to 2018, due to delayed refund value added tax from government.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA (DALAM RIBUAN ASS)

Prepaid Taxes (Thousand US\$)

Uraian Description	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
	1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	6,988	9	9,250	18	(2,262)	(24)	24,895	28,921	0
Pajak Lainnya Other Taxes	71,172	91	41,548	82	29,624	71	42,436	71,533	91,137
Jumlah Total	78,160	100	50,798	100	27,362	54	67,331	100,454	91,137

BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Nilai Saldo Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka mengalami penurunan terutama disebabkan oleh lebih rendahnya uang muka ke pemasok.

PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

Prepaid Expenses and Advances experienced decrease mainly due to lower advances to suppliers.

ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Nilai Aset Keuangan Lancar Lainnya pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan.

OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS

In 2019, other Current Financial Assets did not experience any significant change.



Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar terdiri dari porsi tidak lancar Kas yang Dibatasi Penggunaannya, Pajak Dibayar di Muka, Piutang Non-Usaha Pihak-pihak Berelasi, Aset Tetap dan Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya. Nilai Aset Tidak Lancar pada tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan aset tetap bersih dan kenaikan cicilan PPh Pasal 25.

Non-Current Assets comprises the non-current portion of Restricted Cash, Prepaid Taxes, Non-Trade Receivables - Related Parties, Fixed Assets, and Other Non-Current Financial Assets. In 2019, Non-Current Assets increased compared to 2018, due to higher fixed assets and installment income tax art. 25.

ASET TIDAK LANCAR (DALAM RIBUAN AS\$)

Not Current Assets (Thousand US\$)

Uraian Description	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
	1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash	15,412	1	14,345	1	1,067	7	14,345	6,365	5,061
Pajak Dibayar Di Muka Prepaid Taxes	146,820	9	116,281	8	30,539	26	71,620	76,669	72,554
Piutang Non-Usaha Pihak-pihak Berelasi Non-Trade Receivables – Related Parties	58	0	18	0	40	222	71	140	263
Aset Tetap Fixed Assets	1,467,462	90	1,434,510	91	32,952	2	1,493,789	1,532,653	1,603,302
Aset Keuangan Tidak Lancar Lain Other Non-Current Financial Assets	4,623	0	6,300	0	(1,677)	(27)	7,678	10,511	13,081
Jumlah Total	1,634,375	100	1,571,454	100	62,921	4	1,587,503	1,626,338	1,694,261

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Porsi tidak lancar atas saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada akhir tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan.

RESTRICTED CASH

At the end of 2019, Non-Current Restricted Cash did not experience any significant change.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Porsi Tidak Lancar Pajak Dibayar di Muka pada tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Penyebabnya adalah naiknya pembayaran cicilan PPh Pasal 25.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA – TIDAK LANCAR (DALAM RIBUAN AS\$)

Prepaid Taxes – Non Current (Thousand US\$)

Uraian Description	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
	1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	29,146	20	0	0	29,145	0	9,863	22,631	28,976
Pajak Lainnya Other Taxes	117,674	80	116,281	100	1,394	1	61,757	54,038	43,578
Jumlah Total	146,820	100	116,281	100	30,539	26	71,620	76,669	72,554

PREPAID TAXES

Non-Current Prepaid Taxes increased in 2019 compared to 2018, mainly due to higher installment of income tax art. 25.

PIUTANG NON-USAHA PIHAK-PIHAK BERELASI

Piutang Non-Usaha Pihak-pihak Berelasi tidak mengalami perubahan yang signifikan.

ASET TETAP BERSIH

Nilai Aset Tetap Bersih pada tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh penambahan aset tetap, diimbangi dengan pelepasan aset tetap dan kenaikan biaya penyusutan di tahun 2019.

Perseroan juga mengasuransikan Aset Tetap terhadap risiko kerugian atau kerusakan langsung yang disebabkan semua risiko industri, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik (termasuk gangguan usaha lainnya). Aset Tetap diasuransikan sebesar biaya pengganti. Perseroan percaya bahwa nilai pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

NON-TRADE RECEIVABLES – RELATED PARTIES

Non-Trade Receivables - Related Parties did not experience any significant change.

FIXED ASSETS – NET

In 2019 Fixed Assets - Net increased compared to 2018, due to higher additional of fixed asset, compensated with fixed asset disposal and the increase of depreciation in 2019.

The Company also insures Fixed Assets against the risk of direct loss or damage caused by all industrial risks, including but not limited to earthquakes, fires, mechanical or electrical damage (including other business interruptions). Fixed Assets are insured at replacement cost. The Company believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses arising from these risks.



ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya merupakan bagian jangka panjang dari pinjaman yang diberikan kepada karyawan Perseroan. Nilai saldo Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya pada akhir tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2018.

OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS

Other Non-Current Financial Assets represents the long-term portion of loans granted to Company employees. Other Non-Current Financial Assets at the end of 2019 decreased compared to 2018.

Liabilitas

Liabilities

Liabilitas Perseroan terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Nilai total Liabilitas Perseroan pada akhir tahun 2019 turun dibanding tahun 2018. Hal ini lebih disebabkan oleh penurunan nilai liabilitas jangka pendek.

The Company's liabilities consist of Short-Term Liabilities and Long-Term Liabilities. Total Liabilities at the end of 2019 decreased compared to 2018, due to a decrease in short-term liabilities.

LIABILITAS (DALAM RIBUAN AS\$)

Liabilities (Thousand US\$)

Uraian Description	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
	1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	136,552	49	175,340	55	(38,788)	(22)	129,300	131,989	148,499
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	144,443	51	143,385	45	1,058	1	235,892	258,914	306,705
Jumlah Total	280,995	100	318,725	100	(37,730)	(12)	365,192	390,903	455,204



LIABILITAS JANGKA PENDEK

Nilai Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2019, turun dibanding tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh dilunasinya pinjaman jangka panjang SEFA di tahun 2019.

SHORT-TERM LIABILITIES

Short-Term Liabilities at the end of 2019 decreased compared to 2018, due to repayment of the SEFA long-term loans in 2019.

LIABILITAS JANGKA PENDEK (DALAM RIBUAN AS\$)

Short-Term Liabilities (Thousand US\$)

Uraian Description	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
	1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
Utang Usaha Pihak-pihak Berelasi Trade Payables - Related Parties	2,071	1	1,620	1	451	28	2,913	6,537	8,712
Utang Usaha Pihak Ketiga Trade Payables - Third Parties	95,337	70	89,561	51	5,776	6	58,027	57,737	76,924
Akrual Accruals	16,327	12	25,599	14	(9,272)	(36)	14,722	16,542	16,802
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-Term Employee Benefits Liabilities	15,563	11	15,823	9	(260)	(2)	12,378	10,700	4,922
Utang Pajak Taxes Payable	1,774	1	2,900	2	(1,126)	(39)	1,538	1,490	1,806
Bagian Jangka Pendek Atas Pinjaman Bank Jangka Panjang Current Portion of Long-Bank Borrowings	0	0	36,519	21	(36,519)	(100)	36,743	36,462	36,219
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	947	1	0	0	947	100	0	0	0
Liabilitas Atas Pembayaran Berbasis Saham Share-Based Payment Liabilities	780	1	2,042	1	(1,262)	(62)	1,341	1,273	854
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Current Financial Liabilities	3,753	3	1,276	1	2,477	194	1,638	1,248	2,260
Jumlah Total	135,605	100	175,340	100	(39,735)	(23)	129,300	131,989	148,499



UTANG USAHA – PIHAK-PIHAK BERELASI

Saldo Utang Usaha – Pihak-pihak Berelasi pada tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Penyebabnya adalah kenaikan Utang Usaha kepada VCL.

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Utang Usaha – Pihak Ketiga pada tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018. Hal ini dikarenakan naiknya penerimaan barang, jasa dan barang modal dari pihak ketiga. Disamping itu kenaikan ini sejalan dengan usaha Perseroan untuk meningkatkan jangka waktu pembayaran kepada pemasok melalui Supplier Financing Program.

TRADE PAYABLES - RELATED PARTIES

Trade Payables - Related Parties at the end of 2019 increased compared to 2018, due to increasing trade payable to VCL.

TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES

Trade Payables - Third Parties at the end of 2019 increased compared to 2018, due to increased receipts of goods services and capital goods from third parties. In addition, this increase was in line with the Company's effort to increase the term of payment to suppliers through Supplier Financing Program.

UTANG USAHA

Trade Payables

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Rata-rata Saldo Utang Usaha Pada Awal dan Akhir Tahun Average Trade Payables at the Beginning and End of the Year	Ribu AS\$ Thousand US\$	94,295	76,061	62,607	74,955	79,925
Jumlah Rata-rata Hari Saldo Utang Usaha (360/ Beban Pokok Pendapatan/Rata-rata Saldo Utang Usaha) Days of Trad Payables Outstanding (360/Cost of Revenue/Average Trade Payable Balance)	Hari Days	51	41	36	49	43

AKRUAL

Nilai AkruaI pada akhir tahun 2019 turun dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh pembayaran PNBK Kehutanan yang sebelumnya dicatat sebagai akruaI tahun 2018 dan telah dibayarkan di tahun 2019.

ACCRUALS

AccruaI at the end of 2019 decreased compared to 2018. This was due to PNBK Forestry payments previously recorded as accruals in 2018 and have been paid in 2019.

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Nilai Liabililitas Imbalan Kerja Jangka Pendek pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding tahun 2018.

SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Short-Term Employee Benefit Liabilities in 2019 has not changed significantly compared to 2018.

UTANG PAJAK

Utang Pajak pada tahun 2019 turun dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh nihilnya utang pajak PPh Badan yang dicatatkan di tahun 2019 karena posisi lebih bayar PPh Badan.

TAXES PAYABLE

Taxes Payable in 2019 decreased compared to 2018. This was due to zero Corporate Income Tax ("CIT") payable recorded in 2019 on account of the overpayment position of the CIT. In addition, there was no significant changes on the Taxes Payable compared to 2018.

Liabilitas Jangka Panjang

Long-Term Liabilities

Nilai Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun 2018.

Long-Term Liabilities in 2019 did not experience a significant increase compared to 2018.

LIABILITAS JANGKA PANJANG (DALAM RIBUAN ASS)

Long-Term Liabilities (Thousand US\$)

Uraian Description	2019		2018		Δ		2017	2016	2015
	1	%	2	%	1:2	%	3	4	5
Pinjaman Bank Jangka Panjang Long Term Bank Borrowings	0	0	0	0	0	0	36,295	73,095	109,858
Liabilitas Imbalan Pascakerja Jangka Pendek Long-Term Post-Employment Benefits Liabilities	19,419	13	14,878	11	4,541	31	19,289	17,729	14,383
Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih Deferred Tax Liabilities, Net	80,490	56	90,674	63	(10,184)	(11)	105,392	115,964	124,780
Liabilitas Sewa Lease liabilities	173	0	0	0	173	100	0	0	0
Provisi Atas Penghentian Pengoperasian Aset Provision for Assets Retirement	44,361	31	37,833	26	6,528	17	74,916	52,126	57,684
Jumlah Total	144,443	100	143,385	100	1,058	1	235,892	258,914	306,705

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

Nilai saldo Pinjaman Bank Jangka Panjang pada akhir tahun 2019 dan 2018 adalah nihil. Pada tahun 2018, saldo pinjaman jangka panjang telah dipindahkan ke bagian aset lancar pinjaman jangka panjang dan pinjaman ini telah dilunasi sepenuhnya di tahun 2019.

LONG TERM BANK BORROWINGS

Long term Bank Borrowings at the end of 2019 and 2018 were zero. In 2018, long term balance has been transferred to the current asset borrowings balances and the loan has been fully paid in 2019.

LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA JANGKA PANJANG

Liabilitas Imbalan Pascakerja Jangka Panjang terdiri dari manfaat pensiun dalam kaitannya dengan UU Ketenagakerjaan dan Tunjangan Kesehatan Pasca-Pensiun ("PRMC"). Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang telah ditunjuk.

LONG-TERM POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Long-Term Post-Employment Benefits Liabilities consist of pension benefits as regulated by Labor Law and Post-Retirement Medical Benefits ("PRMC"). The Company has a defined contribution pension plan managed by a designated Financial Institution Pension Fund ("DPLK").



Perseroan juga menyediakan PRMC untuk pensiunan yang memenuhi syarat. Hak atas imbalan ini diberikan kepada karyawan yang bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama pada bulan Januari 2011 dan memilih tetap menjadi peserta program ini.

Setiap tahun, aktuaris yang memenuhi kualifikasi menilai liabilitas ini. Saat ini Perseroan menerapkan pendekatan Layanan Administrasi Saja (pendekatan "ASO") dengan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk untuk membantu administrasi. Pada pendekatan ini, Perseroan menempatkan sejumlah uang yang dikelola pihak ketiga untuk menutupi biaya medis bagi peserta program. Pihak ketiga menerapkan pendekatan Koordinasi Imbalan ("COB") yang memungkinkan klaim medis asuransi, termasuk klaim BPJS, dipertimbangkan dalam perhitungan biaya keseluruhan.

Liabilitas Imbalan Pascakerja Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga selaku aktuaris berkualifikasi. Dalam laporan tertanggal 12 Februari 2020, dinyatakan bahwa nilai saldo Liabilitas Imbalan Pascakerja Jangka Panjang pada 31 Desember 2019 mencapai AS\$19,4 juta, naik dibanding tahun 2018 sebesar AS\$14,9 juta. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan tambahan manfaat pensiun, penurunan keuntungan dari asumsi keuangan dan kerugian dari penyesuaian pengalaman.

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN, BERSIH

Nilai saldo Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih, pada akhir tahun 2019 turun dibanding tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan waktu depresiasi aset tetap diimbangi dengan kenaikan nilai provisi atas penghentian pengoperasian aset.

PROVISI ATAS PENGHENTIAN PENGOPERASIAN ASET

Provisi atas Penghentian Pengoperasian Aset mengacu pada kewajiban hukum atau konstruktif berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset berwujud jangka panjang yang dihasilkan dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan dan/atau operasi normal dari aset jangka panjang.

Nilai Provisi pada akhir tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat diskonto dan perubahan estimasi masa penutupan tambang.

The Company also provides PRMC for eligible pensioners. The right to these benefits is generally granted to employees who work until they reach retirement age and were employed prior to the signing of a Collective Labor Agreement in January 2011, and chose to remain under this program.

Each year, qualified actuaries assess this liability. Currently the Company applies an Administrative Services Only scheme ("ASO") by engaging third party to manage the administration of the program. Within this scheme, the Company places a sum of money to be managed by the third party to cover medical costs for program participants. The third party applies a Coordination of Benefit ("COB") approach that allows insurance medical claims, including BPJS claim, to be considered in calculating overall costs.

Long-Term Post-Employment Benefits Liabilities as at December 31, 2019 were calculated by a qualified actuary, PT Towers Watson Purbajaga. In the report dated February 12, 2020, the outstanding balance of Long-Term Post-Employment Benefits Liabilities as at December 31, 2019 amounted to US\$19.4 million, an increase from US\$14.9 million in 2018, due to increased pension benefit, decreased gain from financial assumption and loss from experience adjustment.

DEFERRED TAX LIABILITES, NET

Deferred Tax Liabilites, Net as at December 31, 2019 decreased compared to 2018, due to the difference in Fixed Assets depreciation times offset by increase in the provision value for assets retirement.

PROVISION FOR OPERATIONAL ASSETS RETIREMENT

The Provision for Operational Asset Retirement refers to legal or constructive obligations relating to the retirement of operational long-term tangible assets which are obtained from acquisitions, construction or normal development and/or operation of long-term assets.

The Provision as at the end of 2019 increased compared to 2018, due to lower discount rate and changes in estimated mine closure period.

Ekuitas

Equity

Nilai Total Ekuitas pada akhir tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya saldo laba belum dicadangkan. Kenaikan tersebut memperlihatkan penghasilan komprehensif pada tahun berjalan.

Total Equity at the end of 2019 increased compared to 2018, due to the increase in unappropriated retained earnings and current year's comprehensive income.

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

ARUS KAS (DALAM RIBUAN AS\$)

Cash Flow (Thousand US\$)

Uraian Description	2019	2018	Δ		2017	2016	2015
	1	2	1:2	%	3	4	5
Aktivitas Operasi Operating Activities	137,994	204,359	(66,365)	(32)	152,561	13,420	133,896
Aktivitas Investasi Investing Activities	(166,104)	(83,784)	(82,320)	98	(74,614)	19,916	(196,544)
Aktivitas Pendanaan Financing Activities	(24,391)	(40,429)	16,038	(40)	(41,728)	(42,824)	(43,441)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash & Cash Equivalents	(52,501)	80,146	(132,647)	(166)	36,219	(9,488)	(106,089)
Kas dan Setara Kas Pada Awal tahun Cash & Cash Equivalents at the Beginning of the Year	301,153	221,699	79,454	36	185,560	194,754	302,256
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	383	(692)	1,075	(155)	(80)	294	(1,413)
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	249,035	301,153	(52,118)	(17)	221,699	185,560	194,754

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada tahun 2019 turun dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok, pembayaran Pajak Penghasilan Badan, dan penurunan penerimaan kas dari pelanggan.

ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun 2018. Hal ini utamanya disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran untuk pembelian aset tetap terkait Larona Canal Lining dan alat berat.

ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan selama tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh dilunasinya pinjaman jangka panjang SEFA di tahun 2019.

RASIO PEMANFAATAN ARUS KAS

Rasio Pemanfaatan Arus Kas pada tahun 2019 lebih kecil dibanding tahun 2018 disebabkan oleh turunnya Arus Kas terhadap Operasi terkait dengan kenaikan pembayaran Pajak Penghasilan Badan, pembayaran kepada pemasok dan penurunan penerimaan kas dari pelanggan.

RASIO PEMANFAATAN ARUS KAS

Cash Flow Coverage Ratio

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Pemanfaatan Arus Kas Terhadap Operasi (Arus Kas Dari Operasi/ Pendapatan) Operating Cash Flows Coverage (Operating Cash Flows/ Revenue)	0.18	0.26	0.24	0.02	0.17
Pemanfaatan Arus Kas Terhadap Belanja Barang Modal (Arus Kas Dari Operasi/Penambahan Aset Tetap Dalam Penyelesaian Selama Tahun Berjalan) Capital Expenditure Coverage (Operating Cash Flows/ Additional Construction in Progress During the Year)	0.83	1.98	2.23	0.22	1.22

NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Net Cash Flow from Operating Activities in 2019 decreased compared to 2018, due to the increased payment to supplier, Corporate Income Tax and decrease cash receipts from customers.

NET CASH FLOW USED FOR INVESTMENT ACTIVITIES

Net Cash Flow used for Investment Activities in 2019 increased compared to 2018, due to higher payments for fixed assets purchase related to Larona Canal Lining project and heavy equipment replacement.

NET CASH FLOW USED FOR FUNDING ACTIVITIES

Net Cash Flow used for Funding Activities in 2019 decreased compared to 2018, due to repayment of the SEFA long-term loan in 2019.

CASH FLOW COVERAGE RATIO

The Cash Flow Coverage Ratio in 2019 was lower than in 2018, due to decrease in operating Cash Flows regarding increase on account of increased payment of Corporate Income Tax, increased payment to suppliers and decreased cash receipts from customers

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement Of Profit And Loss And Other Comprehensive Income

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (DALAM RIBUAN AS\$)

Statement of Profit and Loss Other Comprehensive Income (Thousand US\$)

Uraian Description	2019	2018	Δ		2017	2016	2015
	1	2	1:2	%	3	4	5
Pendapatan Revenue	782,012	776,900	5,112	1	629,334	584,143	789,745
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(665,558)	(672,899)	7,341	(1)	(622,780)	(550,018)	(671,389)
Laba Bruto Gross Profit	116,454	104,001	12,453	12	6,554	34,125	118,356
Pendapatan Lainnya Other Income	3,266	7,615	(4,349)	(57)	353	1,902	1,357
Beban Usaha Operating Expenses	(13,730)	(11,578)	(2,152)	19	(11,339)	(12,131)	(11,562)
Beban Lainnya Other Expenses	(17,701)	(15,184)	(2,517)	(17)	(13,546)	(9,598)	(28,400)
Laba/(Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	88,289	84,854	3,435	4	(17,978)	14,298	79,751
Biaya Keuangan, Bersih Net Finance Costs	847	(2,237)	3,084	(138)	(5,042)	(9,133)	(9,923)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit/(Loss) Before Income Tax	89,136	82,617	6,519	8	(23,020)	5,165	69,828
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax (Expense)/Benefit	(31,736)	(22,105)	(9,631)	44	7,749	(3,259)	(19,327)
Laba/(Rugi) Profit/(Loss)	57,400	60,512	(3,112)	(5)	(15,271)	1,906	50,501
Total Penghasilan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	566	3,848	(3,282)	(85)	49	(1,274)	(1,897)
Jumlah Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Income/(Loss) for the Year	57,966	64,360	(6,394)	(10)	(15,222)	632	48,604
EBITDA yang Disesuaikan Adjusted EBITDA	232,367	235,673	(3,306)	(1)	111,635	134,966	214,692



PENDAPATAN

Tahun 2019 Perseroan mencatat kenaikan Pendapatan dibanding tahun 2018. Kondisi tersebut dipengaruhi realisasi harga rata-rata nikel di pasar global, yang mengalami kenaikan pada periode triwulan ketiga dan bertahan hingga akhir periode pelaporan.

REVENUE

Revenue in 2019 increased compared to 2018. This was due to higher average price in the global market, particularly from the second quarter until the end of the reporting period.

PENDAPATAN

Revenue

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Δ		2017	2016	2015
		1	2	1:2	%	3	4	5
Penjualan Sales	Ribu AS\$ Thousand US\$	782,012	776,900	5,112	1	629,334	584,143	789,745
Harga Realisasi Realized Price	AS\$ Per Ton US\$ Per Ton	10,855	10,272	583	6	8,106	7,396	9,526

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018 terutama disebabkan penurunan konsumsi minyak bakar bersulfur tinggi ("HSFO") dan batubara. Penurunan ini ditambah dengan lebih rendahnya harga batubara dan bahan bakar minyak sepanjang tahun 2019. Sementara Beban Pokok Pendapatan per unit penjualan mengalami kenaikan terutama disebabkan lebih rendahnya produksi nikel dan penjualan nikel matte di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

COST OF REVENUE

Cost of Revenue in 2019 decreased compared to 2018, due to a decrease in high sulphur fuel oil consumption ("HSFO") and coal. This was further added by lower coal and fuel prices throughout 2019. Meanwhile, the Cost of Revenue per unit sales increased mainly due to lower nickel production and nickel matte sales in 2019 compared to 2018.

Perseroan berupaya mengendalikan Beban Pokok Pendapatan untuk setiap ton nikel matte yang dijual. Upaya yang dilakukan menjadi bagian dari strategi mengontrol biaya dengan ketat dan menerapkan efisiensi biaya berkelanjutan.

The Company seeks to control the Cost of Revenue for each ton of nickel matte sold. This is becoming integral part of the Company's strategy to prudently control the costs and implement sustainable cost efficiencies.

PERBANDINGAN HARGA REALISASI RATA DENGAN BEBAN POKOK PENDAPATAN/UNIT PENJUALAN (AS\$ PER TON)

Comparison of Average Realized Prices With Cost of Revenue/Unit Sold (US\$ Per Ton)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Harga Realisasi Rata-rata Average Realized Price	10,855	10,272	8,106	7,396	9,526
Beban Pokok Pendapatan/Unit Penjualan Cost of Revenue/Unit Sold	9,238	8,897	8,021	6,964	8,098

BEBAN POKOK PENDAPATAN (DALAM RIBUAN AS\$)

Cost of Revenue (Thousand US\$)

Uraian Description	2019	2018	Δ		% Dari	2017	2016	2015
	1	2	1:2	%		3	4	5
Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Fuels and Lubricants	146,376	156,352	(9,976)	(6)	22	127,412	95,392	153,043
Depresiasi dan Amortisasi Depreciation and Amortization	132,184	128,930	3,254	3	20	126,606	123,469	121,368
Bahan Pembantu Supplies	120,849	113,740	7,109	6	18	112,683	107,252	119,772
Biaya Karyawan Employee Costs	80,926	85,036	(4,110)	(5)	12	84,863	76,764	67,498
Jasa Kontraktor Contractor's Services	92,897	80,603	12,294	15	14	81,460	86,607	97,773
Bahan Bakar Batubara Coal	44,383	61,823	(17,440)	(28)	7	46,731	33,880	34,968
Pajak dan Asuransi Taxes and Insurance	29,838	36,913	(7,075)	(19)	5	26,911	23,934	26,271
Royalti Royalties	15,862	15,715	147	1	2	12,636	11,683	15,795
Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan Provision for Decline in Inventory Value	0	0	0	0	0	0	(12,940)	12,940
Lainnya Others	9,341	6,893	2,448	36	1	7,180	8,205	10,621
Persediaan Dalam Proses In Process Inventory	(6,490)	(10,873)	4,383	(40)	(1)	(412)	(6,056)	4,215
Beban Pokok Produksi Cost of Production	666,166	675,132	(8,966)	(1)	100	626,070	548,190	664,264
Perubahan Persediaan Barang Finished Goods Inventory Changes	(608)	(2,233)	1,625	(73)		(3,290)	1,828	7,125
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	665,558	672,899	(7,341)	(1)		622,780	550,018	671,389



Beban Pokok Produksi

Cost of Production

Beban Pokok Produksi tahun 2019 turun dibanding tahun 2018. Kondisi ini dipengaruhi oleh turunnya konsumsi dan harga bahan bakar minyak ("BBM") dan pelumas serta bahan bakar batubara.

Cost of Production in 2019 decreased compared to 2018. This was primarily driven by the decrease in the consumption and cost of fuels and lubricants, and coal.

BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pemakaian bahan bakar tahun 2019 mencapai 22% dari total Beban Pokok Produksi. Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai 23% dari total Beban Pokok Produksi. Jenis bahan bakar yang digunakan adalah HSFO dan *High Speed Diesel* ("HSD").

FUELS AND LUBRICANTS

Fuel consumption in 2019 reached 22% of the total Cost of Production, a decrease compared to 23% in 2018. The fuel types used are HSFO and High Speed Diesel ("HSD").

Secara keseluruhan jumlah pemakaian bahan bakar tahun 2019 turun dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan rendahnya penggunaan bahan bakar minyak terutama HSFO.

Fuel consumption in 2019 decreased compared to 2018, due to the lower use of fuel mainly HSFO.

1. HSFO

HSFO digunakan untuk pengoperasian pabrik pengolahan. Biaya HSFO tahun 2019 mencapai 64% dari total biaya bahan bakar, berkurang dibanding tahun 2018. Penyebabnya adalah turunnya harga dan konsumsi HSFO di tahun 2019.

1. HSFO

HSFO is used for processing plant operations. HSFO costs in 2019 represented 64% of total fuel costs, a decrease compared to 2018, due to decrease the prices and consumption of HSFO in 2019.

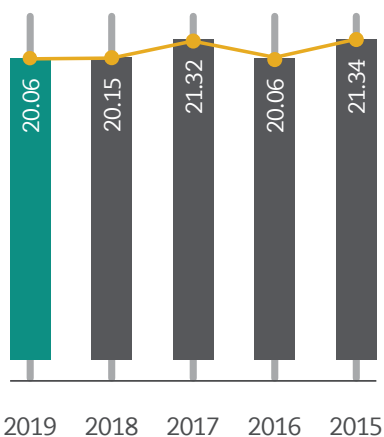
BIAYA DAN KONSUMSI HSFO

HSFO Cost and Consumption

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Δ		2017	2016	2015
		1	2	1:2	%	3	4	5
Biaya Cost	Juta AS\$ Million US\$	93	102	(9)	(9)	86	60	101
Volume	Juta Barel Million Barrels	1.42	1.51	(0.09)	(6)	1.64	1.56	1.73



TINGKAT KONSUMSI HSFO PER TON NIKEL MATTE
HSFO Consumption Rate per Ton of Nickel Matte



Tahun 2019 Perseroan mencatat kenaikan Pendapatan dibanding tahun 2018. Kondisi tersebut dipengaruhi realisasi harga rata-rata nikel di pasar global.

Revenue in 2019 increased compared to 2018. This was due to increase of the average price of nickel in the global market.

2. HSD

HSD digunakan untuk pengoperasian armada tambang dan pembangkit listrik termal. Biaya pemakaian HSD tahun 2019 mencapai 34% dari total biaya bahan bakar, bertambah dibanding tahun 2018 sebesar 32% dari total biaya bahan bakar yang disebabkan oleh meningkatnya volume pemakaian HSD sehubungan dengan pemeliharaan Larona Canal. Tingkat pemakaian HSD per ton nikel matte pada tahun 2019 mencapai 1.209,24 liter per ton nikel matte, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 1.041,30 liter per ton nikel matte. Penyebab naiknya konsumsi HSD adalah karena pengoperasian pembangkit listrik termal di triwulan pertama 2019.

2. HSD

HSD is used to operate mining fleet and thermal power plants. HSD consumption costs in 2019 accounted for 34% of total fuel costs, an increase compared 32% in to 2018, due to the increase of HSD use for maintenance of Larona Canal. The use of HSD per ton of nickel matte in 2019 reached 1,209.24 liters per ton of nickel matte, an increase compared to 1,041.30 liters per ton of nickel matte, in 2018, due to the increase in HSD consumption in the first quarter of 2019 for thermal power generation.



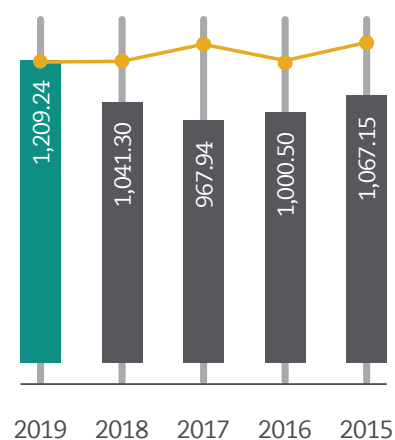
BIAYA DAN KONSUMSI HSD

HSD Cost and Consumption

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Δ		2017	2016	2015
		1	2	1:2	%	3	4	5
Biaya Cost	Juta AS\$ Million US\$	49	50	(1)	(2)	37	32	47
Volume	Juta Barel Million Barrels	86	78	8	10	74	78	87

TINGKAT KONSUMSI HSD PER TON NIKEL MATTE

HSD Consumption Rate per Ton of Nickel Matte



Beban Pokok Produksi tahun 2019 turun dibanding tahun 2018 karena turunnya konsumsi dan harga BBM dan pelumas serta bahan bakar batubara.

Cost of Production in 2019 decreased compared to 2018, due to decreases in the consumption and cost of fuels and lubricants, and coal.

DEPRESIASI DAN AMORTISASI

Depresiasi dan Amortisasi berkontribusi 20% dari total Beban Pokok Produksi tahun 2019. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar 19%. Hal ini sejalan dengan penambahan aset tetap di tahun 2019.

DEPRECIATION AND AMORTIZATION

Depreciation and Amortization accounted for 20% of the total Cost of Production in 2019, higher than the 19% in 2018. It was due to additional fixed assets in 2019.

BAHAN PEMBANTU

Porsi Biaya Bahan Pembantu mencapai 18% dari total Beban Pokok Produksi tahun 2019. Angka tersebut naik dibanding tahun 2018 sebesar 17% dari total Beban Pokok Produksi. Kenaikan bahan pembantu ini disebabkan oleh lebih tinggi biaya perbaikan peralatan pabrik dan tambang.

SUPPLIES

Supplies made up 18% of the total Cost of Production in 2019, an increase compared to 17% in 2018. The increase in supplies was due to higher costs for repairing of plant maintenance and mine equipment maintenance.

BIAYA KARYAWAN

Biaya Karyawan menyumbang 12% dari total Beban Pokok Produksi tahun 2019. Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 13% dari total Beban Pokok Produksi. Penurunan ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran kompensasi bonus dan *overtime*.

EMPLOYEE COSTS

Employee Costs made up 12% of the total Cost of Production in 2019, lower than the 13% in 2018. The decrease was due to lower payment for bonus and overtime compensation.

JASA KONTRAKTOR

Biaya Jasa Kontraktor mencakup 14% dari total Beban Pokok Produksi tahun 2019. Angka tersebut lebih tinggi 12% dari total Beban Pokok Produksi tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh lebih tingginya biaya perbaikan peralatan pabrik dan tambang.

BATUBARA

Batubara digunakan untuk proses pembakaran di tanur pengering dan tanur pereduksi, serta membantu proses reduksi di tanur pereduksi. Biaya konsumsi batubara tahun 2019 mencapai 7% dari total Beban Pokok Produksi. Angka tersebut turun dibanding tahun 2018 sebesar 9% dari total Beban Pokok Produksi. Hal ini disebabkan turunnya harga dan konsumsi batubara.

BIAYA DAN KONSUMSI BATUBARA

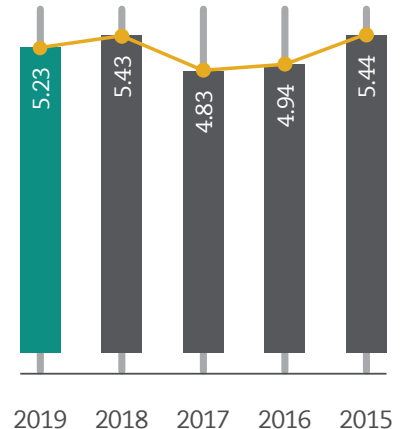
Coal Cost and Consumption

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Δ		2017	2016	2015
		1	2	1:2	%	3	4	5
Biaya Cost	Juta AS\$ Million US\$	44	62	(17)	(28)	47	34	35
Volume	Dry Metric Ton	371,418	406,113	(34,695)	(9)	370,613	383,558	441,777



TINGKAT KONSUMSI BATUBARA PER TON NIKEL MATTE

Coal Consumption Rate per Ton of Nickel Matte



PAJAK DAN ASURANSI

Biaya Pajak dan Asuransi tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Biaya Pajak dan asuransi berkontribusi sebesar 4% dari total beban pokok produksi di tahun 2019, lebih kecil dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5%. Hal ini disebabkan lebih rendahnya kewajiban pembayaran PNPB Kehutanan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Di tahun 2018, Perseroan membuat akrual untuk pembayaran PNPB kehutanan tersebut untuk jumlah sebesar kurang lebih AS\$11,2 juta yang dihitung secara retroaktif dari tahun 2008. Adapun kewajiban PNPB Kehutanan tahun 2019, dibayarkan sebesar AS\$ 1,8 juta.

TAXES AND INSURANCE

Taxes and Insurance in 2019 decreased compared to 2018. Taxes and insurance contributed 4% of the total cost of production in 2019, lower compared to 2018 which was recorded at 5%, due to lower PNPB Forestry in 2019 compared to 2018. In 2018, the Company made accruals for payments of PNPB Forestry amounted to US\$11.2 million, calculated retroactively from 2008. As for the PNPB Forestry in 2019, the amount paid was US\$1.8 million.



ROYALTI

Biaya Royalti berkontribusi 2% dari total Beban Pokok Produksi tahun 2019. Angka tersebut kurang lebih sama dengan Biaya Royalti tahun 2018 yang mencapai 2% dari total Beban Pokok Produksi.

ROYALTIES

Royalties in 2019 made up 2% of the total Cost of Production, This royalties was approximately equal to the royalty costs in 2018 which was recorded at 2% of the total Cost of Production.

LAINNYA

Biaya Lainnya tahun 2019 meningkat sebesar A\$2,4 juta disebabkan oleh kenaikan program pengembangan masyarakat.

OTHERS

Other Costs in 2019 increased by US\$2.4 million due to higher community development program.

Beban Usaha

Operating Expenses

Beban Usaha tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 terutama disebabkan kenaikan biaya untuk legal dan audit sejalan dengan agenda divestasi saham Perseroan.

Operating expenses in 2019 increased compared to 2018, due to higher legal and audit costs associated with several activities to support Company's divestment agenda.

Pendapatan Lainnya

Other Income

Pendapatan lainnya di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar A\$3,3 juta dibandingkan tahun 2018 terutama disebabkan lebih rendahnya pendapatan terkait Provisi atas penghentian aset. Penurunan ini diimbangi dengan tambahan pendapatan dari laba selisih kurs sebesar A\$1,1 juta.

Other income in 2019 decreased by US\$3.3 million compared to 2018, mainly due to provisions for asset retirement. This decrease was offset by additional income from foreign exchange earnings of \$1.1 million.

Beban Lainnya

Other Expenses

Beban Lainnya terdiri dari biaya pengembangan proyek, biaya karyawan, rugi selisih kurs dan lainnya. Pada tahun 2019 Perseroan mencatatkan nilai Beban Lainnya lebih tinggi dibanding tahun 2018 terutama disebabkan kerugian pelepasan aset tetap dan biaya pajak yang diakui oleh Perseroan. Hal ini diimbangi dengan penurunan biaya studi pengembangan.

Other Expenses consist of project development costs, employment costs, loss on foreign exchange differences and others. In 2019 Other Expenses increased compared to 2018, due to fix asset disposal loss and tax costs recognized by the Company. It was in line with the decrease in the costs of development studies.

Labanya Bruto

Gross Profit

Perolehan Labanya Bruto pada tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Hal ini terutama dipengaruhi kenaikan pendapatan sehubungan rata-rata harga nikel yang lebih tinggi di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, meskipun volume penjualan tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018.

Gross Profit in 2019 increased compared to 2018, due to increased revenue which was driven primarily by higher average nickel prices in 2019 compared to 2018, offset by lower sales volume in 2019, compared to 2018.

LABA BRUTO (DALAM RIBUAN AS\$)

Gross Profit (Thousand US\$)

2019	2018	Δ	%	2017	2016	2015
116,454	104,001	12,453	12	6,554	34,125	118,356

Biaya Keuangan

Finance Costs

Biaya Keuangan terdiri dari beban bunga, biaya jaminan, biaya agen, amortisasi biaya pinjaman atas pinjaman Senior Export Facilities Agreement ("SEFA") dan beban akresi untuk provisi atas penghentian pengoperasian aset. Biaya Keuangan Perseroan pada tahun 2019 turun dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan turunnya pokok pinjaman dan dilunasinya pinjaman tersebut di tahun 2019.

Finance costs consist of interest expense, guarantee fees, agency fees, amortization of borrowing costs for the Senior Export Facilities Agreement ("SEFA"), and accretion expenses for the provision for asset retirement. The Finance Costs in 2019 decreased compared to 2018, due to a decline in loan principal and repayment of the loan in 2019.

(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan

Income Tax (Expense)/Benefit

(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan. Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh naiknya laba sebelum pajak Penghasilan dan penyesuaian tahun sebelumnya.

Income Tax (Expense)/Benefit consists of current and deferred tax expenses. In 2019, Income Tax Expense increased compared to 2018, due to increase in profit before income tax and previous year adjustments.

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan

Profit/(Loss) for the Year

Perseroan mencatat Labanya Tahun Berjalan pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Kenaikan beban pajak penghasilan yang lebih tinggi di tahun 2019 menyebabkan laba tahun berjalan Perseroan lebih rendah dibandingkan tahun 2018.

The Company recorded a Profit for the Year in 2019, lower than 2018. Higher tax expenses in 2019 caused the Company's Profit for the Year decreased.



Total Penghasilan Komprehensif Lain

Total Other Comprehensive Income

Perseroan mencatat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2019 dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan lebih rendahnya keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan dan penyesuaian pengalaman di tahun 2019 sebesar AS\$0,8 juta dibandingkan tahun 2018 sebesar AS\$5,1 juta.

The Company recorded a decrease in Other Comprehensive Income in 2019 compared to 2018. This was due to lower actuarial gains as a result of changes in financial assumptions and experience adjustments in 2019, amounted to US\$0.8 million compared to 2018 which was recorded at US\$5.1 million.

EBITDA yang Disesuaikan

Adjusted EBITDA

EBITDA merupakan Laba atau Rugi Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi. EBITDA dihitung dari Laba Sebelum Pajak Penghasilan ditambah Biaya Keuangan, Depresiasi dan Amortisasi serta menghilangkan dampak dari Laba/Rugi Selisih Kurs. Termasuk dalam Biaya Keuangan adalah biaya akresi untuk Provisi Atas Penghentian Pengoperasian Aset.

EBITDA defines Profit or Loss Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. EBITDA is equal to Profit Before Income Tax plus Finance, Depreciation, and Amortization Costs after eliminating the impact of Foreign Exchange Gains/Losses. Included in the Finance Costs are accretion costs for the Provision for Asset Retirement.

PT Vale menggunakan istilah EBITDA yang Disesuaikan untuk merefleksikan pengecualian terhadap biaya yang tidak berulang. EBITDA yang Disesuaikan tidak dapat dianggap sebagai pengganti Laba Operasional atau sebagai acuan yang lebih baik dalam mengukur likuiditas dibanding Arus Kas Operasional yang dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

PT Vale uses the term Adjusted EBITDA to reflect the exclusion of non-recurring expenses. The Adjusted EBITDA should not be considered as a substitute for Operational Profit or as a better measure of liquidity than Operational Cash Flow, which is calculated in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Perseroan memberikan EBITDA yang Disesuaikan untuk memberikan informasi mengenai kesanggupan Perseroan membayar utang, melakukan investasi, dan memenuhi kebutuhan modal kerja. Walaupun Perseroan membukukan EBT yang lebih tinggi, namun perolehan EBITDA yang Disesuaikan Perseroan tahun 2019 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian terhadap angka EBITDA tahun 2018 yang dilakukan atas akrual kewajiban PNBK Kehutanan tahun 2008-2018 yang diakui sekaligus berdasarkan IPPKH tanggal 31 Desember 2018.

The Company provides adjusted EBITDA to provide information on the Company's ability to pay liabilities, conduct investments, and meet working capital needs. Although the Company booked a higher EBT, the Adjusted EBITDA in 2019 was slightly lower than in 2018. This was due to adjustments in the 2018 EBITDA figures for the 2008-2018 PNBK Forestry accruals obligations that were recognized at the same time based on the IPPKH as of December 31, 2018.



Rasio Keuangan

Financial Ratios

Secara umum Rasio Keuangan Perseroan tahun 2019 memperlihatkan kondisi yang stabil dibandingkan tahun 2018 dengan tingkat pendapatan yang meningkat meskipun tingkat produksi dan penjualan mengalami penurunan. Pengendalian biaya juga dilakukan dengan hati-hati sehingga bisa tetap menjaga tingkat keuntungan yang menyerupai dengan kondisi tahun 2018.

In general, the Company's Financial Ratios in 2019 showed stable trend, compared to 2018. Company's revenue increased although production and sales number decreased. Cost control was carried out carefully so that the Company could still maintain a similar level of profit as in 2018.

Profitabilitas

Profitability

Nilai Rasio Profitabilitas tahun 2019 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2018 jika dikaitkan dengan margin laba bersih. Sementara dari margin laba kotor, rasio nya sedikit lebih tinggi disebabkan kenaikan tingkat pendapatan perusahaan. RoA and RoE mengalami sedikit penurunan terutama disebabkan kenaikan nilai aset dan ekuitas perusahaan, sementara profitabilitas perusahaan kurang lebih di level yang sama untuk tahun 2019 dan 2018.

The Profitability Ratio in 2019 was slightly lower compared to 2018, specifically on net profit margin. Gross profit ratio was slightly higher due to an increase in the Company's revenue. RoA and RoE experienced a slight decline mainly due to an increase in the Company's assets and equity, while the Company's profitability was at the same level for 2019 and 2018.

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	14.9	13.4	1.0	5.8	15.0
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	7.3	7.8	(2.4)	0.3	6.4
Pengembalian Atas Aset Return on Assets	2.6	2.8	(0.7)	0.1	2.2
Pengembalian Atas Ekuitas Return on Equity	3.0	3.2	(0.8)	0.1	2.8

Likuiditas

Liquidity

Risiko Likuiditas muncul saat Perseroan memiliki kesulitan memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga kecukupan saldo Kas dan Setara Kas, melalui pemantauan arus kas perkiraan dan aktual serta mencocokkan waktu jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises when the Company has difficulties in obtaining funding to meet its short-term liabilities. Liquidity risk is managed by maintaining adequate cash and cash equivalents, by monitoring the estimated and actual cash flows, and by matching the maturity of financial assets and liabilities.

Nilai Rasio Likuiditas Perseroan tahun 2019 naik dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan dilunasinya bagian lancar pinjaman jangka panjang SEFA dan turunnya akrual PNPB kehutanan yang dibayarkan di tahun 2019. Penurunan di sisi utang lancar ini diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas Perseroan yang lebih rendah di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

The Liquidity Ratio in 2019 increased compared to 2018, due to repayment of the SEFA long-term loan and decrease forestry accrual PNPB paid in 2019. This decrease in the current debt side was offset by a decrease in the Company's cash and cash equivalents, which was lower in 2019 compared to 2018.



RASIO LIKUIDITAS

Liquidity Ratios

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Rasio Lancar Current Ratio	4.31	3.60	4.62	4.54	4.01
Rasio Modal Bersih Terhadap Total Asset Net Working Capital to Total Assets Ratio	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20

Leverage Keuangan

Financial Leverage

Liabilitas Perseroan pada tahun 2019 memperlihatkan penurunan dibanding tahun 2018. Penyebabnya terutama dengan dilunasinya pinjaman jangka panjang SEFA di tahun 2019. Dengan lunasnya pinjaman ini, maka PT Vale mempunyai ruang yang sangat besar untuk melakukan pinjaman di masa depan untuk proyek-proyek pengembangan.

The Company's liabilities in 2019 decreased compared to 2018, mainly due to repayment of the SEFA long-term loan in 2019. PT Vale has a higher debt capacity for development projects in the future.

RASIO LIABILITAS

Liabilities Ratios

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (Total Liabilitas/Total Ekuitas) Debt to Equity Ratio (Total Liabilities/Total Equity)	0.14	0.17	0.20	0.21	0.25
Rasio Utang (Total Liabilitas/Total Aset) Debt Ratio (Total Liabilities/Total Assets)	0.13	0.14	0.17	0.18	0.20
Rasio Utang Tertentu (Rasio Pinjaman Bank Bersih*/ Total Aset) Specific Debt Ratio (Total Net Bank Borrowings*/ Total Assets)	0.00	0.02	0.03	0.05	0.06
Rasio Utang Tertentu Terhadap Ekuitas (Total Pinjaman Bank Bersih*/Total Ekuitas) Specific Debt to Equity Ratio (Total Net Bank Borrowings*/Total Equity)	0.00	0.02	0.04	0.06	0.08
Rasio Utang Terhadap EBITDA yang Disesuaikan (Total Pinjaman Bank Bersih*/Total EBITDA yang Disesuaikan) Debt to Adjusted EBITDA Ratio (Total Net Bank Borrowings*/Total Adjusted EBITDA)	0.00	0.15	0.65	0.81	0.68
Rasio Utang Terhadap Nilai Perseroan (Total Pinjaman Bank Bersih*/Nilai Perseroan) Debt to Enterprise Value Ratio (Total Net Bank Borrowings*/Enterprise Value)	0.00	0.02	0.04	0.05	0.13
Arus Kas Dari Operasi Terhadap Utang (Arus kas Dari Operasi/Total Pinjaman Bank Bersih*) Operating Cash Flow to Debt Coverage (Operating Cash Flow/Total Net Bank Borrowings*)	0.00	5.60	2.09	0.12	0.92
Total Pinjaman Bank Bersih* (Arus Kas Dari Operasi Dikurangi Dividen) Total Net Bank Borrowings* (Operating Cash Flow Minus Dividend Paid)	0.00	0.18	0.48	8.17	1.09

Keterangan | Notes

* Pinjaman Bank Bersih, termasuk biaya pinjaman | * Net Bank Borrowings, including borrowing costs

Kemampuan Membayar Utang (Solvabilitas)

Ability to pay Debt (Solvency)

Nilai Rasio Solvabilitas pada akhir tahun 2019 menurun menjadi nihil dibanding pada akhir tahun 2018 dengan dilunasinya pinjaman jangka panjang SEFA di tahun 2019.

The Solvency Ratio in 2019 decreased compared to 2018, due to repayment of the SEFA long-term loan in 2019.

RASIO SOLVABILITAS

Solvency Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Total Pinjaman Total Borrowings	Ribu AS\$ Thousand US\$	0	36,519	73,038	109,557	146,077
EBITDA yang Disesuaikan Adjusted EBITDA		232,367	235,673	111,635	134,966	214,682
Rasio Solvabilitas (EBITDA yang disesuaikan/Total Pinjaman) Solvency Ratio (Adjusted EBITDA/Total Borrowings)		0	6.45	1.53	1.23	1.47

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectibility

Nilai Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang pada akhir tahun 2019 memperlihatkan penurunan dibanding pada akhir tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan jangka waktu pembayaran VCL dari sebelumnya 90 hari kembali ke 30 hari.

The Receivables Collectibility Ratio in 2019 decreased compared to 2018, due to the changes of term of payment from VCL, from previously 90 days to 30 days.

RASIO KOLEKTABILITAS

Collectibility Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Rata-rata Saldo Piutang Pada Awal dan Akhir Tahun Trade Receivables Average Balance at the Beginning and End of the Year	Ribu AS\$ Thousand US\$	115,772	144,913	156,097	112,408	85,453
Lama Piutang yang Belum Terbayar [360/(Pendapatan/Rata-rata Saldo Piutang Usaha)] Days of Unpaid Receivables [360/(Revenue/Average Trade Receivables Balance)]	Hari Days	53	67	89	69	39



Struktur Modal Dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

Dasar dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure Basis and Policy

Struktur Modal merefleksikan pertimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/utang, yang terdiri utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Perseroan menetapkan kebijakan Struktur Modal yang dirancang untuk menunjang kebutuhan pendanaan bagi kegiatan operasional maupun strategi pertumbuhan dan menjaga neraca yang sehat. Tujuannya agar dapat terus memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham serta manfaat bagi pemangku kepentingan lain.

Capital Structure reflects the balance between the use of own capital and loans/debt consisting of short-term debt and long-term debt. The Company has a Capital Structure policy designed to support its funding needs for operational activities and growth strategies while maintaining a healthy balance sheet. The aim is to provide returns for shareholders as well as benefits for other stakeholders.

Faktor utama yang dipertimbangkan Perseroan dalam struktur modal adalah
The main factors considered in the Company's capital structure include

Risiko bisnis
Business risk

Fleksibilitas finansial
Financial flexibility

Tingkat pertumbuhan
Growth rate

Kondisi pasar
Market conditions

Dalam menentukan kebijakan dan strategi penyusunan struktur modal, Perseroan mempertimbangkan risiko yang ada. Pengelolaan struktur modal dilakukan dengan penyesuaian yang diperlukan ketika terdapat perubahan signifikan pada pasar atau kondisi ekonomi.

When determining the policies and strategies for preparing its capital structure, the Company consider existing risks. Capital structure management is carried out by the Company and adjusted as needed when there are significant changes in the market or economic conditions.

Rincian Struktur Modal

Capital Structure Details

Perseroan melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap struktur modal dengan menggunakan Rasio Utang terhadap Ekuitas sebagai basis. Rasio ini dihitung dengan membagi Total Liabilitas dengan Ekuitas.

The Company uses the Debt to Equity Ratio as a basis for reviewing and evaluating its capital structure. This ratio is calculated by dividing Total Liabilities by Equity.

Rasio Utang terhadap Ekuitas tahun 2019 adalah 0,14. Angka tersebut berkurang dibanding tahun 2018 yang mencapai 0,17. Nilai rasio tersebut menunjukkan pengelolaan struktur modal yang lebih baik. Demikian pula dalam hal pengelolaan atas risiko *leverage*.

The Debt to Equity ratio for 2019 reached 0.14, a reduction compared to 0.17 in 2018. This ratio shows improved capital structure management as well as leverage risk management.





Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments For Capital Goods Investments

Selama periode pelaporan tidak ada ikatan material terkait investasi barang modal.

During the reporting period there were no material commitments related to capital goods investments.

Investasi Barang Modal

Capital Investments

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan tingkat produksi dan pertumbuhan usaha Perseroan. Realisasi investasi barang modal tahun 2019 meliputi beberapa hal, yakni program pemeliharaan aset utama dan penunjang, substitusi dan efisiensi sumber energi, dan perbaikan lingkungan.

PURPOSE OF CAPITAL GOODS INVESTMENTS

The capital investments are intended to maintain the sustainability of Company's production and business growth. The capital investments in 2019 consisted of major and supporting asset maintenance programs, substitution and energy efficiency, and environmental improvement.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Secara keseluruhan realisasi belanja modal Perseroan tahun 2019 mencapai AS\$166,4 juta, meningkat dibanding realisasi tahun 2018 sebesar AS\$103,4 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh aktivitas pemeliharaan Laron Canal yang terencana, penggantian peralatan dan kendaraan tambang, dan aktivitas untuk peningkatan kapasitas produksi.

TOTAL CAPITAL INVESTMENTS

In 2019 the Company's capital expenditure amounted to US\$166.4 million, an increase compared to US\$103.4 million in 2018, due to planned maintenance activity of Laron Canal, heavy equipment replacement and activity to increase production capacity.

REALISASI INVESTASI PERSEROAN (JUTA ASS)

Company's Investment Realization (Milion US\$)

2019	2018	2017	2016	2015
166.4	103.4	68.5	60.7	110.0

Seluruh investasi barang modal didanai menggunakan kas internal Perseroan. Sebagian besar dari belanja modal menggunakan mata uang dolar AS sebagai mata uang fungsional Perseroan. Hal ini menjadikan Perseroan tidak terpapar dengan risiko nilai tukar mata uang asing secara signifikan.

All capital investments were funded using Company's internal cash. Majority of spending were dominated in US\$, which is the Company's functional currency. This was to prevent the Company from significant foreign exchange rate exposure.

JENIS INVESTASI BARANG MODAL

Selama tahun 2019 ada beberapa program investasi barang modal yang selesai dilaksanakan. Selain itu ada beberapa program investasi barang modal tahun jamak yang masih akan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang:

TYPES OF CAPITAL INVESTMENTS

In 2019, several multi-year capital investment programs were completed, while other multi-year capital investment programs will be carried over to the following years:



1. Proyek Larona Canal dan Bendungan Batu Besi;
2. Proyek Pengembangan Tambang;
3. Penggantian Alat Berat;
4. Perbaikan Fasilitas Pemrosesan Batubara;
5. Program Pemeliharaan Aset;
6. Proyek Perbaikan Berkesinambungan;
7. Mobile Screening Station.

1. Larona Canal and Batu Besi Dam Project;
2. Mine Development Project;
3. Heavy Equipment Replacement;
4. Coal Mill Facilities Improvement;
5. Asset Integrity;
6. Continuous Improvement;
7. Mobile Screening Station.

Total program investasi barang modal tersebut di atas sebesar AS\$79,1 juta, atau 48% dari total investasi barang modal di tahun 2019.

The above Capital investment program amounted US\$79.1 million, or 48% from the total capital investment in 2019.

REALISASI INVESTASI BELANJA MODAL TAHUN 2019

Capital Investment Realization 2019

Bentuk Investasi Investment Form	Tujuan Investasi Investment Objective	Nilai Investasi Investment Value (Ribu AS\$) (Thousand US\$)
Larona Canal Lining & Batu Besi Dam	<p>Untuk memperpanjang masa desain kanal (desain maksimum 153m³/detik), mengurangi risiko akibat gempa bumi dan faktor-faktor lain (masalah stabilitas lereng, sifat geoteknik pondasi tanah, potensi likuifaksi), meningkatkan masa pakai fasilitas saluran listrik Larona, dan untuk memaksimalkan pemanfaatan kapasitas daya penuh 180 MegaWatt di pembangkit listrik Larona.</p> <p>To extend the design life of the canal (maximum design 153m³/s), reducing risk due to earthquake and other factors (slope stability issue, geotechnical properties of foundation soils, potential of liquefaction), increasing the longevity of the Larona power canal facility, and to maximize the utilization of full power capacity 180 MegaWatt at Larona power station.</p>	27,927
Mine Development Project	<p>Proyek pengembangan tambang mencakup pengembangan infrastruktur seperti pembukaan lahan dan survei tanah, bench re-sloping, konstruksi tiang pengaman, jalan tambang, tanggul pembuangan, pengeboran tambang & peledakan. Proyek ini ditujukan untuk mempersiapkan aktivitas tambang dan menyelaraskan dengan target produksi.</p> <p>Mine development project includes infrastructure development such as clearing and ground survey, bench re-sloping, safety bund construction, mine road, disposal dyke, quarry drilling & blasting. The project is required to prepare mine activity and align with production target.</p>	11,931
Heavy Equipment Replacement	<p>Untuk mengganti alat berat yang masa pakai ekonomisnya telah mencapai tahap akhir. Peningkatan biaya perawatan dan penurunan kinerja alat berat adalah indikator untuk penggantian alat berat.</p> <p>To replace heavy equipment whose economic lives have reached their final stage. Increased maintenance costs and a decline in machine performance are indicators for heavy equipment replacement.</p>	26,788
Coal Mill Facilities Improvement	<p>Peningkatan fasilitas batubara dengan sistem perlindungan yang aman untuk menghindari ledakan dan kecelakaan, serta pembersihan dan perawatan fasilitas yang memadai.</p> <p>Improvement in coal facility with secure protection system to avoid such as explosion accident and sufficient cleaning and maintenance facility.</p>	278
Asset Integrity	<p>Untuk menjaga integritas bangunan yang ada di pabrik.</p> <p>To preserve the existing building integrity in process plant</p>	2,756
Continuous Improvement	<p>Untuk meninjau dan mengganti peralatan pabrik dan proses produksi yang menghambat produksi dan untuk memenuhi target 90.000 ton.</p> <p>To review and replace factory equipment and production process that cause bottlenecks in production and to meet with 90,000 tons target</p>	1,669
Mobile Screening Station	<p>Untuk mengurangi jarak pengangkutan bijih nikel dari tambang ke <i>screening station</i> dan mengurangi kadar air di dalam produk <i>screening station</i>.</p> <p>To reduce the Run of Mine ("RoM") haul distance from mining face to screening station and reduce the moisture content in Screening Station Product</p>	7,712



Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku Dengan Pencapaian (Realisasi)

Comparison Between Target at the Start of the Year and Realization

Selama tahun 2019 kinerja Perseroan memperlihatkan pencapaian yang baik. Hal ini tidak terlepas dari realisasi produksi nikel dalam matte yang meningkat selepas triwulan kedua, menyusul selesainya pengerjaan pemeliharaan bendungan Larona. Faktor lain adalah optimalisasi penjualan nikel matte seiring meningkatnya produksi, membaiknya harga nikel dunia terutama di triwulan ketiga dan keempat dan efisiensi di segala lini dan produksi. Perseroan juga memperlihatkan kinerja yang baik dalam penerapan tata kelola perusahaan, penerapan aspek-aspek keberlanjutan dan pelaksanaan agenda strategis.

Pada tahun 2019, untuk pertama kali sepanjang sejarah PT Vale, Perseroan meraih predikat PROPER Hijau dari KLHK. Ini menandai untuk pertama kalinya penilaian prestisius tersebut diberikan kepada perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi di Indonesia. Sebelumnya, Perseroan sudah mempertahankan predikat PROPER Biru selama enam tahun penilaian berturut-turut dan pada tahun 2018 PTVI menjadi salah satu kandidat PROPER Hijau.

Di tahun 2019, PT Vale bersama dengan para pemegang sahamnya, VCL, SMM dan MIND ID telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan sebagai langkah awal penting dalam proses divestasi. MIND ID ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah untuk mengakuisisi saham divestasi PT Vale, untuk memenuhi kewajiban divestasi PT Vale. Pada 30 Desember 2019, semua pihak telah sepakat untuk memperpanjang batas waktu penandatanganan perjanjian definitif hingga akhir semester pertama tahun 2020.

During 2019, the Company showed a good performance. This was partly driven by the increase of Nickel in matte production after the second quarter, following the completion of the Larona dam maintenance. Another contributing factor was nickel matte sales optimization in line with increased production, improving world nickel prices especially in the third and fourth quarters and efficiency in the production process. The Company too showed good performance in applying the corporate governance, sustainability principles and implementation of the strategic agenda.

In 2019, for the first time in PT Vale's history, the Company was awarded the Green PROPER title from the KLHK. This was the first time for an integrated nickel mining and processing company in Indonesia to receive such prestigious title. In the six previous years, the Company had received the Blue PROPER title and in 2018 PTVI was considered as one of Green PROPER candidate.

In 2019, PT Vale together with its shareholders, VCL, SMM and MIND ID signed a Heads of Agreement which marked an important first step in the divestment process. MIND ID was appointed as the Government representative to acquire PT Vale's divested shares, in fulfillment of PT Vale's divestment obligations. On December 30, 2019, all parties agreed to extend the deadline for signing of the definitive agreement until the end of the first semester of 2020.

Produksi Nikel Dalam Matte

Nickel In Matte Production

Revisi target produksi nikel dalam matte tahun 2019 adalah 71.000 ton, dengan realisasi 71.025 ton atau sesuai dengan target. Jumlah tersebut lebih rendah 5% dibanding realisasi produksi nikel dalam matte tahun 2018 sebesar 74.806 ton.

The revised 2019 nickel in matte production target was 71,000 tons and the actual production was 71,025 tons, about the same as the revised target. This was 5% lower compared to the nickel in matte production in 2018 of 74,806 tons.



Penjualan Nikel Matte

Nickel Matte Sales

Realisasi penjualan nikel matte tahun 2019 sebesar 72.000 ton, sesuai dengan target penjualan sebesar 72.044 ton. Jumlah tersebut lebih rendah 5% dibanding realisasi penjualan nikel matte 2018 sebanyak 75.631 ton.

The 2019 nickel matte sales target was 72,000 tons, and realization reached 72,044 tons. This was 5% lower compared to the nickel matte sales in 2018 of 75,631 tons.

Pendapatan

Revenue

Perseroan menetapkan target perolehan Pendapatan tahun 2019 adalah AS\$780,0 juta, dengan realisasi AS\$782,0 juta sedikit lebih tinggi dari target. Jumlah tersebut lebih tinggi 1% dibanding realisasi perolehan Pendapatan tahun 2018 sebesar AS\$776,9 juta.

For 2019 the Company set a Revenue target of US\$780.0 million, and realization reached US\$782.0 million, or slightly higher than target. This amount was 1% higher compared to the revenue in 2018 of US\$776.9 million.

Target Aspek Lainnya - Belanja Modal

Capital Expenditure

Rencana belanja modal Perseroan tahun 2019 adalah AS\$196 juta dengan realisasi AS\$166,4 juta atau 85% dari target. Jumlah tersebut lebih tinggi 61% dibanding realisasi belanja modal tahun 2018 sebesar AS\$103,4 juta.

For 2019 the Company planned capital expenditure of US\$196 million, and realization reached US\$166.4 million, or 85% of the target. This amount was 61% higher compared to the capital expenditure in 2018 of US\$103.4 million.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019 DAN PERBANDINGAN DENGAN REALISASI TAHUN 2018

2019 Target and Realization and Comparison with 2018 Realization

Uraian Description	Target 2019	Realisasi 2019 2019 Realization	Realisasi 2018 2018 Realization	Δ%	
	1	2	3	1:2	2:3
Produksi Nikel dalam Matte (Ton) Nickel in Matte Production (Tons)	71,000	71,025	74,806	0	(5)
Penjualan Nikel Matte (Ton) Nickel Matte Sales (Tons)	72,000	72,044	75,631	0	(5)
Pendapatan (Juta AS\$) Revenue (Million US\$)	780.0	782.0	776.9	0	1
Belanja Modal (Juta AS\$) Capital Expenditure (Million US\$)	196.0	166.4	103.4	18	61



Target dan Proyeksi Tahun 2020

2020 Targets and Projection

Perseroan menargetkan produksi dan penjualan nikel matte pada tahun 2020 di level yang sama dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan Perseroan berencana untuk melakukan pemugaran total tanur listrik yang ke-4 di triwulan 4 tahun 2020. Pemugaran ini akan menghabiskan waktu sekitar 5 bulan yang akan berdampak terhadap produksi nikel matte di tahun 2020 dan 2021. Dengan menjaga tingkat produksi di level yang sama, dan asumsi harga nikel kurang lebih sama dengan kondisi tahun 2019, Perseroan mengharapkan kinerja yang lebih baik di tahun 2020 seiring komitmen pada efisiensi biaya produksi dan berbagai inisiatif penghematan biaya untuk mempertahankan daya saing tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja ("K3") serta kelestarian bumi. Perseroan berkeyakinan akan membaiknya tingkat harga nikel dunia terutama di semester kedua setelah isu terkait corona virus bisa teratasi dan tumbuhnya permintaan atas nikel di semester kedua.

The Company has set the target for 2020 nickel in matte production and sales to be at the same level as 2019. This is due to the 4th electric furnace rebuild plan in the 4th quarter of 2020. The rebuild will take approximately 5 months and will affect the nickel in matte production in 2020 and 2021. By keeping the same level of production, and assuming that the nickel price at the same level as 2019, the Company looks forward to achieving a better performance in 2020 while staying focused on various cost-saving initiatives to maintain its competitiveness without compromising occupational health and safety ("OHS") and environmental preservation. The Company believes that nickel prices will improve, especially in the second half of 2020 after the containment of corona virus outbreak and the rebound of nickel demand.

Target Produksi Nikel Dalam Matte

Nickel in Matte Production Target

Perseroan menargetkan volume produksi nikel dalam matte tahun 2020 sebanyak 71.700 ton. Jumlah tersebut hampir sama dengan realisasi produksi nikel dalam matte tahun 2019 sebanyak 71.025 ton.

The Company's 2020 target for nickel in matte production is 71,700 tons, compared to the 2019 nickel in matte production realization of 71,025 tons.

Target Penjualan Nikel Matte

Nickel Matte Sales Target

Target penjualan nikel matte tahun 2020 sebesar 72.660 ton. Jumlah tersebut setara dengan realisasi penjualan nikel matte tahun 2019 sebanyak 72.044 ton.

The Company's 2020 target for nickel matte sales is 72,600 tons, compared to the 2019 nickel matte sales realization of 72,044 tons.

Target Pendapatan

Revenue Target

Target perolehan Pendapatan tahun 2020 sebesar AS\$850,1 juta. Jumlah tersebut bertambah 9% dari realisasi perolehan Pendapatan tahun 2019 sebesar AS\$782,0 juta.

The 2020 Revenue target is US\$850.1 million, an increase of 9% from the 2019 revenue realization of US\$782.0 million.



Target Aspek Lainnya - Belanja Modal dan Proyek Ekspansi

Capital Expenditure and Project Expansion Target

Memasuki tahun 2020, belanja modal Perseroan terkait dengan *sustaining capital* akan difokuskan pada rencana pemugaran total tanur listrik ke 4 yang akan mulai dilakukan di triwulan 4 tahun 2020, melanjutkan pengembangan tambang, penggantian alat berat dan melanjutkan upaya peningkatan kapasitas pabrik pengolahan nikel dalam matte. Upaya peningkatan ini akan dijalankan bersama dengan aktivitas studi untuk penambahan lini baru dengan teknologi RKEF untuk menghasilkan produk berupa feronikel dengan estimasi produksi 10.000 ton setahun. Dengan kombinasi proyek *continuous improvement* dan tambahan satu lini produksi RKEF ini, diharapkan target produksi 90.000 ton nikel dapat tercapai sebelum berakhirnya KK.

Perseroan juga menganggarkan biaya terkait proyek pengembangan Pomalaa dan Bahodopi seiring dengan majunya proses studi, perizinan, dan negosiasi dengan *partner* yang dipilih.

Untuk mendukung upaya tersebut di atas, Perseroan pada tahun 2020 merencanakan belanja modal di kisaran AS\$180 juta untuk belanja modal *sustaining* dan ekspansi.

In 2020, the Company's sustaining capital expenditure will be focused on 4th electric furnace rebuild project which is planned to be executed in 4th quarter of 2020. In addition to that, the Company would also spend capital for the mine development, heavy equipment replacement and the improvement of plant capacity. This improvement initiative will be carried out in line with the study for new RKEF line to produce Ferro Nickel with an estimated production of 10,000 tons a year. With this combination of continuous improvement projects and the addition of one RKEF production line, it is expected that the Company could achieve production target of 90,000 before the expiry of the COW.

The Company prepares the budget for Pomalaa and Bahodopi development project in line with the progress of the study, permission and negotiation with appointed partners.

In order to support above objectives, the Company plans to spend US\$180 million for both sustaining and growth capital expenditure.



Prospek Usaha dan Kelangsungan Usaha

Business Prospects and Business Continuity

Dalam melakukan penilaian atas prospek usaha dan kelangsungan usaha, Perseroan menggunakan asumsi-asumsi yang dianggap relevan terkait industri dan keadaan global serta nasional.

Nikel merupakan logam industri yang banyak dibutuhkan, utamanya untuk industri *stainless steel*. Woodmac dalam publikasi terkait Global Nickel long term outlook Q4 2019, menyebutkan bahwa konsumsi nikel dunia diproyeksikan tumbuh 6% di tahun 2019, terutama karena meningkatnya tingkat produksi *stainless steel* di Cina. Pertumbuhan jangka panjang nikel akan didominasi oleh permintaan dari industri *stainless steel* dengan percepatan permintaan dari industri baterai untuk mobil listrik. *Stainless steel* akan tetap menjadi konsumen utama dari nikel.

When assessing its business prospects and business continuity, the Company uses assumptions that are considered relevant to the industry and the global and national circumstances.

Nickel is a much sought after industrial metal, especially for the stainless steel industry. Woodmac, in a publication related to Global Nickel long term outlook for Q4 2019, said that World Nickel Consumption was projected to increase by 6% in 2019, mainly due to the increased production of stainless steel in China. Nickel's long-term growth will be dominated by demand from stainless steel industry and also driven by accelerated demand from the battery industry for electric vehicles. Stainless steel will remain the main consumer of nickel.



Pada tahun 2019, harga nikel mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun. Pada semester pertama 2019, harga nikel tertahan karena tekanan terhadap industri *stainless steel* dunia dan makin bertambahnya smelter nikel Indonesia yang selesai dibangun. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terjadinya kelebihan pasokan nikel. Pada pertengahan tahun 2019, rumor mengenai larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia dimulai. Hal ini menyebabkan harga nikel naik seiring kekhawatiran terjadi defisit pasokan nikel dunia. Stok nikel di LME juga menunjukkan penurunan yang signifikan sehingga memicu percepatan kenaikan harga nikel sehingga harga nikel mencapai level tertinggi di harga AS\$18.625 per ton. Di periode akhir triwulan ketiga, peraturan mengenai larangan ekspor dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah pada 1 Januari 2020. Pasar merespon ini dengan melakukan pembelian bijih nikel dari Indonesia dalam jumlah yang signifikan selama periode yang tersisa di triwulan keempat untuk *buffer* industri nikel di Cina. Penumpukan ini berdampak penurunan terhadap harga nikel di triwulan keempat, yang ditambah dengan kembali naiknya persediaan nikel di LME. Mulai merebaknya virus corona di Cina memberikan tambahan sentimen negatif yang menyebabkan kekhawatiran terhadap perekonomian dunia. Di sisi lain makin menurunnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina cukup memberikan sentimen positif, ditambah dengan rencana Pemerintah Cina untuk tetap memberikan subsidi terhadap industri mobil listrik di tahun 2020. Rencana Kebijakan di Cina dan banyak negara termasuk Indonesia untuk mengembangkan industri otomotif berbasis tenaga listrik, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan pasokan nikel ke pasar dunia. Penggunaan nikel ke depan untuk industri baterai pada kendaraan bertenaga listrik akan semakin signifikan karena pergeseran teknologi baterai dengan menggunakan komposisi nikel yang lebih besar karena faktor biaya yang lebih rendah dan kebutuhan untuk meningkatkan energi *density* dari baterai.

Secara keseluruhan, rata-rata harga nikel sepanjang tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Dengan kondisi pasar nikel saat ini, dan kebutuhan yang akan semakin meningkat dari *stainless steel* dan industri baterai untuk mendukung mobil listrik di masa mendatang, hal ini menjadi peluang dan prospek usaha bagi Perseroan untuk tetap melanjutkan rencana ekspansi Perseroan di Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa. Untuk Sorowako, rencana pengembangan dijalankan sesuai yang diamanatkan dalam amendemen KK untuk meningkatkan produksi sampai dengan 25%. Upaya peningkatan ini akan dilakukan dengan melakukan investasi yang bersifat *continuous improvement* dan pembangunan

In 2019, nickel prices experienced significant fluctuations throughout the year. In the first half of 2019, the price of nickel came under pressure from the global stainless steel industry and the increasing number of Indonesian nickel smelters being completed. That caused growing concerns of possible over supply in the market. In mid-2019, rumors about Indonesian nickel ore exports ban began. This has caused the nickel price to rise. The LME nickel stocks also showed a significant decrease, triggering an accelerated increase in nickel prices so that nickel price reached its highest level at US\$18,625 per ton. In the third quarter, Government of Indonesia issued new regulation to accelerate the enactment of the ban to January 1, 2020. The market responded by purchasing significant quantities of nickel ore from Indonesia during the fourth quarter to create a buffer for the nickel industry in China. This had a negative impact on nickel prices in the fourth quarter, coupled with an increase in nickel inventories at LME. The outbreak of the corona virus in China also provided additional negative sentiment to the world economy. On the other hand the declining tensions in the United States and China trade war provided positive sentiment, coupled with the Chinese Government's plan to continue to provide subsidies to the electric vehicle industry in 2020. Policy road map in China and many countries, including Indonesia, to develop the electric vehicle industry are expected to increase the demand for nickel. The use of nickel in the electric battery powered vehicles industry will increase significantly due to a change in battery technology that needs larger nickel composition. This will lower battery costs and increase the energy density.

Overall, the average nickel price during 2019 was higher than in 2018. The current nickel market conditions, and the growing need for stainless steel and electric vehicle batteries has created a business opportunity for the Company and provide solid business case for its expansion plans in Sorowako, Bahodopi and Pomalaa. For Sorowako, the expansion plan is part of Company's commitment to increase production up to 25%, as mandated by COW amendment. This growth plan will involve investment in several continuous improvements project and building an additional RKEF production line with an additional annual production level of around 10,000 tons. It is expected that the production target of 90,000 tons of nickel



tambahan satu lini produksi RKEF dengan tingkat produksi tambahan sekitar 10.000 ton. Dengan kombinasi proyek *continuous improvement* dan tambahan satu lini produksi ini, diharapkan target produksi menjadi 90.000 ton nikel dapat tercapai sebelum berakhirnya KK. Perseroan juga melanjutkan berbagai rencana pengembangan Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah dan Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi pengembangan kedua blok tersebut telah memasuki tahap akhir studi kelayakan dan dalam proses penyelesaian negosiasi dengan calon mitra strategis yakni perusahaan pengolah nikel asal Cina untuk Blok Bahodopi, dan Sumitomo Metal Mining Co.Ltd untuk Blok Pomalaa. Langkah berikutnya adalah mendapatkan persetujuan untuk proyek ekspansi di Bahodopi dan Pomalaa, mendapatkan perizinan dan memulai proses pendanaan untuk kedua proyek ini.

Prospek usaha Perseroan di masa mendatang juga tak terlepas dari volatilitas harga nikel di pasar dunia, serta kemampuan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi termasuk pemakaian bahan bakar. Perseroan melakukan pendekatan pengendalian risiko untuk mengurangi potensi kerugian akibat volatilitas harga nikel dan bahan bakar. Secara bersamaan, Perseroan juga melakukan efisiensi biaya dan mencari perbaikan dalam proses, sehingga tetap kompetitif terhadap pergerakan harga nikel dunia. Penurunan harga bahan bakar secara keseluruhan dan turunnya konsumsi bahan bakar HSFO dan batubara turut membantu kemampuan Perseroan dalam mengendalikan biaya di tahun 2019. Biaya bahan bakar ini mencapai 30% dari biaya produksi dalam beberapa tahun terakhir.

can be achieved before the expiry of the COW. The Company is also continuing its development plans for the Bahodopi Block, Central Sulawesi and the Pomalaa Block, Southeast Sulawesi. By the end of the reporting period, the company has entered the final stage of feasibility study for the two development projects and continued the negotiation with prospective strategic partners including the Chinese nickel processing company for the Bahodopi Block, and Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. for the Pomalaa Block. The next step is to get final investment decision for both projects, to obtain all required permits and start the financing process for these projects.

The Company's future business prospects are also dictated by the volatility of nickel prices on the world market, as well as its ability to control factors that affect production costs including fuel consumption. The Company follows a risk control approach to reduce potential losses due to volatility in nickel and fuel prices. Simultaneously, the Company also follows efficiency programs to reduce production costs to the lowest possible level, so that it remains competitive regardless of world nickel price movements. The decline in overall fuel prices and the decline in fuel consumption of HSFO and coal, helped the Company control costs in 2019. The fuel costs has reached 30% of production costs in recent years.





Aktivitas Eksplorasi dan Cadangan Bijih Nikel

Exploration Activities and Nickel Ore Reserves

Prospek usaha dan kelangsungan usaha Perseroan juga dipengaruhi ketersediaan cadangan bijih nikel. Untuk meningkatkan cadangan bijih nikel, Perseroan melakukan kegiatan eksplorasi. Pada tahun 2019 Perseroan mengeluarkan AS\$8,5 juta untuk membiayai kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan pada wilayah KK. Kegiatan eksplorasi dilakukan oleh PT Vale bersama dengan pihak ketiga (kontraktor pengeboran) dan direncanakan untuk mendapat profil laterit yang lengkap.

Kegiatan eksplorasi yang telah dijalankan meliputi:

- Blok Sorowako melakukan pengeboran jarak 25m dan 50m di Sorowako Blok Barat
- Blok Sorowako Outer Area melakukan pengeboran jarak 200m di bukit timur Petea, bukit Lampesue utara dan bukit Gaharu Larona
- Blok Bahodopi melakukan pengeboran dengan jarak 100m di Blok 2, serta jarak 50m dan 25m di blok 3
- Blok Pomalaa melakukan pengeboran dengan jarak 200m di beberapa area yang masih dinilai prospek
- Metode pengeboran yang digunakan adalah metode pengeboran *core drilling HQ-3* untuk program eksplorasi
- Selain kegiatan pengeboran, kegiatan eksplorasi lain yang dilakukan adalah survei geofisika-geolistrik di blok Sorowako, Sorowako Outer Area dan Bahodopi untuk mendapat profil laterit yang lebih lengkap

Dari kegiatan eksplorasi yang telah dijalankan, total cadangan bijih nikel yang dimiliki Perseroan hingga akhir tahun 2019 mencapai 107,6 juta ton DKP.

The Company's business prospects and business continuity are also influenced by the availability of nickel ore reserves. To increase nickel ore reserves, the Company carries out exploration activities. In 2019 the Company spent US\$8.5 million to finance exploration activities in the COW areas. Exploration activities was carried out by PT Vale, together with third parties (drilling contractors), to obtain a complete laterite profile.

Exploration activities carried out included:

- The Sorowako Block drilling 25m and 50m in West Block Sorowako
- The Sorowako Outer Area Block drilling 200m in Petea east hill, Lampesue north hill and Gaharu Larona hill.
- The Bahodopi Block drilling 100m in Block 2, and 50m and 25m in block 3
- The Pomalaa Block drilling 200m in a number of areas where prospects are still being assessed
- The exploration drilling program uses the HQ-3 core drilling method
- In addition to drilling, to obtain a more complete profile of laterite other exploration through geophysical-geolectric surveys were carried out in the Sorowako block, Sorowako Outer Area and Bahodopi

The result of this exploration showed that the total nickel ore reserves owned by the Company at the end of 2019 stood at 107.6 million tons of DKP.



Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan

Material Information and Facts After The Date of The Audited Report

Tidak ada informasi maupun fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan yang memengaruhi kinerja keuangan dan risiko bisnis Perseroan.

There were no important events that occurred after the date of audited report that could affect the Company's future financial performance and business risks.





Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

Strategi Pemasaran dan Capaian Strategi Pasar

Marketing Strategy and Achievements

Nikel matte dipasarkan secara khusus kepada VCL dan SMM sebagai pembeli, melalui mekanisme perjanjian penjualan jangka panjang. VCL dan SMM juga merupakan pemegang saham Perseroan, namun penetapan harga jual nikel matte tetap mengacu harga nikel pada LME. Penjualan nikel matte dilakukan dalam denominasi dolar AS, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Dengan perjanjian jangka panjang dan pembeli tetap, Perseroan tidak memerlukan strategi pemasaran termasuk promosi. Sampai dengan akhir tahun 2019 Perseroan tidak mengeluarkan biaya pemasaran. Secara berkala Perseroan bersama VCL dan SMM melakukan evaluasi atas perjanjian penjualan, sehingga diperoleh kesepakatan saling menguntungkan.

Pada bulan November 2019, PT Vale menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjualan dengan VCL dan SMM dengan tujuan memastikan keberlanjutan kepatuhan berdasarkan prinsip *arm's length*. Perjanjian ini termasuk peninjauan kembali ketentuan harga yang berlaku, memperbarui dan menggabungkan praktik terbaik yang ada, dan untuk mencerminkan keadaan komersial saat ini terkait perjanjian wajib beli logam dasar yang berorientasi jangka panjang. Perjanjian tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan persetujuan ini, mulai 1 Januari 2020, Perusahaan akan mulai menerapkan ketentuan baru berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjualan.

Nickel matte is marketed solely to VCL and SMM as buyers, through a long-term sales agreement mechanism. VCL and SMM are also shareholders of the Company, and the selling price of nickel matte refers to the price of nickel on the LME. Nickel matte sales is denominated in US dollars, which is the Company's functional currency.

With a long-term agreement and regular buyers, the Company does not require marketing strategies including promotion. In 2019 the Company did not incur any marketing costs. Periodically the Company, together with VCL and SMM, evaluates the sales agreements to ensure that mutually beneficial agreements are reached.

In November 2019, PT Vale signed the Amended and Restated Sales Agreements with VCL and SMM, with the underlying objective to ensure on-going compliance with the arm's length principle, including to revisit the existing pricing terms, to update and incorporate current best practices, and to reflect the current commercial realities for long-term base metals offtake agreements, on a going forward basis. The agreements were approved by the Ministry of EMR on December 31, 2019. With this approval, the Company will start to implement the new terms under the Amended and Restated Sales Agreements in January 1, 2020.



Pangsa Pasar

Market Share

Total volume produksi nikel dalam matte tahun 2019 sebanyak 71.025 ton. Jumlah tersebut mencapai 16% dari total pasokan nikel Indonesia ke pasar dunia sebanyak kurang lebih 450 ribu ton dan 3% dari total permintaan nikel dunia sekitar 2,3 juta ton [2].

Total production of nickel in matte in 2019 was 71,025 tons, 16% of Indonesia's total nickel supply of 450 thousand tons, and 3% of the total world nickel demand of 2.3 million tons [2].

PANGSA PASAR NIKEL MATTE PT VALE TAHUN 2019

PT Vale Nickel Matte Market Share 2019

Produksi PT Vale (Ton) PT Vale Production (Tons)	Produksi Nasional (Ton) National Production (Tons)	%
71,025	450 ribu	16%

Produksi PT Vale (Ton) PT Vale Production (Tons)	Produksi Global (Ton) Global Production (Tons)	%
71,025	2,3 juta	3%

Seluruh nikel matte dikirim kepada pembeli dari Pelabuhan Balantang, Sulawesi Selatan menuju Jepang. Pengiriman dilakukan 2-3 kali setiap bulan. Nikel matte dikirim dalam kemasan karung berukuran 3,3 ton menggunakan kapal milik Vale maupun kapal sewa.

All nickel matte is sent from Balantang Port, South Sulawesi to Japan. There are 2-3 shipments every month. Nickel matte is shipped in 3.3 ton bags using both Vale's and chartered vessels.



Uraian Mengenai Dividen

Description of Dividend

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan prospektus saham dan diputuskan berdasarkan ketersediaan kas setelah memperhitungkan kebutuhan modal kerja, pembayaran pinjaman beserta bunganya, program-program investasi modal serta mempertimbangkan laba ditahan Perseroan.

The Company's dividend policy is in accordance with the share prospectus and is decided based on the availability of cash after taking into account working capital requirements, loan and interest repayments, capital investment programs and after considering the Company's retained earnings.

Dalam KK yang telah diamendemen, Perseroan diperbolehkan mengumumkan dan membayarkan dividen kepada para pemegang saham dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan

In the COW amendment, the Company is permitted to announce and pay dividend to the shareholders in US dollars and other foreign currencies. In accordance with this

[2] Wood Mackenzie, Commodity Market Report, Global nickel short-term outlook January 2020.



mata uang asing lainnya. Sesuai ketentuan tersebut, dividen untuk pemegang saham asal Indonesia dibayarkan dalam mata uang rupiah, yang setara dengan nilai tukar per dolar Amerika Serikat. Dividen kepada pemegang saham asing dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

regulation, the dividend are paid to Indonesian shareholders in rupiah based on the US dollar exchange rate, and to foreign shareholders in US dollars.

DISTRIBUSI DIVIDEN PERSEROAN LIMA TAHUN TERAKHIR

Company's Dividend Distribution For Past Five Years

No	Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
1	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (Dalam AS\$ Juta) Profit/(Loss) For The Year (Million US\$)	57.4	60.5	(15.3)	1.9	50.5
2	Dividen Per Saham (AS\$) Dividend Per Share (US\$)					
	Interim	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
	Final	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
	Total	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
3	Rasio Pembayaran Payout Ratio	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	0%

Keterangan | Note

N/A* : Tidak ada dividen yang dideklarasikan dan dibayar | There were no dividend declared and paid.

TANGGAL PEMBAYARAN DIVIDEN PERSEROAN LIMA TAHUN TERAKHIR

Company's Dividend Paid For Past Five Years

Tahun Year	Dividen Dividend	Tanggal Penetapan Declaration Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah Dividen Total Dividend	
				AS\$/Saham US\$/Share	IDR/Saham IDR/Share
2019	N/A*	N/A*	N/A*	0	0
2018	N/A*	N/A*	N/A*	0	0
2017	N/A*	N/A*	N/A*	0	0
2016	N/A*	N/A*	N/A*	0	0
2015	N/A*	N/A*	N/A*	0	0

Keterangan | Note

N/A* : Tidak ada dividen yang dideklarasikan dan dibayar | There were no dividend declared and paid.



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Use of Initial Public Offering Proceeds Realization

Seluruh hasil dari Penawaran Umum Perdana ("IPO") tahun 1990, telah diserahkan kepada VCL. Hal ini sejalan dengan tujuan IPO, yakni melakukan divestasi kepemilikan saham Perseroan dari VCL kepada publik.

Pada tanggal 19 Juni 2020, PT Vale diberitahu oleh para pemegang sahamnya, VCL dan SMM bahwa mereka telah menandatangani perjanjian-perjanjian definitif untuk penjualan 20% saham di PT Vale kepada MIND ID.

Penandatanganan Perjanjian-perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Pendahuluan yang sebelumnya ditandatangani pada 11 Oktober 2019. Berdasarkan KK, divestasi merupakan salah satu syarat untuk keberlanjutan operasi PT Vale setelah 2025.

All proceeds from the 1990 Initial Public Offering ("IPO") have been transferred to VCL. This is in line with the IPO's objective to divest the Company's share ownership from VCL to the public.

On June 19, 2020 PT Vale was informed that its shareholders, VCL and SMM have signed the definitive agreements for the sale of a 20% stake in PT Vale to MIND ID.

The signing of the Agreements is a continuation of the Heads of Agreement which was previously signed on 11 October 2019. Based on the COW, divestment is one of the requirements for PT Vale's continuity of operations beyond 2025.



Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang dan Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan

Material Information Related to Investments, Expansions, Mergers, Acquisitions, Debt Restructuring, and Conflict of Interest Transactions

Sebagai pelaksanaan kesepakatan dalam Amendemen KK pada 2014 antara Perseroan dengan Pemerintah Indonesia, maka Perseroan telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pendahuluan untuk pengalihan 20% saham Perseroan kepada MIND ID. Pengalihan saham tersebut merupakan divestasi tahap kedua sebesar 20% saham Perseroan, sesuai Peraturan Pemerintah ("PP") Nomor 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tidak ada benturan kepentingan dalam pelaksanaan divestasi tersebut.

As part of the agreement in the 2014 COW amendment, between the Company and the Government of Indonesia, the Company signed a Heads of Agreement to divest 20% of the Company's shares to MIND ID. This would be the second phase of divestment of 20% of the Company's shares, in accordance with Government Regulation ("PP") Number 77 of 2014 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. There is no conflict of interest in the implementation of this divestment.





Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Amendments to Laws and Regulations With A Significant Effect On the Company

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2019 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSEROAN

Amendments To Laws and Regulations With A Significant Effect On the Company

No	Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pengaruh Terhadap Perseroan	Impact to the Company
1.	<p>PP Nomor 1 Tahun 2019. Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam</p> <p>Government Regulation No. 1 of 2019 on Export Proceeds from Natural Resources Development, Management and/or Processing Activities</p>	<p>Sebagai implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Peraturan Pemerintah, pada tanggal 10 Januari 2019, Pemerintah mengeluarkan Regulasi No. 1 tahun 2019 tentang Penerimaan Ekspor dari Pengembangan Sumber Daya Alam, Kegiatan Pengelolaan dan/atau Pemrosesan, sebagaimana yang selanjutnya diimplementasikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 21/3/PBI/2019 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1523/2019. Peraturan ini mengatur pengaturan untuk penyimpanan dan penggunaan hasil dari ekspor sumber daya alam dari Indonesia. Berdasarkan peraturan di atas, hasil ekspor Perusahaan sekarang harus diletakkan onshore dalam akun tertentu yang dikelola oleh bank devisa di Indonesia dan hanya dapat dikirim ke luar negeri untuk tujuan tertentu. Mempertimbangkan peraturan baru ini berdampak pada perjanjian fasilitas antara Perusahaan dan Mizuho Bank, Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd untuk proyek Karebbe, yang berakhir pada Agustus 2019, Perusahaan melakukan pelunasan awal atas fasilitas tersebut.</p>	<p>As an implementation of the Government's 16th Economic Policy Package, on January 10, 2019, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2019 on Export Proceeds from Natural Resources Development, Management and/or Processing Activities, as further implemented under Bank of Indonesia Regulation No. 21/3/PBI/2019 and Minister of Finance Decree No. 1523/2019. This regulation sets out the arrangements for the deposit and use of proceeds from the export of natural resources from Indonesia. Based on the above regulations, the Company's export proceeds must now be parked onshore within a specific account maintained with a foreign exchange bank in Indonesia and can only be sent offshore for specific purposes. Considering that this new regulation impacted the facility agreement between the Company and Mizuho Bank, Ltd and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd for the Karebbe project, which expired in August 2019, the Company made early repayment of the facility.</p>
2.	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/3/PBI/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam</p> <p>Bank of Indonesia Regulation No. 21/3/PBI/2019 on Export Proceeds from Natural Resources Development, Management and/or Processing Activities</p>		
3.	<p>Keputusan Menteri Keuangan No. 1523 Tahun 2019</p> <p>Minister of Finance Decree No. 1523 Year 2019</p>		
4.	<p>Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 11/2019")</p> <p>Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2019 on the Second Amendment to MEMR Regulation No. 25 of 2018 on Mining Activities of Mineral and Coal ("MEMR Regulation 11/2019")</p>	<p>Peraturan Menteri ESDM 11/2019 dikeluarkan untuk mempercepat larangan ekspor bijih nikel dengan konten di bawah 1,7% hingga 1 Januari 2020. Berdasarkan peraturan sebelumnya, perusahaan pertambangan diizinkan untuk mengekspor bijih nikel dengan konten di bawah 1,7% hingga 11 Januari 2022, tergantung pada kemajuan konstruksi <i>smelter</i> perusahaan di Indonesia.</p> <p>Walaupun tidak ada dampak langsung terhadap Perseroan (karena Perseroan tidak melakukan aktivitas ekspor bijih), akselerasi pelarangan ekspor bijih dapat berdampak positif terhadap harga nikel global, yang akan memberikan dampak positif bagi Perseroan.</p>	<p>Ministry of EMR Regulation 11/2019 was issued to accelerate the ban on export of nickel ore with content below 1.7% to 1 January 2020. Under the previous regulation, mining companies were allowed to export nickel ore with content below 1.7% until 11 January 2022, subject to the progress of the company's smelter construction in Indonesia.</p> <p>While there is no direct impact to the Company (as the Company does not conduct any ore export activities), the ore export ban acceleration might positively impact the global nickel price, which would give positive impact to the Company.</p>



5.	<p>Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 ("Keputusan 154")</p> <p>Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 154 K/30/MEM/2019 ("Decree 154")</p>	<p>Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri ESDM 11/2019, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan 154, yang menjabarkan lebih jauh mengenai bagaimana Kementerian ESDM akan memberi sanksi kepada perusahaan yang gagal membangun, atau mengadakan pembangunan dari smelter di Indonesia dalam jangka waktu yang disetujui.</p> <p>Sekali lagi, sementara tidak ada dampak langsung terhadap Perseroan, percepatan pelarangan ekspor bijih dan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan smelter di Indonesia dapat berdampak positif terhadap harga nikel global, yang akan memberikan dampak positif bagi Perseroan.</p>	<p>As an implementation of Ministry of EMR Regulation 11/2019, the Ministry of EMR issued Decree 154, which sets out further details of how the Ministry of EMR will seek to sanction companies that fail to construct, or procure the construction of, smelters in Indonesia within the approved timeline.</p> <p>Again, while there is no direct impact to the Company, the ore export ban acceleration and the government's seriousness in implementing smelter construction in Indonesia might positively impact the global nickel price, which would give positive impact to the Company.</p>
6.	<p>Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("Perpres 63/2019")</p> <p>Presidential Regulation No. 63 of 2019 on the Use of Indonesian Language ("Presidential Regulation 63/2019")</p>	<p>Sepuluh tahun setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang dan Semangat Nasional, Presiden mengeluarkan PP 93 sebagai peraturan pelaksana. PP 63 merinci sejauh mana keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia, seperti dalam kontrak dan nota kesepahaman. Perseroan perlu mematuhi persyaratan ini berdasarkan PP 63.</p>	<p>Ten years after the issuance of Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and National Anthem, the President issued Presidential Regulation 93 as the implementing regulation. Presidential Regulation 63 details the extent of the necessity to use Indonesian language, such as in contracts and memoranda of understanding. The Company will need to comply with the requirements under this Presidential Regulation 63.</p>



Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes In Accounting Policies

Standar Baru, Revisi Dan Interpretasi Yang Berlaku Efektif Pada 1 Januari 2019

New Standards, Revisions And Interpretation That Became Effective On January 1, 2019

PSAK dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- PSAK 22 (Penyesuaian 2018) - Kombinasi Bisnis
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018) - Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018) - Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018) - Pengendalian Bersama
- Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja - Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program

The following new/revised PSAK and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") have been issued and are effective starting on or after January 1, 2019:

- ISAK 33 - Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
- ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments
- PSAK 22 (2018 Annual Improvement) - Business Combination
- PSAK 26 (2018 Annual Improvement) - Borrowing Costs
- PSAK 46 (2018 Annual Improvement) - Income Taxes
- PSAK 66 (2018 Annual Improvement) - Joint Arrangements
- Amendments to PSAK 24: Employee Benefits - Plan Amendment, Curtailment or Settlement



Grup menerapkan secara dini standar-standar baru yang hanya diwajibkan sejak 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK 71 - Instrumen Keuangan
- PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 – Sewa

Standar, revisi dan interpretasi baru yang diadopsi Grup sejak 1 Januari 2019 tidak berdampak material kepada laporan keuangan konsolidasian Grup, kecuali yang dijelaskan di bawah ini:

The Group early adopted new standards which are only mandatory starting January 1, 2020 as follows:

- PSAK 71 - Financial Instruments
- PSAK 72 - Revenue from Contracts with Customers
- PSAK 73 - Leases

The new standards, amendments and interpretations adopted by the Group starting January 1, 2019 have no material impact on the Group's consolidated financial statements, except those discussed below:

PSAK 71 - Instrumen Keuangan | PSAK 71 - Financial Instruments

Standar ini membahas klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan, model penurunan nilai yang baru dan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai. Klasifikasi dan model penurunan nilai yang baru berdasarkan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap pengukuran dan provisi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya diakui Perseroan berdasarkan PSAK 55 - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang berdasarkan PSAK 55. Aset keuangan tersebut memenuhi kriteria PSAK 71 untuk klasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, karena instrumen keuangan ini dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan kas, yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk model penurunan nilai, Grup telah menghitung kerugian kredit yang diperkirakan dari aset keuangan dan menentukan bahwa jumlahnya tidak material.

This standard addresses the classification and measurement of financial assets and liabilities, new impairment model and new rules for hedge accounting. The new classification and new impairment model under PSAK 71 have an immaterial impact to the measurement and the provision for impairment of financial assets previously recognised based on PSAK 55 - Financial Instruments: Recognition and measurement.

As at December 31, 2019 and 2018, the Group only had financial assets classified as loans and receivables under PSAK 55. Those financial assets meet the PSAK 71 criteria for classification at amortized cost, because these financial instruments are held within a business model whose objective is to collect the cash flows, which represent solely payments of principal and interest. For the impairment model, the Group has calculated expected credit losses on financial assets and determined that the amount is not material.

PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan | PSAK 72 - Revenue from Contracts with Customers

Standar ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan apakah, berapa banyak dan kapan pendapatan diakui. Standar ini menggantikan PSAK 23 - Pendapatan dan PSAK 34 - Kontrak Konstruksi.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak pada pendapatan yang sebelumnya diakui dalam PSAK 23 karena Grup hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan dan waktu pengakuan pendapatan berada pada titik yang sama.

This standard establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognised. It replaces PSAK 23 - Revenue and PSAK 34 - Construction Contracts.

The adoption of PSAK 72 results in no impact on revenue that was previously recognised under PSAK 23 as the Group has only a single performance obligation and the timing of revenue recognition is at the same point in time.

Berdasarkan PSAK 73, perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan dihapus. Standar ini mensyaratkan penggunaan aset hak-guna dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Ada pengecualian pengakuan untuk sewa jangka pendek dan sewa barang bernilai rendah.

Grup menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan cara praktis. Pada saat transisi, liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan pada tingkat bunga pinjaman incremental Grup pada tanggal 1 Januari 2019. Aset hak-guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan pembayaran sewa di muka atau pembayaran terutang. Tidak ada penyesuaian terhadap laba ditahan Grup karena Grup memilih untuk mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa. Lihat Catatan 11 untuk informasi mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Under PSAK 73, the distinction between operating and finance leases is removed. The standard requires the right-of-use of the leased asset and a financial liability to pay rentals to be recognised. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items.

The Group applies PSAK 73 using the simplified approach. At transition period, lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as at January 1, 2019. Right-of-use assets were measured at an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments. There was no adjustment to the Group's retained earnings as the Group elected to measure the right-of-use assets at an amount equal to the lease liability. Refer to Note 11 for the information regarding impact of PSAK 73 adoption to the Group's consolidated financial statements.



Standar Baru, Revisi dan Interpretasi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Efektif

New Standards, Revisions And Interpretation That Became Effective
On January 1, 2019

Beberapa PSAK dan ISAK baru/revisi telah diterbitkan tetapi belum efektif pada 1 Januari 2019, dan tidak diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini:

- ISAK 35 – Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) – Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen to PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf

Standar baru, Amendemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, kecuali PSAK 112 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

Saat dikeluarkannya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak dari adopsi di masa yang akan datang dari standar terkait, pada posisi keuangan dan hasil operasional konsolidasian Grup.

Several new/revised SFASs and ISAKs have been issued but were not yet effective as of January 1, 2019 and have not been applied in preparing these financial statements:

- ISAK 35 – Presentation of Financial Statements for Non-profit Oriented Entities
- PSAK 1 (2019 Annual Improvement) – Presentation of Financial Statements
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements
- Amendments to PSAK 15: Investments in Associates and Joint Ventures
- Amendments to PSAK 62: Insurance Contracts
- PSAK 112: Accounting for Endowments

The above new standards amendments, annual improvements, and interpretations will be effecting starting January 1, 2020, except for PSAK 112 which will only be effective starting January 1, 2021.

As of the issuance of these consolidated financial statements, management is evaluating the impact the future adoption of these standards may have on the Group's consolidated financial position and operating results.





LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate
Governance Report

Perseroan menyelaraskan perkembangan usaha dengan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau “GCG”) untuk mendukung praktik keberlanjutan Perseroan.

The Company aligns its business development with good corporate governance (“GCG”) improvements to support its sustainability practices.



Peningkatan Praktik GCG Berkesinambungan dan Pembaruan GCG Tahun 2019

Continuous Improvement of GCG Practice and 2019 GCG Update

Bagi Perseroan, penerapan praktik GCG yang berkelanjutan lebih dari sekadar memenuhi perundang-undangan, peraturan, dan standar, baik nasional maupun internasional. Penerapan praktik GCG yang berkelanjutan dimaksudkan untuk mendukung upaya mencapai visi dan misi Perseroan, memaksimalkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham, serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan yang lain.

For the Company, sustainable GCG practice implementation goes beyond compliance with the laws and regulations, as well as nationally and internationally accepted standards. A sustainable GCG practice implementation is aimed at supporting the Company in achieving its vision and mission, maximizing long-term value for the shareholders, and providing benefits and prosperity for its other stakeholders.

Salah satu jejak langkah penting dalam penerapan praktik-praktik GCG berkelanjutan adalah pelaksanaan divestasi tahap kedua sebesar 20% saham Perseroan, sesuai amendemen KK pada tahun 2014. Kewajiban divestasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

One important step taken in its sustainable GCG practices was the second phase divestment of 20% the Company's shares, in accordance with the COW amendment in 2014. The divestment obligation is regulated in Government Regulation Number 77 of 2014 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Activities.

Perseroan bersama pemegang saham, VCL dan SMM, pada 11 Oktober 2019 telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan pengalihan 20% saham divestasi Perseroan dengan MIND ID. Penandatanganan tersebut merupakan langkah awal kerjasama strategis antara Perseroan dengan MIND ID. Selanjutnya, Perjanjian Pendahuluan akan dilanjutkan dengan beberapa perjanjian definitif utama.

The Company and its shareholders, VCL and SMM, signed a Heads of Agreement on October 11, 2019 to divest transfer 20% of its shares with MIND ID. This signing sees the start of a strategic cooperation between the Company and MIND ID. Later, the Heads of Agreement will be followed up with several definitive agreements.



Kesungguhan Perseroan meningkatkan penerapan GCG telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari beberapa pihak, antara lain:

1. Penghargaan Emiten Terbaik dalam Pelaksanaan GCG berdasarkan Instrumen Penilaian Asean CG Scorecard ("**ACGS**"), kategori *Most Improved* Kelas Emiten Kapitalisasi Besar (*Big Cap*) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship ("**IICD**");
2. Top 50 of the Biggest Market Capitalization Public Listed Companies dari IICD;
3. Platinum Asia Sustainability Reporting Rating dari National Center for Sustainability Reporting;
4. Global Corporate Sustainability Awards ("GCSA") 2019 Kategori Sustainability Reporting dari Taiwan Institute for Sustainability Energy;
5. Gold Award Report pada 2019 Australasian Reporting Award dari Australasian Reporting Award ("ARA"); dan
6. Peringkat ketiga dalam Indonesia Green Company Award dari Majalah SWA dan Yayasan KEHATI.

The Company's seriousness in improving its GCG has been acknowledged and appreciated by numerous parties, including:

1. Best Issuer Award in GCG Implementation based on Asean CG Scorecard ("**ACGS**") Assessment Instrument, in the Most Improved Big Cap Issuer Class Category, from the Indonesian Institute for Corporate Directorship ("**IICD**");
2. Top 50 of the Biggest Market Capitalization Public Listed Companies from IICD;
3. Platinum Asia Sustainability Reporting Rating from the National Center for Sustainability Reporting;
4. Global Corporate Sustainability Awards ("GCSA") 2019 in the Sustainability Reporting Category from Taiwan Institute for Sustainability Energy;
5. Gold Award Report for 2019 Australasian Reporting Award from Australasian Reporting Award ("ARA"); and
6. Third Place in Indonesia Green Company Award from SWA Magazine and KEHATI Foundation.

Kebijakan GCG

GCG Policies

Kerangka GCG Perseroan disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Perseroan senantiasa meningkatkan praktik-praktik GCG dengan mengadopsi perubahan pada piagam, norma, aturan internal, prosedur pengoperasian baku, serta proses bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional.

The Company's GCG framework is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The Company continuously improves its GCG practices by adopting changes to the charters, norms, internal rules, standard operating procedures and business processes, based on prevailing laws and regulations as well as national and international best practices.

Kerangka GCG
GCG Framework

Anggaran Dasar Articles of Association	
Kode Etik dan Perilaku Code of Ethics and Conduct	
Norma Pengadaan Procurement Norm	
Piagam Dewan Komisaris dan Direksi Charters of the Board of Directors and the Board of Commissioners	
Piagam Komite Charter of the Committee	Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Charter of the Governance, Nomination and Remuneration Committee
	Piagam Komite Audit Charter of the Audit Committee
	Piagam Komite Mitigasi Risiko Charter of the Risk Mitigation Committee
Piagam Satuan Kerja Working Unit's Charter	Piagam Unit Audit Internal Charter of the Internal Audit Unit
	Piagam Sekretaris Perusahaan Charter of the Corporate Secretary
	Piagam Unit Manajemen Risiko Charter of the Risk Management Unit
Aturan Internal Internal Rules	Norma Delegasi Kewenangan Delegation of Authority Norm
	Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Process Policy
	Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Affiliated and Conflict of Interest Transactions Policy
	Kebijakan Perdagangan Efek Securities Trading Policy
Prosedur Pengoperasian Baku Standard Operating Procedures	Prosedur yang mengatur Proses dan Manajemen Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Meeting Process and Management
	Proses Permohonan Persetujuan Direksi Procedures to Request for the Board of Directors Approval

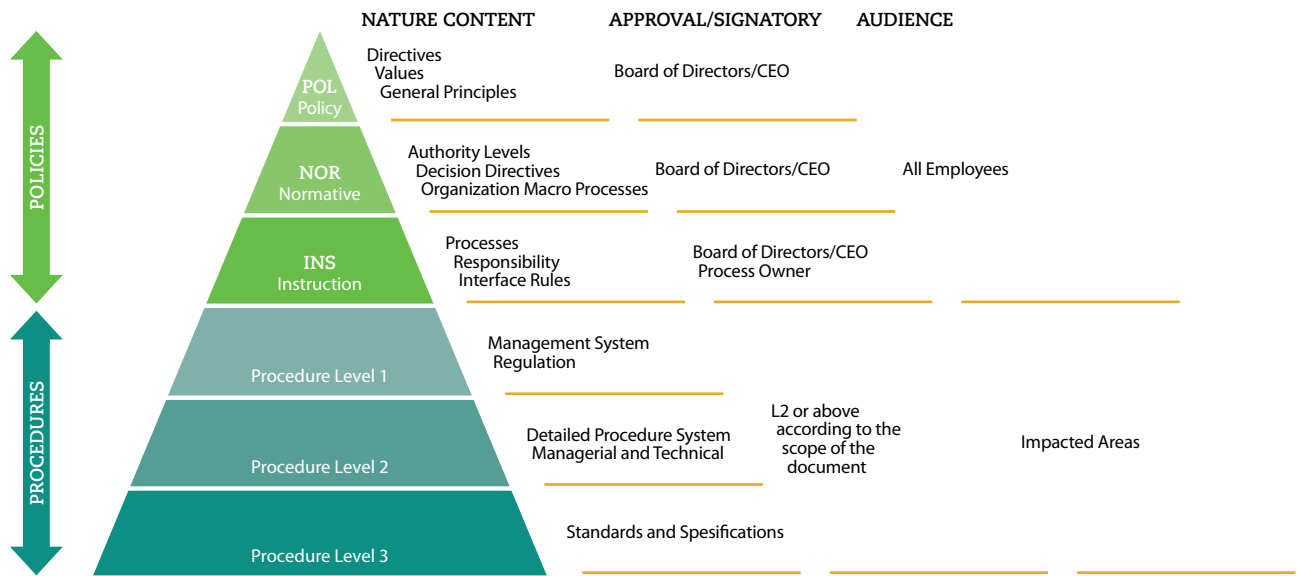
HIRARKI KEBIJAKAN TATA KELOLA

Governance Policy Hierarchy



HIRARKI KEBIJAKAN TATA KELOLA

Governance Policy Hierarchy



Kebijakan (POL) Policies (POL)	Menetapkan secara umum pedoman serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai Perseroan. Determines common guidelines as well as the Company's principles and values.
Norma (NOR) Norms (NOR)	Menentukan otoritas, ketentuan umum dan batasan kewenangan terkait proses pengambilan keputusan makro maupun hal-hal yang memiliki relevansi bagi Perseroan secara keseluruhan, termasuk melengkapi dan merinci kebijakan sebagaimana diperlukan. Defines authorities, general provisions and authority limits associated with macro decision-making processes, or matters that are relevant to Company as a whole, including completing and detailing the policies as deemed necessary.
Instruksi (INS) Instructions (INS)	Menjabarkan aturan bagi proses yang saling terkait (atau berhubungan satu dengan lainnya) dan tanggung jawab yang melibatkan unit-unit organisasi yang berbeda, sesuai dengan Kebijakan dan Norma. Terdapat kajian oleh Direksi dan ditandatangani oleh Presiden Direktur bersama Pemilik Proses yang bertanggung jawab untuk proses dan/atau aturan yang saling terkait sebagaimana dimuat dalam dokumen tersebut. Describes rules for interrelated processes (or interfaces between processes) and responsibilities that involve distinct organizational units, in accordance with Policies and Norms. The Board of Directors review is signed by the President Director, jointly with the Process Owner responsible for the interrelated processes and/or rules contained in the document.
Prosedur Procedures	Merujuk pada rincian suatu proses. Refers to the process details.

Sosialisasi Kebijakan GCG

GCG Policy Socialization

Sepanjang tahun 2019, Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan GCG untuk memberikan pemahaman tentang penerapan GCG kepada para pemangku kepentingan. Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka langsung maupun melalui jejaring intranet, situs Perseroan, dan publikasi internal Perseroan.

Kegiatan sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan tahun 2019:

- Pelatihan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2019 (Penyegaran);
- Sosialisasi Program *Anti-corruption* Perseroan kepada para pemangku kepentingan setempat di Sorowako;
- Peluncuran pelatihan penyegaran anti korupsi secara daring;
- *Action for Integrity*;
- *Global Safety*; dan
- *Reflection Day*.

In 2019, the Company socialized its GCG policies, to provide an understanding of GCG practices to the stakeholders. The socialization was conducted through direct face-to-face meetings and through intranet networks, the Company's website and the Company's internal publications.

Face-to-face socialization activities carried out in 2019 included:

- 2019 Corporate Governance Refreshment Training;
- Socialization of the Company's Anti-corruption Program to local stakeholders in Sorowako;
- Launching online anti corruption refreshment training;
- *Action for Integrity*;
- *Global Safety*; and
- *Reflection Day*.



Struktur Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance Structure

Perseroan adalah suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan memiliki struktur tata kelola yang terdiri atas tiga organ utama, yakni RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Setiap organ utama memiliki peran penting dalam penerapan GCG, sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

- Dewan Komisaris didukung Komite Audit, Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Mitigasi Risiko.
- Direksi didukung Unit Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Unit Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Divisi Etika dan Perilaku.

The Company is a limited liability company, established and organized in line with the 2007 Law No. 40 on Limited Liability Companies ("**UUPT**"). Pursuant to UUPT, the Company's governance structure comprises three main bodies, the GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors.

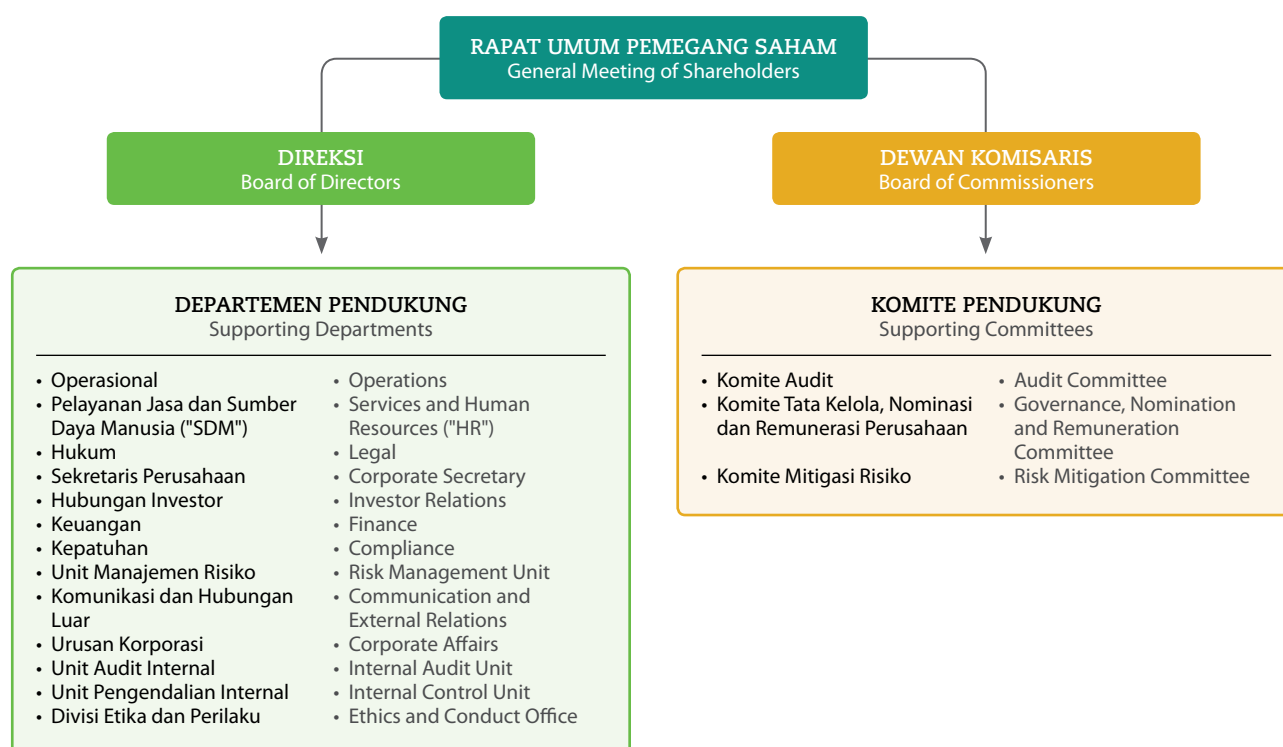
Each main body plays an important role in the GCG implementation, based on their respective functions, duties and responsibilities.

- The Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Governance, Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Mitigation Committee.
- The Board of Directors is supported by the Internal Audit Unit, Corporate Secretary, the Risk Management Unit, Compliance, and Ethics and Conduct Office.



STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN

Corporate Governance Structure



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

RUPS merupakan organ Perseroan dengan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi tata kelola, dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS merupakan forum utama bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak-haknya dan mengambil keputusan-keputusan penting terkait investasi mereka pada Perseroan, termasuk pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS harus diselenggarakan secara wajar dan transparan serta memperhatikan kepentingan jangka panjang Perseroan. Penyelenggaraan RUPS mengacu ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah oleh POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 ("**Peraturan OJK 32/2014**").

The GMS is the Company body with the highest authority in the governance organizational structure, with authorities not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners. The GMS is the main forum for shareholders to exercise their rights and make important decisions related to their investments in the Company, including the selection of Board of Commissioners and Board of Directors members.

The GMS must be conducted fairly and transparently while paying attention to the Company's long-term interest, pursuant to the provisions in OJK Regulation (POJK) Number 32/POJK.04/2014 concerning the Planning and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders, as amended by POJK Number 10/POJK.04/2017 concerning Amendment to POJK Number 32/POJK.04/2014 ("**OJK Reg 32/2014**").

Informasi Pemegang Saham

Shareholder Information

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Sampai pada tanggal 31 Desember 2019, pemegang saham mayoritas Perseroan dengan kepemilikan di atas 5% adalah:

- VCL dengan kepemilikan saham 58,73%;
- SMM dengan kepemilikan saham 20,09%; dan
- Publik dengan kepemilikan saham 20,49%.

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares in the Company. As at 31 December 2019, the Company's majority shareholders holding more than 5% shares were:

- VCL with 58.73% shares;
- SMM with 20.09% shares; and
- Public with 20.49% shares.

Hak Pemegang Saham

Shareholders Rights

Dalam penyelenggaraan RUPS, pemegang saham memiliki hak dasar yang sama, sebagaimana diatur UUPT, antara lain:

1. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham tercatat dalam daftar pemegang saham, satu hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Pemegang saham berhak memperoleh informasi terkait mata acara dan bahan terkait mata acara RUPS secara memadai dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
4. Pemegang saham berhak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Pemegang saham berhak untuk menyetujui penunjukan auditor eksternal yang direkomendasikan oleh Komite Audit.
6. Pemegang saham berhak untuk menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

During the GMS, shareholders have equal basic rights, in accordance with UUPT, namely:

1. Shareholders, either personally or represented with a power of attorney, have the right to attend, express opinions and vote in the GMS.
2. Shareholders entitled to attend the GMS are those registered in the shareholder register one day prior to the GMS notice.
3. Shareholders have the right to be provided with the GMS agenda and related materials in an appropriate and timely manner for decision-making.
4. Shareholders have the right to appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Shareholders have the right to approve the appointment of external auditors recommended by the Audit Committee.
6. Shareholders have the right to receive part of the Company's profit in the form of dividend and other profit sharing.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Shareholders Responsibilities

Pelaksanaan hak-hak pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS juga diimbangi dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan setiap perubahan alamat pemegang saham; dan
2. mengambil setiap keputusan dengan itikad baik dan berdasarkan kepentingan jangka panjang Perseroan.

The shareholders' rights in connection with the GMS organization include:

1. to notify the Company in writing of any change in shareholders' addresses; and
2. making decisions in good faith and based on the Company's long-term interests.



Akses Informasi Bagi Pemegang Saham

Shareholders Access To Information

Perseroan menyediakan berbagai jalur akses informasi bagi para pemegang saham.

The Company provides various access to information for shareholders.

AKSES INFORMASI BAGI PEMEGANG SAHAM

Akses Informasi Bagi Pemegang Saham

Media Elektronik Electronic Media	Situs web: www.vale.com/indonesia PT Vale Investor Relation (aplikasi telepon genggam mobile phone application)	
Pertemuan dengan Investor Investor Meetings	<ul style="list-style-type: none"> • Paparan publik • Quarterly earning call dengan para analis • Non-deal roadshow • Konferensi dengan investor • Kunjungan investor ke lokasi operasi • Temu muka dengan para investor 	<ul style="list-style-type: none"> • Public expose • Quarterly earnings call with analysts • Non-deal roadshow • Investor conference • Investor site visit • Investor gathering
Media Sosial Social Media	<ul style="list-style-type: none"> • Facebook (ptvaleindonesia) • Youtube (bit.ly/PTValeIndonesia) • Twitter (@ptvaleid) • Instagram (ptvaleindonesia) 	
Lainnya Others	Pemberitaan dan publikasi, konferensi pers News and publications, press conference	

Penyelenggaraan RUPS

GMS Organization

Pada tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan dua kali RUPS, yakni:

In 2019, the Company held two GMS, namely:

No.	RUPS GMS	Hari/Tanggal Day/Date	Tempat Venue
1	RUPS Tahunan Annual GMS	Selasa, 2 April 2019 Tuesday, April 2, 2019	Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 57-58, Jakarta 12190
2	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	Jumat, 16 Agustus 2019 Friday, August 16, 2019	Financial Club, Lantai 27, Graha CIMB Niaga Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham melalui situs web BEI dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia serta bahasa asing (Inggris), 39 hari kalender sebelum penyelenggaraan RUPS Tahunan dan 37 hari kalender sebelum penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.

The Company's published the GMS announcement to the shareholder through the IDX website and the Company's website in Indonesian and English 39 calendar days prior to the Annual GMS and 37 calendar days prior to the Extraordinary GMS.

TAHAPAN DAN PROSES PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN 2019 DAN RUPS LUAR BIASA 2019

Stages and Processes of 2019 Annual GMS and Extraordinary GMS

RUPS Tahunan 2019 (2 April 2019) 2019 Annual GMS (April 2, 2019)	Tahapan Stages	RUPS Luar Biasa 2019 (16 Agustus 2019) 2019 Extraordinary GMS (August 16, 2019)
14 Februari 2019 February 14, 2019	Pemberitahuan Penyelenggaraan dan Mata Acara RUPS kepada OJK Notification of GMS and agenda of the GMS to OJK	3 Juli 2019 July 3, 2019
22 Februari 2019 February 22, 2019	Pengumuman RUPS melalui iklan yang dimuat di harian Bisnis Indonesia, Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan GMS announcement advertised in the daily newspaper Bisnis Indonesia, IDX Website and Company's Website	10 Juli 2019 July 10, 2019
11 Maret 2019 March 11, 2019	Pemanggilan RUPS melalui iklan yang dimuat di harian Bisnis Indonesia, Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan GMS notice advertised in the daily newspaper Bisnis Indonesia, IDX Website and Company's Website	25 Juli 2019 July 25, 2019
	Uraian Mata Acara RUPS disampaikan bersama pemanggilan RUPS melalui iklan yang dimuat di harian Bisnis Indonesia, Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan GMS Agenda Description included in the GMS notice and advertised in the daily newspaper Bisnis Indonesia, IDX Website and Company's Website	
	Form Surat Kuasa tersedia di Situs Web Perseroan Proxy Form available in the Company's Website	
	Tata Tertib RUPS tersedia di Situs Web Perseroan Procedures of GMS available in the Company's Website	
2 April 2019 April 2, 2019	Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada BEI dan OJK serta tersedia di Situs Web Perseroan Summary of Minutes of GMS provided to IDX and OJK, and available in the Company's Website	16 Agustus 2019 August 16, 2019
	Daftar Hadir RUPS disampaikan kepada BEI dan OJK serta tersedia di Situs Web Perseroan GMS Attendance List provided to IDX and OJK, and available in the Company's Website	
4 April 2019 April 4, 2019	Laporan Hasil RUPS melalui iklan yang dimuat di harian Bisnis Indonesia, Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan GMS Report advertised in the daily newspaper Bisnis Indonesia, IDX Website and Company's Website	19 Agustus 2019 August 19, 2019
29 April 2019 April 29, 2019	Akta Berita Acara RUPS disampaikan kepada BEI dan OJK serta tersedia di Situs Web Perseroan Deed of Minutes of the GMS provided to IDX and OJK, and available in the Company's Website	20 September 2019 September 20, 2019





Pelaksanaan RUPS mengacu kepada Tata Tertib RUPS, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. RUPS Tahunan 2019 dan RUPS Luar Biasa 2019 dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
2. Setelah menyampaikan penjelasan dari setiap mata acara RUPS, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib yang telah dibagikan dan dibacakan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah. Pimpinan Rapat atau Direktur yang ditunjuk pimpinan rapat menjawab atau menanggapi pertanyaan/pendapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir.
3. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, maka dilakukan pemungutan suara dan setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.

The GMS were held in line with the GMS Procedures, the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, including:

1. 2019 Annual GMS and Extraordinary GMS presided over by the Company's Vice President Commissioner.
2. Following discussions on each GMS agenda, the shareholders/authorized proxy were given the opportunity to raise questions and/or opinions in accordance with the procedures, distributed and read to the shareholders/authorized proxy. The Chairman or appointed Director responded to their questions/responses.
3. After all questions/responses were answered, voting was conducted with each shareholder entitled to cast one vote for one vote held.

Ketentuan Kuorum

Quorum Provisions

Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa RUPS hanya sah dan dapat diadakan apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau wakilnya, lebih dari ½ (setengah) dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

RUPS Tahunan 2019 untuk tahun buku 2018 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang seluruhnya mewakili 8.538.717.273 saham atau 85,93% dari 9.936.338.720 total saham. Sedangkan RUPS Luar Biasa 2019 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang seluruhnya mewakili 8.483.484.792 saham atau 85,38% dari 9.936.338.720 total saham.

Dengan demikian, RUPS Tahunan 2019 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 telah memenuhi kuorum yang diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2019 sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat bagi para pemegang saham Perseroan untuk setiap mata acara RUPS.

The Company's Articles of Association stipulates that the GMS is only valid and may be held if their attendance of the shareholders or their representatives make up more than ½ (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.

The 2019 Annual GMS for the 2018 fiscal year was attended by shareholders/authorized proxies holding 8,538,717,273 shares, or 85.93% of the 9,936,338,720 shares. The 2019 Extraordinary GMS was attended by shareholders/authorized proxies holding 8,483,484,792 shares, or 85.38% of the 9,936,338,720 shares.

Accordingly, the 2019 Annual GMS and Extraordinary GMS fulfilled the quorum governed by the Company's Articles of Association. The 2019 Annual GMS and Extraordinary GMS were valid and could take valid decisions, binding on the Company's shareholders for each GMS agenda item.

Proses Penghitungan Suara

Vote Counting Process

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara dalam RUPS Tahunan 2019 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 diatur dalam Tata Tertib RUPS yang dibagikan kepada para pemegang saham dan dibacakan sebelum RUPS dimulai. Informasi mengenai Tata Tertib RUPS juga dipublikasikan dalam situs web Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS.

Pada RUPS Tahunan 2019, Perseroan menunjuk administrasi internal Perseroan dan pihak independen yakni Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Sedangkan pada RUPS Luar Biasa 2019, Perseroan menunjuk pihak-pihak independen yakni PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek dan Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.

The 2019 Annual GMS and Extraordinary GMS vote counting and voting procedures were regulated by the GMS Procedures, as distributed to shareholders and read before the GMS began. The GMS Procedures were also published on the date of GMS notice.

For the 2019 Annual GMS, the Company appointed the Company's internal share administrator and an independent party, Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. to carry out the voting count and/or validation. While for the 2019 Extraordinary GMS, the Company appointed independent parties, PT Bima Registra as Shares Administration Bureau and Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., to carry out the voting count and/or validation.



Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal

Attendance of The Board of Commissioners, The Board of Directors, Capital Market Supporting Institutions and Professions

RUPS Tahunan 2019 dan RUPS Luar Biasa 2019 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat rapat diselenggarakan. Rapat juga dihadiri oleh Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal.

The 2019 Annual GMS and Extraordinary GMS were attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were in office on the day of the meeting were convened. The meetings were also attended by the Capital Market Supporting Institutions & Professions.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RUPS TAHUNAN 2019 DAN RUPS LUAR BIASA 2019.

The Board of Commissioners' Attendance in the 2019 Annual GMS and 2019 Extraordinary GMS.

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam RUPS Tahunan 2019 Attendance at the 2019 Annual GMS	Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa 2019 Attendance at the 2019 Extraordinary GMS
Eduardo Bartolomeo**	Presiden Komisaris President Commissioner	-	-
Mark James Travers**	Presiden Komisaris President Commissioner	N/A	N/A
Mark James Travers	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner	√	√
Mahendra Siregar***	Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Vice President Commissioner and Independent Commissioner	N/A	N/A
Robert Alan Morris*	Komisaris Commissioner	-	N/A
Luiz Fernando Landeiro*	Komisaris Commissioner	N/A	√
Cory McPhee**	Komisaris Commissioner	N/A	N/A
Nobuhiro Matsumoto	Komisaris Commissioner	√	√
Raden Sukhyar	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√
Mahendra Siregar	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-

Keterangan | Note:

√ Hadir | Present

- Tidak Hadir | Absent

N/A Belum menjabat atau sudah tidak lagi menjabat | Not yet appointed or no longer in office.

* RUPS Tahunan 2019 menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Robert Alan Morris sebagai Komisaris dan pengangkatan Bapak Luiz Fernando Landeiro sebagai Komisaris.

2019 Annual GMS accepted and approved the resignation of Robert Alan Morris as Commissioner and appointed Luiz Fernando Landeiro as Commissioner.

** RUPS Luar Biasa 2019 menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Eduardo Bartolomeo sebagai Presiden Komisaris serta mengangkat Bapak Mark James Travers, Bapak Mahendra Siregar dan Bapak Cory McPhee, masing-masing sebagai Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris.

2019 Extraordinary GMS accepted and approved the resignation of Eduardo Bartolomeo as President Commissioner and appointed Mark James Travers, Mahendra Siregar and Cory McPhee, each as President Commissioner, Vice President Commissioner and Commissioner.

*** Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 4 November 2019, sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah disetujui dan diterima oleh RUPS. Sejak tanggal surat pengunduran diri sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS tersebut, Bapak Mahendra Siregar tidak lagi aktif dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Mahendra Siregar submitted his resignation letter as the Company's Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019, following his appointment as the Deputy Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the resignation became effective upon approval and acceptance at the GMS. Between the date of his resignation until the GMS, Mahendra Siregar was no longer active as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.

KEHADIRAN DIREKSI DALAM RUPS TAHUNAN 2019 DAN RUPS LUAR BIASA 2019

Board of Directors Attendance at the 2019 Annual GMS and 2019 Extraordinary GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam RUPS Tahunan 2019 Attendance at the 2019 Annual GMS	Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa 2019 Attendance at the 2019 Extraordinary GMS
Nicolas D. Kanter	Presiden Direktur President Director	√	√
Bernardus Irmanto*	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	√	N/A
Febriany Eddy*	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	N/A	√
Bernardus Irmanto*	Direktur Director	N/A	√
Febriany Eddy*	Direktur Director	√	N/A
Lovro Paulic*	Direktur Director	N/A	N/A
Dani Widjaja*	Direktur Director	N/A	√
Agus Superiadi*	Direktur Director	N/A	√
Vinicius Mendes Ferreira*	Direktur Director	N/A	√

Keterangan | Note:

√ : Hadir | Present

- : Tidak Hadir | Absent

N/A : Belum menjabat atau sudah tidak lagi menjabat | Not yet appointed or no longer in office.

* : RUPS Tahunan 2019 menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Lovro Paulic sebagai Direktur dan pengangkatan Ibu Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur, serta Bapak Bernardus Irmanto, Bapak Dani Widjaja, Bapak Agus Superiadi dan Bapak Vinicius Mendes Ferreira, masing-masing sebagai Direktur. 2019 Annual GMS accepted and approved the resignation of Lovro Paulic as Director and appointed Febriany Eddy as Vice President Director, as well as Bernardus Irmanto, Dani Widjaja, Agus Superiadi and Vinicius Mendes Ferreira each as Director.

KEHADIRAN LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RUPS TAHUNAN 2019 DAN RUPS LUAR BIASA 2019.

The Attendance of Capital Market Supporting Institutions and Professionals in the 2019 Annual GMS and 2019 Extraordinary GMS.

Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professionals	RUPS Tahunan 2019 2019 Annual GMS	RUPS Luar Biasa 2019 2019 Extraordinary GMS
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Siddharta Widjaja & Rekan, terafiliasi dengan KPMG	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers)
Notaris Notary	Leolin Jayanti, S.H., M.Kn.	Leolin Jayanti, S.H., M.Kn.
Kantor Hukum Law Office	Mochtar Karuwin Komar	Hadiputranto Hadinoto & Partners
Biro Administrasi Efek Shares Administration Bureau	Administrasi efek internal Internal shares administration	PT Bima Registra



Keputusan RUPS Tahunan 2019 dan Pelaksanaannya

2019 Annual GMS Resolutions and Implementation

Mata acara yang dibicarakan pada RUPS Tahunan 2019 sesuai dengan mata acara yang sudah ditetapkan dan tercantum dalam panggilan RUPS Tahunan 2019. Risalah rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Vale Indonesia Tbk tertanggal 2 April 2019 Nomor: 02 yang dibuat Notaris Leolin Jayanti, S.H., M.Kn.

The 2019 Annual GMS agenda was in accordance with that stated in the 2019 Annual GMS notice. Minutes of the meeting were contained in the Deed of Minutes of Annual GMS of PT Vale Indonesia Tbk dated April 2, 2019, Number 02 drawn up by Notary Leolin Jayanti. SH., M.Kn.



Selasa, 2 April 2019
Tuesday, April 2, 2019

Rapat dibuka pukul 13.17 dan ditutup pukul 14.18 WIB.
Meeting opened at 13.17 WIB and closed at 14.18 WIB



Financial Hall, Graha Niaga Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 57-58,
Jakarta 12190

MATA ACARA RUPS TAHUNAN 2019

2019 Annual GMS Agenda

No	Mata Acara Agenda
1	Laporan Direksi Board of Directors' Report
2	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report
3	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Approval and Ratification of the Company's Financial Statements
4	Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan dan Pertimbangan Dividen Appropriation of Company Net Profits and Consideration of Dividend
5	Perubahan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Changes and Appointments to the Company's Board of Directors Members
6	Perubahan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Changes and Appointments to the Company's Board of Commissioners Members
7	Persetujuan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Approval for the Company's Board of Commissioners Remuneration
8	Persetujuan Pendelegasian Wewenang dari Pemegang Saham Kepada Dewan Komisaris Perseroan Dalam Penentuan Gaji dan Remunerasi Lainnya bagi Anggota Direksi Approval for Delegation of Authority from Shareholders to the Company's Board of Commissioners for the Determination of Salaries and Other Remunerations for the Members of the Board of Directors
9	Penentuan Akuntan Publik Appointment of the Public Accountant
10	Penegasan Perubahan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang Disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 Juli 2018 Re-statement of Changes and Appointment of Member of the Board of Commissioners Approved by the 2018 Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders on 20 July 2018

Mata Acara 1 1 st Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	45,000	112,793,251	8,425,879,022	8,538,672,273
				99.99%
Keputusan Rapat Resolution	Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 To accept the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2018			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			

Mata Acara 2 2 nd Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	0	112,793,251	8,425,924,022	8,538,717,273
				100%
Keputusan Rapat Resolution	Menerima Laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasannya terhadap Manajemen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 To accept the Report of the Board of Commissioners on its supervision on the management of the Company for the year ended December 31, 2018			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			

Mata Acara 3 3 rd Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	45,000	112,793,251	8,425,879,022	8,538,672,273
				99.99%
Keputusan Rapat Resolution	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 31 Januari 2019, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dari setiap kewajiban, dan meratifikasi sepenuhnya semua tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh mana tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan To approve and ratify the audited Financial Statements of the Company as at and for the year ended December 31, 2018 as set forth in the Auditor's report dated January 31, 2019, and to fully release and discharge the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company from any liabilities and fully ratify all actions taken in the course of their management and supervision of the Company during the year ended December 31, 2018, to the extent such actions are reflected in the books of the Company			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			



Mata Acara 4 4 th Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	0	0	8,538,717,273	8,538,717,273
				100%
Keputusan Rapat Resolution	Menyetujui bahwa tidak ada dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 To agree that no dividend will be paid to shareholders for the fiscal year ended 31 December 2018			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			

Mata Acara 5 5 th Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	2,608,100	0	8,536,109,273	8,536,109,173
				99.96%
Keputusan Rapat Resolution	<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengunduran diri Bapak Lovro Paulic dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Lovro Paulic tersebut Mengangkat Ibu Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Bernardus Irmanto sebagai Direktur, Bapak Dani Widjaja sebagai Direktur, Bapak Agus Superiadi sebagai Direktur, dan Bapak Vinicius Mendes Ferreira sebagai Direktur, berlaku sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021 Sehubungan dengan keputusan perubahan anggota Direksi sebagaimana tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari RUPS lagi <p>Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak penutupan RUPS Tahunan 2019 adalah sebagai berikut :</p> <p>Presiden Direktur : Nicolas D. Kanter Wakil Presiden Direktur : Febriany Eddy Direktur : Bernardus Irmanto Direktur : Agus Superiadi Direktur : Dani Widjaja Direktur : Vinicius Mendes Ferreira</p> <ul style="list-style-type: none"> To accept the resignation of Lovro Paulic from his position as a member of the Board of Directors of the Company and waive the 90 (ninety) days prior written notice requirement in respect of his resignation The appointment of Febriany Eddy as Vice President Director, Bernardus Irmanto as Director, Dani Widjaja as Director, Agus Superiadi as Director; and Vinicius Mendes Ferreira as Director, with effect from the closing of the 2019 Annual GMS until the closing of the Company's Annual GMS in 2021 In relation to the resolutions to change the members of the Board of Directors as set out above, to authorize the Board of Directors of the Company to take all actions as may be deemed fit or necessary, including but not limited, to state the resolutions in a notarial deed form, upon obtaining approval of the authorized institution on the changes of the Board of Directors of the Company, without having to obtain further approval from the GMS <p>Accordingly, the composition of the members of the Board of Directors of the Company effective as of the closing of the 2019 Annual GMS was as follows:</p> <p>President Director : Nicolas D. Kanter Vice President Director : Febriany Eddy Director : Bernardus Irmanto Director : Agus Superiadi Director : Dani Widjaja Director : Vinicius Mendes Ferreira</p>			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			

Mata Acara 6 | 6th Agenda

Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	2,608,100	0	8,536,109,173	8,536,109,173 99.96%
Keputusan Rapat Resolution	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima pengunduran diri Bapak Robert Alan Morris dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Robert Alan Morris tersebut • Mengangkat Bapak Luiz Fernando Landeiro, sebagai Komisaris, sejak penutupan RUPS Tahunan 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2020 • Sehubungan dengan keputusan perubahan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari RUPS lagi <p>Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan 2019 adalah sebagai berikut :</p> <p>Presiden Komisaris : Eduardo Bartolomeo Wakil Presiden Komisaris : Mark James Travers Komisaris : Luiz Fernando Landeiro Komisaris : Nobuhiro Matsumoto Komisaris Independen : Mahendra Siregar Komisaris Independen : Raden Sukhyar</p> <ul style="list-style-type: none"> • To accept the resignation of Robert Alan Morris from his title as Commissioner of the Company and waive the 90 (ninety) days prior written notice requirement in respect of his resignation • To appoint Luiz Fernando Landeiro as Commissioner of the Company with effect from the closing of the 2019 Annual GMS until the closing of the Company's Annual GMS in 2020 • In relation to the resolutions to change the members of the Board of Commissioners as set out above, to authorize the Board of Directors of the Company to take all actions as may be deemed fit or necessary, including but not limited, to state the resolutions in a notarial deed form, upon obtaining approval of the authorized institution on the changes of the Board of Commissioners of the Company, without having to obtain further approval from the GMS <p>Accordingly, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the 2019 Annual GMS was as follows:</p> <p>President Commissioner : Eduardo Bartolomeo Vice-President Commissioner : Mark James Travers Commissioner : Luiz Fernando Landeiro Commissioner : Nobuhiro Matsumoto Independent Commissioner : Mahendra Siregar Independent Commissioner : Raden Sukhyar</p>			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			



Mata Acara 7 7 th Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	0	0	8,538,717,273	8,538,717,273 100.00%
Keputusan Rapat Resolution	<p>Menyetujui remunerasi tahun 2019 untuk Komisaris Independen adalah mencakup pembayaran sebagai berikut : (a) AS\$12.500 per triwulan, dan (b) AS\$2.500 per kehadiran rapat.</p> <p>To approve the amount of remuneration of the Independent Commissioners for 2019 which include the following payments: (a) US\$12,500 quarterly retainer, (b) US\$2,500 per meeting.</p>			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			

Mata Acara 8 8 th Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	0	0	8,538,717,273	8,538,717,273 100%
Keputusan Rapat Resolution	<p>Menyetujui pendelegasian wewenang para pemegang saham kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan</p> <p>To approve the delegation of authority from the shareholders to the Board of Commissioners for determination of salary and other remunerations for members of the Board of Directors, as recommended by the Governance, Nomination and Remuneration Committee</p>			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			

Mata Acara 9 9 th Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	844,192	0	8,537,873,081	8,537,873,081 99.99%
Keputusan Rapat Resolution	<p>Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers), sebagai auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang auditor tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat pengikatan tugasnya, sesuai dengan rekomendasi Komite Audit Perseroan</p> <p>Appoint the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PricewaterhouseCoopers), as the external auditor to audit the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019, insofar as the auditor has fulfilled all the requirements set out in accordance with the applicable regulations in Indonesia concerning its duties, in accordance with the recommendations of the Company's Audit Committee</p>			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			



Mata Acara 10 | 10th Agenda

Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	0	0	8,538,717,273	8,538,717,273 100%
Keputusan Rapat Resolution	<p>Menyetujui untuk menegaskan kembali perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang disetujui oleh RUPS Luar Biasa 2018 Perseroan tanggal 20 Juli 2018, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Menerima pengunduran diri Bapak Akira Nozaki dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Akira Nozaki tersebut (ii) Mengangkat Bapak Nobuhiro Matsumoto sebagai Komisaris Perseroan, berlaku sejak penutupan RUPS Luar Biasa 2018 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2020 (iii) Menegaskan kembali perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang disetujui oleh RUPS Tahunan 2018 Perseroan tanggal 4 April 2018, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan kembali: <ul style="list-style-type: none"> » Bapak Nicolas D. Kanter sebagai Presiden Direktur; » Bapak Bernardus Irmanto sebagai Wakil Presiden Direktur; » Bapak Lovro Paulic sebagai Direktur; dan » Ibu Febriany Eddy sebagai Direktur, <p>berlaku sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2018 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima pengunduran diri Ibu Jennifer Maki dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Jennifer Maki tersebut • Mengangkat Bapak Eduardo Bartolomeo sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Mark James Travers sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Robert Alan Morris dan Bapak Akira Nozaki sebagai Komisaris, serta Bapak Mahendra Siregar* dan Bapak R. Sukhyar, sebagai Komisaris Independen sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2018 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2020 • Sehubungan dengan keputusan perubahan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari RUPS lagi <ul style="list-style-type: none"> (i) To approve the re-statement of changes and appointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors approved by the Company's Extraordinary GMS 2018 on July 20, 2018 (ii) To accept the resignation of Akira Nozaki from his title as Commissioner of the Company and waive the 90 (ninety) days prior written notice requirement in respect of his resignation (iii) To appoint Nobuhiro Matsumoto as Commissioner of the Company with effect from the closing of the 2018 Extraordinary GMS until the closing of the Company's Annual GMS in 2020 (iv) To re-state changes and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners approved by the Company's Annual GMS 2018 on April 4, 2018: <ul style="list-style-type: none"> • to re-appoint: <ul style="list-style-type: none"> » Nicolas D. Kanter as President Director; » Bernardus Irmanto as Vice President Director; » Lovro Paulic as Direktur; and » Febriany Eddy as Director, <p>with effect from the closing of the Annual GMS in 2018 until the closing of the Company's Annual GMS in 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • To accept the resignation of Jennifer Maki from her title as President Commissioner of the Company and waive the 90 (ninety) days prior written notice requirement in respect of her resignation • To appoint Eduardo Bartolomeo as President Commissioner and to re-appoint Mark James Travers as Vice President Commissioner, Robert Alan Morris and Akira Nozaki as Commissioner, and R. Sukhyar and Mahendra Siregar* as Independent Commissioner of the Company with effect from the closing of the 2019 Annual GMS until the closing of the Company's Annual GMS in 2020 • In relation to the resolutions to change the members of the Board of Commissioners as set out above, to authorize the Board of Directors of the Company to take all actions as may be deemed fit or necessary, including but not limited, to state the resolutions in a notarial deed form, upon obtaining approval of the authorized institution on the changes of the Board of Commissioners of the Company, without having to obtain further approval from the GMS 			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			

Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 dan Pelaksanaannya

2019 Extraordinary GMS Resolutions and Implementation

Mata acara yang dibicarakan pada RUPS Luar Biasa Tahun 2019 telah sesuai dengan mata acara yang sudah ditetapkan dan tercantum dalam panggilan RUPS Luar Biasa Tahun 2019. Risalah rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Vale Indonesia Tbk, tertanggal 16 Agustus 2019 Nomor 62 yang dibuat Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.

The 2019 Extraordinary GMS agenda was in accordance with that stated in the 2019 Extraordinary GMS notice. Minutes of the agenda were contained in the PT Vale Indonesia Tbk Extraordinary GMS Deed of Minutes dated August 16, 2019 Number 62 drawn up by Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.



Jumat, 16 Agustus 2019
Friday, August 16, 2019

Rapat dibuka pukul 14.16 WIB dan ditutup pukul 14.25 WIB
Meeting opened at 14.16 WIB and closed at 14.25 WIB



Financial Club, Lantai 27, Graha
CIMB Niaga
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA 2019

2019 Extraordinary GMS Agenda

No	Mata Acara Agenda
1	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Amendment to Article 3 of the Articles of Association
2	Perubahan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Changes and Appointment of the Board of Commissioners members

Mata Acara 1 1 st Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	0	0	8.483.484.792	8.483.484.792
				100%
Keputusan Rapat Resolution	Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan klasifikasi kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha tahun 2017 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan tersebut Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to adjust the business activities classification to the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) of 2017 and authorized the Company's Board of Directors to take all actions as may be deemed fit or necessary in relation to such amendment			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			



Mata Acara 2 2 nd Agenda				
Kuorum Quorum	Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju For	Total Suara (Setuju + Abstain) Total (For + Abstain)
	0	0	8.483.484.792	8.483.484.792 100%
Keputusan Rapat Resolution	<p>1. Menerima pengunduran diri Bapak Eduardo Bartolomeo dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya sehubungan dengan pengunduran diri tersebut</p> <p>2. Mengangkat Bapak Mark James Travers, Bapak Mahendra Siregar* dan Bapak Cory McPhee, masing-masing sebagai Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan RUPS Luar Biasa 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2020</p> <p>3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, termasuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari RUPS lagi</p> <p>Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan RUPS Luar Biasa 2019 adalah sebagai berikut :</p> <p>Presiden Komisaris : Mark James Travers Wakil Presiden Komisaris : Mahendra Siregar dan Komisaris Independen</p> <p>Komisaris : Luiz Fernando Landeiro Komisaris : Cory McPhee Komisaris : Nobuhiro Matsumoto Komisaris Independen : Raden Sukhyar</p> <p>1. Accepted the resignation of Eduardo Bartolomeo as the President Commissioner of the Company and waived the 90 (ninety) days prior written notice requirement in respect of his resignation</p> <p>2. Appoint Mark James Travers, Mahendra Siregar* and Cory McPhee, each as President Commissioner, Vice President Commissioner and Independent Commissioner, and Commissioner of the Company with effect from the closing of the 2019 Extraordinary GMS until the closing of the Company's Annual GMS in 2020</p> <p>3. Authorized the Company's Board of Directors to take all actions as may be deemed fit or necessary, including but not limited to, stating the resolutions in a notarial deed, upon obtaining approval from the authorized institution on the changes to the Company's Board of Commissioners, without having to obtain further approval from the GMS</p> <p>Accordingly, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the 2019 Extraordinary GMS was as follows:</p> <p>President Commissioner : Mark James Travers Vice-President Commissioner : Mahendra Siregar and Independent Commissioner</p> <p>Commissioner : Luiz Fernando Landeiro Commissioner : Cory McPhee Commissioner : Nobuhiro Matsumoto Independent Commissioner : Raden Sukhyar</p>			
Pelaksanaan Execution	Selesai direalisasikan Realized			

Informasi Mengenai Keputusan RUPS 1 (Satu) Tahun Sebelumnya

Information Related To the Previous Year's GMS Decisions



Rabu, 4 April 2018
Wednesday, April 4, 2018

Rapat dibuka pukul 14:13 WIB dan ditutup pukul 15:04 WIB
Meeting opened at 14:13 WIB and closed at 15:04 WIB



The Energy Building 2nd floor -
Soehanna Hall SCBD Lot 11 A, Jl.
Jendral Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta 12190

PESERTA RUPS TAHUNAN 2018

2018 Annual GMS Attendees

No	Peserta Attendees	Uraian Description
1	Pemegang Saham dan/atau Kuasanya Shareholders and/or their Proxies	Mewakili 8.623.648.648 saham atau 86,78% dari 9.936.338.720. Representing 8,623,648,648 shares or 86.78% of 9,936,338,720. Telah memenuhi kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan. Fulfilling the Meeting quorum as regulated in Article 24 paragraph 1 (a) of the Company's Articles of Association.
2	Direksi Board of Directors	Presiden Direktur President Director: Nicolas D. Kanter Direktur Director: Febriany Eddy
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner: Mark James Travers Komisaris Commissioner: Robert Alan Morris Komisaris Commissioner: Nobuhiro Matsumoto Komisaris Independen Independent Commissioner: Irwandy Arif Komisaris Independen Independent Commissioner: Raden Sukhyar Komisaris Independen Independent Commissioner: Mahendra Siregar
4	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professions	Notaris Notary: Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Penasehat Hukum Legal Counsel: Mochtar Karuwin Komar Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan, terafiliasi dengan KPMG Siddharta Widjaja & Rekan, affiliated with KPMG



Vale Indonesia Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders

Financial Hall, Jakarta, 2 April 2019



MATA ACARA RUPS TAHUNAN 2018

2018 Annual GMS Agenda

No	Mata Acara Agenda
1	Laporan Direksi Board of Directors' Report
2	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report
3	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Approval and Ratification of the Company's Financial Statements
4	Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan dan Pertimbangan Dividen Appropriation of Company Net Profits and Consideration of Dividend
5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Amendment to the Company's Article of Association
6	Perubahan dan Pengangkatan anggota Direksi Perseroan Changes and Appointments to the Company's Board of Directors Members
7	Perubahan dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan Changes and Appointments to the Company's Board of Commissioners Members
8	Persetujuan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Approval for the Company's Board of Commissioners Remuneration
9	Persetujuan Pendelegasian Wewenang Dari Pemegang Saham Kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam Penentuan Gaji dan Remunerasi Lainnya bagi Anggota Direksi Approval for Delegation of Authority from Shareholders to the Company's Board of Commissioners for the Determination of Salaries and other Remunerations for the Members of the Board of Directors
10	Penentuan Akuntan Publik Appointment of the Public Accountant

Keputusan RUPS Tahunan 2018 dan Pelaksanaannya

2018 Annual GMS Resolutions and Its Implementation

Mata acara yang dibicarakan pada RUPS Tahunan 2018 sesuai dengan mata acara yang sudah ditetapkan dan tercantum dalam panggilan RUPS Tahunan 2018. Risalah rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Vale Indonesia Tbk, tertanggal tanggal 4 April 2018 Nomor 13 yang dibuat Notaris Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Seluruh keputusan RUPS Tahunan 2018 telah dilaksanakan.

The agenda discussed at the 2018 Annual GMS was in accordance with the 2018 Annual GMS Agenda Notice. The minutes of meeting were contained in the PT Vale Indonesia Tbk. Annual GMS Deed of Minutes dated April 4, 2018 No. 13 drawn up by Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. All 2018 Annual GMS resolutions have been implemented.





Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan GCG secara berkelanjutan. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada Direksi dalam menentukan strategi Perseroan, serta memberikan saran, nasihat, dan rekomendasi kepada Direksi terkait isu maupun permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak secara independen.

The Company's Board of Commissioners is responsible for overseeing the Company's management by the Board of Directors and for ensuring the Company has implemented GCG in a sustainable manner. The Board of Commissioners is also responsible for providing assistance to the Board of Directors in determining the Company's strategy, as well as providing suggestions, advice and recommendations to the Board of Directors regarding certain issues and matters. In performing its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall act in an independent manner.

Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Composition

Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris terdiri dari enam orang atau lebih anggota komisaris.

The Company's Articles of Association sets down that the Board of Commissioners should comprise six or more members.

RUPS Tahunan 2019 mengesahkan pengunduran diri Bapak Robert Alan Morris sebagai Komisaris dan penunjukan Bapak Luiz Fernando Landeiro sebagai anggota Komisaris yang baru. Sedangkan RUPS Luar Biasa 2019 mengesahkan pengunduran diri Bapak Eduardo Bartolomeo sebagai Presiden Komisaris dan penunjukan Bapak Mark James Travers sebagai Presiden Komisaris, Bapak Mahendra Siregar sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen serta Bapak Cory McPhee sebagai Komisaris.

The 2019 Annual GMS approved the resignation of Robert Alan Morris as Commissioner and the appointment of Luiz Fernando Landeiro as the new Commissioner. While the 2019 Extraordinary GMS approved the resignation of Eduardo Bartolomeo as President Commissioner and the appointment of Mark James Travers as President Commissioner, Mahendra Siregar as Vice President Commissioner and Independent Commissioner, and Cory McPhee as Commissioner.

Selanjutnya Bapak Mahendra Siregar menyampaikan pengunduran diri dari posisinya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen pada tanggal 4 November 2019 sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Further, Mahendra Siregar submitted his resignation as Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019 due to his appointment as Vice Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia.

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, anggota Dewan Komisaris menjadi 5 orang dengan 1 Komisaris Independen. Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah diterima oleh RUPS dan Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen yang baru telah diangkat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Bapak Mahendra Siregar tersebut serta untuk memenuhi keanggotaan minimum Dewan Komisaris.

Following the resignation, the Board of Commissioners members comprised of 5 Commissioners with 1 Independent Commissioner. In accordance with the Articles of Association, the resignation shall be effective if accepted by the GMS and a new Vice President Commissioner and Independent Commissioner is appointed to fill the vacancy left by Mahendra Siregar and comply with the minimum membership of the Board of Commissioners.



Komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners' Composition as at December 31, 2019 was as follows:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2019

Board of Commissioners' Composition as per December 31, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Mark James Travers	Presiden Komisaris President Commissioner
2	Mahendra Siregar*	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner
2	Luiz Fernando Landeiro	Komisaris Commissioner
3	Cory McPhee	Komisaris Commissioner
4	Nobuhiro Matsumoto	Komisaris Commissioner
5	Raden Sukhyar	Komisaris Independen Komisaris Independen

* Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 4 November 2019, sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah disetujui dan diterima oleh RUPS. Sejak tanggal surat pengunduran diri sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS tersebut, Bapak Mahendra Siregar tidak lagi aktif dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Mahendra Siregar submitted his resignation letter as the Company's Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019, following his appointment as the Deputy Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the resignation became effective upon approval and acceptance at the GMS. Between the date of his resignation until the GMS, Mahendra Siregar was no longer active as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.

Program Pengenalan untuk Dewan Komisaris

Perseroan belum memiliki program pengenalan khusus bagi anggota baru Dewan Komisaris. Namun anggota baru Dewan Komisaris diberikan dokumen-dokumen perusahaan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas berbagai hal yang berkaitan dengan Perseroan serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Materi pengenalan yang disiapkan dan diberikan oleh Sekretaris Perusahaan antara lain terdiri dari:

1. Visi dan Misi Perseroan;
2. Anggaran Dasar Perseroan;
3. KK dan perubahannya;
4. Struktur Organisasi Perseroan;
5. Piagam Dewan Komisaris serta Piagam komite di bawah Dewan Komisaris;
6. Piagam Direksi serta unit dibawah Direksi;
7. Kode Etik dan Perilaku Perseroan;
8. Kebijakan dan Pedoman Utama Perseroan;
9. Laporan Tahunan Perseroan;
10. Laporan Keberlanjutan Perseroan; dan
11. Kalender Rapat Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Board of Commissioners' Introduction Program

The Company has not established a formal introduction program for new members of the Board of Commissioners. However, new Commissioners was provided with corporate documents, aimed at providing an overview of matters related to the Company and the Board of Commissioners' duties and responsibilities. The introduction material is prepared and provided by the Corporate Secretary and consists of:

1. The Company's Vision and Mission;
2. The Company's Articles of Association;
3. COW and its amendments;
4. The Company's Organization Structure;
5. Charters of the Board of Commissioners and committees under the Board of Commissioners;
6. Charters of the Board of Directors and working unit under the Board of Directors;
7. The Company's Code of Ethics and Conduct;
8. The Company's Key Policies and Guidelines;
9. The Company's Annual Report;
10. The Company's Sustainability Report; and
11. The Annual Board Meeting Calendar.



Anggota Dewan Komisaris baru juga diberikan kesempatan untuk meninjau secara langsung kegiatan operasional Perseroan di Sorowako, Sulawesi Selatan. Sampai dengan akhir tahun 2019, Perseroan masih dalam proses menyusun suatu program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru.

New Commissioners are also given the opportunity to directly review the Company's operational activity in Sorowako, South Sulawesi. As at end of 2019, the Company was in the process of establishing a formal introduction program for new members of the Board of Commissioners.

Penunjukan dan Kriteria Keanggotaan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Appointment and Membership Criteria

Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Perseroan menetapkan Dewan Komisaris dengan komposisi keanggotaan yang berimbang dalam hal latar belakang profesionalitas, pendidikan, pengalaman, kewarganegaraan dan jenis kelamin.

The Company's Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The Company has established a balanced membership composition for the Board of Commissioners in terms of professional background, education, experience, citizenship and gender.

Penentuan dan seleksi calon anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kebutuhan Perseroan. Selain itu Perseroan juga mengacu pada POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33"), Anggaran Dasar dan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

The determination and selection for candidates as Members of the Board of Commissioners is carried out by the Governance, Nomination and Remuneration Committee, after taking into account their qualifications and the Company's needs. The Company also refers to POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33"), the Articles of Association, and the Nomination and Remuneration Process Policy.

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan peraturan pasar modal dan syarat lain yang ditentukan Anggaran Dasar Perusahaan:

Members of the Board of Commissioners must meet the basic requirements set forth by the capital market regulations and other conditions determined by the Company's Articles of Association, including:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum dan masa proses nominasi;
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari perusahaan yang dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum dan masa proses nominasi;
5. tidak pernah dinyatakan bertanggung jawab (dalam hukum pidana atau administratif) sehubungan dengan atas suatu tindakan yang menyebabkan kerugian pada keuangan Pemerintah dan/atau sehubungan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor keuangan (hukum pasar modal atau lainnya);
6. tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindakan pidana, pelanggaran kepercayaan, ketidakjujuran atau perbuatan curang;

7. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya:
 - a. pernah tidak melaksanakan RUPS Tahunan;
 - b. laporan pertanggungjawabannya (contoh, Laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan) tidak diterima oleh RUPS Tahunan; atau tidak memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris pada RUPS;
 - c. menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pernyataan pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dalam waktu lima tahun sebelum proses nominasi;
 8. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
 10. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan kerja manapun dalam 5 (lima) tahun sebelum proses nominasi;
 11. tidak berada di bawah pengampunan;
 12. tidak memegang jabatan sebagai:
 - a. direktur/anggota direksi di lebih dari 2 (dua) perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - b. komisaris di lebih dari 2 (dua) perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - c. komisaris di lebih dari 4 (empat) perusahaan publik lain yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia apabila ia tidak memegang jabatan sebagai anggota Direksi;
 - d. anggota di lebih dari 5 (lima) komite pada perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ia juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
 13. ia, orangtuanya, kakek/neneknya, saudara-saudaranya, suami/istrinya, anak-anak, dan/atau cucu-cucunya tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung atau tidak langsung, terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya;
 14. bagaimanapun, apabila ia ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan, wajib berjanji untuk melepaskan dirinya dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan usaha keluarga sebagaimana disebutkan di atas dengan Perseroan;
7. has never been a member of a Board of Commissioners who during their term of office:
 - a. has never held the Annual GMS;
 - b. has never had an accountability report (for example, the Report of the Board of Commissioners in the Annual Report), as a member of the Board of Commissioners not accepted by the Annual GMS; or has not provided an accountability report as a member of the Board of Commissioners at the GMS;
 - c. have caused a company that has received permission, approval or registration from OJK, to fail to fulfill their obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK within 5 (five) years prior to the nomination process;
 8. has the commitment to comply with applicable laws and regulations;
 9. has the knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
 10. has never been dishonorably discharged from any job title within 5 (five) years prior to the nomination process;
 11. is not under receivership;
 12. does not hold office as:
 - a. director/members of a board of directors in more than 2 (two) public companies established under Indonesian law;
 - b. commissioner in more than 2 (two) public companies established under Indonesian law;
 - c. commissioner in more than 4 (four) other public companies established under Indonesian law if he/she does not hold a position as a Director;
 - d. member in more than 5 (five) public company committees established under Indonesian law in case he/she also serves as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners.
 13. they, their parents, grandparents, brothers/sisters, spouses, children, and/or grandchildren have no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities, unless otherwise stated;
 14. however, if they are appointed as a Commissioner of the Company, they shall promise to release themselves from any decision-making process involving the family business referred to above;



15. ia, suami/istrinya, dan/atau anak-anaknya tidak memiliki saham (atau efek lainnya) secara langsung atau tidak langsung dalam Perseroan dan/atau perusahaan-perusahaan lain yang didirikan di Indonesia yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan;
16. sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki kesulitan atau komplikasi yang dapat menghalanginya menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Perseroan.

15. they, their spouse and/or their children have no shares (or other securities) directly or indirectly in the Company and/or other companies established in Indonesia that may create a conflict of interest with the Company;
16. be healthy, physically and emotionally, and have no impediments or complications that may prevent them from performing their duties and responsibilities as Commissioner of the Company.

Masa Jabatan

Tenure

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal penutupan RUPS saat anggota tersebut diangkat, dan berakhir pada tanggal penutupan dua RUPS Tahunan berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu dan dengan alasan apapun sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut berakhir. Di akhir masa jabatan, anggota Dewan Komisaris dapat dinominasikan untuk diangkat kembali.

The term of a member of the Board of Commissioners starts from the closing of the GMS that appointed them until the closing of the second Annual GMS after the date of their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time and for whatever reason before the end of the members' tenures. At the end of their tenures, members of the Board of Commissioners may be nominated for reappointment.

Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak dua periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya, sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 POJK 33. Apabila Komisaris Independen menjabat sebagai Kepala Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan audit berikutnya.

The tenure for Independent Commissioner is at most two consecutive periods. An Independent Commissioner who has served for two terms may be reappointed for the following period, provided the Independent Commissioner declares themselves as remaining independent in accordance with Article 25 of POJK 33. If the Independent Commissioner serves as the Audit Committee Head, they may only be reappointed to the Audit Committee for 1 (one) more period for the next Audit Period.

Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, masa jabatan Komisaris Independen dibatasi sampai dengan usia 65 tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dalam kondisi:

- mengundurkan diri;
- dinyatakan pailit atau berdasarkan keputusan pengadilan ditaruh di bawah pengampuan;
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- meninggal dunia atau tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Komisaris.

In accordance with the Board of Commissioners' Charter, the Independent Commissioner's tenure is limited to 65 years of age. The tenure for a member of the Board of Commissioners shall automatically terminate in any of the following conditions:

- they resign;
- they are declared bankrupt, or based on court decisions placed under guardianship;
- they are dismissed by virtue of a GMS resolution;
- they are prohibited from being a member of the Board of Commissioners due to prevailing laws and regulations;
- they pass away, or are unable to perform their duties as a Commissioner.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Duties and Responsibilities

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. mengawasi Direksi dalam menjalankan manajemen Perseroan dengan cara:
 - a. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi
 - b. atas permintaan Direksi memberikan pengarah atau meneruskan permintaan tersebut dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan Pemegang Saham;
2. melaksanakan tugas-tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan/atau RUPS untuk melaksanakan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran;
3. melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana didelegasikan oleh Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan dan/atau RUPS;
4. meninjau dan menyetujui setiap perubahan yang diajukan terhadap KK Perseroan;
5. meninjau kinerja Perseroan dalam menjalankan rencana tanggung jawab sosial perusahaan, serta memutuskan langkah-langkah pelaksanaan yang akan diambil oleh Direksi;
6. mengangkat, memindahtugaskan atau memberhentikan sementara anggota manajemen senior dengan tanggung jawab utama di bidang tanggung jawab sosial Perseroan, audit internal, serta kepatuhan;
7. mengkaji, menyetujui, serta menandatangani laporan tahunan yang dibuat Direksi;
8. mewakili Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan di antara satu atau semua anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di pasar modal dan/atau pasar saham tempat saham Perseroan dicatat;

In performing their duties and responsibilities, members of the Board of Commissioners shall refer to the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners' Charter, and the prevailing laws and regulations.

Board of Commissioners' Duties and Responsibilities Description

The Board of Commissioners duties and responsibilities are:

1. Supervising the Board of Directors' management of the Company by:
 - a. supervising and providing advice to the Board of Directors, and
 - b. at the request of the Board of Directors, providing guidance, or forwarding requests to the GMS for shareholders' approval;
2. Undertaking tasks, authorized actions and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations and/or the GMS to implement the GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness;
3. Undertaking such other tasks delegated to it by the Articles of Association, prevailing laws and regulations and/or the GMS;
4. Reviewing and approving any proposed amendment to the Company's COW;
5. Reviewing the Company's performance in carrying out its corporate social responsibility plan and deciding on the steps the Board of Directors will take in further implementing it;
6. Appointing, transferring or temporarily discharging any member of senior management with primary responsibility in corporate social responsibility, internal audit and compliance;
7. Reviewing, approving and signing off the annual report prepared by the Board of Directors;
8. Representing the Company, when potential conflicts of interest between one or all members of the Board of Directors appear, with observance of the prevailing capital market and/or stock market regulations where the Company is listed;



9. melaporkan tugas pengawasan selama tahun berjalan kepada RUPS Tahunan;
10. setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi dengan itikad baik, teliti dan bertanggung jawab demi kepentingan dan keuntungan Perseroan;
11. setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

9. Reporting its supervisory duty over the preceding fiscal year to the Annual GMS;
10. Each member of the Board of Commissioners will act in good faith, with due care and full responsibility in carrying out their supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the interest and benefit of the Company;
11. Each member of the Board of Commissioners will be personally liable for the Company's losses if found guilty of negligence in carrying out their duties.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai *primus inter pares*, yakni mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Presiden Komisaris juga bertanggung jawab atas tugas-tugas lain:

- mengawasi jalannya fungsi organ utama Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- memimpin rapat Dewan Komisaris;
- memimpin RUPS.

President Commissioner's Duties and Responsibilities Description

The President Commissioner's duties and responsibilities are *primus inter pares*, namely coordinating the activities of the Board of Commissioners. The President Commissioner is also responsible for other tasks:

- overseeing the Board of Commissioners' functions, as the main body, in accordance with their duties and responsibilities;
- chairing the Board of Commissioners' meetings;
- chairing the GMS.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota. Fokus bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengacu pada pembagian peran sebagai Ketua dari komite penunjang Dewan Komisaris sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

Board of Commissioners' Distribution of Duties

The Board of Commissioners determines the distribution of work among its members. The supervisory focus for each member of the Board of Commissioners refers to the division of roles as the Chairman of the Board of Commissioners' Supporting Committees in accordance with their competence and experience.

FOKUS BIDANG PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Supervisory Focus

Komite dan Bidang Pengawasan Committee and Supervision	Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners' Member
Komite Audit Audit Committee	Mahendra Siregar*
Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Governance, Nomination and Remuneration Committee	Raden Sukhyar**
Komite Mitigasi Risiko Risk Mitigation Committee	Raden Sukhyar

*) Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Komite Audit pada tanggal 4 November 2019. Mahendra Siregar submitted his resignation letter as Chairman of the Audit Committee on November 4, 2019.

**) Diangkat oleh Dewan Komisaris pada tanggal 20 November 2019 untuk menggantikan Bapak Mahendra Siregar yang mengundurkan diri pada tanggal 4 November 2019. Appointed by the Board of Commissioners on November 20, 2019 to replace Mahendra Siregar who resigned on November 4, 2019.

Wewenang Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Authorities

1. Dewan Komisaris memiliki akses pada informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasannya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Dewan Komisaris berhak untuk sewaktu-waktu menunjuk penasihat independen dengan biaya yang dibebankan pada Perseroan, sebagaimana diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasannya.
 3. Dewan Komisaris berhak untuk merekomendasikan kepada Direksi tentang pelaksanaan perubahan atau tindakan korektif yang diperlukan berdasarkan tinjauan tahunan terhadap sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal.
 4. Membentuk komite atau pelaksana tugas dibawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan peran, tugas, dan tanggung jawabnya.
 5. Dewan Komisaris dapat setiap saat memberhentikan sementara satu atau lebih anggota Direksi dan memberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan terkait pemberhentian sementara tersebut, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi tersebut telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, atau peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, atau melalaikan tugas mereka, atau alasan-alasan lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.
 6. Apabila terdapat pemberhentian sementara terhadap anggota Direksi, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu 45 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut. Waktu ini diberikan untuk membuat keputusan apakah pemberhentian sementara tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian tetap atau pengembalian jabatan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi tersebut untuk mengajukan pembelaan diri dalam rapat.
1. The Board of Commissioners shall, in accordance with the Company's Articles of Association and policies, as well as the prevailing laws and regulations, have access to any information needed for the performance of its supervisory duty.
 2. At any time, and at the Company's expense, can engage independent advisors as appropriate and necessary to fulfill its supervisory function.
 3. Can rightfully recommend to the Board of Directors the implementation of any necessary changes or corrective actions based on its annual review of the Company's internal risk management and control system.
 4. Can establish committees or task forces below the Board of Commissioners to assist it in performing its role, duties and responsibilities.
 5. At any time, the Board of Commissioners can temporarily discharge any one or more member(s) of the Board of Directors and notify the respective member(s) of the Board of Directors, provided that such member has conducted any act contrary to the Articles of Association or any prevailing laws and regulations, or has neglected their duty, or for any other reasons deemed to be important by the Board of Commissioners.
 6. In case any member of the Board of Directors is temporarily suspended, the Board of Commissioners must call an Extraordinary GMS within 45 days after the date of temporary suspension to decide whether such member of the Board of Directors will be permanently discharged, or returned to their original position, while giving an opportunity for the Director to present a defense at the meeting.



Anggota Dewan Komisaris dapat mendelegasikan kewenangannya kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud. Pendelegasian wewenang tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif. Pada tahun 2019 tidak ada pendelegasian wewenang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya melalui surat kuasa khusus.

A member of the Board of Commissioners can delegate their authority to other members through a power of attorney specifically for the intended purpose. Delegation of authority does not release the Board of Commissioners' collegial responsibilities. In 2019, there were no delegations of authority by any member of the Board of Commissioners to other members through a specific power of attorney.

Lingkup Kerja

Scope of Work

Anggaran Dasar Perseroan secara khusus mengatur beberapa keputusan yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

- **Status korporasi, struktur saham, serta rencana bisnis dan strategi tahunan dan jangka panjang Perseroan**
- **Laporan keuangan triwulanan dan tahunan**
Dewan Komisaris telah menyetujui laporan keuangan triwulan dan tahunan, yang telah disusun dan diterbitkan Direksi selama tahun 2019.
- **Akuisisi atau divestasi**
Dewan Komisaris menyetujui pelaksanaan divestasi tahap kedua 20% saham Perseroan kepada MIND ID.
- **Kerjasama strategis dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar**
- **Penerapan kebijakan yang esensial bagi GCG**

Dewan Komisaris senantiasa meninjau dan melakukan pembaruan tugas dan tanggung jawab dari waktu ke waktu, untuk mencerminkan praktik-praktik terbaik GCG dan dukungan pada keberlanjutan usaha maupun operasi Perseroan.

The Company's Articles of Association specifically stipulate that certain decisions must be approved by the Board of Commissioners, as follows:

- **The Company's corporate status, capital structure, annual and long-term business and strategic plans**
- **Quarterly and annual financial statements**
The Board of Commissioners approved quarterly and annual financial statements, prepared and published by the Board of Directors in 2019.
- **Acquisitions and divestiture**
The Board of Commissioners approved second phase of divestiture for 20% shares of the Company to MIND ID.
- **Strategic cooperation and other actions required under the Articles of Association**
- **Implementation of policies essential to GCG**

The Board of Commissioners continuously reviews and updates its duties and responsibilities periodically, to reflect GCG best practices and support for business sustainability and Company operations.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Mahendra Siregar pada tanggal 4 November 2019, Komisaris Independen Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 berjumlah satu orang sehingga belum memenuhi ketentuan minimum 30% dari total anggota Dewan Komisaris yang dipersyaratkan oleh POJK 33.

Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengunduran diri Bapak Mahendra Siregar menjadi efektif apabila telah diterima oleh RUPS dan Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen yang baru telah diangkat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Bapak Mahendra Siregar tersebut serta untuk memenuhi keanggotaan minimum Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam POJK 33, yaitu:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;

In relation with the resignation of Mahendra Siregar on 4 November 2019, the Company's Independent Commissioners as at 31 December 2019 comprised one person that did not comply with the minimum 30% of the total members of the Board of Commissioners required by POJK 33.

In accordance with the Articles of Association, the resignation of Mahendra Siregar shall be effective if accepted by the GMS and a new Vice President Commissioner and Independent Commissioner is appointed to fill the vacancy left by Mahendra Siregar and comply with the minimum membership of the Board of Commissioners.

Independent Commissioners' Criteria

The criteria for determining Independent Commissioners is based on the requirements in POJK 33, namely:

1. Not a person who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the company or the public company within the last 6 (six) months, except for the re-appointment as an independent commissioner of the company or the public company for a subsequent period;
2. Does not own any shares either directly or indirectly in the company or the public company;



3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut;
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Setiap dua tahun, masing-masing Komisaris Independen Perseroan diwajibkan menandatangani surat pernyataan status independen dan mengungkapkan segala kondisi yang dianggap berpotensi menyebabkan benturan kepentingan. Komisaris Independen Mahendra Siregar dan Raden Sukhyar masing-masing telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi pada tanggal 4 April 2018.

Surat Pernyataan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa yang bersangkutan, termasuk anggota keluarganya, tidak memiliki saham di Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
2. bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga hingga tiga tingkat secara horisontal dan vertikal dari pernikahan dari anggota Dewan Komisaris atau Direksi;
3. bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama Perseroan;
4. bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan bisnis apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait aktivitas bisnis Perseroan;
5. bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan:
 - a. menjabat sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") atau perusahaan swasta yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatannya yang berlaku di Perseroan;
 - b. menjabat sebagai administrator partai politik dan/atau kandidat/anggota parlemen dan/atau kandidat atau menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur atau walikota/wakil walikota;
 - c. memegang jabatan lainnya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatannya yang berlaku di Perseroan;
6. bahwa yang bersangkutan harus secara bersungguh-sungguh menghindari benturan kepentingan yang dapat memengaruhi tugas pengawasan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Does not have any affiliations with the company or the public company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholder of the company or the public company;
4. Does not have business relationships either directly or indirectly related to the business activities of the company or the public company.

Independent Commissioner's Independency Statement

Every two years, each Independent Commissioner of the Company is required to sign an independency statement and disclose any conditions deemed to be a potential conflict of interest. The Independent Commissioners, Mahendra Siregar and Raden Sukhyar, each signed an Independency Statement on April 4, 2018.

The independency statement states the following:

1. That he and his family members do not have any shares in the Company either directly or indirectly;
2. That he does not have any family relation up to 3 (three) grade horizontally and vertically due to the marriage with any other members of the Board of Commissioners or Board of Directors;
3. That he does not have any affiliation with the Company, members of Board of Commissioners', members of Board of Directors', or majority shareholders of the Company;
4. That he does not have any business relation, either direct or indirect, in relation to the main business activity of the Company;
5. That he does not perform the following activities:
 - a. serves as any member of Director of State Owned Enterprise, Local State Owned Enterprise or private companies, that may cause any conflict of interest related to his current position in the Company;
 - b. serves as administrator of any political party and/or candidate/member of parliament and/or are candidate or serve as governor/vice governor or mayor/vice mayor;
 - c. holds any other position that may cause conflict of interest in relation to his/her current title in the Company;
6. that he will wholeheartedly avoid conflicts of interest that may affect their supervisory duty as a member of the Company's Board of Commissioners.



Piagam Dewan Komisaris

Charter of the Board of Commissioners

Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan komite pendukung Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris terakhir kali diubah dan berlaku efektif pada tanggal 4 September 2018.

The Company has a Board of Commissioners' Charter that serves as the guidelines and rules for the Board of Commissioners and their supporting committees. The Board of Commissioners' Charter was last amended and became effective on September 4, 2018.

Piagam Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter		
1	Tata Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners' Working Procedures	1.1. Peran Dewan Komisaris Board of Commissioners' Role
		1.2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Board of Commissioners' Responsibilities
		1.3. Tanggung Jawab Pengawasan Supervisory Responsibilities
		1.4. Akses Pada Informasi Access to Information
		1.5. Kehadiran Dalam RUPS Attendance at GMS
		1.6. Rapat Meetings
		1.7. Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Komite Pendukung Dewan Komisaris Agenda Items for the Board of Commissioners' and any Supporting Committee Meetings
		1.8. Berita Acara Rapat Minutes
2	Tanggung Jawab Pengawasan Secara Khusus Special Supervisory Responsibilities	2.1. Tanggung Jawab Pengawasan Supervisory Responsibilities
		2.2. Wewenang untuk Menunjuk Penasihat Independen Authority to Engage Independent Advisor
		2.3. Manajemen Risiko dan Kendali Internal Internal Risk Management and Control
		2.4. Strategi Perseroan dan Tujuan Kinerja Corporate Strategy and Performance Objectives
		2.5. Anggaran Tahunan Annual Budget
		2.6. Tinjauan Operasional Operations Review
		2.7. Remunerasi dan Nominasi Direksi Directors' Nomination and Remuneration
		2.8. Evaluasi Evaluation
		2.9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibilities
		2.10. Organisasi Perseroan Company Organization



Piagam Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter		
3	Struktur Dewan Komisaris Board of Commissioners' Structure	3.1. Komisaris Commissioners
		3.2. Komite Audit Audit Committee
		3.3. Komite atau Gugus Tugas Lain Other Committees and Task Forces
4	Praktik-praktik Lain Other Practices	4.1. Kepemilikan atau Perdagangan Saham Holding and Trading of Shares
		4.2. Benturan Kepentingan Conflicts of Interest
		4.3. Keterlibatan dalam Kejahatan Keuangan Involvement in Financial Crimes
		4.4. Keterbukaan Informasi Information Disclosure
		4.5. Hubungan dengan Pemegang Saham Relationship with Majority Shareholders
		4.6. Rapat dengan Direksi Meetings with the Board of Directors
		4.7. Pelatihan dan Pendidikan Komisaris Commissioners' Education and Training
		4.8. Jasa Bisnis Atau Profesional oleh Komisaris Professional or Business Services Provide by Commissioners
		4.9. Usia Pensiun Wajib Mandatory Retirement Age
5	Lain-Lain Others	5.1. Tanggal Berlaku Efektif Effective Date
		5.2. Penerimaan dan Persetujuan Komisaris Commissioners Acceptance and Agreement
		5.3. Perubahan Piagam Charter Amendments
		5.4. Dasar Hukum Legal Basis
		5.5. Benturan Kepentingan Conflicts of interest



Kebijakan, Prosedur, Dasar Penetapan dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Board of Commissioner's Remuneration Policies, Procedures, Basis and Structure

Perseroan memiliki kebijakan hanya memberikan remunerasi kepada Komisaris Independen, yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi remunerasi kepada Komisaris Independen disampaikan dalam suatu struktur dan jumlah remunerasi dengan mempertimbangkan kondisi pasar pada industri yang sama. Dewan Komisaris kemudian mengusulkan nilai remunerasi tahunan berdasarkan tinjauan dan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan ke para pemegang saham untuk disetujui di dalam RUPS Tahunan.

The Company has a policy to only provide remuneration for Independent Commissioners, as determined based on the Governance, Nomination and Remuneration Committee recommendation to the Board of Commissioners. The Independent Commissioners' remuneration recommendations are submitted and show the structure and amount of remuneration after taking into account the market conditions in the same industry. Based on the Governance, Nomination and Remuneration Committee recommendation, the Board of Commissioners proposes the annual remuneration to the shareholders for their approval at the Annual GMS.

Dalam memberikan rekomendasi suatu struktur dan jumlah remunerasi, Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada indikator acuan penetapan remunerasi berupa tolok ukur industri yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kredibilitas. Sumber-sumber yang menjadi acuan di antaranya fungsi SDM Perseroan, konsultasi dengan perusahaan publik lain, dan konsultasi dengan ahli di bidang industri dari luar Perseroan.

When providing recommendation on the structure and amount of remuneration, the Governance, Nomination and Remuneration Committee refers to indicator of determining remuneration in the form of industry benchmarks from credible sources. These sources include the Company's Human Resources department, consultation with other public companies and industry experts from outside the Company.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Procedure for Determining Board of Commissioners' Remuneration



Struktur Remunerasi Komisaris Independen

Dalam RUPSTahunan 2019 untuk tahun buku 2018, pemegang saham menyetujui remunerasi tahun 2019 untuk Komisaris Independen adalah mencakup pembayaran (a) AS\$12.500 per triwulan dan (b) AS\$2.500 per kehadiran rapat.

Laporan ini menampilkan besaran remunerasi bagi Komisaris Independen dengan komponen remunerasi yang terdiri dari gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek. Perseroan tidak memberikan bonus kinerja, bonus non-kinerja, dan/atau opsi saham kepada Dewan Komisaris.

Independent Commissioners' Remuneration Structure

In the 2019 Annual GMS for the 2018 fiscal year, the shareholders agreed to the 2019 remuneration for the Independent Commissioners that comprised of payments (a) US\$12,500 per quarter and (b) US\$2,500 per meeting attendance.

The Independent Commissioners' remuneration consists of salaries and short-term employment benefits. The Company does not give performance bonuses, non-performance bonuses, and/or stock options to the Board of Commissioners.

REMUNERASI KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioners' Remuneration

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Jumlah Komisaris Independen Number of Independent Commissioner	Orang People	2	2	3	3	3
Gaji dan Imbalan Jangka Pendek Short-term Salaries and Benefits	Ribu AS\$ Thousand US\$	177.5	215.5	255.0	293.0	224.5

Kebijakan dan Pelaksanaan Tentang Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting Frequency Policy and Implementation

Rapat Dewan Komisaris merupakan forum bagi para anggota Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan secara kolektif, serta membahas kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dengan cara tatap muka maupun secara jarak jauh (*conference call*) menggunakan peralatan komunikasi, antara para anggota Dewan Komisaris yang berada di tempat yang berbeda.

The Board of Commissioners' meetings are a forum for its members to make collective decisions, and discuss the Board of Directors' performance in managing the Company. The Board of Commissioners meetings can be held face-to-face or via conference calls using communication equipment, for members of the Board of Commissioners who are in different locations.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan setidaknya satu kali setiap 2 (dua) bulan atau lebih sering sebagaimana diperlukan.
2. Presiden Komisaris memimpin Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan atau tidak hadir, rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris berhalangan atau tidak hadir, seorang anggota Komisaris akan ditunjuk oleh Komisaris yang menghadiri rapat tersebut untuk memimpin Rapat Dewan Komisaris.

Board of Commissioners' Meeting Policy

1. The Board of Commissioners' meetings are held at least once every 2 (two) months or more frequently as required.
2. The President Commissioner chairs the Board of Commissioners' meeting. In case of absence, the meeting shall be chaired by the Vice President Commissioner and in case the Vice President Commissioner is absent, a member of the Board of Commissioners shall be elected by the attending Commissioners to chair the meeting.

3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 4. Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada peserta rapat tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
 5. Bahan rapat harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 6. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
 7. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang diwakili dalam rapat dengan berlaku prinsip satu orang satu suara.
 8. Rapat-rapat Dewan Komisaris akan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan. Risalah rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 9. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis dengan menandatangani keputusan yang memuat usulan yang diajukan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris.
3. A member of the Board of Commissioners can be represented in the meeting by another Commissioner by virtue of a power of attorney.
 4. Invitations for the Board of Commissioners' meetings must be distributed to the meeting participants no later than 7 (seven) days prior to the scheduled meeting.
 5. The respective material must be made available to each member of the Board of Commissioners no later than 5 (five) days prior to the scheduled meeting.
 6. The Board of Commissioners' meeting can be held if more than 50% of the members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.
 7. Any decisions at the Board of Commissioners' meetings are made by consensus. In the event consensus is not reached, decisions are made by a majority vote of the members of the Board of Commissioners present or represented at the meeting; the principle of one person, one vote shall apply.
 8. The meetings shall be recorded in the minutes of the meeting and appropriately documented. The minutes of the meeting must be signed by all members present, and distributed to all members of the Board of Commissioners.
 9. The Board of Commissioners may also adopt lawful and binding resolutions without convening a meeting of the Board of Commissioners, provided all members of the Board of Commissioners approve in writing by signing a decree containing the proposal in question. Decisions taken in this manner have the same legal force as decisions taken at in-person meetings.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 kali. Rapat diselenggarakan secara tatap muka 3 kali dan melalui konferensi jarak jauh 3 kali. Semua keputusan rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dalam risalah rapat.

Board of Commissioners' Meetings Frequency and Attendance

In 2019, the Board of Commissioners held 6 meetings. Meetings were held in person 3 times and through conference calls 3 times. All decisions were documented in the minutes of the meetings.



PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Meetings

Peserta Rapat Attendees	Tanggal Rapat Meeting Date					
	30 Januari January 30	2 April April 2	4 Juni June 4	16 Agustus August 16	15 Oktober October 15	20 November November 20
Eduardo Bartolomeo	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
Mark James Travers	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Robert Alan Morris	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nobuhiro Matsumoto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mahendra Siregar*	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
Raden Sukhyar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luiz Fernando Landeiro	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
Cory McPhee	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✓

Catatan | Notes:

- Bapak Eduardo Bartolomeo mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris pada tanggal 7 Juni 2019; Eduardo Bartolomeo resigned as President Commissioner on June 7, 2019;
- Bapak Robert Alan Morris mengundurkan diri sebagai Komisaris pada tanggal 1 Januari 2019; Robert Alan Morris resigned as Commissioner on January 1, 2019;
- Bapak Mahendra Siregar mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen pada tanggal 4 November 2019; Mahendra Siregar resigned as Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019;
- Bapak Luiz Fernando Landeiro diangkat sebagai Komisaris efektif pada penutupan RUPS Tahunan 2019 pada tanggal 2 April 2019; Luiz Fernando Landeiro was appointed as Commissioner, effective on the closing of 2019 Annual GMS on April 2, 2019;
- Bapak Cory McPhee diangkat sebagai Komisaris efektif para penutupan RUPS Luar Biasa 2019 pada tanggal 16 Agustus 2019. Cory McPhee was appointed as Commissioner, effective on the closing of 2019 Extraordinary GMS on August 16, 2019.

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Meetings Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda
1	30 Januari January 30	<p>Agenda yang dibicarakan antara lain mengenai persetujuan, kondisi terkini operasional, keuangan, strategi usaha, kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan, SDM, komunikasi, keamanan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan, laporan komite audit dan unit audit internal, etika dan kepatuhan, tata kelola perusahaan, perkembangan pasar dan manajemen risiko.</p> <p>The agenda items included approvals, current operational conditions, finance, business strategy, legal and legislative policies, human resources, communications, security, and stakeholder relations, audit committee and internal audit unit reports, ethics and compliance, corporate governance, market development and risk management.</p>
2	2 April April 2	
3	4 Juni June 4	
4	16 Agustus August 16	
5	15 Oktober October 15	
6	20 November November 20	

JUMLAH RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019 DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Number of Board of Commissioners' Meeting 2019 and Members' Attendance

Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners Members	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Eduardo Bartolomeo	3	3	100%
Mark James Travers	6	6	100%
Robert Alan Morris	0	0	N/A
Nobuhiro Matsumoto	6	6	100%
Mahendra Siregar*	5	5	100%
Raden Sukhyar	6	6	100%
Luiz Fernando Landeiro	4	4	100%
Cory McPhee	2	1	50%

* Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 4 November 2019, sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah disetujui oleh RUPS. Sejak tanggal surat pengunduran diri sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS tersebut, Bapak Mahendra Siregar tidak lagi aktif dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Mahendra Siregar submitted his resignation letter as the Company's Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019, following his appointment as the Deputy Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the resignation became effective upon approval at the GMS. Between the date of his resignation until the GMS, Mahendra Siregar was not active as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan dengan Direksi yang diselenggarakan setidaknya satu kali dalam empat bulan. Rapat membahas risalah rapat sebelumnya, kinerja Perseroan serta isu-isu politik, ekonomi, sosial dan keamanan Negara yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Selama tahun 2019 Dewan Komisaris menyelenggarakan 3 kali rapat gabungan dengan Direksi, yang bertempat di Jakarta.

The Board of Commissioners also holds joint meeting with the Board of Directors at least once every four months. The meeting discuss the minutes of the previous meeting, the Company's performance, as well as political, economic, social and national security issues that could affect the Company's performance. In 2019, the Board of Commissioners held 3 joint meetings with the Board of Directors which took place in Jakarta.



PELAKSANAAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI TAHUN 2019

Board of Commissioners' Joint Meeting with the Board of Directors in 2019

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Tempat Rapat Meetings Place	Jumlah Peserta Rapat Attendees	
			Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	2 April April 2	Jakarta	5	3
2	16 Agustus August 16	Jakarta	5	6
3	20 November November 20	Jakarta	5	6

JUMLAH RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI TAHUN 2019 DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Joint Meeting with the Board of Directors in 2019 and Members' Attendance

Peserta Rapat Attendees	Jumlah Rapat Gabungan Number of Joint Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage Attendance
Eduardo Bartolomeo	1	1	100%
Mark James Travers	3	3	100%
Nobuhiro Matsumoto	3	3	100%
Mahendra Siregar*	2	2	100%
Raden Sukhyar	3	3	100%
Luiz Fernando Landeiro	2	2	100%
Cory McPhee	1	1	100%

* Bapak Mahendra Siregar telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 4 November 2019, sehubungan dengan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut efektif apabila telah disetujui oleh RUPS. Sejak tanggal surat pengunduran diri sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS tersebut, Bapak Mahendra Siregar tidak lagi aktif dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Mahendra Siregar submitted his resignation letter as the Company's Vice President Commissioner and Independent Commissioner on November 4, 2019, following his appointment as the Deputy Minister of Foreign Affairs for the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the resignation became effective upon approval at the GMS. Between the date of his resignation until the GMS, Mahendra Siregar was not active as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner.



Kebijakan Penilaian Terhadap Kinerja Anggota Direksi

Assessment Policy of The Board of Directors' Performance

Penilaian kinerja Direksi dilakukan Dewan Komisaris berdasarkan kriteria pencapaian target-target Perseroan yang dijabarkan sebagai *key performance indicators* ("KPI") dan telah ditetapkan pada setiap awal tahun. Penilaian dilaksanakan setiap akhir tahun, baik secara kolektif maupun individual, dengan mempertimbangkan pencapaian KPI dari setiap target.

Masing-masing anggota Direksi bertanggung-jawab untuk memberi bukti-bukti pencapaian target-target sesuai KPI kepada Dewan Komisaris. Dengan adanya aktivitas pemeliharaan yang terencana maupun tidak terencana di awal tahun, dan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi tahun 2019, secara keseluruhan kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan dinilai baik.

The Board of Directors' performance assessment procedure is conducted by the Board of Commissioners. The criteria is based on achieving the Company's targets defined as key performance indicators ("KPI"), which are set at the beginning of each year. Assessments are conducted at the end of each year, either collegially or individually, taking into account the achievement of each target.

Each member of the Board of Directors is responsible for providing evidence of target achievement to the Board of Commissioners. With planned and unplanned maintenance activities at the beginning of the year, and taking into account the challenges faced in 2019, the overall performance of the Board of Directors in managing the Company is considered good.

KRITERIA DAN HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI TAHUN 2019

Board of Directors' Performance Assessment Criteria and Result in 2019

Target	Bobot Penilaian Weighting	Pencapaian Achievement	Nilai Score
Mencapai Target kesehatan dan keselamatan kerja - kombinasi dari pelaksanaan sejumlah program terkait aspek kesehatan dan keselamatan, serta tingkat kecelakaan/insiden selama tahun 2019 Deliver occupational health and safety target - a combination of health and safety program execution and occurrence rate of injury/incident during the year 2019	10%	0	0
Mencapai penerapan bisnis berkelanjutan pada area lingkungan, penggunaan energi dan interaksi sosial. Deliver sustainable business practices in the environment, energy utilization and social interaction areas	10%	150	1.5
Mencapai target arus kas bebas: EBITDA – nilai investasi (tidak disesuaikan) Deliver targeted Free Cash Flows: EBITDA – investment (not adjusted)	10%	69.17	0
Mencapai target arus kas bebas: EBITDA – nilai investasi (d disesuaikan) Deliver targeted Free Cash Flows: EBITDA – investment (adjusted)	20%	0	0
Manajemen krisis dan restrukturisasi organisasi/budaya Crisis management and organization/cultural restructuring	20%	1.24	1.24
Mencapai agenda strategis yang sudah disetujui yang meliputi area berikut: pengembangan yang berkelanjutan, efisiensi biaya, pembenahan area kerja dan proses seleksi mitra untuk investasi proyek Deliver the agreed strategic agenda, which covers the following areas: continous improvement, cost efficiency, housekeeping and partner selection process for project investment	20%	108	1.08
Pemenuhan terhadap rencana produksi Adherence to production plan	10%	93.74	0.87



Kebijakan Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Members Performance Assessment Policy

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi/pencapaian atas indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum dari hasil penilaian, diketahui kinerja anggota Dewan Komisaris pada tahun 2019 telah memenuhi atau melampaui target.

Selanjutnya hasil penilaian Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Hasil penilaian menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham dalam RUPS.

The Governance, Nomination and Remuneration Committee conducts the performance evaluation for the Board of Commissioners' members. The assessments were carried out by comparing the realization/achievement of the key performance indicators set at the start of the year.

In general, the assessment results known for the Board of Commissioners' members performance in 2019 has met or exceeded target.

The Governance, Nomination and Remuneration Committee assessment results are reported to the Board of Commissioners. The assessment results form part of the Board of Commissioners' Report in the Company's Annual Report as submitted to the shareholders at the GMS.

KRITERIA DAN HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Board of Commissioners' Performance Assessment Criteria and Result in 2019

Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Pencapaian Achievement
Efektivitas dalam mengawasi pelaksanaan roadmap untuk melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam GCG Effectiveness in supervising the roadmap execution using the best practices in GCG	Melampaui Exceeding
Terlaksananya program-program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan Implementation of health and safety programs for employees	Melampaui Exceeding
Penentuan target bagi Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi serta evaluasi pada setiap triwulan Setting targets for Sub-Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors including their quarterly evaluation	Terpenuhi Met
Terlaksananya rencana bisnis tahunan serta strategi jangka panjang Execution of annual and long-term business plans	Melampaui Exceeding
Memonitor pelaksanaan dari program-program CSR Monitoring the implementation of CSR programs	Terpenuhi Met
Memonitor pelaksanaan program-program yang disepakati sebagai bagian dari rencana suksesi untuk calon-calon yang disiapkan untuk menggantikan anggota dari Direksi Monitoring the implementation of agreed programmes as part of succession plan for Board of Director members	Terpenuhi Met

Penilaian Terhadap Kinerja Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Committees Under the The Board of Commissioners' Performance Assessment

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta Komite Mitigasi Risiko. Sampai dengan tahun 2019, Perseroan belum melakukan penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Namun dengan komitmen peningkatan GCG di tahun-tahun mendatang, Perseroan sedang menyusun suatu proses penilaian atas kinerja Komite Audit, Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi dan Komite Mitigasi Risiko yang akan dilakukan setiap tahun dengan prinsip swa evaluasi dan hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Corporate Governance, Nomination and the Remuneration Committee, and the Risk Mitigation Committee. As of 2019, the Company has not yet assessed the performance of each committee under the Board of Commissioners. However, with its commitment to improve GCG in the coming years, the Company is preparing a process for evaluating their performances annually using the principle of self-assessment and the results will be reported to the Board of Commissioners.



Direksi

Board of Directors

Direksi bertanggung jawab secara kolegal mengelola Perseroan secara efektif, efisien dan hati-hati untuk kepentingan, maksud, dan tujuan Perseroan. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Presiden Direktur adalah setara. Di bawah koordinasi Presiden Direktur, Direksi mengawasi kinerja dan proses operasional, hukum, tanggung jawab sosial dan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

The Board of Directors is responsible for managing the Company effectively, efficiently and prudently in accordance with the Company's interest, objectives, and purposes. All member positions in the Board of Directors, including the President Director, are equal. Under the President Director's coordination, the Directors oversee the Company's overall performance, as well as operational, legal, social and financial responsibility processes.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:

- satu orang Presiden Direktur;
- satu orang Wakil Presiden Direktur;
- tidak lebih dari delapan orang Direktur.

Based on the Company's Articles of Association, the Company is managed by a Board of Directors consisting of a minimum of three but with not more than ten Directors with the following composition:

- one President Director;
- one Vice-President Director;
- not more than eight Directors.



Komposisi anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2019 terdiri dari enam orang, yakni satu orang Presiden Direktur, satu orang Wakil Presiden Direktur dan empat orang Direktur.

The Board of Directors' composition as at December 31, 2019 comprised one President Director, one Vice President Director and four Directors.

KOMPOSISI DIREKSI PER 31 DESEMBER 2019

Board of Directors' Composition as at December 31, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Nicolas D. Kanter	Presiden Direktur President Director
2	Febriany Eddy	Wakil Presiden Direktur Vice President Director
3	Bernardus Irmanto	Direktur Director
4	Dani Widjaja	Direktur Director
5	Agus Superiadi	Direktur Director
6	Vinicius Mendes Ferreira	Direktur Director

Penunjukan dan Kriteria Keanggotaan Direksi

Board of Directors' Appointment and Membership Criteria

Suksesi Direksi Perseroan di atur dalam sistem *Career and Succession Planning* ("CSP"). Sistem CSP menyediakan program-program penunjang perencanaan karir dan suksesi, antara lain, proses evaluasi kinerja karyawan, aspirasi karir, program pelatihan dan pengembangan diri.

The Company's Board of Directors' succession is regulated under a *Career and Succession Planning* ("CSP") system. The CSP system provides career planning and succession support programs, including employee performance evaluation processes, career aspirations, training programs and self-development.

Sistem CSP mewajibkan masing-masing anggota Direksi Perseroan menominasikan paling tidak seorang calon pengganti yang akan dikembangkan. Selain oleh Direksi yang menjabat, calon pengganti dapat juga diajukan oleh Pemegang Saham serta sumber profesional lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

The CSP system requires each member of the Company's Board of Directors to nominate at least one prospective replacement for development. Besides the Board of Directors, replacement candidates may also be submitted by the shareholders and other professional sources, appointed by the Board of Commissioners.

Sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi, calon pengganti akan direkomendasikan kepada Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya Komite melakukan penilaian calon pengganti dengan mempertimbangkan kualifikasi calon tersebut, kebutuhan Perseroan serta persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penilaian disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang akan membawa calon yang dipilih untuk diangkat dan ditetapkan oleh Pemegang Saham di dalam RUPS.

In accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy, prospective candidates will be recommended to the Governance, Nomination and Remuneration Committee. Further, the Governance, Nomination and Remuneration Committee will conduct assessments of the prospective candidates by considering the candidates' qualifications, the Company's needs, and the requirements set forth in the prevailing laws and regulations. The assessment results will be submitted to the Board of Commissioners, who will forward the nominated candidates for appointment, for determination by the shareholders in the GMS.

Masa Jabatan

Tenure

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan seorang anggota Direksi berlaku sejak tanggal penutupan RUPS saat anggota tersebut diangkat dan berakhir pada tanggal penutupan dua RUPS Tahunan berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu dan dengan alasan apapun sebelum masa jabatan anggota Direksi tersebut berakhir. Di akhir masa jabatan, anggota Direksi dapat dinominasikan untuk diangkat kembali.

Members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed by the GMS. The tenure for each member of the Board of Directors shall take effect from the close of the GMS, during which the member is appointed, and ends at the closing of the second Annual GMS after the date of appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time and for whatever reasons before the end of the member's tenure. At the end of their tenure, members of the Board of Directors may be nominated for reappointment.

Masa jabatan anggota Direksi akan otomatis berakhir dalam kondisi:

- mengundurkan diri;
- dinyatakan pailit atau berdasarkan keputusan pengadilan ditaruh di bawah pengampunan;
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- dilarang menjadi anggota Direksi karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- meninggal dunia atau tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Direktur.

Tenure of a member of the Board of Directors shall automatically terminate in the following conditions:

- they resign;
- they are declared bankrupt; or based on court decisions placed under guardianship;
- they are dismissed by virtue of a GMS resolution;
- they are prohibited from being a member of the Board of Directors due to prevailing laws and regulations;
- they pass away, or unable to perform their duties as a Director.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Board of Directors' Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi secara bersama-sama berwenang untuk mengambil keputusan bagi Perseroan dan memiliki lima tugas utama, yaitu terkait manajemen operasional, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial.

The Board of Directors members' duties and responsibilities are determined based on the Company's Articles of Association, the Board of Directors' Charter and the prevailing laws and regulations. The Board of Directors is jointly authorized to make decisions for the Company and has five main duties, which are related to operational management, risk management, internal control, communication and social responsibility.



Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

1. bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dengan didasarkan pada itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab penuh untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai manajemen Perseroan;
3. mengawasi, memelihara, serta mengelola aset-aset Perseroan;
4. mempersiapkan dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, serta risalah rapat Direksi;
5. melaporkan setiap saham yang dimiliki anggota Direksi maupun keluarga mereka di Perseroan maupun di perusahaan lain dengan cara memasukkan informasi ke dalam daftar khusus;
6. mempersiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diserahkan dalam RUPS setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
7. menyimpan semua catatan, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan;
8. meninjau dan memberikan masukan untuk semua masalah yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan/atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan yang berlaku;
9. menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
10. menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors' duties and responsibilities are as follows:

1. responsible for managing the Company in good faith and with full responsibility for the best interests of the Company and in accordance with the objectives and purposes of the Company;
2. applying corporate governance principles in carrying out the day-to-day duties for the management of the Company;
3. controlling, maintaining and managing the Company's assets;
4. preparing and maintaining the shareholder register, special register, minutes of GMS and minutes of the Board of Directors' meetings;
5. reporting any shares that they or their families own in the Company, or in other companies, by entering such information in a special register for this purpose;
6. preparing the Company's annual report and financial statements in accordance with prevailing laws and regulations and presenting them to the GMS after approval by the Board of Commissioners;
7. maintaining all records, minutes and any financial documents of the Company;
8. reviewing and providing recommendations on any matters requiring approval from the Board of Commissioners and/ or the GMS under the Articles of Association or prevailing laws and regulations;
9. preparing an annual work plan before the start of the following fiscal year;
10. holding a GMS in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Distribution of Duties and Responsibilities for Each Board of Directors Member

Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun demikian, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Each member of the Board of Directors carries out their decision-making duties in accordance with the division of duties and authority. However, the implementation of each member's duties in the Board of Directors remains a collegial responsibility.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Distribution of Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Nicolas D. Kanter	Presiden Direktur President Director	Seluruh kegiatan usaha dan juga bertanggung jawab khusus untuk tata kelola perusahaan, hukum, kepatuhan, audit internal dan sumber daya manusia. All business activities with specific responsibility for corporate governance, legal, compliance, internal audit and human resources.
Febriany Eddy	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Formulasi, inisiasi dan pengawasan strategis Perseroan, pengendalian internal dan manajemen risiko. Formulation, initiation, and Company strategic oversight, internal control and risk management.
Bernardus Irmanto	Direktur Director	Keuangan, akuntansi, perpajakan, hubungan dengan investor, teknologi informasi (IT), pengadaan barang dan jasa operasional serta strategis, logistik. Finance, accounting, taxation, investor relations, information technology (IT), operational and strategic goods and service procurement.
Dani Widjaja	Direktur Director	Pengembangan proyek untuk pemenuhan komitmen investasi berdasarkan KK. Project development for fulfilling investment commitments under the COW.
Agus Superiadi	Direktur Director	Komunikasi dan hubungan luar, tanggung jawab sosial perusahaan, layanan keamanan, dan layanan operasional lainnya. Communication and external affairs, corporate social responsibility, security services, and other operational services.
Vinicius Mendes Ferreira	Direktur Director	Operasi dan produksi, eksplorasi, keselamatan dan kesehatan karyawan, lingkungan hidup. Operations and production, exploration, employees' safety and health, the environment

Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi diharapkan membantu Direksi memenuhi tujuan-tujuan utama pengelolaan Perseroan, yang mencakup:

- melaporkan secara komprehensif, akurat dan tepat waktu, mengenai kegiatan bisnis dan sosial Perseroan secara umum, ataupun mengenai hal-hal tertentu yang dianggap material atau dapat berdampak signifikan pada Perseroan, pemegang saham ataupun pemangku kepentingan Perseroan;
- bertindak secara tepat waktu dan mengambil segala keputusan yang diperlukan sehubungan dengan bisnis dan operasi Perseroan sesuai dengan seluruh ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan atau kewajiban lainnya yang berlaku dalam kerangka kebijakan perusahaan terkini, dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham;

The distribution of duties and responsibilities between members of the Board of Directors is expected to assist the Board of Directors in fulfilling its main objective of managing the Company, and includes:

- comprehensive, accurate and timely reporting on the Company's business and social activities in general, or on certain matters deemed material or that might have a significant impact on the Company, its shareholders or stakeholders;
- acting in a timely manner and taking all necessary decisions in relation to the Company's business and operations in accordance with all applicable laws and regulations or other obligations in the current corporate policy framework, with a view to maximizing long-term value for shareholders;



- melakukan proses penetapan anggaran tahunan secara komprehensif dan memantau kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara seksama sesuai dengan rencana bisnis tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - mengkaji secara berkesinambungan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pelaksanaannya dalam semua bidang kegiatan utama, dengan memerhatikan faktor-faktor penting, antara lain perkembangan kondisi pasar, perubahan peraturan, hukum, dan teknologi yang terkait;
 - menerapkan kebijakan, prosedur dan proses-proses yang diperlukan guna memastikan standar integritas dan perilaku etika tertinggi di kalangan manajemen dan karyawan Perseroan;
 - memastikan keberkelanjutan usaha Perseroan dengan meminimalkan dampak operasional terhadap masyarakat dan lingkungan hidup sekitar.
- performing a comprehensive annual budgeting process and monitoring the Company's financial and operational performance carefully in line with the annual business plan as approved by the Board of Commissioners;
 - continuously reviewing short-term and long-term strategic plans and their implementation in all key areas of activity, take into account key factors, including the development of market conditions, regulatory changes, laws and related technologies;
 - implementing the policies, procedures and processes necessary to ensure the highest standards of integrity and ethical behavior among the Company's management and employees;
 - ensuring the sustainability of the Company's business by minimizing its operational impact on the surrounding community and the environment.

Ruang Lingkup dan Wewenang Direksi

Board of Directors' Scope of Work and Authorities

Ruang lingkup dan wewenang Direksi meliputi antara lain:

1. mewakili Perseroan pada tiap perkara dan dalam peristiwa apapun;
2. mengikutsertakan dan mengikat Perseroan secara hukum dengan pihak ketiga dan antara pihak ketiga dengan Perseroan;
3. menjalankan semua tindakan, baik yang terkait dengan manajemen maupun kepemilikan, dalam hal mengelola/melepaskan aset Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Anggaran Dasar atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. mengambil tindakan hukum untuk memindahkan atau menghilangkan hak atau penjaminan sejumlah lebih dari 50% dari total aktiva bersih Perseroan, baik dalam transaksi tunggal maupun beberapa transaksi yang berkaitan, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS;
5. tanpa mengurangi tanggung-jawabnya, Direksi melalui dua Direktur dapat mengangkat satu atau lebih karyawan(-karyawan) atau pihak(-pihak) lain sebagai kuasanya(-kuasa) sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan;
6. mengangkat, mengakhiri atau menanggukhan jabatan perorangan di bawah, setingkat manajer, atau di atasnya (atau setara);

The Board of Directors' authorities include:

1. representing the Company inside and outside the court in all matters and at any events;
2. engaging and legally binding the Company with third parties and between other parties and the Company;
3. performing all actions, whether regarding management or ownership, in managing/disposing of Company assets, except as stipulated otherwise in the Articles of Association or prevailing laws and regulations;
4. taking legal action to transfer or dispose of any right or pledge of the Company's assets of more than 50% of total net assets of the Company, either in a single transaction or several related transactions, subject to prior approval of the GMS;
5. without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors, through two Directors, may appoint one or more employee(s) or other person(s) as proxy (ies) in accordance with the criteria and standards established by the Board of Commissioners and the Company's Articles of Association;
6. appointing, removing or suspending any individual below, at, or higher than the general manager level (or equivalent);

7. mengangkat, mengakhiri jabatan, atau memberhentikan dengan sementara Sekretaris Perusahaan dari Perseroan dan Kepala Unit Audit Internal;
8. mengangkat, mengakhiri jabatan, atau memberhentikan dengan sementara karyawan senior pada divisi hubungan investor;
9. dengan tetap tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi dapat mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan amal, kontribusi masyarakat, kontribusi atau donasi lain (dalam bentuk uang maupun barang) dari atau atas nama Perseroan maupun anak perusahaan, sesuai dengan batasan yang digariskan oleh standar yang telah diberlakukan sebelumnya oleh Dewan Komisaris;
10. menata ulang organisasi pada departemen-departemen di bawah masing-masing anggota Direksi dan perubahan personil pada tingkat manajer atau di atasnya;
11. menentukan kebijakan umum Perseroan mengenai SDM serta menjalankan kebijakan yang telah disetujui;
12. mematuhi pedoman umum dan kebijakan bisnis Perseroan sebagaimana disarankan oleh Dewan Komisaris;
13. menentukan rencana strategis Perseroan, anggaran tahunan, serta kebijakan pengelolaan keuangan dan risiko Perseroan, menyerahkannya kepada Dewan Komisaris, kemudian melaksanakan inisiatif-inisiatif tersebut;
14. mengkaji dan memperbarui apabila diperlukan Piagam Direksi, Piagam Unit Audit Internal, Piagam Sekretaris Perusahaan dan piagam lainnya, apabila diperlukan, sesuai prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diberlakukan;
15. bertanggung jawab atas operasional Perseroan yang material dan isi setiap laporan tertulis atau presentasi kepada Dewan Komisaris;
16. mengidentifikasi dan mengevaluasi investasi, divestasi, dan peluang-peluang lain yang material bagi Perseroan;
17. melakukan perjanjian, kontrak dan penyelesaian yang merupakan materi kewajiban atau komitmen Perseroan dan kuasa yang didelegasikan, dalam setiap halnya sesuai dengan kewajiban yang material yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar;
18. membuka dan menutup kantor-kantor cabang Perseroan atau anak perusahaan dari kantor cabang tersebut;
19. melepaskan hak kontraktual yang dimiliki Perseroan (atau setiap anak perusahaannya), kecuali telah dibuat berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan;
7. appointing, removing or suspending the Company's Corporate Secretary and Head of the Internal Audit Unit;
8. appointing, removing or suspending a senior employee responsible for investor relations;
9. subject to the prevailing laws and regulations, making decisions on any charitable, community or other contribution or donation (in cash or in kind) by, or on behalf of, the Company or any Company's subsidiary, to an extent based on standards previously established by the Board of Commissioners;
10. restructuring the organization of departments under each member of the Board of Directors and any changes in personnel at the general manager level or higher;
11. determining the Company's general policies on human resources and executing approved policies;
12. complying with the general guidelines and business policies of the Company as recommended by the Board of Commissioners;
13. determining the Company's strategic plan, annual budget, and finance and risk management policies, submitting them to the Board of Commissioners, and subsequently carrying out those initiatives;
14. periodically reviewing and updating, where necessary, the Board of Directors' Charter, Internal Audit Charter, the Corporate Secretary Charter and any other charter as may be required under the GCG principles and prevailing laws and regulations and submission to the Board of Commissioners and subsequent execution thereof;
15. overseeing the Company's material operational matters and the content of any written report or presentation to the Board of Commissioners;
16. identifying and evaluating investments, divestments and other material opportunities available to the Company;
17. entering into agreements, contracts and settlements that constitute material liabilities, obligations or commitments by the Company and any delegation of such power, in each case in accordance with material liabilities/obligations established by the Board of Commissioners and the Articles of Association;
18. opening and closing branch offices of the Company or subsidiaries of those offices;
19. waiving of any proposed contractual right belonging to the Company (or any subsidiary), unless it has been made in accordance with criteria and standards previously established by the Board of Commissioners and the Company's Articles of Association;



- | | |
|--|---|
| <p>20. menetapkan kebijakan internal terkait batasan kewenangan setiap anggota Direksi dan seluruh jajaran administrasi organisasi Perseroan;</p> <p>21. mengatur strategi pengambilan suara yang akan didelegasikan Perseroan kepada perwakilannya di perusahaan, lembaga-lembaga dan organisasi lain yang pengelolaan atau hak suaranya dimiliki oleh Perseroan;</p> <p>22. menangani setiap permasalahan yang dianggap dapat memiliki atau memberikan dampak terhadap KK atau hak dan kewajiban Perseroan yang tercantum dalam KK;</p> <p>23. menangani setiap kegiatan akuisisi, divestasi, atau hibah atau hak atas tanah, termasuk, tanpa pengecualian, hak atas air, kayu, atau akses;</p> <p>24. membentuk komite(-komite) atau satuan(-satuan) tugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.</p> | <p>20. establishing internal policies regarding limits on the authority of each member of the Board of Directors and throughout the whole of the Company's administrative organization;</p> <p>21. setting the voting strategy to be followed by its proxies in the companies, institutions and other organizations in which the Company has management or voting rights;</p> <p>22. attending to any matter, which could reasonably be believed to have, or result in an impact on, the COW or the Company's rights and obligations under the COW;</p> <p>23. attending to any acquisition, divestments or other grant or receipt of land or land-based rights including without limitation, rights related to water, timber or access;</p> <p>24. establishing committee(s) or task force(s) to assist in the performance of its duties and responsibilities.</p> |
|--|---|

Dalam menjalankan tugas, Direksi mendapatkan pengawasan dan arahan oleh Dewan Komisaris. Untuk tindakan-tindakan tertentu, Direksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Direksi menentukan tingkat risiko yang dapat diterima Perseroan dalam hal menghadapi kepentingan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners provides supervision and direction to the Board of Directors when carrying out their duties. For certain actions, the Board of Directors needs prior approval from the Board of Commissioners. In terms of dealing with the interests and relationships with stakeholders, the Board of Directors determines the risk levels that the Company can accept.

Piagam Direksi

Board of Directors' Charter

Direksi menjalankan peran, tugas, tanggung jawab dan kewajiban dengan berpedoman pada Piagam Direksi yang diubah terakhir kali dan berlaku efektif sejak tanggal 4 September 2018. Piagam Direksi diterbitkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, POJK, dan Pedoman Umum GCG yang merupakan ekstraksi dari berbagai sumber, seperti Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola, ACGS, serta OECD Principles of Corporate Governance.

The Board of Directors' Charter serves as the guideline for performing the Board of Directors' roles, duties, responsibilities and obligations, and was last amended and became effective on September 4, 2018. The Board of Directors' Charter was issued based on the Company's Articles of Association, UUPT, the POJKs, and General Guidelines for GCG, extracted from various sources including: National Committee on Governance Policies; ACGS and OECD Principles of Corporate Governance.

Piagam Direksi diperbarui dari waktu ke waktu untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau apabila terdapat perubahan yang dianggap perlu oleh Perseroan.

The Board of Directors' Charter will be updated from time to time to ensure that it satisfies the prevailing laws and regulations requirements, or according to changes deemed necessary by the Company.

Piagam Direksi | Board of Directors' Charter

1	Operasi Direksi Board of Directors' Operations	1.1. Peran Direksi Board of Directors' Role
		1.2. Tanggung Jawab Direksi Board of Directors' Responsibility
		1.3. Pengambilan Keputusan Decision Making
		1.4. Akses Pada Informasi Access to Information
		1.5. Kehadiran dalam RUPS Attendance at GMS
		1.6. Rapat Meetings
		1.7. Mata Acara Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dengan Dewan Komisaris Agenda Items for Board of Directors' Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners
		1.8. Berita Acara Rapat Minutes
		1.9. Wewenang untuk Menunjuk Penasihat Independen Authority to Engage Independent Advisors
		1.10. Manajemen Risiko dan Kendali Internal Risk Management and Internal Control
		1.11. Tanggung jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
2	Struktur Direksi Board of Directors' Structure	2.1. Struktur Pelaporan Reporting Structure
		2.2. Komite dan Gugus Tugas Dibawah Direksi Committees and Task Forces Under the Board of Directors
3	Praktik-praktik Lain Direksi Other Practices of The Board of Directors	3.1. Kebijakan Perusahaan Company Policies
		3.2. Kepemilikan dan Perdagangan Saham Holding and Trading of Shares
		3.3. Benturan Kepentingan Conflicts of Interest
		3.4. Keterlibatan Dalam Kejahatan Keuangan Involvement in Financial Crime
		3.5. Pernyataan Informasi Information Disclosure
		3.6. Hubungan dengan Pemegang Saham Mayoritas Relationship with Majority Shareholders
		3.7. Rapat dengan Dewan Komisaris Meetings with The Board of Commissioners
		3.8. Pelatihan dan Pendidikan Direktur Directors' Education and Training
		3.9. Layanan Profesional Atau Bisnis oleh Direksi Professional or Business Services Provided by the Directors
4	Ketentuan Lain Miscellaneous	4.1. Masa Berlaku Effective Date
		4.2. Penerimaan dan Persetujuan Direksi Directors' Acceptance and Agreement
		4.3. Perubahan Atas Piagam Charter Amendments
		4.4. Dasar Hukum Legal Basis
		4.5. Benturan Kepentingan Conflicts of Interest



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

The Board of Directors' Implementation of Duties and Responsibilities

Selama tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mengurus Perseroan. Beberapa bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersifat strategis, di antaranya:

1. bersama dengan VCL dan SMM, Direksi menandatangani Perjanjian Pendahuluan dengan MIND ID, sebagai langkah awal kerja sama strategis dalam mengelola sumber daya mineral strategis di Indonesia. Berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1706/32/DJB/2019 tanggal 8 Oktober 2019, Pemerintah Republik Indonesia telah menunjuk MIND ID sebagai perwakilannya dalam mengambil alih 20% saham Perseroan untuk memenuhi kewajiban divestasi.
2. menyetujui realisasi belanja modal Perseroan tahun 2019 mencapai AS\$166,4 juta, meningkat dibanding realisasi tahun 2018 sebesar AS\$103,4 juta utamanya disebabkan oleh aktivitas pemeliharaan Larona Canal yang terencana untuk meningkatkan integritas struktural dari Larona Canal serta meningkatkan kecepatan air mengalir yang berfungsi untuk menambah pasokan energi.
3. menyelesaikan penilaian tanur listrik 4 dan melaksanakan *Furnace 4 rebuild* yang direncanakan di 4Q20 untuk memastikan produksi Perseroan tetap terjaga.
4. menyelesaikan sesi HIRA yang komprehensif di seluruh wilayah operasi Sorowako. Proses ini difokuskan pada potensi kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan kematian. Kendali dan mitigasi telah diidentifikasi dan rencana tindakan akan dilaksanakan di tahun 2020.
5. pada tahun 2019, untuk pertama kali sepanjang sejarah, Perseroan meraih predikat PROPER Hijau dari KLHK. Ini menandai untuk pertama kalinya penilaian prestisius tersebut diberikan kepada perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi di Indonesia. Sebelumnya, Perseroan sudah mempertahankan predikat PROPER Biru selama enam tahun penilaian berturut-turut dan tahun lalu menjadi kandidat PROPER Hijau.
6. Perseroan merealisasikan penghematan biaya sebesar AS\$28.9 juta dari target sebesar AS\$28 juta untuk tahun 2019.

During 2019, the Board of Directors performed its duties and responsibilities well. Their strategic duties and responsibilities included:

1. together with VCL and SMM, the Board of Directors signed a Heads of Agreement with MIND ID, as the first step of a strategic cooperation in managing strategic natural resources in Indonesia. Based on the Republic of Indonesia Ministry of Energy and Mineral Resources Letter No. 1706/32/DJB/2019 dated October 8, 2019, the Republic of Indonesia Government appointed MIND ID as its representative in the acquisition of 20% shares in the Company to fulfill the divestment obligation.
2. approved the Company's capital expenditure realization in 2019 amounting of US\$166,4 million, an increase compared to US\$103,4 million realization in 2018 primarily due to the Larona Canal planned maintenance activities to improve its structural integrity to increase waterflow and energy supply.
3. completed Furnace 4 assessment and implemented Furnace 4 rebuild plan in 4Q20 to ensure the Company's production is maintained.
4. completed a comprehensive HIRA session across the entire Sorowako operation. This process focused on potential events that could result in multiple fatalities. Controls and mitigations were identified and action plans will be implemented in 2020.
5. in 2019, for the first time in its history, the Company received Green PROPER from the KLHK. This was the first time this prestigious assessment was awarded to an integrated nickel mining and processing company in Indonesia. Previously, the Company had maintained its Blue PROPER for six consecutive years and last year the Company became a candidate for Green PROPER.
6. the Company realized cost savings of US\$28.9 million from a target of US\$28 million in 2019.

Kebijakan, Prosedur, Dasar Penetapan, Struktur Remunerasi Direksi

Board of Directors' Remuneration Policies, Procedures, Basis, and Structure

KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN DASAR PENETAPAN REMUNERASI

Remunerasi Direksi ditetapkan dan disetujui oleh RUPS. Para Pemegang Saham di dalam RUPS Tahunan mendelegasikan kewenangan menentukan remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris, untuk ditentukan melalui rapat Dewan Komisaris.

Usulan nilai remunerasi tahunan dan/atau paket remunerasi dipersiapkan berdasarkan tinjauan dan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi. Komite memberikan beberapa pertimbangan dalam menyampaikan rekomendasi remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris, yang dimaksudkan untuk tetap dapat menarik dan mempertahankan manajemen unggulan. Pertimbangan tersebut di antaranya adalah standar pasar pada industri yang sama.

REMUNERATION DETERMINATION POLICY, PROCEDURE AND BASIS

The Board of Directors' remuneration is determined and approved by the GMS. During the Annual GMS, the shareholders delegated authority for determining the Board of Directors' remuneration to the Board of Commissioners for determination through a Board of Commissioners' meeting.

The annual remuneration and/or remuneration package proposal is prepared based on reviews and recommendations from the Governance, Nomination and Remuneration Committee. The Governance, Nomination and Remuneration Committee considers several factors to attract and retain prime management, one being the current market standards in the same industry.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Board of Directors Remuneration Determination Procedure



STRUKTUR REMUNERASI DAN HUBUNGAN DENGAN KINERJA PERSEROAN

Perseroan menetapkan besaran remunerasi Direksi untuk tahun buku 2019 sebesar AS\$3.363 ribu. Jumlah tersebut terdiri atas gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek serta imbalan pasca-kerja. Selain bonus kinerja dan bonus yang tidak terkait dengan kinerja untuk tahun 2018 yang diterima di tahun 2019 sebagai bagian dari imbalan pekerjaan jangka pendek, anggota Direksi tidak menerima manfaat lainnya seperti opsi setara saham.

REMUNERATION STRUCTURE AND RELATIONSHIP WITH COMPANY'S PERFORMANCE

The Board of Directors' remuneration for fiscal year 2019 amounted to US\$ 3,363 thousand, and comprised of salaries and short-term employee benefits and post-employment benefits. Other than 2018 performance and non-performance related bonuses which were received in 2019 as part of the short-term employee benefits, members of the Board of Directors did not receive any other benefits such as stock options.



REMUNERASI DIREKSI (DALAM RIBU AS\$)

Board of Directors' Remuneration (In Thousand US\$)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Gaji dan Imbalan Jangka Pendek Salaries and Short-Term Employment Benefits	3,158.3	3,465	1,989	1,391	1,659.1
Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefits	204.7	167	159	138	174.4
Jumlah Total	3,363	3,632	2,148	1,529	1,833.5

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

Board of Directors Meetings' Policy and Implementation

- Rapat Direksi dilaksanakan setidaknya satu kali sebulan atau lebih sering sebagaimana diperlukan.
- Setiap hal penting atau material bagi Perseroan harus diinformasikan kepada Direksi untuk dilakukan pembahasan, dan bila perlu untuk diberikan keputusan.
- Presiden Direktur memimpin rapat Direksi. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir, rapat akan dipimpin Wakil Presiden Direktur. Dalam hal Wakil Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir, seorang anggota Direksi akan ditunjuk oleh Direktur yang menghadiri rapat tersebut untuk memimpin Rapat Direksi.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus disampaikan kepada peserta rapat tidak lebih dari tujuh hari sebelum rapat diadakan.
- Bahan rapat harus disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat lima hari sebelum rapat diselenggarakan.
- Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila lebih dari 50% anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari anggota Direksi yang hadir atau yang diwakili dalam rapat.
- The Board of Directors' meetings are held at least once a month, or more frequently if required.
- Any subject matter of material interest to the Company shall be brought before the Board of Directors for discussion, and if applicable, for decision-making.
- The President Director chairs the Board of Directors' meeting. In case of absence, the Vice President Director shall chair the meeting. In case the Vice President Director is absent, another member of the Board of Directors shall be elected by the attending Directors to chair the Board of Directors meeting.
- A member of the Board of Directors can be represented in the meeting by another Director by virtue of a power of attorney.
- Invitations for the Board of Directors' meeting must be distributed to the meeting participants no later than seven days prior to the scheduled meeting.
- The respective materials must be submitted to the meeting participants no later than five days prior to the scheduled meeting.
- A Board of Directors' meeting can be held if more than 50% of the Board of Directors' members are present or represented at the meeting.
- Any decision at the Board of Directors' meeting is made by consensus. In the event consensus is not reached, decisions are made by a majority vote by the Board of Directors' members present, or represented at the meeting, and the principle of one person, one vote shall apply.

9. Rapat-rapat akan dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
10. Risalah rapat harus ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan tertulis dengan menandatangani keputusan yang memuat usulan yang diajukan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

Sesuai dengan POJK 33, pada tahun berjalan Direksi Perseroan menyusun jadwal rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris untuk diselenggarakan di tahun berikutnya. Jadwal rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris tahun 2019 disusun pada akhir tahun 2018, sedangkan jadwal rapat tahun 2020 telah disusun pada saat Laporan ini ditulis.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2019, Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 31 kali. Rapat dihadiri Direksi dan selalu memenuhi kuorum seperti ditetapkan dalam Piagam Direksi. Frekuensi dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi dapat dilihat dalam tabel.

9. The meetings shall be recorded in meeting minutes and appropriately documented.
10. The minutes must be signed by all members present at the meeting and distributed to all members of the Board of Directors.
11. The Board of Directors may also adopt lawful and binding resolutions without convening a Board of Directors' meeting, provided all Board of Directors' members approve in writing by signing a decree containing the proposal in question. Decisions taken in this manner have the same legal force as decisions taken at legitimate meetings.

In accordance with POJK 33, during the current year the Company's Board of Directors prepares a schedule for the Board of Directors meetings and the joint meetings with the Board of Commissioners for the following year. The 2019 Board of Directors meetings and the joint meetings with the Board of Commissioners schedule were set at the end of 2018, while the 2020 meetings schedule was set when this Report was drafted.

BOARD OF DIRECTORS' MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

During 2019, the Board of Directors held 31 meetings. The meetings were attended by the Board of Directors and always met the quorum requirements as stipulated in the Board of Directors' Charter. The Board of Directors' Meeting frequency, and the attendance of Board of Directors' members can be seen in the following table.

JUMLAH RAPAT DIREKSI DI TAHUN 2019 DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI

Total Board of Directors' Meeting in 2019 and Members' Attendance

Nama Name	Jumlah Rapat Direksi Total Board of Directors' Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Nicolas D. Kanter	31	29	93.54%
Febriany Eddy	31	30	96.77%
Bernardus Irmanto	31	30	96.77%
Dani Widjaja	25	22	88%
Agus Superiadi	25	17	68%
Vinicius Mendes Ferreira	25	24	96%



TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI TAHUN 2019 DAN KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI

Board of Directors' Meeting 2019, Date dan Attendance

Bulan dan Tanggal Month and Date	Nama Name					
	Nicolas D. Kanter	Febriany Eddy	Bernardus Irmanto	Dani Widjaja	Agus Superiadi	Vinicius Mendes Ferreira
8 Januari January 8	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
23 Januari January 23	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
12 Februari February 12	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
26 Februari February 26	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
5 Maret March 5	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
12 Maret March 12	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
10 April April 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 April April 23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 Mei May 7	✓	✓	✓	✗	✓	✓
14 Mei May 14	✓	✓	✓	✗	✓	✓
21 Mei May 21	✓	✓	✗	✓	✓	✓
28 Mei May 28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 Juli July 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 Juli July 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Juli July 17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 Juli July 18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 Juli July 25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 Juli July 30	✓	✓	✓	✓	✗	✓
13 Agustus August 13	✓	✓	✓	✓	✗	✓
28 Agustus August 28	✓	✓	✓	✓	✗	✓
29 Agustus August 29	✗	✓	✓	✓	✗	✓
11 September September 11	✓	✗	✓	✓	✓	✓

Bulan dan Tanggal Month and Date	Nama Name					
	Nicolas D. Kanter	Febriany Eddy	Bernardus Irmanto	Dani Widjaja	Agus Superiadi	Vinicius Mendes Ferreira
27 September September 27	✓	✓	✓	✓	✗	✓
1 Oktober October 1	✓	✓	✓	✓	✗	✓
8 Oktober October 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 Oktober October 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 Oktober October 22	✓	✓	✓	✓	✗	✓
5 November November 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 November November 15	✓	✓	✓	✓	✗	✓
4 Desember December 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Desember December 17	✓	✓	✓	✗	✓	✗



AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2019
Board of Directors' 2019 Meeting Agenda

Bulan Month	Tanggal Date	Agenda
Januari January	8	<p>Agenda yang dibicarakan adalah untuk menyetujui, mengetahui, melaporkan dan/atau berdiskusi antara lain mengenai tinjauan visi dan misi Perseroan, kepatuhan, temuan internal audit, kinerja Perseroan, koordinasi operasional, lingkungan, keselamatan kerja, manajemen risiko, sistem manajemen dan pengelolaan SDM.</p> <p>The agendas discussed approving, understanding, reporting and/or discussing, among other matters, reviews of the Company's vision and mission, compliance, internal audit findings, the Company's performance, operational coordination, environment, work safety, risk management, HR and management systems.</p>
	23	
Februari February	12	
	26	
Maret March	5	
	12	
April April	10	
	23	
Mei May	7	
	14	
	21	
	28	
Juli July	1	
	9	
	17	
	18	
	25	
Agustus August	30	
	13	
	28	
September September	29	
	11	
	27	
Oktober October	1	
	8	
	14	
	22	
November November	5	
	15	
Desember December	4	
	17	

KEHADIRAN DAN FREKUENSI RAPAT GABUNGAN DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

Direksi wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Selama tahun 2019 Direksi menyelenggarakan 3 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Frekuensi dan kehadiran anggota Direksi dalam rapat gabungan dapat dilihat dalam tabel.

BOARD OF DIRECTORS' JOINT MEETING WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS ATTENDANCE AND FREQUENCY

The Board of Directors shall hold periodical joint meeting with the Board of Commissioners at least once every four months. During 2019, the Board of Directors held 3 joint meetings with the Board of Commissioners. The following table illustrates the frequency and attendance of Board of Directors' members in the joint meetings.

JUMLAH RAPAT GABUNGAN DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS 2019 DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI

Total and Attendance of Member of Board of Directors' in the Joint Meeting with the Board of Commissioners In 2019

Nama Name	Jumlah Rapat Direksi Total Board of Directors' Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Nicolas D. Kanter	3	3	100%
Febriany Eddy	3	3	100%
Bernardus Irmanto	3	3	100%
Dani Widjaja	2	2	100%
Agus Superiadi	2	2	100%
Vinicius Mendes Ferreira	2	2	100%

TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019 DAN KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI

Board of Directors' Joint Meeting 2019, Date and Attendance

Nama Name	Bulan dan Tanggal Month and Date		
	2 April April 2	16 Agustus August 16	20 November November 20
Nicolas D. Kanter	✓	✓	✓
Febriany Eddy	✓	✓	✓
Bernardus Irmanto	✓	✓	✓
Dani Widjaja	N/A	✓	✓
Agus Superiadi	N/A	✓	✓
Vinicius Mendes Ferreira	N/A	✓	✓



AGENDA RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Agenda of Board of Directors' Joint Meeting with the Board of Commissioners in 2019

Bulan Month	Tanggal Date	Agenda
April April	2	Agenda yang dibicarakan antara lain persetujuan risalah rapat sebelumnya dan pembahasan kondisi keamanan, politik, ekonomi, industri dan sosial di Indonesia maupun di negara lain yang memiliki dampak terhadap kegiatan operasi Perseroan The agenda included approval of minutes of previous meetings and discussions on security, political, economic, industrial and social conditions in Indonesia and in other countries which could impact the Company's operations
Agustus August	16	
November November	20	

Penilaian Kinerja Departemen/Unit Manajemen Pendukung Kinerja Direksi

Department/Management Unit Supporting the Board of Directors Performance Assessment

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi didukung departemen/unit manajemen yang menjadi bagian dari manajemen Perseroan. Uraian dan informasi tentang penilaian kinerja masing-masing departemen/unit manajemen dimaksud, disampaikan pada pembahasan masing-masing departemen/unit manajemen di bagian lain dalam Laporan ini.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by departments/units that form part of the Company's management. The description and information regarding the performance assessment of these department/units can be found in the discussion for each department/unit in other sections of this Report.

Informasi Mengenai Keputusan RUPS

Information Regarding GMS Resolutions

Uraian dan informasi mengenai keputusan RUPS, baik keputusan RUPS satu tahun sebelumnya maupun keputusan RUPS pada tahun buku disampaikan pada pembahasan mengenai RUPS di halaman 175 dalam Laporan ini.

A description and information regarding the GMS resolutions, both for previous year and the current year, can be found in the GMS section on page 175 of this Report.



Uraian Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Description Regarding Majority and Controlling Shareholders

Uraian dan informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali, disampaikan pada pembahasan mengenai Profil Perseroan di halaman 84 Laporan ini.

A description and information regarding the Majority and Controlling Shareholders can be found in the Company Profile section on page 84 of this Report.



Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Affiliation Between Members of the Board of Commissioners and Majority Shareholders and/or Controlling Shareholders

Uraian dan informasi mengenai pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali, disampaikan pada pembahasan mengenai Profil Perusahaan di halaman 75 Laporan ini.

A description and information regarding disclosure of affiliation between members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Majority Shareholders and/or Controlling Shareholders, can be found in the Company Profile section on page 75 of this Report.





Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Supporting Bodies

Komite Penunjang Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Committees

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris membentuk Komite Penunjang Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi, serta Komite Mitigasi Risiko. Untuk kebutuhan administrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris juga dibantu Sekretaris Perusahaan.

To support its supervisory function, the Board of Commissioners has established Board of Commissioners' Supporting Committees, namely Audit Committee, Governance Nomination and Remuneration Committee, and Risk Mitigation Committee. For its administrative needs in carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is also assisted by the Corporate Secretary.

Setiap Komite dipimpin oleh seorang Komisaris Independen sebagai ketua dan memiliki piagam sebagai pedoman kerja. Pembentukan Komite Penunjang Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan praktik-praktik GCG. Komite Penunjang Dewan Komisaris wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima, disertai rekomendasi jika diperlukan. Laporan ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, dan anggota komite.

Each Committee is chaired by an Independent Commissioner as Chairman and has a charter containing its working guidelines. The Board of Commissioners Supporting Committees' establishment was based on the provisions governing the implementation of GCG practices. The Board of Commissioners Supporting Committees must prepare reports for the Board of Commissioners for each assignment received, together with recommendations if needed. Reports are signed by the chairman, vice chairman and committee members.

Laporan ini akan menyampaikan uraian dan informasi masing-masing Komite, dengan mengacu pada ketentuan tentang penulisan Laporan Tahunan yang diterbitkan OJK.

This Report contains a description and information for each Committee, in accordance with the provisions for preparing an Annual Report issued by the OJK.

Departemen/Unit Manajemen Pendukung Kinerja Direksi

Board of Directors' Supporting Department/Management Units

Setiap departemen pendukung kinerja Direksi dipimpin pejabat perusahaan yang diangkat berdasarkan surat keputusan ("SK") yang diterbitkan Direksi. Secara berkala masing-masing departemen menyampaikan laporan kinerja kepada Direksi.

Each Board of Directors' supporting department/management unit is led by a company official appointed by a decree issued by the Board of Directors. Periodically, each department delivers performance reports to the Board of Directors.

Sesuai ketentuan tentang penulisan Laporan Tahunan yang diterbitkan OJK, uraian dan informasi terutama berkaitan dengan departemen Hukum, Sekretaris Perusahaan, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, dan Unit Pengendalian Internal.

In accordance with the provisions for preparing an Annual Report issued by OJK, the description and information mainly relate to the Legal Department, the Corporate Secretary, the Risk Management Unit, Internal Audit Unit and the Internal Control Unit.





Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah komite independen yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi proses dan integritas dari praktik tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada Perseroan. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Penetapan keanggotaan Komite mengacu pada POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Keanggotaan Komite terdiri atas tidak kurang dari tiga anggota, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.

Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen sebagai Ketua. Pada tahun 2018, Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Mahendra Siregar sebagai Ketua Komite Audit melalui keputusan Dewan Komisaris yang diambil pada rapat Dewan Komisaris tanggal 4 April 2018. Pengangkatan Ketua Komite Audit telah mempertimbangkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi.

Pada tanggal 4 November 2019, Mahendra Siregar mengundurkan diri dari posisinya, baik sebagai Komisaris Independen maupun sebagai Ketua Komite Audit Perseroan. Pengunduran diri tersebut menyusul penunjukan beliau sebagai Wakil Menteri Luar Negeri periode 2019 – 2024.

The Audit Committee is an independent committee that assists the Board of Commissioners in overseeing the Company's process and integrity governance, risk management and internal control practices. The Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners.

The Committee's membership was established based on POJK No.55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines for Audit Committees. The Committee's membership shall consist of at least three members, with at least one Independent Commissioner and parties from outside of the Company.

The Independent Commissioner chairs the Audit Committee. In 2018, the Board of Commissioners approved the appointment of Mahendra Siregar as Audit Committee Chairman based on the Board of Commissioners' meeting resolution dated April 4, 2018, after taking into account the Governance, Nomination and Remuneration Committee's recommendation.

On November 4, 2019, Mahendra Siregar tendered his resignation as the Company's Independent Commissioner and Audit Committee Chairman, following his appointment as Vice Minister of Foreign Affairs for the period of 2019 - 2024.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT TAHUN 2019

Audit Committee Composition in 2019

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Tenure
Mahendra Siregar*	Ketua Chairman	4 April 2018 – 25 Oktober 2019 April 4, 2018 – October 25, 2019
Dedi Rudaedi**	Anggota Member	Januari 2015 – 2 April 2019 January 2015 – April 2, 2019
Annie Margono***	Anggota Member	14 November 2017 – 13 November 2019 November 14, 2019 – November 13, 2019
Herwan Ng****	Anggota Member	1 May 2019 – sekarang May 1, 2019 - present

Keterangan | Notes:

* mengundurkan diri pada tanggal 4 November 2019 dan efektif sejak tanggal 25 Oktober 2019 | tendered resignation on November 4, 2019 and effective as of October 25, 2019

** masa jabatan kedua telah berakhir pada tanggal 2 April 2019 | second term of office ended on April 2, 2019

*** masa jabatan pertama telah berakhir pada tanggal 13 November 2019 | first term of office ended on November 13, 2019

**** diangkat oleh Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 1 May 2019 | appointed by the Board of Commissioner effective as of May 1, 2019



PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Audit Committee Members Profile

Periode jabatan: 1 May 2019 – Sekarang	Period in Office: May 1, 2019 – Present
Tempat dan Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 20 Juli 1972	Place and Date of Birth: Tanjung Pandan, July 20, 1972
Usia: 47 Tahun per 31 Desember 2019	Age: 47 Years as at December 31, 2019
Kewarganegaraan: Indonesia	Nationality: Indonesian
Riwayat Pendidikan 1. Master of Business Administration, Edinburgh Business School, Heriot Watt University 2. Sarjana Ekonomi, Universitas Tarumanagara	Education History 1. Master of Business Administration, Edinburgh Business School, Heriot Watt University 2. Bachelor's Degree in Economy, Universitas Tarumanagara
Riwayat Jabatan Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit melalui keputusan tertulis Dewan Komisaris tanggal 1 May 2019.	Position History Appointed as Audit Committee member based on a written resolution of the Board of Commissioners dated May 1, 2019.
Pengalaman Kerja: <ul style="list-style-type: none"> Finance Director and Chief Financial Officer, Rio Tinto Indonesia (2010-2019) Controller, Rio Tinto Indonesia (2005-2010) Assurance and Business Advisory, Senior Manager, Pricewaterhouse Coopers, Indonesia and Netherlands (1995-2005) 	Working Experience: <ul style="list-style-type: none"> Finance Director and Chief Financial Officer, Rio Tinto Indonesia (2010-2019) Controller, Rio Tinto Indonesia (2005-2010) Assurance and Business Advisory, Senior Manager, Pricewaterhouse Coopers, Indonesia and Netherlands (1995-2005)
Rangkap Jabatan: <ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Audit PT Maybank Indonesia Finance (2015 – sekarang) Anggota Komite Audit PT Red Planet Indonesia Tbk (2015 – sekarang) Anggota Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2018 – sekarang) Anggota Komite Audit PT Goodyear Indonesia (2013 - sekarang) Ketua Komite Audit Hewlett Packard Finance Indonesia (2016 - sekarang) Komisaris Independen Hewlett Packard Finance Indonesia (2016 - sekarang) 	Concurrent Position: <ul style="list-style-type: none"> Audit Committee Member of PT Maybank Indonesia Finance (2015 - present) Audit Committee Member of PT Red Planet Indonesia Tbk (2015 - present) Audit Committee Member of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2018 - present) Audit Committee Member of PT Goodyear Indonesia (2013 - present) Audit Committee Chairman of Hewlett Packard Finance Indonesia (2016 - present) Independent Commissioner of Hewlett Packard Finance Indonesia (2016 - present)



Herwan Ng
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit

Audit Committee Members Independency Statement

Setiap anggota Komite Audit diwajibkan memberikan pernyataan independensi, yang diperbarui setiap tahun. Pernyataan independensi Komite Audit disusun sesuai POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 7, terkait Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit.

Each Audit Committee member is required to provide an annual independency statement. The independency statement is prepared based on Article 7 of POJK No.55/POJK.04/2015 concerning the Audit Committee Establishment and Work Guidelines, relating to the Audit Committee Membership's Requirement and Term of Office.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT TAHUN 2019

Audit Committee Independency Statement in 2019

Pernyataan Independensi Komite Audit Tahun 2019 Independency Statement of Audit Committee in 2019	Anggota Komite Audit Anggota Komite Audit			
	Mahendra Siregar	Dedi Rudaedi	Annie Margono	Herwan Ng
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain pada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir. Has not worked for a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraiser Office or any other party providing assurance, non-assurance, appraisal and/or other consulting services to the Company within the last six month.	√	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. Is not a person who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company in the last six month, except as Independent Commissioner.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Does not own direct or indirect shares in the Company.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Does not have direct or indirect business relationships with the Company business activities.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain maupun Pemegang Saham. Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the Company's Majority Shareholders.	√	√	√	√



Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang menjadi pedoman anggota Komite dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris. Perubahan terakhir terhadap Piagam tersebut disetujui Dewan Komisaris melalui keputusan Dewan Komisaris yang diambil pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Agustus 2019.

The Audit Committee has a Charter to guide the Committee members in carrying out their roles, duties and responsibilities when assisting the Board of Commissioners. The Charter was updated and approved by the Board of Commissioners at the Board of Commissioners' meeting on August 16, 2019.

Piagam Komite Audit memuat tentang:

1. Maksud dan Tujuan;
2. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang;
3. Pelaporan;
4. Keanggotaan Komite Audit;
5. Proses Kerja;
6. Rapat Komite Audit;
7. Evaluasi Kinerja; dan
8. Ketentuan Lain.

The Audit Committee Charter includes:

1. Purpose and Objectives;
2. Duties, Responsibilities and Authorities;
3. Reporting;
4. Audit Committee Membership;
5. Working Processes;
6. Audit Committee Meetings;
7. Performance Assessment; and
8. Miscellaneous.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee's Duties and Responsibilities

1. Pelaporan Keuangan

- 1.1. Melakukan telaah dan analisis terhadap kehandalan dan objektivitas atas laporan keuangan Perseroan (seperti laporan posisi keuangan, proyeksi dan laporan terkait keuangan lainnya) yang akan diterbitkan kepada publik dan pihak luar lainnya (termasuk pihak pemerintah dan badan regulator); dan
- 1.2. Melakukan telaah dan menilai keberatan sehubungan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada Perseroan, serta mengawasi rencana tindakan yang timbul dari keberatan tersebut. Keberatan harus disampaikan secara tertulis kepada Komite Audit. Untuk menangani keberatan yang diterima, Komite Audit dapat meminta investigasi audit untuk dilakukan oleh Unit Audit Internal dan/atau manajemen Perseroan dan/atau pihak ketiga yang independent. Seluruh keberatan yang dapat dibuktikan akan dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit akan mengawasi tindak lanjut dari rencana tindakan untuk menanggapi keberatan tersebut.

1. Financial Reports

- 1.1. Review and analyze the reliability and objectivity of the Company's financial reports (such as financial statements, projections and other financially-related reports) intended for issuance to the public and other external parties (including governmental entities and regulatory agencies); and
- 1.2. Review and assess complaints related to the accounting and financial reporting processes in the Company and monitor the action plan based on the complaint. Complaints must be submitted in written to the Audit Committee. To handle the received complaints, the Audit Committee may request an audit investigation be performed by the Internal Audit Unit and/or Company's management and/or an independent third party. All proven complaints will be reported to the Board of Directors, and the Audit Committee will monitor the follow up of the action plans to address the complaints.

2. **Aktivitas Manajemen Risiko**
Melakukan telaah dan analisis atas aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, melalui koordinasi dengan Komite Mitigasi Risiko.
 3. **Aktivitas Assurance – Audit Internal**
 - 3.1. Menelaah dan menganalisa rencana, kemajuan dan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh Unit Audit Internal, termasuk laporan audit dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menilai apakah risiko-risiko utama telah dievaluasi dan ditangani secara memadai serta untuk memastikan kecukupan dalam kebijakan pengendalian internal;
 - 3.2. Mengawasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi terkait dengan temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh Unit Audit Internal; dan
 - 3.3. Menelaah objektivitas dan independensi dari Unit Audit Internal.
 4. **Aktivitas Assurance – Audit Eksternal**
 - 4.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian auditor eksternal Perseroan;
 - 4.2. Melakukan telaah dan evaluasi terhadap rencana audit, kemajuan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan auditor eksternal Perseroan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan OJK yang berlaku. Hasil evaluasi terhadap kinerja jasa audit oleh eksternal auditor disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun buku;
 - 4.3. Memberikan pendapat yang independen pada saat terjadi perbedaan pendapat antara Direksi Perseroan dan auditor eksternal atas jasa yang diberikan;
 - 4.4. Melakukan telaah terhadap objektivitas dan independensi, ruang lingkup pekerjaan dan biaya audit dari auditor eksternal Perseroan; dan
 - 4.5. Mengawasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.
 5. **Ketentuan Lain**
 - 5.1. Mengambil tindakan yang dianggap perlu atas hal-hal lain sebagaimana dapat diminta oleh Dewan Komisaris.
 - 5.2. Menganalisa dan menilai potensi benturan kepentingan Perseroan dan memberikan masukan lebih lanjut kepada Dewan Komisaris atas hal tersebut.
 - 5.3. Menjaga kerahasiaan dari dokumen, data, dan informasi Perseroan; dan
2. **Risk Management Activities**
Review and analyze the risk management activities performed by the Board of Directors, in coordination with the Risk Mitigation Committee.
 3. **Assurance Activities - Internal Audit**
 - 3.1. Review and analyze the plans, progress and results of activities conducted by the Internal Audit Unit, including its audit report and recommendations to the Board of Directors and the Board of Commissioners to assess whether key risks are appropriately evaluated and addressed and to ensure the adequacy of internal control policies;
 - 3.2. Oversee the follow-up by the Board of Directors with regards to the findings and recommendations of the Internal Audit Unit; and
 - 3.3. Review the objectivity and independence of the Internal Audit Unit.
 4. **Assurance Activities - External Audit**
 - 4.1. Provide recommendations to the Board of Commissioners with regards to the appointment, re-appointment and dismissal of the Company's external auditor;
 - 4.2. Review and evaluate the audit plan, progress and results of activities conducted by the Company's external audit based on the criteria established by the applicable OJK regulations. The results of the evaluation for the performance of audit service by the external auditor is submitted to the OJK within six months after fiscal year ended;
 - 4.3. Provide independent opinion in the event of disagreement between the Board of Directors and the external auditor for services rendered;
 - 4.4. Review the objectivity and independence, audit scope of work and audit fees of the Company's external auditors; and
 - 4.5. Oversee the follow-up by the Board of Directors with regard to the findings and recommendations from by the external auditor.
 5. **Miscellaneous**
 - 5.1. Take action on such other matters as the Board of Commissioners may from time to time request;
 - 5.2. Analyze and assess the Company's potential conflicts of interest and further advise the Board of Commissioners of such matters;
 - 5.3. Analyze and assess the Company's compliance with applicable laws and regulations; and



5.4. Menganalisa dan menilai kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4. Analyze and assess the Company's compliance with applicable laws and regulations.

Setiap anggota Komite melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik serta penuh kehati-hatian, bertanggung jawab penuh dan sesuai dengan:

- Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Seluruh ketentuan OJK dan BEI
- Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan
- Piagam Komite Audit
- Instruksi dari Dewan Komisaris

Each member of the Committee shall perform his/her duties and responsibilities in good faith, with due care, full responsibility and in accordance with:

- All prevailing laws and regulations
- All OJK and IDX provisions
- The Company's Articles of Associations and policies
- Charter of the Audit Committee
- Instructions from the Board of Commissioners

Kebijakan dan Pelaksanaan Tentang Frekuensi Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Frequency Policy and Implementation

Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan secara berkala. Selama tahun 2019 Komite telah mengadakan lima kali rapat dengan manajemen dan Unit Audit Internal Perseroan, sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur OJK.

The Audit Committee shall meet periodically, at least once every three months. During 2019, the Committee held five meetings, with the Company's management and the Internal Audit Unit, thus fulfilling the requirement set by OJK.

Rapat-rapat tersebut membahas, antara lain, laporan keuangan, rencana dan hasil audit yang dilakukan auditor eksternal Perseroan, potensi permasalahan hukum dan pajak, pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko, serta kegiatan dan permasalahan audit internal. Komite Audit juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang menunjuk pada Laporan Komite Audit. Jumlah dan persentase kehadiran masing-masing anggota tersaji dalam tabel di bawah ini.

The meetings discussions included: financial statements, audit plans and the Company's external auditor results, potential legal and tax issues, implementation of internal controls and risk management, as well as internal audit activities and problems. In addition, the Audit Committee carried out activities referring to the Audit Committee Report. The number and attendance frequency for each member is presented as in the table below.

JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2019 DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE

Number of Audit Committee Meetings in 2019 and Level of Attendance by Committee Member

Nama Anggota Komite Committee Member Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Mahendra Siregar*	Ketua Chairman	5	5	100%
Dedi Rudaedi**	Anggota Member	1	1	100%
Annie Margono***	Anggota Member	5	2	40%
Herwan Ng****	Anggota Member	3	3	100%

Keterangan | Notes:

* Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 25 Oktober 2019. | Tendered resignation effective as of October 25, 2019.

** Masa jabatan kedua telah berakhir pada tanggal 2 April 2019. | Second term of office ended on April 2, 2019.

*** Masa jabatan pertama telah berakhir pada tanggal 13 November 2019. | First term of office ended on November 13, 2019.

**** Diangkat oleh Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Mei 2019. | Appointed by the Board of Commissioner effective as of May 1, 2019.

Pendidikan dan Pelatihan Anggota Komite Audit

Audit Committee Members' Education and Training

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Audit mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

During 2019, members of the Audit Committee participated in several educational and training activities, to support the implementation of the Audit Committee's duties and responsibilities.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti Herwan Ng pada tahun 2019 antara lain:

Educational and training activities for Herwan Ng in 2019, included:

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT TAHUN 2019

Number of Audit Committee Meetings in 2019 and Attendance Frequency by Committee Members

No	Nama Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time	Penyelenggara Organizer
1	Fraud Risk Management	15 Mei 2019 May 15, 2019	Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI")
2	Manajemen Pajak Sehubungan Tax Audit dan Surat Pemberitahuan (Masa dan Tahunan) Tax Management Regarding Tax Audit and Notification (Periodic and Annual)	24 Oktober 2019 October 24, 2019	
3	Kode Etik Profesi Akuntan Publik Ketentuan Independensi dalam Audit atas Laporan Keuangan berdasarkan Kode Etik Akuntan Publik 2018 Public Accountants Professional Code of Ethics for Independence in Audits of Financial Statements based on the Code of Ethics for Public Accountants 2018	22 November 2019 November 22, 2019	
4	Workshop Penyusunan Annual Report (Laporan Tahunan) Annual Report Preparation Workshop	26 November 2019 November 26, 2019	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee Duties and Responsibilities Implementation

Selama tahun 2019 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang meliputi:

During 2019, the Audit Committee carried out a number of activities in performing its duties and responsibilities, comprised of:

1. Rapat Komite Audit dengan manajemen Perseroan;
2. Ketua Komite Audit ikut dalam rapat Dewan Komisaris dengan manajemen Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; dan
4. Membuat laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

1. Audit Committee meetings with the Company's management;
2. Audit Committee Chairman participated in Board of Commissioners meetings with the Company's management;
3. Provided recommendation with regards to the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm; and
4. Prepared an evaluation results report on the audit service performance for the annual historical financial information by the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.



Laporan Komite Audit

Audit Committee Report

Komite Audit beranggotakan Mahendra Siregar sebagai Ketua, Annie Margono, dan Herwan Ng yang menggantikan anggota sebelumnya Dedi Rudaedi. Ketua Komite Audit juga menjabat sebagai Komisaris Independen.

The Audit Committee members are Mahendra Siregar as the Chairman, Annie Margono and Herwan Ng who replaced Dedi Rudaedi. The Audit Committee Chairman is also an Independent Commissioner.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang terakhir kali diperbaharui dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada 16 Agustus 2019. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap fungsi pengawasan atas proses serta integritas dari praktik tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian internal di dalam Perseroan.

The Audit Committee's roles and responsibilities are regulated by the Audit Committee's Charter which was last updated and approved by the Board of Commissioners on August 16, 2019. The Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners and to assist the Board in overseeing the process and integrity of governance, risk management and internal control practices in the Company.

Berikut adalah rangkuman dari kegiatan utama sesuai dengan pedoman/piagam Komite Audit yang dilakukan dalam rapat-rapat Komite Audit, berupa peninjauan terhadap:

In accordance to the Audit Committee's guidelines/charter, the following summarizes the main activities conducted at the Audit Committee meetings, review of:

- Laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, 31 Maret 2019, 30 Juni 2019, 30 September 2019, dan 31 Desember 2019.
- Presentasi oleh auditor eksternal Perseroan mengenai hasil audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, 30 Juni 2019, dan 31 Desember 2019, termasuk komentar mengenai perbaikan terhadap proses-proses pengendalian serta tanggapan manajemen. Termasuk juga presentasi atas rencana audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019.
- Pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan pembuatan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- Surat Ketetapan dan perlakuan perpajakan termasuk permasalahan perpajakan yang berpotensi memiliki dampak terhadap laporan keuangan Perseroan.
- Kasus hukum yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap Perseroan.
- Laporan Unit Audit Internal serta status pelaksanaan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Unit Audit Internal Perseroan.
- Status pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Unit Audit Internal untuk tahun 2018 dan 2019, dan dukungan yang dibutuhkan oleh unit Audit Internal untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya.

- The Company's financial statements for the periods ended December 31, 2018, March 31, 2019, June 30, 2019, September 30, 2019 and December 31, 2019.
- Presentation by the Company's external auditor regarding the audit results of the Company's financial statements for the periods ended December 31, 2018, June 30, 2019 and December 31, 2019, including comments regarding the control process improvement and management's responses. The presentation also includes the external auditor's audit plan of the Company's financial statements for the periods ended on June 30, 2019 and December 31, 2019.
- The performance of the audit service on the Company's annual historical financial information by the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and to prepare a recommendation with regard to the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
- Tax assessment and treatment including tax issues that may potentially have impact to the Company's financial statements.
- Legal cases that may have a potential impact to the Company.
- Internal Audit Unit's report and implementation status of the recommendations issued by the Internal Audit Unit.
- Implementation status of Internal Audit Unit's Annual Audit Plan for 2018 and 2019 and the support needed by the Internal Audit Unit to perform its function and duties.

- Rencana kerja Unit Audit Internal untuk tahun 2020 beserta penilaian risiko, lingkup serta metodologinya.
- Aktivitas dan prosedur manajemen risiko Perseroan.

Pendapat utama yang disampaikan oleh Komite Audit adalah:

- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019, dan periode yang berakhir pada 31 Maret 2019, 30 Juni 2019, dan 30 September 2019, telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia untuk dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk diterbitkan.
- Manajemen telah mengambil tindakan perbaikan yang memadai terhadap permasalahan dan temuan audit dari auditor eksternal Perseroan.
- Manajemen telah melakukan usaha-usaha yang signifikan untuk meningkatkan pengendalian internal Perseroan baik pada rancangan maupun pelaksanaannya.
- Pengendalian internal telah ditetapkan dan dilaksanakan untuk mengelola risiko Perseroan pada tingkat yang wajar.

Ketua Komite Audit

Penilaian Kinerja Unit Audit Internal

Penilaian terhadap kinerja Unit Audit Internal dilakukan melalui penilaian secara kolegial oleh Direksi berdasarkan manajemen dan pelaksanaan audit, maupun penyampaian dan kualitas laporan-laporan audit. Berdasarkan penilaian tersebut, kinerja Unit Audit Internal di tahun 2019 telah memenuhi ekspektasi. Unit Audit Internal akan terus meningkatkan proses, metode, alat-alat penunjang serta kualitas dan keahlian anggotanya dalam memberikan nilai tambah bagi praktik-praktik tata kelola di Perseroan.



Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi

Governance, Nomination and Remuneration Committee

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah membantu Dewan Komisaris, terkait aspek tata kelola perusahaan, proses nominasi dan remunerasi. Komite dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris tertanggal 27 Maret 2017.

- Internal Audit Unit's Annual Audit Plan for 2020 together with its risk assessment, scope and methodology.
- The Company's risk management activities and procedure.

The main opinions expressed by the Audit Committee are:

- The Company's financial statements for the year ended as at December 31, 2018, March 31, 2019, June 30, 2019, September 30, 2019 and December 31, 2019, were presented fairly in accordance to the Indonesian's Financial Accounting Standard for approval by the Board of Commissioners for issuance.
- Management have taken proper corrective actions on the audit problems and findings raised by the Company's external auditor.
- Management have made a significant effort to improve the Company's internal control both in its design and implementation.
- The internal control has been established and implemented to manage the Company's risk to a reasonable level.

Chairman of The Audit Committee

Internal Audit Unit Performance Assessment

Internal Audit Unit performance assessment is conducted through collegial assessment by the Board of Directors based on audit management and implementation, as well as the delivery and quality of the audit reports. Based on the assessment, the Internal Audit Unit performance in 2019 has met the expectation. The Internal Audit Unit will continue to improve its processes, methods, tools and also the member's quality and skills in providing added value to corporate governance best practices in the Company.



Keanggotaan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi

Governance, Nomination and Remuneration Committee Membership

Keanggotaan Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi ditetapkan mengacu pada POJK No.34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Publik. Berdasar ketentuan tersebut, komposisi Komite paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota, dengan ketentuan satu orang anggota merangkap ketua yang merupakan Komisaris Independen. Anggota lain Komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak dari luar Perseroan maupun pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

Penunjukan anggota Komite dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dan dikukuhkan melalui keputusan Dewan Komisaris. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, periode dan masa jabatan anggota Komite adalah dua tahun, yang diadaptasi dari masa jabatan Dewan Komisaris. Selama tahun 2019 ada perubahan keanggotaan Komite. Komposisi keanggotaan Komite per 31 Desember 2019 terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang Anggota.

The Governance, Nomination and Remuneration Committee Members were appointed based on POJK No.34/POJK.04/2014 regarding Public Company's Nomination and Remuneration Committee. The Committee composition shall consist of at least three members with the provision that the Chairman is an Independent Commissioner. Other members may come from the Board of Commissioners, parties from outside the Company, as well as those who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of HR.

Committee members are appointed through Board of Commissioners' meetings, and confirmed through a Board of Commissioners' decision. In accordance with the Company's Articles of Association, the period and term of office for Committee members is two years, in line with the Board of Commissioners' tenure. In 2019, there were changes to the Committee membership. The Committee membership as of December 31, 2019 comprised 1 Chairman and 3 members.

KOMPOSISI KOMITE TATA KELOLA, NOMINASI DAN REMUNERASI PER 31 DESEMBER 2019

Governance, Nomination and Remuneration Committee Composition as at December 31, 2019

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penunjukkan Date of Appointment
Raden Sukhyar	Ketua Chairman	20 November 2019 November 20, 2019
Luiz Fernando Landeiro	Anggota Member	2 April 2019 April 2, 2019
Mark James Travers	Anggota Member	3 September 2018 September 3, 2018
Nobuhiro Matsumoto	Anggota Member	20 Juli 2018 July 20, 2018

Profil Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi

Governance, Nomination and Remuneration Committee Members Profile

Seluruh anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Perseroan. Uraian dan Informasi lain mengenai Profil para Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi dapat dilihat pada bahasan mengenai Dewan Komisaris Perseroan pada Profil Perseroan dalam Laporan ini.

All members of the Governance, Nomination and Remuneration Committee are Commissioners of the Company. The members of the Governance, Nomination and Remuneration Committee profiles can be found in the Company Profile section in this Report.

INFORMASI TERKAIT PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA, NOMINASI DAN REMUNERASI

Governance, Nomination and Remuneration Committee Member Information

Nama Name	Jabatan Position	Halaman Dalam Laporan Pages' Number on The Report
Mark James Travers	Anggota Member	66
Raden Sukhyar	Ketua Chairman	68
Nobuhiro Matsumoto	Anggota Member	69
Luiz Fernando Landeiro	Anggota Member	70

Pernyataan Independensi Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi

Governance, Nomination and Remuneration Committee Members
Independency Statement

Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan wajib memberikan pernyataan independensi. Ketentuan tentang hal tersebut diatur dalam POJK No.34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 3 mengenai Keanggotaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

Sampai dengan akhir tahun 2019 pernyataan independensi telah diberikan oleh Raden Sukhyar sebagai Ketua Komite, yang merupakan Komisaris Independen dan berasal dari luar Perseroan.

Committee members from outside the Company must provide an independency statement. Provisions regarding this matter pertain to POJK No.34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies, Article 3 concerning Membership. Based on these provisions, Committee members from outside the Company must fulfill the following conditions: have no affiliations with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Company's Majority Shareholders.

At the end of 2019, an independency statement had been given by Raden Sukhyar as Committee Chairman who is an Independent Commissioner and from outside of the Company.

Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi

Governance, Nomination and Remuneration Committee Charter

Komite melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi yang telah diperbaharui dan berlaku sejak 27 Maret 2017.

Piagam Komite tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi memuat tentang:

- Maksud dan Tujuan
- Tanggung Jawab dan Kewajiban
- Wewenang
- Keanggotaan Komite Tata Kelola Nominasi dan Remunerasi
- Praktik-praktik Lain Komite
- Ketentuan Lain

The Committee carries out its duties and responsibilities based on the Governance, Nomination and Remuneration Committee Charter, last updated and became effective on March 27, 2017.

The Governance, Nomination and Remuneration Committee Charter includes:

- Purpose and Objectives
- Responsibilities and Obligations
- Authorities
- Governance, Nomination and Remuneration Committee Membership
- Other Committee Practices
- Miscellaneous



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi

Governance, Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait aspek tata kelola perusahaan, nominasi dan remunerasi.
2. memantau secara tahunan perkembangan praktik terbaik, standar, maupun persyaratan tata kelola perusahaan yang dikeluarkan pemerintah dan bursa efek.
3. menetapkan prosedur untuk melakukan pengawasan atas evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta melakukan penilaian atas kinerja dan efektivitas Dewan Komisaris maupun Direksi, secara terpisah maupun secara keseluruhan.
4. mengidentifikasi kandidat yang dianggap kompeten untuk jabatan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris sesuai kriteria yang disetujui Dewan Komisaris, serta memilih atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang dinominasikan untuk dipilih sebagai Komisaris Independen.
5. mengkaji independensi anggota Dewan Komisaris, terutama pihak Komisaris Independen, serta mempertimbangkan kemungkinan adanya benturan kepentingan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, menyeluruh, teliti dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan:

- Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Seluruh ketentuan OJK dan BEI;
- Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan;
- Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi;
- Instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris Perseroan.

Duties and responsibilities of the Governance, Nomination and Remuneration Committee are:

1. assisting with the execution of the Board of Commissioners' duties regarding corporate governance, nomination and remuneration.
2. annually monitoring the development of best practices, standards, and corporate governance requirements issued by the government and the stock exchange.
3. establishing procedures for oversight of the performance assessment for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, and regularly assessing the performance and effectiveness of the Board of Commissioners and Board of Directors, either individually or collegially.
4. identifying candidates deemed competent for the positions of Independent Commissioners in the Board of Commissioners according to the criteria approved by the Board of Commissioners, as well as vote or recommend to the Board of Commissioners, candidates nominated to be elected as Independent Commissioners.
5. reviewing the independency of the Board of Commissioners' members, especially the Independent Commissioners, and consider the possibility of conflicts of interest among members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

The Governance, Nomination and Remuneration Committee Members carry out their duties and responsibilities in good faith, thoroughly and responsibly and in accordance with:

- All applicable laws and regulations;
- All OJK and IDX provisions;
- The Company's Articles of Association and policies;
- The Governance, Nomination and Remuneration Committee Charter;
- Instructions received from the Company's Board of Commissioners.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA, NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi Perseroan, Komite bertemu dan mengadakan rapat setidaknya satu kali dalam empat bulan. Rapat dilaksanakan melalui tatap muka atau video, conference, dan media lainnya, dengan mempertimbangkan domisili anggota Komite. Kuorum rapat dipenuhi apabila dihadiri oleh setidaknya tiga anggota pada setiap rapat.

Keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila rapat gagal mencapai mufakat, maka keputusan berlaku selama disetujui mayoritas anggota Komite yang hadir dalam rapat yang telah memenuhi kuorum. Komite akan menunjuk sekretaris komite untuk menyusun risalah rapat. Setiap anggota Komite yang hadir dalam rapat menandatangani risalah rapat.

Selama tahun 2019 Komite telah melakukan 3 kali rapat. Jumlah dan persentase kehadiran masing-masing anggota Komite tersaji dalam tabel. Seluruh rapat telah memenuhi kuorum sehingga pelaksanaan rapat dan keputusan Komite telah memenuhi ketentuan dalam Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi.

GOVERNANCE, NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING POLICIES AND IMPLEMENTATION

According to the Company's Governance, Nomination and Remuneration Committee Charter, the Committee meets at least once every four months. Meetings are held in person or through teleconferences, video conferencing and other media. Quorum meetings are met when attended by at least three members.

Meeting decisions are taken through deliberation to reach consensus. If a meeting fails to reach a consensus, the decision shall be valid if approved by the majority of the committee members present at the meeting having fulfilled the quorum. The Committee shall appoint a committee secretary to prepare minutes of meetings. Each Committee member present at the meeting signs the minutes of the meetings.

During 2019, the Governance, Nomination and Remuneration Committee held 3 meetings. The total and percentage of attendance by each member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee is presented in the table below. All meetings met the quorum therefore the meetings and resolutions of the Governance, Nomination and Remuneration Committee complied with the Charter of the Governance, Nomination and Remuneration Committee.

JUMLAH RAPAT KOMITE TATA KELOLA, NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2019 DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE

Total Governance, Nomination and Remuneration Committee Meetings 2019 and Member Attendance

Nama Anggota Komite Committee Member Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Mahendra Siregar	Ketua Chairman	2	2	100%
Raden Sukhyar	Ketua Chairman	1	1	100%
Eduardo Bartolomeu	Anggota Member	1	1	100%
Mark J. Travers	Anggota Member	3	3	100%
Luiz Fernando Landeiro	Anggota Member	2	2	100%
Nobuhiro Matsumoto	Anggota Member	3	3	100%

Catatan | Notes:

- Bapak Mahendra Siregar mengundurkan diri sebagai Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 4 November 2019; Mahendra Siregar resigned as Chairman of the Governance, Nomination and Remuneration Committee on November 4, 2019;
- Bapak Raden Sukhyar diangkat sebagai Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 20 November 2019; Raden Sukhyar was appointed as Chairman of the Governance, Nomination and Remuneration Committee on November 20, 2019;
- Bapak Eduardo Bartolomeo mengundurkan diri sebagai anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 7 Juni 2019; Eduardo Bartolomeo resigned as member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee on June 7, 2019;
- Bapak Luiz Fernando Landeiro diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 2 April 2019. Luiz Fernando Landeiro was appointed as member of the Governance, Nomination and Remuneration Committee on April 2, 2019.



JUMLAH RAPAT KOMITE TATA KELOLA, NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2019 DAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE
Total Governance, Nomination and Remuneration Committee Meetings 2019 and Total Member Attendance

Tanggal Rapat Date of Meetings	Jumlah Anggota Hadir Total Member Attendance	Persentase Percentage
2 April 2019 April 2, 2019	4	100%
16 Agustus 2019 August 16, 2019	4	100%
20 November 2019 November 20, 2019	4	100%

Pendidikan dan Pelatihan Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi

Governance, Nomination and Remuneration Committee Education and Training

Seluruh anggota Komite adalah Komisaris Perseroan. Informasi terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Komite dapat dilihat di bagian Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewan Komisaris pada bahasan mengenai Profil Perseroan, di halaman 74 Laporan ini.

All members of the Governance, Nomination and Remuneration Committee are Commissioners of the Company. A description of the Committee members' education and training can be seen in the Board of Commissioners' Education and Training section with their profiles, in the Company Profile section on page 74 of this Report.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi

Governance, Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities Implementation

ASPEK TATA KELOLA

Selama periode pelaporan, Komite telah melaksanakan dan menyelesaikan beberapa tugas.

1. mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap pengkinian piagam-piagam komite Dewan Komisaris;
2. mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap identifikasi dan pelaksanaan inisiatif perbaikan GCG Perseroan;
3. mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan situs web Perseroan; dan
4. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG Perseroan.

GOVERNANCE ASPECT

During the reporting period, the Committee conducted and completed several duties.

1. reviewing and providing recommendations for updating the charters of the committees under the Board of Commissioners;
2. overseeing and providing recommendations on the identification and implementation of the Company's GCG improvement initiatives;
3. reviewing and providing recommendations on improvements to the Company's website; and
4. assessing the Company's GCG implementation.

PROSEDUR NOMINASI

Selama periode pelaporan, Komite telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan suksesi Direksi Perseroan dan pejabat Perseroan yang lain. Suksesi diatur dan dilakukan melalui sistem CSP yang menyediakan program-program penunjang perencanaan karir dan suksesi, antara lain proses evaluasi kinerja karyawan, aspirasi karir, program pelatihan dan pengembangan diri.

Peran strategis Komite berkaitan dengan rekomendasi calon pengganti kepada Komite yang kemudian melakukan penilaian kandidat yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kualifikasi kandidat, kebutuhan Perseroan serta persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penilaian disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang akan membawa calon yang dipilih untuk diangkat dan ditetapkan pemegang saham dalam RUPS.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Komite telah memberikan rekomendasi bagi perubahan pejabat-pejabat Perseroan, meliputi:

1. penunjukan Ibu Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur;
2. penunjukan Bapak Bernardus Irmanto, Bapak Agus Superiadi, Bapak Dani Widjaja dan Bapak Vinicius Mendes Ferreira, masing-masing sebagai Direktur;
3. penunjukan Bapak Mark James Travers sebagai Presiden Komisaris dan Bapak Mahendra Siregar sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen;
4. penunjukan Bapak Luiz Fernando Landeiro dan Bapak Cory McPhee, masing-masing sebagai Komisaris;
5. penunjukan Bapak Luiz Fernando Landeiro sebagai anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi serta Komite Mitigasi Risiko;
6. penunjukan Bapak Raden Sukhyar sebagai Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi; dan
7. penunjukan Bapak Herwan Ng sebagai anggota Komite Audit.

NOMINATION PROCEDURE

During the reporting period, the Committee conducted and completed duties related to the succession of the Company's Board of Directors and other officers. Succession is regulated and conducted through the CSP system that provides programs supporting career planning and succession, and include the employee's performance evaluation process, career aspirations, training and development program.

The Committee's strategic role is related to recommending candidates to the Committee who will assess the candidates by considering their qualifications, the Company's needs and conditions regulated in the prevailing laws and regulations. The assessment results will be delivered to the Board of Commissioners who will propose the selected candidates to be appointed, for approval by the shareholders at the GMS.

During 2019, the Committee provided recommendation on the following Company officer changes:

1. appointment of Febriany Eddy as Vice President Director;
2. appointment of Bernardus Irmanto, Agus Superiadi, Dani Widjaja and Vinicius Mendes Ferreira, each as Director;
3. appointment Mark James Travers as President Commissioner and Mahendra Siregar as Vice President Commissioner and Independent Commissioner;
4. appointment of Luiz Fernando Landeiro and Cory McPhee, each as Commissioner;
5. appointment of Luiz Fernando Landeiro as members of the Governance, Nomination and Remuneration Committee and Risk Mitigation Committee;
6. appointment of Raden Sukhyar as Chairman of the Governance, Nomination and Remuneration Committee; and
7. appointment of Herwan Ng as member of the Audit Committee.



ASPEK REMUNERASI

Selama periode pelaporan, Komite telah melaksanakan dan menyelesaikan beberapa tugas.

1. mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi untuk Komisaris Independen serta anggota komite-komite Dewan Komisaris;
2. mengkaji dan memberikan pertimbangan mengenai kompensasi dan remunerasi bagi Direksi dan pejabat senior Perseroan;
3. mengawasi administrasi program-program insentif kompensasi Perseroan dan menyetujui pemberian penghargaan dalam program-program tersebut.

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan segala kegiatan diperlukan dalam lingkup tanggung jawabnya, termasuk mencari dan meminta informasi yang diperlukan Dewan Komisaris, Direksi, dan melalui Direksi, karyawan Perseroan serta pihak-pihak eksternal yang relevan.

REMUNERATION ASPECT

During the reporting period, the Committee has conducted and completed several duties.

1. reviewing and making recommendations to the Board of Commissioners on the compensation for the Independent Commissioners and committee's members under the Board of Commissioners;
2. reviewing and giving considerations on the compensation and remuneration of the Board of Directors and senior officers of the Company;
3. overseeing the administration of the Company's incentives compensation programs and approving rewards under such programs.

The Board of Commissioners authorized the Governance, Nomination and Remuneration Committee to perform all activities required within the scope of its responsibilities, including seeking and soliciting information required from the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Company's employees and relevant external parties.



Komite Mitigasi Risiko

Risk Mitigation Committee

Komite Mitigasi Risiko dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris tertanggal 27 Maret 2017. Komite memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris, terkait pengawasan dalam menerapkan dan pelaksanaan pengelolaan risiko.

The Risk Mitigation Committee was formed based on the Board of Commissioners' Meeting decision on March 27, 2017. The Committee's duties and responsibilities include assisting the Board of Commissioners regarding risk management application and implementation supervision.

Keanggotaan Komite Mitigasi Risiko

Risk Mitigation Committee Members

Penetapan keanggotaan Komite mengacu pada keputusan Dewan Komisaris dan Piagam Komite Mitigasi Risiko. Berdasarkan ketentuan tersebut, komposisi Komite terdiri dari tiga orang anggota, dengan ketentuan satu orang anggota merangkap ketua yang merupakan Komisaris Independen. Masa jabatan anggota Komite adalah dua tahun.

Committee membership is determined based on the Board of Commissioners' decree and Risk Mitigation Committee Charter. Based on these provisions, the Committee composition consists of three members, provided one member is concurrently the Chairman and an Independent Commissioner. The term of office for Committee members is two years.



Selama tahun 2019 terjadi beberapa perubahan keanggotaan Komite, yaitu penunjukan Bapak Luiz Fernando Landeiro pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 2 April 2019 untuk menggantikan Bapak Dino Otranto yang mengundurkan diri sebagai anggota Komite Mitigasi Risiko, penunjukan Bapak Justin Thompson sebagai anggota Komite yang baru pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Agustus 2019 dan Ibu Annie Margono yang telah menyelesaikan masa jabatannya pada tanggal 13 November 2019. Dengan perubahan-perubahan tersebut, komposisi keanggotaan Komite Mitigasi Risiko per tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota.

In 2019, there were several changes in committee membership with the appointment of Luiz Fernando Landeiro at a meeting of the Board of Commissioners on 2 April 2019 to replace Dino Otranto who resigned from his position as member of the Risk Mitigation Committee, the appointment of Justin Thompson as new member of the Risk Mitigation Committee at a meeting of the Board of Commissioners on 16 August 2019, and the end of term of Annie Margono on 13 November 2019. Following these changes, Risk Mitigation Committee composition as at 31 December 2019 comprised of a Chairman and two members.

KOMPOSISI KOMITE MITIGASI RISIKO PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2019

Risk Mitigation Committee Composition as at December 31, 2019

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Position Period
Raden Sukhyar	Ketua Chairman	Juni 2017 – sekarang June 2017 - present
Luiz Fernando Landeiro	Anggota Member	April 2019 – Sekarang April 2019 - Present
Justin Thompson	Anggota Member	Agustus 2019 – Sekarang August 2019 - Present

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE MITIGASI RISIKO

Risk Mitigation Committee Chairman and Member Profiles



Raden Sukhyar

Ketua Komite Mitigasi Risiko
Risk Mitigation Committee
Chairman

Periode Jabatan: 7 June 2017 - sekarang

Position Period: June 7, 2017 – present

Diangkat sebagai Ketua Komite Mitigasi Risiko berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 Juni 2017

Appointed as Risk Mitigation Committee Chairman based on Board of Commissioners Meeting Resolution dated June 7, 2017

Uraian dan Informasi lain dapat dilihat dalam Profil Dewan Komisaris pada bahasan tentang Profil Perseroan, di halaman 68 dalam Laporan ini

A further description and information can be found in the Board of Commissioners Profiles in the Company Profile section, on page 68 of this Report



Luiz Fernando Landeiro

Anggota Komite Mitigasi Risiko
Risk Mitigation Committee Member

Periode Jabatan: 2 April 2019 - sekarang

Position Period: 2 April 2019 – present

Diangkat sebagai anggota Komite Mitigasi Risiko berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 2 April 2019

Appointed as a Risk Mitigation Committee member based on Board of Commissioners Meeting Resolution dated April 2, 2019

Uraian dan Informasi lain dapat dilihat dalam Profil Dewan Komisaris pada bahasan tentang Profil Perseroan, di halaman 70 dalam Laporan ini.

A further description and information can be found in the Board of Commissioners Profiles in the Company Profile section, on page 70 of this Report





Justin Thompson

Anggota Komite Mitigasi Risiko
Risk Mitigation Committee Member

Periode jabatan: 16 Agustus 2019 - Sekarang	Period in Office: August 16, 2019 - Present
Tempat dan Tanggal Lahir: 20 Oktober 1986 Usia: 33 tahun per 31 Desember 2019	Born: October 20, 1986 Age: 33 years old as at December 31, 2019
Kewarganegaraan: Kanada	Nationality: Canadian
Riwayat Pendidikan 1. Bachelor of Applied Science in Mining Engineering dan Master of Applied Science in Mineral Economics, from Queens University.	Education History 1. Bachelor of Applied Science in Mining Engineering dan Master of Applied Science in Mineral Economics, from Queens University.
Riwayat Jabatan Diangkat sebagai anggota Komite Mitigasi Risiko berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Agustus 2019	Position History Appointed as Risk Mitigation Committee member based on Board of Commissioners Meeting Resolution dated August 16, 2019
Pengalaman Kerja: 1. Manager of Operational Risk, Vale Canada Limited, April 2019 - sekarang 2. Teck Resources Limited di Vancouver, British Columbia	Pengalaman Kerja: 1. Manager of Operational Risk, Vale Canada Limited, April 2019 - present. 2. Teck Resources Limited in Vancouver, British Columbia
Rangkap Jabatan: 1. Manager of Operational Risk, Vale Canada Limited, April 2019 - sekarang 2. Professional engineer pada Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta	Rangkap Jabatan: 1. Manager of Operational Risk, Vale Canada Limited, April 2019 - present 2. Professional engineer of Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta

Piagam Komite Mitigasi Risiko

Risk Mitigation Committee Charter

Komite Mitigasi Risiko telah memiliki Piagam Komite Mitigasi Risiko yang berlaku efektif pada tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana diperbaharui pada tanggal 15 Oktober 2019 dan keduanya telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Piagam tersebut menjadi pedoman Komite Mitigasi Risiko dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris.

The Risk Mitigation Committee Charter became effective on June 7, 2017, and was amended on 15 October 2019, after both obtained approval from the Board of Commissioners. The Charter serves as the Risk Mitigation Committee guidelines in carrying out its roles, duties and responsibilities when assisting the Board of Commissioners.

Piagam Komite Mitigasi Risiko memuat tentang:

- Keseluruhan Maksud dan Tujuan
- Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang
- Laporan
- Keanggotaan Komite Mitigasi Risiko
- Proses kerja
- Rapat Komite Mitigasi Risiko
- Evaluasi Kinerja
- Ketentuan Lainnya

The Risk Mitigation Committee Charter contains:

- Overall Purpose and Objectives
- Duties, Responsibilities and Authorities
- Reporting
- Risk Mitigation Committee Membership
- Work Processes
- Risk Mitigation Committee Meetings
- Performance Evaluation
- Miscellaneous

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Mitigasi Risiko

Risk Mitigation Committee Duties and Responsibilities

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Mitigasi Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi keseluruhan risiko perusahaan, termasuk memformalisasikan profil risiko dan risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan, serta memastikan bahwa kerangka manajemen risiko Perusahaan (seperti kebijakan-kebijakan, tata cara dan praktek-praktek) tetap kuat dan sehat. Hal-hal yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Komite Mitigasi Risiko meliputi:

1. mengawasi pelaksanaan kerangka manajemen risiko.
2. mengamati budaya risiko yang mempromosikan pengungkapan yang terbuka dan transparan serta peningkatan kualitas kegiatan manajemen risiko di Perseroan.
3. mengkaji risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan setiap triwulan dan mengawasi kebijakan Perusahaan serta praktek-praktek manajemen insiden, manajemen kelangsungan usaha dan manajemen krisis.
4. mengambil tindakan atas hal-hal tertentu yang dapat diminta oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Anggota Komite Mitigasi Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, teliti dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan:

- i. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. Seluruh ketentuan OJK dan BEI;
- iii. Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan;
- iv. Piagam Komite Mitigasi Risiko; dan
- v. Instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris Perseroan.

In general, the Risk Mitigation Committee duties and responsibilities include assisting the Board of Commissioners in overseeing the overall Company risks, including formalizing the risk profiles and risk appetite, and ensuring the Company's risk management framework (policies, procedures and practices) remains strong and healthy. The Risk Mitigation Committee duties and responsibilities include:

1. overseeing the risk management framework implementation.
2. monitoring the risk culture that promotes open and transparent disclosure as well as improvement in the quality of risk management activities within the Company.
3. reviewing the Company's risk appetite quarterly and overseeing the Company's policy and incident management practices, business continuity management as well as crisis management.
4. taking action on other matters as the Board of Commissioners may from time to time request.

Members of the Risk Mitigation Committee carry out their duties and responsibilities in good faith, prudent and responsibly and in accordance with:

- i. All prevailing laws and regulations;
- ii. All OJK and IDX provisions;
- iii. Company's Articles of Association and policies;
- iv. Charter of the Risk Mitigation Committee; and
- v. Instructions received from the Board of Commissioners of the Company.



Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Mitigasi Risiko

Risk Mitigation Committee Meeting Policy and Implementation

Sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Mitigasi Risiko, Komite bertemu dan mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam satu tahun buku. Rapat dilaksanakan melalui tatap muka atau video conference, teleconference atau media lain dengan mempertimbangkan domisili anggota Komite. Kuorum rapat dipenuhi apabila dihadiri oleh setidaknya tiga anggota pada setiap rapat.

In accordance with the Risk Mitigation Committee Charter, the Committee meets at least once every four months. Meetings are held in person or through teleconferences, video conferencing and other media. Quorum meetings are met when attended by at least two-thirds of the Committee members.

Komite Mitigasi Risiko menyelenggarakan tiga kali rapat di tahun 2019. Jumlah peserta rapat telah memenuhi ketentuan kuorum dua per tiga yang diatur oleh Piagam Komite Mitigasi Risiko, sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat-rapat yang dilakukan Komite Mitigasi Risiko sepanjang tahun 2019 tersaji dalam tabel di bawah ini.

The Risk Mitigation Committee held three meetings in 2019. The meetings met the two-thirds quorum required by the Risk Mitigation Committee Charter, therefore the meetings were valid and could adopt binding resolutions. Risk Mitigation Committee Meetings in 2019 are presented in the table below.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE MITIGASI RISIKO

Implementation on Risk Mitigation Committee's Meeting

Hari/Tanggal Day/Date	Peserta Attendees	Agenda Agenda
Selasa, 6 April 2019 Tuesday, April 6, 2019	<ul style="list-style-type: none"> · R Sukhyar · Luiz Landeiro 	<ul style="list-style-type: none"> i. Ulasan singkat sistem Manajemen Risiko Perseroan; ii. Mengulas dan memastikan risiko yang dapat diterima (<i>risk appetite</i>) Perseroan masih sesuai dan kini; dan iii. Mengulas secara mendalam risiko yang berhubungan dengan keamanan (<i>security</i>) dan risiko yang mungkin timbul dari rencana divestasi. <ul style="list-style-type: none"> i. Briefly reviewed the Company's Risk Management system; ii. Reviewed and ensured the Company's Risk Appetite is current and aligned; and iii. In depth-review on safety related risk that may be triggered by the divestment plan.
Jumat, 16 Agustus 2019 Friday, August 16, 2019	<ul style="list-style-type: none"> · R Sukhyar · Luiz Landeiro · Justin Thompson 	<ul style="list-style-type: none"> i. Ulasan singkat sistem Manajemen Risiko Perseroan; ii. Mengulas dan memastikan risiko yang dapat diterima (<i>risk appetite</i>) Perseroan masih sesuai dan kini; iii. Membahas rencana pembaruan Kebijakan Manajemen Risiko yang akan diajukan ke Dewan Komisaris; iv. Membahas perubahan struktur organisasi area Operasi yang lebih mencerminkan konsep 3 lini pertahanan (<i>3 lines of defense</i>); v. Membahas secara mendalam risiko ledakan atau kebakaran pada sistem konversi batubara; dan vi. Membahas rencana HIRA yang akan dilaksanakan bulan Oktober dan November 2019 dengan melibatkan tim teknis Vale Base Metals dan Vale S.A. <ul style="list-style-type: none"> i. Briefly reviewed the Company's Risk Management system; ii. Reviewed and ensured the Company's Risk Appetite is current and aligned; iii. Discussed the plan to update the Risk Management Policy for presentation to the Board of Commissioners; iv. Discussed the changes to Operation Department structure reflecting the 3 lines of defence concept; v. In-depth discussion on explosion or fire risk at coal conversion system; and vi. Discussed the HIRA plan to be held in October and November 2019 by involving technical team from Vale Base Metals and Vale S.A.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE MITIGASI RISIKO

Implementation on Risk Mitigation Committee's Meeting

Hari/Tanggal Day/Date	Peserta Attendees	Agenda Agenda
Rabu, 20 November 2019 Wednesday, November 20, 2019	<ul style="list-style-type: none"> · R Sukhyar · Justin Thompson 	<ul style="list-style-type: none"> i. Ulasan singkat sistem Manajemen Risiko Perseroan; ii. Mengulas dan memastikan risiko yang dapat diterima (<i>risk appetite</i>) Perseroan masih sesuai dan kini; dan iii. Membahas hasil HIRA yang dilaksanakan bulan November 2019 dan rencana tindak lanjut yang sedang disiapkan untuk memitigasi risiko yang ditemukan dari hasil HIRA tersebut. <ul style="list-style-type: none"> i. Briefly reviewed the Company's Risk Management system; ii. Reviewed and ensured the Company's Risk Appetite is current and aligned; and iii. Discussed the HIRA results held in November 2019 and follow up plan prepared to mitigate the risks identified from the results.

JUMLAH RAPAT KOMITE MITIGASI RISIKO TAHUN 2019 DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE

Total Risk Mitigation Committee Meetings 2019 and Member Attendance

Nama Anggota Komite Committee Member Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Raden Sukhyar	Ketua Chairman	3	3	100%
Annie Margono	Anggota Member	2	0	0%
Dino Otranto	Anggota Member	N/A	N/A	N/A
Luiz Fernando Landeiro	Anggota Member	3	2	66.66%
Justin Thompson	Anggota Member	2	2	100%

Pendidikan dan Pelatihan Anggota Komite Mitigasi Risiko

Risk Mitigation Committee Members Education and Training

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diikuti Ketua dan anggota Komite Mitigasi Risiko yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris, yaitu Bapak Raden Sukhyar dan Bapak Luiz Fernando Landeiro dapat dilihat di bagian Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewan Komisaris pada bahasan mengenai Profil Perusahaan, di halaman 74 dalam Laporan ini.

A description of the Chairman and members of the Risk Mitigation Committee education and training who are also members of the Board of Commissioners, namely Raden Sukhyar and Luiz Fernando Landeiro, can be found in the Board of Commissioners' Education and Training in the Company Profile section on page 74 of this Report.



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Mitigasi Risiko

Risk Mitigation Committee Duties and Responsibilities Implementation

Selama periode pelaporan, Komite telah melaksanakan dan menyelesaikan sejumlah tugas dan tanggung jawabnya:

1. meninjau Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan dan mengusulkan kebijakan yang diperbarui kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan Dewan Komisaris;
2. meninjau risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) Perseroan untuk memastikan bahwa risiko yang dapat diterima tersebut (*risk appetite*) sesuai dengan keadaan saat ini dan selaras dengan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) Dewan Komisaris;
3. meninjau pembaruan daftar risiko Perseroan dan mengusulkannya kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui daftar yang diperbarui; dan
4. melakukan tinjauan secara mendalam terhadap beberapa peristiwa risiko Perseroan untuk memastikan pencegahan dan pengendalian mitigasi yang tepat, dan inisiatif untuk pengurangan risiko lebih lanjut.

During the reporting period, the Committee carried out and completed a number of duties and responsibilities:

1. reviewed the Company's Risk Management Policy and proposed updated policy to the Board of Commissioners for approval;
2. reviewed the Company's Risk Appetite to ensure it is current and aligned with Board of Commissioners' risk appetite;
3. reviewed updates to the Company's risk register and proposed to the Board of Commissioners for approval; and
4. conducted in-depth reviews to several risk events in the Company to ensure proper prevention and mitigation controls, and initiatives for further risk reduction.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Penunjukan Sekretaris Perusahaan diatur dalam POJK No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan BEI No.1-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi, dan diangkat/diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi strategis, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, BEI dan pemangku kepentingan lain.

The Corporate Secretary's appointment is regulated under POJK No.35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, and IDX Regulation No.1-E on Disclosure of Information Requirement. The Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and is appointed/dismissed based on a Board of Directors' Decree with approval from the Board of Commissioners. The Corporate Secretary has a strategic function as a liaison between the Company and the shareholders, OJK, IDX and other stakeholders.

Kualifikasi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Qualifications

Sesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi sekurang-kurangnya persyaratan berikut:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
3. memahami kegiatan usaha Perseroan dan dapat berkomunikasi dengan baik;
4. berdomisili di Indonesia;
5. dapat menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
6. tidak memiliki rangkap jabatan di dalam Perseroan.

In accordance with POJK No.35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary for Issuers or Public Companies, the Corporate Secretary must meet at least the following requirements:

1. has the ability to perform legal acts;
2. has a knowledge and understanding of law, finance and corporate governance;
3. has an understanding of the Company's business activities; and is able to communicate well;
4. resides in Indonesia;
5. can maintain the confidentiality of documents, data and information, except when fulfilling obligations in accordance with laws and regulations, or as otherwise stipulated in legislation; and
6. has no concurrent positions within the Company.

Piagam Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Charter

Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu kepada Piagam Sekretaris Perusahaan, yang terakhir kali diperbarui dan disetujui Direksi pada 12 Januari 2015. Selama periode pelaporan belum dilakukan perubahan Piagam Sekretaris Perusahaan karena dinilai masih relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

The Corporate Secretary carries out its duties and responsibilities by referring to the Corporate Secretary Charter last amended and approved by the Board of Directors on January 12, 2015. During the reporting period, there was no amendment to the Corporate Secretary Charter as it was deemed as still relevant with the current situation and condition.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Cut Fika Lutfi yang ditunjuk Direksi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No 002/SK-DIR/XI/2018 tertanggal 30 November 2018. Penunjukan Sekretaris Perusahaan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui surat No. 1026/SS-J/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018.

At the end of the reporting period, Cut Fika Lutfi served as the Corporate Secretary following appointment based on the Board of Directors Decree No. 002/SK-DIR/XI/2018 dated November 30, 2018. The Corporate Secretary appointment became effective as of December 1, 2018 and was notified to OJK and IDX by letter No. 1026/SS-J/XII/2018 dated December 3, 2018.





Cut Fika Lutfi

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Tanggal Penunjukan:

1 Desember 2018

Date of Appointment:

December 1, 2018

Tempat dan Tanggal Lahir:

Bandung 24 Juli 1984

Place and Date of Birth:

Bandung, July 24, 1984

Usia: 35 Tahun per 31 Desember 2019

Age: 35 Years as at Desember 31, 2019

Kewarganegaraan: Indonesia

Nationality: Indonesian

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Hukum tahun 2005 dari Universitas Indonesia
2. Master di bidang Hukum dan Kebijakan Mineral dari Center of Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, Universitas Dundee, Skotlandia, United Kingdom

Education History

1. Bachelor's Degree in Law from Universitas Indonesia
2. Master's Degree in Mineral Law and Policy from Center of Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, Scotlandia, United Kingdom

Riwayat Jabatan

Ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No.002/SK-DIR/X/2018 tanggal 30 November 2018

Position History

Appointed as Corporate Secretary through Decree No 002/SK-DIR/XI/2018 dated November 30, 2018

Pengalaman Kerja:

1. Paralegal di Firma Hukum Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro, 2005
2. Associate di Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, 2006
3. Associate di Firma Hukum Soemadipradja & Taher, 2007 – 2012
4. VP Corporate Legal di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 2012
5. Senior Legal Counsel di PT Vale, 2013 - 2018

Pengalaman Kerja:

1. Paralegal at Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Law firm, 2005
2. Associate at Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm, 2006
3. Associate at Soemadipradja & Taher Law Firm, 2007 - 2012
4. VP Corporate Legal at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 2012
5. Senior Legal Counsel at PT Vale, 2013 - 2018

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Education and/or Training

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan, Perseroan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2019, seluruh pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan diikuti oleh Cut Fika Lutfi.

To increase the Corporate Secretary's knowledge and understanding of the assignment, the Company provides opportunities to attend education and/or training. During 2019, all Corporate Secretary training was attended by Cut Fika Lutfi.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2019

Corporate Secretary Education and/or Training in 2019

No	Nama Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time	Penyelenggara Organizer
1	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Implementasi Notasi Khusus Socialization of Regulation Number I-A Amendment concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies and Implementation of Special Notation	10 Januari 2019 January 10, 2019	BEI IDX

No	Nama Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time	Penyelenggara Organizer
2	Sosialisasi e-Proxy dan e-Voting Platform E-Proxy and e-Voting Platform Socialization	14 Januari 2019 January 14, 2019	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
3	Persiapan penilaian ACGS Tahun 2019 Preparation for the 2019 ACGS assessment	24 Januari 2019 January 24, 2019	OJK
4	Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Oleh Corporate Secretary Terkait Makro & Industry Update by Ryan Kiryanto - Chief Economist dan Senior Vice President PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk You Need To Know as a Corporate Secretary Regarding Macro & Industry Update by Ryan Kiryanto - Chief Economist and Senior Vice President of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	29 Januari 2019 January 29, 2019	Indonesian Corporate Secretary Association ("ICSA") Academy
5	Workshop kriteria Tahun 2019 criteria workshop in 2019	30 Januari 2019 January 30, 2019	OJK
6	Seminar POJK Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal POJK Seminar Number 36/POJK.04/2018 concerning Procedures for Examinations in the Capital Market Sector	12 Februari 2019 February 12, 2019	ICSA dan BEI ICSA and IDX
7	Workshop Sukuk Korporasi Sebagai Sumber Pendanaan Corporate Sukuk as a Source of Funding Workshop	19 Februari 2019 February 19, 2019	OJK
8	HandsOn Pelatihan e-Proxy dan e-Voting Platform HandsOn e-Proxy Training and e-Voting Platform	21 Februari 2019 February 21, 2019	KSEI
9	Seminar Pemakai Jasa KSEI Tahun 2019 KSEI Service User Seminar 2019	14 Maret 2019 March 14, 2019	KSEI
10	Memastikan Kepatuhan Perusahaan atas Peraturan terkait Direksi dan Dewan Komisaris" Ensuring Company Compliance with Regulations relating to Board of Directors and Board of Commissioners "	20 Maret 2019 March 20, 2019	ICSA dan BEI ICSA and IDX
11	How to Report Gender Equality, Water, Occupational Health and Safety in Sustainability Report?	28 Maret 2019 March 28, 2019	BEI dan Global Reporting Initiative ("GRI") IDX and Global Reporting Initiative ("GRI")
12	Yang Perlu Diperhatikan oleh Corporate Secretary dalam Pembentukan Organ Board: Komite, Corporate Secretary dan Internal Audit What the Corporate Secretary Needs to Look For when Forming Board Bodies: Committees, Corporate Secretary and Internal Audit	9 April 2019 April 9, 2019	ICSA dan BEI ICSA and IDX
13	Sosialisasi Peraturan I-W tentang Pencatatan Unit Penyertaan DINFRA berbentuk KIK di Bursa dan Peraturan II-O tentang Perdagangan Unit Penyertaan DINFRA berbentuk KIK di Bursa Socialization of I-W Regulation concerning Listing of DINFRA Participation Unit in the form of KIK on the Exchange and Regulation II-O concerning Trading on DINFRA Participation Unit in the form of KIK on the Exchange	11 April 2019 April 11, 2019	BEI IDX



No	Nama Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time	Penyelenggara Organizer
14	Business Reporting on the Sustainable Development Goals	25 April 2019 April 25, 2019	BEI dan GRI IDX and GRI
15	Accelerating the Indonesian Economy Through Gender Equality	30 April 2019	Indonesia Business Coalition for Women Empowerment ("IBCWE") dan/and Yayasan Pulih
16	Sosialisasi Uji Coba Penggunaan Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi IDXnet dengan SPE Otoritas Jasa Keuangan Socialization for Trial Use of IDXnet Integrated Electronic Reporting Facilities with SPE Financial Services Authority	14 Mei 2019 May 14, 2019	BEI IDX
17	Seminar POJK 14/POJK.04/2019 POJK 14/POJK.04/2019 Seminar	24 Juni 2019 June 24, 2019	IDX dan/and Asosiasi Emiten Indonesia
18	Board Gender Diversity in ASEAN	27 Juni 2019 June 27, 2019	IDX dan/and International Finance Corporation ("IFC")
19	Seminar Strategi Implementasi GCG yang Efektif sehubungan dengan Tugas Corporate Secretary terkait POJK 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Seminar on Effective GCG Implementation Strategies in conjunction with Corporate Secretary Duties related to POJK 21/POJK.04/2014 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines	2 Juli 2019 July 2, 2019	ICSA dan BEI ICSA and IDX
20	Sosialisasi Peraturan Pencatatan dan Pengenalan Sistem Pelaporan IDXNet Socialization of Regulations for Recording and Introduction of the IDXNet Reporting System	29 Agustus 2019 August 29, 2019	BEI IDX
21	POJK 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka Online Single Submission (Electronic Integrated Business Licensing)	10 September 2019 September 10, 2019	ICSA dan BEI ICSA and IDX
22	Online Single Submission (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) Online Single Submission (Electronic Integrated Business Licensing)	8 October 2019 October 8, 2019	ICSA dan BEI ICSA and IDX
23	Presentation Skills and Negotiation Skills	17 October 2019 October 17, 2019	Hiswara Bunjamin & Tandjung in association with Herbert Smith Freehills
24	Workshop "How to Handle Your Boss"	27 November 2019 November 27, 2019	ICSA
25	Launching Sistem E-registration Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Launching the Pre-emptive Rights E-registration System	1 November 2019 November 1, 2019	OJK
26	Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi Global: Menanti Gebrakan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju Indonesia's Preparation for Facing Global Economic Turbulence: Awaiting the Breakthrough of the Indonesian Cabinet Economic Team	12 November 2019 November 12, 2019	ICSA dan/and IDX

No	Nama Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time	Penyelenggara Organizer
27	Conflict of Interest among Shareholders and Management	22 November 2019 November 22, 2019	ABNR Lawfirm
28	Lokakarya Alignment POJK 51s/2017 dan Monitoring dan Evaluasi SDGs Khususnya Non-Pemerintah Alignment Workshop POJK 51s/2017 and SDGs Monitoring and Evaluation, Especially Non-Government	18 Desember 2019 December 18, 2019	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ("BAPPENAS") Republik Indonesia dengan dukungan dari OJK dan BEI. Republic of Indonesia Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency ("BAPPENAS") with support from OJK and IDX.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan terutama dalam hal:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada OJK dan IDX secara tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat-rapat komite di bawah Dewan Komisaris;
 - e. pelaksanaan program orientasi bagi anggota baru dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 4. bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, IDX, dan para pemangku kepentingan lainnya.
1. Monitoring capital market developments, especially applicable capital market laws and regulations;
 2. providing input to the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding compliance with the capital market laws and regulations;
 3. assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance, particularly in terms of:
 - a. disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company's website;
 - b. submission of reports to OJK and IDX in a timely manner;
 - c. organizing and documenting the GMS;
 - d. organizing and documenting the Board of Directors meetings, meetings Board of Commissioners meetings, and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as committees under the Board of Commissioners meetings ;
 - e. implementation of orientation program for new members of the Company's Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 4. acting as a liaison between the Company and the shareholders, OJK, IDX and other stakeholders.



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Corporate Secretary Duties and Responsibilities Implementation in 2019

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan dan memastikan pelaporan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 2. mengawasi perkembangan peraturan pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan terbaru di bidang pasar modal kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut; 3. membantu Direksi dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan 2019 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019; 4. membantu Direksi dalam menyusun jadwal dan menyiapkan kalender rapat Direksi, Dewan Komisaris serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020; 5. memastikan bahwa rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menyelenggarakan rapat-rapat tersebut; 6. menjadi sekretaris dalam rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, termasuk memastikan bahwa bahan rapat tersedia pada jangka waktu yang telah ditentukan dan membuat risalah rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. meninjau pelaksanaan protokol penyelenggaraan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan memperbaharui protokol tersebut sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam rangka peningkatan praktik GCG; 8. mengkaji dan memperbaharui Piagam Komite Audit, Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, Piagam Komite Mitigasi Risiko, Piagam Unit Audit Internal dan Piagam Unit Manajemen Risiko, serta beberapa kebijakan dan prosedur internal Perseroan; 9. mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perseroan; dan 11. berkoordinasi dengan area-area terkait untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat dan terkini untuk melakukan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, OJK, BEI dan para pemangku kepentingan lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prepared and ensured any reporting related to disclosure of information was in accordance with capital market laws and regulations; 2. monitored the development of capital market regulations and provided information on recent capital market laws and regulations to the Company's Board of Directors, the Board of Commissioners and Governance, Nomination and Remuneration Committee, and ensuring compliance with such laws and regulations; 3. assisted the Board of Directors in organizing the 2019 Annual GMS and Extraordinary GMS in 2019; 4. assisted the Board of Directors in scheduling and preparing the meeting calendar for the Board of Directors, the Board of Commissioners and committees under the Board of Commissioner in 2020; 5. ensured meetings for the Board of Directors and the Board of Commissioners were held in accordance with the pre-determined schedule and assisted the Board of Directors in holding the meetings; 6. acted as secretary to the meetings for the Board of Directors, Board of Commissioners and Governance, Nomination and Remuneration Committee, and ensured that relevant materials were available within the determined timeline and prepared minutes of meeting in accordance with the prevailing laws and regulations; 7. reviewed the implementation of the Board of Directors and Board of Commissioners' meeting organization protocols and updated the protocols to align with the needs of the Company for improving the GCG practices; 8. reviewed and updated the Audit Committee Charter, Governance, Nomination and Remuneration Committee Charter, Risk Mitigation Committee Charter, Internal Audit Unit Charter and Risk Management Unit Charter, as well as some internal Company policies and procedures; 9. amended Article 3 of the Articles of Association as required by the prevailing laws and regulations; 10. assisted the Board of Directors and the Board of Commissioners in ensuring the implementation of GCG principles within the Company; and 11. coordinated with relevant areas to ensure the availability of accurate and updated information for disclosure of information to shareholders, OJK, IDX and other stakeholders. |
|--|--|

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Penilaian terhadap kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan melalui penilaian secara kolegial oleh Direksi berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, di antaranya penyampaian laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta komite-komite di bawahnya secara tepat waktu, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik terbaik tata kelola dilaksanakan di dalam organisasi. Pengakuan internasional maupun nasional yang diterima oleh Perseroan atas pelaksanaan praktik-praktik tata kelola di tahun 2019 merupakan bukti bahwa kualitas kinerja Sekretaris Perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan sehingga melampaui ekspektasi.



Departemen Hubungan Investor

Investor Relation Department

Perseroan pertama kali memiliki fungsi hubungan investor yang diintegrasikan dengan fungsi sekretaris perusahaan sejak tahun 2005. Mengingat pentingnya fungsi hubungan investor dalam menghubungkan antara manajemen Perseroan dengan pihak investor, komunitas pemegang saham dan masyarakat pasar modal, maka dibentuklah Departemen Hubungan Investor yang berdiri sendiri pada tahun 2011. Saat ini Departemen Hubungan Investor Perseroan dikepalai oleh Adi Susatio yang telah memiliki kualifikasi dan pengalaman di industri selama lebih dari 20 tahun.

Corporate Secretary Performance Assessment

Corporate Secretary performance assessment is conducted through collegial assessment by the Board of Directors based on the performance of duties and responsibilities, among others, delivery of reports to the boards and committees under the boards in a timely manner, and taking necessary measures to ensure that corporate governance best practices are implemented within the organization. The multiple international and local recognitions the Company received for implementation of corporate governance practices in 2019 are testament of significantly improve quality of works performed by the Corporate Secretary which exceed the expectations.

The Company's investor relations function has been integrated into the corporate secretary function since 2005. Considering the importance of the investor relation function in liaising between the Company's management and the investors, shareholders and capital market, an independent Investor Relations Department was established in 2011. Currently, Adi Susatio is the Head of PT Vale Investor Relations. He has qualifications and extensive experience in the industry of more than 20 years.

Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Hubungan Investor

Investor Relation Department Duties and Responsibilities

1. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis, fund manager dan masyarakat pasar modal pada umumnya.
 2. menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan road show, pertemuan dengan analis dan telekonferensi.
 3. mengomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja Perseroan serta laporan keuangan kepada pihak-pihak seperti fund manager, investor dan calon investor.
 4. mengelola hubungan dengan para fund manager, pakar dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
 5. memantau dan melaporkan hasil analisis para analis terhadap kinerja dan harga saham Perseroan secara berkala.
1. Preparing communication strategies, particularly to investors, potential investors, analysts, fund managers, shareholders and the capital market.
 2. preparing materials and conducting road shows, analyst meetings and conference calls.
 3. communicating various aspects related to shares and the performance of the Company as well as financial statements to parties such as fund managers, investors and potential investors.
 4. maintaining relationships with fund managers, economic experts and observers (particularly shares).
 5. monitoring and reporting analysis results on the performance of the Company's shares periodically.



- | | |
|--|--|
| <p>6. mengoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian laporan tahunan ke investor/analisis.</p> <p>7. menyediakan data dan informasi keuangan Perseroan untuk investor dan masyarakat pasar modal.</p> | <p>6. coordinating the annual report drafting, publishing and distributing to investors/analysts.</p> <p>7. providing financial data and information on the Company to investors, shareholders and the capital market.</p> |
|--|--|

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Hubungan Investor Di Tahun 2019

Investor Relation Department Duties and Responsibilities Implementation in 2019

Selama tahun 2019, Departemen Hubungan Investor melakukan beberapa kegiatan yang dirangkum dalam tabel di bawah ini.

In 2019, the Investor Relations Department activities are summarised in the table below.

Kegiatan Activity	Frekuensi Frequency
Pertemuan dengan Analis dan investor Analyst and Investor meetings	55x
Konferensi atau Non-Deal Roadshow dengan analis dan investor baik domestik maupun internasional Conference or Non-Deal Roadshow with domestic and international analysts and investors	6x
Telekonferensi dengan analis dan investor tentang pencapaian kinerja Perseroan triwulan Tele-conference with analysts and investors regarding the Company's quarterly performance achievements	4x
Siaran pers kepada OJK dan BEI tentang pencapaian kinerja Perseroan triwulan Press releases to OJK and IDX regarding the Company's quarterly performance achievements	4x
Siaran pers kepada OJK dan BEI tentang RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa Press releases to OJK and IDX regarding the Annual GMS and Extraordinary GMS	2x
Penyampaian pengumuman penyelenggaraan, panggilan maupun hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada OJK, BEI dan KSEI Announcements, notices and results related to the Annual GMS and Extraordinary GMS to OJK, IDX and the KSEI	6x
Penyampaian laporan keuangan triwulan kepada OJK dan BEI Quarterly financial statements to OJK and IDX	4x
Penyampaian laporan eksplorasi bulanan kepada BEI Monthly exploration reports to IDX	12x
Penyampaian laporan bulanan tentang registrasi saham kepada OJK dan BEI Reports related to shares registration to OJK and IDX	12x
Paparan Publik Public Expose	1x
Penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Laporan Tahunan 2018 Drafting, publishing and distributing the 2018 Annual Report	1x



Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Pembentukan Unit Audit Internal mengacu pada POJK No.56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK 56”). Sesuai Piagam Unit Audit Internal, secara fungsional Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

Unit Audit Internal terdiri dari setidaknya tiga auditor internal. Personel Unit Audit Internal tidak diperkenankan menjabat posisi di departemen-departemen atau divisi operasional lain di Perseroan.

The Internal Audit Unit establishment refers to POJK No.56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparation of the Internal Audit Unit Charter (“POJK 56”). In accordance with the Internal Audit Unit Charter, the Internal Audit Unit is functionally responsible to the Board of Commissioners through the Audit Committee and administratively responsible to the President Director.

The Internal Audit Unit comprised of at least three internal auditors. Internal Audit Unit personnel are not permitted to hold positions in any other Company departments or operational divisions.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

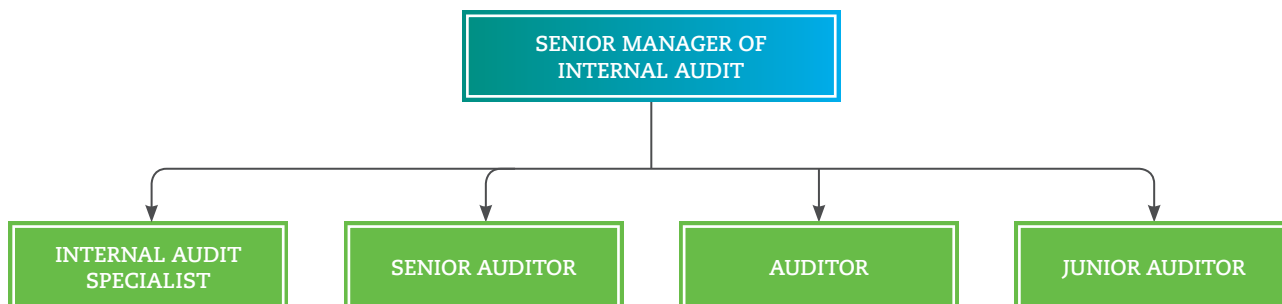
Internal Audit Unit Structure and Position

Unit Audit Internal dipimpin oleh Senior Manager Internal Audit selaku Kepala Unit Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, jumlah pegawai auditor internal pada Unit Audit Internal Perseroan ada 2 orang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Internal Audit Unit is managed by a Senior Manager of Internal Audit who is appointed and dismissed by the Board of Directors with approval from the Board of Commissioners. As of December 31, 2019, there were 2 internal auditors in the Company's Internal Audit Unit, directly responsible to the Senior Manager of Internal Audit.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AUDIT INTERNAL

Organizational Structure of Internal Audit Unit



Profil Kepala Unit Audit Internal

Head of Internal Audit Unit's Profile

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Kepala Unit Audit Internal Audit dijabat oleh Tito Agustinus Sitepu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/IV/2017 tertanggal 1 April 2017 dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK 56.

As of December 31, 2019, the Senior Manager of Internal Audit was held by Tito Agustinus Sitepu based on the Board of Directors Decree No. 001/SK-DIR/IV/2017 dated April 1, 2017 and reported to OJK in accordance with POJK 56.



Tito Agustinus Sitepu

Kepala Unit Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Tanggal Penunjukan:

1 April 2017

Date of Appointment:

April 1, 2017

Tempat dan Tanggal Lahir:

Medan, 28 Agustus 1979

Place and Date of Birth:

Medan, August 28, 1979

Usia: 40 Tahun per 31 Desember 2019

Age: 40 Years Old as at December 31, 2019

Kewarganegaraan: Indonesia

Nationality: Indonesian

Riwayat Pendidikan

1. Program Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Indonesia, 2005 – 2006
2. Sarjana Akutansi, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, 1997 - 2002

Educational History

1. Accounting Profesional Education Program, Universitas Indonesia, 2005 – 2006
2. Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, 1997 - 2002

Riwayat Jabatan

Ditetapkan sebagai Kepala Unit Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/IV/2017 tertanggal 1 April 2017

Position History

Appointed as Senior Manager of Internal Audit Unit by Board of Directors Decree No. 001/SK-DIR/IV/2017 dated April 1, 2017

Pengalaman Kerja:

1. Unit Audit Internal PT Vale Indonesia Tbk, 2009-Sekarang
2. Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) dengan jabatan terakhir Manager Audit, 2004 - 2009
3. Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (Deloitte Indonesia) dengan jabatan terakhir Semi Senior Auditor, 2003 - 2004

Working Experience:

1. Internal Audit Unit PT Vale Indonesia Tbk 2009-Present
2. Public Accounting Firm Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia), last position as Manager Audit, 2004 - 2009
3. Public Accounting Firm Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (Deloitte Indonesia), last position as Semi Senior Auditor, 2003 - 2004

Persyaratan, Kualifikasi Atau Sertifikasi Profesi Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Requirements, Qualifications or Professional Certification

PERSYARATAN PERSONEL DI UNIT AUDIT INTERNAL

1. Memiliki integritas, profesionalisme, independensi, kejujuran dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya;
2. memiliki pengetahuan dan pengalaman teknik dalam praktik audit dan disiplin ilmu terkait lainnya sesuai dengan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan akan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal dan peraturan lain yang relevan;
4. mampu untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik verbal maupun tertulis;
5. mematuhi standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Internal Auditor di Indonesia dan/atau yang berlaku secara umum dan internasional;
6. menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan/atau data Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Unit Audit Internal kecuali disyaratkan lain oleh undang-undang dan peraturan atau keputusan/perintah pengadilan;
7. memahami praktik tata kelola Perseroan dan rencana manajemen risiko yang ada di Perseroan;
8. mematuhi Kode Etik dan Perilaku yang berlaku di Perseroan; dan
9. senantiasa membangun dan mengembangkan pengetahuan dan kompetensi dalam bidang audit internal yang dimiliki, antara lain dengan mengikuti perkembangan terbaru serta praktik terbaik dalam industri.

Setiap auditor internal juga memiliki kualifikasi dan/atau sertifikasi untuk menunjang profesi Audit Internal.

INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL'S REQUIREMENT

1. display integrity and professionalism, independence, honesty and objectivity in carrying out their duties;
2. be knowledgeable and experienced in audit techniques and other disciplines relevant to their duties;
3. have knowledge of capital market regulations and other relevant laws and regulations;
4. be capable of effectively interacting and communicating both verbally and in writing;
5. comply with professional standards and the code of ethics established by the Internal Auditor Association in Indonesia and/or applicable generally and internationally;
6. maintain the confidentiality of the Company's documentation, information and/or data related to the Internal Audit Unit's duties and responsibilities performance unless otherwise required by the laws and regulations or any court decisions/rulings;
7. understand the good corporate governance and risk management principles;
8. comply with the Company's Code of Conduct; and
9. continuously maintain and build upon their professional knowledge, expertise and competence in the area of internal audit by, among other things, keeping abreast of new developments and best practices in the industry.

All internal auditors have the qualifications and/or certification to support the Internal Audit profession.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit Members' Education Background

Nama Name	Jabatan Position	Latar Belakang Pendidikan Education Background
Tito Agustinus Sitepu	Senior Manager Internal Audit	Sarjana Akuntansi Degree in Accounting
Hendro Ganjar Gunarso	Senior Auditor	MSc in Accounting and Control
Teddi Gunadi	Auditor	Sarjana Akuntansi Degree in Accounting



KUALIFIKASI ATAU SERTIFIKASI PROFESI ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit Members' Professional Qualification and Certification

Kualifikasi/Sertifikasi Qualification/Certification	Dikeluarkan Oleh From	Jumlah Anggota Number	Pemegang Sertifikasi Certification Holder
Register Negara Akuntan	Departemen Keuangan Republik Indonesia	1	Kepala Unit Audit Internal Head of Internal Audit

Pendidikan dan Pelatihan Anggota Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Members Education and Training

Perseroan mendorong anggota Unit Audit Internal untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Unit Audit Internal. Selama tahun 2019, anggota Unit Audit Internal telah mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.

The Company encourages the Internal Audit Unit members to continue developing their competencies and capabilities based on the needs of their Internal Audit Unit duties. During 2019, Internal Audit Unit members participated in several education and/or training activities.

PELATIHAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

Training attended by Internal Audit Unit members in 2019

No	Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
1	Tito Agustinus Sitepu	4 Februari February 4	Workshop PIC (People Integrated Cycle)	HRBP Team, PT Vale
2	Tito Agustinus Sitepu	12 Februari February 12	Holistic Communication	PT Vale
3	Teddi Gunadi	18 Maret March 18	Refreshing SDT LV	Mining Team, PT Vale
4	Hendro Ganjar Gunarso	26 Juni June 26	New SDT LV	Mining Team, PT Vale
5	Tito Agustinus Sitepu	22 September September 22	VPS Vale Management Model	VPS Team, PT Vale
6	Teddi Gunadi	23 September September 23	VPS Vale Management Model	VPS Team, PT Vale
7	Hendro Ganjar Gunarso	23 September September 23	VPS Vale Management Model	VPS Team, PT Vale

Anggota Unit Audit Internal juga terlibat aktif dalam keanggotaan asosiasi profesi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, para anggota Unit Audit Internal tercatat sebagai anggota The Institute of Internal Auditors dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Internal Audit Unit members are active members of professional associations. As at December 31, 2019, members of the Internal Audit Unit registered as members of The Institute of Internal Auditors and Ikatan Akuntan Indonesia.

Piagam Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Charter

Unit Audit Internal bekerja secara independen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal berpedoman pada Piagam Unit Audit Internal yang telah diperbaharui dan berlaku efektif sejak tanggal 20 November 2019 berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 November 2019.

The Internal Audit Unit works independently. In performing its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit is guided by the Internal Audit Unit Charter that was updated and became effective on November 20, 2019 based on approval the Board of Commissioners' meeting decision on November 20, 2019.

Secara garis besar, Piagam Unit Audit Internal berisi:

- Tujuan dan Maksud
- Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- Laporan
- Keanggotaan Unit Audit Internal
- Ketentuan Lain

The Internal Audit Unit Charter contains:

- Purpose and Objectives
- Duties, Responsibilities and Authorities
- Reporting
- Internal Audit Unit Membership
- Miscellaneous

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Functions, Duties and Responsibilities

Fungsi utama Unit Audit Internal berdasar Piagam Unit Audit Internal, adalah memberikan layanan keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan dan untuk memperbaiki operasi Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perseroan. Secara khusus, Unit Audit Internal melakukan penilaian atas pengendalian, prosedur, dan sistem yang ada untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

Based on the Internal Audit Unit Charter, their Primary function is to provide an independent and objective assurance and consulting services, to increase the Company value and operations through a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the Company's risk management, internal controls and GCG processes. In particular, the Internal Audit Unit assesses the controls, procedures and systems in place to ensure:

1. Keandalan dan integritas dari informasi keuangan dan operasional, maupun alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, memperoleh, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Penjagaan terhadap aset;
3. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perseroan maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dari sisi biaya; dan
5. Pencapaian dari sasaran dan tujuan Perseroan.

1. Reliability and integrity of financial and operational information and the means used to identify, classify, secure and report such information;
2. Safeguarding of assets;
3. Compliance with Company's policies and procedures, as well as prevailing laws and regulations;
4. Cost-effective and efficient use of resources; and
5. Accomplishment of the Company's goals and objectives.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal bekerja sama dan memperoleh informasi dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Unit Manajemen Risiko dan Auditor Eksternal Perseroan.

In performing its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit works closely with the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, the Risk Management Unit and external auditors.



Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Description of Duties and Responsibilities

- **Rencana Kerja Audit Internal**
Mengembangkan rencana audit tahunan berbasis risiko, berdasarkan, namun tidak terbatas pada *Enterprise Risk Assessment* dari Unit Manajemen Risiko sebagai satuan kerja Direksi. Rencana audit tahunan berbasis risiko ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- **Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**
Menelaah dan menilai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- **Efisiensi dan Efektivitas**
Mengkaji dan menilai efisiensi dan efektivitas dari aspek keuangan, akuntansi, operasional, SDM, teknologi informasi, dan bagian-bagian lain Perseroan.
- **Pemberian Nasehat**
Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif atas hasil internal audit di seluruh level manajemen.
- **Laporan Audit Internal**
Menyiapkan dan menyampaikan laporan audit internal kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- **Langkah Perbaikan**
Memantau, menganalisa dan melaporkan implementasi serta dampak dari langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan.
- **Koordinasi**
Melakukan koordinasi baik dengan Komite Audit maupun Unit Manajemen Risiko. Untuk keperluan tersebut, Unit Audit Internal harus menyediakan kepada Unit Manajemen Risiko, sebagai unit kerja dari Direksi, akses kepada informasi internal audit yang relevan termasuk lembar kerja audit apabila diminta, dengan persetujuan dari Kepala Unit Audit Internal dan Direksi untuk informasi rahasia.
- **Penilaian**
Menyiapkan program peningkatan jaminan kualitas untuk mengevaluasi fungsi kegiatan internal.
- **Internal Audit Plan**
Developing an annual risk-based audit plan based on, but not limited to, the Enterprise Risk Assessment from the Risk Management Unit as the Board of Directors' working unit. This annual risk-based audit plan is subject to approval from the Board of Commissioners.
- **Internal Control and Risk Management System**
Reviewing and assessing the internal control and risk management systems to determine whether they are in compliance with the Company's policies.
- **Efficiency and Effectiveness**
Reviewing and assessing the effectiveness and efficiency of the financial, accounting, operations, human resources, information technology and other aspects of the Company.
- **Advisory**
Providing recommendations and objective information on internal audit results at all management levels.
- **Internal Audit Report**
Preparing and providing internal audit reports for the President Director and the Board of Commissioners.
- **Corrective Actions**
Monitoring, analyzing and reporting the implementation and impact of proposed corrective actions.
- **Coordination**
Closely coordinating with the Audit Committee and the Risk Management Unit. For such purpose, the Internal Audit Unit provides the Risk Management Unit, as the Board of Directors' working unit, access to relevant internal audit information including the audit working papers upon request, subject to approval from the Senior Manager of the Internal Audit Unit and the Board of Directors for confidential information.
- **Assessment**
Preparing a quality assurance improvement program to evaluate the internal audit function activities.

- **Kepatuhan Terhadap Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku**

Mengkaji dan menilai kecukupan dari kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan, termasuk undang-undang dan peraturan pasar modal.

- **Kepatuhan terhadap Standar Internasional bagi Praktik Profesi Audit Internal**

Memantau perubahan-perubahan yang signifikan pada prinsip, kebijakan, pengendalian, prosedur dan praktik audit internal di Perseroan sebagaimana diusulkan oleh auditor eksternal Perseroan, Komite Audit, atau Direksi.

- **Audit Khusus**

Melakukan penugasan audit khusus sebagaimana diperlukan dan diminta oleh Direksi dan Dewan Komisari. Seorang anggota Direksi dapat meminta Unit Audit Internal untuk melakukan audit/review yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Audit dan Presiden Direktur, dengan memperhitungkan, diantaranya, sumber daya Perseroan.

Laporan-laporan Unit Audit Internal antara lain:

1. **Laporan Audit Internal**

Menyiapkan Laporan Audit Internal kepada Presiden Direktur, Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) mengenai kecukupan dan efektivitas proses-proses yang ada untuk mengendalikan kegiatan dan risiko Perseroan, termasuk rekomendasi dan informasi yang objektif dari hasil audit internal pada semua tingkatan manajemen.

2. **Kajian Berkala atas Tindakan yang Direkomendasikan**

Memberikan kajian berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite Audit atas hal-hal berikut:

- a. kecukupan dari (termasuk kegagalan yang signifikan atau kekurangan) tindakan-tindakan yang diambil atas hal-hal yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh Direksi atau Unit Audit Internal memerlukan tindak lanjut;
- b. permasalahan yang signifikan terkait dengan proses-proses yang ada untuk mengendalikan aktivitas Perseroan dan afliasinya, termasuk potensi perbaikan atas proses-proses tersebut;
- c. status dan hasil dari Rencana Kerja Audit tahunan dan kecukupan sumber daya Unit Audit Internal; dan
- d. kemajuan yang dicapai menuju kinerja yang ditetapkan dalam matriks kinerja.

- **Compliance with Applicable Laws and Regulations**

Reviewing and assessing the adequacy of the Company's compliance with laws and regulations applicable to the Company, including the capital market laws and regulations.

- **Internal Standards for the Professional Practice of Internal Auditing**

Monitoring significant changes to the Company's internal auditing principles, policies, controls, procedures and practices, proposed or contemplated by the Company's external auditor, the Audit Committee, Board of Commissioners, or the Board of Directors.

- **Special Audit**

Conducting special audits as required and requested by the Board of Directors or the Board of Commissioners. A member of the Board of Directors may request the Internal Audit Unit perform specific audits/reviews with prior approval from the Audit Committee and the President Director, taking into consideration (among other things) the Company's resources.

The Internal Audit Unit's reporting obligations shall include the following:

1. **Internal Audit Report**

Preparing the internal audit report for the President Director, the Board of Directors and the Board of Commissioners (through Audit Committee) on the adequacy and effectiveness of the Company's process for controlling its activities and managing its risks, including therewith recommendations and objective information on internal audit results in all management levels.

2. **Periodic Assessment of Recommended Actions**

Providing periodic assessments for the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee on:

- a. the adequacy (including any significant failures by or shortcomings) of actions taken regarding matters previously identified by the Board of Directors or the Internal Audit Unit as requiring action;
- b. significant issues relating to the Company's processes for controlling the Company and its affiliates activities, including potential improvements to those processes;
- c. annual audit plan status and results and sufficiency of Internal Audit Unit resources; and
- d. progress towards achieving defined performance metrics.



Tugas lain dari Unit Audit Internal antara lain:

1. mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris perubahan yang dianggap perlu pada Piagam Unit Audit Internal;
2. mengevaluasi kinerjanya dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris secara berkala;
3. mematuhi seluruh kebijakan Perseroan (termasuk, tidak terbatas pada, Kebijakan Perdagangan Saham Perseroan dan Kebijakan Pengungkapan Informasi Perseroan);
4. bekerja sama dengan Komite Audit;
5. bekerja sama dengan Unit Manajemen Risiko dan secara berkala menentukan profil risiko dari Perseroan dan implikasinya;
6. berkoordinasi dengan Auditor Eksternal.

Other tasks of the Internal Audit Unit include:

1. review and recommend to the Board of Commissioners changes that are deemed necessary in the Internal Audit Unit Charter;
2. evaluating its performance and submitting the evaluation results to the Board of Commissioners periodically;
3. comply with all Company policies (including, not limited to, the Company's Share Trading Policy and the Company's Information Disclosure Policy);
4. cooperating with the Audit Committee;
5. cooperates with the Risk Management Unit and periodically determines the risk profile of the Company and its implications;
6. coordinate with External Auditors.

Uraian Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal

Description of Internal Audit Unit Duties

Selama tahun 2019 Unit Audit Internal telah melakukan tiga audit operasional sesuai rencana pemeriksaan tahunan ("RPT") yang telah disetujui. RPT disusun dengan pendekatan berbasis risiko, mencakup Audit Operasional, Internal Control Review ("ICR"), Telaah/Evaluasi Atas Pelaksanaan Manajemen Risiko, *Internal Control Review Over Financial Reporting* ("ICOFR") dan Audit Khusus.

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah risiko sehubungan dengan proses bisnis dikelola dengan pengawasan internal yang efektif, termasuk menilai kepatuhan terhadap aturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan terhadap penggudangan, tresuri dan perawatan alat berat.

In 2019, the Internal Audit Unit conducted three operational audits in accordance with the approved annual audit plan ("AAP"). The AAP is prepared with a risk-based approach, including Operational Audit, Internal Control Review ("ICR"), Risk Management Implementation Review/Evaluation, Internal Control Review Over Financial Reporting ("ICOFR") and Special Audit.

An audit was conducted to assess whether the risks associated with the business processes were being managed with effective internal controls, including assessing compliance with Company rules and applicable legislation. Audits were conducted on warehouse, treasury, and maintenance of heavy equipment.

PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

Internal Audit Unit Implementation of Duties 2019

Bentuk Penugasan Duties	Jumlah Total
Jumlah pemeriksaan sesuai RPT yang disetujui Number of inspections in accordance with AAP	5
Jumlah pemeriksaan yang ditunda Number of pending inspections	2
Jumlah pemeriksaan tambahan Number of additional inspections	0
Jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan Number of inspections conducted	3



Akuntan Publik

Public Accountant

Dalam RUPS Tahunan 2019 tertanggal 2 April 2019, Perseroan telah menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers), sebagai auditor eksternal yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penunjukkan tersebut berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan oleh karenanya Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 Tahun 2002 tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan telah menyampaikan laporan kepada OJK sehubungan penunjukan KAP tersebut. Mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

At the 2019 Annual GMS on April 2, 2019, the Company appointed Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PricewaterhouseCoopers), as the external auditor to audit the Company's financial statements for the year ended December 31, 2019. This appointment was based on the Audit Committee recommendation and therefore the Company has complied with the Minister of Finance Decree No.423/KMK.06/2002 dated 2002 concerning Public Accountant Services; Government Regulation No.20 of 2015 concerning Public Accounting Practices; and POJK Decree No.13/POJK.03/2017 dated 2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms Services in Financial Service Activities.

The Company submitted a report to OJK regarding the KAP appointment, in accordance with POJK No.13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms Services in Financial Service Activities.

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan Publik

Other Services Provided by the Public Accountants

Pihak yang ditunjuk Perseroan sebagai Akuntan Publik juga memberikan jasa lain selain lingkup audit sebagaimana tersebut di atas, yaitu audit interim atas Laporan Keuangan Perseroan untuk triwulan kedua yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

The party appointed by the Company as its Public Accountant also provided services other than the audit as mentioned above, which was an interim audit of the Financial Statements of the Company for the second quarter ended on June 30, 2019.

Besaran Fee Jenis Jasa yang Diberikan Akuntan Publik

Public Accountant Fees For Services Provided

Besaran nilai fee yang dibayarkan Perseroan untuk jasa audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dan interim Laporan Keuangan sebesar AS\$515.781. Perseroan tidak membayarkan fee untuk jasa lain yang diberikan Akuntan Publik yang ditunjuk.

The fees paid by the Company for the Financial Statements audit and interim audit of the Financial Statements for 2019 amounted to US\$515,781. The Company did not pay any fees for other services provided by the appointed Public Accountant.



PERIODE KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERSEROAN

Public Accounting Firms and Public Accountants for Corporate Annual Finance Reports Audits

Tahun Buku Fiscal year	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Fee (A\$)
2019	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA	515,781
2018	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Budi Susanto	338,000
2017	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Budi Susanto	338,000
2016	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Jongky Titus Lazuardi, S.E. CPA	338,000
2015	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Jongky Titus Lazuardi, S.E. CPA	338,000



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sebagai bagian dari Vale S.A., Perseroan telah menerapkan pengendalian internal menggunakan kerangka kerja yang dikeluarkan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO").

As part of Vale S.A., the Company applies internal controls using the framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO").

Tujuan dan Kerangka Kerja Pengendalian Internal

Internal Control Objectives and Framework

- Efektivitas dan Efisiensi Operasi**
 Perseroan terus berupaya menjadi produsen nikel berbiaya rendah, melalui efisiensi sehingga operasi yang dijalankan menjadi lebih efektif. Sampai dengan akhir tahun 2019, upaya pengendalian yang dilakukan telah mampu mencatatkan pencapaian produksi sesuai rencana dan beban pokok pendapatan kas per unit relatif terjaga.
- Effectiveness and Efficiency of Operations**
 The Company continually strives to be a low-cost nickel producer, through efficient and more effective operations. As of the end of 2019, the control efforts recorded that production was attained according to plan, and the cash cost per unit was maintained.
- Keandalan Pelaporan Keuangan**
 Penerapan pengendalian internal menjadikan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan Perseroan, menghasilkan informasi akuntansi yang lebih andal, tepat waktu, dapat dibandingkan dan dipahami, akurat dan lengkap, serta dapat diaudit dan diuji kebenarannya.
- Reliability of Financial Reporting**
 The internal controls in the Company's financial reporting accounting system ensures the accounting information produced is more reliable, timely, comparable and understandable, accurate and complete, and can be audited and tested for its correctness.



• **Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku**

Perseroan senantiasa menjunjung kepatuhan terhadap ketentuan hukum, baik yang berlaku di Indonesia maupun di Amerika Serikat, mengingat Perseroan adalah anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung dari Vale S.A., perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil dan tercatat di Bursa New York Amerika Serikat. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perseroan tidak pernah mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun atas sangkaan ketidakpatuhan hukum, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

• **Compliance with Applicable Laws and Regulations**

The Company complies with legal provisions, both in Indonesia and the United States, considering that the Company is a subsidiary with indirect ownership by Vale S.A., a public company established under the laws of the Federal Republic of Brazil and listed on the New York Stock Exchange in the United States. As at the end of reporting period, the Company has never received any sanctions in any form for non-compliance, whether in Indonesia or the United States.

Kesesuaian Dengan Kerangka Kerja COSO

Alignment With COSO Framework

Perseroan menerapkan pengendalian internal sesuai dengan kerangka kerja COSO, yang menempatkan lima unsur pengendalian internal.

The Company has implemented internal controls in accordance with the COSO framework, following five elements of internal control.

KERANGKA PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control Framework

Komponen Component	Penerapan Implementation
<p>Lingkungan Pengendalian Meliputi seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal.</p> <p>Control Environment Includes sets of standards, processes, and structures as the basis for implementing internal controls.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku • Pemberlakuan Matriks Delegasi Kewenangan untuk mengatur tingkat persetujuan transaksi dan pemisahan tugas yang tepat • Pembagian fungsi, tugas dan kewenangan melalui Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi dan Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris • Pembentukan Unit Pengendalian Internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan • Code of Ethics and Conduct enforcement • Authority Delegation Matrix enforcement to regulate the level of transaction approval and proper segregation of duties • Distribution of functions, duties and authorities through the Board of Commissioners' Charter, Board of Directors' Charter, and Board of Commissioners Supporting Committees' Charters • Establishment of an Internal Control Unit to ensure the Company's internal control system compliance and effectiveness
<p>Penilaian Risiko Penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.</p> <p>Risk Assessment The basis for determining how risk must be managed by the organization.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja dan anggaran Perseroan setiap tahun • Penerapan sistem manajemen risiko dan proses manajemen risiko serta sumber daya untuk mendukung pencegahan dan mitigasi risiko • Preparation of the Company's long-term plan, work plan and annual budget • Implementation of risk management systems and risk management processes and resources to support risk prevention and mitigation



Komponen Component	Penerapan Implementation
<p>Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan telah dilakukan.</p> <p>Control Activities Actions established through policies and procedures that ensure that management's direction to reduce risks through the achievement of objectives has been carried out.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan pengembangan sistem formal kebijakan dan prosedur bidang keuangan dan operasional • Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi yang mendukung kegiatan pengendalian • A formal system of financial and operational policies and procedures implementation and development • Use of information technology through application developments that support control activities
<p>Informasi & Komunikasi Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik, yang berasal dari proses komunikasi antarpihak internal maupun eksternal.</p> <p>Information & Communication Information needed by management that is relevant and of good quality, from the communication processes between internal and external parties.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan alur pelaporan dan publikasi, baik untuk internal maupun dengan pihak-pihak di luar Perseroan • Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi yang mendukung proses komunikasi dan penyampaian/pengumpulan informasi, termasuk intranet kolaboratif • Reporting and publications flow, both internally and with parties outside the Company • Use of information technology through application developments that support the communication and delivery/information gathering processes, including collaborative intranets
<p>Kegiatan Pemantauan Merupakan kegiatan evaluasi yang digunakan untuk memastikan masing-masing dari kelima komponen ada dan berfungsi.</p> <p>Monitoring Activities An evaluation activity used to ensure that each of the five components exists and functions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi berkelanjutan oleh Unit Audit Internal dan fungsi pengawasan lain di Perseroan. • Pelibatan auditor eksternal dan assessor independen lain secara berkala. • Continuous Internal Audit Unit evaluations and other supervisory functions in the Company. • External auditors and other independent assessors regular involvement.

Perseroan juga telah menerapkan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, melalui sistem Vale Whistleblower Channel ("VWC"). Kanal tersebut dibuat sebagai akses pelaporan alternatif, terkait dugaan atau sangkaan adanya pelanggaran atas Kode Etik dan Perilaku Perseroan. Uraian dan informasi mengenai VWC disampaikan dalam bahasan terpisah di halaman 289 Laporan ini.

The Company has also implemented a violation reporting mechanism, through a whistleblowing system called Vale Whistleblower Channel ("VWC"). This channel provides an alternative reporting access, related to allegations or suspicions of violations of the Company's Code of Ethics and Behavior. A description and information related to VWC is presented in a separate discussion on page 289 in this Report.

Hasil Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Laporan Keuangan

Internal Control System Effectiveness for Financial Reporting Overview

Perseroan memastikan kesesuaian kaidah laporan keuangan dengan standar keuangan yang berlaku dan ketentuan OJK. Secara umum, selama tahun 2019 Perseroan meyakini tidak ada kelemahan signifikan pada pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan pelaporan keuangan.

The Company ensures the financial statements comply with the applicable financial standards and OJK provisions. In general, the Company believes that there are no significant weaknesses in the financial reporting during that could affect the Company's operational effectiveness and efficiency, compliance with applicable regulations and laws, and reliability.

Hasil Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Internal Control System Effectiveness for Operational Activities Overview

Sepanjang tahun 2019, penerapan sistem pengendalian internal telah dapat mendukung penerapan perbaikan berkelanjutan.

During 2019, implementation of internal control system supported the implementation of sustainable improvement.

1. implementasi konsep lini pertahanan dan penerapan indikator terkait proses bisnis manajemen aset, *supply chain*, *accounts payable*, *accounts receivable*, *accounting*, *segregation of duties*, *maintenance*, dan *compliance business process*
2. pembaharuan beberapa kebijakan dan prosedur, termasuk diantaranya Request for Approval, Process and Management of BOC Meetings, Travel, Treasury, Resignation, Recruitment, Retirement, HR On Boarding, Organization Change, Employee Transfer, Performance Management, People Development, Internal Selection, Housing Allocation, Workforce Planning, Job Evaluation, Promotion, Career and Succession
3. penerapan sistem online untuk pencatatan dan persetujuan program kontribusi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

1. implemented lines of defense concept, and applied indicators related to asset management, supply chain, accounts payable, accounts receivable, accounting, segregation of duties, maintenance, and compliance business processes
2. renewed several policies and procedures including: Request for Approval, Process and Management of BOC Meetings, Travel, Treasury, Resignation, Recruitment, Retirement, HR On Boarding, Organization Change, Employee Transfer, Performance Management, People Development, Internal Selection, Housing Allocation, Workforce Planning, Job Evaluation, Promotion, Career and Succession
3. applied an online system for recording and approving contributions to community development and empowerment programs





Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Sebagai perusahaan publik dan tercatat di BEI, Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko di setiap aspek bisnis. Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko yang mempertimbangkan ISO 31000:2009, ISO 55000 dan COSO-ERM tentang Manajemen Risiko dan Manajemen Aset. Sistem ini digunakan untuk pengelolaan risiko-risiko baik yang bersifat strategis/bisnis maupun risiko operasional yang berpengaruh pada keseluruhan organisasi serta berdampak negatif terhadap tujuan-tujuan usaha Perseroan.

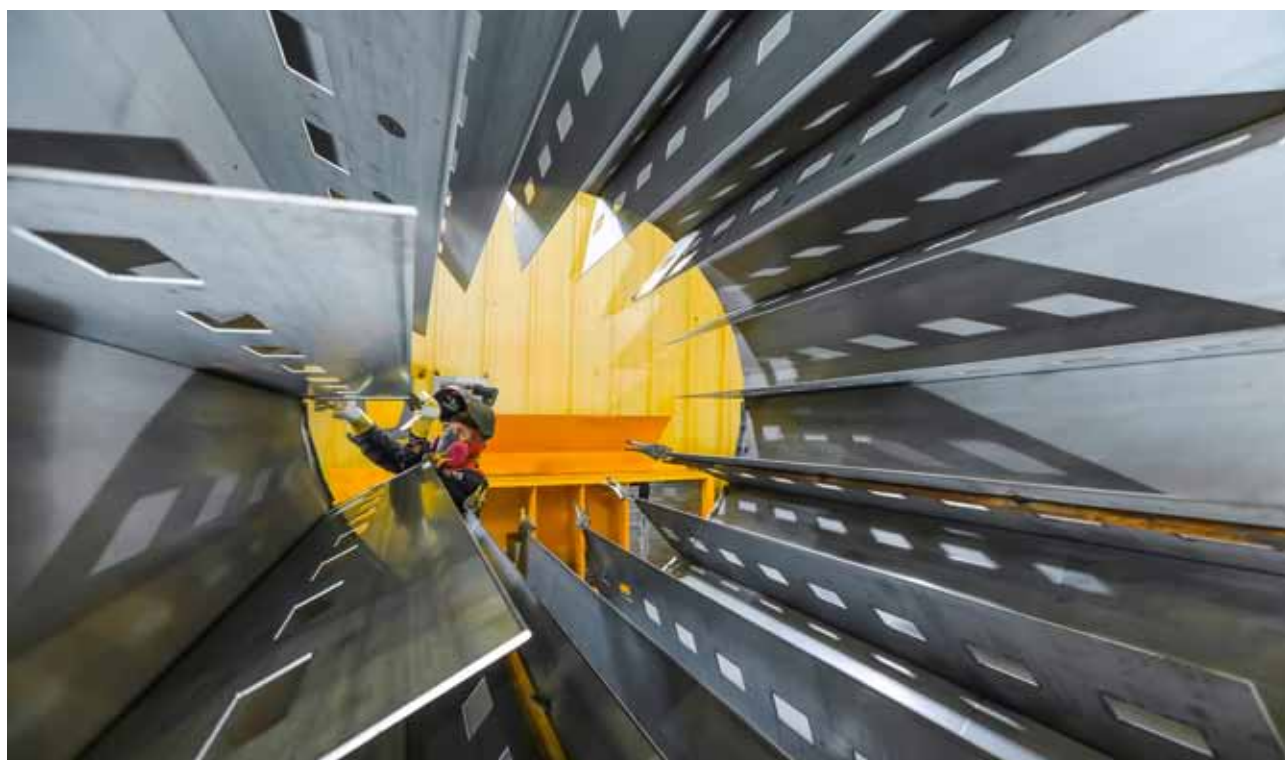
Pada tahun 2019, Perseroan mengimplemetasikan konsep 3 lini pertahanan sebagai upaya untuk meningkatkan kontrol dan manajemen risiko. Konsep ini membagi tugas dan tanggung jawab manajemen risiko dan kontrol kepada 3 lini pertahanan yang meskipun masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, memiliki obyektif tunggal untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan usaha perseroan melalui manajemen risiko yang efektif.

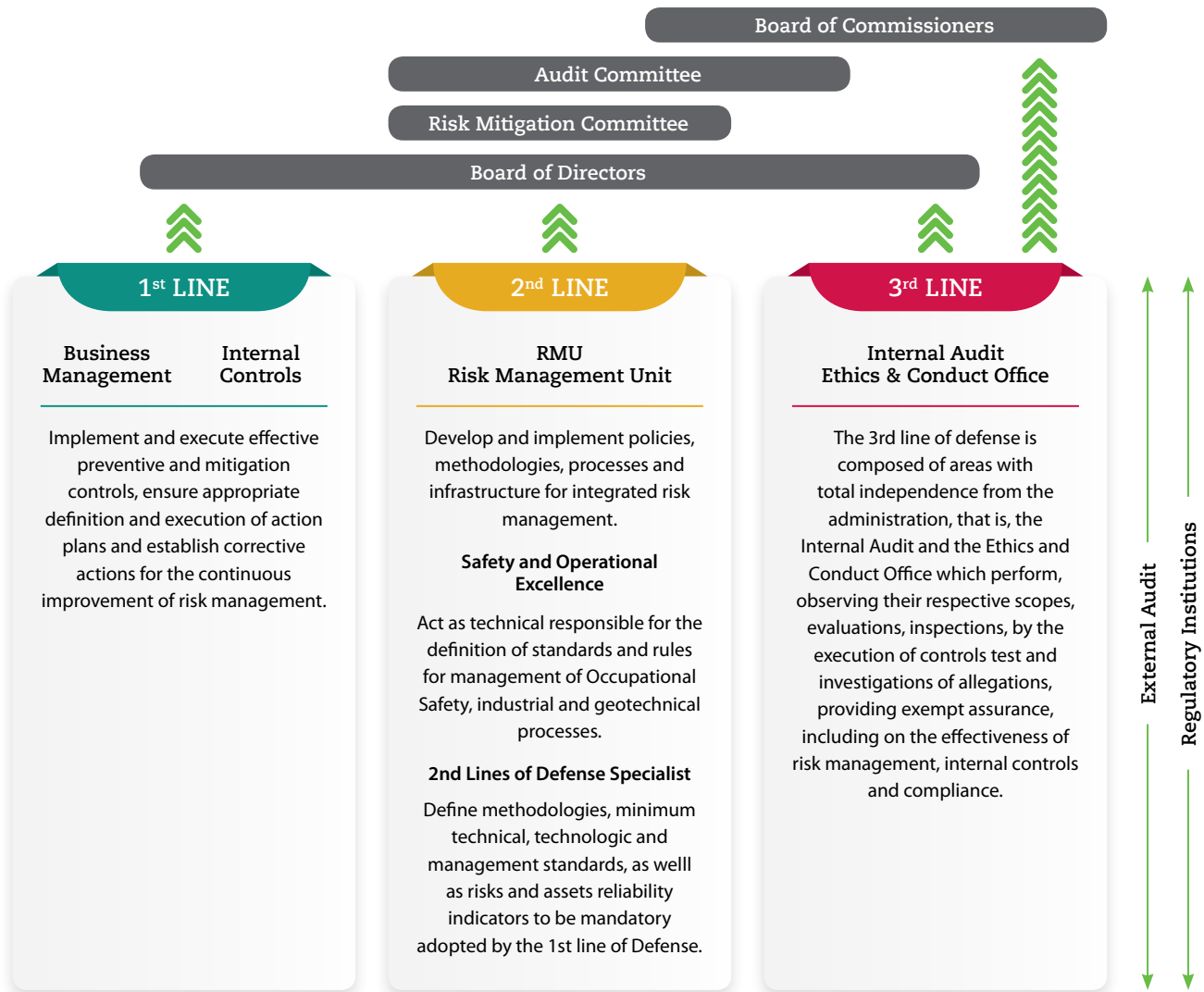
Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan konsep 3 lini pertahanan dijelaskan dalam bagan prosedur di bawah ini.

As a public company and listed in the IDX, the Company is aware of the importance of risk management in every aspect of the business. The Company has applied a risk management system in accordance with ISO 31000:2009, ISO 55000 and COSO-ERM on Risk Management and Asset Management. This system is used for management of strategic/business or operational risks that may affect the entire organization and may have a negative impact to the Company's business objectives.

In 2019, the Company implemented a 3 lines of defence concept in an effort to improve risk management and control. This concept distributes duties and responsibilities to 3 lines of defence, with each having specific duties and responsibilities, but with a single objective to support achieving the Company's business purpose through an effective risk management.

Distribution of duties and responsibilities in the implementation of the 3 lines of defence concept procedure is described the table below.





Pertahanan Lini Pertama adalah pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan risiko dan bertindak sebagai pemilik risiko. Dengan dukungan dari Internal Control, Manajemen Lini Depan, sebagai Pertahanan Lini Pertama bertugas memastikan pelaksanaan dan efektifitas kontrol pencegahan dan mitigasi dan rencana kerja terkait penurunan risiko.

Pertahanan Lini Kedua bertugas memberikan dukungan kepada manajemen senior dalam penerapan manajemen risiko dan menyediakan keahlian teknis untuk mengawasi Pertahanan Lini Pertama dalam mengelola risiko dan kontrolnya. Yang termasuk dalam kelompok ini termasuk: Unit Manajemen Risiko ("RMU"), Departemen Health & Safety, Departemen Operational Planning & Geotechnical, dan Governance & Compliance Officer.

First Line of Defence is the party who directly interacts with the risk on a daily basis and acts as risk owner. With support from the Internal Control, Front Line Management, the First Line of Defence ensures the execution and effectiveness of precautionary and mitigation control as well as work plan related to risk reduction.

Second Line of Defence supports senior management in the implementation of risk management and provides technical skill to monitor the First Line of Defence in risk management and its control. Second Line of Defence includes Risk Management Unit ("RMU"), Health & Safety Department, Operational Planning & Geotechnical Department, and Governance & Compliance Officer.





RMU adalah sebuah unit yang melapor ke CEO yang bertanggung jawab memfasilitasi proses pengelolaan risiko Perseroan. Tugas-tugas RMU termasuk penilaian risiko, menyiapkan kontrol pencegahan dan rencana mitigasi risiko, pemantauan pelaksanaan kontrol pencegahan dan rencana mitigasi, evaluasi proses pengelolaan risiko, serta membuat laporan kepada Direksi dan Komite Mitigasi Risiko. Pembentukan RMU disahkan Direksi melalui Piagam Unit Manajemen Risiko, yang menjadi pedoman kerja RMU.

Pertahanan Lini Ke-tiga adalah pihak independen di luar administrasi yang berfungsi meyakinkan Pertahanan Lini Pertama dan Kedua bekerja secara konsisten sesuai harapan para pemangku kepentingan Perseroan. Yang termasuk dalam fungsi ini adalah Internal Audit dan Divisi Etika dan Perilaku.

RMU is a unit reporting to CEO and responsible for facilitating the Company's risk management process. The RMU's duties include conducting risk assessments, preparing preventive controls and risk mitigation plans, monitoring preventive controls and mitigation plans, evaluating risk management processes, and preparing reports to the Board of Directors and the Risk Mitigation Committee. The RMU's establishment was approved by the Board of Directors through the Risk Management Unit Charter that serves as the RMU's working guidelines.

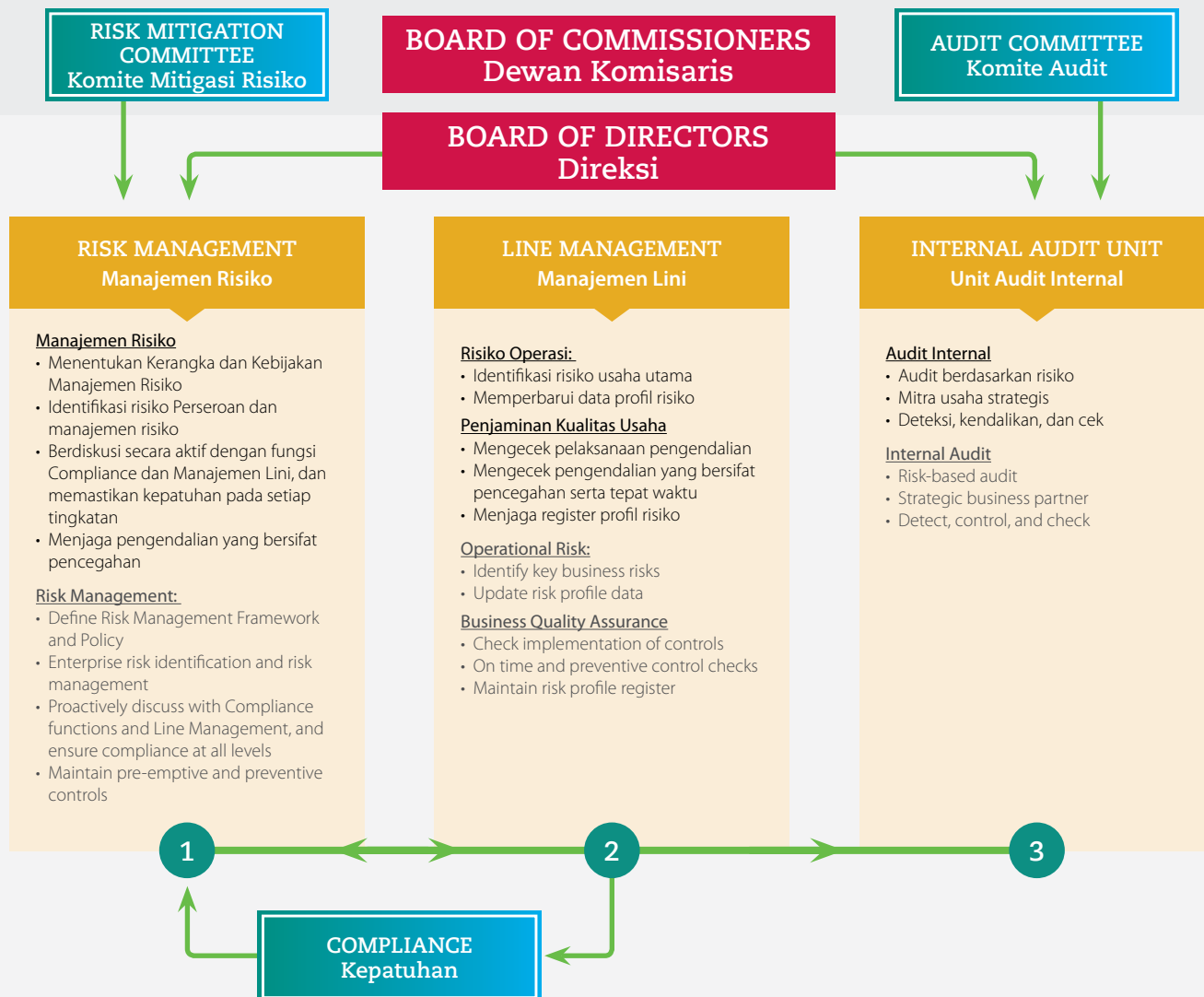
Third Line of Defence is an independent party outside the administration that functions to ensure consistent performance by the First and Second Lines of Defence in accordance with the Company stakeholders' expectation. This function includes Internal Audit and the Ethics & Conduct Office.

Struktur Pengelolaan Risiko

Risk Management Structure

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan



Pengelolaan risiko Perseroan dikendalikan Direksi dan RMU bertindak sebagai organ yang bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas dan tanggung jawab RMU diatur dalam Piagam Unit Manajemen Risiko yang telah disahkan Direksi pada rapat Direksi tanggal 3 Desember 2015.

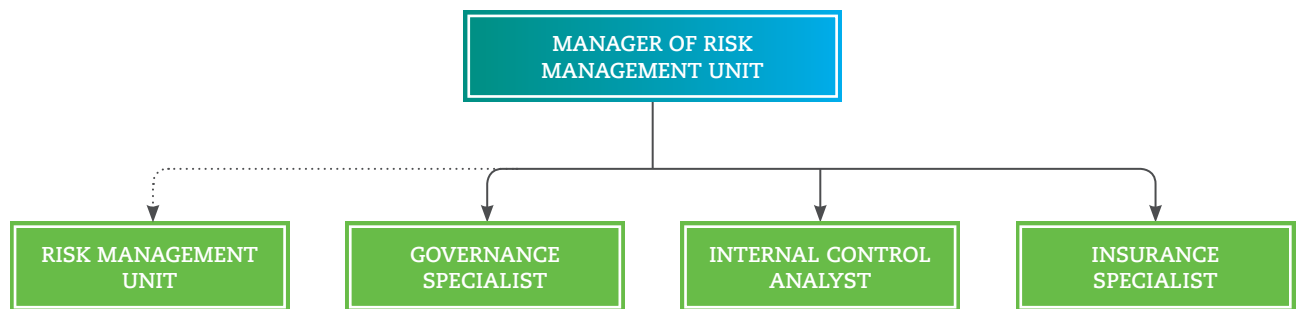
The Company's risk management is managed by the Board of Directors and RMU acts as a body responsible to the Board of Directors. The RMU's duties and responsibilities are regulated by the Risk Management Unit Charter as approved by the Board of Directors at their meeting on December 3, 2015.



RMU dipimpin Manajer RMU. Sampai dengan akhir tahun 2019 Manajer of RMU dijabat Budi Handoko, berdasarkan penunjukan Direksi melalui SK No. 01/SK-DIR/IX/2019 tanggal 27 September 2019. Manajer RMU dibantu lima orang perwakilan ex-officio dari masing-masing anggota Direksi, yakni Chief Executive Officer (CEO), Chief Operational Officer (COO), Human Resources and Corporate Supports (HRCS) dan Chief Financial Officer (CFO).

The RMU is headed by a Manager. At the end of 2019, the Manager of RMU was Budi Handoko, based on his appointment by the Board of Directors through their Decree No. 01/SK-DIR/IX/2019 dated September 27, 2019. The Manager of RMU is assisted by five ex-officio representatives from The Board of Directors members, i.e., Chief Executive Officer (CEO), Chief Operational Officer (COO), Human Resources and Corporate Supports (HRCS) and Chief Financial Officer (CFO).

STRUKTUR ORGANISASI RMU PERSEROAN
Company RMU Organization Structure



Tugas dan Tanggung Jawab RMU

RMU Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab RMU adalah:

- menyiapkan kebijakan, metode, proses dan infrastruktur untuk penerapan manajemen risiko terintegrasi;
- mengusulkan risk appetite statement dan revisinya kepada Komite Mitigasi Risiko dan Direksi;
- memfasilitasi penilaian risiko secara berkala dan memformulasikan matriks risiko beserta rencana mitigasinya;
- secara proaktif memastikan kepatuhan pengelolaan risiko perusahaan di semua tingkatan Perseroan bersama-sama dengan fungsi-fungsi kepatuhan dan manajemen lini;
- secara berkala mengkaji aktivitas manajemen risiko beserta rencana mitigasinya.

Duties and responsibilities of RMU include:

- preparing policies, methodology, processes and infrastructure for implementing integrated risk management;
- proposing risk appetite statements and their revisions to the Risk Mitigation Committee and the Board of Directors;
- facilitating periodic risk assessments and formulating risk matrices and mitigation plans;
- proactively ensuring the Company's risk management complies at all levels with the compliance and line management functions;
- periodically reviewing risk management activities and mitigation plans.

Penilaian Kinerja Unit Manajemen Risiko

Penilaian terhadap kinerja Unit Manajemen Risiko dilakukan melalui penilaian secara kolegial oleh Direksi berdasarkan identifikasi dan manajemen risiko perusahaan, termasuk dalam menindaklanjuti rencana tindakan serta penyampaian laporan kepada Direksi. Beberapa tugas belum dapat diselesaikan dan masih perlu perbaikan dalam rangka menerapkan praktik-praktik terbaik, namun Direksi menilai bahwa Perseroan kini memiliki praktik manajemen risiko perusahaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karenanya, kinerja RMU di tahun 2019 telah memenuhi ekspektasi.

Risk Management Unit Performance Assessment

RMU performance assessment is conducted through collegial assessment by the Board of Directors based on identification and management of enterprise risks, including following up with the action plans and the delivery of reports to the Board of Directors. Some works were not completed and there are still room to improve towards best practices, but the Board of Directors consider the Company now has stronger enterprise risk management practices than before. Therefore, the RMU performance in 2019 has met the expectation.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko

Risk Management Framework

Perseroan melengkapi penerapan pengelolaan risiko dengan menyusun panduan manajemen risiko, berupa Kebijakan Manajemen Risiko yang telah diperbaharui pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Direksi dan Risk Management Manual yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris tertanggal 27 Maret 2017.

Secara umum Kebijakan Manajemen Risiko mengatur kerangka kerja pengelolaan risiko sebagai berikut:

- Klasifikasi risiko Perseroan ke dalam 7 profil risiko (risiko aturan, risiko hukum, risiko pasar, risiko operasional, risiko komunitas, risiko teknologi, dan risiko teknologi informasi);
- Penyusunan peta risiko terintegrasi dan kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan validasi tahunan;
- Penentuan risk appetite oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam mengelola risiko;
- Pembagian tanggung jawab terkait pengelolaan manajemen risiko antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite Mitigasi Risiko, dan ketiga lini pertahanan.

Kebijakan Manajemen Risiko juga mengatur alur proses yang harus dilalui Perseroan dalam mengelola risiko yang meliputi tujuh tahapan. Proses yang berlangsung memungkinkan Perseroan mengidentifikasi risiko usaha, tingkat risiko, upaya pengendalian, rencana tindakan yang diperlukan dan menyusun rekomendasi untuk menurunkan tingkat risiko. Secara keseluruhan proses melibatkan kerjasama antara fungsi organisasi, namun sebagian besar tahapan berada di bawah RMU dan Manajemen Lini.

The Company has continued to develop its risk management by formulating risk management guidelines, comprising a Risk Management Policy that was updated on October 15, 2019 by the Board of Directors and Risk Management Manual, approved by the Company's Board of Commissioners at their Meeting dated March 27, 2017.

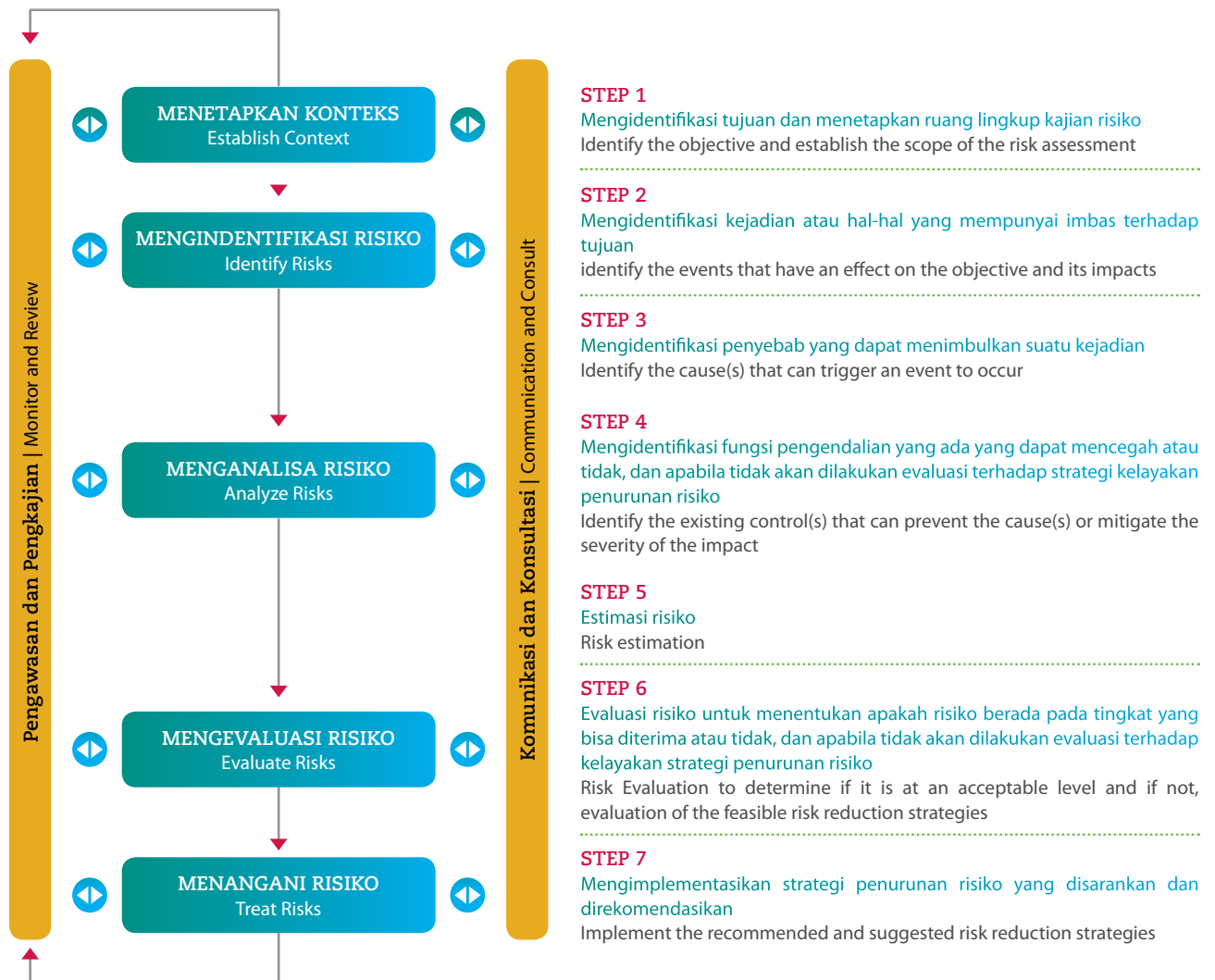
The Risk Management Policy regulates the risk management framework as follows:

- The Company's risk classification in 7 risk profiles (regulation risk, legal risk, market risk, operational risk, community risk, technology risk, and information technology risk);
- Formulation of integrated risk map and the necessary annual evaluation and validation;
- Determination of risk appetite by the Board of Commissioners as risk management guideline;
- Distribution of responsibilities related to risk management between Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Mitigation Committee, and three lines of defence.

The Risk Management Policy also regulates the process flow's seven stages that the Company must follow for managing risks. This process enables the Company to identify business risks, risk levels, control efforts, action plans and recommendations to lower the risk levels. The overall process involves collaboration between organizational functions, however most of the stages are under the RMU and Line Management.



ALUR PROSES MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Process Flow



Siklus ERM

ERM Cycle

Setiap tahun Perseroan menyelenggarakan ERM workshop, sebelum siklus anggaran baru dimulai. Tujuannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan risiko Perseroan, termasuk evaluasi terhadap register risiko, penilaian risiko, efektivitas kontrol pencegahan dan rencana mitigasi, dan strategi penurunan risiko dan alokasi pendanaannya.

Untuk tahun buku 2019, kegiatan ERM workshop diselenggarakan pada bulan Desember. Peserta ERM workshop adalah Direksi dan manajer-manajer kunci. Sebagai tambahan, evaluasi rutin yang melibatkan lini pertahanan pertama dan kedua dilakukan bulanan. Hal-hal yang dievaluasi termasuk efektivitas kontrol risiko dan rencana kerja untuk meningkatkan efektivitas kontrol dan/atau mengurangi tingkat risiko.

Every year the Company conducts an ERM workshop before the new budget cycle begins. The purpose is to comprehensively evaluate the Company's risk management, including evaluating the risk register, risk assessments, prevention controls effectiveness and mitigation plans, and risk reduction strategies and funding allocation.

For fiscal year 2019, the ERM workshop activities were held in December. Participants at the ERM workshop included the Board of Directors and key managers. In addition, routine evaluations involving first and second lines of defense were conducted on a monthly basis. Matters evaluated include risk control effectiveness and work plans to improve control effectiveness and/or reduce risk levels.

Siklus ERM ERM Cycle		
Lokakarya ERM ERM Workshop	<ul style="list-style-type: none"> Menyepakati risiko saat ini dan <i>Maximum Foreseeable Loss</i> ("MFL") Menyepakati tingkat risiko Menyepakati sebab dan tingkat kemungkinan kejadian Membuat diagram risiko bowtie (jika diperlukan) Memperbaharui matriks risiko Dihadiri Direksi dan manajer-manajer kunci 	<ul style="list-style-type: none"> Agree on current risks and MFL Agree on severity Agree on causes and likelihood Prepare bowtie (if required) Update risk matrix Attended by Board of Directors & key managers
Komunikasi Communicate	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan strategi pengelolaan risiko kepada Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Present risk management strategy to Board of Commissioners
Rencana Aksi Action Plan	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan melaksanakan tindakan untuk memenuhi sasaran strategi risiko Memastikan pendanaan yang dibutuhkan suatu tindakan terpenuhi Memantau dan mengelola tindakan yang sedang berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> Define and implement actions to meet risk strategy objectives Ensure actions requiring budget are funded Monitor and manage work in progress
Daftar Risiko Risk Register	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah risiko-risiko sebelumnya Menambahkan data risiko baru sesuai konteks terkini 	<ul style="list-style-type: none"> Review previous risks Add new risks based on current context

PROYEK HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA)

Sebagai bentuk implementasi komitmen Perseroan terhadap nihil celaka (*zero harm*) dan perbaikan terus menerus terhadap risiko operasi, pada bulan Oktober dan November 2019 dilaksanakan proyek HIRA. Kegiatan yang melibatkan konsultan internasional ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisa aktivitas operasi yang memiliki risiko keselamatan

HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA) PROJECT

As a form of the Company's commitment to zero harm and continuous improvement of operating risks, in October and November 2019 the HIRA project was implemented. The activities involved international consultants who mapped and analyzed operational activities regarded as very high safety risks, and mapped and prepared controls, and related



yang sangat tinggi, dan memetakan dan menyiapkan kontrol dan kriteria kinerja terkait untuk meyakinkan Perseroan memiliki tata kelola yang memadai terhadap risiko-risiko tersebut.

Proyek ini menghasilkan daftar kejadian yang tidak diinginkan dalam operasi Perseroan, Analisa risiko terkait, kontrol kritikal, evaluasi risiko, dan rencana kerja untuk menurunkan tingkat risiko masing-masing kejadian yang tidak diinginkan tersebut, yang menjadi prioritas Perseroan untuk diselesaikan.

performance criteria to ensure the Company followed adequate governance of those risks.

This project produced a list of undesirable events in the Company's operations, related risk analysis, critical control, risk evaluation, and a work plan to reduce the risk level of each of these undesirable events, which the Company has prioritized for completion.

Klasifikasi Risiko

Risk Classification

Berdasarkan proses yang telah dilakukan, RMU mengidentifikasi ada beberapa hal yang termasuk dalam tujuh kategori risiko yang dihadapi Perseroan selama tahun 2019. Pengelolaan yang dilakukan dinilai telah mampu mengendalikan risiko sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan, dan kegiatan Perseroan tidak terganggu.

Following this process, RMU identified several matters within the seven risk categories faced by the Company during 2019. The management carried out what was considered sufficient risk controls so that any potential losses incurred could be minimized, and the Company's activities were not disturbed.

PROFIL RISIKO TAHUN 2019

2019 Risk Profile

Kategori Risiko Berdasarkan Panduan ERM Risk Category Based on ERM Guide	Profil Risiko Dihadapi Risk Profile Faced	Rencana Aksi Action Plan
Risiko Peraturan Regulatory Risk	Kegagalan pemenuhan aturan yang berlaku khususnya terhadap standar lingkungan hidup, dan rencana perpanjangan izin operasi Failure to comply with applicable regulations specifically to environmental standards, and plans for extension of operating licenses	Implementasi manajemen lingkungan hidup, Pemenuhan komitmen amendemen KK 2014 Environmental management implementation, fulfillment of commitments to the 2014 COW amendment
Risiko Hukum Legal Risk	Litigasi/tuntutan hukum terhadap Perseroan dan/atau manajemen Litigation/lawsuits against the Company and/or management	Penerapan kode etik, program anti suap dan korupsi, program whistleblower Application of codes of ethics, anti-bribery and corruption programs, whistleblower programs
Risiko Pasar Market Risk	Perubahan harga komoditas, khususnya nikel, minyak, dan batubara yang berpengaruh besar bagi kinerja keuangan Perseroan Changes in commodity prices, particularly nickel, oil and coal that have a major influence on the Company's financial performance	Proyek Continuous Improvement, Inisiatif Penghematan Biaya, Growth Projects Continuous Improvement, Cost Saving Initiatives, Growth Projects
Risiko Operasional Operational Risk	Kerusakan besar pada fasilitas dan infrastruktur utama produksi, seperti: Processing Plant, Main Tanks, and Hydro Plants Substantial damage to major production facilities and infrastructure, such as: Processing Plants, Main Tanks, and Hydro Plants	Rencana Tindak Darurat, Business Continuity Plan, Emergency Management Plan, HIRA follow up plan Emergency Action Plan, Business Continuity Plan, Emergency Management Plan

PROFIL RISIKO TAHUN 2019

2019 Risk Profile

Kategori Risiko Berdasarkan Panduan ERM Risk Category Based on ERM Guide	Profil Risiko Dihadapi Risk Profile Faced	Rencana Aksi Action Plan
Risiko Masyarakat Community Risk	Gangguan operasi terkait izin sosial dari masyarakat sekitar tambang Operational disturbances related to social permits with communities around the mines	Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ("PKPM") Implementation of community development and empowerment programs ("PKPM")
Risiko Teknologi Technology Risk	Kemampuan daya saing Perseroan di dalam industri penambangan dan pengolahan nikel terkait penerapan teknologi The Company's competitiveness in the nickel mining and processing industry related to the use of technology	Program riset dan teknologi, peninjauan joint venture Research and technology program, exploration of joint ventures
Risiko Informasi Information Risk	Kegagalan penerapan keamanan siber Failure to implement cyber security	Penerapan manajemen informasi teknologi Information technology management implementation

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat risiko, pada periode pelaporan terdapat lima risiko yang memiliki tingkat risiko kritikal.

1. Kegagalan proyek pengembangan Bahodopi dan Pomalaa

Proyek pengembangan di Bahodopi dan Pomalaa akan menjamin daya saing Perseroan di masa depan, juga akan memberikan pengaruh positif bagi kemungkinan perpanjangan izin usaha setelah tahun 2025 dan izin sosial Perseroan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Perseroan tengah menyiapkan rencana joint venture sebagai strategi proyek ekspansi di Bahodopi dan Pomalaa.

2. Kerusakan besar pada processing plant

Dampak terhadap keselamatan kerja dan gangguan bisnis dari kerusakan besar pada fasilitas pengolahan nikel seperti tanur pengering, tanur pereduksi, dan tanur listrik, akan cukup signifikan. Perseroan memiliki standar operasi, program pelatihan, dan program pemeliharaan yang detail dan menyeluruh untuk memastikan reliabilitas dan keamanan operasi semua fasilitas produksi.

Perseroan juga menyiapkan Rencana Tindak Darurat ("RTD") dan *Business Continuity Plan* ("BCP") sebagai rencana mitigasi. Rencana Tindak Darurat tersebut dilengkapi dengan simulasi rutin untuk memastikan *Emergency Management Team* ("EMT") dan karyawan terkait memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi kondisi darurat jika diperlukan.

Based on the risk level evaluation results, there were five risks that could reach a critical risk level, namely:

1. Failure of the Bahodopi and Pomalaa development projects

The Bahodopi and Pomalaa development projects will guarantee the Company's future competitiveness, and will also have a positive influence on the possibility of business license extension after 2025, and the Company's social permits in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi. The company is preparing a joint venture plan as a strategy for the expansion projects in Bahodopi and Pomalaa.

2. Major damage to the processing plants

The impact on work safety and business disruption from major damage to nickel processing facilities such as dryers, kilns, and furnaces, being quite significant. The Company has operating standards, training programs and detailed and comprehensive maintenance programs to ensure the reliability and security of its operations at all production facilities.

The Company also prepares an Emergency Action Plan ("RTD") and a Business Continuity Plan ("BCP") as part of its mitigation plan. The Emergency Action Plan includes routine simulation drills to ensure the Emergency Management Team ("EMT") and related employees have the knowledge and skills needed to deal with emergencies if needed.



3. Kegagalan memperoleh perpanjangan izin operasi setelah tahun 2025

KK Perseroan akan berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan regulasi, Perseroan diizinkan mengajukan perpanjangan izin operasi dua tahun sebelum berakhir. Perpanjangan izin ini menjadi krusial bagi keberlanjutan bisnis Perseroan.

Perseroan meyakini pemenuhan lima komitmen yang tercantum dalam Amendemen KK tahun 2014 akan berpengaruh positif bagi peluang perolehan perpanjangan izin operasi setelah 2025, dan menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikannya.

4. Kegagalan Bendungan Batubesi, Balambano, dan Karebbe

Sebagai komitmen terhadap kelestarian bumi dan memastikan daya saing, Perseroan memiliki dan mengoperasikan tiga PLTA yang disuplai oleh tiga bendungan. Kegagalan salah satu dari tiga bendungan ini akan memiliki dampak serius bagi pemukiman yang berada di daerah muara dan hilir sungai.

Perseroan memiliki standar operasi, perawatan, dan manajemen bendungan yang menjadi tolak ukur manajemen bendungan di Indonesia, termasuk program sertifikasi kelayakan bendungan untuk memastikan keamanan bendungan-bendungan yang dioperasikan. Perseroan juga telah menyiapkan RTD bendungan yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

5. Kegagalan memenuhi standar kepatuhan lingkungan hidup

Kegiatan penambangan dan pengolahan nikel Perseroan harus memenuhi berbagai aturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Perseroan memiliki berbagai program untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan hidup. Penjelasan terperinci mengenai pengelolaan lingkungan hidup Perseroan dapat dilihat dalam Laporan Keberlanjutan.

3. Failure to obtain an operating license extension after 2025

The Company's COW will expire in 2025. Based on regulations, the Company is permitted to submit an operating license extension request two-years before expiration. This license extension is crucial for the Company's business sustainability.

The Company believes that the fulfillment of the five commitments stated in the 2014 COW Amendment will have a positive effect on the opportunity to obtain an operating license extension after 2025, and various strategic steps have been prepared to ensure compliance.

4. Failure of the Batubesi, Balambano, and Karebbe Dams

As a commitment to environmental preservation, and to ensure competitiveness, the Company owns and operates three HEPP supplied by three dams. The failure of one of these three dams could have a serious impact on downstream settlements.

The Company has dam operations, maintenance and management standards, which have become a benchmark for dam management in Indonesia, including a dam certification feasibility program to ensure the safety of the operated dams. The Company has also prepared dam Emergency Action Plans that have been approved by the East Luwu District government.

5. Failure to meet environmental compliance standards

The Company's nickel mining and processing activities must meet the applicable environmental regulations in Indonesia. The Company has various programs to ensure compliance with environmental standards. A detailed explanation of the Company's environment management can be seen in the Sustainability Report.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System Effectiveness Evaluation

Selama tahun 2019 Perseroan juga melakukan upaya perbaikan sistem manajemen risiko untuk mendukung penerapan GCG, serta membangun budaya risiko di kalangan karyawan dan mitra kerja/kontraktor. Perbaikan sistem manajemen risiko yang telah dilaksanakan meliputi:

- Peningkatan penyelarasan profil risiko dengan rencana belanja modal
- Implementasi model 3 lini pertahanan
- Penambahan fungsi Manajemen Risiko Operasional dan Proses (*Operational and Process Risk Management*) di dalam struktur Direktur Operasi
- Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*), Perseroan memandang perlu peningkatan tata kelola risiko operasional mengingat Perseroan memiliki dan mengelola beberapa aset besar yang memiliki risiko proses dan risiko operasi yang signifikan. Fungsi Manajemen Risiko Operasional dan Proses kemudian ditambahkan di bawah fungsi Health & Safety yang melapor ke Direktur Operasi. Dengan penambahan fungsi ini, Perseroan yakin tata kelola risiko proses dan operasi khususnya terkait proses penambangan dan pengolahan nikel akan semakin baik dan mendukung pencapaian visi nihil celaka (*zero harm*) Perseroan.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan juga menggandeng beberapa konsultan nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang manajemen aset, bendungan, keselamatan kerja, dan manajemen bisnis dalam upaya meningkatkan tata kelola manajemen risiko Perseroan.

In 2019, the Company took risk management system improvement measures to support the GCG implementation, as well as build the risk culture among employees and work partners/contractors. Risk management system improvements included:

- Improving the risk profile alignment with capital expenditure plan
- Implementing the 3 lines of defence model
- Adding Operational Risk Management and Process functions in the Operational Director's structure
- Renewing the Risk Management Policy.

As part of continuous improvement, the Company considered it necessary to improve its operational risk governance as the Company owns and manages major assets with significant processing and operational risks. Operational and Process Risk Management functions were added under the Health and Safety function that reports to the Operational Director. With this addition, the Company is confident that the processing and operational risk governance, particularly related to mining process and nickel processing, will improve and support the achievement of the Company's vision of 'zero harm'.

During 2019, the Company engaged a number of national and international consultants in assets management, dam, occupational health, and business management to improve the Company's risk management governance.





Perkara Penting yang Dihadapi

Important Cases Faced

POKOK PERKARA | SUBJECT MATTER

Pada pertengahan bulan Desember 2015, Perseroan memperoleh kutipan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA") mengenai Perkara No.1279K/Pid.Sus/2012 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kehutanan 1999 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997 ("Putusan MA"). Salinan resmi Putusan MA tersebut baru diterima oleh Perseroan pada bulan Oktober 2016.

Faktanya, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut, akan tetapi MA justru menghukum Perseroan untuk membayar sejumlah denda dan menyerahkan beberapa kendaraan milik Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa MA telah melakukan kekeliruan dengan menghukum Perseroan; dan karenanya pada bulan Maret 2016 Perseroan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") atas putusan MA tersebut. Namun demikian, Perseroan menganggap perlu untuk mengungkapkan kewajiban membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) (nilai penuh), meskipun Perseroan telah mengajukan permohonan PK.

In mid December 2015, the Company obtained an excerpt of the Supreme Court decision regarding Case No. 1279 K/Pid. Sus/2012 with respect to the alleged violations of the 1999 Forestry Law and the 1997 Environmental Law. The official copy of Decision No. 1279 K/Pid.Sus/2012 was only received by the Company in October 2016.

In fact, the Company has neither been named as a suspect nor determined as a defendant in the case, but the Supreme Court found that the Company should pay a fine and surrender Company vehicles.

The Company believed that this was an error by the Supreme Court to punish the Company; and therefore, in March 2016 the Company submitted a Reconsideration (Peninjauan Kembali - "PK") against the Supreme Court decision. However, the Company still needs to disclose its obligation to pay the fine of IDR5 billion (full amount), even though the Company has submitted a PK application.

STATUS PENYELESAIAN PERKARA | SETTLEMENT STATUS

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menerima pemberitahuan putusan dari MA sehubungan dengan permohonan PK yang diajukan oleh Perseroan pada bulan Maret 2016.

As at December 31, 2019, the Company has received notification of the Supreme Court decision in relation to the PK application filed by the Company in March 2016.

PENGARUH TERHADAP PERSEROAN | SIGNIFICANCE TO THE COMPANY

Sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI nomor: 1279 K/PID. SUS/2012, tanggal 29 September 2015, Perseroan diharuskan membayar denda korporasi sebesar IDR5.000.000.000,-.

Dua orang mantan Direksi dan satu orang mantan General Manager Project, serta satu orang mantan Senior Project Manager Perseroan statusnya menjadi Terpidana dan saat ini sedang menjalani masa pidana.

Pursuant to the Supreme Court Decision Number: 1279 K/PID. SUS/2012, dated September 29, 2015, the Company is required to pay a corporate penalty of IDR5,000,000,000.-

Two former Directors and one former Project General Manager, as well as one former Senior Project Manager of the Company, have the status of being convicted and are currently serving their sentence.

RISIKO YANG DIHADAPI DAN PENGARUH TERHADAP PERSEROAN | ASSOCIATED RISK AND SIGNIFICANCE TO THE COMPANY

Putusan MA tersebut pada intinya menyatakan bahwa keempat mantan karyawan Perseroan bersalah dan menghukum keempatnya dengan pidana penjara selama 2 tahun dan bahwa Perseroan dijatuhi hukuman denda sebesar IDR5.000.000.000,- (nilai penuh). Putusan MA tersebut juga menghukum agar beberapa kendaraan Perseroan disita oleh Negara.

The decision specifically stated that four former employees of the Company were guilty as charged and therefore sentenced them to 2 years imprisonment; and that the Company was ordered to pay a fine of IDR5,000,000,000 (full amount). The decision also ordered that some vehicles of the Company were to be seized by the State.



POKOK PERKARA | SUBJECT MATTER

Pada akhir tahun 2019, terdapat perkara gugatan Tata Usaha Negara (“TUN”) antara CV Bumi Nikel Bungku melawan Bupati Morowali, Nomor Perkara: 15/G/2019/PTUN.PL. di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (“Perkara No. 15/2019”).

Dalam Perkara No.15/2019, CV Bumi Nikel Bungku (“BNB”), mengajukan gugatan TUN terhadap Bupati Morowali (Tergugat I) atas dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) milik BNB oleh Bupati Morowali pada tahun 2014 karena IUP tersebut tumpang tindih dengan Wilayah KK Perseroan di Blok Bahodopi. Perseroan kemudian mengajukan diri sebagai Pihak Tergugat II Intervensi untuk membela kepentingan Perseroan.

In late 2019, CV Bumi Nikel Bungku (“BNB”) filed a state administrative claim against Bupati Morowali under case No.15/G/2019/PTUN.PL at the State Administrative Court of Palu (“Case No.15/2019”).

In this Case No.15/2019, BNB filed a State Administrative Claim against the Bupati of Morowali (Defendant I) for revocation of BNB’s Mining Permit (“IUP”) in 2014 because the IUP overlapped with the Company’s COW area in Bahodopi Block, Central Sulawesi. Therefore, the Company filed an intervention claim as Intervention Party II to protect the Company’s interest.

STATUS PENYELESAIAN PERKARA | SETTLEMENT STATUS

Persidangan masih berlangsung.

Court Proceedings are still ongoing.

**PENGARUH TERHADAP PERSEROAN & RISIKO YANG DIHADAPI DAN PENGARUH TERHADAP PERSEROAN
SIGNIFICANCE TO THE COMPANY & ASSOCIATED RISK AND SIGNIFICANCE TO THE COMPANY**

Apabila gugatan TUN dikabulkan, dapat berakibat tumpang tindih dengan sebagian Wilayah KK Perseroan di Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah. Perseroan akan mengajukan banding dan melakukan upaya hukum yang ada dan perlu.

If the claim is granted, there will be a partial overlap with the Company’s COW area in Bahodopi Block, Central Sulawesi. The Company will file an appeal and take any legal measures available and necessary.





Informasi Tentang Sanksi Administratif Terhadap Perseroan

Information on Administrative Sanctions to The Company

Sampai dengan akhir periode pelaporan, baik Perseroan maupun Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak pernah menerima sanksi administratif maupun sanksi lain dari BEI, OJK maupun pihak berwenang lain.

Up until the end of reporting period, neither the Company nor members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors received any administrative sanctions from the IDX, OJK or other authorities.



Divisi Kode Etik dan Perilaku

Ethics and Conduct Office

Divisi ini dibentuk pada akhir tahun 2019 di bawah departemen Legal dengan seorang personel yang memiliki secara fungsional tugasnya berhubungan langsung dengan Departemen Etik dan Perilaku, Vale S.A. di Brazil.

This office was established end of 2019 under Legal department with one personnel which, functionally, the duties and responsibilities directly coordinate with the Department of Ethics and Conduct of Vale S.A. in Brazil.

Sejalan dengan fungsi Departemen Etik dan Perilaku di Vale S.A. Brazil, unit ini memiliki 2 fungsi utama yaitu untuk mempromosikan etika dan menginvestigasi aduan. Promosi etika dilakukan untuk peningkatan kesadaran etika yang berkesinambungan di Perseroan. Sedangkan investigasi aduan dilakukan untuk memberikan para pemangku kepentingan internal dan eksternal saluran komunikasi yang proaktif, transparan, independen, dan tidak memihak untuk menangani keluhan dan masalah.

Align with the Department of Ethics and Conduct of Vale S.A. in Brazil, this office has 2 main functions namely, to promote ethics and investigate any allegation. Promoting ethics aimed to improve sustainable ethics awareness within the Company. While investigation of allegation facilitates proactive, transparent, independent and impartial communication channel to both internal and external stakeholders, in handling any allegation and issues.



Informasi Tentang Kode Etik

Information on Code of Ethics

Kode Etik dan Perilaku menjadi pedoman semua pihak di Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha maupun operasi secara beretika dan berintegritas. Kode Etik dan Perilaku yang berlaku saat ini mengadopsi Kode Etik dan Perilaku Vale S.A., dan telah disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The Code of Ethics and Conduct is a guideline for all parties in the Company for how they carry out business activities and operations ethically and with integrity. The current Code of Ethics and Conduct adopts the Vale S.A. Code of Ethics and Conduct and has been jointly approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Kode Etik dan Perilaku bersifat dinamis, dan senantiasa diperbaharui agar selaras dengan perkembangan regulasi, norma serta bisnis Perseroan.

The Code of Ethics and Conduct is dynamic and is constantly being updated in line with developments in the Company's regulations, norms and business.

Perseroan juga memiliki Kode Etik dan Perilaku Pemasok yang berlaku sejak tahun 2016. Kode Etik dan Perilaku Pemasok pada dasarnya merupakan pengembangan dari Kode Etik dan Perilaku Perseroan, namun dengan kekhususan hal-hal yang dapat dan/atau tidak dapat dilakukan oleh para pemasok pada saat mereka bekerja untuk dan/atau atas nama Perseroan.

The Company also has a Supplier's Code of Ethics and Conduct effective since 2016. It is basically a development of the Company's Code of Ethics and Conduct but specifies what can and/or cannot be done by suppliers when they work for and/or on behalf of the Company.



Pokok Pokok Kode Etik dan Perilaku

Code of Ethics and Conduct Principles

Kode Etik dan Perilaku Perseroan terdiri dari beberapa pokok. Setiap pokok mencantumkan perilaku yang diharapkan dan perilaku yang tidak dapat diterima, yang harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa kecuali.

The Code of Ethics and Conduct of the Company consists of seven principles, each of which includes expected behavior, which all parties must obey without exception.

Pokok Pokok Kode Etik dan Perilaku Code of Ethics and Conduct Principles	
Prinsip-prinsip Fundamental	<ul style="list-style-type: none"> · Menghargai kehidupan, dengan fokus pada tindakan pencegahan, perhatian terhadap kesejahteraan di tempat kerja, kesehatan dan keselamatan, fasilitas, dan rutinitas dalam sistem Perseroan, menghargai para karyawannya. · Mengamati tata kelola yang baik, prinsip pembukuan dan praktik manajemen, serta kejelasan, obyektif, dan ketepatan waktu dalam berkomunikasi dengan para pemegang saham, investor, dan pasar modal. · Perlindungan, dukungan, dan kesadaran akan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan Perseroan dan diseluruh rantai pasokan sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. · Mencapai tujuan bisnis sesuai dengan kewajiban sosial Perseroan, bertindak secara sadar dan bertanggung jawab dengan menghargai aspek sosial-ekonomi dan lingkungan di seluruh kegiatan Perseroan, dan berkontribusi kepada pengembangan masyarakat tempat Perseroan beroperasi, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
Fundamental Principles	<ul style="list-style-type: none"> · Respect for life, with a focus on precautionary measures, attention to workplace welfare, health and safety, facilities, and routines within the Company's system, valuing our people. · Observing good corporate governance, bookkeeping and principles and management practices, as well as clarity, objectivity, and timeliness in communicating with shareholders, investors, and capital markets. · Protect, support, and be aware of Human Rights in corporate activities, throughout the supply chain, in accordance with the principles of the Universal Declaration of Human Rights. · Achieving the business goals in accordance with the Company's social obligations, acting consciously and responsibly by respecting the socio-economic and environmental aspects of all Company activities, and contributing to the development of the communities where the Company operates, and actively encouraging community participation.
Jangkauan dan Cakupan	Kode Etik dan Perilaku harus menjadi dipatuhi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta komite pendukungnya, kepala pejabat eksekutif dan pejabat eksekutif lainnya, karyawan, pekerja magang, penyedia jasa dan setiap orang yang bertindak atas nama Perseroan, yang berlaku dan berfungsi sebagai pedoman umum.
Coverage and Scope	The Code of Ethics and Conduct must be respected by the Board of Commissioners and the Board of Directors and their supporting committee members, and chief executive officers, and other executive officers, employees, apprentices, services providers and any other persons who act on behalf of the Company, and serves as a general guideline.
Aturan Perilaku Etis	<p>Panduan berperilaku ketika terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bekerja bersama memastikan kesehatan dan keselamatan · Menghormati hak asasi manusia · Menggalakkan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam · Peduli pada lingkungan · Bersaing dengan jujur · Menghindari benturan kepentingan · Memerangi korupsi · Memakai sumber daya perusahaan dengan benar · Bekerja dengan pemasok · Bertukar hadiah · Melindungi informasi kita · Mewakili Perseroan
Code of Ethics and Conduct Rules	<p>Guidance on how we should act:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Working together to ensure health and safety · Respecting human rights · Promoting an inclusive and diverse work environment · Caring for the environment · Competing fairly · Avoiding conflicts of interest · Fighting against corruption · Using company resources correctly · Working with suppliers · Exchanging gifts · Protecting our information · Representing the Company



Pokok Pokok Kode Etik dan Perilaku Pemasok
Suppliers' Code of Ethics and Conduct Principles

Prinsip-prinsip Fundamental	<p>Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang lebih adil, seimbang secara lingkungan dan sejahtera secara ekonomi.</p> <p>Untuk mencapai tujuan ini, kami perlu bertindak, secara positif dan proaktif untuk mempengaruhi masing-masing mitra dan pihak lain yang terlibat dalam rantai produksi Perseroan.</p> <p>Kode Etik dan Perilaku Pemasok dimaksudkan untuk memperjelas apa yang Perseroan maksud dengan perilaku etis dalam hubungan komersialnya dengan perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan. Demikian juga, Perseroan berharap agar pemasok akan menyebarkan kriteria ini ke seluruh rantai kerja mereka, yaitu kepada pelanggan, mitra, pemasok bahan baku dan penyedia jasa mereka yang langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan mereka.</p> <p>The Company is committed to developing a sustainable business model and contributing to a more equitable, environmentally and economically prosperous society.</p> <p>To achieve this goal, we need to act positively and proactively to influence our partners and other parties involved in the Company's production chain.</p> <p>The Suppliers' Code of Ethics and Conduct is intended to clarify what ethical conduct the Company expects in its commercial relationships with companies providing services and products to the Company. Likewise, the Company expects our suppliers to deploy these criteria throughout their work chain, i.e. with customers, partners, suppliers of raw materials and their service providers that are directly or indirectly linked to their activities.</p>
Fundamental Principles	
Cakupan dan Jangkauan	<p>Kode Etik dan Perilaku Pemasok ini berlaku bagi seluruh pemasok Perseroan, dan pemasok-pemasok dari afiliasi dan anak perusahaan Vale, di negara-negara di mana afiliasi Perseroan menjalankan bisnis.</p>
Coverage and Scope	<p>The Suppliers' Code of Ethics and Conduct applies to all Company suppliers, and suppliers of its affiliates and subsidiaries, in countries where affiliates conduct business.</p>
Ketentuan Dalam Kode Etik dan Perilaku Pemasok	<ul style="list-style-type: none"> · Kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan dan kontrak · Hubungan yang transparan dan informasi yang jujur · Hubungan komersial yang beretika · Kerahasiaan informasi · Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja · Perilaku pemasok · Hak Asasi Manusia · Lingkungan hidup · Hubungan Komunitas · VWC · Komitmen terhadap kinerja operasional yang baik · Pelanggaran dan tindakan disiplin
Suppliers' Code of Ethics and Conduct Provisions	<ul style="list-style-type: none"> · Compliance with regulations, legislations and contracts · Transparent relationships and honest information · Ethical commercial relationships · Confidentiality of information · Health and safety at work · Supplier behavior · Human rights · Living environment · Community Relations · VWC · Commitment to good operational performance · Violations and disciplinary action

Bentuk Sosialisasi Kode Etik dan Perilaku dan Upaya Penegakannya

Code of Ethics and Conduct Socialization and Enforcement Efforts

Perseroan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi Kode Etik dan Perilaku kepada semua pihak, baik di internal Perseroan maupun pihak-pihak lain di luar Perseroan (eksternal). Selama tahun 2019 Perseroan beberapa kegiatan sosialisasi, yaitu Ethics Roadshow, Conflict of Interest Socialization dan Action for Integrity. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk tatap muka maupun dengan cara lain.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kegiatan sosialisasi yang dijalankan telah diikuti oleh 2,828 pekerja atau mencakup 93% dari total pekerja. Selain itu, kegiatan sosialisasi dalam rangka Action for Integrity juga diikuti oleh karyawan dari perusahaan pemasok sebanyak 744 orang.

Perseroan juga berkomitmen untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku, dengan menekankan pentingnya kepatuhan pada Kode Etik dan Perilaku oleh semua pihak tanpa kecuali. Perseroan akan menjatuhkan sanksi maupun melakukan langkah hukum diperlukan bagi setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

The Company continuously disseminates the Code of Ethics and Conduct to all parties, both internally and to other external parties. During 2019, the Company conducted several dissemination activities, namely Ethics Roadshow, Conflict of Interest Socialization and Action for Integrity. These dissemination activities include face-to-face and other ways.

By December 31, 2019, the dissemination activities were followed by 2,828 employees or 93% of the total employees. The dissemination activity, Action for Integrity, was followed by 744 employees of the Company's suppliers.

The Company is also committed to enforcing the Code of Ethics and Conduct by emphasizing the importance of complying with the Code of Ethics and Conduct by all parties, without exception. The Company will impose sanction and takes necessary legal measure to any party proven to conduct any violation.

Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Perilaku

Code of Ethics and Conduct Statement of Compliance

Kode Etik dan Perilaku berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali, yakni karyawan Perseroan pada semua tingkatan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pejabat eksekutif lain di Perseroan. Bentuk kepatuhan mereka terhadap Kode Etik dan Perilaku diwujudkan dengan menandatangani pernyataan konfirmasi Penerimaan dan Komitmen Pada Kode Etik dan Perilaku, yang ditandatangani pada saat mulai bekerja di Perseroan sebagai bentuk komitmen kepatuhan.

The Code of Ethics and Conduct applies to all parties without any exception, including employees of the Company at all levels, including members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and other executive officers. Their Compliance to the Code of Ethics and Conduct is realized through a statement confirming Acceptance and Commitment to the Code of Ethics and Conduct, signed when started working in the Company as a form of compliance commitment.

Pelanggaran dan Sanksi Dijatuhkan

Violations and Sanctions Imposed

Secara prinsip setiap pelanggaran Kode Etik dan Perilaku harus dilaporkan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Perilaku akan mengakibatkan pelanggaran dikenakan hukuman disiplin, yang dilaksanakan secara bertahap, termasuk peringatan (lisan atau formal), suspensi

In principle, every Code of Ethics and Conduct violation must be reported. Any violations to Code of Ethics and Conduct will result in the violators being subject to disciplinary sanctions, conducted in stages, including warning (verbally or formally), suspension, and dismissal. The Company provides reporting



dan pemecatan. Perseroan menyediakan fasilitas pelaporan, melalui intranet global Perseroan atau situs web www.vale.com.

facilities through the Company's global intranet or website www.vale.com.

Selama tahun 2019, terjadi 62 pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku yang diberikan tindakan kedisiplinan oleh Departemen Sumber Daya Manusia.

In 2019, there were 62 violation of Code of Ethics and Conduct followed up with disciplinary action by the Department of Human Resources.

PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2019 | Code of Ethics and Conduct Violation 2019

Jenis Tindakan Disiplin Disciplinary Action	Jumlah Pelanggaran Number of Violations
Langkah I - Pengarahan tertulis Step I – Written Direction	15
Langkah II - Peringatan tertulis I Step II – Written warning I	38
Langkah III - Peringatan tertulis II Step III - Written warning II	8
Langkah IV - Peringatan tertulis III Step IV - Written warning III	0
Langkah V - PHK Step V – Termination of employment	1
Total	62



Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2019, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

As at the end of 2019, the Company did not have any employee and/or management share ownership program.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Perseroan telah memiliki sistem layanan pelaporan pelanggaran yang mandiri, yaitu VWC dan terhubung langsung dengan Departemen Etik dan Perilaku Vale S.A., Brazil, yang mengelola pengaduan yang diterima. Sistem dan layanan VWC diberlakukan di Perseroan sejak 1 Januari 2016. Penerapan VWC menjadi salah satu cara Perseroan meningkatkan nilai-nilai etikanya, termasuk prinsip-prinsip GCG dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Investigasi terhadap pengaduan dapat dilakukan secara internal maupun oleh pihak eksternal yang ditunjuk.

The Company has an independent violation reporting service system, the VWC, directly connected with Vale's Code of Ethics and Behavior, S.A., Brazil, who manages reports received. The Company implemented the VWC system and services on January 1, 2016. The VWC is one of the ways the Company enhances its ethical values, including the corporate governance principles and applicable laws compliance. Complaint investigations can be carried out internally or by designated external parties.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Violation Report Delivery Methods

Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui VWC melalui saluran-saluran yang disediakan. Laporan dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Alleged violations reports may be submitted in Bahasa Indonesia or English, through the VWC channels provided.

Saluran Pelaporan VWC VWC Reporting Channels		
Telepon	0 800 100 2233 Merupakan telepon bebas pulsa. Pelapor tidak harus menyampaikan identitasnya.	Telephone A toll-free phone for anonymous complaints.
Faksimili	+62 21 2993 8456 <ul style="list-style-type: none"> Formulir pelaporan dapat diunduh di http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info. Informasi lengkap terdapat dalam lembar faks. 	Facsimile <ul style="list-style-type: none"> Reporting form can be downloaded at http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info. Detailed information should be included on the fax sheet.
Email	vwc@tipoffs.info Alamat email pelapor tidak akan diberikan ke Bagian Kode Etik dan Perilaku di Brazil tanpa sepengetahuan pelapor.	Email The whistleblower's email address will not be given to the Ethics and Conduct Office in Brazil without the consent of the whistleblower.
Website VWC	http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info	Website VWC
Surat	Vale Whistleblower Channel, PO Box 3035, JKP 10030 Formulir pelaporan dapat diunduh di http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info , dan dikirim dengan informasi yang lengkap.	Mail The report form can be downloaded at http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info , and is comes with complete
Pesan Singkat	+62 812 8040 0622	Short Message Service (SMS)

Perlindungan Bagi Pelapor dan Penanganan Pelaporan

Protection for Reporters and Report Handling

Perseroan menjamin kerahasiaan, kemandirian (tanpa intervensi), ketidakberpihakan dan kekebalan dalam penanganan, penyelidikan dan penyimpanan informasi yang diterima melalui VWC. Hak-hak perorangan dalam membuat laporan dan kerahasiaan identitasnya juga dilindungi.

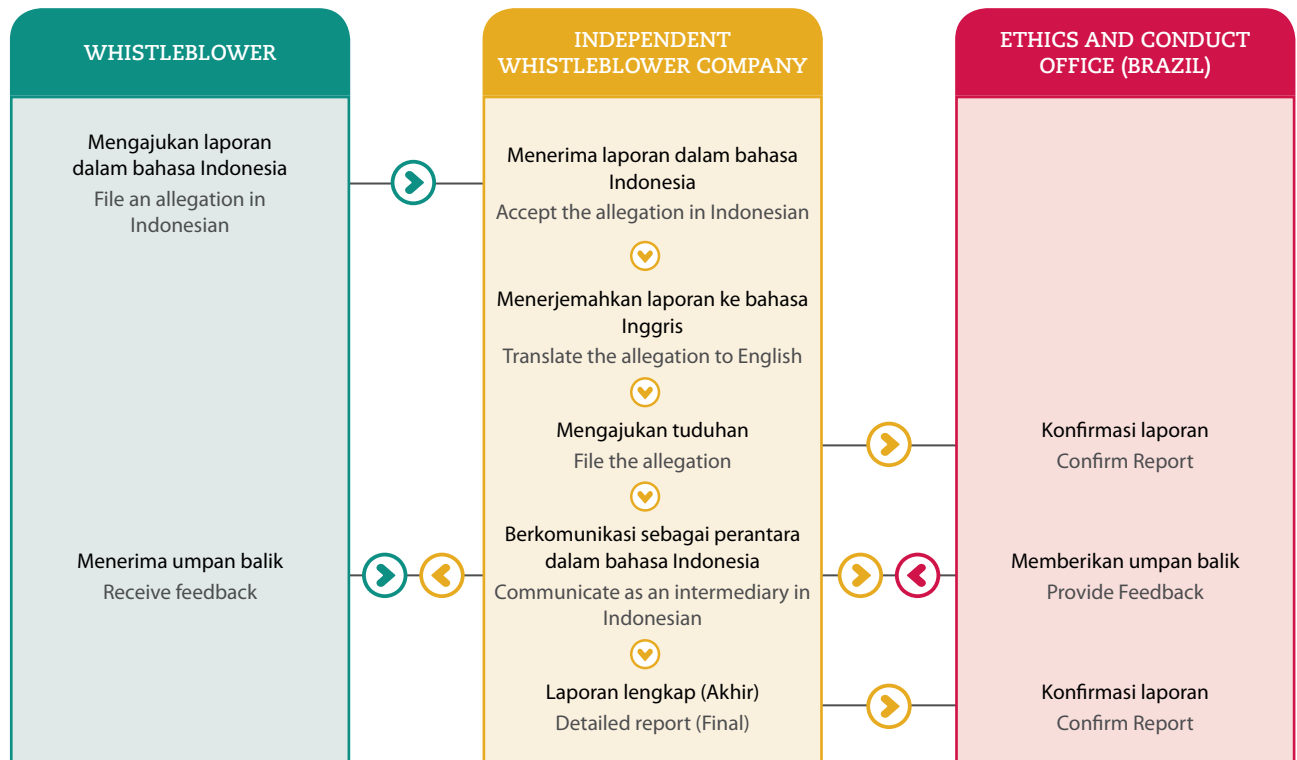
The Company guarantees confidentiality, independence (without intervention), impartiality and immunity when handling, investigating and storing information received through the VWC. Individual rights in making reports and the confidentiality of their identities are also protected.

Tidak akan ada bentuk-bentuk pembalasan atau retaliasi terhadap pihak-pihak yang menggunakan VWC dengan itikad baik. Perseroan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan pembalasan. Tindakan pembalasan dianggap sebagai pelanggaran (*misconduct*). Seluruh karyawan dihimbau untuk melaporkan setiap kasus pembalasan.

There will be no form of reprisals or retaliation against parties using VWC in good faith. The Company does not tolerate retaliation, which it considers a violation (misconduct). All employees are encouraged to report all cases of retaliation.



PROSES PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN
Violation Reporting Handling Process



Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Total Violations Reported and Follow Up

Hal-hal yang dapat dilaporkan melalui VWC adalah setiap bentuk pelanggaran, di antaranya: penggelapan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan Perseroan, konflik kepentingan, kecurangan laporan keuangan, penyogokan, pelecehan, diskriminasi, pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja.

Selama periode pelaporan tercatat ada 24 laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui VWC. Jumlah tersebut berkurang dibanding tahun 2018 sebanyak 30 laporan. Seluruh laporan tersebut dikategorikan valid dan telah ditindaklanjuti dengan tetap memegang prinsip kerahasiaan dan perlindungan pelapor.

Reports through VWC cover any form of violation, including fraud, corruption, theft, Company's policy violations, conflicts of interest, fraudulent financial statements, bribery, harassment, discrimination, breaches of environmental, health and occupational provisions.

During the reporting period, 24 reports on alleged violations were submitted through the VWC, a decrease from 30 reports in 2018. These reports were valid and have been followed up whilst maintaining the principle of confidentiality and protection of the reporters.

Pada tahun 2019 sebanyak 16 laporan atau 67% dari total laporan telah diinvestigasi. Selain itu juga ada 11 laporan dari tahun 2018 yang selesai diinvestigasi pada tahun 2019. Hasil investigasi menunjukkan:

- 9 laporan dinyatakan terbukti kebenarannya;
- 5 laporan tidak dapat disimpulkan karena kurangnya informasi;
- 13 laporan dinyatakan tidak terbukti kebenarannya.

Perseroan menjadikan laporan-laporan yang diterima dan hasil investigasi yang didapat, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pengendalian internal, guna mencegah berulangnya pelanggaran.

In 2019, 16 reports or 67% of the total reports have been investigated. In addition, there were 11 reports from 2018 where the investigation was completed in 2019. The investigations resulted in:

- 9 reports confirmed;
- 5 reports inconclusive due to lack of information;
- 13 reports not confirmed.

The Company uses the reports received and the investigation results as evaluation material to improve internal control, and to prevent repeated violations.

HASIL DARI PENANGANAN PELANGGARAN MELALUI VWC TAHUN 2019

Violation Outcome Reported Through VWC 2019

Jumlah Pengaduan Number of Reports	Hasil Result	Jumlah Laporan Dengan Perbaikan Pengendalian Internal Number of Reports Resulting in Internal Control Improvements
9	Terbukti Confirmed	9
13	Tidak Terbukti Not Confirmed	0
5	Tidak Dapat Disimpulkan Inconclusive	1
0	Diluar Cakupan Out of Scope	0





Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity Policy

Perseroan memberikan kesempatan setara kepada setiap individu untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan ras, sepanjang memenuhi kualifikasi serta persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Direksi dan Dewan Komisaris, serta Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi. Sampai dengan akhir periode pelaporan, komposisi keanggotaan Dewan Komisaris, Direksi serta pejabat eksekutif lain di Perseroan, terdiri atas individu-individu terbaik dengan latar belakang yang beranekaragam.

Hal ini menandakan Perseroan telah menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terutama Prinsip 3 dan Prinsip 5. Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memperlihatkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang diselaraskan dengan kebutuhan Perseroan.

- Berdasarkan jenis kelamin, anggota Direksi terdiri atas laki-laki dan perempuan.
- Berdasarkan usia, anggota Dewan Komisaris dan Direksi termuda berusia 42 tahun dan yang tertua 64 tahun.
- Berdasarkan keahlian dan pengetahuan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Berdasarkan pengalaman, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki latar belakang pengalaman kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawabnya.
- Berdasarkan kebangsaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berasal dari Indonesia, Brasil, Kanada, dan Jepang.

Informasi lengkap mengenai keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dapat dilihat pada bahasan mengenai Profil Perseroan, yang menampilkan profil setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada halaman 56-61 dan 66-71 Laporan ini.

The Company provides equal opportunities for anyone to become a member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, regardless of ethnicity, religion or race background, insofar as they fulfill the qualifications and criteria required by the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, the Board of Directors and Board of Commissioners Charters, as well as the Nomination and Remuneration Process Policy. As of the end of the reporting period, the Company's Board of Directors and other executive officers was made up of the best individuals with diverse backgrounds.

It shows the Company has implemented the Corporate Governance Guidelines for Public Companies, particularly Principles 3 and 5, and the Board of Commissioners and Board of Directors composition reflects a diversity of expertise, knowledge and experience aligned with the Company's needs.

- Based on gender, the Board of Directors is made up of men and women.
- Based on age, the youngest member of the Board of Directors and the Board of Commissioners is 42 years old and the oldest is 64 years old.
- Based on knowledge and expertise, all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have different educational backgrounds relevant to their duties and responsibilities.
- Based on experience, all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have relevant working experience to support their duties and responsibilities.
- Based on nationality, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors originate from Indonesia, Brazil, Canada and Japan.

Detailed information on the Board of Commissioners and Board of Directors members' composition diversity is available in the Company Profile on page 56-61 and 66-71 of this Report, which provides a profile for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.





Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Corporate Governance Guidelines of Public Company

Sebagai suatu perusahaan terbuka, Perseroan senantiasa menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mencakup 5 aspek, 8 prinsip serta 25 rekomendasi, sebagaimana diatur dalam POJK No.21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Sejak tahun 2018, Perseroan telah memenuhi hampir seluruh rekomendasi OJK tersebut kecuali kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggota Dewan Komisaris tidak berdomisili di Indonesia. Dari tahun ke tahun, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas pemenuhan rekomendasi OJK untuk kinerja tata kelola yang lebih baik, sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

As a public company, the Company has implemented the Corporate Governance Guidelines for Public Companies that includes 5 aspects, 8 principals and 25 recommendations as set forth in POJK No.21/POJK.04/2015 on Implementation of Corporate Guidelines for Public Companies and OJK Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies. Since 2018, the Company has complied with almost all OJK's recommendations, save for the presence of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the Company's Annual GMS since the majority of the Board of Commissioners members do not reside in Indonesia. Each year, the Company continues to improve the quality of compliance with the OJK's recommendation for better governance performance, in accordance with the Corporate Guidelines for Public Companies.



ASPEK 1 | FIRST ASPECT
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Public Company Relations with Shareholders in Protecting the Shareholders' Rights

Prinsip 1 | Principle 1
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS

Improving the Value of GMS

1.1.	<p>Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Tata cara mengenai pengambilan suara baik secara terbuka maupun secara tertutup diatur di dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan 2019, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang disampaikan kepada para pemegang saham di awal rapat maupun di situs web Perseroan pada tanggal pengumuman RUPS.</p>
	<p>Public company has technical ways or procedures for voting, either openly or closed, that promotes shareholders' independency and interests</p>	<p>Perseroan tidak menunjuk Biro Administrasi Efek untuk keperluan RUPS Tahunan 2019 karena Perseroan memiliki bagian layanan pemegang saham yang bertugas melakukan proses penghitungan suara dan/atau validasi. Perseroan menunjuk PT Bima Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2019. Untuk selanjutnya, proses penghitungan suara dan/atau validasi sejak RUPS Luar Biasa 2019 dilakukan oleh PT Bima Registra.</p>
		<p>The Company has complied with this recommendation. The procedures for voting, whether open or closed, are regulated in Article 25 of the Company's Articles of Association. At the 2019 Annual GMS, the voting mechanism was part of the meeting procedures explained to the Shareholders at the beginning of the meeting, or on the Company's website on the GMS announcement date.</p>
		<p>The Company did not appoint any Securities Administration Bureau for the 2019 Annual GMS since the Company has an in-house shareholders services department in-charge of vote counting and/or validation processes. The Company appointed PT Bima Registra as the Company's Securities Administration Bureau on August 1st, 2019. The vote counting and/or validation processes since the 2019 Extraordinary GMS will be conducted by PT Bima Registra.</p>
1.2.	<p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p>	<p>Rekomendasi ini belum dilaksanakan oleh Perseroan. Sebagian besar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p>
	<p>All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are present at the Annual GMS.</p>	<p>The Company has not complied with this recommendation yet. The majority of the Board of Directors and the Board of Commissioners members were present at the Annual GMS.</p>
1.3.	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama periode 1 (satu) tahun.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Risalah RUPS Tahunan 2019 dibuat dalam dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Risalah RUPS Tahunan 2019 dapat diakses serta diunduh setiap waktu melalui situs web Perseroan.</p>
	<p>A summary of the GMS minutes is made available on the public company's website at least within a 1 (one) year period.</p>	<p>The Company has complied with this recommendation. The 2019 Annual GMS minutes was prepared in both Indonesian and English. They are accessible and can be downloaded at any time through the Company's website.</p>

HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Public Company Relations with Shareholders in Protecting the Shareholders' Rights

Prinsip 2 | Principle 2

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor

Improving the Quality of Public Company's Communications with Shareholders or investors

2.1.	<p>Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>The public company has a communication policy with shareholders or investors.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan dengan memiliki Kebijakan Administrasi Saham internal yang antara lain mengatur tentang prosedur korespondensi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>The Company has complied with this recommendation by having an internal Shares Administration Policy that includes, setting out the correspondence procedures with shareholders or investors</p>
2.2.	<p>Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.</p> <p>The public company discloses its communication policy with Shareholders or investors on its website.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan dengan menyediakan akses komunikasi bagi pemegang saham atau investor melalui menu Investor pada website Perseroan.</p> <p>The Company has complied with this recommendation by providing communication access for shareholders or investors through the Investors menu at the Company's website.</p>

ASPEK 2 | SECOND ASPECT

FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Function and Role

Prinsip 3 | Principle 3

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Strengthening the Board of Commissioners' Membership and Composition

3.1.	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka.</p> <p>Determining the number of Board of Commissioners' members shall be based on consideration of the public company condition.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris, Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi, serta peraturan terkait lain.</p> <p>The Company has complied with this recommendation as reflected in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners Charter, Nomination and Remuneration Process Policy and other related regulations.</p>
3.2.	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Determining the composition of Board of Commissioners' members shall consider the diversity of required expertise, knowledge and experience.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Perseroan menetapkan kualifikasi dan persyaratan calon anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris, Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi, serta peraturan terkait lain.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Company determines the qualification and criteria for candidate of member of the Board of Commissioners as set forth in the Articles of Association, the Board of Commissioners Charter, Nomination and Remuneration Process Policy and other related regulations.</p>



FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS
Function and Role of the Board of Commissioners

Prinsip 4 | Principle 4

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Improving the Quality of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities Implementation

4.1.	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess its performance.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Ketentuan penilaian kinerja Dewan Komisaris tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris dan dilakukan dengan penilaian sendiri berdasarkan kriteria yang telah disepakati Dewan Komisaris.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. Provisions for the Board of Commissioners' performance assessments are set forth in the Board of Commissioners' Charter and are carried out by self-assessment based on criteria agreed upon by the Board of Commissioners.</p>
4.2.	<p>Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris harus diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.</p> <p>The Board of Commissioners' self-assessment policy for performance assessments shall be disclosed in the public company annual report.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Laporan ini telah mencantumkan perihal penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam bahasan mengenai Dewan Komisaris, pada halaman 207.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. This Report includes the Board of Commissioners' performance assessment in the Board of Commissioners' discussion section that can be found on page 207.</p>
4.3.	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of Board of Commissioners' members if there is involvement of a financial crime.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Sejak tahun 2018, Perseroan telah memiliki kebijakan khusus yang dimuat di dalam Piagam Dewan Komisaris untuk pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Secara umum, hal-hal yang bias membuat anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal keterlibatan dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. Since 2018, the Company has a particular policy, stipulated in the Board of Commissioners' Charter, related to the resignation of member of the Board of Commissioners if they are involved in a financial crime. In general, matters that may cause the resignation of a member of the Board of Commissioners shall refer to the provisions set forth in the Articles of Association and prevailing laws and regulations, including involvement in financial crime.</p>
4.4.	<p>Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi harus menyusun kebijakan suksesi sebagai bagian dari proses nominasi anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners or Committee that conducts the nomination and remuneration functions must establish a succession policy as part of the nomination process of the Board of Directors' members.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Perseroan memiliki Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi yang antara lain mengatur suksesi dan proses nominasi anggota Direksi. Kebijakan dibuat dalam dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta dapat diakses dan diunduh melalui website Perseroan.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Company has a Nomination and Remuneration Process Policy that includes, the succession and nomination processes for the Board of Directors members. The Policy is prepared in Indonesian and English and can be accessed and downloaded through the Company's website.</p>

FUNGSI DAN PERAN DIREKSI
Board of Directors Function and Role

Prinsip 5 | Principle 5

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
Strengthening the Board of Directors' Membership and Composition

<p>5.1.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi harus mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>Determining the number of Board of Directors' members shall consider the public company condition and effectiveness in decision-making processes.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Pemilihan dan penetapan anggota Direksi pada RUPS Tahunan 2019 telah dilakukan dan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Masa keanggotaan Direksi saat ini akan berlaku hingga RUPS Tahunan 2021.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The selection and determination of the Board of Directors' members at the 2019 Annual GMS was conducted and implemented by considering the condition and the needs of the Company. The term of office for the current Board of Directors' members shall be valid until the Annual GMS 2021.</p>
<p>5.2.</p>	<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Determining the composition of Board of Directors' members shall be based on considering the diversity of the required expertise, knowledge and experience.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Pemilihan dan penetapan anggota Direksi pada RUPS Tahunan 2019 telah dilakukan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Board of Directors' members were selected and determined at the 2019 Annual GMS that took into account the required expertise, knowledge and experience diversity.</p>
<p>5.3.</p>	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>The Board of Directors' member who is responsible for accounting or finance must have accounting expertise and/or knowledge.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Bernardus Irmanto selaku Direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Perseroan, telah menyelesaikan program Global Executive MBA dari University of California Los Angeles dan National University of Singapore.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. Bernardus Irmanto as the Director responsible for Company's finance management completed a Global Executive MBA program at the University of California Los Angeles and National University of Singapore.</p>



FUNGSI DAN PERAN DIREKSI

Function and Role of the Board of Directors

Prinsip 6 | Principle 6

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Improving the Quality of Board of Directors Duties and Responsibilities

6.1.	<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>The Board of Directors has a self-assessment policy to assess its performance.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Mekanisme penilaian sendiri Direksi untuk tahun 2019 dilakukan melalui metode perbandingan antara target dan pencapaian Perseroan secara aktual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Board of Directors' self-assessment mechanism for 2019 was conducted through a comparative method of Company targets and actual achievement, in accordance with the areas of responsibility for each member of the Board of Directors.</p>
6.2.	<p>Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.</p> <p>The self-assessment policy to assess the Board of Directors' performance is disclosed in the public company annual report.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Laporan ini telah mencantumkan perihal penilaian kinerja Direksi dalam bahasan mengenai Direksi, pada halaman 206.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. This Report includes the Board of Directors' performance assessment in the Board of Directors' discussion section that can be found on page 206.</p>
6.3.	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors has a policy related to the resignation of Board of Directors' members if there is involvement in a financial crime.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Sejak tahun 2018, Perseroan telah memiliki kebijakan khusus yang dimuat di dalam Piagam Direksi untuk pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Secara umum, hal-hal yang bisa membuat anggota Direksi mengundurkan diri, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal keterlibatan dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. Since 2018, the Company has particular policy, stipulated in the Board of Directors' Charter, related to the resignation of Board of Directors members if they are involved in a financial crime. In general, matters that may cause the resignation of a member of the Board of Directors shall refer to the provisions set forth in the Articles of Association and prevailing laws and regulations, including involvement in financial crime.</p>



ASPEK 4 | FOURTH ASPECT

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN
Stakeholder Participation

Prinsip 7 | Principle 7

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan
Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation

7.1.	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>The public company has a policy to prevent insider trading.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Perseroan memiliki Kebijakan Perdagangan Efek, yang antara lain mengatur pencegahan terjadinya perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>). Kebijakan tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta dapat diakses diunduh melalui situs Perseroan. Selama periode pelaporan tidak dilaporkan terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Company has a Security Trading Policy that includes the prevention of insider trading. The Securities Trading Policy is written in Indonesian and English and can be accessed and downloaded through the Company's website. During the reporting period there has been no reported insider trading.</p>
7.2.	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan anti penyuapan.</p> <p>The public company has anti-corruption and anti-fraud policies.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Perseroan memiliki Pedoman Kepatuhan Antikorupsi. Selama periode pelaporan, Perseroan tidak pernah dihadapkan pada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyuapan.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Company has Anti-Corruption Compliance Guidelines. During the reporting period, the Company did not receive any allegations related to corruption or bribery criminal acts.</p>
7.3.	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>The public company has suppliers and vendors selection and capacity building policies.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Perseroan melakukan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok sesuai dengan Pedoman Perilaku Pemasok, Contractor Safety Management System (CSMS), Norma Pengadaan, Instruksi Kontraktor dan Praktik-praktik Etika Pemasok. Selama tahun 2019 ada 945 pemasok yang mengikuti seleksi dan kegiatan peningkatan kemampuan.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Company selects and enhances its suppliers' capabilities based on the Supplier Code of Conduct, Contractor Safety Management System (CSMS), Procurement Norms, Contractor Instructions, and Supplier Ethical Practices. During 2019 there were 945 suppliers who took part in the selection and capacity building activities.</p>
7.4.	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>The public company has a policy concerning the fulfillment of creditors' rights.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Hak-hak kreditur diatur didalam perjanjian antara Perseroan dengan kreditur terkait. Saat ini Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan kreditur.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. Creditors' rights are stipulated under the agreement between the Company and the respective creditor. Currently, the Company does not have any existing agreements with creditors.</p>
7.5.	<p>Perusahaan terbuka harus memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>The public company has a whistleblowing system policy.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Perseroan memiliki <i>system whistleblowing</i> dan kanal VWC, sebagaimana diuraikan dalam halaman 289 Laporan ini.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Company has a whistleblowing system and a VWC, as shown on page 289 in this Report.</p>
7.6.	<p>Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>The public company has a long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan, antara lain berupa pinjaman pembelian rumah tanpa bunga. Selama tahun 2019 ada 9 karyawan yang telah menerima insentif tersebut.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Company has long-term incentives for the Board of Directors and employees, including a policy on housing loans facilities without interest for the Board of Directors and employees. During 2019, there were 9 employees who received these incentives.</p>



ASPEK 5 | FIFTH ASPECT

KETERBUKAAN INFORMASI

Information Disclosure

Prinsip 8 | Principle 8

Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Improving of Information Disclosure

8.1.	<p>Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lain secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>The public company makes use of other information technologies, in addition to the website, as means for information disclosure.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Perseroan menggunakan aplikasi jejaring sosial sebagaimana diungkapkan dalam Laporan ini pada halaman 302 Laporan ini.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. The Company uses social networking applications that can be found in this Report, on page 302.</p>
8.2.	<p>Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>The public company's annual report discloses the beneficial owner in the public company's share ownership with at least 5% (five percent), in addition to disclosing the beneficial owner in the public company's ownership of majority and controlling shareholders.</p>	<p>Rekomendasi ini telah dilaksanakan Perseroan. Laporan ini mengungkapkan struktur pemegang saham, yang terdiri atas pemegang saham utama dan pengendali, serta pemegang saham dengan jumlah saham paling sedikit 5%.</p> <p>The Company has complied with this recommendation. This Report discloses the structure of the majority and controlling shareholders, which includes those with at least 5% of shares.</p>



Penilaian Penerapan GCG

GCG Implementation Assessment

Selama periode pelaporan, Perseroan tidak menunjuk pihak independen untuk melakukan penilaian terhadap penerapan GCG selama tahun pelaporan. Namun Perseroan secara tidak langsung dinilai oleh IICD berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan mengikuti standar ACGS. Berdasarkan penilaian tersebut, IICD memberikan penghargaan sebagai Top 50 of the Biggest Market Capitalization Public Listed Companies serta Penghargaan Emiten Terbaik dalam Pelaksanaan GCG kategori *Most Improved* Kelas Emiten Kapitalisasi Besar (*Big Cap*).

The Company did not appoint independent parties to conduct GCG implementation assessments during the reporting year. However, the Company was indirectly assessed by IICD based on criteria determined by the ACGS standards. Based on this assessment, IICD recognized the Company in Top 50 of the Biggest Market Capitalization Public Listed Companies and Best Issuer Award in GCG Implementation Most Improved Category, For Big Cap Issuer Class.





Akses Informasi dan Data Perusahaan

Information Access and Company Data

Perseroan secara berkala menyampaikan informasi maupun data terkait Perseroan melalui saluran informasi pada tabel di bawah ini yang dapat diakses setiap saat oleh investor dan analis.

The Company periodically discloses Company information and data through information channels detailed in the table below, accessible at any time by investors and analysts.

Akses Informasi dan Data Perseroan Access to Company Information and Data			
RUPS	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Tahunan RUPS Luar Biasa 	<ul style="list-style-type: none"> Annual GMS Extraordinary GMS 	GMS
Situs Perseroan	http://www.vale.com/indonesia Informasi yang disediakan sesuai POJK No. 8/POJK.04/2015 Hasil Triwulan, Laporan Keuangan, Ikhtisar Keuangan, Ikhtisar Saham, Dividen, Laporan Tahunan, RUPS.	http://www.vale.com/indonesia Information provided is in accordance with POJK No.8/POJK.04/2015 Quarterly Results, Financial Statements, Financial Highlights, Stock Highlights, Dividend, Annual Report, GMS	Company website
Email Perseroan	ptvi-corpsec@vale.com ptvi.investorrelations@vale.com		Company emails
Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan Laporan Keberlanjutan Majalah Halo Vale Tabloid Verbeek 	<ul style="list-style-type: none"> Annual Report Sustainability Report Halo Vale Digital Magazine Verbeek Tabloid 	Publications
Media Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Facebook: PT Vale Indonesia Tbk You Tube: PT Vale Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Twitter: @ptvaleid Instagram: @ptvaleindonesia 	Social Media

Pada tahun 2019, Perseroan melalui Departemen Hubungan Investor menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada investor dan analis yang diuraikan pada bagian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Hubungan Investor di halaman 256.

In 2019, the Company through its Investor Relation Department, organized other activities as a form of information disclosure to investors and analysts as detailed in the Investor Relations Department Duties and Responsibilities Implementation in 2019 on page 256.

Pengungkapan informasi terkait komitmen keberlanjutan dan tanggung jawab sosial Perusahaan tersedia dalam Laporan Keberlanjutan 2019 PT Vale Indonesia Tbk, yang disusun terpisah dari laporan ini.

Disclosure of information regarding sustainability commitments and corporate social responsibility is available in PT Vale Indonesia Tbk's 2019 Sustainability Report, prepared separately from this report.





LAPORAN KEUANGAN AUDIT 2019

2019 Audited
Financial Statement





**PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/
*and its subsidiaries***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 Desember 2019 dan 2018/
*December 31, 2019 and 2018***

**PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

Daftar isi/Contents

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi/*Directors' Statement of Responsibility*

Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:/
Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2019 and 2018:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>	6-57



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI ATAS
TANGGUNG JAWAB UNTUK LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**THE DIRECTORS' STATEMENT
OF THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

**PT VALE INDONESIA Tbk
dan entitas anaknyad and its subsidiaries**

Atas nama Direksi, kami, yang bertanda tangan
di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors,
we, the undersigned:

1.	Nama	Nicolas D. Kanter	Name
	Alamat Kantor	The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cikatomas II No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Telepon Kantor	+62 21 524 9002/524 9000	Office Telephone
	Jabatan	Presiden Direktur/President Director	Position
2.	Nama	Bernardus Irmanto	Name
	Alamat Kantor	The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cilandak I No. 30 Kav. 17 Cilandak Barat Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Telepon Kantor	+62 21 524 9002/524 9000	Office Telephone
	Jabatan	Direktur/Director	Position

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan") dan entitas anaknya (bersama-sama disebut "Grup"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company") and its subsidiaries (together the "Group"); |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Pengungkapan yang telah kami buat dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah lengkap dan akurat;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup; | 3. a. The disclosures we have made in the Group's consolidated financial statements are complete and accurate;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any information or facts that would be material to the Group's consolidated financial statements; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal Grup. | 4. We are responsible for the Group's internal control. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 20 Februari 2020/February 20, 2020

Presiden Direktur/President Director

Direktur/Director




(Nicolas D. Kanter)  (Bernardus Irmanto)

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT VALE INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015

00096/2.1025/AU.1/02/0226-1/1/II/2020



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries as at 31 December 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA

20 Februari/February 2020



Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0226

**PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya and its subsidiaries**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	249,035	301,153	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	-	15,607	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	7	107,295	124,248	- Related parties
Persediaan	9	147,961	131,779	Inventories
Pajak dibayar di muka	14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		6,988	9,250	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		71,172	41,548	- Other taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	10	3,108	4,887	Prepayments and advances
Aset keuangan lancar lainnya	8	2,754	2,526	Other current financial assets
Jumlah aset lancar		588,313	630,998	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	15,412	14,345	Restricted cash
Pajak dibayar di muka	14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		29,146	-	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		117,674	116,281	- Other taxes
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	33e	58	18	- Related parties
Aset tetap	11, 12	1,467,462	1,434,510	Fixed assets
Aset keuangan tidak lancar lainnya	8	4,623	6,300	Other non-current financial assets
Jumlah aset tidak lancar		1,634,375	1,571,454	Total non-current assets
JUMLAH ASET		2,222,688	2,202,452	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	13			Trade payables
- Pihak-pihak berelasi		2,071	1,620	- Related parties
- Pihak ketiga		95,337	89,561	- Third parties
Akrual	15	16,327	25,599	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17	15,563	15,823	Short-term employee benefit liabilities
Utang pajak	14b			Taxes payable
- Pajak penghasilan badan		-	1,119	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		1,774	1,781	- Other taxes
Bagian jangka pendek atas pinjaman bank jangka panjang	18	-	36,519	Current portion of long-term bank borrowings
Liabilitas sewa	11	947	-	Lease liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham		780	2,042	Share-based payment liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	16	3,753	1,276	Other current financial liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		136,552	175,340	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	19	19,419	14,878	Long-term post-employment benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	14d	80,490	90,674	Deferred tax liabilities
Liabilitas sewa	11	173	-	Lease liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	28	44,361	37,833	Provision for asset retirement
Jumlah liabilitas jangka panjang		144,443	143,385	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		280,995	318,725	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
- Modal dasar - 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2019 dan 2018				- Authorised capital - 39,745,354,880 shares with par value IDR25 (full amount) per share as at December 31, 2019 and 2018
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2019 dan 2018	20	136,413	136,413	- Issued and fully paid capital - 9,936,338,720 shares as at December 31, 2019 and 2018
Tambahan modal disetor	22	277,760	277,760	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
- Dicapang	23	27,283	27,283	- Appropriated
- Belum dicadangkan		1,500,237	1,442,271	- Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		1,941,693	1,883,727	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,222,688	2,202,452	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
Pendapatan	33a	782,012	776,900	Revenue
Beban pokok pendapatan	24	(665,558)	(672,899)	Cost of revenue
LABA BRUTO		116,454	104,001	GROSS PROFIT
Pendapatan lainnya	26	3,266	7,615	Other income
Beban usaha	25	(13,730)	(11,578)	Operating expenses
Beban lainnya	27	(17,701)	(15,184)	Other expenses
LABA USAHA		88,289	84,854	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan		4,759	4,552	Finance income
Biaya keuangan	34	(3,912)	(6,789)	Finance costs
PENDAPATAN/(BIAYA) KEUANGAN, BERSIH		847	(2,237)	NET FINANCE INCOME/(COSTS)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		89,136	82,617	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	14c	(31,736)	(22,105)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		57,400	60,512	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Perubahan yang timbul dari pengukuran ulang aktuarial dari liabilitas imbalan pascakerja	19	755	5,131	- Changes resulting from actuarial remeasurement of post-employment benefit liabilities
- Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain	14d	(189)	(1,283)	- Income tax on other comprehensive income
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		566	3,848	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		57,966	64,360	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
- Dasar dan dilusian (dalam nilai penuh Dolar AS)	31	0.0058	0.0061	- Basic and diluted (in full amount of US Dollars)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.



PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Modal saham/ <i>Share capital</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Saldo laba/Retained earnings		Total ekuitas/ <i>Total equity</i>
			Dicadangkan/ <i>Appropriated</i>	Belum dicadangkan/ <i>Unappropriated</i>	
Saldo 1 Januari 2018	136,413	277,760	27,283	1,377,911	1,819,367
Laba komprehensif 2018					
Laba	-	-	-	60,512	60,512
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	3,848	3,848
Saldo 31 Desember 2018	136,413	277,760	27,283	1,442,271	1,883,727
Laba komprehensif 2019					
Laba	-	-	-	57,400	57,400
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	566	566
Saldo 31 Desember 2019	136,413	277,760	27,283	1,500,237	1,941,693

Balance as at January 1, 2018

Comprehensive income 2018

Profit
Other comprehensive income

Balance as at December 31, 2018

Comprehensive income 2019

Profit
Other comprehensive income

Balance as at December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	798,965	818,229	Receipts from customers
Pembayaran kas ke pemasok	(441,062)	(417,047)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan badan	(70,616)	(36,348)	Payments of corporate income tax
Pembayaran pajak lainnya	(50,899)	(59,927)	Payments of other taxes
Penerimaan restitusi pajak	23,808	23,224	Receipts of tax refunds
Pembayaran ke karyawan	(86,216)	(92,342)	Payments to employees
Penempatan jaminan keuangan	(14,486)	(128)	Placement of financial guarantee
Penarikan jaminan keuangan	13,419	128	Withdrawal of financial guarantee
Penerimaan pendapatan keuangan	4,759	4,552	Receipts of finance income
Pembayaran royalti dan retribusi	(39,678)	(35,982)	Payments of royalties and levies
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi	137,994	204,359	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran untuk pembelian aset tetap	(166,560)	(83,784)	Payments for acquisition of fixed assets
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	456	-	Proceeds from disposal of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(166,104)	(83,784)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	6 (3,902)	(39,394)	Placement of restricted cash
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	6 19,509	39,677	Withdrawal of restricted cash
Pembayaran pinjaman jangka panjang	18 (37,500)	(37,500)	Payments of long-term borrowings
Pembayaran liabilitas sewa	(1,245)	-	Payments of lease liabilities
Pembayaran beban keuangan	(1,253)	(3,212)	Payments of finance costs
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(24,391)	(40,429)	Net cash flows used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(52,501)	80,146	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	301,153	221,699	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	383	(692)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir tahun	249,035	301,153	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

1. Umum

PT Vale Indonesia Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, akta No. 14 tanggal 4 April 2018 dan akta No. 37 tanggal 13 September 2019, yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 4 April 2018 dan RUPSLB pada tanggal 16 Agustus 2019. Perubahan dalam akta No.121 tanggal 29 Juni 2015 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, sedangkan perubahan dalam akta No. 14 tanggal 4 April 2018 dan No. 37 tanggal 13 September 2019 masing-masing telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, sedangkan perubahan dalam akta No. 14 tanggal 4 April 2018 dan No. 37 tanggal 13 September 2019 masing-masing telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0135774 tanggal 5 April 2018 dan Surat Keputusan No. AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 9 Oktober 2019.

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited ("VCL") dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di Gedung The Energy, Lt. 31, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

Hak Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi didasarkan atas Kontrak Karya ("KK") yang ditandatangani pada 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan, yang kemudian diubah dan diperpanjang pada 15 Januari 1996, dan terakhir diamendemen pada 17 Oktober 2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pertambangan 2009 ("KK 2014").

Berdasarkan ketentuan KK 2014, KK Perseroan akan berakhir pada tahun 2025 dan Perseroan dapat mengajukan untuk melanjutkan operasinya dalam bentuk izin usaha untuk jangka waktu perpanjangan dua kali sepuluh tahun, setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah.

Selain itu, KK 2014 juga mengatur mengenai komitmen Perseroan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri, serta mengenai komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan (lihat Catatan 39d mengenai komitmen investasi Perseroan).

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Karebbe dan Balambano (yang merupakan tambahan dari fasilitas pembangkit listrik awal Larona), memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya untuk aset tetap PLTA dan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga pasar untuk aset lainnya, dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan pada Keputusan Pemerintah tahun 1975 tersebut.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham biasa atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

1. General

PT Vale Indonesia Tbk, (the "Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary of Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times with the latest amendments made by deed No. 121, dated June 29, 2015, deed No. 14, dated April 4, 2018, and deed No. 37, dated September 13, 2019, all drawn up before Leolin Jayayanti S.H., a public notary of Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on June 29, 2015, in the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on April 4, 2018 and in the EGMS on August 16, 2019, respectively. The amendment in deed No. 121, dated June 29, 2015 was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0938647.AH.01.02 Year 2015 dated July 3, 2015 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0948078 Year 2015 dated July 3, 2015, while the amendment in deeds No. 14 dated April 4, 2018 and No. 37 dated September 13, 2019, each has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0135774 dated April 5, 2018 and decision letter No. AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019 dated October 9, 2019, respectively.

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited ("VCL") and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the registered office is located in The Energy Building, 31st floor, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

The Company's right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi was granted pursuant to a Contract of Work ("CoW") dated July 27, 1968 entered into between the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") and the Company, which was modified and extended on January 15, 1996, and was later amended on October 17, 2014 as required by the 2009 Mining Law ("the 2014 CoW").

Under the terms of the 2014 CoW, the Company's CoW is set to expire in 2025 and the Company may apply to continue its operations by way of a business license for a period of two consecutive ten-year extensions upon approval of the Government.

Furthermore, the 2014 CoW reflects the Company's commitment to prioritize domestic manpower, goods and services and outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy (refer to Note 39d about the Company's investment commitments).

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operating pursuant to the Governmental Decree of 1975. This decree, which effectively covers the Karebbe and the Balambano power plants (which are additions to the original Larona facility), provides the Government with the right to acquire the hydroelectric facilities, with two years' prior written notice to the Company. No such notice has been received to date. If this right is exercised, the facilities will be transferred at their net book value for hydroelectric fixed assets and lower of cost or market price for other assets, under the condition that the Government shall supply the Company with sufficient electrical power for its operations, at a rate based on a formula stated in the Governmental Decree of 1975.

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million ordinary shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

1. Umum (lanjutan)

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai 3 Agustus 2004.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai 15 Januari 2008.

Perseroan mengadakan RUPST pada 2 April 2019 yang menyetujui antara lain, pengunduran diri Lovro Paulic sebagai Direktur. Dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan dan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bernardus Irmanto, Dani Widjaja, Agus Superiadi dan Vinicius Mendes Ferreira, masing-masing sebagai Direktur, efektif sejak penutupan RUPST 2019 sampai dengan penutupan RUPST 2021.

Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Robert Alan Morris sebagai Komisaris. Dengan demikian pemegang saham menyetujui pengangkatan Luiz Fernando Landeiro sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan RUPST 2019 sampai dengan penutupan RUPST 2020.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri") No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPST 2019 dan RUPSLB 2018 sebagaimana dibuktikan Surat Menteri No. 272/30/MEM.B/2019 tertanggal 11 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.

Selanjutnya Perseroan mengadakan RUPSLB pada 16 Agustus 2019 yang menyetujui antara lain, pengunduran diri Eduardo Bartolomeo sebagai Presiden Komisaris. Dengan demikian, pemegang saham menyetujui pengangkatan Mark James Travers sebagai Presiden Komisaris, Mahendra Siregar sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Cory McPhee sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan RUPSLB 2019 sampai dengan penutupan RUPST 2020. Perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut juga telah disetujui oleh Menteri sebagaimana dibuktikan Surat Menteri No. 415/30/MEM.B/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.

Mahendra Siregar menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan kepada Direksi Perseroan yang berlaku efektif pada 25 Oktober 2019.

Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris akan terdiri dari 5 Komisaris dengan 1 Komisaris Independen, hingga RUPST menerima pengunduran diri Mahendra Siregar dan menunjuk Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mahendra Siregar tersebut.

Terkait dengan susunan Komite Audit, masa jabatan kedua Dedi Rudaedi dan masa jabatan Annie Margono sebagai anggota Komite Audit, masing-masing berakhir pada tanggal 2 April 2019 dan 13 November 2019. Dedi Rudaedi pertama kali diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2015, sedangkan Annie Margono pertama kali diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tahun 2017. Selanjutnya, Mahendra Siregar menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komite Audit kepada Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada 25 Oktober 2019.

Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Herwan Ng sebagai anggota Komite Audit yang baru efektif sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2021.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

1. General (continued)

At the EGMS held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's ordinary shares. This became effective on August 3, 2004.

At the EGMS held on December 17, 2007, the shareholders approved a ten-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008.

The Company held an AGMS on April 2, 2019, which approved among others, the resignation of Lovro Paulic as Director. Taking into consideration the needs of the Company and effectiveness in the decision making process, the shareholders approved the appointment of Febriany Eddy as Vice President Director, Bernardus Irmanto, Dani Widjaja, Agus Superiadi and Vinicius Mendes Ferreira, each as Director, effective as at the closing of the 2019 AGMS until the closing of the AGMS in 2021.

With regards to composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the resignation of Robert Alan Morris as Commissioner. Thus, the shareholders approved the appointment of Luiz Fernando Landeiro as Commissioner, effective as at the closing of the 2019 AGMS until the closing of the AGMS in 2020.

The Company has complied with the Minister of Energy and Mineral Resources (the "Minister") Regulation No. 48 Year 2017 on the Supervision of the Implementation of Business Activities in the Field of Energy and Mineral Resources with respect to the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners approved by the shareholders at the 2019 AGMS and 2018 EGMS, as evidenced by the Minister's Letter No. 272/30/MEM.B/2019 dated July 11, 2019 on the Approval to the Change of the Directors and/or Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk.

Further, the Company held an EGMS on August 16, 2019, which approved among others, the resignation of Eduardo Bartolomeo as President Commissioner. Thus, the shareholders approved the appointment of Mark James Travers as President Commissioner, Mahendra Siregar as Vice President Commissioner and Cory McPhee as Commissioner, effective as at the closing of the 2019 EGMS until the closing of the AGMS in 2020. The changes in the Board of Commissioners composition has obtained approval from the Minister, as evidenced by the Minister's Letter No. 415/30/MEM.B/2019 dated October 7, 2019 on the Approval to the Change of the Board of Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk.

Mahendra Siregar tendered his resignation as Vice President Commissioner and Independent Commissioner to the Board of Directors of the Company, effective on October 25, 2019.

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is composed of 5 Commissioners with 1 Independent Commissioner until the AGMS accepts Mahendra Siregar's resignation and appoints a new Vice President Commissioner and Independent Commissioner to fill the vacancy left by Mahendra Siregar.

With regards to composition of the Audit Committee, the second term of Dedi Rudaedi and the term of Annie Margono as members of the Audit Committee has expired on April 2, 2019 and November 13, 2019, respectively. Dedi Rudaedi was first appointed as a member of the Audit Committee in 2015, while Annie Margono was first appointed as a member of the Audit Committee in 2017. Further, Mahendra Siregar tendered his resignation as Chair of the Audit Committee to the Board of Commissioners of the Company, effective on October 25, 2019.

The Board of Commissioners of the Company has appointed Herwan Ng as the new member of the Audit Committee effective from May 1, 2019 until April 30, 2021.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

1. Umum (lanjutan)

Per 31 Desember 2019 dan 2018, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
Presiden Komisaris	Mark James Travers	Eduardo Bartolomeo	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	-	Mark James Travers	Vice President Commissioner
Komisaris	Luiz Fernando Landeiro Cory McPhee Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *)	Robert Alan Morris Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *) Mahendra Siregar *)	Commissioners
Ketua Komite Audit	-**)	Mahendra Siregar	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	Herwan Ng**)	Dedi Rudaedi Annie Margono	Audit Committee Members
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Febriany Eddy	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Direktur	Bernardus Irmanto Dani Widjaja Agus Superiadi Vinicius Mendes Ferreira	Febriany Eddy Lovro Paulic	Directors

*) Komisaris Independen

**) Anggota Audit Komite tambahan telah ditunjuk setelah akhir tahun 2019 (Catatan 42)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

1. General (continued)

As at December 31, 2019 and 2018, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:

2019	2018	December 31
Mark James Travers	Eduardo Bartolomeo	President Commissioner
-	Mark James Travers	Vice President Commissioner
Luiz Fernando Landeiro Cory McPhee Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *)	Robert Alan Morris Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *) Mahendra Siregar *)	Commissioners
-**)	Mahendra Siregar	Chairman of Audit Committee
Herwan Ng**)	Dedi Rudaedi Annie Margono	Audit Committee Members
Nicolas D. Kanter	Nicolas D. Kanter	President Director
Febriany Eddy	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Bernardus Irmanto Dani Widjaja Agus Superiadi Vinicius Mendes Ferreira	Febriany Eddy Lovro Paulic	Directors

*) Independent Commissioners

**) Additional Audit Committee member has been appointed subsequent to 2019 year end (Note 42)

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan dan entitas anaknya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2019, entitas anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Total aset (sebelum dieliminasi)/ Total assets (before elimination)	
		2019	2018	2019 AS\$/US\$'000	2018 AS\$/US\$'000
PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia	Indonesia	99.9%	-	720	-
PT Kolaka Nickel Indonesia	Indonesia	99.9%	-	720	-

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan telah membentuk dua anak perusahaan, yaitu PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan PT Kolaka Nickel Indonesia ("entitas anak"), yang masing-masing 99,9% sahamnya dimiliki Perseroan dan 0.1% saham dimiliki oleh VCL. Total modal ditempatkan dan disetor pada masing-masing entitas anak adalah sebesar IDR10 miliar (nilai penuh). Perseroan telah membayarkan porsi modal Perseroan di kedua entitas anak tersebut pada bulan Desember 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, VCL belum membayarkan porsi modal pada kedua entitas anak tersebut. Pembentukan entitas anak tersebut merupakan bagian dari tahapan dalam pelaksanaan komitmen investasi Perseroan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara berdasarkan Amandemen KK, dimana Perseroan berkomitmen atas pembangunan fasilitas pengolahan bijih nikel.

Jumlah seluruh karyawan Grup pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 3.044 (31 December 2018: 3.092) (tidak diaudit).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan

Ikhtisar kebijakan akuntansi Grup yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan konsolidasian terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk tahun-tahun yang tercakup oleh laporan keuangan ini konsolidasian, kecuali yang dinyatakan dalam Catatan 3. Laporan keuangan konsolidasian Grup diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 20 Februari 2020.

2.1. Penyajian laporan keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh KK dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group". As at December 31, 2019, subsidiaries directly owned by the Company were as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Total aset (sebelum dieliminasi)/ Total assets (before elimination)	
		2019	2018	2019 AS\$/US\$'000	2018 AS\$/US\$'000
PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia	Indonesia	99.9%	-	720	-
PT Kolaka Nickel Indonesia	Indonesia	99.9%	-	720	-

On June 25, 2019, the Company has established two subsidiaries, namely PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia and PT Kolaka Nickel Indonesia ("subsidiaries"), each of which has 99.9% of its shares owned by the Company and 0.1% by VCL. The total capital issued and paid for in each of the subsidiaries is IDR10 billion (full amount). The Company has paid up its capital in these subsidiaries in December 2019. Up to December 31, 2019, VCL has not yet paid up its capital. The establishment of the subsidiaries is intended as a milestone in the implementation of the Company's investment commitments in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi provinces based on the CoW Amendment, under which the Company is committed to the construction of nickel ore processing facilities.

The total number of employees of the Group as at December 31, 2019 was 3,044 (December 31, 2018: 3,092) (unaudited).

2. Summary of significant accounting policies

The following summary of the significant accounting policies of the Group is presented to assist the reader in evaluating the accompanying consolidated financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the years covered in the consolidated financial statements, except as stated in Note 3. The Group's consolidated financial statements were authorised by the Board of Directors on February 20, 2020.

2.1. Presentation of financial statements

As required by its CoW with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.2. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2.3. Dasar pengukuran

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

2.4. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan dalam laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan dalam Catatan 4.

2.5. Prinsip-prinsip konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban antar entitas Grup dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi antar entitas Grup yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

2.6. Mata uang fungsional, penyajian dan penjabaran mata uang

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat, yang merupakan mata uang penyajian dan fungsional, kecuali dinyatakan lain.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas Grup beroperasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir tahun. Penjabaran dari aset dan liabilitas lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Selama tahun berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku selama bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada laba rugi.

2.7. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, deposito berjangka dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari saat ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.2. Statement of compliance

The financial statements are prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, and the Regulations and Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosure Guidance issued by the Financial Service Authority ("FSA").

2.3. Basis of measurement

The consolidated financial statements are prepared based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

2.4. Use of judgment, estimates and assumptions

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. The Indonesian Financial Accounting Standards also require management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

2.5. Principles of consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS").

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

2.6. Functional and presentation currency and currency translation

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars, which is the presentation and functional currency, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Group entities operate.

At each reporting date, monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at year-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities are generally recognised at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

During the year, transactions in currencies other than US Dollars are translated at rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in profit or loss.

2.7. Cash and cash equivalents and restricted cash

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, time deposits and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.7. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangkan cerukan.

2.8. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan untuk nikel *matte* yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan dapat mengalami penurunan nilai.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

2.9. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel dan nikel dalam proses dinilai dengan metode rata-rata tertimbang dari biaya perolehan. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya pengupasan tanah, menambang, bahan baku, bahan bakar, bahan pembantu, tenaga kerja, penyusutan serta alokasi biaya overhead yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

2.10. Biaya dibayar di muka dan uang muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada laba rugi berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

Uang muka adalah pembayaran di muka yang dilakukan Grup kepada pemasok. Uang muka dibebankan secara proporsional pada laba rugi sesuai dengan kemajuan dari pembelian barang dan jasa dan kesepakatan dengan pemasok.

2.11. Aset tetap

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk ke dalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

Biaya pengupasan pasca produksi dimasukkan dalam biaya persediaan, kecuali ketika sebuah proyek baru dikembangkan untuk mendapatkan akses ke cadangan bijih nikel yang signifikan. Dalam hal tersebut, biaya dikapitalisasi dan diamortisasi selama ekstraksi bijih nikel, selama masa manfaat cadangan nikel. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada biaya pengupasan yang dikapitalisasi oleh Grup.

Biaya-biaya selanjutnya diikutsertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir ke dalam Grup dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan ke dalam laba rugi pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.7. Cash and cash equivalents and restricted cash (continued)

Cash and cash equivalents which are restricted for use, are presented separately as "restricted cash".

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents are presented net of overdrafts.

2.8. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for nickel matte sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, and they are subject to impairment.

Non-trade receivables from related parties are receivables reflecting loans given to related parties of the Group.

2.9. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost of finished nickel inventory and nickel in process is determined using a weighted average cost method. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realisable value.

Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

Cost of finished goods and work in progress comprises stripping, mining, raw materials, fuels, supplies, labor, depreciation and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads.

2.10. Prepayments and advances

Prepaid expenses are charged to profit or loss on a straight-line basis over the expected period of benefit.

Advances are payments made in advance by the Group to its vendors. Advances are charged to profit or loss based on progress of goods and services purchase and agreements with suppliers.

2.11. Fixed assets

Fixed assets are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs is construction of roads providing access to mining areas.

Post-production stripping costs are included in the cost of inventory, except when a new project is developed to permit access to a significant nickel ore reserve. In such cases, the cost is capitalised and amortised during the extraction of the nickel ore, over the useful life of the ore reserve. As at December 31, 2019 and 2018, there were no stripping costs capitalised by the Group.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of a replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.12. Aset tetap dalam penyelesaian

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke dalam aset tetap ketika konstruksi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya keuangan dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai.

Untuk pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, di luar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset dalam penyelesaian tertentu yang memenuhi syarat.

2.13. Penyusutan dan amortisasi

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas taksiran masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya KK (d disesuaikan dengan asumsi perpanjangan) yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan PLTA yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan konsolidasian ini.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	5 - 40
Jalan dan jembatan	5 - 30
Bangunan	5 - 30
Pengembangan tambang	5 - 30
Pabrik dan mesin	4 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

Grup memperkirakan nilai sisa aset tetap diatas adalah nihil.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun pelaporan.

Grup mengalokasi komponen dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendepresiasi komponen tersebut secara terpisah jika komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.14. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas (jika ada) - sebagai contoh, *goodwill* atau aset tak berwujud - tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset ditelaah untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.12. Construction in progress

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in profit or loss.

Exploration costs are expensed as incurred.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Finance and other borrowing costs, such as discount fees on loans used in financing construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete.

For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

2.13. Depreciation and amortisation

Depreciation of fixed assets is calculated on a straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the CoW (adjusted for assumed extensions). An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 Decree of the Indonesian Government, as referred to in Note 1 to these consolidated financial statements.

The estimated useful lives of fixed assets used for depreciation are as follows:

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	5 - 40
Roads and bridges	5 - 30
Buildings	5 - 30
Mine development	5 - 30
Plant and machinery	4 - 30
Furniture and office equipment	5

The Group has estimated the residual value of the above fixed assets at nil.

The assets' residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting year.

The Group allocates significant components of the fixed asset costs and depreciates separately each significant component if those components have different useful lives.

Amortisation of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using the straight-line method.

2.14. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life (if any) - for example, goodwill or intangible assets - are not subject to amortisation and are tested annually for impairment. Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.



2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.14. Penurunan nilai dari aset non-keuangan (lanjutan)

2.14. Impairment of non-financial assets (continued)

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss.

2.15. Pengeluaran untuk lingkungan hidup

2.15. Environmental expenditures

Pengeluaran - pengeluaran yang berhubungan dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Cadangan jaminan reklamasi, yang kemudian diubah dengan suatu mekanisme bank garansi, juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 39b). Disamping itu, provisi atas penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang, penghentian dan pembongkaran fasilitas.

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to profit or loss as incurred or capitalised and depreciated depending on their future economic benefits. A reclamation guarantee reserve which subsequently was changed to a bank guarantee mechanism has also been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 39b). In addition, a provision for asset retirement has been recognised for the estimated costs of mine closure, decommissioning and dismantling of facilities.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian penggunaan aset tetap ini adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian termasuk penjualan, penelantaran, pendaur-ulangan atau penghapusan dengan cara lainnya.

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset diakui sebagai liabilitas pada saat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto bebas risiko. Di samping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah liabilitasnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Provisions for asset retirement are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a risk-free rate. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalised as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to passage of time is recognised as finance costs.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current year. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is such an indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for the impairment loss incurred, if any.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu liabilitas serta jumlahnya dapat diukur, maka Grup akan mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan, Grup mengacu pada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Group is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Group accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Group applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

2.16. Pengakuan pendapatan dan beban

2.16. Revenue and expense recognition

Penjualan merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk. Penjualan diakui sebagai pendapatan ketika pengendalian atas produk ditransfer ke pelanggan dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup untuk ditukar dengan produk tersebut. Berdasarkan kontrak penjualan, pendapatan diakui ketika produk dimuat ke kapal pelanggan di pelabuhan muat.

Sales represent revenue earned from the sale of products. Sales are recognised as revenue when the control of the product transfers to customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those products. Based on the sales contracts, revenue is recognised when the product is loaded on to the customer vessel at the loading port.

Pendapatan diakui berdasarkan harga yang ditentukan dalam kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan ketentuan pembayaran kontrak, periode antara transfer produk ke pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan kurang dari satu tahun. Ketentuan pembayaran tidak memiliki komponen pembiayaan yang signifikan dan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Revenue is recognised based on the price specified in the contracts with the customer. Based on the contract payment terms, the period between the transfer of the products to the customer and payment by the customer is less than one year. The payment terms do not have a significant financing component and were not changed from previous years.

Beban (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya eksplorasi dan pengupasan tanah) diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

Expenses (including but not limited to exploration and stripping costs) are recognised as incurred on an accrual basis.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.17. Pajak penghasilan

Manfaat/(beban) pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan badan kini dan tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam penghasilan atau kerugian komprehensif lain.

Pajak kini merupakan pajak terutang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan kena pajak atau rugi pajak tahun berjalan, menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada saat tanggal pelaporan, dan mencakup penyesuaian tahun sebelumnya baik untuk keperluan rekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan, atau untuk mencatat perbedaan yang timbul dari penilaian pajak. Liabilitas pajak kini atau piutang pajak diukur dengan menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diharapkan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang terkait dengan kompleksitas atas peraturan-peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak tangguhan tidak diakui jika timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan atas manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*).

Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi sejauh manfaat pajak terkait tidak lagi memungkinkan untuk terealisasi; pengurangan tersebut dilakukan pembalikan ketika kemungkinan laba kena pajak di masa depan meningkat.

Dalam menentukan besarnya jumlah pajak kini dan tangguhan, Grup memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan setiap tambahan pajak dan denda.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

2.18. Liabilitas imbalan kerja

a. Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang berlaku semenjak akhir 2012. Sebelumnya Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan metode iuran tetap kepada pengelola dana pensiun baik yang wajib, berdasarkan kontrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 mewajibkan Perseroan untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia pensiun dengan jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerjanya, ada kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran imbalan tambahan apabila jumlah akumulasi dana iuran pensiun pada program pensiun iuran pasti lebih kecil dari jumlah imbalan pensiun yang diharuskan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diakui seolah-olah sebagai program manfaat pasti.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.17. Income taxes

Income tax benefit/(expense) is comprised of current and deferred corporate income tax. Current tax and deferred tax are recognised in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income or loss.

Current tax is the expected tax payable or refundable on the taxable income or loss for the year, using tax rates substantively enacted as of the reporting date, and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Current tax payable or refundable is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves.

In determining the amount of current and deferred tax, the Group considers the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Management periodically evaluates the position taken in Annual Tax Return with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

2.18. Employment benefit liabilities

a. Pension and Labor Law benefits

The Company has maintained a defined contribution pension plan starting from the end of 2012. Prior to this, the Company maintained a defined benefit plan. The defined contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to trustee-administered pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labor Law No. 13/2003 requires the Company to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount, as required by the Labor Law, in particular when the cumulative contributions are less than that amount. For financial reporting purposes, the defined contribution plan is therefore effectively treated as if it were a defined benefit plan.



2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

2.18. Employment benefit liabilities (continued)

a. Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan (lanjutan)

a. Pension and Labor Law benefits (continued)

Perseroan mengakui kelebihan pembayaran (jika ada) yang akan diperlukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, atas program pensiun iuran pasti, bersama dengan pengembalian investasi yang dihasilkan dari iuran, sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, akun liabilitas imbalan pascakerja.

The Company recognises the excess (if any) of the payments that would be required under the Labor Law, over the defined contributions paid, together with investment returns arising from the contributions, as a liability in the consolidated statements of financial position, accounted for as post-employment benefit liabilities.

Liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setidaknya setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (karena tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognised in the statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated at least annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laba rugi.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefits expense in profit or loss.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada posisi keuangan konsolidasian.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the year in which they arise. They are included in retained earnings in the consolidated statements of changes in equity and financial position.

Saat manfaat suatu program diganti atau saat suatu program mengalami kurtailmen, dampak perubahannya yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian kurtailmen diakui langsung di laba rugi.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss.

b. Imbalan kesehatan pascakerja

b. Post-retirement medical benefits

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk para karyawan yang telah pensiun dan memiliki hak atas fasilitas ini. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang ditandatangani pada bulan Januari 2011 dan memilih untuk mengikuti program ini. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setidaknya setiap tahun oleh aktuaris yang berkualifikasi. Pada tahun 2014, Perseroan mengubah metode pembiayaan atas program ini dengan menggunakan program asuransi.

The Company provides post-retirement medical benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age and were hired prior to the signing of the Collective Labor Agreement ("CLA") in January 2011 and opted to enroll into this program. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. A qualified actuary values this liability at least annually. In 2014, the Company changed its method to fund this program through an insurance program.

Pada tahun 2016, Perseroan berhenti menggunakan program asuransi karena peningkatan jumlah premi. Perseroan kemudian menerapkan sebuah pendekatan Layanan Administrasi Saja (pendekatan "ASO") dengan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu administrasi program ini. Pada pendekatan ini, Perseroan menempatkan sejumlah uang untuk dikelola oleh pihak ketiga untuk menutupi biaya medis bagi peserta program. Pihak ketiga menerapkan pendekatan Koordinasi Imbalan ("COB") yang memungkinkan klaim medis dipertimbangkan dalam perhitungan biaya keseluruhan.

In 2016, the Company stopped using an insurance program due to escalating premiums. The Company subsequently implemented an Administrative Service Only approach ("ASO" approach) by engaging a third party appointed by the Company to help administer the program. In this approach, the Company places a certain amount of money to be administered by a third party to cover the medical costs for the program participants. The third party applies the Coordination of Benefit ("COB") approach which allows the medical claim to be considered in the overall cost calculation.

c. Imbalan pesangon

c. Termination benefits

Pesangon adalah pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Perseroan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Company recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Company recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 57 and involves the payment of termination benefits. Termination benefits payable more than 12 months after the reporting date are discounted to reflect present value.

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.18. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

d. Program bonus

Perseroan mengakui liabilitas dan beban untuk bonus berdasarkan rumus-rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja Perseroan.

e. Pembayaran berbasis saham

Perseroan memberikan program imbalan setara saham dan kinerja unit saham ("PSU") kepada karyawan tertentu ("peserta"). Untuk imbalan setara saham, peserta dapat membeli saham Vale S.A. tanpa ada manfaat yang diberikan oleh karyawan tertentu. Jika saham yang dibeli ditahan selama periode tiga tahun dan peserta masih merupakan karyawan Perseroan, maka peserta berhak mendapatkan dari Perseroan imbalan saham setara dengan jumlah saham yang dibeli oleh peserta.

Untuk program PSU, selama periode empat tahun *vesting cycle* peserta berhak menerima imbalan setara dengan nilai pasar saham biasa Vale S.A. berdasarkan faktor kinerja yang diukur sebagai indikator tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Imbalan ini dibayarkan secara kas dan dapat berupa pembayaran cicilan, tergantung faktor kinerja setiap tahunnya.

2.19. Sewa

Pada tanggal 1 Januari 2019, Grup telah menerapkan PSAK 73 - Sewa menggunakan pendekatan cara praktis sehingga informasi komparatif tidak disajikan kembali dan tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 30.

Diterapkan sebelum 1 Januari 2019

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan pada laba rugi selama periode sewa.

Diterapkan sejak 1 Januari 2019

Pada tanggal dimulainya kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi, Grup menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substantial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan;
- Grup memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset.

Pada tanggal dimulainya kontrak atau pada saat penilaian kembali kontrak yang mengandung sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap unsur sewa berdasarkan harga relatif dari unsur sewa.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal awal sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya, yang terdiri dari nilai awal dari liabilitas sewa yang disesuaikan dengan setiap pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulai, ditambah dengan biaya langsung yang terjadi dan perkiraan biaya untuk membongkar dan melepas aset terkait atau untuk merestorasi area dimana aset tersebut ditempatkan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Kewajiban sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tidak dibayar pada awal kontrak, didiskontokan menggunakan tingkat bunga implisit dalam sewa.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal dimulainya hingga akhir masa manfaat dari aset hak-guna atau akhir dari masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dinilai untuk penurunan nilai dan disesuaikan atas pengukuran kembali dari liabilitas sewa.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa di masa depan yang timbul dari perubahan suatu indeks atau tingkat, jika ada perubahan dalam estimasi Grup dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan melakukan opsi pembelian, perpanjangan atau pemutusan kontrak. Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara tersebut, penyesuaian dilakukan terhadap jumlah tercatat dari aset hak-guna, atau diakui dalam laba rugi jika jumlah tercatat dari aset hak-guna telah dikurangi menjadi nol.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Employment benefit liabilities (continued)

d. Bonus plans

The Company recognises a liability and an expense for bonuses based on the applicable formula which consider various aspects of the Company's performance.

e. Share-based payments

The Company awards eligible employees ("participants") participation in a share matching program and performance share units ("PSU") program. For the share matching program, the participants can acquire Vale S.A.'s shares without any benefits being provided by the eligible employee. If the shares acquired are held for a period of three years and the participants keep an employment relationship with the Company, the participant is entitled to receive from the Company an award in shares, equivalent to the number of shares originally acquired by the participants.

For the PSU program, the participants have the opportunity to receive during a four year-vesting cycle, an award equivalent to the market value of a determined number of common shares and conditioned to Vale S.A.'s performance factor measured as an indicator of total return to the shareholders ("TSR"). This award is paid in cash and can occur in cumulative installments, conditioned to the performance factor of each year.

2.19. Leases

On January 1, 2019, the Group has applied SFAS 73 - Leases using the simplified approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under SFAS 30.

Policy prior to January 1, 2019

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss over the term of the lease.

Policy starting January 1, 2019

At the inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- The contract involves the use of an identified asset;
- The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.19. Sewa

Grup menyajikan aset hak-guna yang tidak memenuhi definisi properti tersedia untuk pemegang saham dengan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset yang bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa ini sebagai beban menggunakan basis garis lurus selama masa sewa.

2.20. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia untuk pemegang saham dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusi dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Grup.

2.21. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional (Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup) untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.22. Instrumen keuangan

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Grup menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Grup atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Grup kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Aset keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Grup menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya

Grup menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal dan tidak dapat merubah klasifikasi yang ditentukan saat penerapan awal tersebut.

Seluruh aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali dalam hal aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi. Biaya transaksi atas aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan dalam laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.19. Leases

The Group presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property as fixed assets and lease liabilities in the consolidated statements of financial position.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2.20. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant year.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of any dilutive potential ordinary shares owned by the Group.

2.21. Segment reporting

An operating segment is a component of an enterprise:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to the transactions with different components within the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the enterprise's chief operating decision maker (the Directors are the Group's chief operating decision maker) to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

2.22. Financial instruments

A financial instrument is recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are derecognised when the Group's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Group's obligations expire or are discharged or cancelled.

Financial assets

Initial recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Group assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI").

Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets at amortised cost.
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL").
- Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification made at initial adoption.

All financial assets are recognised initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.22. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Grup diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya, aset keuangan lancar lainnya, piutang non-usaha dari pihak berelasi dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang ditahan hingga pengembalian arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga, dan tidak didesain untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur dengan biaya diamortisasi. Nilai tercatat aset tersebut disesuaikan dengan penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian ("ECL") yang diakui dan diukur. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam 'pendapatan keuangan dan pendapatan lainnya' menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak legal untuk melakukan saling hapus dan terdapat intensi untuk menyelesaikan berdasarkan nilai bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2.23. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui ECL untuk semua aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan pada perkiraan tingkat bunga efektif awal.

ECL diakui dalam tiga tahap ("*general model*") untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal. Untuk eksposur kredit di mana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL ditentukan untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit di mana terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diharapkan selama sisa waktu eksposur risiko kredit, terlepas dari waktu peristiwa gagal bayar (ECL sepanjang umur). Untuk aset keuangan yang terdapat bukti obyektif penurunan nilai, ECL sepanjang umur dihitung pada nilai tercatat bersih (setelah dikurangi penyisihan kredit).

Ketika menentukan apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika mengestimasi ECL, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada aset keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada aset keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang mendukung dan relevan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan informasi penilaian kredit dan termasuk informasi *forward-looking*.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.22. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

The Group's financial assets measured at amortised cost include cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables, other current financial assets, non-trade receivables from related parties and other non-current financial assets. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current assets.

Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent SPPI, and that are not designated at FVTPL, are measured at amortised cost. The carrying amount of these assets is adjusted by any expected credit losses ("ECLs") allowance recognised and measured. Interest income from these financial assets is included in 'finance income and other income' using the effective interest rate method.

Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost. As at December 31, 2019 and 2018, the Group only has financial liabilities measured at amortised cost.

Amortised cost is measured by discounting the liability amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest rate method are recognised in profit or loss.

Trade payables, accruals, other current financial liabilities and borrowings are initially measured at fair value less any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realised and the liability is settled simultaneously.

2.23. Impairment of financial assets

The Group recognises an allowance for ECLs for all the Group's financial assets measured at amortised cost. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate.

ECLs are recognised in three stages ("*general model*") for impairment based on changes in credit quality since initial recognition. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 months (12-months ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (lifetime ECL). For financial assets that have objective evidence of impairment, lifetime ECL is calculated at the net carrying amount (net of credit allowance).

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group compares the risk of a default occurring on the financial assets as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial assets as at the date of initial recognition and considers supportable and reasonable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.23. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup mempertimbangkan bahwa piutang usaha memiliki risiko kredit rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi peringkat investasi yang dipahami secara global. Grup menganggap ini sebagai BBB- oleh S&P atau BBB lebih tinggi oleh Japan Credit Rating Agency. Ketika peringkat kredit di bawah BBB- oleh S&P atau BBB oleh Japan Credit Rating Agency, Grup menilai apakah peningkatan risiko kredit yang signifikan telah terjadi.

2.24. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tahun dimana dividen tersebut diumumkan.

2.25. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Seorang individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut akan berelasi dengan entitas pelapor ketika individu bersangkutan:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) merupakan manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau *joint venture* yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu berelasi seperti didefinisikan di atas.
- (vii) Orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 33 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

3. Perubahan kebijakan akuntansi

3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019

PSAK dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- PSAK 22 (Penyesuaian 2018) - Kombinasi Bisnis
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018) - Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018) - Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018) - Pengendalian Bersama
- Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja - Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program

Grup menerapkan secara dini standar-standar baru yang hanya diwajibkan sejak 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK 71 - Instrumen Keuangan
- PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 - Sewa

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.23. Impairment of financial assets (continued)

The Group considers trade receivables to have low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of 'investment grade'. The Group considers this to be BBB- per S&P or BBB or higher per the Japan Credit Rating Agency. When the credit rating is below the BBB- per S&P or BBB per Japan Credit Rating Agency, the Group assesses whether a significant increase in credit risk has occurred.

2.24. Dividends

Dividend distributions to the shareholders are recognised as a liability in the Group's consolidated statements of financial position in the year in which the dividends are declared.

2.25. Related party transactions

A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a related person as identified above.
- (vii) A person that has control or joint control over the reporting entity that has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 33 to the Consolidated Financial Statements.

3. Changes in accounting policies

3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2019

The following new/revised SFAS and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") have been issued and are effective starting on or after January 1, 2019:

- ISAK 33 - Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
- ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments
- SFAS 22 (2018 Annual Improvement) - Business Combination
- SFAS 26 (2018 Annual Improvement) - Borrowing Costs
- SFAS 46 (2018 Annual Improvement) - Income Taxes
- SFAS 66 (2018 Annual Improvement) - Joint Arrangements
- Amendments to SFAS 24: Employee Benefits - Plan Amendment, Curtailment or Settlement

The Group early adopted new standards which are only mandatory starting January 1, 2020 as follows:

- SFAS 71 - Financial Instruments
- SFAS 72 - Revenue from Contracts with Customers
- SFAS 73 - Leases



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

3. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019 (lanjutan)

Standar, revisi dan interpretasi baru yang diadopsi Grup sejak 1 Januari 2019 tidak berdampak material kepada laporan keuangan konsolidasian Grup, kecuali yang dijelaskan di bawah ini:

PSAK 71 - Instrumen Keuangan

Standar ini membahas klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan, model penurunan nilai yang baru dan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai. Klasifikasi dan model penurunan nilai yang baru berdasarkan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap pengukuran dan provisi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya diakui Perseroan berdasarkan PSAK 55 - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang berdasarkan PSAK 55. Aset keuangan tersebut memenuhi kriteria PSAK 71 untuk klasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, karena instrumen keuangan ini dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan kas, yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk model penurunan nilai, Grup telah menghitung kerugian kredit yang diperkirakan dari aset keuangan dan menentukan bahwa jumlahnya tidak material.

PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Standar ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan apakah, berapa banyak dan kapan pendapatan diakui. Standar ini menggantikan PSAK 23 - Pendapatan dan PSAK 34 - Kontrak Konstruksi.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak pada pendapatan yang sebelumnya diakui dalam PSAK 23 karena Grup hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan dan waktu pengakuan pendapatan berada pada titik yang sama.

PSAK 73 - Sewa

Berdasarkan PSAK 73, perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan dihapus. Standar ini mensyaratkan penggunaan aset hak-guna dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Ada pengecualian pengakuan untuk sewa jangka pendek dan sewa barang bernilai rendah.

Grup menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan cara praktis. Pada saat transisi, liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan pada tingkat bunga pinjaman incremental Grup pada tanggal 1 Januari 2019. Aset hak-guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan pembayaran sewa di muka atau pembayaran terutang. Tidak ada penyesuaian terhadap laba ditahan Grup karena Grup memilih untuk mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa. Lihat Catatan 11 untuk informasi mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

3.2. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum efektif

Beberapa PSAK dan ISAK baru/revisi telah diterbitkan tetapi belum efektif pada 1 Januari 2019, dan tidak diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini:

- ISAK 35 – Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) – Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 15: Inventasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf

Standar baru, amendemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, kecuali PSAK 112 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

Saat dikeluarkannya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak dari adopsi di masa yang akan datang dari standar terkait, pada posisi keuangan dan hasil operasional konsolidasian Grup.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

3. Changes in accounting policies (continued)

3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2019 (continued)

The new standards, amendments and interpretations adopted by the Group starting January 1, 2019 have no material impact on the Group's consolidated financial statements, except those discussed below:

SFAS 71 - Financial Instruments

This standard addresses the classification and measurement of financial assets and liabilities, new impairment model and new rules for hedge accounting. The new classification and new impairment model under SFAS 71 have an immaterial impact to the measurement and the provision for impairment of financial assets previously recognised based on SFAS 55 - Financial Instruments: Recognition and Measurement.

As at December 31, 2019 and 2018, the Group only has financial assets classified as loans and receivables under SFAS 55. Those financial assets meet the SFAS 71 criteria for classification at amortised cost, because these financial instruments are held within a business model whose objective is to collect the cash flows, which represent solely payments of principal and interest.

For the impairment model, the Group has calculated expected credit losses on financial assets and determined that the amount is not material.

SFAS 72 - Revenue from Contracts with Customers

This standard establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognised. It replaced SFAS 23 - Revenue and SFAS 34 - Construction Contracts.

The adoption of SFAS 72 results in no impact on revenue that was previously recognised under SFAS 23 as the Group has only a single performance obligation and the timing of revenue recognition is at the same point in time.

SFAS 73 - Leases

Under SFAS 73, the distinction between operating and finance leases is removed. The standard requires the right-of-use of the leased asset and a financial liability to pay rentals to be recognised. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items.

The Group applies SFAS 73 using the simplified approach. At transition, lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as at January 1, 2019. Right-of-use assets are measured at an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments. There is no adjustment to the Group's retained earnings as the Group elected to measure the right-of-use assets at an amount equal to the lease liability. Refer to Note 11 for the information regarding impact of SFAS 73 adoption to the Group's consolidated financial statements.

3.2. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective

Certain new/revised SFASs and ISAKs have been issued that are not yet effective on January 1, 2019 and have not been applied in preparing these financial statements:

- ISAK 35 – Presentation of Financial Statements for Non-profit Oriented Entities
- SFAS 1 (2019 Annual Improvement) – Presentation of Financial Statements
- Amendments to SFAS 1: Presentation of Financial Statements
- Amendments to SFAS 15: Investments in Associates and Joint Ventures
- Amendments to SFAS 62: Insurance Contracts
- SFAS 112: Accounting for Endowments

The above new standards, amendments, annual improvements and interpretations are effective beginning January 1, 2020, except for SFAS 112 which is effective from January 1, 2021.

As of the issuance of these consolidated financial statements, management is evaluating the impact the future adoption of these standards may have on the Group's consolidated financial position and operating results.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus-menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan atas peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan dalam periode mendatang. Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan konsolidasian.

4.1. Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari aset Grup. Untuk memperkirakan cadangan bijih nikel, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga-harga komoditas, biaya modal dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau kadar cadangan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan bijih atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi untuk aktivitas purna operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

4.2. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Kebijakan akuntansi Grup atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan penghentian dan pembongkaran fasilitas membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti: persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan (termasuk penelaahan masa periode KK); besarnya kemungkinan kontaminasi atau kerusakan serta waktu, luas dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang; dan juga tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual di masa depan dari jumlah yang disisihkan pada saat ini. Provisi yang telah diakui ditinjau secara berkala dan diperbaharui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

Pada tahun 2018, Perseroan mengubah estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2036 dan 2051 menjadi antara tahun 2041 dan 2056. Pada tahun 2019, Perseroan merubah rencana penambangan dan produksi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan perubahan estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2041 dan 2056 menjadi antara tahun 2045 dan 2060. Hal ini dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa probabilitas untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk melanjutkan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun (lihat Catatan 1) meningkat. Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan proses divestasi Perseroan (lihat Catatan 39d). Walaupun demikian, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi Perseroan.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

4. Critical accounting estimates and judgments

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the consolidated financial position reported in future periods. Further details of the nature of these assumptions and conditions can be found in the relevant notes to the consolidated financial statements.

4.1. Reserves estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Group's properties. In order to estimate nickel ore reserves, assumptions are required about a range of geological, technical, capital costs and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or grade of reserves requires the size, shape and depth of ore bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's consolidated financial results and financial position in a number of ways, including:

- Carrying values of assets may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortisation charged in profit or loss may change where the useful economic lives of assets change.
- Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

4.2. Provision for asset retirement

The Group's accounting policy for the recognition of provisions for environmental reclamation and mine closure and decommissioning and dismantling of facilities requires the use of significant estimates and assumptions such as: requirements of the relevant legal and regulatory framework (including assessment of the period of the CoW); the magnitude of possible contamination or disturbance and the timing, extent and costs of required environmental reclamation and mine closure activities; and also the discount rate. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The recognised provision is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

In 2018, the Company changed the estimated period of its mine closure from between 2036 and 2051 to between 2041 and 2056. In 2019, the Company changed its mining and production plan at South and Central Sulawesi areas which resulted in a change in the estimated period of mine closure from between 2041 and 2056 to between 2045 and 2060. This is because the Company believes that the probability of obtaining the Government's approval to continue its operations for two additional ten-year periods (see Note 1) is increasing. This is especially associated with the development of the Company's divestment process (see Note 39d). Nevertheless, actual results may differ from the Company's estimate.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4.3. Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan Grup. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kumulatif rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

4.4. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap tahun pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat dipulihkan kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai membutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan' di atas), biaya operasi, biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk imbalan dimaksud termasuk tingkat bunga diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat kenaikan klaim kesehatan di masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Grup menentukan tingkat bunga diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja. Dalam menentukan tingkat bunga diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah (karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

4.3. Income taxes

Judgment and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Group. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the current income tax and deferred income tax provisions in the year in which the determination was made.

All judgements and estimates made by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

4.4. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, an asset or a cash generating unit is evaluated at every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs of disposal and value in use.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs, environmental reclamation and mine closure costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits

The present value of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for the pension benefits and post-retirement medical benefits include the discount rate, future remuneration changes, increase rate of future medical claims, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension benefits and post-retirement medical benefits. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of Government bonds (as there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which those benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related retirement benefits and post-retirement medical benefits.

Other key assumptions for the pension benefits and post-retirement medical benefits obligations are determined based on current market conditions.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

5. Kas dan setara kas

5. Cash and cash equivalents

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kas di bank:			Cash in bank:
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
Citibank N.A.	48,700	10,497	Citibank N.A.
JP Morgan Chase Bank N.A.	38,285	42,797	JP Morgan Chase Bank N.A.
PT Bank UOB Indonesia	31,397	-	PT Bank UOB Indonesia
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
Citibank N.A.	17,398	9,572	Citibank N.A.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1,930	635	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,325	359	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	139,035	63,860	
Deposito berjangka:			Time deposits:
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
Banco Bradesco	55,000	-	Banco Bradesco
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	45,000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
ANZ Bank	10,000	99,840	ANZ Bank
Standard Chartered Bank	-	31,060	Standard Chartered Bank
National Bank of Canada	-	60,393	National Bank of Canada
Citibank N.A.	-	33,000	Citibank N.A.
BNP Paribas	-	13,000	BNP Paribas
	110,000	237,293	
Jumlah	249,035	301,153	Total

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
Deposito Dolar AS	2.6%	2.7%	US Dollar deposits

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

6. Kas yang dibatasi penggunaannya

6. Restricted cash

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kas di bank:			Cash in bank:
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
MUFG Union Bank N.A.	-	15,607	MUFG Union Bank N.A.
Deposito berjangka:			Time deposits:
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	15,412	14,345	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Jumlah	15,412	29,952	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	(15,412)	(14,345)	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian lancar	-	15,607	Current portion

Rekening pada MUFG Union Bank N.A. ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhutang. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd untuk Proyek Karebbe. Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019 (lihat Catatan 18).

The account with MUFG Union Bank N.A. is intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established to fulfil the requirement of the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") between the Company and Mizuho Bank, Ltd and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd for the Karebbe Project. The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019 (refer to Note 18).

Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditujukan sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi dan penutupan tambang (lihat Catatan 39b).

The time deposits placed with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk are intended as collateral in relation to the bank guarantee issued by the bank in relation to the reclamation and mine closure guarantees (refer to Note 39b).

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

6. Kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Perubahan kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan pembayaran pinjaman bank yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Saldo awal	15,607	15,890	Beginning balance
Arus kas:			Cash flows:
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	3,902	39,394	Placement of restricted cash
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	(19,509)	(39,677)	Withdrawal of restricted cash
Total perubahan dari arus kas pendanaan	(15,607)	(283)	Total changes from financing cash flows
Saldo akhir	-	15,607	Ending balance

6. Restricted cash (continued)

The movement in restricted cash intended for payments of bank loan arising from financing activities is as follows:

7. Piutang usaha

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Pihak-pihak berelasi dalam mata uang Dolar AS	107,295	124,248	Related parties denominated in US Dollars

7. Trade receivables

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat piutang sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of receivables mentioned above.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada piutang usaha yang dijaminkan, dan piutang usaha sebesar AS\$107,3 juta (2018: AS\$124,2 juta) (nilai penuh) belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2019 and 2018, there were no trade receivables pledged as collateral, and trade receivables of US\$107.3 million (2018: US\$124.2 million) (full amount) were not yet past due nor impaired.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the year, management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2019 and 2018.

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33 for details of related party balances and transactions.

8. Aset keuangan lainnya

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Pinjaman kepada karyawan	6,289	8,134	Loans to employees
Tagihan kepada kontraktor	1,088	53	Receivables from contractors
Piutang bunga	-	639	Interest receivables
Jumlah	7,377	8,826	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
- Pinjaman kepada karyawan	(4,623)	(6,300)	- Loans to employees
Bagian lancar	2,754	2,526	Current portion

8. Other financial assets

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh aset keuangan lainnya belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Analisis umur aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2019 and 2018, all other financial assets were not yet past due nor impaired. The aging analysis of these other financial assets is as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Sampai dengan 3 bulan	1,505	1,151	Up to 3 months
3 bulan sampai 1 tahun	1,249	1,375	3 months to 1 year
Lebih dari 1 tahun	4,623	6,300	More than 1 year
Jumlah	7,377	8,826	Total

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33 for details of related party balances and transactions.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

9. Persediaan

9. Inventories

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Nikel			Nickel
Dalam proses	55,452	48,962	In process
Barang jadi	13,212	12,604	Finished
	68,664	61,566	
Bahan pembantu	80,151	70,213	Supplies
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(854)	-	Less: Provision for obsolete supplies
	79,297	70,213	
Jumlah	147,961	131,779	Total

Mutasi penyisihan untuk bahan pembantu usang:

Movement in the provision for obsolete supplies is as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(854)	-	Provision for obsolete supplies
Saldo akhir	(854)	-	Ending balance

Manajemen yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang pada tanggal 31 Desember 2019.

Management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies as at December 31, 2019.

Tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There were no inventories pledged as collateral as at December 31, 2019 and 2018.

Biaya persediaan yang dijual atau digunakan dalam operasi diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" (lihat Catatan 24).

The cost of inventories sold or used in operations is recognised as an expense and included in "cost of revenue" (refer to Note 24).

Pada tanggal 31 Desember 2019, semua persediaan telah diasuransikan bersama-sama dengan aset tetap Grup (lihat Catatan 11). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

As at December 31, 2019, all inventories were insured together with the Group's fixed assets (refer to Note 11). Supplies are insured at replacement cost, nickel in process at the cost of ore raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in matte finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses.

10. Biaya dibayar di muka dan uang muka

10. Prepayments and advances

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Asuransi dibayar di muka	1,977	2,430	Prepaid insurance
Uang muka ke pemasok	1,019	2,376	Advance to vendors
Lainnya	112	81	Others
Jumlah	3,108	4,887	Total

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

11. Aset tetap

11. Fixed assets

	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Harga perolehan						Cost
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	932,526	-	2,953	(763)	934,716	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	70,596	-	3,923	(1,074)	73,445	Roads and bridges
Bangunan	647,454	-	76,298	(6,985)	716,767	Buildings
Pabrik dan mesin	1,714,912	-	74,804	(35,341)	1,754,375	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	22,153	-	790	(882)	22,061	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	51,979	2,606	20,456	(936)	74,105	Mine development
Sewa	-	2,303	-	-	2,303	Leases
Aset tetap dalam penyelesaian *)	162,655	166,367	(179,224)	-	149,798	Construction in progress *)
Jumlah	3,602,275	171,276	-	(45,981)	3,727,570	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(392,365)	(21,650)	-	-	(414,015)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(39,134)	(4,321)	-	1,047	(42,408)	Roads and bridges
Bangunan	(495,930)	(20,631)	-	5,633	(510,928)	Buildings
Pabrik dan mesin	(1,192,878)	(79,429)	-	32,082	(1,240,225)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(21,075)	(549)	-	877	(20,747)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(26,383)	(4,746)	-	562	(30,567)	Mine development
Sewa	-	(1,218)	-	-	(1,218)	Leases
Jumlah	(2,167,765)	(132,544)	-	40,201	(2,260,108)	Total
Nilai buku bersih	1,434,510				1,467,462	Net book value

*) Lihat Catatan 12 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 12 for details of construction in progress.

	1 Januari/ January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2018	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Harga perolehan						Cost
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	932,621	-	-	(95)	932,526	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	70,642	-	-	(46)	70,596	Roads and bridges
Bangunan	642,995	-	5,604	(1,145)	647,454	Buildings
Pabrik dan mesin	1,680,110	-	56,934	(22,132)	1,714,912	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	34,309	-	388	(12,544)	22,153	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	76,991	-	2,829	(27,841)	51,979	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	129,444	103,369	(65,755)	(4,403)	162,655	Construction in progress *)
Jumlah	3,567,112	103,369	-	(68,206)	3,602,275	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(367,014)	(25,424)	-	73	(392,365)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(34,994)	(4,180)	-	40	(39,134)	Roads and bridges
Bangunan	(478,245)	(18,560)	-	875	(495,930)	Buildings
Pabrik dan mesin	(1,137,968)	(75,866)	-	20,956	(1,192,878)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(33,222)	(397)	-	12,544	(21,075)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(21,880)	(4,503)	-	-	(26,383)	Mine development
Jumlah	(2,073,323)	(128,930)	-	34,488	(2,167,765)	Total
Nilai buku bersih	1,493,789				1,434,510	Net book value

*) Lihat Catatan 12 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 12 for details of construction in progress.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

11. Aset tetap (lanjutan)

Grup menyewa ruang kantor dari PT Api Metra Graha dan bus dari PT Sinar Jaya Langgeng Utama (Catatan 32). Informasi mengenai sewa di mana Grup adalah penyewa disajikan sebagai berikut:

11. Fixed assets (continued)

The Group leases an office space from PT Api Metra Graha and buses from PT Sinar Jaya Langgeng Utama (Note 32). Information about the leases under which the Group is a lessee is presented below:

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Penyusutan/ Depreciation	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Bangunan	-	779	(360)	-	419	Buildings
Pabrik dan mesin	-	1,524	(858)	-	666	Plant and machinery
Jumlah	-	2,303	(1,218)	-	1,085	Total

Liabilitas sewa yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Lease liabilities recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Liabilitas sewa	1,120	-	Lease liabilities
Dikurangi: Bagian jangka panjang	(173)	-	Less: Non-current portion
Bagian jangka pendek	947	-	Current portion

Beban bunga yang diakui pada laba rugi dan pembayaran yang dilakukan oleh Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 masing-masing adalah AS\$63 ribu dan AS\$1.245 ribu (nilai penuh).

Interest expense recognised in profit or loss and payments made by the Group for the year ended December 31, 2019 were US\$63 thousand and US\$1,245 thousand (full amount), respectively.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 was allocated as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Beban pokok pendapatan (lihat Catatan 24)	132,184	128,930	Cost of revenue (refer to Note 24)
Beban usaha	360	-	Operating expenses
Jumlah	132,544	128,930	Total

Pada tanggal 31 Desember 2019, semua aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanikal atau elektrik termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk keseluruhan aset dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2019 adalah AS\$4.338 juta (31 Desember 2018: AS\$6.263 juta) (nilai penuh), dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2018: AS\$800 juta) (nilai penuh). Seluruh aset tetap diasuransikan sebesar biaya penggantian. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2019, all of the fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by all industrial risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for the total assets and related business interruption exposure as at December 31, 2019 was US\$4,338 million (December 31, 2018: US\$6,263 million) (full amount), with policy limits of US\$800 million per occurrence (December 31, 2018: US\$800 million) (full amount). The fixed assets are insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There were no fixed assets pledged as collateral as at December 31, 2019 and 2018.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar AS\$542,9 juta (31 Desember 2018: AS\$392,4 juta) (nilai penuh). Nilai buku bersih aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil.

The gross carrying value of each fixed asset that is fully depreciated and still in use was US\$542.9 million (December 31, 2018: US\$392.4 million) (full amount). Net book value of fixed assets which are permanently inactive and not classified as held for sale as at December 31, 2019 and 2018 was nil.

Grup telah melakukan pengkajian atas masa manfaat dan nilai sisa aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan berdasarkan pengkajian tersebut, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan atas masa manfaat aset tetap yang ada.

The Group has performed a review of the useful lives and residual value of the Company's fixed assets as at December 31, 2019 and based on that review, the Company did not identify any changes in the useful lives of the fixed assets.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 terdapat penyesuaian atas kenaikan jumlah kewajiban penghentian pengoperasian aset yang dikapitalisasi dalam aset pengembangan tambang sebesar AS\$2,6 juta (31 Desember 2018: turun sebesar AS\$27,8 juta) (nilai penuh). Nilai tercatat aset tetap yang dilepas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah AS\$5,8 juta (31 Desember 2018: AS\$5,9 juta) (nilai penuh).

For the year ended December 31, 2019 there was an adjustment to increase the amount of the asset retirement obligation capitalised in mine development assets by US\$2.6 million (December 31, 2018: decrease of US\$27.8 million) (full amount). The carrying amount of fixed assets disposed for the year ended December 31, 2019 was US\$5.8 million (December 31, 2018: US\$5.9 million) (full amount)



Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

12. Aset tetap dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal pelaporan.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

12. Construction in progress

Construction in progress represents capital projects that have not been completed at the reporting dates.

The construction in progress is as follows:

31 Desember	2019	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Pengembangan tambang 2019	17,609	79 - 99	2020	Mine development 2019
Mobile screening station	8,834	99	2020	Mobile screening station
Lainnya di bawah AS\$7 juta	123,355	-	-	Others below US\$7 million
Jumlah	149,798		Total	

31 Desember	2018	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu Penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Pelapisan kanal Larona	41,507	55	2019	Larona canal lining
Pengembangan tambang 2018	25,530	90 - 96	2019	Mine development 2018
Lainnya di bawah AS\$7 juta	95,618	-	-	Others below US\$7 million
Jumlah	162,655		Total	

13. Utang usaha

13. Trade payables

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pihak-pihak berelasi			Related parties
Dalam mata uang Dolar AS	2,071	1,620	Denominated in US Dollars
	2,071	1,620	
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	63,132	48,809	Denominated in Indonesian Rupiah
Dalam mata uang Dolar AS	26,701	26,435	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Euro	591	12,017	Denominated in Euro
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	4,913	2,300	Denominated in other currencies (below US\$1 million)
	95,337	89,561	
Jumlah	97,408	91,181	Total

Utang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Jumlah yang disebutkan di atas adalah jangka pendek sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan.

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang usahanya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

The trade payables arose from the purchase of goods and services. The amounts are current within the payment terms as set out in the relevant agreement.

There were no guarantees made by the Group for its payables as at December 31, 2019 and 2018.

Refer to Note 33 for details of related party balances and transactions.



Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

14. Perpajakan

14. Taxation

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pajak penghasilan badan ("PPH Badan")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2019	29,146	-	- CIT 2019
- PPh Badan 2018	6,988	-	- CIT 2018
- PPh Badan 2017	-	9,250	- CIT 2017
	36,134	9,250	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak dalam sengketa *)	119,233	107,652	- Taxes in dispute *)
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	77,616	49,459	- Value Added Tax ("VAT")
- Pajak impor	743	718	- Import tax
	197,592	157,829	
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(8,746)	-	Less: Provision for impairment
Jumlah	224,980	167,079	Total
Dikurangi: Bagian lancar	(78,160)	(50,798)	Less: Current portion
Bagian tidak lancar	146,820	116,281	Non-current portion

*) Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding.

*) Refer to Note 14e for details of taxes in dispute.

Manajemen yakin bahwa penyisihan penurunan nilai telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari ketidakpastian posisi pajak.

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses from uncertain tax positions.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
PPH Badan	-	1,119	CIT
Pajak lainnya			Other taxes
- PPh pasal 21	901	1,251	- Withholding Tax ("WHT") article 21
- PPh pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26	473	365	- WHT articles 4(2), 15, 22, 23 and 26
- PPN terhutang	400	165	- VAT payable
	1,774	1,781	
Jumlah	1,774	2,900	Total

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

14. Perpajakan (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Kini	34,207	37,467	Current
Tanggungan	(10,373)	(16,001)	Deferred
Penyesuaian tahun sebelumnya	7,902	639	Previous year adjustment
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	31,736	22,105	Total consolidated income tax expense

Perhitungan pajak penghasilan kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak yang dapat direvisi pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Basis yang digunakan dalam estimasi ini sama dengan yang digunakan dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	89,136	82,617	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	-	-	Profit before income tax - subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	89,136	82,617	Profit before income tax - the Company
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	42,917	38,945	Difference between commercial and tax depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	5,291	262	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	2,324	5,780	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	854	-	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(315)	640	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(9,581)	18,377	Other accruals/provisions
Pendapatan kena pajak final	(815)	(512)	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	7,015	3,761	Non-deductible expenses
Penghasilan kena pajak - Perseroan	136,826	149,870	Taxable income - the Company
Pajak penghasilan kini pada tarif 25% - Perseroan	34,207	37,467	Current income tax at 25% - the Company
Pajak penghasilan kini - entitas anak	-	-	Current income tax - subsidiaries
Pajak penghasilan kini - konsolidasian	34,207	37,467	Current income tax - consolidated
Pembayaran pajak di muka - konsolidasian	(63,353)	(36,348)	Prepayment of income taxes - consolidated
(Lebih)/kurang bayar pajak - konsolidasian	(29,146)	1,119	(Over)/under payment of tax - consolidated

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dengan hasil perhitungan teoritis dari laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	89,136	82,617	Consolidated profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 25%	22,284	20,654	Income tax calculated at 25%
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1,754	940	Non-deductible expenses
Pendapatan kena pajak final	(204)	(128)	Income subject to final tax
Penyesuaian tahun sebelumnya	7,902	639	Previous years adjustments
Beban pajak penghasilan konsolidasian	31,736	22,105	Consolidated income tax expense

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

14. Taxation (continued)

c. Income tax expense

The consolidated income tax expense for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Kini	34,207	37,467	Current
Tanggungan	(10,373)	(16,001)	Deferred
Penyesuaian tahun sebelumnya	7,902	639	Previous year adjustment
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	31,736	22,105	Total consolidated income tax expense

Current income tax calculations for the years ended December 31, 2019 and 2018 are based on estimated taxable income and may be revised when filing annual tax returns. The basis used for the estimates is the same as that used in the preparation of the annual tax return to be filed with the tax authority.

The reconciliation between profit before income tax as shown in these consolidated financial statements and the estimated consolidated taxable income for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	89,136	82,617	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	-	-	Profit before income tax - subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	89,136	82,617	Profit before income tax - the Company
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	42,917	38,945	Difference between commercial and tax depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	5,291	262	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	2,324	5,780	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	854	-	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(315)	640	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(9,581)	18,377	Other accruals/provisions
Pendapatan kena pajak final	(815)	(512)	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	7,015	3,761	Non-deductible expenses
Penghasilan kena pajak - Perseroan	136,826	149,870	Taxable income - the Company
Pajak penghasilan kini pada tarif 25% - Perseroan	34,207	37,467	Current income tax at 25% - the Company
Pajak penghasilan kini - entitas anak	-	-	Current income tax - subsidiaries
Pajak penghasilan kini - konsolidasian	34,207	37,467	Current income tax - consolidated
Pembayaran pajak di muka - konsolidasian	(63,353)	(36,348)	Prepayment of income taxes - consolidated
(Lebih)/kurang bayar pajak - konsolidasian	(29,146)	1,119	(Over)/under payment of tax - consolidated

The reconciliation of consolidated income tax expense to the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before income tax for the years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	89,136	82,617	Consolidated profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 25%	22,284	20,654	Income tax calculated at 25%
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1,754	940	Non-deductible expenses
Pendapatan kena pajak final	(204)	(128)	Income subject to final tax
Penyesuaian tahun sebelumnya	7,902	639	Previous years adjustments
Beban pajak penghasilan konsolidasian	31,736	22,105	Consolidated income tax expense



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

Perubahan liabilitas pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Changes in the deferred tax liabilities for the years ended December 31, 2019 and 2018 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2019	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	119,226	(15,281)	-	103,945	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	(3,999)	(1,045)	189	(4,855)	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(16,953)	5,863	-	(11,090)	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	-	(214)	-	(214)	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(325)	130	-	(195)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(7,275)	174	-	(7,101)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	90,674	(10,373)	189	80,490	Deferred tax liabilities, net

	1 Januari/ January 1, 2018	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2018	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	128,962	(9,736)	-	119,226	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	(5,216)	(66)	1,283	(3,999)	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(15,508)	(1,445)	-	(16,953)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(165)	(160)	-	(325)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(2,681)	(4,594)	-	(7,275)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	105,392	(16,001)	1,283	90,674	Deferred tax liabilities, net

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Jenis Pajak/ Tax Assessment Letter/ Tax Type	Tahun pajak/ Fiscal year	Nilai awal sengketa pajak/ Original tax in-dispute amount	Diterima oleh Grup atau kalah pada banding terakhir/ Accepted by the Group or lost on final appeal	Restitusi/ Refund	Selisih nilai tukar mata uang asing dan penyesuaian lainnya/ Exchange rate and other adjustments	Saldo akhir dan status terakhir per 31 Desember 2019/ Ending balance and latest status as of December 31, 2019	Catatan/ Notes
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)					
00003/204/04/091/11 PPh Pasal 26/WHT Article 26	2004	9,439	(1,159)	(7,124)	(403)	753	a)
00003/206/04/091/11 PPh Badan/CIT	2004	4,629	(1,112)	-	-	3,517	a)
00006/206/06/091/11 PPh Badan/CIT	2006	6,406	(466)	-	-	5,940	a)
00009/207/06/091/11 PPN/VAT	2006	4,069	(2,563)	(506)	(1,000)	-	b)
00014/406/08/091/10 PPh Badan/CIT	2008	1,931	-	-	-	1,931	a)
00006/206/10/091/14 PPh Badan/CIT	2010	19,410	-	(10,910)	-	8,500	a)
00007/406/11/091/13 PPh Badan/CIT	2011	4,911	-	(839)	1	2,758	a)
00026/406/12/091/14 PPh Badan/CIT	2012	647	-	-	-	647	a)
00056/207/13/091/17 sampai dengan/To 00067/207/13/091/17 PPN/VAT	2013	8,871	-	(162)	(89)	8,620	e)
00007/206/14/091/17 PPh Badan/CIT	2014	38,040	-	-	-	38,040	f)
00002/245/14/091/17 sampai dengan/To 00013/245/14/091/17 PPh Pasal 26/WHT Art. 26	2014	20,789	-	-	412	21,201	f)
00024/406/15/091/17 PPh Badan/CIT	2015	3,820	-	-	-	3,820	d)
00001/203/15/803/17 PPh Pasal 23/WHT Article 23	2015	811	-	(1)	(24)	786	d)
00039/406/16/091/18 PPh Badan/CIT	2016	7,942	-	-	-	7,942	g)
00023/406/17/091/19 PPh Badan/CIT	2017	2,355	-	-	-	2,355	g)
10148/84/DBN.PL/2018 PNBP/ Non-Tax State Revenue	2014-2016	1,036	-	-	-	1,036	h)
Surat ketetapan pajak lainnya*/ Other tax assessment letters*		11,635	(462)	(959)	(142)	10,072	
Total pajak dalam proses banding/ Total taxes in-dispute		146,741	(5,762)	(20,501)	(1,245)	119,233	

* Dengan nilai saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 kurang dari AS\$0,5 juta per ketetapan/

* With ending balances as of December 31, 2019 less than US\$0.5 million per assessment.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

- a) Sengketa ini terkait dengan pembayaran jasa *Management Assistance Agreement* ("MAA") kepada VCL dimana Direktorat Jenderal Pajak menilai sebagai deviden sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan dipotong PPh Pasal 26. Khusus untuk tahun pajak 2010, sengketa juga melibatkan pembayaran *Technical Assistance Agreement* ("TAA") kepada VCL. Perseroan tidak setuju dengan ketetapan ini.

Sengketa yang belum terselesaikan dengan jumlah total AS\$22,1 juta (nilai penuh) sedang dilakukan banding melalui jalur *Mutual Agreement Procedure* ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B").

Khusus untuk tahun pajak 2004, Perseroan juga meyakini bahwa surat ketetapan pajak yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2011, telah melewati batas waktu lima tahun sesuai P3B tersebut. Untuk sengketa tahun pajak 2008 senilai AS\$1,9 juta (nilai penuh), Perseroan telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

- b) Sengketa PPN ini terkait dengan koreksi atas pembayaran jasa luar negeri yang dapat dikreditkan. Pada tanggal 17 Juni 2019, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung telah menolak Peninjauan Kembali Perseroan dan jumlah ini telah dibebankan.
- c) Sengketa terkait biaya-biaya pinjaman SEFA sebesar AS\$1,3 juta (nilai penuh) yang dianggap tidak seharusnya dibebankan kepada Perseroan, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perseroan meyakini bahwa biaya-biaya dalam rangka perolehan pinjaman untuk kepentingan usaha utama dalam hal ini perusahaan nikel dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana telah diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan dan juga KK. Sengketa pajak ini masih dalam tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

- d) Sengketa terkait koreksi atas biaya-biaya penelitian dan pengembangan, biaya-biaya Akademi Teknik Sorowako, biaya-biaya Jasa Manajemen dan Teknis, biaya-biaya royalti, biaya-biaya jaminan hutang, biaya konsultan, biaya pengiriman, biaya konsinyasi stok, biaya kontribusi lainnya, dan biaya donasi dengan jumlah koreksi sebesar AS\$4,6 juta (nilai penuh). Perseroan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.
- e) Sengketa terkait koreksi utamanya atas penyebaran slag pada jalan tambang dan jasa luar negeri dengan jumlah koreksi sebesar AS\$17,6 juta (nilai penuh). Perseroan menyetujui sebagian dan telah membayar IDR2,5 miliar atau setara dengan AS\$0,2 juta (nilai penuh) dimana telah dicatat sebagai beban dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Di 2018, Perseroan telah membayarkan 50% dari sisa saldo tersebut dan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

- f) Sengketa terkait koreksi atas peredaran usaha, biaya-biaya pengembangan proyek, jaminan hutang, royalti dan biaya-biaya yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Koreksi atas peredaran usaha juga dianggap sebagai deviden sehingga dijadikan obyek koreksi untuk PPh Pasal 26. Koreksi lainnya adalah PPh Pasal 26 atas pembayaran deviden yang dipertimbangkan salah menggunakan tarif pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut adalah sebesar AS\$62,4 juta (nilai penuh).

Perseroan menyetujui sebagian dan telah membayar AS\$40,0 ribu (nilai penuh) serta telah dicatat sebagai beban dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

- a) The tax dispute is related to the Management Assistance Agreement ("MAA") fees paid to VCL which the Director General of Tax has assessed to be dividends and therefore not deductible for taxable income and subject to WHT Article 26. Specifically for the 2010 fiscal year case, the tax assessment also includes the payment of Technical Assistance Agreement ("TAA") fees to VCL. The Company does not agree with these assessments.

The outstanding disputes in the amount of US\$22.1 million (full amount) are currently in the appeal process through the Mutual Agreement Procedure ("MAP") in accordance with the Double Tax Avoidance Agreement ("DTAA") between the Indonesian and Canadian Tax Authorities.

Specifically for the fiscal year 2004, the Company also believes that the tax assessment letter which was issued on February 22, 2011, has exceeded the five-year time limit in accordance with the DTAA. For the disputed amount of US\$1.9 million (full amount) for the fiscal year 2008, the Company has submitted a reconsideration letter to the Supreme Court.

- b) This dispute relates to claimable VAT on payment of offshore service fees. On June 17, 2019, the Supreme Court, has rejected the Company's reconsideration, and the amount has been expensed.
- c) The tax dispute is on expenses related to SEFA in the amount of US\$1.3 million (full amount) which was considered non-deductible for the taxable income calculation.

The Company believes that the expenses related to securing loans which were used to fund the Company's main business of processing nickel, should be treated as deductible in the taxable income calculation, in accordance with prevailing regulations and the CoW. The dispute is still in the Reconsideration process at the Supreme Court.

- d) The tax dispute for expenses related to cost of project development, Technical Academy of Sorowako, Management and Technical Services, royalty, guarantee fee, consultancy, freight charges, consignment stock, other contributions, and donations in the total correction amount of US\$4.6 million (full amount). The Company filed an objection to these disputed amounts. The Director General of Tax has rejected the objection and the Company has filed an appeal letter to the Tax Court.
- e) The tax dispute is related mostly with the slag usage on the mining road and offshore services with total disputed amount of US\$17.6 million (full amount). The Company partially agreed and has paid IDR2.5 billion or equivalent to US\$0.2 million (full amount) which has been recorded as an expense in profit or loss for the year ended December 31, 2017.

In 2018, the Company paid 50% of the remaining balance and has filed an objection. The Director General of Tax has rejected the objection and the Company has filed an appeal to the Tax Court.

- f) The tax disputes are related to adjustment on revenue, project development costs, guarantee fee, royalty, other expenses which are considered by the Director General of Tax to be non-deductible expenses.

The adjustment to revenue is also deemed as a dividend subject to Withholding Tax ("WHT") article 26. The other WHT article 26 adjustment is related to under-withheld WHT article 26 on dividend payment which was considered to have used the incorrect WHT rate. The total adjustments amount to US\$62.4 million (full amount).

The Company partially agreed and paid US\$40.0 thousand (full amount) which has been recorded as an expense in profit or loss for the year ended December 31, 2017.

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Di 2018, Perseroan telah membayar sebagian yaitu sejumlah AS\$49,4 juta (nilai penuh), dan Perseroan tidak melakukan pembayaran atas koreksi sebesar AS\$12,9 juta (nilai penuh) koreksi PPh Pasal 26 atas pembayaran deviden kepada Pemegang Saham Pendiri yang dianggap kurang potong karena dianggap salah menggunakan tarif pajak dan Perseroan telah mengajukan keberatan. Keberatan tersebut ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Namun Direktur Jenderal Pajak secara sepihak melakukan kompensasi atas lebih bayar PPh Badan Tahun 2017 sebesar AS\$6,9 juta dan restitusi PPN bulan Mei 2018 sebesar AS\$3,5 juta kepada nilai sengketa PPh Pasal 26 yang tidak disetujui Perseroan tersebut. Perseroan sedang berupaya untuk mendapatkan kembali lebih bayar PPh Badan Tahun 2017 dan restitusi PPN bulan Mei 2018 yang dikompensasikan karena sengketa pajak ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Pajak.

g) Sengketa ini terkait dengan pembayaran jasa *Management Service Agreement* ("MSA") dan *Technical Service Agreement* ("TSA") kepada VCL dan Vale Technology Development Ltd ("VTDL") yang dianggap sebagai deviden sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sengketa ini juga terkait dengan biaya-biaya penelitian dan pengembangan, biaya jaminan hutang dan biaya-biaya lain yang dianggap tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut adalah AS\$10,3 juta (nilai penuh). Untuk tahun pajak 2016, keberatan Perseroan telah ditolak dan Perseroan akan mengajukan banding atas koreksi-koreksi tersebut, sementara itu untuk tahun pajak 2017, Perseroan telah mengajukan keberatan.

h) Sengketa terkait dugaan kurang bayar royalti kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penjualan nikel *matte* untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 karena ketidaktepatan dalam mengenakan tarif.

Jumlah koreksi-koreksi tersebut AS\$1,0 juta (nilai penuh). Perseroan tidak setuju atas koreksi-koreksi ini dan telah mengajukan keberatan. Perseroan telah menerima Surat Keputusan Keberatan yang menolak keberatan Perseroan, dan telah pula mengajukan gugatan atas keputusan tersebut.

15. Akruai

31 Desember	2019	2018
(Dalam ribuan Dolar AS)		
Barang dan jasa	11,448	9,748
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	3,430	13,156
Barang modal	1,449	1,987
Biaya keuangan	-	708
Jumlah	16,327	25,599

Lihat Catatan 33f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Perubahan akrual atas biaya keuangan yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

In 2018, the Company partially paid the amount of US\$49.4 million (full amount) with the exception of a disputed amount of US\$12.9 million (full amount) on WHT article 26 adjustment in relation to under-withheld dividend payment to the Founding Shareholders, and the Company has filed objection letters on these disputes. The objections were rejected by the Director General of Tax and the Company has filed appeals to the Tax Court. However, the Director General of Tax has unilaterally offset the 2017 CIT overpayment of US\$6.9 million and VAT refund for May 2018 period of US\$3.5 million against this WHT article 26 which was not agreed to by the Company. The Company is following up to obtain back the 2017 CIT overpayment and VAT refund for May 2018 period which were offset, as the dispute is still in the Tax Court process.

g) The tax dispute is related to the payment of Management Service Agreement ("MSA") and Technical Service Agreement ("TSA") fees to VCL and Vale Technology Development Ltd ("VTDL") which were deemed to be dividends, and therefore non-deductible against taxable income. The disputes were also related to cost of project development, guarantee fees and other expenses which are deemed to be non-deductible expenses. The total adjustment is US\$10.3 million (full amount). For the fiscal year 2016, the Company objection was rejected and the Company will file an appeal on this dispute, while for the fiscal year 2017, the Company has also filed an objection.

h) The dispute is related to an alleged underpayment of royalty to the Government of the Republic of Indonesia on nickel matte sales for the years 2014 to 2016 due to incorrect rate used.

The total adjustment is US\$1.0 million (full amount). The Company is not in agreement with the adjustment and filed an objection on this dispute. The Company received the Objection Decision Letter that rejected the Objection, and the Company has filed a law suit on the decision.

15. Accruals

	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Goods and services	11,448	9,748	
Royalties, water levy, land rent and others	3,430	13,156	
Capital items	1,449	1,987	
Finance costs	-	708	
Total	16,327	25,599	

Refer to Note 33f for details of related party balances and transactions.

The movement in accruals of finance costs arising from financing activities is as follows:



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

15. Akrual (lanjutan)

15. Accruals (continued)

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	708	1,141	Beginning balance
Arus kas:			Cash flows:
Pembayaran atas bunga	(849)	(2,177)	Payments of interest
Pembayaran atas biaya jaminan garansi	(315)	(1,035)	Payments of guarantee fee
	(1,164)	(3,212)	
Perubahan non kas:			Non-cash changes:
Akrual biaya bunga	333	1,939	Accrued interest expense
Akrual biaya jaminan dan agen	123	840	Accrued guarantee and agency fee
	456	2,779	
Saldo akhir	-	708	Ending balance

16. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

16. Other current financial liabilities

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Utang dividen	556	642	Dividends payable
Utang non-operasional lainnya	3,197	634	Other non-operational payables
Jumlah	3,753	1,276	Total

17. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

17. Short-term employee benefit liabilities

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	15,563	15,823	Salaries, wages and other employee benefits

18. Pinjaman bank jangka Panjang

18. Long-term bank borrowings

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd	-	25,000	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd
Mizuho Bank, Ltd	-	12,500	Mizuho Bank, Ltd
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(981)	Unamortised debt issuance costs
	-	36,519	
Bagian jangka pendek:			Current portion:
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd	-	(25,000)	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd
Mizuho Bank, Ltd	-	(12,500)	Mizuho Bank, Ltd
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	981	Unamortised debt issuance costs
Total bagian jangka pendek	-	(36,519)	Total current portion
Bagian jangka panjang	-	-	Non-current portion

Perubahan pinjaman bank yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

The movement in bank borrowings arising from financing activities is as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	36,519	73,038	Beginning balance
Perubahan arus kas:			Cash flow changes:
Pembayaran pinjaman bank	(37,500)	(37,500)	Repayment of bank borrowings
Perubahan non kas:			Non-cash changes:
Amortisasi biaya pinjaman	981	981	Amortisation of debt issuance costs
Saldo akhir	-	36,519	Ending balance

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

18. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Biaya keuangan yang terkait dengan pinjaman bank jangka panjang ini dibebankan pada laba rugi selama tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar AS\$1,5 juta (31 Desember 2018: AS\$4,2 juta) (nilai penuh).

Pada tanggal 30 November 2009, Perseroan ("Peminjam") menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") dengan Mizuho Bank, Ltd (sebelumnya bernama Mizuho Corporate Bank, Ltd) sebagai *Facility Agent*, MUFG Union Bank, N.A. (sebelumnya bernama Union Bank, N.A.) sebagai *Collateral Agent* dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd dan Mizuho Bank, Ltd sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin ("Penjamin").

Peminjam telah melakukan penarikan atas keseluruhan SEFA sebesar AS\$300 juta (nilai penuh) (terdiri dari pinjaman dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Bank, Ltd sebesar AS\$100 juta) (nilai penuh). Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian Proyek Karebbe. Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019.

19. Liabilitas imbalan pascakerja

Program dana pensiun untuk karyawan Grup adalah program *defined contribution* dan dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang ditunjuk oleh Grup.

Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, Grup diharuskan memberikan imbalan pascakerja tertentu kepada karyawannya saat diberhentikan atau saat mereka pensiun. Manfaat ini terutama didasarkan pada masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penghentian atau masa pensiun.

Liabilitas atas imbalan kerja pada 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris yang berkualifikasi pada laporannya tertanggal 12 Februari 2020 (31 Desember 2018: 16 Januari 2019).

Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	11,366	6,669	Pension and Labor Law benefits
Imbalan kesehatan pascakerja	8,053	8,209	Post-retirement medical benefits
Jumlah	19,419	14,878	Total

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	
Asumsi ekonomi:					Economic assumptions:
Tingkat diskonto (IDR)	7.50%	8.25%	7.75%	8.50%	Discount rate (IDR)
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	6.00%	8.00%	N/A	N/A	Future salary increases (IDR)
Tingkat kenaikan klaim di masa depan (IDR)	N/A	N/A	11.00%	12.00%	Future claim increase rate (IDR)
Asumsi lainnya:	2019		2018		Other assumptions:
Tingkat mortalita	TMI 2011		TMI 2011		Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita		10% dari tingkat mortalita		Disability rate
Usia pensiun normal	10% of mortality rate 55 tahun/years		10% of mortality rate 55 tahun/years		Normal retirement age

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto, biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah yang ada di pasar modal aktif pada tanggal pelaporan.

Asumsi tingkat kenaikan upah di masa depan memproyeksikan kewajiban imbalan kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

18. Long-term bank borrowings (continued)

Finance costs related to the long-term bank borrowings that were charged to profit or loss during the year ended December 31, 2019 amounted to US\$1.5 million (December 31, 2018: US\$4.2 million) (full amount).

On November 30, 2009, the Company (the "Borrower") entered into the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") with Mizuho Bank, Ltd (formerly known as Mizuho Corporate Bank, Ltd) as Facility Agent, MUFG Union Bank, N.A. (formerly known as Union Bank, N.A.) as Collateral Agent and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd and Mizuho Bank, Ltd, as Mandated Lead Arrangers (the "Lenders"), with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor (the "Guarantor").

The Borrower has fully drawn down the SEFA of US\$300 million (full amount) (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd of US\$200 million and from Mizuho Bank, Ltd of US\$100 million) (full amount). The credit facilities were utilised solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe Project. The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019.

19. Post-employment benefit liabilities

The pension plan fund for the Group's employees is a defined contribution plan that is managed by a pension fund financial institution ("DPLK") appointed by the Group.

In accordance with Indonesian labor regulations, the Group is required to provide certain post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The employee benefit liabilities as at December 31, 2019 and 2018 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, a qualified actuary with its reports dated February 12, 2020 (December 31, 2018: January, 16, 2019).

The liability in the consolidated statements of financial position consists of:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	11,366	6,669	Pension and Labor Law benefits
Imbalan kesehatan pascakerja	8,053	8,209	Post-retirement medical benefits
Jumlah	19,419	14,878	Total

The principal actuarial assumptions used were as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	
Asumsi ekonomi:					Economic assumptions:
Tingkat diskonto (IDR)	7.50%	8.25%	7.75%	8.50%	Discount rate (IDR)
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	6.00%	8.00%	N/A	N/A	Future salary increases (IDR)
Tingkat kenaikan klaim di masa depan (IDR)	N/A	N/A	11.00%	12.00%	Future claim increase rate (IDR)
Asumsi lainnya:	2019		2018		Other assumptions:
Tingkat mortalita	TMI 2011		TMI 2011		Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita		10% dari tingkat mortalita		Disability rate
Usia pensiun normal	10% of mortality rate 55 tahun/years		10% of mortality rate 55 tahun/years		Normal retirement age

The discount rate is used in determining the present value of the benefit obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availability of government bonds in the active capital market at the reporting date.

The future salary increase assumption projects the benefit obligation starting from the valuation date up to the normal retirement age. The rate of salary increase is generally determined based on inflation adjustments to pay scales and increases in length of service.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

19. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Asumsi tentang bagaimana klaim akan meningkat di masa depan dikenal sebagai tingkat kenaikan klaim. Tren biaya klaim di masa mendatang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemanfaatan, inflasi umum, perkembangan medis, dan ketersediaan pelayanan medis. Pada umumnya, biaya klaim meningkat lebih cepat dari pada tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 31 Desember 2019, durasi rata-rata tertimbang atas kewajiban iuran pasti untuk imbalan pensiun adalah 9,39 tahun (31 Desember 2018: 10,69 tahun) dan imbalan kesehatan pascakerja adalah 12,51 tahun (31 Desember 2018: 15,17 tahun).

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

19. Post-employment benefit liabilities (continued)

The actuarial assumptions also factor in how future claims will increase which is influenced by several factors such as utilisation, general inflation, medical developments, and availability of medical services. Generally, the claim costs have risen faster than price inflation in recent years.

As of December 31, 2019, the weighted average duration of the defined contribution obligation for pension benefits was 9.39 years (December 31, 2018: 10.69 years) and post-retirement medical benefits was 12.51 years (December 31, 2018: 15.17 years).

The movement in post-employment benefits obligation over the year is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		Jumlah/ <i>Total</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Pada awal tahun	6,669	8,969	8,209	10,320	14,878	19,289	At beginning of the year
Diakui di laba rugi							Recognised in profit or loss
- Biaya jasa kini	647	694	2	6	649	700	- Current service cost
- Biaya bunga	552	567	683	689	1,235	1,256	- Interest cost
- Biaya jasa lalu	3,388	-	-	-	3,388	-	- Past service cost
Diakui di penghasilan komprehensif lain							Recognised in other comprehensive income
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gains) arising from:
- Asumsi keuangan	(229)	(1,031)	(203)	(1,796)	(432)	(2,827)	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	469	(1,637)	(792)	(667)	(323)	(2,304)	- Experience adjustments
Lain-lain							Others
- Pembayaran manfaat	(513)	(557)	(71)	(139)	(584)	(696)	- Benefits paid
- Pengaruh perbedaan dalam pelaporan mata uang	383	(336)	225	(204)	608	(540)	- Effect of difference in reporting currency
Liabilitas imbalan pascakerja, akhir tahun	11,366	6,669	8,053	8,209	19,419	14,878	Post-employment benefit liabilities, end of year

Biaya jasa lalu yang diakui di tahun 2019 disebabkan oleh perubahan manfaat sesuai dengan PKB tahun 2018-2020 yang telah disahkan di tanggal 11 November 2019.

Past service cost recognised in 2019 was due to changes in benefits in accordance with the 2018-2020 CLA which was ratified on November 11, 2019.

Jumlah kumulatif kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Total cumulative actuarial loss/(gain) recognised in other comprehensive income is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		Jumlah/ <i>Total</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Pada awal tahun	(1,674)	994	2,931	5,394	1,257	6,388	At beginning of the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan							Other comprehensive income for the year
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gains) arising from:
- Asumsi keuangan	(229)	(1,031)	(203)	(1,796)	(432)	(2,827)	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	469	(1,637)	(792)	(667)	(323)	(2,304)	- Experience adjustments
Jumlah kumulatif (keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	(1,434)	(1,674)	1,936	2,931	502	1,257	Total cumulative actuarial (gain)/ loss recognised in other comprehensive income

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

19. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

19. Post-employment benefit liabilities (continued)

luran ke DPLK selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Contributions to DPLK over the year are as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Oleh Grup	2,760	2,656	By the Group
Oleh karyawan	578	555	By employees
Jumlah	3,338	3,211	Total

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan kesehatan pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and post-retirement medical benefits, is as follows:

31 Desember 2019	Imbalan pension/ Pension benefits	Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits	Jumlah/ Total	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Kurang dari 1 tahun	303	342	645	Less than 1 year
1 sampai dengan 10 tahun	10,330	3,490	13,820	1 year – 10 years
Lebih dari 10 tahun	30,138	4,563	34,701	More than 10 years
Jumlah	40,771	8,395	49,166	Total

Penyesuaian pengalaman dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

The five years history of experience adjustments is as follows:

	2019	2018	2017	2016	2015	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(19,419)	(14,878)	(19,289)	(17,729)	(14,383)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(19,419)	(14,878)	(19,289)	(17,729)	(14,383)	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	-	-	-	-	-	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	(323)	(2,304)	(882)	447	4,628	Experience adjustments on plan liabilities

Jika asumsi yang digunakan berbeda dari estimasi manajemen, nilai tercatat kewajiban pensiun diestimasi sebagai berikut:

If the assumptions differed from management's estimates, the carrying amount of pension obligations would be as follows:

31 Desember 2019	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kewajiban imbalan pensiun/ Pension benefits obligation	Kewajiban imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits obligation	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Tingkat diskonto	+1%	(905)	(854)	Discount rate
	-1%	1,025	1,028	
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	+0.5%	543	-	Future salary increase rate
	-0.5%	(501)	-	
Tingkat kenaikan klaim di masa depan	+1%	-	986	Future claim increase rate
	-1%	-	(838)	
31 Desember 2018	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kewajiban imbalan pensiun/ Pension benefits obligation	Kewajiban imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits obligation	December 31, 2018
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Tingkat diskonto	+1%	(543)	(895)	Discount rate
	-1%	620	1,084	
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	+0.5%	246	-	Future salary increase rate
	-0.5%	(231)	-	
Tingkat kenaikan klaim di masa depan	+1%	-	1,037	Future claim increase rate
	-1%	-	(877)	



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

20. Modal saham

Pemegang saham Perseroan dan jumlah kepemilikan saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	
VCL	5,835,607,960	80,115	58.73	VCL
Publik	2,036,346,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

The Company's shareholders and number of shares with the related par value IDR25 (full amount) per share as at December 31, 2019 and 2018 were as follows:

No public shareholder owned more than 5% of the total issued and fully paid shares at December 31, 2019 and 2018.

21. Deklarasi dividen

Perseroan tidak mendeklarasikan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018.

21. Dividends declared

The Company did not declare dividends for the years ended December 31, 2019 and 2018.

22. Tambahan modal disetor

Perseroan mempunyai saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,8 juta (31 Desember 2018: AS\$277,8 juta) (nilai penuh) yang merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham Perseroan di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983.

22. Additional paid-in capital

The Company has an Additional Paid-in Capital balance of US\$277.8 million (December 31, 2018: US\$277.8 million) (full amount) representing the remaining surplus arising from the issuance of the Company's shares in excess of par value and a reduction in the par value of its shares in 1983.

23. Cadangan modal

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Grup wajib membentuk cadangan umum sebesar minimum 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jumlah modal ditempatkan dan disetor dari Perseroan adalah sebesar IDR248,4 miliar atau setara dengan AS\$136,4 juta (nilai penuh); sehingga, cadangan umum minimum yang disyaratkan bagi Grup adalah sebesar AS\$27,3 juta (nilai penuh).

23. Capital reserves

In accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, the Group shall set up a general reserve at a minimum amount of 20% of the issued and paid up capital of the Company. The Company's issued and paid up capital is IDR248.4 billion or equivalent to US\$136.4 million (full amount); therefore, the minimum required general reserve for the Group is US\$27.3 million (full amount).

Jumlah cadangan umum minimum Grup pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah terpenuhi.

The Group's minimum general reserve as of December 31, 2019 and 2018 has been fulfilled.

24. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

24. Cost of revenue

Cost of revenue for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Bahan bakar minyak dan pelumas	146,376	156,352	Fuels and lubricants
Depresiasi	132,184	128,930	Depreciation
Bahan pembantu	120,849	113,740	Supplies
Jasa kontraktor	92,897	80,603	Contractors' services
Biaya karyawan	80,926	85,036	Employee costs
Bahan bakar batubara	44,383	61,823	Coal
Pajak dan asuransi	29,838	36,913	Taxes and insurance
Royalti	15,862	15,715	Royalties
Lainnya	9,341	6,893	Others
	672,656	686,005	
Persediaan dalam proses			In-process inventory
Persediaan awal	48,962	38,089	Beginning balance
Persediaan akhir	(55,452)	(48,962)	Ending balance
Beban pokok produksi	666,166	675,132	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	12,604	10,371	Beginning balance
Persediaan akhir	(13,212)	(12,604)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	665,558	672,899	Cost of revenue

Lihat Catatan 33d untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33d for details of related party transactions.

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

24. Beban pokok pendapatan (lanjutan)

Rincian pemasok dengan transaksi pembelian yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan:

24. Cost of revenue (continued)

Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total cost of revenue:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pihak ketiga			Third parties
PT Pertamina (Persero)	66,813	676	PT Pertamina (Persero)
Mercuria Energy Trading Pte. Ltd	22,466	105,397	Mercuria Energy Trading Pte. Ltd
Jumlah	89,279	106,073	Total

25. Beban usaha

Rincian beban usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

25. Operating expenses

The components of operating expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti	6,272	6,852	Management service, license and royalty fees
Biaya karyawan	3,296	1,643	Employee costs
Biaya jasa profesional	2,827	1,390	Professional fees
Lainnya	1,335	1,693	Others
Jumlah	13,730	11,578	Total

Lihat Catatan 33c untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33c for details of related party transactions.

26. Pendapatan lainnya

Rincian pendapatan lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

26. Other income

The components of other income for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Bunga dari piutang perpanjangan waktu pembayaran piutang	1,426	1,974	Interest on extended payment terms of trade receivables
Laba selisih kurs, neto	1,141	-	Gain on currency translation adjustments, net
Lainnya	699	5,641	Others
Jumlah	3,266	7,615	Total

Lihat Catatan 33a untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33a for details of related party transactions.

27. Beban lainnya

Rincian beban lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

27. Other expenses

The components of other expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Rugi pelepasan aset tetap	4,887	1,447	Loss on disposal of fixed assets
Biaya pengembangan proyek	3,807	8,132	Project development costs
Biaya karyawan	2,344	1,214	Employment costs
Beban pajak	2,200	470	Tax expenses
Rugi selisih kurs, neto	-	768	Loss on currency translation adjustments, net
Lainnya	4,463	3,153	Others
Jumlah	17,701	15,184	Total

Beban lainnya adalah beban yang berhubungan dengan dari kegiatan non-operasional Grup, antara lain, rugi pelepasan aset tetap, biaya pengembangan proyek, pembayaran kepada karyawan, beban terkait putusan akhir peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan lain-lain.

Other expenses are expenses related to the Group's non-operational activities, among others, loss on disposal of fixed assets, project development costs, employee costs, expenses related to the final decision of reconsideration in Supreme Court and others.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

28. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Pergerakan di saldo provisi atas penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	37,833	74,916	Beginning balance
Penyisihan/(pembalikan) tahun berjalan	2,606	(33,472)	Provisions/(reversal) made during the year
Beban akresi	2,324	2,615	Accretion expense
Dampak perubahan selisih kurs	1,598	(6,226)	Effect of exchange rate differences
Saldo akhir	44,361	37,833	Ending balance

Beban akresi diakui sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Grup mengakui provisi atas biaya penghentian pengoperasian aset sebesar IDR616,5 miliar atau setara dengan AS\$44,4 juta (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: IDR544,9 miliar atau setara dengan AS\$37,8 juta (nilai penuh)). Biaya ini diperkirakan akan terjadi antara tahun 2045 dan 2060. Provisi tersebut diestimasi berdasarkan biaya penutupan menggunakan teknologi dan material yang tersedia sekarang, pada tingkat harga kini, dan didiskontokan menggunakan tingkat diskonto bebas risiko di Indonesia sebesar 4,78% (31 Desember 2018: 5,73%).

Pada tahun 2018, Perseroan mengubah estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2036 dan 2051 menjadi antara tahun 2041 dan 2056. Pada tahun 2019, Perseroan merubah rencana penambangan dan produksi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan perubahan estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2041 dan 2056 menjadi antara tahun 2045 dan 2060. Hal ini dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa probabilitas untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk melanjutkan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun (lihat Catatan 1) meningkat. Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan proses divestasi Perseroan (lihat Catatan 39d). Walaupun demikian, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi Perseroan.

Grup dibantu oleh PT ERM Indonesia, konsultan lingkungan yang berkualifikasi, dalam menghitung biaya penutupan operasi Perseroan di Sulawesi sehubungan dengan Rencana Penutupan Tambang. Perhitungan biaya penutupan tambang meliputi asumsi umur aset berdasarkan ketentuan KK (lihat Catatan 1) disesuaikan dengan perpanjangan yang diasumsikan sebagaimana di atas, untuk penyelesaian operasi penambangan yang diikuti dengan penutupan pabrik pengolahan setelah penipisan sisa tumpukan bijih.

29. Pengeluaran untuk lingkungan hidup lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Grup di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung termasuk penghijauan daerah purna tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan pada laba rugi adalah sebesar AS\$4,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: AS\$2,1 juta) (nilai penuh). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$40,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: AS\$5,1 juta) (nilai penuh).

30. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar AS\$86,5 juta (31 Desember 2018: AS\$87,9 juta) (nilai penuh).

28. Provision for asset retirement

Movement in the provision for the asset retirement balance is as follows:

Accretion expense is recognised as part of finance costs in profit or loss.

The Group recognises a provision for asset retirement cost of IDR616.5 billion or equivalent to US\$44.4 million (full amount) as at December 31, 2019 (December 31, 2018: IDR544.9 billion or equivalent to US\$37.8 million (full amount)). This cost is expected to be incurred between 2045 and 2060. The provision is estimated based on closure costs using existing technology and materials that are currently available, at the current price level, and discounted using the Indonesian risk-free rate of 4.78% (December 31, 2018: 5.73%).

In 2018, the Company changed the estimated period of its mine closure from between 2036 and 2051 to between 2041 and 2056. In 2019, the Company changed its mining and production plan at South and Central Sulawesi areas which resulted in a change in the estimated period of mine closure from between 2041 and 2056 to between 2045 and 2060. This is because the Company believes that the probability of obtaining the Government's approval to continue its operations for two additional ten-year periods (see Note 1) is increasing. This is especially associated with the development of the Company's divestment process (see Note 39d). Nevertheless, actual results may differ from the Company's estimate.

The Group is assisted by PT ERM Indonesia, a qualified environmental consultant, in calculating the closure costs of the Company's operations in Sulawesi in conjunction with the Mine Closure Plan. The closure cost calculation includes the assumption of asset life in accordance with the term of the CoW (refer to Note 1) adjusted for assumed extensions as referred to above, for completion of mining operations closely followed by shutdown of the processing plant after depletion of residual ore stockpiles.

29. Other environmental expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan.

For the year ended December 31, 2019, a number of initiatives, representing part of the Group's commitments under these plans, were completed while others were still in progress including the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to profit or loss were US\$4.8 million for the year ended December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$2.1 million) (full amount). Capital expenditures for environmental projects were US\$40.8 million for the year ended December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$5.1 million) (full amount).

30. Employee costs

Total employee costs for the year ended December 31, 2019 amounted to US\$86.5 million (December 31, 2018: US\$87.9 million) (full amount).

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

31. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperuntukkan kepada pemegang saham entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

31. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing total profit attributable to the shareholders of the parent entity by the weighted average number of common shares outstanding during the year.

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba per saham)		(US Dollars, in thousands, except earnings per share)	
Jumlah laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham entitas induk	57,400	60,512	Total profit for the year attributable to the shareholders of parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
Labanya per saham dasar (dalam AS\$)	0.0058	0.0061	Basic earnings per share (in US\$)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, labanya per saham dilusian sama dengan labanya per saham dasar.

As at December 31, 2019 and 2018 there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

32. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting seperti disebutkan di bawah ini:

32. Significant commitments and agreements

The Company has entered into various significant agreements as mentioned below:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
PT Pertamina (Persero)	Pembelian Minyak Berkadar Sulfur Tinggi/ Purchase of High Sulphur Fuel Oil (HSFO)	11 Agustus 2019 - 10 April 2022/ August 11, 2019 - April 10, 2022
PT Pertamina Patra Niaga	Pembelian Solar Berkecepatan Tinggi/ Purchase of High Speed Diesel (HSD)	1 Juli 2019 - 30 Juni 2022/ July 1, 2019 - June 30, 2022
PT Marunda Graha Mineral	Pembelian batubara/ Purchase of coal	31 Januari 2019 - 31 Januari 2020*/ January 31, 2019 - January 31, 2020*
PT Trubaindo Coal Mining	Pembelian batubara/ Purchase of coal	31 Januari 2019 - 31 Januari 2020*/ January 31, 2019 - January 31, 2020*
PT Trakindo Utama	Pembelian suku cadang/ Purchase of spare parts	1 Januari 2016 - 31 Desember 2020/ January 1, 2016 - December 31, 2020
PT Cipta Krida Bahari	Jasa freight forwarding global/ Global freight forwarding	1 Mei 2015 - 30 April 2020/ May 1, 2015 - April 30, 2020

*) Perjanjian sedang dalam proses perpanjangan.

*) Agreements are in the process of extension.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Grup memiliki komitmen pembelian barang dan jasa yang terkait dengan biaya operasi dan biaya modal dengan pemasok pihak ketiga sebagai berikut:

As at December 31, 2019 and 2018, the Group had purchase commitments for goods and services related to operating expenses and capital expenses with third party suppliers, as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Tidak lebih dari 1 tahun	284,792	162,789	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	29,867	102,328	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	-	115	Later than 5 years
Jumlah	314,659	265,232	Total

Pengeluaran modal yang telah diperjanjikan pada akhir tahun pelaporan namun belum diakui sebagai liabilitas adalah senilai AS\$3,3 juta (nilai penuh).

Capital expenditure contracted for at the end of the reporting year but not yet recognised as liabilities is amounted to US\$3.3 million (full amount).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memiliki sewa berikut yang diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas terkait:

As at December 31, 2019, the Group has the following lease recognized as right-of-use assets and a corresponding liability:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
PT Api Metra Graha	Sewa Gedung Kantor Jakarta/ Rental Building for Jakarta Office	2 November 2015 - 31 Maret 2021/ November 2, 2015 - March 31, 2021
PT Sinar Jaya Langgeng Utama	Sewa Bus Transportasi/ Rental Bus Transportation	5 April 2019 - 31 Juli 2020/ April 5, 2019 - July 31, 2020



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi

Grup berada di bawah pengendalian VCL. Pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan dan pendapatan lainnya

Pendapatan

Seluruh penjualan Grup dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, dimana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di LME dan harga realisasi rata-rata nikel VCL. Semua penjualan Grup merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Penjualan kepada VCL	625,429	621,593	Sales to VCL
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd ("SMM")	156,583	155,307	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd ("SMM")
Jumlah	782,012	776,900	Total
(Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan)	100%	100%	(Sales to related parties as a percentage of total revenue)

Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	1,426	1,974	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan lainnya)	43.66%	25.92%	(As a percentage of total other income)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi adalah personil manajemen kunci Grup.

Kompensasi yang dibayar atau terutang kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

33. Related party information

The Group is controlled by VCL. The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

a. Revenue and other income

Revenue

The Group's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the LME cash price for nickel and VCL's average net realised price for nickel. All of the Group's sales represent transactions with related parties.

Revenue for the years ended December 31, 2019 and 2018 consisted of:

Other income

Other income from related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 consisted of:

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors

The Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Group.

The compensation paid or payable to the Boards of Commissioners and Directors is shown below:

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019/
For the year ended December 31, 2019**

(Dalam ribuan Dolar AS)/ (US Dollars, in thousands)	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
	% *)	Jumlah/Amount	% *)	Jumlah/Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.21%	177.5	3.65%	3,158.3
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.24%	204.7
Jumlah/Total	0.21%	177.5	3.89%	3,363.0

*) % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018/
For the year ended December 31, 2018**

(Dalam ribuan Dolar AS)/ (US Dollars, in thousands)	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
	% *)	Jumlah/Amount	% *)	Jumlah/Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.25%	215.5	3.94%	3,465.0
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.19%	167.0
Jumlah/Total	0.25%	215.5	4.13%	3,632.0

*) % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

c. Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti

Beban untuk jasa manajemen, lisensi dan royalti disajikan sebagai beban usaha (lihat Catatan 25) dalam laba rugi. Berdasarkan perjanjian yang relevan, beban jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah biaya jasa 10%, sementara beban lisensi dan royalti dihitung dari 0,8% dari nilai pendapatan kotor.

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
VCL	6,272	6,852	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)	45.68%	59.18%	(As a percentage of total operating expenses)

d. Beban lainnya

Di beban pokok pendapatan

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Jasa profesional dan tagihan atau beban yang dibayarkan atas nama Perseroan:			Professional services and expense reimbursement paid on behalf of the Company:
VCL	3,614	3,913	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)	0.54%	0.58%	(As a percentage of total cost of revenue)

Di biaya keuangan

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Biaya jaminan:			Guarantee fee:
Vale S.A.	154	1,006	Vale S.A.
(Sebagai persentase terhadap jumlah biaya keuangan)	3.94%	14.82%	(As a percentage of total finance costs)

Berkaitan dengan SEFA (lihat Catatan 18), Perseroan dan Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, melakukan perjanjian jaminan dimana Vale S.A. setuju untuk menjamin AS\$300 juta (nilai penuh) fasilitas utang yang diterima Perseroan. Biaya jaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap jumlah pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari SEFA akan terhutang kepada Vale S.A. Selanjutnya, biaya sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi harus dibayar sepanjang umur pinjaman. Biaya tersebut akan terhutang oleh Perseroan pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran jaminan pertama adalah hari kerja terakhir pada Februari 2010, dan selanjutnya pada hari kerja terakhir pada Agustus dan Februari). Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019.

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

33. Related party information (continued)

c. Management service, license and royalty fees

Management service, license and royalty fees are presented as operating expenses (refer to Note 25) in profit or loss. Based on the relevant agreement, the management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while the license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross sales proceeds.

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
VCL	6,272	6,852	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)	45.68%	59.18%	(As a percentage of total operating expenses)

d. Other costs

In cost of revenue

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Jasa profesional dan tagihan atau beban yang dibayarkan atas nama Perseroan:			Professional services and expense reimbursement paid on behalf of the Company:
VCL	3,614	3,913	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)	0.54%	0.58%	(As a percentage of total cost of revenue)

In finance costs

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Biaya jaminan:			Guarantee fee:
Vale S.A.	154	1,006	Vale S.A.
(Sebagai persentase terhadap jumlah biaya keuangan)	3.94%	14.82%	(As a percentage of total finance costs)

In connection with the SEFA (refer to Note 18), the Company and Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million (full amount) debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by the Company under the SEFA is payable to Vale S.A. Subsequently, the fee of 1.5% per annum on the outstanding loan amount is to be paid over the life of the loan. The fee is payable by the Company on each interest payment date (the first guarantee payment date was the last business day in February 2010, and thereafter the last business day of each August and February). The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

33. Related party information (continued)

e. Aset

e. Assets

i) Piutang usaha

i) Trade receivables

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
VCL	71,335	110,750	VCL
SMM	35,960	13,498	SMM
Jumlah	107,295	124,248	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)		100%	(As a percentage of trade receivables)

Pada 30 Juni 2017, Perseroan menerima permintaan dari VCL untuk melanjutkan perpanjangan jangka waktu pembayaran ini untuk periode yang berlaku efektif 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018. Sebagai kompensasi atas perpanjangan jangka waktu pembayaran, VCL akan membayar bunga dengan tingkat bunga sebesar dua bulan LIBOR ditambah 125 basis poin yang dibagi dengan setiap jumlah hari tambahan di atas jangka waktu sebelumnya.

On June 30, 2017, the Company received a request from VCL to continue the extension of the payment term for the period effective on July 1, 2017 until June 30, 2018. As compensation for the extended payment term, VCL will pay interest at an annual rate of two months LIBOR plus 125 basis points prorated for the number of days of the effective extended payment term beyond the original term.

Pada 3 April 2018, VCL meminta untuk kembali memperpanjang masa berlaku persetujuan perpanjangan jangka waktu pembayaran untuk periode yang berlaku efektif 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 dan mengajukan perubahan pada skema kompensasi. VCL akan membayar bunga dengan tingkat bunga sebesar dua bulan LIBOR ditambah 85 basis poin per tahun untuk setiap hari tambahan di atas jangka waktu sebelumnya.

On April 3, 2018, VCL further asked for extension of the payment term for the period effective on July 1, 2018 until June 30, 2019 and requested changes on the compensation scheme. VCL will pay interest at two months LIBOR plus 85 basis points per annum for the number of days of the effective extended payment term beyond the original term.

Untuk menjamin perlakuan yang sama di antara para pembeli produk nikel Perseroan, Perseroan telah menawarkan perpanjangan jangka waktu pembayaran yang sama kepada SMM. Perseroan telah menerima konfirmasi tertulis bahwa SMM tidak akan mengubah jangka waktu pembayaran saat ini yang berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan tidak memiliki keberatan terhadap transaksi dengan VCL.

To ensure equal treatment between the purchasers of the Company's nickel products, the Company has offered the same extended payment term to SMM. The Company has obtained written confirmation that SMM wishes to maintain the original term under its sales agreement and it has no objection to the VCL transaction.

Perjanjian tidak diperpanjang setelah 30 Juni 2019.

The agreement has not been extended after June 30, 2019.

ii) Aset keuangan lancar lainnya

ii) Other current financial assets

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di atas IDR1 miliar*)	99	-	Loans to key management personnel above IDR1 billion*)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di bawah IDR1 miliar	87	61	Loans to key management personnel below IDR1 billion
Pinjaman kepada personil manajemen kunci*)	186	61	Loans to key management personnel*)
Piutang bunga (Catatan 8 dan 33e.i)	-	639	Interest receivables (Note 8 and 33e.i)
Jumlah	186	700	Total
Dikurangi: Bagian tidak lancar	(58)	(18)	Less: Non-current portion
Bagian lancar	128	682	Current portion
(Sebagai persentase terhadap aset keuangan lancar lainnya)		4.65%	(As a percentage of other current financial assets)

*) Personil manajemen kunci yang mempunyai saldo pinjaman lebih dari IDR1 miliar (nilai penuh) per 31 Desember 2019 adalah Agus Superiadi.

*) Key management personnel with a loan balance of more than IDR1 billion (full amount) as at December 31, 2019 is Agus Superiadi.

Piutang bunga dan bagian lancar dari pinjaman kepada personil manajemen kunci akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai aset lancar.

Interest receivables and current portion of loans to key management personnel will be settled within one year; therefore, they are presented as current assets.

iii) Piutang pihak berelasi non-usaha

iii) Non-trade receivables from related parties

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pinjaman kepada personil manajemen kunci - tidak lancar	58	18	Loans to key management personnel - non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)		100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset (piutang usaha (i), aset keuangan lancar lainnya (ii), dan piutang pihak berelasi non-usaha (iii)) yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	107,481	124,948	Total assets (trade receivables (i), other current financial assets (ii), and non-trade receivables from related parties (iii)) associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)		4.84%	(As a percentage of total assets)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

33. Related party information (continued)

f. Liabilitas

f. Liabilities

i) Utang usaha

i) Trade payables

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	2,071	1,620	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)	2.13%	1.78%	(As a percentage of total trade payables)

ii) Akrua

ii) Accruals

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	276	1,229	VCL
Vale S.A.	-	192	Vale S.A.
Jumlah	276	1,421	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah akrual)	1.69%	5.55%	(As a percentage of total accruals)
Jumlah liabilitas (utang usaha (i) dan akrual (ii)) yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	2,347	3,041	Total liabilities (trade payables (i) and accruals (ii)) associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)	0.84%	0.95%	(As a percentage of total liabilities)

g. Pihak-pihak berelasi

g. Related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of relationship with the related parties	Transaksi/ Transactions
Vale S.A.	Entitas pengendali utama/ Ultimate parent entity	Penjamin dari pinjaman dengan kompensasi biaya jaminan (lihat Catatan 33d)/ Guarantor of loans in return for guarantee fee (refer to Note 33d)
VCL	Perusahaan induk/Parent entity	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen, lisensi dan royalti (lihat Catatan 33a, 33c, dan 33d)/ Sale of finished goods; Professional services; Management service, license and royalty fees (refer to Notes 33a, 33c, and 33d)
SMM	Pemegang saham/Shareholder	Penjualan barang jadi (lihat Catatan 33a)/ Sale of finished goods (refer to Note 33a)
Manajemen kunci/Key management	Personil manajemen kunci (yaitu Dewan Komisaris dan Direksi)/ Key management personnel (i.e. Board of Commissioners and Board of Directors)	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi (lihat Catatan 33b dan 33e)/ Compensation and remuneration; housing and personal loans (refer to Notes 33b and 33e)

34. Biaya keuangan

34. Finance costs

Rincian biaya keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The components of finance costs for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Beban akresi (Catatan 28)	2,324	2,615	Accretion expense (Note 28)
Biaya agen dan amortisasi biaya pinjaman (Catatan 18)	996	1,016	Agency fee and amortisation of debt issuance costs (Note 18)
Biaya bunga (Catatan 18)	438	2,152	Interest expense (Note 18)
Biaya jaminan (Catatan 18 dan 33d)	154	1,006	Guarantee fee (Notes 18 and 33d)
Jumlah	3,912	6,789	Total



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

35. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS

35. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah pada 31 Desember 2019 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 (nilai penuh) = IDR13.897 (31 Desember 2018: IDR14.402).

As at December 31, 2019 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US Dollars using an exchange rate of US\$1 (full amount) = IDR13,897 (December 31, 2018: IDR14,402).

31 Desember	2019		December 31
	Mata Uang Asing (Jutaan/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan/ US\$ Equivalent (Thousands)	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	IDR	287,013	Cash and cash equivalents
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	23,152	Other current financial assets
Pajak dibayar di muka	IDR	1,664,751	Prepaid taxes
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha	IDR	806	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	64,245	Other non-current financial assets
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing		146,793	Total monetary assets in foreign currencies
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	IDR	(877,339)	Third parties
	Others	(10)	
Akrual	IDR	(165,985)	Accruals
Utang pajak	IDR	(24,649)	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(216,277)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(52,225)	Other current financial liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	IDR	(616,480)	Provision for asset retirement
Liabilitas imbalan pascakerja	IDR	(269,864)	Post-employment benefit liabilities
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		(165,450)	Total monetary liabilities in foreign currencies
Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing		(18,657)	Net monetary liabilities in foreign currencies
31 Desember	2018		December 31
	Mata Uang Asing (Jutaan/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan/ US\$ Equivalent (Thousands)	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	IDR	152,174	Cash and cash equivalents
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	26,414	Other current financial assets
Pajak dibayar di muka	IDR	1,186,515	Prepaid taxes
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha	IDR	259	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	90,734	Other non-current financial assets
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing		101,102	Total monetary assets in foreign currencies
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	IDR	(702,958)	Third parties
	EUR	(10)	
	Others	(4)	
Akrual	IDR	(240,283)	Accruals
Utang pajak	IDR	(25,661)	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(227,886)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(18,377)	Other current financial liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	IDR	(544,880)	Provision for asset retirement
Liabilitas imbalan pascakerja	IDR	(214,276)	Post-employment benefit liabilities
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		(151,401)	Total monetary liabilities in foreign currencies
Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing		(50,299)	Net monetary liabilities in foreign currencies

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**35. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS
(lanjutan)**

Grup tidak melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Grup dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika Dolar AS melemah/menguat sebesar 3% terhadap Rupiah dengan variable lain konstan, rugi sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar AS\$0,6 juta (nilai penuh).

36. Informasi segmen

Grup beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Grup dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang (lihat Catatan 33a).

Seluruh penjualan Grup merupakan penjualan nikel kepada pihak-pihak berelasi yang berdomisili di Kanada (VCL) dan Jepang (SMM) (lihat Catatan 33a).

37. Aset dan liabilitas keuangan

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan Grup berdasarkan kategori akun:

31 Desember 2019	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan/ <i>Financial assets measured at Total amortised cost</i>	Nilai wajar diakui pada laba rugi <i>Fair value through profit or loss</i>	Nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ <i>Fair value through other comprehensive income</i>	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Aset keuangan:				Financial assets:
Kas dan setara kas	249,035	249,035	-	- Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	15,412	15,412	-	- Restricted cash
Piutang usaha	107,295	107,295	-	- Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	2,754	2,754	-	- Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	58	58	-	- Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	4,623	4,623	-	- Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	379,177	379,177	-	Total financial assets
31 Desember 2018 December 31, 2018				
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Aset keuangan:				Financial assets:
Kas dan setara kas	301,153	301,153	-	- Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	29,952	29,952	-	- Restricted cash
Piutang usaha	124,248	124,248	-	- Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	2,526	2,526	-	- Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	18	18	-	- Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	6,300	6,300	-	- Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	464,197	464,197	-	Total financial assets

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

**35. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other
than US Dollars (continued)**

The Group does not hedge the risk of fluctuations in the exchange rate of Rupiah since all sales and the majority of the Group's expenses are transacted in US Dollars which indirectly represents a natural hedge.

As at December 31, 2019, if the US Dollar had weakened/strengthened by 3% against the Rupiah with all other variables held constant, pre-tax loss for the year would have been US\$0.6 million (full amount) higher/lower.

36. Segment information

The Group operates in only one business and geographical segment: nickel mining and processing in Indonesia. All of the Group's products are delivered under long-term sales contracts (refer to Note 33a).

All of the Group's sales represent nickel sales to related parties domiciled in Canada (VCL) and Japan (SMM) (refer to Note 33a).

37. Financial assets and liabilities

The information given below relates to the Group's financial assets and liabilities by category:



Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018

Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018

37. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

37. Financial assets and liabilities (continued)

31 Desember 2019	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	December 31, 2019
(US Dollars, in thousands)				
Liabilitas keuangan:				Financial liabilities:
Utang usaha	97,408	-	97,408	Trade payables
Akrual	16,327	-	16,327	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	3,753	-	3,753	Other current financial liabilities
Liabilitas sewa	1,120	-	1,120	Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	118,608	-	118,608	Total financial liabilities
(US Dollars, in thousands)				
Liabilitas keuangan:				Financial liabilities:
Utang usaha	91,181	-	91,181	Trade payables
Akrual	25,599	-	25,599	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1,276	-	1,276	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	36,519	-	36,519	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	154,575	-	154,575	Total financial liabilities

38. Pengelolaan risiko keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Grup berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Grup.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Direksi Perseroan. Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Pada tanggal 31 Desember 2019, struktur modal Grup didanai oleh ekuitas pemegang saham.

38. Financial risk management

The Group's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and manages financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market risk, credit risk and liquidity risk.

Capital risk management

The Group's objective when maintaining capital is to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. As at December 31, 2019, the Group's capital structure is funded by shareholders' equity.

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar

Penjualan dan mayoritas pengeluaran operasional Grup dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Grup tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Lihat Catatan 35 untuk rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS.

(ii) Risiko harga

Grup terpengaruh oleh fluktuasi harga nikel, batubara dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh secara negatif oleh harga nikel, batu bara dan bahan bakar, yang bergantung dari tingkat permintaan dan penawaran dunia. Grup mengelola secara aktif risiko-risiko ini dengan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, jika harga rata-rata nikel meningkat/menurun sebesar 15%, dengan semua variabel lain tetap, laba sebelum pajak Grup meningkat/menurun sebesar AS\$16,09 juta (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Grup tidak memiliki instrumen keuangan yang nilainya terkait langsung dengan pergerakan harga nikel dunia. Sehingga, fluktuasi harga nikel dunia tidak akan berdampak terhadap nilai buku dari instrumen keuangan Grup.

(iii) Risiko suku Bunga

Grup menilai risiko suku bunga adalah minimal karena Grup tidak memiliki pembiayaan eksternal pada tanggal 31 Desember 2019. Eksposur tingkat bunga dipantau untuk menjaga risiko yang rendah dan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Grup.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang terpengaruh oleh suku bunga.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

38. Financial risk management (continued)

Market risk

(i) Foreign exchange risk

The Group's sales and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to the fluctuations in foreign exchange rates.

Refer to Note 35 for detail of monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars.

(ii) Price risk

The Group is exposed to fluctuations in nickel, coal and fuel prices. The operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, coal and fuel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand. The Group actively manages these risks by adjusting production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of price volatility.

For the year ended December 31, 2019, if the average price of nickel had increased/decreased by 15%, with all other variables held constant, the Group's pre-tax profit would have increased/decreased by US\$16.09 million (full amount).

At December 31, 2019 and December 31, 2018, the Group does not have any financial instruments whose value was directly linked to movements of the world nickel price. Therefore, fluctuation of the world nickel price will have no impact on the carrying amount of the Group's financial instruments.

(iii) Interest rate risk

The Group assesses the interest rate risk as minimal since the Group does not have any external financing as at December 31, 2019. Interest rate exposure is monitored to maintain a low risk and to minimise any negative impact to the Group.

The following table presents a breakdown of the Group's financial assets and liabilities which are impacted by interest rates.

	31 Desember/December 31, 2019						Jumlah/ Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Tidak terikat bunga/ Non interest bearing			
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year				
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)	
Aset							Assets	
Kas dan setara kas	139,035	-	110,000	-	-	249,035	Cash and cash equivalents	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	15,412	-	15,412	Restricted cash	
Piutang usaha	-	-	-	-	107,295	107,295	Trade receivables	
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-	2,754	2,754	Other current financial assets	
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	58	58	Non-trade receivables from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	4,623	4,623	Other non-current financial assets	
Jumlah aset keuangan	139,035	-	110,000	15,412	114,730	379,177	Total financial assets	
Liabilitas							Liabilities	
Utang usaha	-	-	-	-	(97,408)	(97,408)	Trade payables	
Akrual	-	-	-	-	(16,327)	(16,327)	Accruals	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(3,753)	(3,753)	Other current financial liabilities	
Liabilitas sewa	-	-	(947)	(173)	-	(1,120)	Lease liabilities	
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	(947)	(173)	(117,488)	(118,608)	Total financial liabilities	



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

38. Financial risk management (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 31, 2018						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Aset						Assets
Kas dan setara kas	63,860	-	237,293	-	-	301,153 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	14,345	15,607	29,952 Restricted cash
Piutang usaha	110,750	-	-	-	13,498	124,248 Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	639	-	-	-	1,887	2,526 Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	18	18 Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	6,300	6,300 Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	175,249	-	237,293	14,345	37,310	464,197 Total financial assets
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	(91,181)	(91,181) Trade payables
Akrual	-	-	-	-	(25,599)	(25,599) Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(1,276)	(1,276) Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(36,519)	-	-	-	-	(36,519) Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(36,519)	-	-	-	(118,056)	(154,575) Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2019 perubahan suku bunga sebesar 0,5% dengan semua variabel lain tetap, tidak akan berdampak signifikan terhadap laba tahun berjalan.

As at December 31, 2019, changes in interest rates by 0.5% with all other variables held constant would not have a significant impact to profit for the year.

Risiko kredit

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel Grup dalam *matte*, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan VCL (induk Perseroan) dan SMM yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan. Risiko kredit juga muncul dari kas dan setara kas, terutama kas di bank dan deposito berjangka. Untuk bank, Grup hanya menyimpan dana di bank lokal maupun internasional yang bereputasi bagus untuk memperkecil risiko kredit (lihat Catatan 5).

Credit risk

Credit risk is minimal as the Group's nickel in *matte*, is sold in export markets pursuant to long-term, US Dollar denominated "must take" contracts with VCL (parent company) and SMM, one of the Company's majority shareholders. Credit risk also arises from cash and cash equivalents, specifically from cash in banks and time deposits. The Group has a policy to select reputable local and overseas banks to minimise credit risk (refer to Note 5).

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Piutang usaha: Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			Trade receivables: Counterparties with external credit rating:
Fitch			Fitch
BBB- (2018: BBB+)	71,335	110,750	BBB- (2018: BBB+)
Japan Credit Rating Agency			Japan Credit Rating Agency
AA- (2018: AA-)	35,960	13,498	AA- (2018: AA-)
Berperingkat	107,295	124,248	Rated

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	

Kas di bank, deposito berjangka dan kas yang di batasi penggunaannya

Moody's

Aa3 (2018: Aa3)	66,098	113,462
A2 (2018: A2)	38,285	42,797
A1 (2018: A1)	10,000	146,507
Baa2 (2018: Baa2)	63,667	15,339
Ba3 (2018: Ba3)	55,000	-

Fitch National

AAA (2018: AAA)	31,397	13,000
-----------------	--------	--------

Cash in bank, time deposits and restricted cash

Moody's

Aa3 (2018: Aa3)	66,098	113,462
A2 (2018: A2)	38,285	42,797
A1 (2018: A1)	10,000	146,507
Baa2 (2018: Baa2)	63,667	15,339
Ba3 (2018: Ba3)	55,000	-

Fitch National

AAA (2018: AAA)	31,397	13,000
-----------------	--------	--------

Berperingkat	264,447	331,105	Rated
---------------------	----------------	----------------	--------------

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasang profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini mengklasifikasikan liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang disajikan adalah arus kas kontraktual dan tidak didiskontokan.

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below classifies the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

38. Financial risk management (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

31 Desember 2019	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(97,408)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(16,327)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,753)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(780)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Liabilitas sewa	(390)	(670)	(120)	-	-	Lease liabilities

31 Desember 2018

December 31, 2018

(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(91,181)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(25,599)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(1,276)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(2,042)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Pinjaman bank	(19,792)	(16,727)	-	-	-	Bank borrowing

Estimasi nilai wajar

Fair value estimation

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or the price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at December 31, 2019 and 2018.

39. Aset dan liabilitas kontinjensi

39. Contingent assets and liabilities

a. Perihal lingkungan hidup

a. Environmental matters

Kehutanan

Forestry

Berdasarkan KK Perseroan sebagaimana telah diubah dengan KK 2014, Perseroan diberikan semua lisensi dan izin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan pengusahaannya serta semua kewenangan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah KK.

Based on the Company's CoW as amended by the 2014 CoW, the Company is granted all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorisations needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

Pada tahun 1999, Undang-Undang Kehutanan 1999 diterbitkan. Undang-Undang Kehutanan 1999 secara tegas melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

In 1999, the 1999 Forestry Law was proclaimed. The 1999 Forestry Law expressly prohibits open pit mining in protected forests.

Pada bulan Mei 2004, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang mengakui KK Perseroan sebagai salah satu dari 13 perusahaan tambang yang diizinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung (sampai dengan berakhirnya izin/kontrak). Selanjutnya pada tahun 2008, Perseroan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk seluruh kawasan hutan yang berada di dalam wilayah KK, dengan tetap mencadangkan dan tidak mengurangi hak-hak Perseroan berdasarkan KK.

In May 2004, the President issued a Presidential Decree which recognises the Company's CoW as one of the 13 mining companies permitted to conduct mining activities in protected forest areas (until the end of the permit/contract). Therefore, in 2008, the Company applied for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated.

Peraturan kehutanan menetapkan kewajiban tertentu bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, antara lain untuk melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan ("PSDH") dan Dana Reboisasi, melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP"), melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan izin pinjam pakai kawasan hutan dan untuk melakukan perlindungan hutan.

Forestry laws and regulations stipulate certain obligations for lend-use permit holders, among others, to pay Forest Resource Charges ("FRC") and Reforestation Funds, to pay non-tax state revenue, to carry out rehabilitation of watershed area, to carry out empowerment of the community surrounding the lend-use permit area and to conduct forest protection.

Untuk periode bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran PNBP untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR450 juta atau setara dengan AS\$0,03 juta (nilai penuh).

For the period from June 2019 to June 2020, the Company has made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR450 million or equivalent to US\$0.03 million (full amount).



39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

Kehutanan (lanjutan)

Pada 14 Mei 2012, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas nama Perseroan, sebagaimana diubah dengan SK No. 5714/Menhk-PDASHL/KTA/2015. Surat Keputusan ini diterbitkan untuk menetapkan area rehabilitasi daerah aliran sungai atas izin pinjam pakai Karebbe. Perseroan telah menunjuk kontraktor dan akan mengeluarkan IDR42 juta/ha (nilai penuh) untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi ini (setara dengan perkiraan AS\$3.086/ha). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, jumlah yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi ini adalah sebesar IDR3,2 miliar atau setara dengan AS\$230 ribu (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi wilayah Sorowako melalui Keputusan No. SK.645/Menhk/Setjen/PLA.0/12/2018. Dengan diterbitkannya izin ini, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014. Perseroan juga memiliki kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi setelah mendapatkan penetapan batas areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain kewajiban pembayaran PSDH, Dana Reboisasi dan nilai tegakan, serta kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk membayar PNPB di bidang kehutanan secara retroaktif terhitung mulai tahun 2008 (yaitu tahun diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2/2008 yang memperkenalkan pengenaan pendapatan negara bukan pajak terkait izin pinjam pakai kawasan hutan). Kewajiban pembayaran secara retroaktif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Perseroan memiliki jangka waktu satu tahun untuk memenuhi kewajiban pembayaran ini. Nilai pembayaran akan didasarkan pada perhitungan Perseroan (*self-assessment*). Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan, Perseroan telah mengakui IDR169 milyar atau setara dengan AS\$11,2 juta (nilai penuh) beban di laporan keuangan tahun 2018 dan telah melakukan pembayaran di tahun 2019 atas PNPB retroaktif untuk tahun 2008 - 2018. Perseroan juga telah melakukan pembayaran sebesar IDR26 milyar atau setara dengan AS\$1,8 juta (nilai penuh) untuk PNPB tahun 2019.

Pada bulan Mei 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi wilayah Bahodopi melalui Keputusan No. SK.341/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Dengan diterbitkannya izin ini, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014. Perseroan juga memiliki kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi setelah mendapatkan penetapan batas areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain kewajiban pembayaran PSDH, Dana Reboisasi dan nilai tegakan, serta kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi

Perseroan menerima izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi untuk kawasan KK Perseroan di (i) blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, (ii) blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan (iii) blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Karena izin pinjam pakai tersebut hanya untuk kegiatan eksplorasi, maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran PNPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014.

Lingkungan hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, seluruh perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") dari Pemerintah pada tahun 2008 yang mencakup seluruh area yang saat ini diusahakan di wilayah KK Sulawesi Selatan. Persetujuan AMDAL tersebut secara otomatis dianggap sebagai Izin Lingkungan bagi Perseroan. Untuk Blok Bahodopi, Perseroan mendapatkan Izin Lingkungan pada September 2013. Untuk Blok Pomalaa, Perseroan mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL pada tahun 2005 dengan lingkup penambangan terbatas.

39. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Environmental matters (continued)

Forestry (continued)

On May 14, 2012, the Ministry of Forestry issued Decree No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 regarding stipulation on Forestation Location in the Framework of Watershed Rehabilitation under the name of the Company, as amended by SK No. 5714/Menhk-PDASHL/KTA/2015. This Decree is issued to determine the watershed forestation area with respect to the Karebbe lend-use permit. The Company has appointed a contractor and shall incur IDR42 million/ha (full amount) to fulfil this forestation obligation (equivalent to approximately US\$3,086/ha). As of December 31, 2019, the amount incurred by the Company to fulfil the rehabilitation obligation is IDR3.2 billion or equivalent to US\$230 thousand (full amount).

On December 31, 2018 the Minister of Environment and Forestry issued forest area lend-use permit for production operation activities in Sorowako area by virtue of Decree No. 645/Menhk/Setjen/PLA.0/12/2018. By the issuance of this permit, the Company is subject to the obligation to pay forestry non-tax state revenue as regulated under Government Regulation No. 33/2014. The Company is also subject to other obligations that need to be fulfilled after obtaining the determination on working area boundary from the Ministry of Environment and Forestry, among others, obligation to pay FRC, Reforestation Funds and timber fee, as well as to carry out rehabilitation of watershed area.

In addition, the Company is also required to pay the forestry non-tax state revenue retroactively starting from 2008 (i.e. since the issuance date of Government Regulation No. 2/2008 introducing non-tax state revenue related to lend-use permits). This retroactive payment obligation is in accordance with Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.27/Menhk/Setjen/Kum.1/7/2018 regarding Guidance for Lend Use of Forest Area. The Company has a one-year period to fulfil this payment obligation. The payment amount will be based on a self-assessment basis. Based on the Company's self-assessment, the Company has recognized expense of IDR169 billion or equivalent to US\$11.2 million (full amount) in the 2018 financial statements and has made payments in 2019 for the retroactive forestry non-tax state revenue for the years 2008 - 2018. The Company also made a payment of IDR26 billion or equivalent to US\$1.8 million (full amount) for the forestry non-tax state revenue for the year 2019.

In May 2019, the Minister of Environment and Forestry issued forest area lend-use permit for production operation activities in Bahodopi area by virtue of Decree No. 341/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2019. By the issuance of this permit, the Company is subject to the obligation to pay forestry non-tax state revenue as regulated under Government Regulation No. 33/2014. The Company is also subject to other obligations that need to be fulfilled after obtaining the determination on working area boundary from the Ministry of Environment and Forestry, among others, obligation to pay FRC, Reforestation Funds and timber fee, as well as to carry out rehabilitation of watershed area.

Lend-use permit for exploration activities

The Company received lend-use permits for exploration activities within the Company's CoW area in (i) the Bahodopi block, Morowali Regency, Central Sulawesi Province, (ii) the Pomalaa block, Kolaka and East Kolaka Regencies, South East Sulawesi Province and (iii) the Sorowako block, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. Since the above mentioned lend-use permits only cover exploration activities, the Company does not have the obligation to pay the non-tax state revenue as stipulated in Government Regulation No. 33/2014.

Environment

Based on Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Licenses, all companies are required to obtain an Environmental License as a pre-requisite for their business license.

The Company has already obtained an approved Environmental Impact Assessment ("AMDAL") from the Government in 2008 covering all areas that are currently being operated in the CoW area in South Sulawesi. The AMDAL approval is automatically deemed as the Company's Environmental License. For the Bahodopi Block, the Company obtained its Environmental License in September 2013. For the Pomalaa Block, the Company obtained AMDAL approval in 2005 with a limited mine scope.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

Lingkungan hidup (lanjutan)

Pada bulan Desember 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Izin Lingkungan dan persetujuan atas addendum AMDAL untuk kegiatan operasional Perseroan di Blok Sorowako.

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 ("PP 78/2010") mengharuskan seluruh perusahaan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 28 Februari 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") menerbitkan Peraturan No. 07/2014 ("Peraturan Menteri No. 07/2014"). Berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, salah satu persyaratan untuk dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi adalah terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya setidaknya 40% dari total saham yang dimiliki. Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, Perseroan telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi mulai tahun 2015.

Pada tanggal laporan ini, total bank garansi yang ditempatkan oleh Perseroan sebagai jaminan reklamasi sesuai dengan Peraturan Menteri No.07/2014 adalah sebesar AS\$11.2 juta (nilai penuh) untuk Blok Sorowako dan AS\$304 ribu (nilai penuh) untuk Blok Pomalaa.

Pada tanggal 6 Januari 2015, KESDM menerbitkan persetujuan atas rencana penutupan tambang Perseroan. Jumlah estimasi biaya penutupan tambang disetujui sebesar AS\$69,9 juta (nilai penuh), yang akan ditempatkan secara bertahap sebagai deposito berjangka mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Dengan pelaksanaan komitmen investasi berdasarkan KK 2014, rencana penutupan tambang Perseroan akan berubah secara signifikan dibanding dengan rencana penutupan tambang yang telah diajukan dan disetujui oleh KESDM, baik dari aspek jumlah jaminan yang dibutuhkan maupun waktu penempatan.

Perseroan telah menempatkan jaminan penutupan tambang untuk 2017 sampai dengan 2019 dalam bentuk deposito berjangka masing-masing sebesar AS\$1,4 juta (nilai penuh), AS\$3,8 juta (nilai penuh) dan AS\$6,6 juta (nilai penuh).

Dengan diperolehnya Izin Lingkungan dan persetujuan atas perubahan AMDAL untuk kegiatan operasional Perseroan di Blok Sorowako, pada bulan Desember 2018, Perseroan mengajukan perubahan atas rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh KESDM pada tahun 2015. Rencana penutupan tambang ini dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 (yang mencabut Peraturan Menteri No. 07/2014) dan Keputusan Menteri ESDM No.1827/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Praktik Penambangan yang Baik. Dalam hal perubahan ini disetujui oleh KESDM, maka jaminan penutupan tambang yang telah ditempatkan oleh Perseroan akan disesuaikan kembali.

c. Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dan perambahan

Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan menetapkan bahwa terdapat Izin Usaha Pertambangan ("IUP") pihak ketiga yang tumpang tindih di dalam wilayah KK Perseroan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat terkini dari KESDM, KESDM mengkonfirmasi bahwa tiga dari empat IUP yang tumpang tindih dengan wilayah KK Perseroan telah dinyatakan *non-clean and clear* berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM dan Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 15 November 2018 dan telah dinyatakan dicabut/berakhir. Sedangkan satu IUP telah dinyatakan *non-clean and clear*, namun masih menunggu proses pencabutan IUP.

Sementara tidak terdapat tumpang tindih pertambangan di dalam Wilayah KK Perseroan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa perambahan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu dalam bentuk perkebunan dan bangunan konstruksi temporer. Pada saat ini, perambahan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya.

Untuk mengatasi masalah perambahan di dalam wilayah KK Perseroan, Perseroan terus bekerja dengan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan KESDM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

39. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Environmental matters (continued)

Environment (continued)

In December 2017, the Ministry of Environment and Forestry issued an Environmental License and approval for AMDAL addendum for the Company's operational activities in the Sorowako Block.

b. Mine reclamation and mine closure

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 of 2010 ("GR 78/2010"). The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the financial statements.

On February 28, 2014, the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR") issued Regulation No. 07/2014 ("Ministerial Regulation No. 07/2014"). Based on Ministerial Regulation No. 07/2014, one of the requirements for placing a reclamation guarantee in the form of accounting reserve is to be registered on the Indonesia Stock Exchange with a free float of at least 40% of its shares. In order to fulfil the obligations under Ministerial Regulation No. 07/2014, the Company adjusted the form of its reclamation guarantee from an accounting reserve to a bank guarantee in 2015.

As at the date of this report, the total bank guarantee placed by the Company as reclamation guarantees in accordance with Ministerial Regulation No.07/2014 is US\$11.2 million (full amount) for Sorowako Block and US\$304 thousand (full amount) for Pomalaa Block.

On January 6, 2015, the MEMR issued its approval of the Company's mine closure plan. The total estimated cost for the mine closure is in the amount of US\$69.9 million (full amount), which will be placed gradually in time deposits starting from 2017 up to 2023. By the implementation of investment commitments under the 2014 CoW, the Company's mine closure plan will change significantly compared to the mine closure plan that has been submitted to and approved by the MEMR, both in the amount and the period for the guarantee placement.

The Company has placed mine closure guarantees for 2017 up to 2019 in the form of time deposits in the amount of US\$1.4 million (full amount), US\$3.8 million (full amount) and US\$6.6 million (full amount), respectively.

With the issuance of the Environmental License and approval for AMDAL addendum for the Company's operational activity in the Sorowako Block, in December 2018, the Company submitted a revision to the mine closure plan that was approved by the MEMR in 2015. This mine closure plan was prepared in accordance with MEMR Regulation No. 26/2018 (which revoked Ministerial Regulation No. 07/2014) and MEMR Decree No.1827/K/30/MEM/2018 on Guidance for the Implementation of Good Mining Practices. If the revision is approved, the mine closure guarantee that has been placed by the Company will be adjusted.

c. Overlapping "Izin Usaha Pertambangan" and encroachment

Based on the Company's field verifications, the Company determined that there are third party Mining Business Licences (*Izin Usaha Pertambangan* - "IUP") that overlap the Company's CoW area in Central Sulawesi. Based on a recent letter from the MEMR, the MEMR confirmed that three out of four IUPs that overlapped the Company's CoW area have been declared non-clean and clear based on the Minutes of Reconciliation between the Directorate General of Mineral and Coal of the MEMR and the Central Sulawesi Province dated 15 November 2018 and have been declared revoked or expired. The other IUP has been declared non-clean and clear, however is still awaiting IUP revocation process.

While there is no third party mining overlapping in the Company's CoW area in South Sulawesi and Southeast Sulawesi, there have been some community or individual encroachment in the form of plantations and temporary constructions. At this time, the encroachment does not pose any material risk to the Company's ability to proceed with its growth strategy.

To address the issue of encroachment on the Company's CoW area, the Company continues to work with the relevant government institutions, including the MEMR, the State Ministry of Environment and Forestry and Local Governments.

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

d. Amandemen KK

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan menandatangani amandemen KK sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Pertambangan 2009. KK 2014 meliputi perubahan-perubahan prinsip sebagai berikut:

- Perseroan tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan lainnya. Renegosiasi ini mencerminkan luasan lahan yang memadai untuk keperluan investasi dan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan.
- Royalti yang disepakati sebesar 2% dari penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan jika harga rata-rata nikel LME bulan sebelumnya sama atau lebih besar dari AS\$21.000/ton.
- Kewajiban bagi Perseroan untuk mendivestasikan tambahan 20% saham kepada peserta Indonesia. Proses divestasi ini akan dilakukan bulan Oktober 2019.
- Perseroan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun dalam bentuk izin operasi, dan tunduk pada persetujuan Pemerintah.

Selain perubahan-perubahan utama di atas, KK 2014 juga mengatur komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Di bawah ini adalah ringkasan dari komitmen investasi Perseroan berdasarkan KK 2014.

Di Sulawesi Selatan, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih di fasilitas Perseroan di Sorowako.

Di Sulawesi Tenggara, Perseroan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembangunan suatu fasilitas pengolahan dan pemurnian sebagai bagian dari suatu joint venture, bersama dengan infrastruktur pendukungnya.

Jangka waktu Perseroan untuk memulai kegiatan konstruksi untuk setiap komitmen investasi bergantung pada diterimanya semua perizinan/persetujuan dan dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan. Selain itu, komitmen investasi Sulawesi Tengah dan Tenggara dapat dilakukan secara independen atau sebagai bagian dari suatu *joint venture* (usaha patungan).

Di tahun 2019, Perseroan mendirikan dua entitas anak sebagai suatu tahapan dalam pelaksanaan komitmen investasi Perseroan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara (lihat Catatan 1).

Dalam hal Perseroan tidak memenuhi komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, upaya satu-satunya Pemerintah (*sole remedy*) atas hal tersebut adalah pelepasan atas wilayah KK tertentu yang berdampak sebagaimana ditetapkan dalam KK 2014.

e. Paket peraturan pertambangan

Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan paket peraturan pertambangan baru.

Ketentuan utama dari peraturan-peraturan baru yang berpotensi memiliki dampak terhadap Perseroan di masa depan diuraikan sebagai berikut:

- Divestasi: IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") dalam rangka penanaman modal asing tunduk pada kewajiban divestasi sebesar 51%.
- Harga patokan mineral: Pemegang IUP/IUPK wajib berpedoman pada harga patokan mineral dalam menjual logam.

Mengingat bahwa divestasi merupakan salah satu butir dalam amendemen KK (lihat Catatan 39d), Perseroan merujuk kepada peraturan tersebut di atas hanya jika KK 2014 tidak mengatur hal dimaksud.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

39. Contingent assets and liabilities (continued)

d. CoW amendment

On October 17, 2014, the Government and the Company signed an amendment to the CoW marking the conclusion of the renegotiation process, as required by the 2009 Mining Law. The 2014 CoW includes the following principal changes:

- The Company can retain areas required to support its operations. This represents a renegotiated land package that is sufficient to support the Company's investments and long-term growth plans.
- An agreed royalty rate of 2% of sales escalating to 3% if the average LME price for nickel is greater than or equal to US\$21,000/ton in the prior month.
- A requirement for the Company to divest a further 20% of the Company's shares to Indonesian participants. The process of divestment will be conducted by October 2019.
- The Company can apply to continue its operations for two additional periods of ten years, in the form of an operating license, subject to the Government's approval.

In addition to the above mentioned major changes, the 2014 CoW also outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. Below is a summary of the Company's investment commitments under the 2014 CoW.

In South Sulawesi, the Company commits to implementing an investment program to expand the ore processing and refining capacity at the Company's facility in Sorowako.

In Southeast Sulawesi, the Company is committed to the development and construction of a processing and refining facility as part of a joint venture, together with supporting infrastructure.

The timeline for the Company to commence construction in respect of each investment undertaking is subject to the Company's receipt of all requisite licenses/approvals and consideration of feasibility and environmental studies. Further, the Central and Southeast Sulawesi undertakings may be undertaken independently or as part of a joint venture.

In 2019, the Company established two subsidiaries as a milestone in the implementation of the Company's investment commitments in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi Provinces (refer to Note 1).

In the event that the Company does not fulfil the investment commitments as set out above, the remedy of the Government in this respect is the relinquishment of the affected area as defined in the 2014 CoW.

e. Mining regulation package

In 2017, the Government issued a package of new mining regulations.

The highlights of the new regulations that may have impacts on the Company in the future are outlined below:

- Divestment: Foreign direct investment IUP/Special Mining Business Licence (*Izin Usaha Pertambangan Khusus* – "IUPK") holders are subject to 51% divestment requirement.
- Benchmark Price: IUP/IUPK holders must use a defined benchmark price as the guidance in selling minerals.

As divestment is one of the CoW amendment items (refer to Note 39d), the Company will refer to the above regulations only if the 2014 CoW is silent on the matter.



**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

f. Tuntutan hukum

Pada pertengahan bulan Desember 2015, Perseroan memperoleh kutipan putusan Mahkamah Agung RI mengenai Perkara No. 1279 K/Pid.Sus/2012 sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU Kehutanan 1999 dan UU Lingkungan Hidup 1997. Salinan resmi putusan MA No. 1279 K/Pid.Sus/2012 tersebut baru diterima oleh Perseroan pada bulan Oktober 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa keempat mantan karyawan Perseroan bersalah dihukum dengan pidana penjara selama dua tahun dan bahwa Perseroan dijatuhi hukuman denda sebesar IDR5,0 miliar atau setara dengan AS\$351,8 ribu (nilai penuh). Putusan juga menghukum agar beberapa kendaraan Perseroan disita oleh Negara.

Perseroan telah menyerahkan seluruh kendaraan (empat unit), sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung, kepada Kantor Kejaksaan Malili. Pada bulan Maret 2017, Perseroan juga telah melakukan pembayaran denda sebesar IDR5,0 miliar atau setara dengan AS\$351,8 ribu (nilai penuh) kepada Jaksa. Pemenuhan permintaan tersebut bukan merupakan pengakuan terhadap tanggung jawab.

Faktanya, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau dijadikan terdakwa dalam perkara, akan tetapi Mahkamah Agung justru menghukum Perseroan untuk membayar denda dan menyerahkan kendaraan-kendaraan sebagaimana tersebut di atas. Pada bulan Maret 2016 Perseroan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") atas putusan Mahkamah Agung tersebut dan mengajukan revisi permohonan PK pada bulan Februari 2017.

Permohonan Peninjauan Kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2017 dan pemberitahuan putusan telah diterima pada akhir 2019. Sampai dengan 31 Desember 2019, tidak ada temuan terhadap Perusahaan dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan terhadap Perusahaan selain penyitaan dari kendaraan dan pembayaran denda, sebagaimana disebutkan di atas.

g. Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Rupiah

Bank Indonesia ("BI") telah mengeluarkan surat No. 17/2430/DKSP tanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya menyetujui usulan Perseroan untuk tetap menggunakan mata uang selain Rupiah dalam transaksi-transaksinya sampai dengan berakhirnya KK. BI meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak yang transaksinya dapat menggunakan Rupiah dan melaporkan hasil penyesuaian yang telah dilakukan Perseroan kepada BI setiap enam bulan.

h. Peraturan ESDM tentang kewajiban tata batas

Pada bulan Oktober 2015, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 33 Tahun 2015 yang mewajibkan pemegang IUP dan KK untuk melakukan tata batas wilayah. Perseroan, sebagai pemegang KK, memiliki jangka waktu enam bulan untuk melakukan kewajiban tersebut, terhitung sejak tanggal diterbitkannya peraturan. Pada bulan April 2018, kewajiban ini diubah melalui peraturan ESDM No. 25/2018. Berdasarkan peraturan yang baru ini, kewajiban untuk melakukan tata batas tidak berlaku bagi seluruh wilayah KK, namun hanya wilayah yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Saat ini, Perseroan belum dapat memenuhi Peraturan ini, mengingat sebagian besar wilayah KK Perseroan berada di dalam kawasan hutan dan Perseroan masih menunggu penetapan areal kerja untuk atas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, Perseroan telah melakukan pemasangan tanda batas pada wilayah non-kawasan hutan secara bertahap dan Perseroan senantiasa menyampaikan laporan kemajuan kepada KESDM.

i. Peraturan Pemerintah No. 1/2019

Sebagai implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah ke-XVI, pada 10 Januari 2019, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21/3/PBI/2019 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1523/2019. Peraturan ini menetapkan pengaturan mengenai penempatan dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam dari Indonesia (termasuk nikel matte). Berdasarkan peraturan di atas, Perseroan wajib untuk menempatkan devisa hasil ekspor melalui rekening khusus pada bank devisa di Indonesia dan hanya dapat dikirim ke luar negeri untuk tujuan tertentu. Mempertimbangkan bahwa peraturan baru ini memiliki dampak terhadap SEFA antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd untuk Proyek Karebbe, yang berakhir pada bulan Agustus 2019, Perseroan telah melakukan pelunasan awal atas fasilitas tersebut.

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

39. Contingent assets and liabilities (continued)

f. Litigation

In mid December 2015, the Company obtained an excerpt of the Supreme Court decision regarding Case No. 1279 K/Pid.Sus/2012 with respect to the alleged violations of the 1999 Forestry Law and the 1997 Environmental Law. The official copy of Decision No. 1279 K/Pid.Sus/2012 was only received by the Company in October 2016. The decision stated that four former employees of the Company are guilty as charged and, therefore, sentenced to imprisonment of two years; and that the Company is ordered to pay a fine of IDR5.0 billion or equivalent to US\$351.8 thousand (full amount). The decision also ordered that some vehicles of the Company are to be seized by the State.

The Company has delivered all vehicles (four units), as stated in the Supreme Court Decision, to the Malili Prosecutor Offices. In March 2017, the Company also paid the IDR5.0 billion or equivalent to US\$351.8 thousand (full amount) fine to the Prosecutor. The Company's fulfillment of the request is not an admission of liability.

In fact, the Company has neither been named as a suspect nor determined as a defendant in the case, yet the Supreme Court punished the Company to pay a fine and surrender the above mentioned vehicles. In March 2016 the Company submitted a Reconsideration against the Supreme Court decision and submitted a revised application for Reconsideration in February 2017.

The Reconsideration application has been rejected in August 2017 and the notice of the decision has been received at the end of 2019. Up to December 31, 2019, there are no findings against the Company and no penalties imposed against the Company other than the confiscation of vehicles and payment of a fine, referred to above.

g. Bank Indonesia regulation on obligation to use Rupiah

Bank Indonesia ("BI") has issued letter No. 17/2430/DKSP dated October 30, 2015 which essentially approved the Company's proposal to continue using a currency other than Rupiah in its transactions until the expiry of the CoW. BI asked the Company to adjust its contracts that can use Rupiah and to provide BI with a report on the adjustments the Company has made every six months.

h. MEMR regulation on boundary markings

In October 2015, the MEMR issued Regulation No. 33/2015 which imposes the obligation for IUP and CoW holders to establish geographic boundary markings. The Company, as a CoW holder, has six months to comply with the Regulation from the date of promulgation. In April 2018, this obligation was revised by MEMR regulation No. 25/2018. Based on this new regulation, the obligation to establish geographic boundary markings does not apply to the whole CoW area, but only to areas which fulfil the stipulated criteria.

At present, the Company is not able to fully comply with the Regulation, considering the majority of the Company's CoW area is located inside forest areas and the Company is still awaiting the issuance of the working area determination for the forestry land-use permits for production operation activities from the Ministry of Environment and Forestry. However, the Company has started to gradually establish the boundary marking in the non-forestry area and the Company reports the progress to the MEMR.

i. Government Regulation No. 1/2019

As an implementation of the Government's 16th Economic Policy Package, on January 10, 2019, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2019 on Export Proceeds from Natural Resources Development, Management and/or Processing Activities, as further implemented under Bank of Indonesia Regulation No. 21/3/PBI/2019 and Minister of Finance Decree No. 1523/2019. This regulation sets out the arrangements for the deposit and use of proceeds from the export of natural resources from Indonesia. Based on the above regulations, the Company's export proceeds must now be parked onshore within a specific account maintained with a foreign exchange bank in Indonesia and can only be sent offshore for specific purposes. Considering that this new regulation will impact the SEFA between the Company and Mizuho Bank, Ltd and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd for the Karebbe Project, which was to expire in August 2019, the Company made early repayment of the facility.

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
31 Desember 2019 dan 2018**

39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

j. Peraturan ESDM No. 11/2019

Pada tanggal 28 Agustus 2019, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelumnya, pemegang IUP dapat melakukan penjualan bijih nikel dengan kadar <1,7% ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan persyaratan tertentu. Dengan diterbitkannya peraturan baru ini: (i) rekomendasi ekspor bijih nikel yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan baru akan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi tersebut berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019, dan (ii) rekomendasi yang diberikan setelah diundangkannya peraturan baru ini hanya akan berlaku efektif sampai 31 Desember 2019. Peraturan ini akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan ini tidak memiliki dampak langsung terhadap Perseroan mengingat Perseroan tidak melakukan penjualan bijih nikel ke luar negeri. Namun, peraturan ini dapat berdampak pada pasar nikel.

k. Amandemen terhadap Perjanjian Penjualan

Pada tanggal 20 November 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian *Offtake* (Pembelian dan Pengambilan) yang Diubah dan Dinyatakan Kembali dengan Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. untuk penjualan produk Perseroan dari Sorowako. Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari KESDM pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, mulai tanggal 1 Januari 2020, Perseroan akan mulai mengimplementasikan ketentuan-ketentuan baru berdasarkan Perjanjian *Offtake* (Pembelian dan Pengambilan) yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tersebut.

40. Informasi tambahan untuk laporan arus kas

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang dan akrual	29,785	29,978	Acquisition of fixed assets through incurrence of payables and accruals
Penambahan/(pembalikan) aset tetap dari provisi penghentian pengoperasian aset	2,606	(27,841)	Addition/(reversal) of fixed assets from provision for asset retirement

41. Informasi komparatif

Beberapa akun di dalam informasi komparatif telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan presentasi laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

	31 Desember/December 31, 2019		
	Disajikan sebelumnya/ <i>Previously reported</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pendapatan lainnya	5,641	1,974	7,615
Beban lainnya	(13,210)	(1,974)	(15,184)
			Other income
			Other expenses

42. Peristiwa setelah tanggal neraca

a. Anggota komite audit

Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pengangkatan Felia Salim sebagai anggota Komite Audit yang baru efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Pada Januari 2020, Perseroan menempatkan bank garansi baru sebagai jaminan reklamasi untuk tahun 2016-2020 sesuai dengan Peraturan Menteri No.07/2014 sebesar AS\$16 juta (nilai penuh) untuk Blok Sorowako dan AS\$300 ribu (nilai penuh) untuk Blok Pomalaa. Perseroan juga menempatkan jaminan penutupan tambang untuk 2020 dalam bentuk deposito berjangka sebesar AS\$11,4 (nilai penuh).

**Notes to the Consolidated Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries
December 31, 2019 and 2018**

39. Contingent assets and liabilities (continued)

j. MEMR Regulation No. 11/2019

On August 28, 2019, the MEMR issued Regulation No. 11 of 2019 on the Second Amendment to MEMR Regulation No. 25 of 2018 on Mining Activities of Mineral and Coal. Previously, IUP holders may export nickel ore with <1.7% Ni content in a certain amount under certain conditions. With the issuance of this new regulation: (i) any ore export recommendation which has been issued before the new regulation becomes effective will remain effective until the expiry of the recommendation or, at the latest, until December 31, 2019, and (ii) any recommendation that will be issued after the new regulation was issued will remain effective until December 31, 2019 only. This regulation will become effective on January 1, 2020.

This regulation does not have direct impact to the Company as the Company does not export any nickel ore. However, this regulation may impact the nickel market.

k. Amendment to the Sales Agreement

On November 20, 2019, the Company signed Amended and Restated Sales Agreements with Vale Canada limited and Sumitomo Metal Mining Co. Ltd for the sales of the Company's products from Sorowako. The agreements were approved by the MEMR on December 31, 2019. With this approval, starting January 1, 2020, the Company will start to implement the new terms under the Amended and Restated Sales Agreements.

40. Supplementary information for statements of cash flows

Significant activities not affecting cash flows:

41. Comparative information

Certain accounts in the comparative information have been reclassified to conform with the current period presentation of consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2019.

42. Subsequent events

a. Audit committee member

The Board of Commissioners of the Company has approved the appointment of Felia Salim as the new member of the Audit Committee effective from January 1, 2020 until December 31, 2021.

b. Mine reclamation and mine closure

In January 2020, the Company placed new bank guarantees as reclamation guarantees for the period of 2016-2020 in accordance with Ministerial Regulation No.07/2014 in the amount of US\$16 million (full amount) for Sorowako Block and US\$300 thousand (full amount) for Pomalaa Block. The Company also placed a mine closure guarantee for 2020 in the form of a time deposit in the amount of US\$11.4 million (full amount).







Referensi POJK 29/POJK.04/2016 - Laporan Tahunan Emiten dan SEOJK 30/SEOJK.04/2016 - Bentuk dan Isi Laporan

Referensi POJK 29/POJK.04/2016 - Laporan Tahunan Emiten dan SEOJK 30/SEOJK.04/2016 - Bentuk dan Isi Laporan [Theme Journey](#)

I. Ketentuan Umum		Halaman
1	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√
2	Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√
3	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√
4	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	√
II. Bentuk Laporan Tahunan		
1	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√
2	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√
3	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√
III. Isi Laporan Tahunan		
1	Ketentuan Umum	
a.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	
	1) ikhtisar data keuangan penting;	√
	2) informasi saham (jika ada);	√
	3) laporan Direksi;	√
	4) laporan Dewan Komisaris;	√
	5) profil Emiten atau Perusahaan Publik;	√
	6) analisis dan pembahasan manajemen;	√
	7) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	√
	8) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	√
	9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	√
	10) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	√
b.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	√
2	Uraian Isi Laporan Tahunan	
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	
	Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	



	1)	pendapatan/penjualan;	8
	2)	laba bruto	8
	3)	laba (rugi);	8
	4)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	8
	5)	total laba (rugi) komprehensif;	8
	6)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali);	8
	7)	laba (rugi) per saham;	8
	8)	jumlah aset;	8
	9)	jumlah liabilitas;	8
	10)	jumlah ekuitas;	8
	11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	8
	12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	8
	13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	8
	14)	rasio lancar;	8
	15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	8
	16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	8
	17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	8
	b.	Informasi Saham	
		Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	
	1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	10
	a)	jumlah saham yang beredar;	10
	b)	kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	10
	c)	harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	10
	d)	volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	10
		Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	
		Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	
	2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	11
	a)	tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	11
	b)	rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;	11
	c)	jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	11
	d)	harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	11

	3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	11
	4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;	11
c.	Laporan Direksi		14-23
	Laporan Direksi paling sedikit memuat:		
	1)	uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	
	a)	strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	18-20
	b)	perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	20-21
	c)	kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	20
	2)	gambaran tentang prospek usaha;	21
	3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	22
	4)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	22
d.	Laporan Dewan Komisaris		24-33
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:		
	1)	penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	27-28
	2)	pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	26-27
	3)	pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	30
	4)	pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	30-31
	5)	perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	32
	6)	frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	29
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik		37
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:		
	1)	nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	37
	2)	akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	37
	a)	alamat;	37
	b)	nomor telepon;	37
	c)	nomor faksimile;	37
	d)	alamat surat elektronik; dan	37
	e)	alamat Situs Web;	37
	3)	riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	39
	4)	visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	41
	5)	kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	47-52
	6)	struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	53



	7)	profil Direksi, paling sedikit memuat:	56-61
		a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	56-61
		b) foto terbaru;	56-61
		c) usia;	56-61
		d) kewarganegaraan;	56-61
		e) riwayat pendidikan;	56-61
		f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	56-61
		(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	56-61
		(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	56-61
		(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	56-61
		g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	62-63
		h) hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	75
	8)	profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	66-71
		a) nama;	66-71
		b) foto terbaru;	66-71
		c) usia;	66-71
		d) kewarganegaraan;	66-71
		e) riwayat pendidikan;	66-71
		f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	66-71
		(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	66-71
		(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	73
		(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	66-71
		(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	74
		g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	75
		h) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	197
		i) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	65
	9)	dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	78
	10)	jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	76
	11)	nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	

	a)	pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	82
	b)	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	82
	c)	kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	82
	12)	jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	
	a)	kepemilikan institusi lokal;	83
	b)	kepemilikan institusi asing;	83
	c)	kepemilikan individu lokal; dan	83
	d)	kepemilikan individu asing;	83
	13)	informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	84
	14)	nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	87
		Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	87
	15)	kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	85
	16)	kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	85
	17)	nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	86
	18)	dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	86
	19)	penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	88-89
	a)	nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	88-89
	b)	badan atau lembaga yang memberikan; dan	88-89
	c)	masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	88-89
	f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen	
		Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	
	1)	tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	94-111
	a)	produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	94-111
	b)	pendapatan/penjualan; dan	94-111
	c)	profitabilitas;	94-111
	2)	kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	112
	a)	aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	113-121
	b)	liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	121-125
	c)	ekuitas;	126-137



	d)	pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	129-137
	e)	arus kas;	126-127
	3)	kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	140
	4)	tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	140
	5)	struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	141
	6)	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	142
	a)	tujuan dari ikatan tersebut;	142
	b)	sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	142
	c)	mata uang yang menjadi denominasi; dan	142
	d)	langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	142
	7)	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	142-143
	a)	jenis investasi barang modal;	142-143
	b)	tujuan investasi barang modal; dan	142-143
	c)	nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	142-143
	8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	150
	9)	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	147-149
	10)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	
	a)	pendapatan/penjualan;	144
	b)	laba (rugi);	
	c)	struktur modal (capital structure); atau	144
	d)	hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	144
	11)	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	
	a)	pendapatan/penjualan;	146
	b)	laba (rugi);	
	c)	struktur modal (capital structure);	146
	d)	kebijakan dividen; atau	
	e)	hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	147
	12)	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	151-152
	13)	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	152-153
	a)	kebijakan dividen;	152
	b)	tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	153
	c)	jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	153
	d)	jumlah dividen per tahun yang dibayar;	153

	14)	realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	154
	a)	dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	154
	b)	dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	154
	15)	informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	154
	a)	tanggal, nilai, dan objek transaksi;	154
	b)	nama pihak yang melakukan transaksi;	154
	c)	sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	154
	d)	penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	154
	e)	pemenuhan ketentuan terkait;	154
	16)	perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	155-156
	17)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	156-159
	g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	
		Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	1)	Direksi, mencakup antara lain:	
	a)	tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	211-212
	b)	pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	215-216
	c)	prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	218-219
	d)	kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	219-225
	e)	informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	184-186
	(1)	keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	
	(2)	alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;	
	f)	informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	175-181
	(1)	keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	
	(2)	alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	
	g)	penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	225
	2)	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	
	a)	tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	192-193
	b)	pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris	198-199
	c)	prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris.	200-201
	d)	kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	201-205
	e)	kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	206-207
	(1)	prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	206-207



	(2)	kriteria yang digunakan; dan	206-207
	(3)	pihak yang melakukan penilaian;	206-207
	f)	penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	208
	g)	dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	237
	(1)	alasan tidak dibentuknya komite; dan	237
	(2)	prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	237
	3)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	Tidak relevan
	a)	nama;	Tidak relevan
	b)	tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	Tidak relevan
	c)	frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	Tidak relevan
	4)	Komite Audit, mencakup antara lain:	
	a)	nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	229
	b)	usia;	229
	c)	kewarganegaraan;	229
	d)	riwayat pendidikan;	229
	e)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	229
	(1)	dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	229
	(2)	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	229
	(3)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	229
	f)	periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	229
	g)	pernyataan independensi Komite Audit;	230
	h)	kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	233
	i)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	234
	j)	pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	234
	5)	komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	234-235
	a)	nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	
	b)	usia;	237-238
	c)	kewarganegaraan;	66-69
	d)	riwayat pendidikan;	66-69
	e)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	66-69
	(1)	dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	66-69
	(2)	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	66-69

	(3)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	66-69
	f)	periode dan masa jabatan anggota komite;	237
	g)	uraian tugas dan tanggung jawab;	239
	h)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	238
	i)	pernyataan independensi komite;	238
	j)	kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	240-241
	k)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	241
	l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	241-243
	6)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	
	a)	nama;	251
	b)	domisili;	251
	c)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	251
	(1)	dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	251
	(2)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	251
	d)	riwayat pendidikan;	251
	e)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	251
	f)	uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	255
	7)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	
	a)	nama kepala Unit Audit Internal;	259
	b)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	259
	(1)	dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan	259
	(2)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	259
	c)	kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	260-261
	d)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	261
	e)	struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	258
	f)	uraian tugas dan tanggung jawab;	262-265
	g)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	262
	h)	uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	265
	8)	uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
	a)	pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	267-269
	b)	tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	270
	9)	sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
	a)	gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	271-279
	b)	jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	279-281
	c)	tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	282



	10)	perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	
	a)	pokok perkara/gugatan;	283-284
	b)	status penyelesaian perkara/gugatan; dan	283-284
	c)	pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	283-284
	11)	informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	285
	12)	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	
	a)	pokok-pokok kode etik;	285-287
	b)	bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	288
	c)	pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	288
	13)	informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	43-46
	14)	uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	289
	a)	jumlah saham dan/atau opsi;	289
	b)	jangka waktu pelaksanaan;	289
	c)	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	289
	d)	harga pelaksanaan;	289
	15)	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	
	a)	cara penyampaian laporan pelanggaran;	290
	b)	perlindungan bagi pelapor;	290-291
	c)	penanganan pengaduan;	290-291
	d)	pihak yang mengelola pengaduan; dan	289
	e)	hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
	(1)	jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	291-292
	(2)	tindak lanjut pengaduan;	291-292
	16)	penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	294-301
	a)	pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	294-301
	b)	penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	294-301
	h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	Referensi pada Laporan Keberlanjutan 2019
	1)	Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	
	a)	lingkungan hidup, antara lain:	
	(1)	penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	
	(2)	sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	
	(3)	mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	
	(4)	sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	

		b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	
		(1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	
		(2) sarana dan keselamatan kerja;	
		(3) tingkat perpindahan (turnover) karyawan;	
		(4) tingkat kecelakaan kerja;	
		(5) pendidikan dan/atau pelatihan;	
		(6) remunerasi; dan	
		(7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	
		c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	
		(1) penggunaan tenaga kerja lokal;	
		(2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	
		(3) perbaikan sarana dan prasarana sosial;	
		(4) bentuk donasi lainnya; dan	
		(5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	
		d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	
		(1) kesehatan dan keselamatan konsumen;	
		(2) informasi barang dan/atau jasa; dan	
		(3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	
	2)	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	
	3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	
	i.	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	
		Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	303
	j.	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	34-35
		Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	





PT Vale Indonesia Tbk

The Energy Building, 31st Floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 524 9000
Fax: +62 21 524 9020

www.vale.com/indonesia